PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020–2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020–2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

(2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJM ...

(3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;

b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;

c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;

d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

(4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

(1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah.

(2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

(3) Dalam ...

(3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.

(4) Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Menteri kepada Presiden.

(5) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Narasi RPJM Nasional Tahun 2020–2024, tercantum dalam Lampiran I;

b. Proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional Tahun 2020–2024, tercantum dalam Lampiran II;

c. Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020–2024, tercantum dalam Lampiran III; dan

d. Arah Pembangunan Wilayah RPJM Nasional Tahun 2020–2024, tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet untuk mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

NARASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR ISTILAH viii

BAB 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 ..... I.1
- Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025 ..... I.2
- Visi Misi Presiden 2020-2024 ..... I.3
- Visi Indonesia 2045 ..... I.4
- Arahan Presiden I.5
- Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan I.16
- Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2020-2024 ..... I.17
- Batasan Pembangunan (*Development Constraint*) I.32
- Prinsip Dasar Pembangunan Nasional I.38
- Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 ..... I.41
- Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024 ..... I.43

BAB 2 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN II.1
- Pendahuluan II.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... II.3
- Lingkungan dan Isu Strategis II.8
- Sasaran, Indikator, dan Target II.16
- Arah Kebijakan dan Strategi II.24

BAB 3 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN III.1
- Pendahuluan III.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... III.3
- Lingkungan dan Isu Strategis III.5
- Sasaran, Indikator, dan Target III.9
- Arah Kebijakan dan Strategi III.13

BAB 4 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING IV.1
- Pendahuluan IV.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... IV.3
- Lingkungan dan Isu Strategis IV.4
- Sasaran, Indikator, dan Target IV.17
- Arah Kebijakan dan Strategi IV.23

BAB 5 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN V.1
- Pendahuluan V.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... V.3
- Lingkungan dan Isu Strategis V.4
- Sasaran, Indikator, dan Target V.10
- Arah Kebijakan dan Strategi V.11

BAB 6 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR VI.1
- Pendahuluan VI.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... VI.3
- Lingkungan dan Isu Strategis VI.4
- Sasaran, Indikator, dan Target VI.19
- Arah Kebijakan dan Strategi VI.21

BAB 7 MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM VII.1
- Pendahuluan VII.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... VII.3
- Lingkungan dan Isu Strategis VII.8
- Sasaran, Indikator, dan Target VII.23
- Arah Kebijakan dan Strategi VII.26

BAB 8 MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK VIII.1
- Pendahuluan VIII.2
- Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019 ..... VIII.3
- Lingkungan dan Isu Strategis VIII.4
- Sasaran, Indikator, dan Target VIII.11
- Arah Kebijakan dan Strategi VIII.14

BAB 9 KAIDAH PELAKSANAAN IX.1
- Pendahuluan IX.2
- Kerangka Regulasi IX.3
- Kerangka Kelembagaan IX.12
- Kerangka Pendanaan IX.16
- Kerangka Evaluasi dan Pengendalian IX.28

BAB 10 PENUTUP X.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju I.4
Gambar 1.2 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan I.16
Gambar 1.3 Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019 ..... I.18
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1968-2019 (Persen)..... I.19
Gambar 1.5 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 ..... I.21
Gambar 1.6 Rincian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 ..... I.21
Gambar 1.7 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024 ..... I.22
Gambar 1.8 Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan I.22
Gambar 1.9 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik . I.23
Gambar 1.10 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal I.24
Gambar 1.11 Sasaran Keuangan Negara Tahun 2024 ..... I.25
Gambar 1.12 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Pulau Tahun 2020-2024..... I.27
Gambar 1.13 Proyeksi Penurunan Tutupan Hutan Primer I.32
Gambar 1.14 Proyeksi Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci selama Periode 2000-2045 ..... I.34

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan dan Nasional II.5
Gambar 2.2 Proyeksi Keberlanjutan Hutan dan Air hingga 2045..... II.8
Gambar 2.3 Perbandingan Produktivitas di Berbagai Sektor II.10
Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia 2015-2019..... II.11
Gambar 2.5 Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Lain II.12
Gambar 2.6 Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi II.12
Gambar 2.7 Keterkaitan Hulu-Hilir yang Menurun dalam 15 Tahun Terakhir..... II.12
Gambar 2.8 Pergeseran Investasi ke Sektor Tersier II.13
Gambar 2.9 *Network Readiness Index* Negara-negara di ASEAN..... II.14

Gambar 3.1 Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah III.2
Gambar 3.2 Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi III.13
Gambar 3.3 Alur Pikir Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah III.14
Gambar 3.4 Persebaran Sentra Hilirisasi Pertanian III.16
Gambar 3.5 Persebaran Sentra Produksi Perikanan Budidaya dan Garam..... III.17
Gambar 3.6 Persebaran Sentra Produksi Pangan III.18
Gambar 3.7 Persebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) III.19
Gambar 3.8 Persebaran Sumber Gas Bumi dan Batubara Untuk Kebutuhan Industri dan Listrik III.20
Gambar 3.9 Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan *Smelter* III.21

Gambar 3.10 Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan Kawasan Industri III.22
Gambar 3.11 Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) III.23
Gambar 3.12 Persebaran Destinasi Pariwisata III.24
Gambar 3.13 Peta Pengembangan Wilayah Papua III.30
Gambar 3.14 Peta Pengembangan Wilayah Maluku III.32
Gambar 3.15 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara III.34
Gambar 3.16 Peta Pengembangan Wilayah Sulawesi III.36
Gambar 3.17 Peta Pengembangan Wilayah Kalimantan III.38
Gambar 3.18 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera III.40
Gambar 3.19 Peta Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali III.42

Gambar 4.1 Cakupan JKN Berdasarkan Kelompok Peserta (dalam juta jiwa) IV.6
Gambar 4.2 10 Peringkat Teratas dan Perubahan Beban Penyakit (*Disability Adjusted Life Years*/DALYs) Tahun 1990 dan 2017 di Indonesia IV.8
Gambar 4.3 Kesenjangan Taraf Pendidikan Antarwilayah dari Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Keatas per Provinsi, 2018 ..... IV.9
Gambar 4.4 Proporsi Anak Kelas 9 di Atas Standar Minimum Kemampuan Matematika, Sains, dan Membaca pada Tes PISA IV.9
Gambar 4.5 Perbandingan Beberapa Negara Mengenai Proporsi Anak di Bawah Standar Minimum Kemampuan Matematika pada Tes PISA IV.10
Gambar 4.6 Jumlah dan Kualifikasi SDM Iptek tahun 2018 ..... IV.15

Gambar 6.1 Bauran Sumber Air untuk Keperluan Domestik (2019) VI.7

Gambar 7.1 Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019 ..... VII.5
Gambar 7.2 Grafik Perbandingan Bencana dan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi VII.10
Gambar 7.3 Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017 ..... VII.11
Gambar 7.4 Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Gempa bumi dan Sesar Aktif VII.12
Gambar 7.5 Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Gempa bumi dan Tsunami VII.14

Gambar 7.6 Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Erupsi Gunung Api VII.15
Gambar 7.7 Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Kering Tahun 2020-2025 ..... VII.16
Gambar 7.8 Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Basah Tahun 2020-2025 ..... VII.17
Gambar 7.9 Peta Proyeksi Bahaya Iklim Gelombang di Perairan Indonesia Tahun 2045 ..... VII.18
Gambar 7.10 Batasan Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi yang Diperbolehkan .. VII.21

Gambar 8.1 Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke Luar Negeri dengan Kasus WNI di Luar Negeri VIII.6
Gambar 8.2 Isu Strategis Pemantapan Sistem Hukum Nasional VIII.8
Gambar 8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola VIII.17

Gambar 9.1 Kerangka Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ..... IX.2
Gambar 9.2 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi yang Menjadi Koridor Penyusunan IX.3
Gambar 9.3 Peran Regulasi Dalam Pembangunan IX.4
Gambar 9.4 Pendekatan “Omnibus Law” IX.5
Gambar 9.5 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi IX.5
Gambar 9.6 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi (KR) IX.6
Gambar 9.7 Laju Pembubaran Jumlah LNS IX.12
Gambar 9.8 Prinsip Kerangka Kelembagaan IX.13
Gambar 9.9 Arah Pengelolaan Belanja Pemerintah IX.18
Gambar 9.10 Kaidah Pelaksanaan Pendanaan IX.27
Gambar 9.11 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional IX.28
Gambar 9.12 Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN IX.29
Gambar 9.13 Mekanisme Evaluasi RPJMN IX.31
Gambar 9.14 Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan IX.32
Gambar 9.15 Mekanisme Pengendalian Pembangunan IX.33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Tahun 2020-2024 (persen) I.28
Tabel 1.2 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020-2024 (USD Miliar) I.30
Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahnn 2020-2024 (persen PDB) I.31
Tabel 1.4 Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut I.32

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2024 ..... II.16

Tabel 3.1 Rata-rata Kontribusi Setiap Pulau terhadap PDB Nasional (%)..... III.3
Tabel 3.2 Isu-isu Strategis Wilayah..... III.5
Tabel 3.3 Target Pembangunan Wilayah Tahun 2024 ..... III.9
Tabel 3.4 Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Kewilayahan..... III.10
Tabel 3.5 Lingkup Wilayah Adat dan Strategi Pengembangannya..... III. 29

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Aplikasi Pendaftaran Paten dan Paten yang diberikan (2015-2019) IV.15

Tabel 7.1 Perbandingan antara Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK.... VII.7
Tabel 7.2 Gunung Api Aktif di Indonesia..... VII.15

Tabel 9.1 Rekapitulasi Kerangka Regulasi (KR) Agenda Pembangunan Terkait RPJMN 2020-2024 ..... IX.6
Tabel 9.2 Jumlah Lembaga Non Struktural..... IX.12

DAFTAR ISTILAH

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIPR	ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
AKE	Angka Kecukupan Energi
AKP	Angka Kecukupan Protein
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
AP	Availability Payment
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
API	Adaptasi Perubahan Iklim
APK	Angka Partisipasi Kasar
APL	Areal Penggunaan Lain
ASEAN	Association Southeast Asian Nation
ASFR	Age Specific Fertility Rate
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASO	Analog Switch Off
ATCS	Automatic Traffic Control System
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATS	Anak Tidak Sekolah
BABS	Buang Air Besar Sembarangan
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BCD	Be Creative District
BDF	Bali Democracy Forum
BHI	Badan Hukum Indonesia
BIN	Badan Intelijen Negara
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BLK	Balai Latihan Kerja
BLU	Badan Layanan Umum
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BMN	Barang Milik Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOD	Biological Oxygen Demand
BoP	Biaya Overhead Pabrik
BP	Bukan Pekerja
BP Tapera	Badan Tabungan Perumahan Rakyat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunaan Kelapa Sawit
BPIP	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Nasional

BPJS TK	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistika
BRG	Badan Restorasi Gambut
BRI	Belt and Road Initiative
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRT	Bus Rapid Transit
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BTS	Base Transceiver Station
BUILD	Better Utilization of Investment Leading to Development
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBA	Cost Benefit Analysis
CBM	Confidence Building Measure
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CMO	Crude Palm Oil
CoC	Code of Conduct
COD	Chemical Oxygen Demand
CPR	Contraceptive Prevalance Rate
CSIRT	Computer Security Incident Response Team
CSR	Corporate Social Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
DALYs	Disability Adjusted Life Years
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DI	Daerah Irigasi
DID	Dana Insentif Daerah
DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional
DMO	Domestic Market Obligation
DOS	Denial Of Service
DPP	Destinasi Pariwisata Prioritas
DTF	Distance to Frontier
DTK	Dana Transfer Khusus
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTPK	Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
DTU	Daerah Tertib Ukur
EBT	Energi Baru Terbarukan
EoDB	Easy of Doing Business
EPPD	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ESCO	Energy Service Company
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

FIES	Food Insecurity Experience Scale
Fintech	Financial Technology
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FOB	Free on Board
FTA	Free Trade Agreement
G20	Group of Twenty
GBI	Global Terrorism Index
GII	Global Innovation Index
GNI	Gross National Income
GR	Gini Ratio
GRK	Gas Rumah Kaca
GWPP	Gubernur Wakil Pemerintah Pusat
HAM	Hak Asasi Manusia
HD	Hutan Desa
HELE	High Efficiency and Low Emission
HITS	Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HLM CLKS	High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing
HP	Hutan Produksi
HT	Hasil Tembakau
HTA	Health Technology Assessment
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IBSAP	Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IE	Intensitas Emisi
IKA	Indeks Kualitas Air
IKAL	Indeks Kualitas Air Laut
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan
IKM	Industri Kecil dan Menengah
IKN	Ibu Kota Negara
IKP	Indeks Kemerdekaan Pers
IKTL	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	Indeks Kualitas Udara
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IMO	Infrastructure Maintenance and Operation
INATEWS	Indonesia Tsunami Early Warning System
INDI 4.0	Indonesia Industry 4.0 Readiness Index
INSW	Indonesia National Single Windows
IOD	Indian Ocean Dipole
IORA	Indian Ocean Rim Association
IoT	Internet of Things
IPA	Instalasi Pengolahan Air
IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi

IPB	Institut Pertanian Bogor
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPH	Indeks Pembagunan Hukum
IPHPS	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
Iptek	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
ITB	Institut Teknologi Bandung
ITMP	Integrated Tourism Master Plan
IUUF	Illegal, Unreported, Unregulated Fishing
JHT	Jaminan Hari Tua
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KA	Kereta Api
KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara
KB	Keluarga Berencana
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender Online
KBI	Kawasan Barat Indonesia
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEE	Kawasan Ekonomi Esensial
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemenhan	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemenristek-dikti	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi
KI	Kawasan Industri
KK	Kawasan Konservasi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLIK	Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
KNAPP	Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
KP	Kegiatan Prioritas
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPPN	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kerangka Regulasi
KSN	Kawasan Strategis Nasional
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KSST	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
KTH	Kelompok Tani Hutan
KTI	Kawasan Timur Indonesia
KTP	Keterbatasan terhadap Perempuan
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHAPer	Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
LDF	Long Distance Ferry
LH	Lingkungan Hidup
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LNPRT	Lembaga Non Profit untuk melayani Rumah Tangga
LNS	Lembaga Non Struktural
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPDP	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan
LPG	Liquified Petroleum Gas
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPNK	Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
LTS	Laut Tiongkok Selatan
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MBTK	Maloy Batuta Trans Kalimantan
MDF	Municipal Development Fund
MEF	Minimum Essential Force
MEWS	Modified Early Warning System
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MICE	Meeting-Incentive-Convention-Exhibition
MK	Mahkamah Konstitusi
MMSCFD	Million Standard Cubic Feet per Day
MOU	Momerandum Of Understanding
MPASI	Makanan Pendamping Asi
MPD	Mobile Positioning Data
MSBP	Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
MSY	Maximum Sustainable Yield
MTs	Madrasah tsanawiyah

NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NSTP	National Science Techno Park
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OP	Operasional dan Pemeliharaan
P2K2	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD HI	Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Produk Domestik Bruto
PEMDA	Pemerintah Daerah
PEP	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
PINA	Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah
PISA	Program for International Student Assessment
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLTN	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PoU	Prevalence of Undernourishment
PP	Program Prioritas
PPBT	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPH	Pola Pangan Harapan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PTM	Penyakit Tidak Menular
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUD	Perairan Umum Daratan
PUG	Pengarus Utamaan Gender
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusbindiklatren	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas
Puspiptek	Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAN API	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RCA	Regional Competitive Advantage
RCP	Representative Concentration Pathway

RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RE	Rasio Elektrifikasi
RIPD	Rencana Induk Penyandang Disabilitas
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRR	Reverse Replacement Ratio
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RZ KSN/KSNT	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SAIDI	System Avarage Interruption Duration Index
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SATAP	Sekolah Satu Atap
SD	Sekolah Dasar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDLB	Sekolah Dasar Besar
SDM	Sumber Daya Manusia
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKPT	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNKBS	Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah
SNPHAR	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
SP3	Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan
SPALD-T	Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPHPN	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPM	Standar Pelayanan Minimal
STP	Science Techno Park
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFP	Total Factor Productivity
TFR	Total Fertility Rate
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	Taman Kanak-kanak
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TNI	Tentara Nasional Indonesia

TORA	Tanah Obyek Reformasi Agraria
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TVET	Technical and Vocational Education Training
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
UKS	Upaya Kesehatan Sekolah
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Unair	Universitas Airlangga
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
Unpad	Universitas Padjajaran
UU	Undang-Undang
VA	Volt Ampere
WEF	World Economic Forum
WNI	Warga Negara Indonesia
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTO	World Trade Organization

BAB I

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 1.1
Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

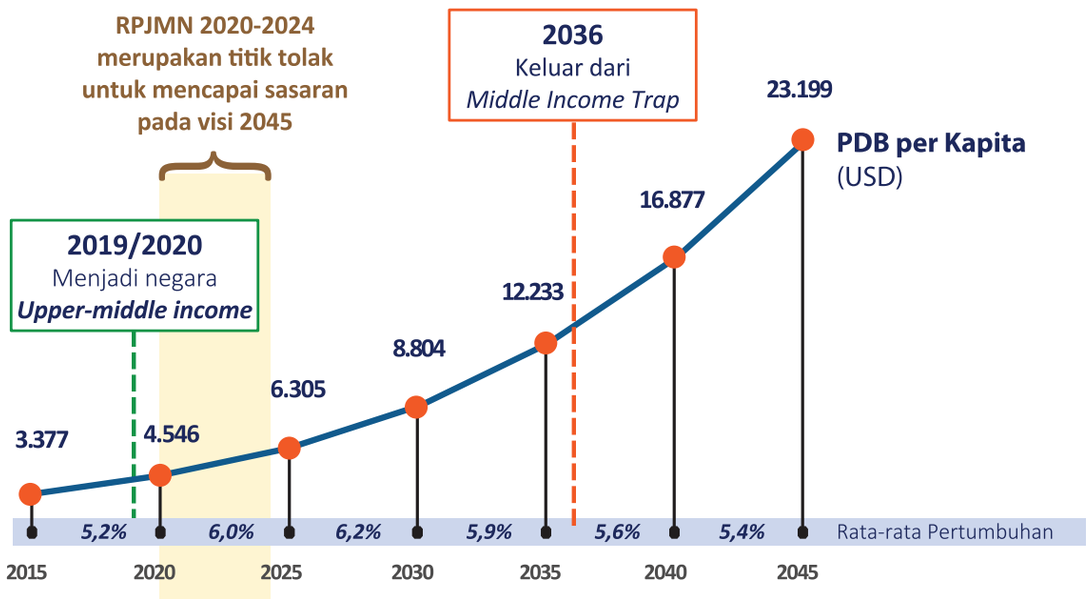

TRANSFORMASI EKONOMI dimulai pada tahun **2020-2024**
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-2045:		TAHUN 2045:	
PDB RIIL	PDB RIIL PER KAPITA	NEGARA MAJU DAN PDB TERBESAR	PERANAN KTI MENJADI
5,7%	5,0%	ke-5 (USD 7,4 triliun)	25%

Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMBANGUNAN SDM

STRATEGI

LAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

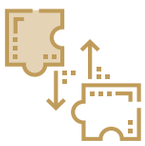

PRODUKTIVITAS

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Pendidikan Tinggi
3. Iptek dan Inovasi
4. Prestasi Olahraga

PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Moderasi Beragama
4. Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

HIGHLIGHT SASARAN 2024

- 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian
- 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial
- 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu
- 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif
- Indeks Perlindungan Anak: 73,49
- Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67

- Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18
- 49,8% Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
- 66,7% lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
- 40% hasil inovasi Prioritas Riset Nasional
- 3 Medali Emas baik *Olympic Games* maupun *Paralympic Games* tahun 2024
- 50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi

- Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
- Indeks Pembangunan Masyarakat : 0,65
- Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
- Nilai Budaya Literasi: 71,0
- Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
- Median usia kawin pertama perempuan: 22,1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

STRATEGI

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

INFRASTRUKTUR EKONOMI

KONEKTIVITAS

Darat
Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru

Kereta Api
KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang

Laut
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Udara
Bandara Baru, Jembatan Udara

SEKTOR EKONOMI

Industri Pengolahan

Jasa dan Pariwisata

Pertanian Perkebunan Kawasan/ Klaster Kelautan-Perikanan

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Transportasi Perkotaan
- Energi Berkelanjutan Perkotaan
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
- Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

- Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
- Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (T
UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HIGHLIGHT SASARAN 2024

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

70%
Rumah Tangga Menempati Hunian Layak

100%
Hunian dengan Akses Air Minum Layak
» Termasuk Akses Aman 15%

90%
Hunian dengan Akses Sanitasi Layak
» Termasuk Akses Aman 15%

30%
Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan

500 Ribu ha
Jaringan Irigasi Baru

50 m^3/detik
Tambahan Air Baku Industri & Domestik

63
Bendungan Multiguna

3 m^3/kg
Produktivitas Air untuk Padi

20 Provinsi
berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana

INFRASTRUKTUR EKONOMI

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Kereta Api
Makassar - Parepare

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu

43 Rute
Jembatan Udara

2.500 km
Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi

3.000 km
Jalan Nasional Baru

97%
Kondisi Mantap Jalan Nasional

1,9 jam/100 km
Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau

27%
Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (*loop*)

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di
6 Wilayah Metropolitan

80% Penanganan
20% Pengurangan
Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

1.400 kWh
Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional

100 %
Rasio Elektrifikasi

4 Juta
Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota

6 Unit
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 *Grass Root Refinery*/GRR dan 4 *Refinery Development Master Plan*/RDMP)

TRANSFORMASI DIGITAL

95%
Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar

60% Kecamatan
Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar

80%
Populasi Terjangkau
Siaran Digital

3
Start Up
***Unicorn* Baru**

PENYEDERHANAAN REGULASI

STRATEGI

PENDEKATAN *OMNIBUS LAW*

Penerapan pendekatan ***Omnibus Law***
(Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya)

TAHUN 2019			TAHUN 2024	
177	UU terkait **Cipta Lapangan Kerja** (termasuk regulasi terkait kemudahan dan perlindungan UMKM)	PENYEDERHANAAN PENCABUTAN PENGGABUNGAN	RUU **Cipta Lapangan Kerja**	
73	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)		menuju 40	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)

PENDEKATAN TERHADAP REGULASI YANG AKAN DISUSUN

Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis*/RIA)
Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost And Benefit Analysis*/CBA)

Mengurangi tumpang tindih regulasi *(membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)*	**Regulasi yang berorientasi tujuan**	**Regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas**

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

STRATEGI

PENYEDERHANAAN PROSEDUR

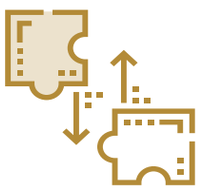

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK KEGIATAN EKSPOR/ IMPOR, KEPABEANAN, DAN KEPELABUHAN

HIGHLIGHT SASARAN 2024

4 hari waktu memulai usaha (EoDB)

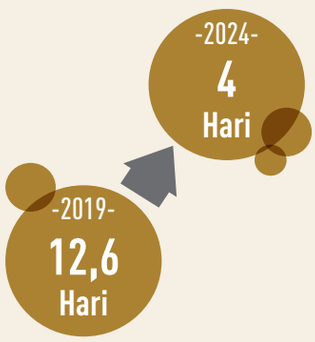

Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): ≥ 2,6 (predikat baik)

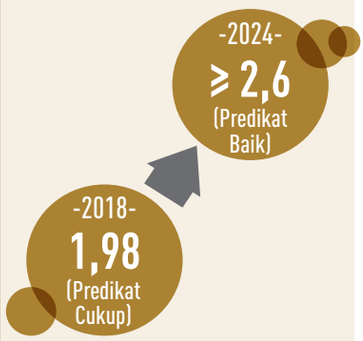

*Indeks Maturitas SPBE menggambarkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan layanan publik pemerintah

2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang *(dwelling time)*

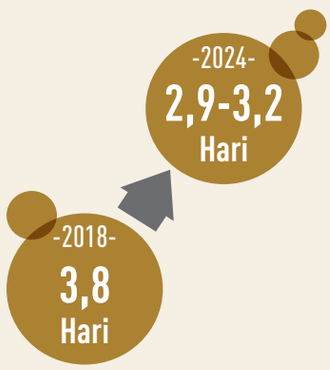

TRANSFORMASI EKONOMI

STRATEGI

INDUSTRIALISASI

Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global

PENGEMBANGAN DESTINASI UNGGULAN

Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas

PENGUATAN EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, *fashion*, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

HIGHLIGHT SASARAN 2024

Kontribusi PDB industri pengolahan
-2018- 19,9 persen
-2024- 21,0 persen

Kontribusi PDB industri pengolahan non migas
-2018- 17,6 persen
-2024- 18,9 persen

Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
-2018- 14,9 persen
-2024- 15,7 persen

Devisa pariwisata
-2018- USD 19,3 miliar
-2024- USD 30 miliar

Nilai tambah ekonomi kreatif
-2018- Rp 1.105 triliun
-2024- Rp 1.846 triliun

Nilai transaksi *e-commerce*
-2018- Rp 170 triliun
-2024- Rp 600 triliun

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3) Moderasi beragama; dan
4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Melalui:

1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2020-2024

Kilas Balik Ekonomi Makro Tahun 2015-2019

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti *Brexit*, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun[1]. Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang tahun 2015– 2019, inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2 miliar pada tahun 2019.

1. Berdasarkan World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang di bawah 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (*Atlas Method*) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi[2].

Tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antargolongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018).

Target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya merupakan sasaran makro pembangunan.

Gambar 1.3
Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019

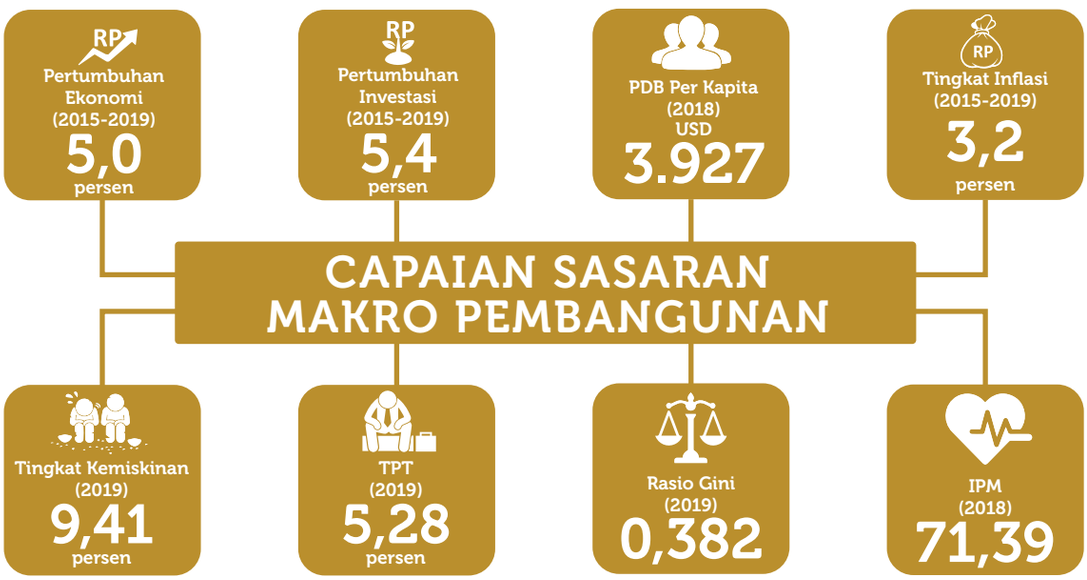

Catatan: Angka pertumbuhan ekonomi dan investasi 2019 berdasarkan perkiraan Bappenas.
Sumber: BPS

2.Batas GNI per kapita (*Atlas Method*) negara berpendapatan menengah tinggi menurut *World Bank* per Juli 2019 sebesar USD3.996.

Tantangan Perekonomian Tahun 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan[3] sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*)[4] menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1968-2019 (Persen)

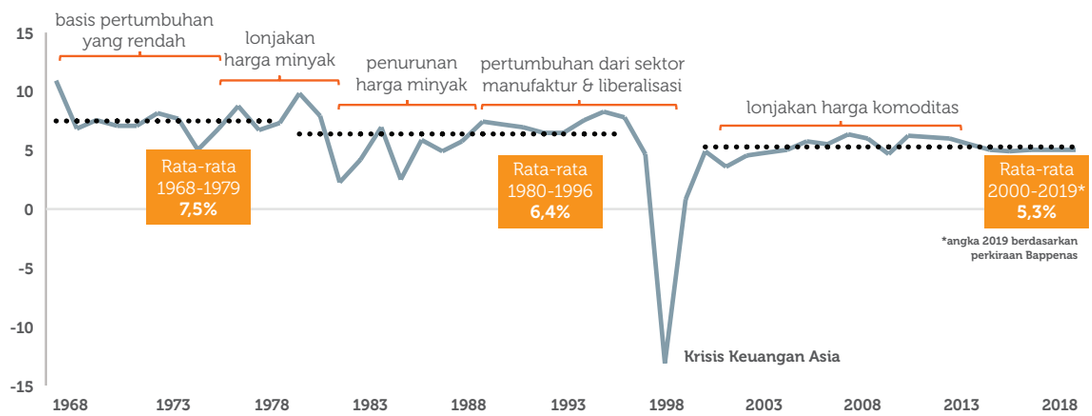

Sumber: Diolah dari BPS

3. Berdasarkan *World Economic Outlook Database* IMF Oktober 2019.
4. Studi *Growth Diagnostic* Bappenas 2018.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa *peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning)*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology* (*fin-tech),* dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

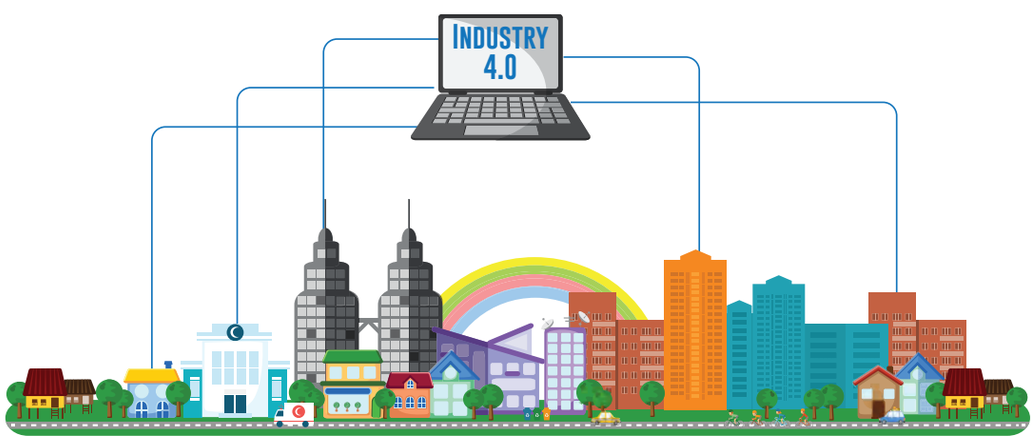

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Gambar 1.5
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

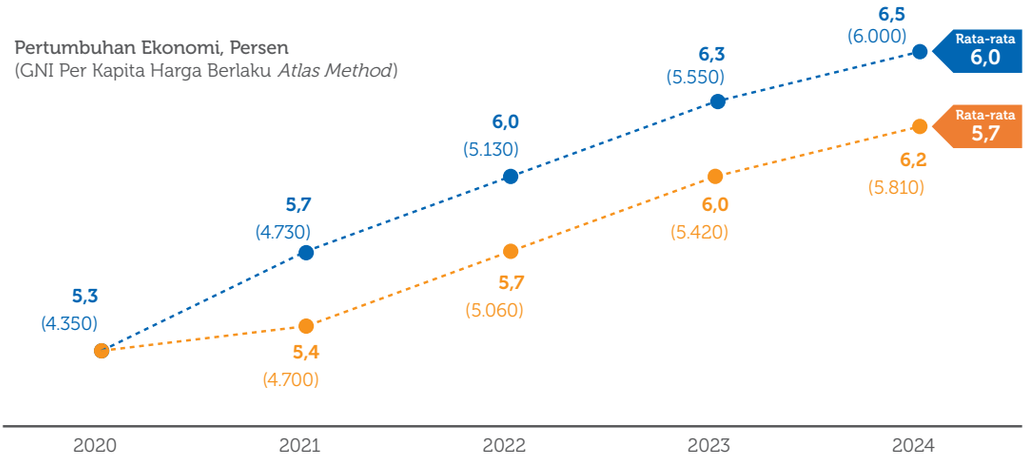

Sumber: Bappenas

Gambar 1.6
Rincian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

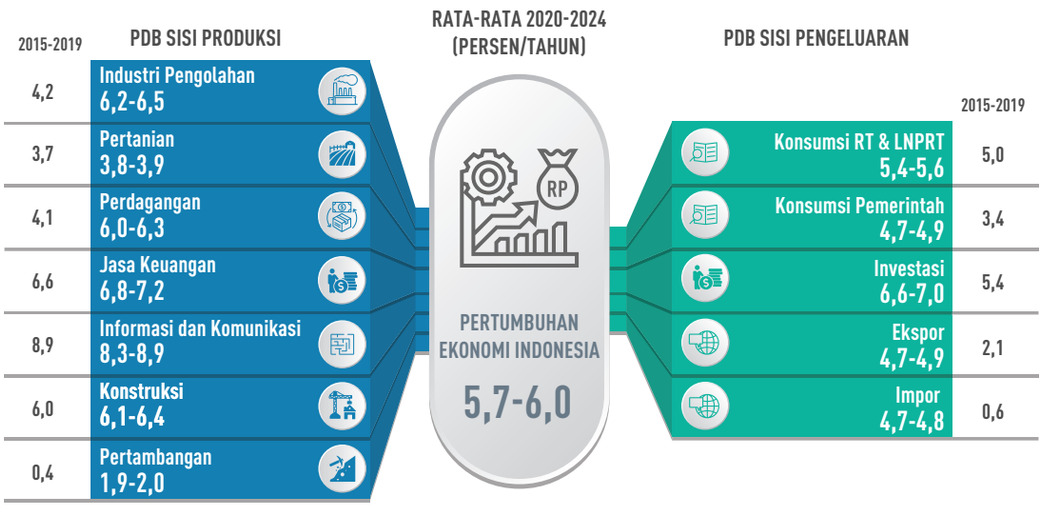

Sumber: Bappenas

Gambar 1.7
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024

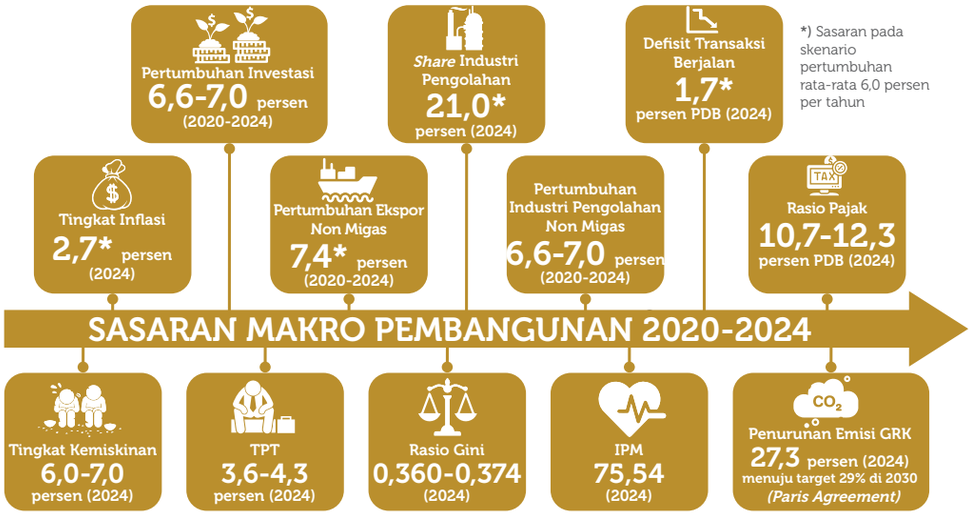

Sumber: Bappenas

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Gambar 1.8
Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural
untuk Peningkatan Kesejahteraan

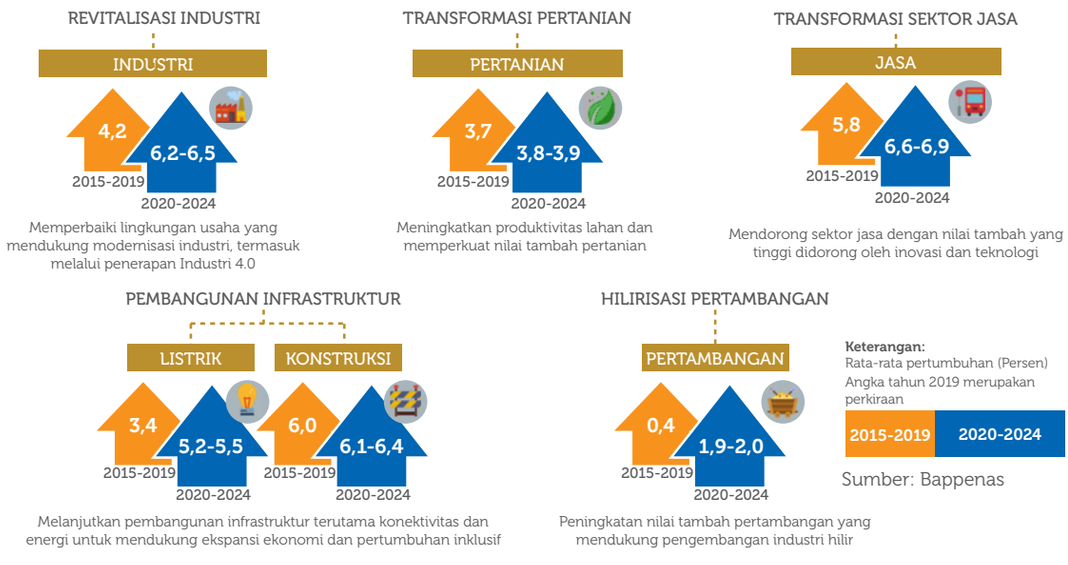

Sumber: Bappenas

Memperkuat Permintaan Domestik

Di sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,4-5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Gambar 1.9
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

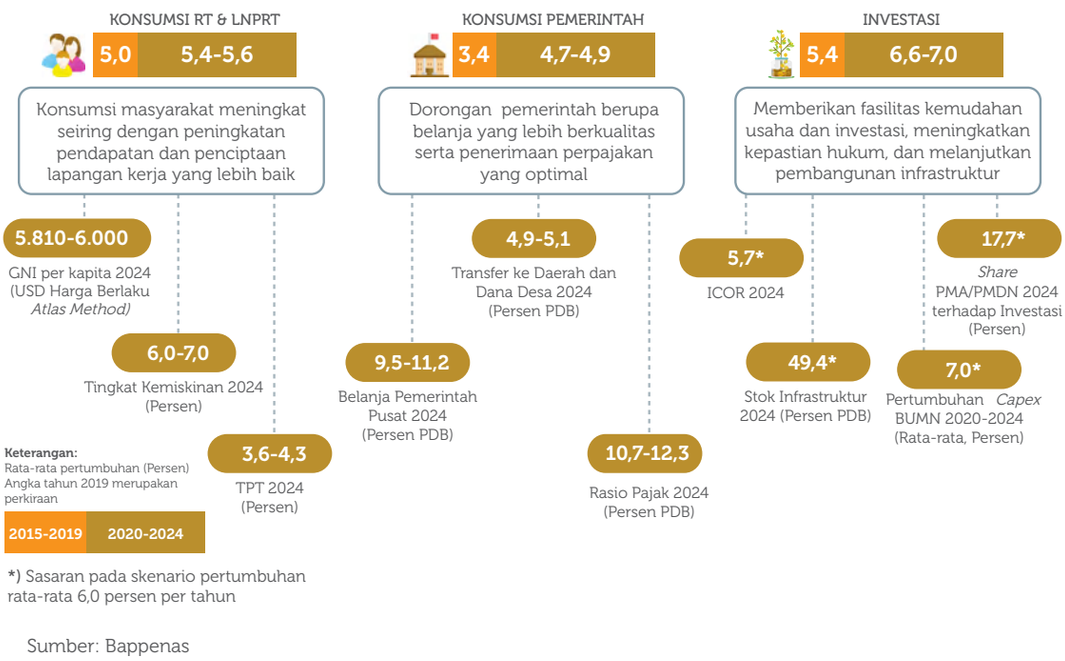

Sumber: Bappenas

Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7-4,8 persen per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 1,7 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD159,5 miliar pada tahun 2024.

Gambar 1.10
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Sumber: Bappenas

Menjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 12,9-14,6 persen PDB pada tahun 2024, dengan rasio perpajakan mencapai 10,7-12,3 persen pada tahun 2024. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan perpajakan. Dari sisi administrasi, terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara diperkirakan meningkat menjadi 14,4 - 16,3 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masing-masing meningkat menjadi 9,5-11,2 dan 4,9 - 5,1 persen PDB pada tahun 2024. Defisit akan dijaga pada 1,5 - 1,7 persen PDB pada tahun 2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Gambar 1.11
Sasaran Keuangan Negara Tahun 2024 (Persen PDB)

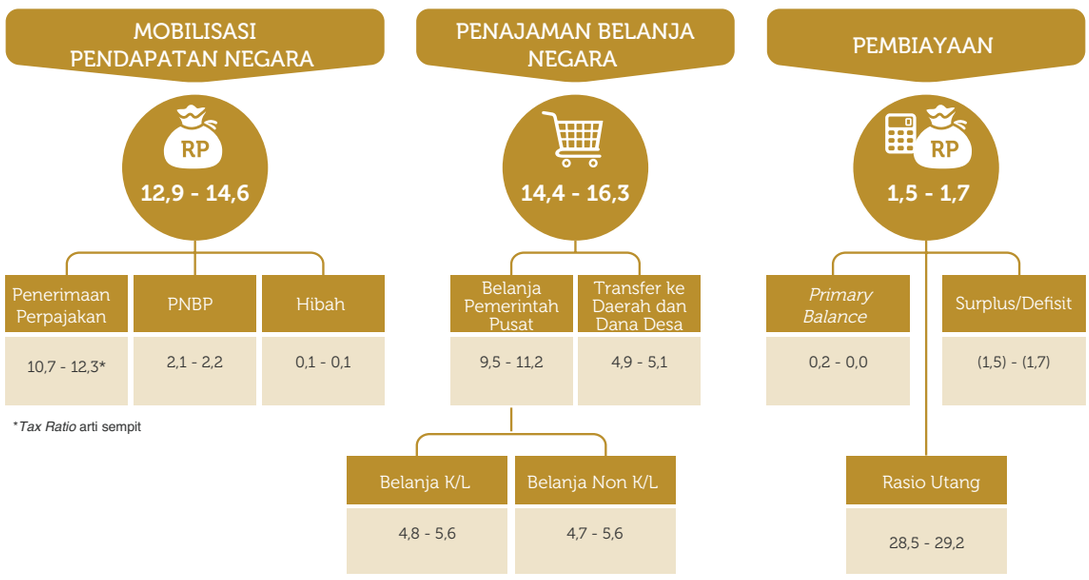

Sumber: Kementerian Keuangan

Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang tahun 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Perekonomian nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan agar tumbuh lebih cepat di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pergeseran perekonomian ditandai dengan bergesernya porsi (*share*) perekonomian secara nominal sebesar 1,1 persen ke luar Pulau Jawa dan Sumatera. Angka pergeseran ini telah mempertimbangkan kemampuan wilayah yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Momentum pertumbuhan Pulau Sumatera tetap dijaga dan didorong akan melebihi tingkat pertumbuhan Pulau Jawa. Kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan potensi pariwisata, perkuatan infrastruktur konektivitas antarwilayah menjadi kunci percepatan pertumbuhan Pulau Sumatera.

Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (*share*) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian serta hilirisasi sumber daya alam untuk energi.

Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia.

Perekonomian Kepulauan Maluku diharapkan tumbuh tinggi dengan didorong oleh pengembangan industri perikanan, pariwisata, dan hilirisasi sumber daya alam.

Pulau Papua diharapkan tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Penguatan konektivitas juga dilakukan untuk menurunkan disparitas harga komoditas dan biaya logistik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku dan Papua diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

Gambar 1.12
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Pulau Tahun 2020-2024

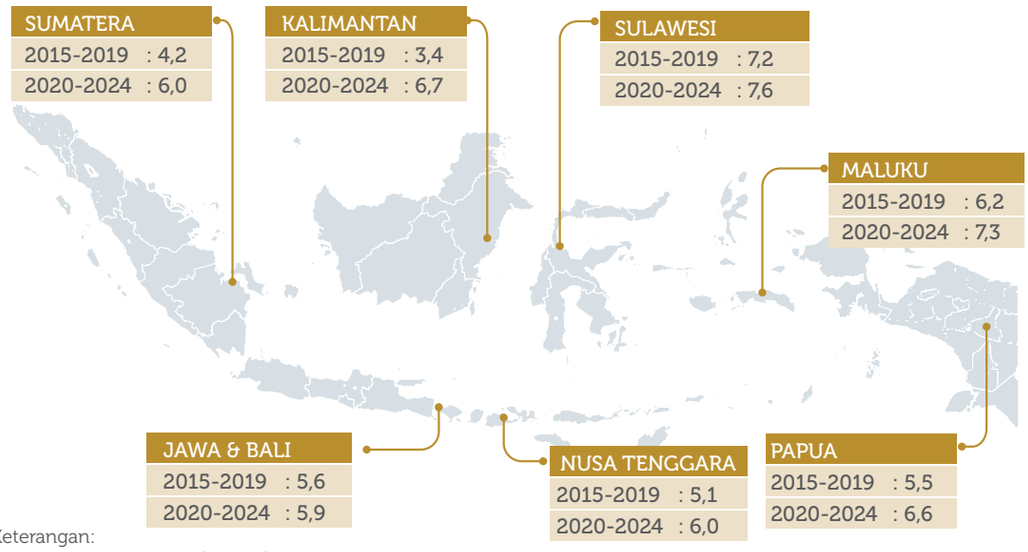

Keterangan:
Rata-rata pertumbuhan (Persen)
Angka tahun 2019 merupakan perkiraan

Sumber : Bappenas

Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Tabel 1.1
Pertumbuhan dan Stuktur Ekonomi Tahun 2020-2024 (Persen)

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB	5,1	5,3	5,4 – 5,7	5,7 – 6,0	6,0 – 6,3	6,2 – 6,5
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Masyarakat	5,2	5,0	5,2 – 5,4	5,4 – 5,6	5,7 – 5,9	5,9 – 6,1
Konsumsi Pemerintah	2,8	4,3	4,5 – 4,6	4,6 – 4,9	4,8 – 5,1	5,1 – 5,3
Investasi (PMTB)	4,8	5,6	5,8 – 6,2	6,3 – 6,9	7,2 – 7,8	8,0 – 8,4
Ekspor Barang dan Jasa	-1,2	3,9	3,9 – 4,2	4,6 – 4,8	5,3 – 5,6	5,8 – 6,2
Impor Barang dan Jasa	-8,2	4,3	4,4 – 4,6	4,7 – 4,8	5,0 – 5,1	5,1 – 5,2
Sisi Produksi						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,5	3,7	3,7 – 3,8	3,8 – 3,9	3,9 – 4,0	4,0 – 4,1
Pertambangan dan Penggalian	1,4	1,9	1,9 – 1,9	1,9 – 2,0	2,0 – 2,1	2,0 – 2,2
Industri Pengolahan	4,1	5,0	5,2 – 5,5	6,2 – 6,5	7,1 – ,5	7,7 – 8,1
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	3,9	4,2	5,2 – 5,2	5,2 – 5,6	5,5 – 6,0	5,7 – 6,1
Pengadaan Air	7,4	4,0	4,3 – 4,4	4,5 – 4,6	4,7 – 4,8	4,9 – 5,0
Konstruksi	5,7	5,7	5,8 – 6,1	6,1 – 6,4	6,4 – 6,7	6,6 – 6,9
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,8	5,5	5,6 – 6,0	5,9 – 6,5	6,2 – 6,7	6,4 – 6,8
Transportasi dan Pergudangan	5,8	7,0	7,1 – 7,4	7,3 – 7,7	7,5 – 7,9	7,5 – 8,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,6	6,0	6,1 – 6,3	6,3 – 6,5	6,5 – 6,7	6,7 – 6,8
Informasi dan Komunikasi	9,3	7,3	7,7 – 8,8	8,4 – 9,2	8,9 – 9,4	9,1 – 9, 8
Jasa Keuangan	6,0	6,3	6,4 – 6,9	6,7 – 7,1	7,1 – 7,7	7,3 – 7,8
Real Estat	5,5	4,9	5,0 – 5,0	5,0 – 5,2	5,3 – 5,3	5,3 – 5,4
Jasa Perusahaan	9,8	8,3	8,4 – 8,4	8,5 – 8,5	8,5 – 8,7	8,7 – 8,8

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintah-an dan Jaminan Sosial Wajib	6,0	4,5	4,8 – 5,1	5,1 – 5,4	5,2 – 5,5	5,4 – 5,6
Jasa Pendidikan	6,1	5,1	5,2 – 5,2	5,2 – 5,3	5,5 – 5,6	5,7 – 5,8
Jasa Kesehatan dan Ke-giatan Sosial	8,6	7,5	7,6 – 8,0	8,1 – 8,2	8,4 – 8,5	8,5 – 8,6
Jasa Lainnya	10,1	8,9	9,3 – 9,5	9,5 – 9,6	9,6 – 9,6	9,7 – 9,7
Distribusi PDB (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,5	12,3	12,6 – 10,0	11,9 – 11,9	11,7 – 11,6	11,5 – 11,4
Pertambangan dan Peng-galian	7,4	7,1	6,8 – 6,7	6,5 – 6,4	6,2 – 6,2	5,9 – 5,9
Industri Pengolahan	19,7	19,7	19,7-19,8	19,9 – 20,0	20,2 – 20,4	20,5 – 21,0
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	1,1	1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1
Pengadaan Air	0,1	0,1	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1
Konstruksi	10,6	10,6	10,7– 10,7	10,7– 10,7	10,8 – 10,8	10,8 – 10,8
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mo-bil dan Sepeda Motor	13,0	13,0	13,0– 13,1	13,1– 13,2	13,1 – 13,3	13,2 – 13,3
Transportasi dan Pergu-dangan	5,5	5,6	5,7 – 5,7	5,7 – 5,8	5,8 – 5,8	5,9 – 5,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,7	2,7	2,7 – 2,7	2,6 – 2,6	2,6 – 2,6	2,6 – 2,6
Informasi dan Komunikasi	3,9	3,9	3,9 – 3,9	4,0 – 4,0	4,0 – 4,1	4,1 – 4,2
Jasa Keuangan	4,2	4,2	4,3 – 4,3	4,3 – 4,3	4,4 – 4,4	4,4 – 4,4
Real Estat	2,7	2,7	2,7 – 2,7	2,7 – 2,7	2,7 – 2,7	2,6 – 2,6
Jasa Perusahaan	1,9	1,9	2,0 – 2,0	2,0 – 2,0	2,1 – 2,1	2,1 – 2,1
Administrasi Pemerintah-an dan Jaminan Sosial Wajib	3,6	3,6	3,6 – 3,6	3,5 -3,5	3,5 -3,5	3,5 -3,5
Jasa Pendidikan	3,3	3,2	3,2 – 3,2	3,2 – 3,2	3,2 – 3,2	3,2 – 3,2
Jasa Kesehatan dan Ke-giatan Sosial	1,1	1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1	1,1 – 1,1
Jasa Lainnya	1,9	2,0	2,0 – 2,0	2,1 – 2,1	2,2 – 2,2	2,2 – 2,3

Sumber: Bappenas dan BPS

Tabel 1.2
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020-2024 (USD Miliar)

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Transaksi Berjalan	-30,7	-30,4	-30,3	-30,2	-30,0	-29,3
Barang	-0,4	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0
- Ekspor	167,2	175,9	185,9	198,5	214,8	235,1
- Impor	-167,6	-175,6	-184,8	-195,5	-207,3	-220,1
Jasa	-7,0	-6,8	-6,3	-5,3	-4,9	-4,4
- Ekspor	31,7	33,9	37,0	41,8	47,3	53,8
- Impor	-38,6	-40,7	-43,3	-47,1	-52,3	-58,2
Pendapatan Primer	-30,6	-31,5	-32,8	-35,9	-40,6	-48,1
Pendapatan Sekunder	7,3	7,6	7,8	7,9	8,0	8,2
Transaksi Modal dan Finansial	39,3	31,2	33,4	35,8	38,0	42,0
Transaksi Modal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Transaksi Finansial	39,2	31,1	33,3	35,7	37,8	41,9
- Investasi Langsung	17,5	18,6	21,5	24,3	27,4	32,0
- Investasi Portofolio	24,3	18,5	18,9	19,7	20,0	20,5
- Derivatif Finansial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Investasi Lainnya	-2,5	-6,0	-7,1	-8,3	-9,5	-10,7
Total (Transaksi Berjalan + Modal dan Finansial)	8,6	0,8	3,1	5,6	8,0	12,7
Memorandum:						
Posisi Cadangan Devisa	129,2	130,1	133,2	138,8	146,8	159,5
- Dalam Bulan Impor	7,6	7,2	7,0	6,9	6,8	6,9
Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,7	-2,5	-2,3	-2,1	-1,9	-1,7

Sumber: Bappenas dan BI

Tabel 1.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020-2024 (Persen PDB)

Indikator	Perkiraan 2019*	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah o/w	12,2	11,9 – 13,1	12,5 – 13,4	12,6 – 13,8	12,8 – 14,1	12,9 – 14,6
Penerimaan Perpajakan	9,6	9,7 – 10,5	10,1 – 10,7	10,3 – 11,2	10,5 – 11,7	10,7 – 12,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,5	2,2 – 2,5	2,3 – 2,6	2,3 – 2,5	2,2 – 2,3	2,1 – 2,2
Hibah	0,0	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1
Belanja Negara	14,4	13,7 – 15,1	14,2 – 15,1	14,2 – 15,5	14,3 – 15,8	14,4 – 16,3
Belanja Pemerintah Pusat	9,3	8,9 – 10,0	9,2 – 10,0	9,3 – 10,4	9,4 – 10,7	9,5 – 11,2
- Belanja K/L	5,5	4,4 – 5,5	4,9 – 5,2	4,8 – 5,4	4,6 – 5,4	4,8 – 5,6
- Belanja Non K/L	3,9	4,5 – 4,5	4,3 – 4,8	4,5 – 5,1	4,8 – 5,3	4,7 – 5,6
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	5,0	4,8 – 5,1	5,0- 5,2	4,9 – 5,1	4,9 – 5,1	4,9 – 5,1
- Transfer ke Daerah	4,6	4,4 - 4,7	4,6 – 4,8	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7
- Dana Desa	0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4	0,4 – 0,4
Keseimbangan Primer	(0,5)	0,0–(0,3)	0,1 – 0,0	0,1 – 0,0	0,2 – 0,0	0,2 – 0,0
Surplus/Defisit Anggaran	(2,2)	(1,8) – (2,0)	(1,6) – (1,7)	(1,6) – (1,7)	(1,6) – (1,7)	(1,5) – (1,7)
Pembiayaan o/w	2,5	1,8 – 2,0	1,6 – 1,7	1,6 – 1,7	1,6 – 1,7	1,5 – 1,7
Pembiayaan Utang	2,7	2,0 – 2,3	1,8 – 2,1	1,8 – 2,1	1,8 – 2,1	1,7 – 2,1
Pembiayaan Investasi	(0,3)	(0,3) – (0,5)	(0,3) – (0,5)	(0,3) – (0,5)	(0,3) – (0,5)	(0,3) – (0,5)
Pembiayaan Lainnya	0,1	0,1 – 0,2	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1	0,1 – 0,1
Rasio Utang	29,8	29,6 – 30,4	29,4 – 30,0	29,1 – 29,8	28,9 – 29,6	28,5 – 29,2

*) Berdasarkan Realisasi APBN 2019 Sementara s.d. 31 Desember 2019

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Batasan Pembangunan
(*Development Constraint*)

Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.

Beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan meliputi: (a) Tutupan Hutan Primer; (b) Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Kunci; (d) Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; serta (g) Ketersediaan Energi.

A. Tutupan Hutan Primer

Hutan memberikan jasa lingkungan yang tidak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan. Nilai manfaat jasa lingkungan hutan yang paling optimal terdapat pada hutan primer, yakni tutupan hutan alam dengan kondisi masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia.

Walaupun laju deforestasi hutan primer telah berhasil dikurangi secara signifikan dengan diterapkannya kebijakan moratorium hutan primer sejak tahun 2011, namun penyusutan tutupan hutan primer masih terjadi di beberapa lokasi tertentu. Pada tahun 2045

Gambar 1.13
Proyeksi Penurunan Tutupan Hutan Primer

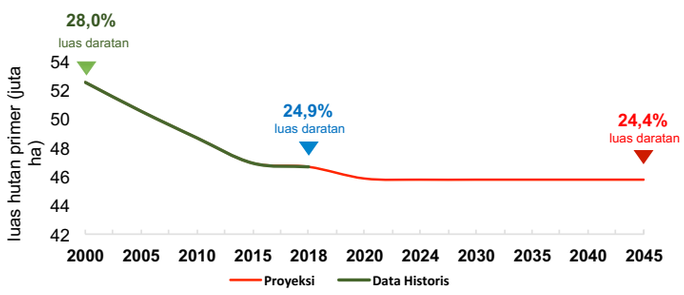

Sumber: Bappenas, 2019

diproyeksikan luas tutupan hutan primer tinggal tersisa 45,8 juta ha atau 24 persen dari total luas daratan nasional sebesar 188 juta ha. (Gambar 1.13). Agar dapat mempertahankan fungsinya, maka area hutan primer dalam Peta Moratorium seluas 45-46 juta ha (kondisi tahun 2019) atau sekitar 24-25 persen dari luas total lahan nasional merupakan luas minimal yang harus dipertahankan dalam perencanaan pembangunan.

B. Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Selain kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya, ekosistem gambut juga mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi sehingga diperlukan upaya terintegrasi dalam mengkonservasi dan merestorasinya.

Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan lahan gambut, deforestasi, serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut. Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun (Tabel 1.4).

Total lahan gambut yang telah direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8 persen); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77 persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pemulihan dan restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal.

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 1.4
Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Sumber: Bappenas, 2019

C. Habitat Spesies Kunci

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati serta ciri khas ekosistem yang spesifik dengan tingkat endemisitas spesies yang tinggi pada masing- masing pulau. Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo spp.*), burung cendrawasih (*Paradisaea ssp.*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), maleo (*Macrocephalon maleo*), dan anoa (*Bubalus spp.*).

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci ini adalah tumbuhan atau satwa yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi dan produktifitas dari habitat/ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babirusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orang Utan Kalimantan, Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera. Habitat spesies kunci ini diproyeksikan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan, sehingga menjadikan spesies tersebut semakin terancam punah (Gambar 1.14).

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat Garis *Wallacea* akan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan luas *key biodiversity areas* di sisi timur Garis *Weber*, khususnya wilayah Maluku dan Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat dari masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami

Gambar 1.14
Proyeksi Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci
Tahun 2000-2045

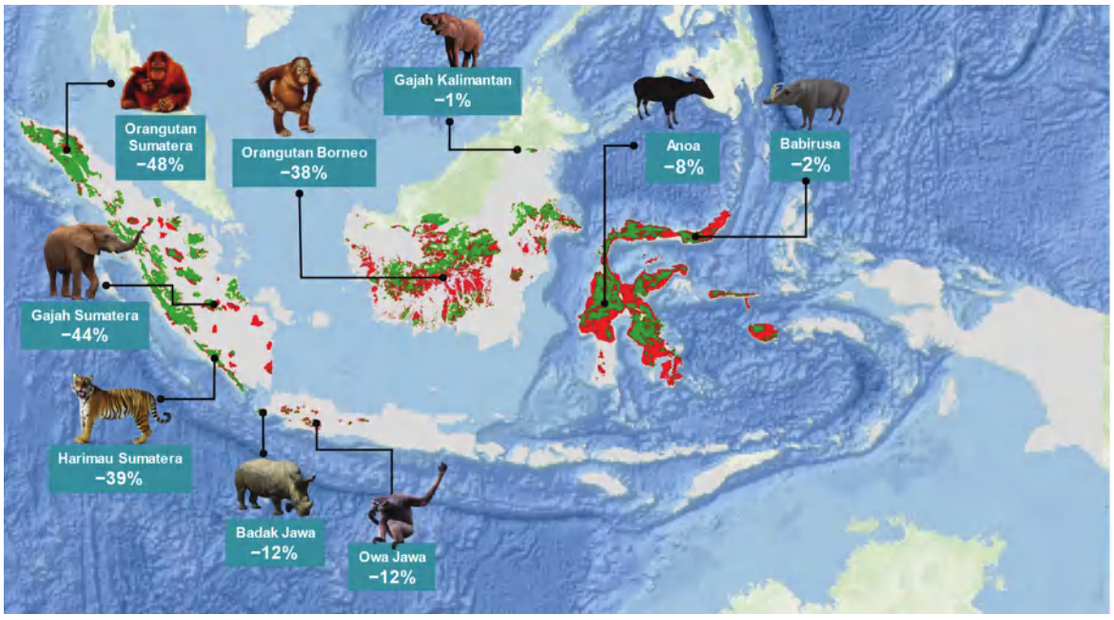

Sumber: Bappenas, 2019

penurunan luas habitat spesies kunci terbesar maka pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut.

Sesuai hasil analisis tersebut, luas tutupan habitat spesies kunci secara nasional terutama di sebelah barat Garis *Weber* yang harus dipertahankan adalah minimal seluas 43,2 juta ha. Bila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan maka dikhawatirkan mengganggu fungsi ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

D. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah daerah yang rawan terjadi abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai). Sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000 akibat dampak perubahan iklim. Kenaikan tinggi gelombang laut ini akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen sehingga diperkirakan meningkatkan cakupan luas wilayah permukiman di pesisir yang rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis KLHS diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas pembangunan karena akan mengancam permukiman dan infrastruktur lain yang sudah ada, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada tingginya gelombang laut yang mempengaruhi pola penangkapan ikan dan nelayan (Bappenas, 2018).

E. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona *megathrust*-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar.

Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih-alih dijadikan sebagai kawasan budidaya. Apabila tidak bisa dihindari sebagai kawasan budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

F. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m^3/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

G. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang.

Guna memenuhi kebutuhan energi nasional, maka pada tahun 2024 porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga menuju 23 persen dari bauran energi nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang.

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi dan struktur ruang dalam pembangunan kewilayahan.

Kapasitas Fiskal dan Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui investasi publik yang berkualitas yaitu: 1) Tepat sasaran dan waktu; 2) Memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan; 3) Konsisten dengan arah kebijakan, program, dan rencana pembangunan; serta 4) Penggunaan sumber daya dan dana yang efisien.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara yang berpendapatan setara. Akar permasalahan utama dari rendahnya *tax ratio* tesebut adalah kebijakan perpajakan yang belum cukup memadai untuk mewujudkan sistem perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara optimal. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan turut mempengaruhi terhadap belum optimalnya kinerja perpajakan. Berbagai permasalahan perpajakan tersebut menyebabkan terbatasnya ruang fiskal untuk mendanai kebutuhan pembangunan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam, diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan seluruh kapasitas pendanaan yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan perlu didorong dan disinergikan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk pemerintah pusat dan daerah diarahkan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan untuk badan usaha (BUMN dan Swasta) difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan perlu dilakukan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip *Money Follow Program*. Selain itu, pemerintah perlu lebih mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya.

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi untuk dapat menjadi modal pembangunan bagi bangsa sendiri.

Memiliki penguasaan atas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa.

Mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekerjasama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

MENJAMIN KEADILAN

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya.

Penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat.

Menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

MENJAGA KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Keadilan antar generasi dimana setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

Keadilan dalam satu generasi, dimana keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.

Pencegahan dini, dimana apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati.

Internalisasi biaya lingkungan, dimana kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena, itu biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam.

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan

Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa

Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Selain itu, *Major Project* dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dkendalikan.

Rincian Indikator *Major Project* memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*).

Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	**Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:** Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	• Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0%	**245,8** • APBN: 13,0 • BUMN 125,9 • Swasta: 106,9	a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	**10 Destinasi Pariwisata Prioritas:** Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	**161** (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	**9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *smelter***	• Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	**317,4** • APBN: 15,7 • Swasta: 176,0 • KPBU: 14,3 • BUMN: 111,4	a.l KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	**Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.	**226,4** • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	**Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit**	• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%	**32,0** • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19,0	a.l Kementan KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	**Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	**25** • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
7	**Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**	• Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	**30** • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	**Pembangunan Wilayah Batam – Bintan**	• Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	**69,9** • APBN: 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha: 54,0	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	**Pengembangan Wilayah Metropolitan:** Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	• Meningkatnya *share* PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	**222,9** (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	**Ibu Kota Negara (IKN)**	• Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah	**466,04** • APBN: 90,35 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23	a.l KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	**Pengembangan Kota Baru:** Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	• Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)	**134,6** (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	**Wilayah Adat Papua:** Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay • Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan	**27,4** (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kementan, KemenDesa PDTT, Kemenhub, Pemda

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
13	**Pemulihan Pascabencana:** (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana • Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana	**15,2** • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	**Pusat Kegiatan Strategis Nasional:** PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	• Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya	**3,4** • APBN: 3,0 • KPBU: 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP
15	**Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***	• Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi *stunting* hingga 14%	**87,1** (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
16	**Pembangunan *Science Techno Park*** (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)	• Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	**0,8** (APBN)	a.l Kemenristek/ BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta
17	**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**	• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	**29,1** (APBN)	a.l Kemenaker, Kemenperin Kemdikbud, BPS

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
18	**Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh**	• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial • Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan	**406,5** (APBN)	a.l Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS
19	**Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**	• Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam	**308,5** • APBN: 105,5 • KPBU: 203,0	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
20	**KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)**	Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam • Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	**63,6** • APBN: 21,6 • KPBU: 42,0	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	**Kereta Api Makassar-Pare Pare**	• Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar *New Port* • Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun)	**6,4** • APBN: 3,8 • Badan Usaha: 2,6	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
22	**Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**	• Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama • Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk *loop* secara teratur menjadi 27% • Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada *hinterland*	**113,0** (BUMN/Swasta)	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	**Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:** Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	• Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan	**118,8** (APBN, APBD, BAdan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
24	**Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak**	• Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta *Barrel* Per Hari di tahun 2026; • Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas.	**637,0** (Badan Usaha)	a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN
25	**Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA**	• Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW • Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% • Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 • Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO_2 pada 2024 • Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 • Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	**1.121,0** (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
26	**Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital**	• Berkurangnya kesenjangan digital • Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	**435,2** • APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0	a.l KemenKominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
27	**Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa**	• Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	**54,9** • APBN: 31,4 • KPBU: 18,7 • APBD: 4,8	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
28	**18 Waduk Multiguna**	• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m^3/ detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan • Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	**92,9** • APBN: 12,9 • KPBU: 24,0 • Swasta : 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
29	**Jembatan Udara 37 Rute di Papua**	• Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50%	**7,7** (APBN)	a.l Kemenhub,
30	**Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan**	• Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	**12,4** (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
31	**Jalan Trans Papua Merauke - Sorong**	• Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua • Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.	**15,4** (APBN)	a.l KemenPUPR,
32	**Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)**	• Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	**140,9** • APBN: 73,5 • APBD: 1,7 • Masyarakat/ Swasta: 65,7	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), dan Masyarakat
33	**Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**	• Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	**123,5** • APBN: 77,9 • APBD: 15,6 • KPBU: 29,9	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
34	**Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)**	• Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh	**397,9** • APBN: 18,0 • APBD: 109,2 • BUMN: 28,0 • Swasta: 237,5 • Masyarakat: 5,0	a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat
35	**Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah**	• Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun • Mengurangi impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun	**38,4** • APBN: 4,1 • BUMN: 6,9 • KPBU: 27,4	a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
36	**Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis**	• Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha • Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	**30,9** (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
37	**Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)**	• Tersambungnya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan); • Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; • Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara; • Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna	**36,4** (Badan Usaha)	a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
38	**Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**	• Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/ tahun	**4,6** • APBN: 0,6 • KPBU: 3,0 • Swasta: 1,0	a.l KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
39	**Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**	• Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit	**13,0** (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG, BPPT
40	**Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT**	• Menurunnya insiden serangan siber; • Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar *stakeholder* terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).	**8,0** (APBN)	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN
41	**Penguatan Keamanan Laut di Natuna**	• Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; • Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, *trans-national crimes* dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.	**12,2** (APBN)	a.l. Kemenhan dan TNI

Catatan: Deskripsi lengkap Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB II

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

- Pengelolaan pangan menunjukan capaian produksi yang meningkat. Surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan produksi daging sebesar 5,5% per tahun.
- Angka kerawanan pangan menurun menjadi 7,9 % pada tahun 2018
- Produksi ikan dan konsumsi ikan terus mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 14,1 juta ton dan 50,7 kg/kapita/tahun pada tahun 2018
- Rasio elektrifikasi mencapai 98,3% pada tahun 2018
- 8 Kawasan Industri / Kawasan Ekonomi Khusus sudah beroperasi.
- Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari 9,4 juta orang pada tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang, dengan penerimaan devisa sebesar USD 19,3 miliar pada tahun 2018.
- Kontribusi ekspor ekonomi kreatif mencapai USD 19,8 miliar atau 11,8% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2017.
- Penciptaan lapangan kerja baru sekitar 11,88 juta (kumulatif tahun 2015-2019) dan pengangguran terbuka menurun menjadi 5,28% pada tahun 2019.
- Peningkatan realisasi investasi dari Rp 545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 721,3 triliun pada tahun 2018.

Pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat di antaranya surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan produksi daging sebesar 5,5 persen per tahun. Produksi perikanan tangkap meningkat, mencapai 7,3 juta ton pada tahun 2018, terdiri dari 6,7 juta ton produksi perikanan tangkap laut di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan 0,6 juta ton di perairan darat. Produksi perikanan budidaya meningkat menjadi 17,3 juta ton, yang mencakup 6,9 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,4 juta ton rumput laut. Adapun produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,7 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukung penyelesaian infrastruktur tampungan air sebanyak 16 bendungan, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah satu alat pengelolaan perikanan berkelanjutan juga ditingkatkan luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4 persen dari total luas wilayah perairan yang meliputi 172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini berdampak positif pada membaiknya kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,3/100 (AKE, 2000 kkal/kapita/hari), dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat dari 41,1 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,7 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. Akses masyarakat ke sumber air minum yang layak meningkat menjadi 87,8 persen pada tahun 2018.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari Rasio Elektrifikasi (RE) yang telah mencapai 98,3 persen pada tahun 2018. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan *smartgrid*, dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Akses ke sumber energi lainnya, seperti gas, semakin diperluas. Sampai dengan tahun 2018, jaringan gas telah dibangun sebanyak 463.643 sambungan (kumulatif) untuk rumah tangga dan sepanjang 10.942,5 km (kumulatif) untuk pipa transmisi dan distribusi. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi yang ditunjukkan oleh realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) mencapai 60 persen dari produksi gas bumi pada tahun 2018.

Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian positif, pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Di dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya: (1) keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi masih perlu diperkuat; (2) kecukupan pasokan dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan, *stunting*, kemiskinan dan perbatasan perlu lebih difokuskan dalam pengelolaan pangan; dan (3) integrasi data produksi pangan strategis dengan realisasi impor.

Pengelolaan cadangan air masih perlu ditingkatkan. Meskipun cadangan air secara nasional masih dalam kategori aman, perhatian khusus perlu diberikan untuk cadangan air di Pulau Jawa yang sudah memasuki status langka, dan di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang sudah berstatus stres. Perbaikan juga perlu dilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurun sejak tahun 2015.

Di sisi sumber daya energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional masih perlu ditingkatkan. Konsumsi listrik nasional baru mencapai 1.064 kWh per kapita pada tahun 2018, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik negara-negara Eropa yang mencapai 5.000 kWh per kapita. Pemanfaatan EBT juga perlu ditingkatkan untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sampai dengan tahun 2018, porsi bauran EBT baru mencapai 8,6 persen, atau sekitar 2,5 persen (9,8 GW) dari potensi yang ada (441,7 GW).

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Industri nasional juga belum dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga masih bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persen dari total impor merupakan impor bahan baku dan bahan antara/pendukung industri pengolahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi hasilnya belum siginifikan. Salah satu upaya yaitu dengan menarik investasi untuk hilirisasi sumber daya alam di Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri terutama yang dibangun di luar Jawa.

Dari 21 KI/KEK prioritas di luar Jawa, sampai dengan tahun 2018 baru 8 KI/KEK yang sudah beroperasi, yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Bantaeng, KI Konawe, KI/KEK Palu, dan KI Morowali. Nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp.179,9 triliun dari 58 perusahaan PMA dan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnya masih menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yang kompetitif, dan rendahnya investasi.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan dan Nasional

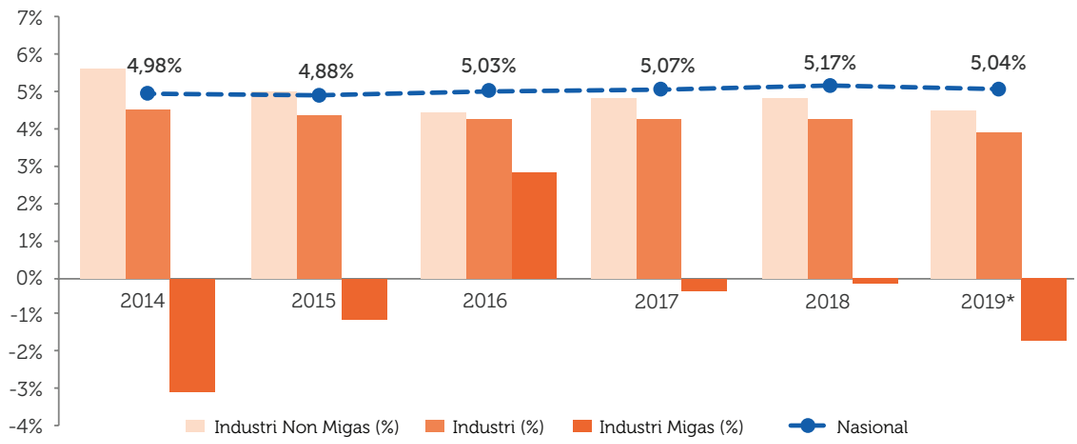

Keterangan: * Tiga triwulan pertama tahun 2019

Sumber: BPS, 2019 (diolah)

Kapasitas industri nasional untuk mengolah dan mengekspor produk bernilai tambah tinggi juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan nilai tambah industri nasional pada periode 2015-2019 masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan cenderung stagnan pada kisaran 20 persen dalam empat tahun terakhir. Ke depan, kinerja Industri nasional ditingkatkan.

Kinerja pariwisata serta ekonomi kreatif terus meningkat. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 19,3 miliar pada tahun 2018. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam, budaya dan buatan di Indonesia dari 9,4 juta pada tahun 2014 menjadi 15,8 juta pada tahun 2018. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara juga meningkat dari 251 juta pada tahun 2014 menjadi 303 juta pada tahun 2018. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen pada tahun 2015 menjadi 4,8 persen pada tahun 2018.

Kreativitas dalam pemanfaatan dan pemaduan sumber daya ekonomi dan budaya mendorong perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Beberapa indikatornya diantaranya pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang mencapai 5,1 persen pada tahun 2017, dengan kontribusi ekspor mencapai USD 19,8 miliar atau 11,8 persen dari total ekspor. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatif meningkat dari 15,5 juta orang pada tahun 2014 menjadi 17,7 juta orang pada tahun 2017. Capaian ekspor dan tenaga kerja ekonomi kreatif tersebut telah melampaui target-target dalam RPJMN 2015-2019.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (*Fintech*), namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Selama periode 2015-2019, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata dapat menciptakan sekitar 470.000 lapangan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa secara total, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta mencapai sekitar 11,9 juta dan pengangguran terbuka menurun dari 6,2 persen (2015) menjadi 5,3 persen (2019). Sektor jasa mampu menciptakan lapangan kerja tertinggi yaitu sekitar 12,6 juta orang tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap sekitar 3,7 juta orang. Di sisi lain, tenaga kerja di sektor pertanian menurun sekitar 4,4 juta orang. Proporsi pekerja formal juga meningkat dari 42,3 persen pada tahun 2015 menjadi 44,3 persen pada tahun 2019.

Selain penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia juga ikut mengisi pangsa pasar kerja luar negeri. Kontribusi nilai remitansi pekerja migran Indonesia mencapai USD 8,6 miliar hingga triwulan III 2019, yang berasal dari pekerja migran

Indonesia sejumlah 3,7 juta orang. Selama periode 2015-2019, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia yang mencapai 1,3 juta orang. Jumlah penempatan pekerja migran di sektor formal mencapai 648 ribu orang atau 50,4 persen, sedangkan informal mencapai 638 ribu orang atau 49,6 persen. Meskipun berstatus formal, sebagian besar pekerja migran Indonesia masih mengisi lapangan kerja berkeahlian rendah.

Daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97 persen. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Beberapa capaian pembangunan tersebut juga didukung dengan perbaikan tata kelola pembangunan. Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017. Peringkat EoDB turun menjadi 73 pada tahun 2018 dan 2019, meskipun skor *Distance to Frontier* (DTF), yaitu kedekatan jarak Indonesia dengan negara yang berkinerja terbaik dalam hal kemudahan usaha, meningkat dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018 dan 69,6 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain lebih cepat melakukan perbaikan. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif.

Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditunjukkan oleh peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp.545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.721,3 triliun pada tahun 2018. Porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) baru sebesar 45,6 persen, dan perlu terus ditingkatkan. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (56,2 persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan tersebut adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 proyek di KEK senilai Rp.10,8 triliun telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 proyek di KI senilai Rp.334,4 triliun.

Perbaikan dari sisi tata kelola pembangunan juga ditunjukkan dari peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi pondasi bagi analisis ekonomi dan dunia usaha untuk pembangunan ke depan. Perbaikan kualitas data produksi beras pada tahun 2018 menjadi basis bagi perbaikan kebijakan pangan. Perbaikan dan penyediaan data-data pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi juga dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasian dari pencapaian target-target pembangunan dan basis pengambilan kebijakan.

Seiring dengan proyeksi naiknya status menjadi *upper-middle income country*, Indonesia dapat lebih berperan aktif sebagai *key partners* bersama Tiongkok, Brazil, India dan Afrika Selatan dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Lingkungan dan Isu Strategis

Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa.

Terkait sumber daya energi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah menipisnya cadangan minyak dan gas. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru belum signifikan. Pada lima tahun terakhir, *Reserve Replacement Ratio* (RRR) minyak dan gas bumi rata-rata hanya sebesar 70,4 persen. Di sisi lain, pemanfaatan sumber energi terbarukan dan efisiensi dalam penggunaan energi perlu ditingkatkan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield*/ MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan

Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA lainnya seperti hutan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045.

Gambar 2.2
Proyeksi Keberlanjutan Hutan dan Air hingga 2045

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) tahun 2017 hingga tinggal 38% (71,4 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2045

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% pada tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan

Sumber: Perhitungan Bappenas

lndonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari pemanfaatan keanekaragaman hayatinya jika keberlanjutannya terus ditingkatkan. Pemanfaatannya dapat dilaksanakan melalui kegiatan *bioprospecting* untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, kosmetik, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan; sebagai contoh, fluktuasi harga beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) yang rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) dominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana, (2) tingginya biaya input produksi, (3) rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha, (4) sarana prasarana kelautan dan perikanan belum memadai, seperti pelabuhan perikanan, sistem pembenihan dan induk, sistem rantai dingin, pertambakan garam, serta sarana prasarana pendukung lainnya, (5) perizinan yang belum efektif dan efisien, (6) rendahnya integrasi hulu hilir perikanan dan persoalan rantai nilai produk, dan (7) degradasi ekosistem dan pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan laut.

Dalam pengelolaan perikanan dan kelautan, isu yang dihadapi adalah: (1) perlunya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (2) belum optimalnya produktivitas perikanan; dan (3) perlunya peningkatan harmonisasi tata ruang laut dan darat berupa penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZKSN/KSNT).

Berkaitan dengan sumber daya energi, isu yang dihadapi yaitu pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien. Selain itu, pemanfaatan batubara untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri belum optimal. Pemberlakuan DMO batubara dengan harga berbasis pasar dapat menjadi peluang untuk meningkatkan rasio cadangan produksi batubara dan pengembangan pembangkit EBT. DMO batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi lainnya yang perlu ditangani yaitu: (1) kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; (2) pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri; (3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; (5) konsumsi energi yang belum efisien, penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30 persen dari penggunaan energi saat ini; dan (6) belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.

Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang sempat terhenti akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998. Transformasi struktural saat ini juga masih berjalan lambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga menjadi rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kontribusi PDB industri pengolahan terus menurun menjadi 19,9 persen pada tahun 2018. Di sisi lain, pada tahun yang sama kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2 persen dan kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9 persen.

Gambar 2.3
Perbandingan Produktivitas di Berbagai Sektor

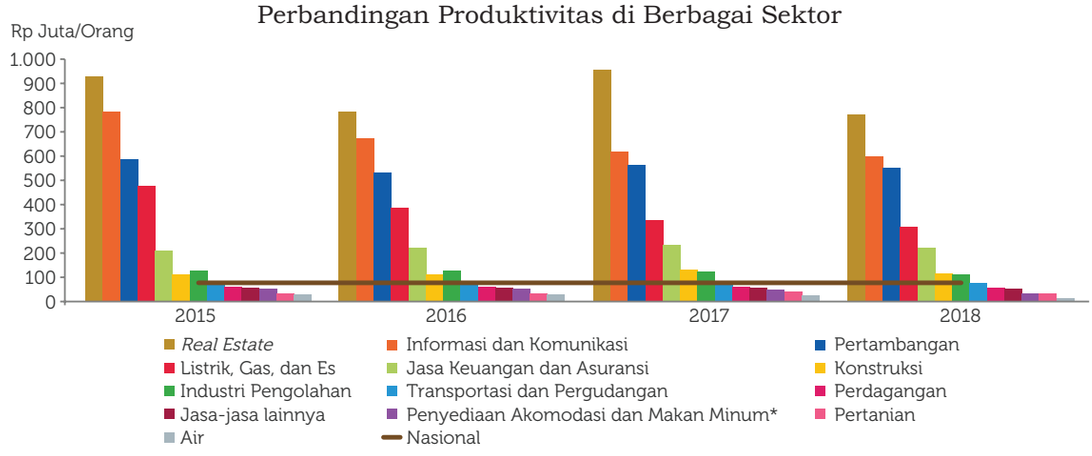

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sektor industri pengolahan, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan yang antara lain kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara.

Gambar 2.4
Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia 2015-2019

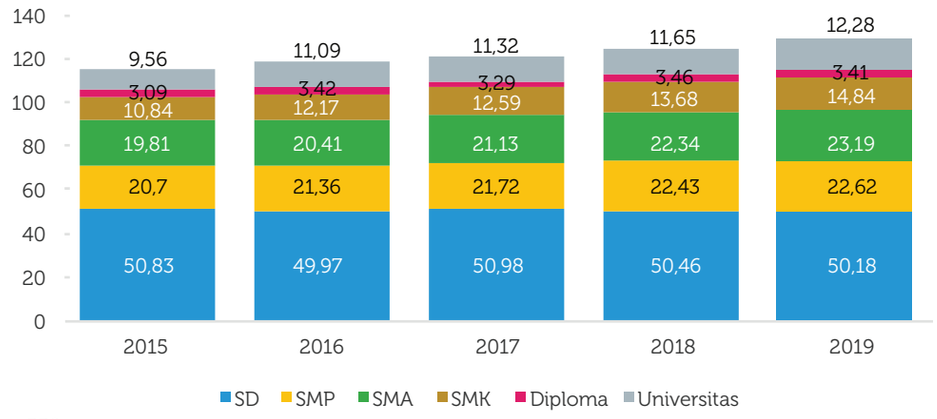

Sumber: BPS

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah. Tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah yaitu sebanyak 50,2 juta orang (39,7 persen). Sementara, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Lambatnya transformasi struktural di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen, atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam (93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen). Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekpor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan.

Rasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor komoditas menggambarkan tiga isu dalam struktur industri nasional yang perlu ditangani ke depan. Pertama, adanya disharmoni antara sektor hulu dan hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/nilai industri nasional sehingga daya saing industri nasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.

Gambar 2.5
Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Lain

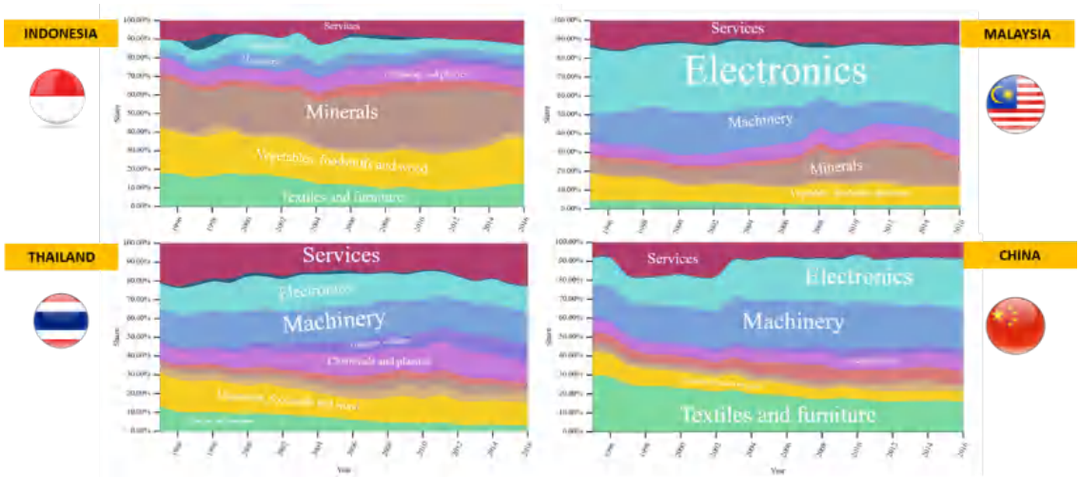

Sumber: Atlas of Economic Complexity, World Development Indicators (2016), dan Bank Dunia (2018)

Gambar 2.6
Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi

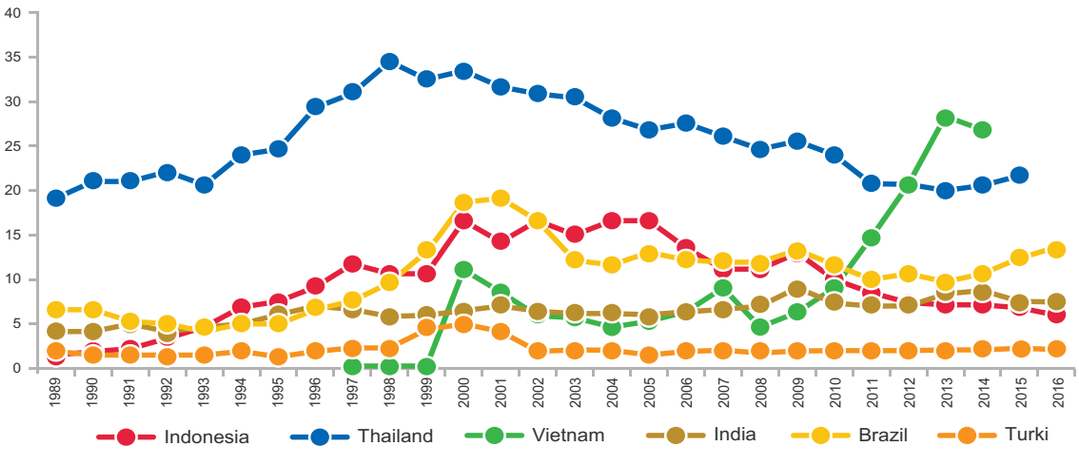

Sumber: Bank Dunia, diolah

Gambar 2.7
Keterkaitan Hulu-Hilir yang Menurun dalam 15 Tahun Terakhir

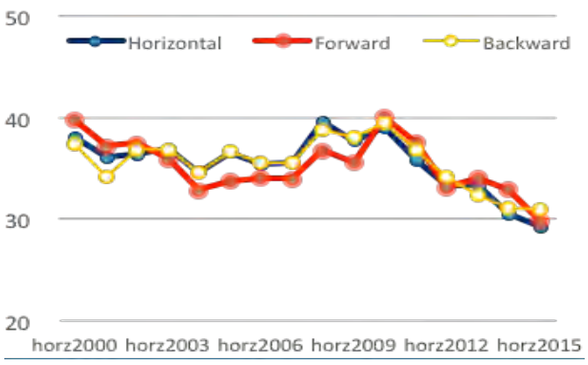

Sumber: Analisis Bappenas

Gambar 2.8
Pergeseran Investasi ke Sektor Tersier

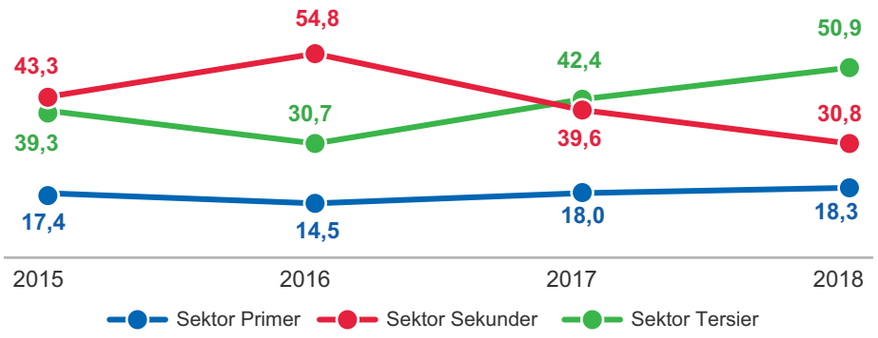

Sumber: BKPM, diolah

Ketiga, kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan kualitas investasi juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan persaingan usaha. Data *Global Competitiveness Index* (2019) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi industri di Indonesia - yang diukur melalui nilai dominasi pasar - masih cukup tinggi, yaitu 4,0. Angka ini menunjukkan bahwa industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Penumbuhan industri baru melalui investasi, dan kemudahan pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta pertumbuhan yang inklusif.

Upaya peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pariwisata, juga dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala: (1) belum terpadunya kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi; (2) belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri; (3) belum harmonisnya regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian dagang; dan (4) belum optimalnya penetrasi pasar Indonesia ke negara non tradisional.

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional (99,0 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya *hollow middle* yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas.

Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional.

Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirusahaan juga terus didorong. Namun, baru sekitar 7,0 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Sementara itu, tren perbaikan terdapat pada sisi kewirausahaan seperti ditunjukkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang sudah mencapai 3,3 persen pada tahun 2019. Kondisi ini ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Data *Global Entrepreneurship Monitor* (2017) menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kapasitas dan partisipasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan: (1) keyakinan masyarakat untuk berwirausaha, (2) kepemilikan usaha sendiri, (3) pandangan bahwa berwirausaha merupakan pilihan karir dan status sosial yang baik, dan (4) partisipasi perempuan untuk berwirausaha. Tren ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha.

Namun di sisi lain, terdapat tantangan yang cukup besar untuk menjamin keberlanjutan wirausaha. Minat berwirausaha tersebut belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar dan inovasi.

Gambar 2.9
Network Readiness Index Negara-negara di ASEAN

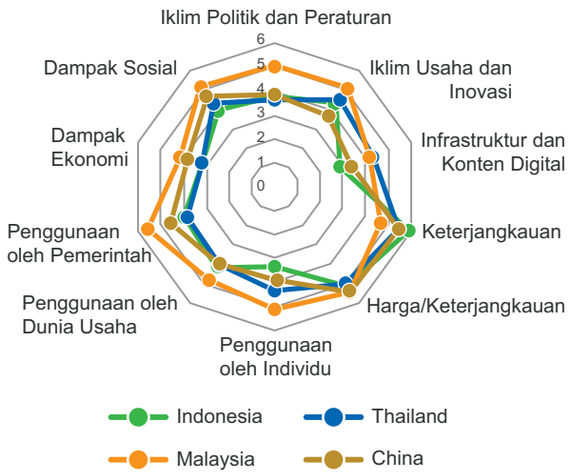

Sumber: *Global Information Technology Report*, World Economic Forum (2016)

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 di mana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

Sasaran, Indikator, dan Target

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Target-target yang akan diwujudkan secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (7.2.1*) (%)	8,6 [a]	menuju 23
		2. Intensitas energi primer (harga konstan 2010) (7.3.1*) (SBM/Rp.Miliar)	141 [b]	133,8
		3. Penurunan intensitas energi final (harga konstan 2010) (SBM/Rp.Miliar)	0,9 [b]	0,8
		4. Kapasitas terpasang pembangkit EBT (GW)	10,2 [b]	19,2
		5. Produksi gas bumi (juta SBM/hari)	1,1 [b]	1,2
		6. Pemanfaatan biofuel untuk domestik (juta kiloliter)	6,9 [c]	17,4
		7. *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara (juta ton)	120 [d]	187
		8. Alokasi pemanfaatan gas domestik (%)	64 [b]	68
		9. TKDN Sektor pembangkit EBT a. Surya (%) b. Bioenergi (%) c. Panas Bumi (%)	 40 [b] 40 [b] 30 [b]	 40 40 35
2	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Luas minimal kawasan berfungsi lindung (juta ha)	55	65
		2. Kawasan hutan produksi (juta ha)	33,7	36,0
		3. Peningkatan persentase irigasi premium (%)	12,3	16,4
		4. Pembangunan jaringan irigasi baru (ha)	1.000.000[e]	500.000
		5. Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (kumulatif) (m^3/ detik)	81,4	131,4
		6. Pembangunan bendungan multiguna (kumulatif) (unit)	45	63

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	86,4 b)	95,2
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/kapita/hari)	2.121 b)	2.100
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 b)	57
		4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU)	6,7 b)	5
		5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES)	5,8 b)	4
		6. Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ tahun)	50,7 c)	62
		7. Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 b)	14,6
		8. Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9 b)	11
		9. Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3 b)	316,3
		10. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 a) §	85-95
		11. Luas lahan Produksi beras biofortifikasi (ha padi)	195 §§	200.000
		12. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	480 ton §§§	100% penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
		13. Persentase pangsa pangan organik (%)	2	20
		14. Penggunaan benih bersertifikat (%)	53	80
		15. Ketersediaan beras** (juta ton)	38,4 b)	46,8
		16. Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,4 b)	2,9
		17. Produksi jagung (juta ton)	24,8 b)	35,3
		18. Produksi daging (juta ton)	3,8 b)	4,9
		19. Produksi umbi-umbian (juta ton)	23,3 b)	25,5
		20. Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	65 b)	80-95
		21. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp.juta/tenaga kerja)	46,9 b)	59,9
		22. Nilai tukar petani	100 a)	105
		23. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50 b)	100

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		24. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak [b)]	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak
		25. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (aksesi)	4.250 [b)]	4.250
		26. Global food security index	62,6	69,8
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1. Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan WPP	11 WPP	11 WPP
		2. Model percontohan penguatan tata kelola WPP (14.2.1(b))	3 WPP	11 WPP
		3. Luas kawasan konservasi laut/ perairan (14.5.1*) (juta ha)	22,7	26,9
		4. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24 RZ	102 RZ (kumulatif)
		5. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000 ($km^{2)}$)	5.689	50.000
		6. Produksi ikan (juta ton)	14,8 [b)]	20,4
		7. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	53,6 [a)]	≤ 80
		8. Produksi rumput laut (juta ton)	9,9 [b)]	12,3
		9. Produksi garam (juta ton)	2,8 [b)]	3,4
		10. Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp.triliun)	2,8 [c)]	4,2
		11. Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	5	15
		12. Kawasan klaster sentra produksi perikanan budidaya unggulan	10	50
		13. Nilai tukar nelayan	100 [f)]	107
		14. Nilai tukar pembudidaya ikan	100 [f)]	105
		15. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	93,5 [c)]	98

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	1. Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,3 [g]	3,9
		2. Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	57,2 [a]	65
		3. Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,1 [a]	5,5
		4. Proprosi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%)	8,1 [a]	11
		5. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%)	24,7[c]	30,8
		6. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)	19,7[c]	22
		7. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM (9.3.2*) (%)	2,4	5
		8. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi (%)	50,4[c]	80
		9. Nilai penyaluran KUR (Rp. Triliun)	140	325
		10. Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit)	0	500 (kumulatif)
		11. Pertumbuhan wirausaha (%)	1,7 [g]	4
		12. Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra)	22 (kumulatif)	30 (kumulatif)
		13. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas (9.3.1*) (%)	18,5	20
		14. Kontribusi usaha sosial (% PDB)	1,9	2,5
		15. Penumbuhan *start-up* (unit) [h]	748	3.500 (kumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	3,9 [c]	8,1
		2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	4,5 [c]	8,4
		3. Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	19,9 [a]	21,0
		4. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	17,6 [a]	18,9
		5. Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,5 [c]	4,1
		6. Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)	5,2 [b]	6,8
		7. Pertumbuhan PDB Perkebunan (%)	4,9 [c]	5,0
		8. Peningkatan Produksi Kakao (%)	1,7 [b]	2,7
		9. Peningkatan Produksi Kopi (%)	1,4 [b]	1,5
		10. Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	5,7 [b]	6,0

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		11. Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,8 c)	6,0
		12. Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5 i)	5,7
		13. Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5 i)	3,1
		14. Peningkatan Produksi Florikultura (%)	5,0 i)	5,5
		15. Kontribusi PDB kemaritiman (%)	6,0 j)	7,8
		16. Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,2 a)	8,7
		17. Produksi kayu terutama dari hutan produksi (juta m^3/tahun)	45	60
		18. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	4,8 k)	5,5
		19. Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas (destinasi)	4 (kumulatif)	10 (kumulatif)
		20. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	9	25 (kumulatif)
		21. Destinasi wisata *global geopark* (*global geopark*)	4	12 (kumulatif)
		22. Destinasi wisata bahari (destinasi)	6	6 (kumulatif)
		23. Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	989 j)	1.846
		24. Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (kab/kota)	20	20 (kumulatif)
		25. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan (lokasi)	N/A	11
		26. Revitalisasi ruang kreatif (unit)	39	154 (kumulatif)
		27. Kontribusi ekonomi digital (%)	2,5 a)	4,7
		28. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (%)	9,3 c)	11,2
		29. Nilai transaksi *e-commerce* (Rp Triliun)	170 a)	600
		30. Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,5	2,6-3,0
		31. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (%)	3,0-4,0	3,7-4,5
		32. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,9 g)	22,5
		33. Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	14,9 g)	15,7
		34. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	13	15
		35. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19 l)	21
		36. Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran (10.7.2(b)) (%)	57	70
		37. Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,7c)	8,4

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		38. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: a. jumlah prosedur b. waktu (hari)	73 11 13	Menuju 40 5 4
		39. Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	792,0 [b]	1.500
		40. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	47,1 [c]	49,5
		41. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	198,0 [b]	782,0
		42. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	45,1 [c]	49,7
		43. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bertahap	Selesai
		44. Belanja modal (*Capex*) BUMN (Rp Triliun)	488 [d]	680
		45. Profitabilitas BUMN (Rp Triliun)	171 [b]	325
		46. Pembentukan holding BUMN (*holding*)	1	3
		47. Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri (negara)	30 [b]	54
		48. Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi (KI)	8 (kumulatif)	9 (kumulatif)
		49. Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan (KI)	15 (kumulatif)	18 (kumulatif)
		50. Fasilitas percepatan pembangunan smelter di luar Jawa (unit)	2	31 (kumulatif)
		51. Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik: industri halal (kawasan)	N/A	3 (kumulatif)
		52. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	N/A	10
		53. Indeks persepsi persaingan usaha	4,7	5,0
		54. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan (%)	3	20
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	1. Neraca perdagangan (USD Miliar)	-3,1 [l] [m]	15,0
		2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-1,2 [c] [m]	6,2
		3. Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-5,7 [l] [m]	9,8
		4. Ekspor hasil pertanian (FOB) (US$ Miliar)	3,2 [l] [n]	5,5
		5. Ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	4,4 [l] [o]	8,0
		6. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-3,6 [l] [p]	10,1
		7. Nilai ekspor produk industri pengolahan (USD Miliar)	115,7 [l] [p]	183,4

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		8. Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi (9B.1) (%)	10,7 c) q)	13,0
		9. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (BoP) (%)	2,6 j)	3,0
		10. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD Miliar)	19,3 a)	30
		11. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,3	22,3
		12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (*cultural heritage regeneration*) (lokasi)	N/A	20 (kumulatif)
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD Miliar)	19,8 j) s)	24,5
		14. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43,3	50
		15. Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	6.097	8.400
		16. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (8.9.1(b) (juta perjalanan)	303,4 a)	350-400
		17. Jumlah promosi *Tourism, Trade and Investment* (TTI) terintegrasi	6	8
		18. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	71	98
		19. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	84	94
		20. Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4	4
		21. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (%)	5	5
		22. PTA/FTA/CEPA yang disepakati	14 (kumulatif)	40 (kumulatif)
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,2 c)	4,4
		2. Rasio M2/PDB (%)	38,9 a)	43,2
		3. Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (unit)	54,0 t)	57,5
		4. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (unit)	15,6 t)	15,3
		5. Skema pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis HKI	N/A	1
		6. Biaya logistik terhadap PDB (%)	23,2	20
		7. Skor *logistic performance index*	3,1 a)	3,5
		8. Tingkat Inflasi (%)	2,7	2,7
		9. Inflasi pangan bergejolak (%)	4,3	3,1

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (orang)	8.500	43.000 (kumulatif)
		11. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 (perusahaan)	24	60 (kumulatif)
		12. Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	28	71
		13. Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development* (12.b.1) (lokasi)	12	22
		14. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	40	29-34 [u]
		15. Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%)	9,6 [v]	10,7-12,3
		16. Imbal Hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara (%)	7,3***	Menurun
		17. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,4	20,6
		18. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) (%)	0	Selesai
		19. Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (*database*)	3	3
		20. Ketersediaan data statistik *e-commerce* (*database*)	1	1
		21. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (*database*)	2	2

Keterangan:
Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs
* Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs)
** Mencakup produksi nasional dan stok beras di pemerintah dan non pemerintah
*** Angka *Yield* SBN Tenor 10 Tahun (data IBPA pada 31 Desember 2019
§ Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target
§§ Uji coba benih biofortifikasi
§§§ Uji coba beras fortifikasi

[a] Capaian tahun 2018; [b] Prognosa/estimasi tahun 2019; [c] Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019; [d] Target tahun 2019; [e] Capaian tahun 2015-2019; [f] Angka dasar tahun 2018; [g] Sakernas Agustus tahun 2019, diolah; [h] Jumlah kumulatif *start-up* yang difasilitasi oleh Bekraf, Kemenkominfo, dan Kemenristekdikti; [i] Rata-rata 2015-2018; [j] Capaian tahun 2017; [k] Prognosa/estimasi tahun 2018; [l] Capaian hingga 11 bulan pertama tahun 2019; [m] Sumber BPS; [n] Sumber BPS, realisasi per November 2019 menggunakan pengelompokkan sesuai Kementan; [o] Sumber BPS, realisasi per November 2019 menggunakan pengelompokkan sesuai KKP; [p] Sumber BPS, realisasi per November 2019 menggunakan pengelompokkan sesuai Kemenperin; [q] Sumber BPS, realisasi per September 2019 menggunakan pengelompokkan sesuai Kemendag; [r] Sumber BI; [s] Sumber BPS, realisasi tahun 2017 menggunakan pengelompokkan sesuai Kemenparekraf; [t] Capaian hingga 10 bulan pertama tahun 2019; [u] Sasaran tahun 2025, TTCI terbit biennial/dua tahun sekali; [v] Realisasi sementara tahun 2019.

Arah Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi: (1) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (4) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (5) mengembangkan industri pendukung EBT.

Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batu bara difokuskan pada: (1) pemanfaatan dalam negeri baik sebagai sumber energi maupun bahan baku industri untuk meningkatkan nilai tambah; dan (2) peningkatan industri pengolahan batubara menjadi gas untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Pengembangan bahan bakar nabati dilaksanakan secara bertahap, melalui produksi biodiesel dan *greenfuel*. Kapasitas produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri melalui integrasi dengan sektor lain. Pola penyediaan energi terintegrasi difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. Peningkatan penyediaan listrik juga diupayakan dengan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan.

Pengembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.

(ii) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (6) mengembangkan waduk multiguna.

Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas yang difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan terluar; pulau kecil terluar; perkotaan; kawasan strategis (KI, KEK, KSPN); kawasan pantai utara Pulau Jawa; dan wilayah rawan air. Nilai produktivitas air dapat ditingkatkan melalui efisiensi penggunaan air, terutama dalam pertanian.

Infrastruktur dengan nilai ekonomi tinggi, seperti bendungan diharapkan dapat memberikan layanan maksimal. Selain pemenuhan kebutuhan air baku, bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi, reduksi banjir, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani.

(iii) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan anak sekolah. Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak, ikan dan komoditas pangan strategis, serta penyediaan input produksi diantaranya sistem perbenihan nasional, pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, pupuk organik asal rumput laut, serta pengembangan koridor pangan dan pertanian berbasis korporasi petani di Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru menjadi fokus pelaksanaan dari strategi kedua. Strategi ketiga mencakup penguatan basis data petani dan nelayan, pembentukan korporasi petani dan nelayan, asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan asuransi usaha budidaya ikan, pembiayaan inklusif, pelatihan dan penyuluhan. Strategi keempat mencakup pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, *lowland*, *upland*, dan lahan kering, efisiensi air, jalan produksi sepanjang 9.500 km, jalan usaha tani sepanjang 3.500 km, pengembangan kawasan budidaya perikanan didukung sistem pengairannya, pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak. Strategi kelima mencakup penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis termasuk ikan, *platform* pangan dan pertanian berbasis data *driven*, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan (*urban food*) serta pengelolaan limbah pangan (*food waste*).

Pengelolaan sumber daya pangan difokuskan pada: (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan (2) daerah yang rawan pangan, rentan kelaparan dan *stunting*, serta daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

(iv) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan *database* kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).

Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi. Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang berskala ekonomi dan berkelanjutan, eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), pengembangan perikanan berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. Strategi keempat mencakup kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju, pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Selain itu terus ditingkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Komoditas udang dikembangkan di Sumatera, NTB, Jawa, dan Sulawesi. Komoditas nila dikembangkan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Komoditas rumput laut dikembangkan di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Kalimantan. Selanjutnya, sentra garam dikembangkan di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui: (1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas; (2) inkubasi usaha; (3) penguatan kapasitas layanan usaha; (4) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan (5) penyediaan insentif fiskal. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM

Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan: (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

(ii) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.

Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (1) peningkatan produktivitas; (2) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (4) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (5) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (6) penguatan jasa industri; (7) penguatan penerapan manajemen industri modern; (8) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (9) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian difokuskan pada: (1) industri pengolahan hulu agro, kimia dan logam; dan (2) industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Pelaksanaannya juga didukung oleh harmonisasi dan sinergi kebijakan antara sektor primer, sekunder dan tersier.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan *agroforestry*. Khusus untuk industri pengolahan perikanan dan hasil laut, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui perbaikan kualitas, kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah, penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI), penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional, penguatan *branding* produk perikanan Indonesia, dan pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital.

Pelaksanaan industrialisasi yang berbasis investasi juga disinergikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM. Sinergi ini diwujudkan dalam kemitraan usaha hulu hilir dengan usaha-usaha rakyat dalam

bentuk sentra IKM, termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola koperasi, usaha perdesaan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan *Aerospace*, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni. Selain itu, terdapat 18 KI (KI Ladong, KI Kuala Tanjung, KI Tanjung Buton, KI Tenayan, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, KI Brebes, KI Madura, KI Sumbawa Barat, KI Batanjung, KI Jorong, KI Batulucin, KI Tanah Kuning, dan KI Takalar) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Dukungan untuk KI juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri.

Khusus kawasan industri di pantai utara Jawa, termasuk KI Brebes dan KI Madura, akan diintegrasikan dengan dukungan konektivitas, serta pasokan energi dan SDM yang memadai. Dukungan ini diharapkan menurunkan biaya, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan.

Hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan *smelter* akan difokuskan pada hasil tambang nikel (22 *smelter*), bauksit (5 *smelter*), besi (2 *smelter*), timbal (1 *smelter*) dan tembaga (1 *smelter*).

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Fokus utama pengembangan yaitu percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai. Pengembangannya akan difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Revitalisasi Bali juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung.

Pengembangan 8 destinasi pariwisata difokuskan pada peningkatan kesiapannya untuk menampung peningkatan kunjungan wisatawan. Kedelapan destinasi pengembangan tersebut mencakup: Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih. Revitalisasi destinasi diarahkan pada Bali yang dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan daya dukungnya.

Jenis pariwisata yang akan ditingkatkan diversifikasi mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*,

wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition*/MICE, *yacht and cruise*, wisata kebugaran/*wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, penataan kota sebagai *service hub* pariwisata, penataan kawasan perdesaan untuk mendukung pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Terkait destinasi pariwisata yang akan dikembangkan, akan mencakup 25 destinasi ekowisata berbasis Kawasan Hutan Prioritas, 16 taman bumi (*Geopark*), serta 6 wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan.

Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui: (1) pendampingan dan inkubasi; (2) pengembangan *center of excellence*; (3) fasilitasi inovasi dan penguatan *brand*, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif, klaster/kota kreatif dan *Be Creative District* (BCD); (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6) penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital ke depan difokuskan pada 8 klaster kreatif di Jawa, Bali, Medan dan Makassar. Sektor yang diperkuat yaitu kuliner, *fashion*, kriya, aplikasi dan konten digital, *e-sport* dan *games*, film, dan musik. Perluasan aktivitas ekonomi kreatif dilaksanakan secara bertahap di wilayah lain yang memiliki potensi nilai tambah yang besar.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; (2) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (3) reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;

(4) penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan (5) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan *holding* BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peningkatan industri halal dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup: (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) pengembangan industri halal; (3) pembentukan suatu badan pengembangan ekonomi syariah (komite nasional ekonomi dan keuangan syariah); (4) pelaksanaan rencana induk ekonomi dan keuangan syariah; dan (5) penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(iii) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor akan difokuskan pada: (1) peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi; (2) peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan kapasitas dari pelaku sektor jasa dalam negeri berdasarkan peta kompetensi, harmonisasi regulasi sektor jasa, serta penyediaan statistik perdagangan jasa; (3) penguatan *platform* informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral; (4) pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor, termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan *start-up* teknologi untuk memasok produk dan jasa ke pasar internasional; dan (5) fasilitasi peningkatan daya saing *brand* barang dan jasa Indonesia.

Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor didukung diantaranya dengan pembiayaan ekspor dan impor, serta penguatan skema kerja sama *business-to-business*. Perluasan pasar ekspor mencakup kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Pelaksanaan strategi pengelolaan impor disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN serta penggunaan produk dalam negeri. Sinergi kedua strategi ini didukung dengan pengembangan pemasok komponen, serta peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah. Promosi pariwisata melalui berbagai *event* dan kemudahan akses perjalanan di dalam negeri diharapkan meningkatkan pilihan wisatawan nusantara untuk berwisata di dalam negeri sehingga impor jasa dapat dikelola lebih baik.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor, serta pengelolaan impor juga dilaksanakan secara sinergi dengan peningkatan partisipasi di rantai produksi global antara lain dengan memberikan insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Sinerginya diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kerja sama investasi di dalam negeri (*inbound*), serta diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi di negara tujuan ekspor (*outbound*). Pelaksanaannya membutuhkan peran aktif dan kerjasama dengan aktor non-pemerintah. Selain itu, peningkatan ekspor juga dilaksanakan melalui pendekatan fasilitasi bahan baku impor untuk tujuan ekspor.

Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata difokuskan pada inovasi dan keterpaduan pemasaran, serta penguatan *nation branding*. Berbagai ajang promosi pariwisata akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi.

Berbagai strategi tersebut didukung oleh optimalisasi kerja sama ekonomi dan diplomasi ekonomi, baik secara bilateral, multilateral dan regional. Salah satu langkah konkrit yaitu melalui penguatan perwakilan pariwisata, perdagangan dan investasi di luar negeri, promosi terintegrasi, dan memperluas partisipasi aktif Indonesia di organisasi dan inisiatif internasional seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *World Trade Organization* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Belt Road Initiatives* (BRI), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta kerja sama regional/sub-regional lainnya. Pelaksanaannya membutuhkan reformasi tata kelola dan kebijakan pemerintahan dalam rangka mencapai standar yang berlaku dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang disepakati dan direkomendasikan.

(iv) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan: (1) peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan); (2) perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi; (3) pengembangan infrastruktur sektor keuangan; (4) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan di dalam negeri; dan (5) harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap pada lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor

pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan.

Penguatan sistem logistik difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Pelaksanaannya dilengkapi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi distribusi dan logistik, diantaranya: Pusat Logistik Berikat, pengembangan *National Logistic Ecosystems*, serta peningkatan kualitas pasar rakyat melalui perbaikan tata kelola, penerapan SNI pasar dan pemanfaatan teknologi digital. Perbaikan sistem logistik juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW).

Pelaksanaan strategi penerapan praktik berkelanjutan di sektor industri dan pariwisata merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SDG ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fokus pelaksanaannya yaitu penerapan Standar Industri Hijau/SNI/ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan, serta sertifikasi praktik pariwisata berkelanjutan. Sertifikasi pariwisata berkelanjutan meliputi pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, peningkatan aktivitas ekonomi untuk masyarakat sekitar, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung serta pelestarian lingkungan.

Strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien.

Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal.

Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Optimalisasi PNBP dilakukan dengan penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP, serta pengembangan PNBP-*earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan subsidi ditujukan untuk meningkatan efektivitas dan efisiensi melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran. Reformasi fiskal juga diarahkan untuk

memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan pembiayaan, reformasi fiskal ditempuh dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada: (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (5) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (6) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

BAB III

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Pendahuluan

RPJPN 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah secara spasial adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Peta Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan. Rincian wilayah koridor pertumbuhan dan pemerataan dapat dilihat pada Lampiran 4.

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

Saat ini sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 60,1 persen dan Pulau Sumatera sebesar 21,6 persen terhadap PDB nasional. Ketimpangan antarwilayah pulau masih sangat tinggi sedangkan ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau bervariasi, dimana yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Demikian pula ketimpangan antardesa-kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Tabel 3.1
Rata-rata Kontribusi Setiap Pulau terhadap PDB Nasional (%)

No	Indikator	Capaian 2018	Target 2019
1	Papua	1,9	1,7
2	Maluku	0,5	0,5
3	Nusa Tenggara	1,5	1,5
4	Sulawesi	6,2	6,3
5	Kalimantan	8,2	8,1
6	Sumatera	21,6	21,3
7	Jawa-Bali	60,1	60,6

Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah
Keterangan:
* Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada 2015-2019 dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 Wilayah Metropolitan (WM), 11 kota baru dan 15 KEK. Sampai dengan akhir 2018, 2 WM telah dalam tahap legalisasi (Surabaya, Jakarta), 2 WM dalam tahap penyusunan Rperpres (Manado dan Banjar), dan 1 WM dalam tahap penyusunan materi teknis (Palembang). Investasi untuk infrastruktur perkotaan diarahkan pada 10 WM tersebut. Untuk KEK, sampai dengan akhir 2018, 11 KEK telah operasional dan telah dilengkapi infastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK. Namun, masih diperlukan industri jangkar (*anchor industries*) untuk memastikan industri hilir beroperasi dan investasi di dalam kawasan meningkat.

Capaian Tahun 2015-2019

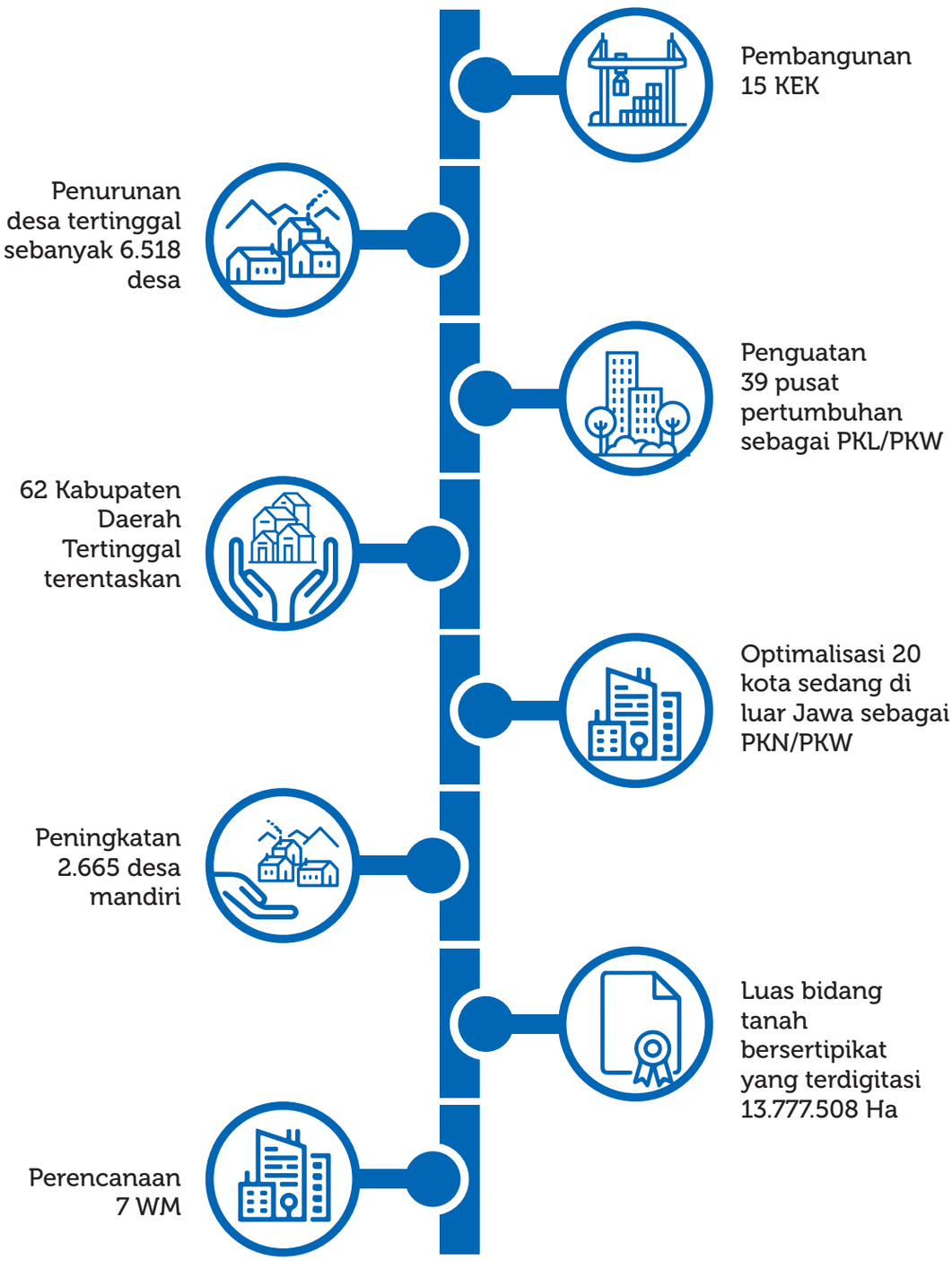

Lingkungan dan Isu Strategis

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 3.2
Isu-isu Strategis Wilayah

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Williamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1.137,3	26,34	4,2	0,15
2	Maluku	402,2	13,21	7,6	0,08
3	Nusa Tenggara	1.882,3	17,94	3,3	0,19
4	Sulawesi	2.009,9	10,23	4,9	0,17
5	Kalimantan	974,2	5,93	5,0	0,69
6	Sumatera	5.851,1	10,03	5,2	0,48
7	Jawa Bali	12.886,9	8,31	5,8	0,73

Keterangan:
* Susenas, 2019, diolah Bappenas
** BPS, 2018, diolah Bappenas
*** BPS, 2017, diolah Bappenas

Faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai oleh: (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (11 telah operasional dari 15 KEK, 5 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal, ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk *urban*, hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Hal ini berbeda bila dibanding Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rata-rata mencapai 2,7 persen PDB. Dalam tahun 2010-2018 jumlah penduduk perkotaan Indonesia meningkat sebesar 27 juta dengan laju pertumbuhan 2,5

persen. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini dapat dilihat, misalnya, di DKI Jakarta, yang mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, penurunan kualitas air sungai (96% tercemar berat), dan kerugian akibat kemacetan (Rp 65 triliun per tahun). Selain itu, WM Jakarta masih harus menampung populasi sebesar 32,8 juta jiwa (BPS, 2017), tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, WM Jakarta berkontribusi 20,9 persen terhadap PDB Nasional (BPS, 2018), menunjukkan dominasi WM Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Faktor penyebab lainnya adalah masih rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (1) cakupan peta dasar pertanahan baru 49,05 persen; (2) cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (3) dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018); (4) sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan; belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan; terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, permasalahan pembangunan wilayah pulau yang menyebabkan ketimpangan dan perlu diatasi lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Papua masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus Papua, (b) terbatasnya pelayan dasar, belum kuatnya kapasitas pemerintahan daerah, (c) belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; (d) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam; (e) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

2. Pembangunan Wilayah Maluku masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam dan pengembangan industri kecil menengah; (c) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Maluku; (d) belum optimalnya pembangunan infrastruktur; dan (e) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.

3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (c) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Nusa Tenggara; (d) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan; (e) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah; dan (e) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

4. Pembangunan Wilayah Sulawesi masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (b) belum terwujudnya pengembangan hub internasional untuk Kawasan Timur Indonesia; (c) masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana; (d) masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar; (d) belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan untuk mendukung peran Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional; (e) belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola kawasan metropolitan; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

5. Pembangunan Wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (b) masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan, serta banjir; (c) tingginya ancaman kerusakan hutan yang mengakibatkan terancamnya peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (d) belum optimalnya peran daerah perbatasan; (e) menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

6. Pembangunan Wilayah Sumatera masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam; (b) belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antarwilayah; dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa; (c) belum optimalnya pengelolaan dan kualitas belanja APBD dan dana Otonomi Khusus Aceh; (d) masih tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara; (e) belum adanya pusat perdagangan komoditas (*trading house*) yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur perekonomian lokal; (f) belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri; (g) masih

terdapatnya praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal; (h) tingginya potensi konflik pada kawasan perbatasan Natuna, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan (i) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai khususnya pulau-pulau di perbatasan negara, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perdesaan dan perkotaan.

7. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali masih menghadapi permasalahan: (a) tingginya eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan budidaya dan kawasan lindung seperti kawasan karst yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati; (b) semakin berkurangnya ketersediaan dan pasokan air yang tidak sebanding dengan permintaan; (c) tingginya perubahan konversi lahan pertanian pangan beririgasi teknis yang mengancam peran Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional; (d) tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tingginya potensi ancaman bencana; dan (e) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

Sasaran, Indikator, dan Target

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera". Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan tersebut dan sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 rata-rata sebesar 6,0 persen pertahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran wilayah pulau pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Target Pembangunan Wilayah Tahun 2024

Wilayah Pembangunan	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2020-2024	Kontribusi (*Share*) Ekonomi Regional (% per PDRB) 2024	Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun) 2024	Tingkat Kemiskinan (%) 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2024
Papua	6,6	2,1	41,1	18,2	2,5
Maluku	7,3	0,6	18,8	9,0	4,6
Nusa Tenggara	6,0	1,5	19,9	12,1	2,1
Sulawesi	7,6	7,0	110,7	7,2	3,5
Kalimantan	6,7	8,8	143,1	3,7	3,4
Sumatera	6,0	20,9	251,1	7,1	3,6
Jawa-Bali	5,9	59,2	742,4	6,2	4,1

*Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019

Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Kewilayahan

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2019	2024
Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.			
A. Pengembangan Kawasan Strategis			
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	N/A	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		
	a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	14 kawasan	18 kawasan
	b. Kawasan Industri (KI)	8 KI (kumulatif)	27 KI (kumulatif)
	c. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	3 destinasi	10 destinasi
B. Pengembangan Sektor Unggulan			
1	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun		
	a. Kelapa Sawit (%)	8,6	6,0
	b. Kelapa (%)	0,0	0,5
	c. Kakao (%)	0,4	2,7
	d. Kopi (%)	3,4	1,5
	e. Karet (%)	3,1	1,9
	f. Tebu (%)	7,6	8,0
	g. Lada, Pala, dan Cengkeh (%)	0,0	1,0
	h. Perikanan Budidaya (ikan dan rumput laut) (%)	0,4	5,3
	i. Perikanan Tangkap (%)	5,0	5,9
C. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	3 WM	3 WM [f)]
2	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	N/A	6 WM [f)]
3	Jumlah wilayah metropolitan Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	N/A	4 WM [f)]
4	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	0	5.600 [f)]
5	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	N/A	52 [g)]
6	Pembangunan kota baru	N/A	4 kota baru [f)]

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2019	2024
D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi			
1	Perkembangan status pembangunan desa (desa)[a)]		
	a. Desa Mandiri	1.444	10.559
	b. Desa Berkembang	54.291	59.879
	c. Desa Tertinggal	19.152	3.232
2	Penurunan angka kemiskinan desa (%)	12,9	9,9
3	Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	187	222
	a. Bumdes Berkembang	5.000	10.000
	b. Bumdes Maju	600	1.800
4	Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status		
	a. Bumdes Bersama Berkembang	200	300
	b. Bumdes Bersama Maju	120	200
5	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222
6	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN	0,42	0,52
7	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	37 (terentaskan 25 kabupaten)
8	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	26,1 (2018 25,5 (2019) [b)]	23,5 – 24
9	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,11 (2018) 58,82 (2019) [b)]	62,2 – 62,7
10	Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN) [c)]	51,10	58,70
11	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	48,74	57,50
Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (Kab/Kota)	313	542
2	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas (Kab/Kota)	102	542
3	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (Kab/Kota)	102	542
4	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	36

No	Indikator Pembangunan	*Baseline* 2019	2024
5	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	200	542
6	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	10	58
7	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)	N/A [d)]	100
8	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,8	3,2
9	Jumlah daerah dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) kategori baik (Provinsi)	NA [e)]	34
10	Jumlah pelaksanaan kebijakan (regulasi) pada daerah otonomi khusus dan daerah istimewa	1 regulasi	2 regulasi
11	Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 (Nomor Lembar Peta/NLP)	5.013	125.810 (seluruh wilayah Indonesia non hutan)
12	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Rancangan Perpres)	10	18
13	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	10 Rancangan Perpres
14	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	37 [h)]	250
15	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (juta Ha)	13,78	52,12
16	Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	0	34 Kantor Wilayah ATR/ BPN dan 467 Kantor Pertanahan
17	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1 Bank Tanah

Keterangan:
a) Jumlah desa berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2019. Terdapat perubahan metode perhitungan status desa dari Indeks Pembangunan Desa (2014 dan 2018) menjadi Indeks Desa. Terdapat 66 desa yang tidak memiliki nilai Indeks Desa
b) Estimasi capaian tahun 2019
c) Capaian tahunan akan dihitung berdasarkan rata-rata capaian Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan; KPPN Klungkung dihitung berdasarkan IPD
d) Data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia. Data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%
e) Indikator baru 2020-2024
f) Proyek K/L dan Indikator dapat dilihat pada Matriks PN 2 KP 3
g) Sesuai dengan Tabel 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, dan 7.3 pada Buku Lampiran Bab 3 Per Pulau; Proyek K/L dan Indikator dapat dilihat pada Matriks PN 2 KP 3
h) Capaian kumulatif 2015-2019

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antarkementerian/lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antarpemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Gambar 3.2
Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi

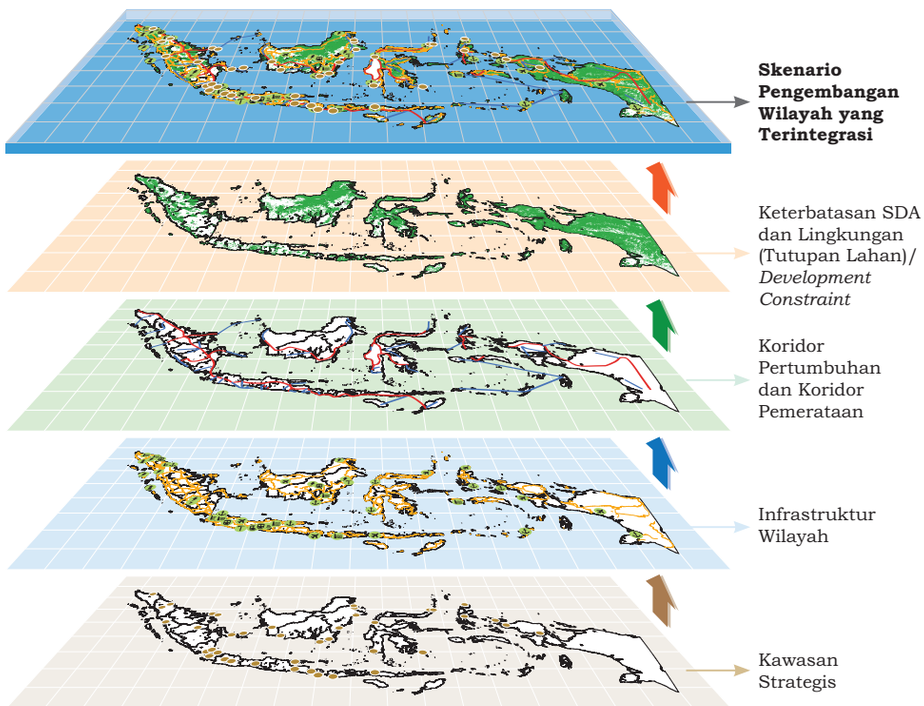

Dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kedepan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasiskan wilayah pulau (Gambar 3.1). Pendekatan koridor tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan PDRB tahun 2017, serta mempertimbangkan jalur manufaktur nusantara, jalur mineral nusantara, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*). Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

Gambar 3.3
Alur Pikir Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah

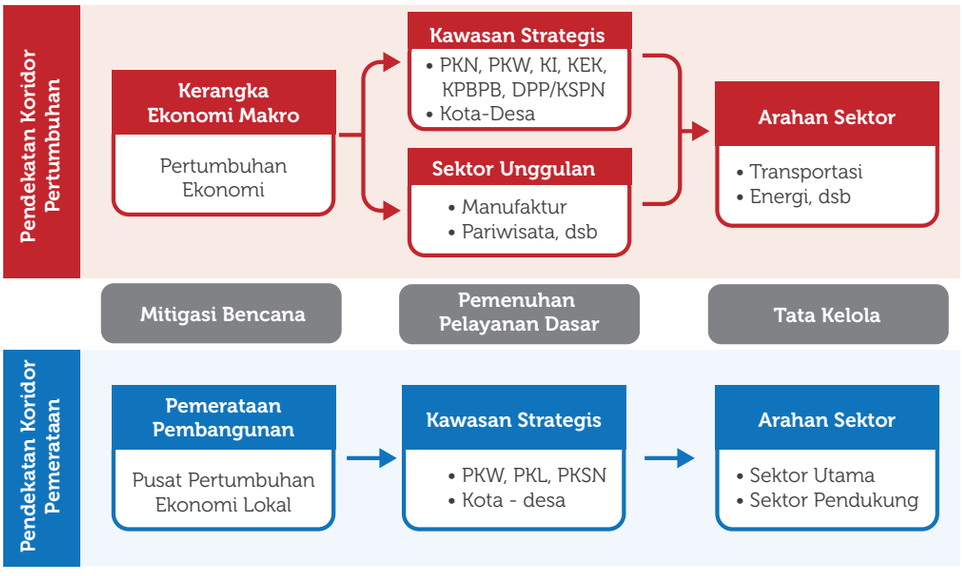

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan**, yaitu:
   a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi,

melalui: (i) perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; (ii) penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; (iii) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut dan udara; (iv) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; (v) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan; (vi) meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta (vii) pemenuhan hak-hak transmigran sesuai mandat regulasi yang berlaku.

b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui: (i) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional; dan (ii) pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan yaitu:

a. Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan antara lain melalui: (i) penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (ii) pembangunan smelter pada kawasan potensial dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); (iii) penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; (iv) pelayanan perijinan dan investasi yang cepat; (v) penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung; (vi) pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha; (vii) penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis; serta (viii) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global.

Gambar 3.4
Persebaran Sentra Hilirisasi Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

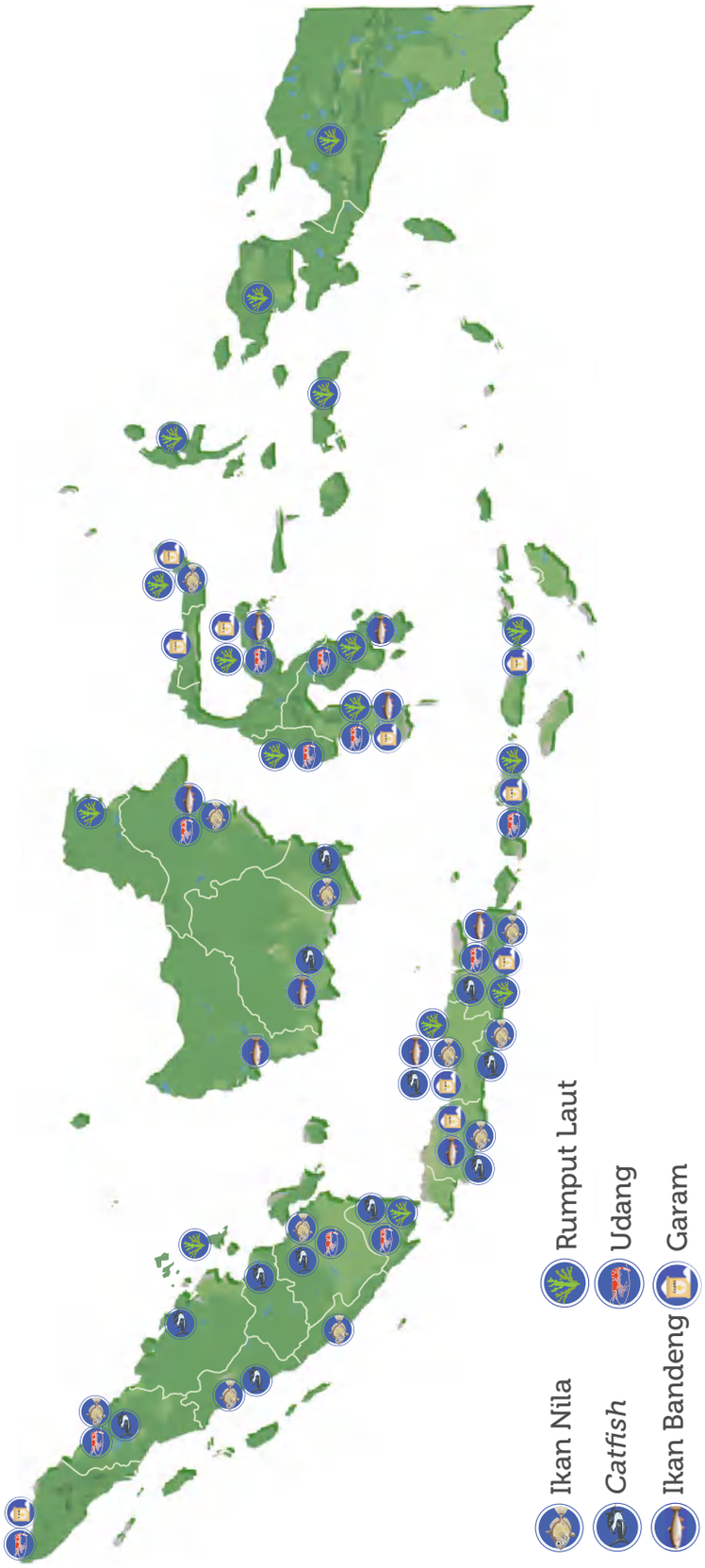

Gambar 3.5
Persebaran Sentra Produksi Perikanan Budidaya dan Garam

Gambar 3.6
Persebaran Sentra Produksi Pangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.7
Persebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

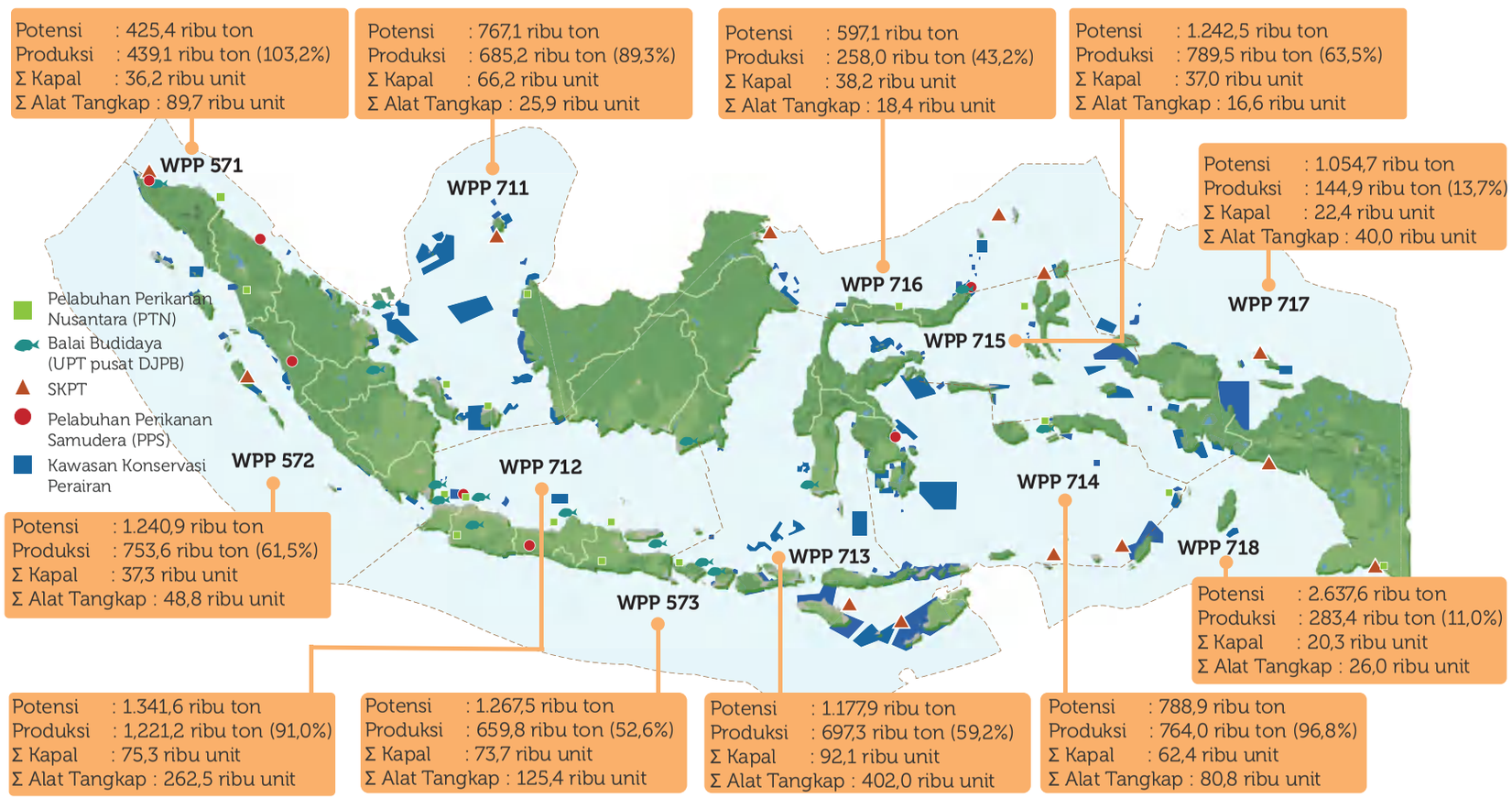

Keterangan:
1. Data potensi berdasarkan Kepmen KP No. 50/2017 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP
2. Data produksi perikanan tangkap di laut tahun 2018 (KKP, 2019)
3. Jumlah kapal dan alat tangkap perikanan tahun 2018 (KKP, 2019)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.8
Persebaran Sumber Gas Bumi dan Batubara Untuk Kebutuhan Industri dan Listrik

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.9
Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan Smelter

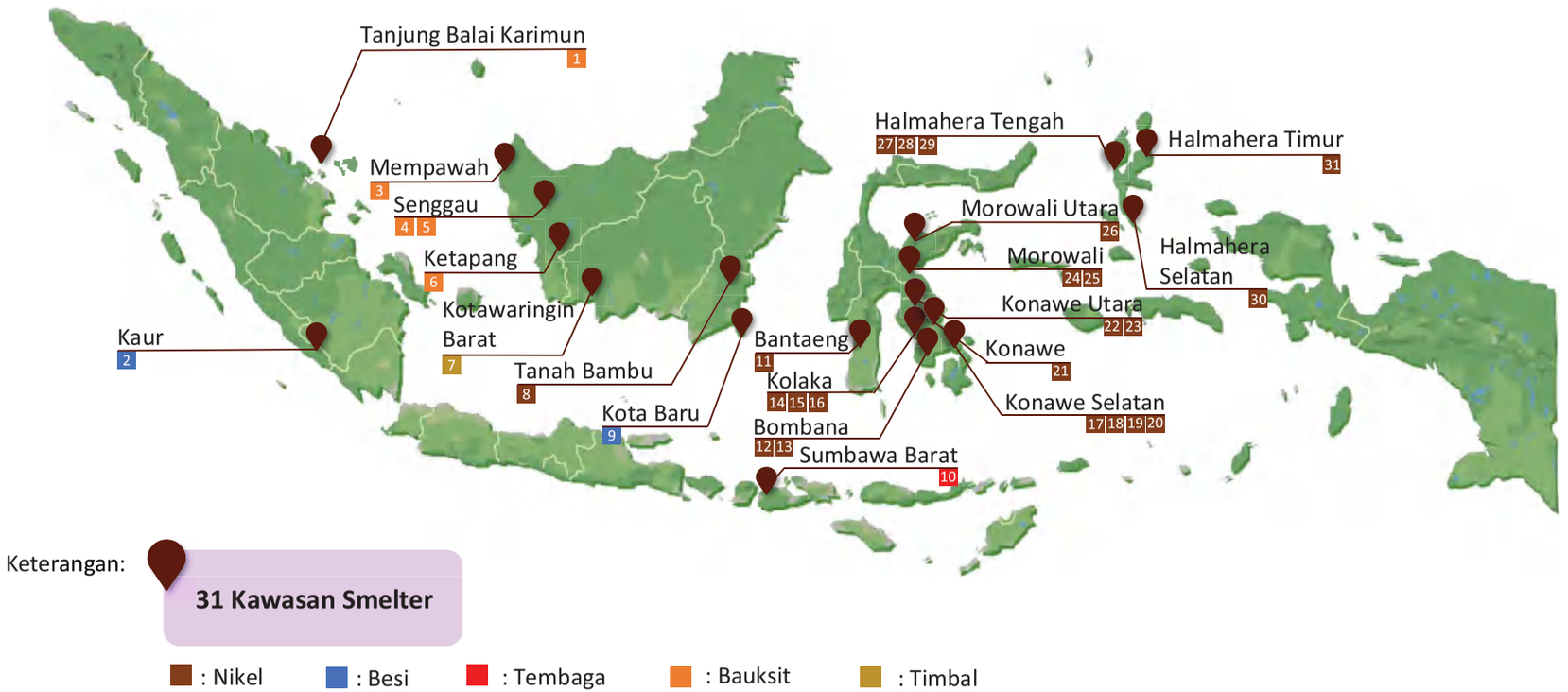

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.10
Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan Kawasan Industri

Keterangan:

9 Kawasan Industri Prioritas Nasional

18 Kawasan Industri yang Dikembangkan

*KI Palu difasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
**KI Teluk Bintuni difasilitasi dengan KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.11
Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

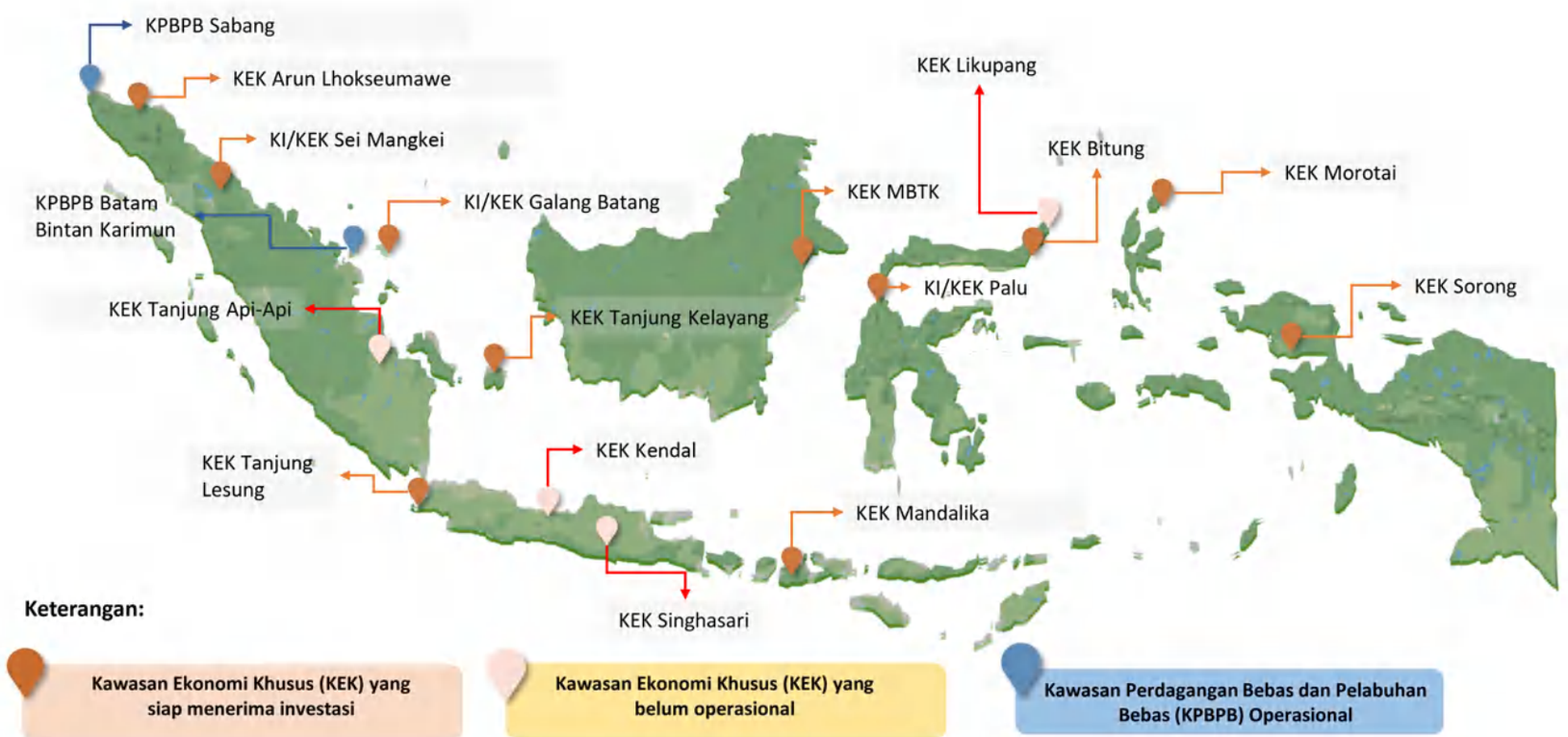

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.12
Persebaran Destinasi Pariwisata

Keterangan :

- Destinasi Pariwisata Prioritas (10 lokasi)
- Destinasi Pariwisata Pengembangan (8 lokasi)
- Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali

TWA : Taman Wisata Alam
TWP : Taman Wisata Perairan
SAP : Suaka Alam Peraian
KHDTK: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

TN : Taman Nasional
KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KPPN : Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
dskt. : dan sekitarnya

Wisata Bahari

1. TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
2. TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
3. TWP Laut Sawu dan Sekitarnya
4. TWP Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya
5. SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya
6. SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat

Ekowisata

1. TN Gunung Leuser dan KHDTK Aek Nauli
2. TWA Muka Kuning
3. TWA Kamojang Papandayan
4. TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, dan Hutan Pendidikan Wanagama
5. TN Bromo-Tengger-Semeru
6. TN Alas Purwo, TN Baluran, dan TWA Kawah Ijen
7. TN Bali Barat
8. TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora, dan TWA Gunung Tunak
9. TN Komodo dan TN Kelimutu
10. TN Danau Sentarum dan TWA Tanjung Belimbing
11. TN Bantimurung Bulusaraung dan TN Takabonerate
12. TN Wakatobi
13. TN Bunaken
14. TWA Sorong
15. TN Teluk Cenderawasih

KSPN/KPPN

1. KSPN Toba dskt.
2. KSPN Nongsa-Pulau Abang dskt. dan KSPN Lagoi-Bintan dskt.
3. KSPN Bukittinggi dskt, KSPN Maninjau dskt, KSPN Singkarak dskt, KPPN Padang dskt, dan KPPN Sawahlunto dskt.
4. KSPN Tanjung Kelayang dskt. dan KPPN Pangkal Pinang-Sungai Liat dskt.
5. KSPN Ciwidey dskt, KSPN Tangkuban Parahu dskt, KSPN Bandung Kota dskt, dan KSPN Halimun dskt.
6. KSPN Prambanan–Kalasan dskt, KSPN Yogyakarta Kota dskt, KSPN Sangiran dskt, KSPN Merapi–Merbabu dskt, KSPN Borobudur dskt, KSPN Pantai Selatan Yogyakarta dskt, KSPN Karst Gunung Kidul dskt, KSPN Karimunjawa dskt, dan KSPN Dieng dskt.
7. KSPN Bromo–Tengger–Semeru dskt.
8. KSPN Ijen-Baluran dskt. dan KPPN G Land-Alas Purwo dskt.
9. Seluruh KSPN di Provinsi Bali.
10. KSPN Pantai Selatan Lombok dskt, KSPN Rinjani dskt, dan KSPN Gili Tramena dskt.
11. KSPN Komodo dskt. dan KSPN Ende-Kelimutu dskt.
12. KSPN Sambas dskt. dan KPPN Singkawang dskt.
13. KPPN Derawan–Sangalaki dskt. dan KPPN Tanjung Redeb dskt.
14. KSPN Toraja dskt, KPPN Selayar dskt, KSPN Takabonerate dskt, dan KPPN Makassar Kota dskt.
15. KSPN Wakatobi dskt, KPPN Kendari dskt, dan KPPN Baubau dskt.
16. KSPN Bunaken dskt, KSPN Bitung-Lembeh dskt, KPPN Likupang dskt, dan KPPN Manado Kota dskt.
17. KSPN Morotai dskt.
18. KSPN Raja Ampat dskt. dan KPPN Sorong dskt.
19. KSPN Biak dskt. dan KSPN Teluk Cenderawasih dskt.

Geopark

1. Geopark Kaldera Toba
2. Geopark Natuna
3. Geopark Ngarai Sianok-Maninjau
4. Geopark Ranah Minang Silokek
5. Geopark Sawahlunto
6. Geopark Belitong
7. Geopark Ciletuh-Palabuhanratu
8. Geopark Pongkor
9. Geopark Gunung Sewu
10. Geopark Karangsambung-Karangbolong
11. Geopark Banyuwangi
12. Geopark Batur
13. Geopark Rinjani
14. Geopark Tambora
15. Geopark Maros-Pangkep
16. Geopark Raja Ampat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
c. Pembangunan kota baru sebagai contoh untuk pengembangan kota publik inklusif yang terencana; dan
d. Pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, didukung oleh kebijakan pengelolaan ASN berbasis *smart governance*;

3. **Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah**, melalui strategi pembangunan:
   a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
      i. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui: (a) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; (b) penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif; (c) optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; (d) peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan; (e) peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; (f) optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah; (g) peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi; (h) pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, (i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah
      ii. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
      iii. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

bagi Provinsi Papua dan Papua Barat secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; (b) pengembangan wilàyah adat Tabi, Saereri, La Pago, Me Pago, Anim Ha, Bomberai dan Domberai dalam mendukung perekonomian wilayah; (c) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (d) optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; (e) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta (f) penguatan distrik sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa; dan

iv. Pelaksanaan daerah khusus/daerah istimewa diarahkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lain melalui: (a) pemberdayaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlandaskan pada budaya, adat istiadat dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (b) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; (c) optimalisasi pengelolaan Dana Keistimewaan bagi penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; serta (d) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja.

b. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
   i. Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
   ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
   iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
   iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
   i. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
   ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan
   iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah.

4. **Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan**:
   a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
   c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan
   d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v) pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multiphak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana di setiap wilayah.

Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau

Pembangunan wilayah pulau dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan memperhitungkan (1) keberlanjutan daya dukung pembangunan secara menyeluruh; (2) pengembangan ekonomi wilayah, baik berskala lokal maupun nasional dan internasional, melalui pengembangan komoditas dan hilirisasi komoditas melalui pengembangan kawasan strategis berbasis sumberdaya alam, pengembangan kawasan strategis berbasis non sumber daya alam, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, revitalisasi kawasan transmigrasi, serta pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal; (4) pembangunan sumberdaya manusia melalui pemenuhan layanan dasar serta peningkatan produktivitas dan daya saing; (5) pengembangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (untuk Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat); serta (6) pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial

1. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Papua

Kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Percepatan pembangunan Wilayah Papua juga diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah perekonomian wilayah yang lebih maju dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

Strategi pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: *)

(1) Peningkatan pelayanan dasar, antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM; (b) percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah antara kawasan pesisir dan pegunungan serta memperhatikan kontekstual Papua; (c) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet; (d) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya juga dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (e) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (f) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan, pertambangan, perikanan, serta pengolahan pupuk dan petrokimia pada Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus; (g) pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal; (h) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah; (i) pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru; dan (j) pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay) dengan memperhatikan zona ekologi dan penyiapan SDM dalam rangka revolusi industri 4.0 melalui hilirisasi potensi ekonomi Papua; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

(3) Penataan pelaksanaan otonomi khusus dilakukan melalui antara lain: (a) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung; (b) penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat; (c) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; (d) pengembangan dan penguatan peran distrik sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (e) pengembangan 7 wilayah adat; (f) optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan kementerian/lembaga; (g) pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*); (h) pemberdayaan pengusaha lokal; (i) pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura; dan (j) penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Tanah Papua

Tabel 3.5
Lingkup Wilayah Adat dan Strategi Pengembangannya

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Laa Pago	Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari Major Project Wilayah Adat Laa Pago.
Saireri	Kabupaten Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen	Hilirisasi industri perikanan, industri pengalengan ikan dan industri pariwisata budaya dan bahari Kepulauan Padaido dan Kepulauan Ambai
Mamta	Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom	Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari
Mee Pago	Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Mimika	Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Anim Ha	Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel	Hilirisasi industri tebu, sagu, perikanan, industri pangan dan industri peternakan
Bomberay	Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana	Hilirisasi industri pala, peternakan dan pariwisata budaya dan bahari Teluk Triton
Domberay	Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari Major Project Wilayah Adat Domberay.

(4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain (a) pembangunan jalan, pelabuhan laut, dan udara; dan (b) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, khususnya pelabuhan hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan.

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai utara Pulau Papua; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); (d) peningkatan investigasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.

(6) Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Papua dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 3.13
Peta Pengembangan Wilayah Papua

2. Arah Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku

Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga; gas, dan pengembangan pariwisata.

Strategi pembangunan Wilayah Maluku akan mengutamalan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: *)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkataan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, serta perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/ WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan; (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (h) pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru; dan (i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

(4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Maluku; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Maluku dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 3.14
Peta Pengembangan Wilayah Maluku

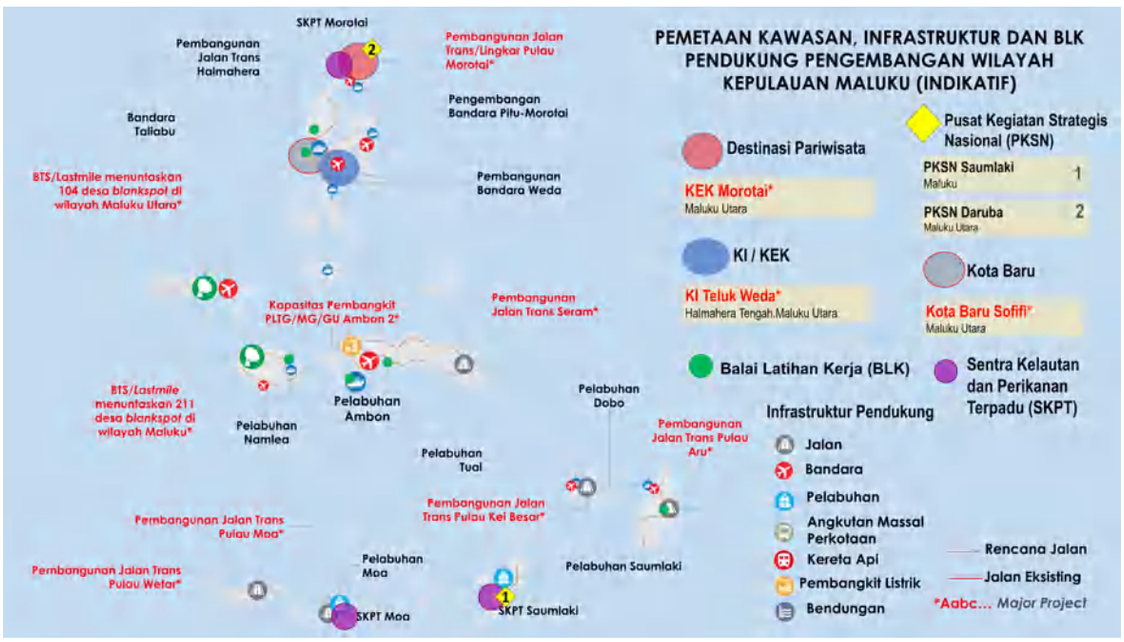

3. Arah Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamalan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: *)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN, (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan; (g) destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (h) pengembangan kawasan perkotaan; (i) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta; (j) peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

---

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.
(4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; (b) penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan (c) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 3.15
Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

4. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan wilayah Sulawesi perlu mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: *)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi yaitu kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KEK dan KI; dan (g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan,

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antardaerah otonom di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan kepulauan.

(4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

(5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

(6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Sulawesi Tengah dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;

(7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 3.16
Peta Pengembangan Wilayah Sulawesi

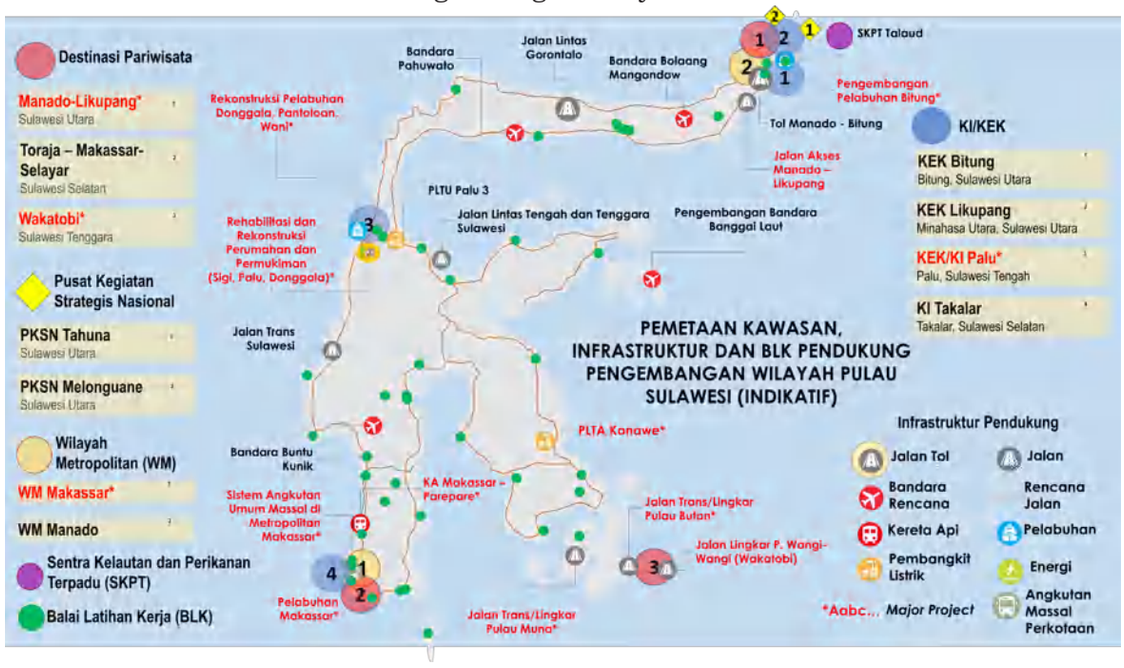

5. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan akan mengutamalan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (c) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (d) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (e) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (g) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (h) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; (i) pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan (j) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

---

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.
(4) Penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Kalimantan dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 3.17
Peta Pengembangan Wilayah Kalimantan

6. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; (f) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong transformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan Aceh; dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); (e) revitalisasi kawasan transmigrasi; (f) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (g) pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah; (h) pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal pada Destinasi Pariwisata

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

Prioritas (DPP); (i) pengembangan industri kedirgantaraan; (j) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan.

(4) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan (c) memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Pulau Sumatera dan pemantapan pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada peta berikut

Gambar 3.18
Peta Pengembangan Wilayah Sumatera

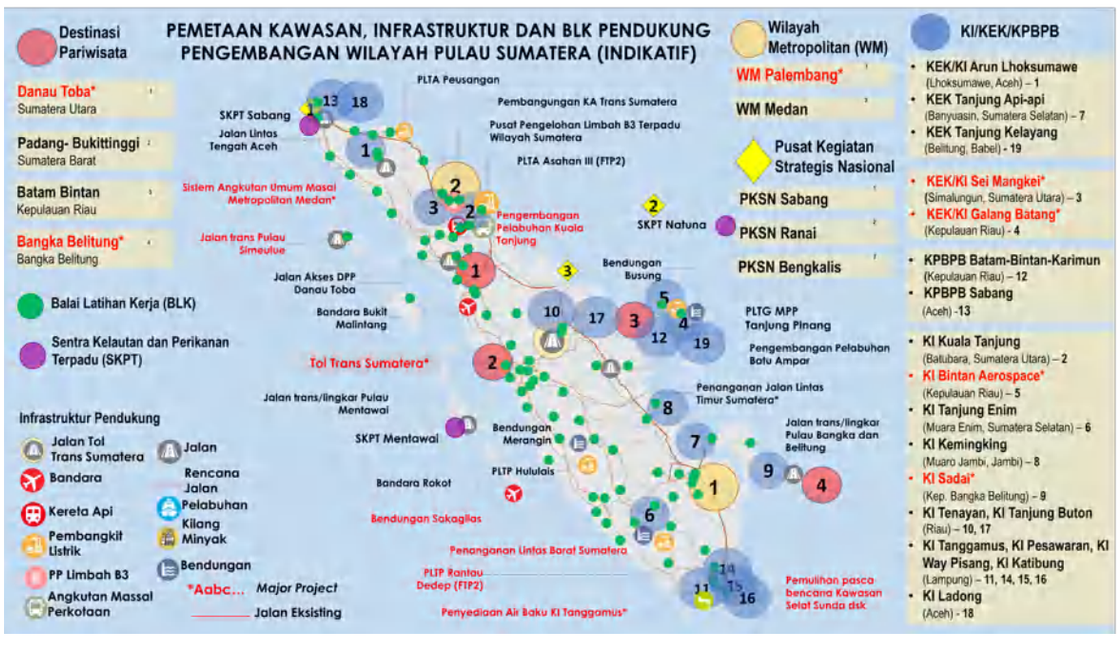

7. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali

Wilayah Jawa-Bali menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin tercpitanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Dalam upaya mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan akan dilakukan secara bertahap didukung dengan pengembangan wilayah metropolitan dan kota baru di luar Pulau Jawa. Secara bersamaan, pembangunan ekonomi di Pulau Jawa-Bali akan diarahkan pada kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkeberlanjutan.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mengutamalan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:*)

(1) Pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa.
(2) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020– 2022); dan (c) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.
(3) Pertahanan pertumbuhan Jawa-Bali, dilakukan dengan: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sektor industri teknologi tinggi, industri kreatif, dan jasa serta pusat industri manufaktur pada beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI); (c) pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE pada beberapa Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (d) pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM, pembangunan kota baru, serta pengembangan kota lainnya; (e) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (f) pengembangan kawasan agropolitan; dan (g) pengembangan sentra produksi perikanan di WPP.
(4) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat

*) Detail strategi pembangunan wilayah tertuang di dalam Lampiran 4 RPJMN 2020-2024

pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM antara lain sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

(5) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di pelabuhan hub; (c) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan massal multimoda; dan (d) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

(6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai selatan Pulau Jawa-Bali dan pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir.

Gambaran integrasi pembangunan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada peta berikut

Gambar 3.19
Peta Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali

BAB IV

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Pendahuluan

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

Laju Pertumbuhan Penduduk

Status Awal: 1,14% (2015-2016)
Capaian Akhir: 1,07% (2017-2018)

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Status Awal: 2,41 (SP 2010)
Capaian Akhir: 2,28 (Supas 2015)

Cakupan kepesertaan JKN Kesehatan

Status Awal: 62% (BPJS, 2015)
Capaian Akhir: 83,3% (BPJS, 1 Juli 2019)

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Status Awal: 37,2% (Riskesdas, 2013)
Capaian Akhir: 27,7% (SSGB, 2019)

Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Status Awal: 346 (SP, 2010)
Capaian Akhir: 305 (Supas, 2015)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Status Awal: 70,83 (2015)
Capaian Akhir: 72,10 (2018)

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Status Awal: 8,22 tahun (2014)
Capaian Akhir: 8,52 tahun (2018)

Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun

Status Awal: 81,68% (2016)
Capaian Akhir: 83,55% (Maret, 2018)

Proporsi pekerja pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi

Status Awal: 38,70% (2015)
Capaian Akhir: 40,60% (2019)

Peringkat *Global Innovation Index*

Status Awal: 97/141 (2015)
Capaian Akhir: 85/129 (2019)

Indeks Pembangunan Pemuda

Status Awal: 48,67 (2015)
Capaian Akhir: 51,50 (2018)

Lingkungan dan Isu Strategis

Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) nasional sampai pada tingkat *replacement rate* yaitu 2,1. Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Namun, jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, di mana lebih dari 60 persennya merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua (*ageing population*) yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup mencakup 1000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, pola asuh dan pembentukan karakter anak dalam keluarga, remaja, transisi dari sekolah menuju dunia kerja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan lansia.

Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2018, hampir 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan luas pulau hanya sekitar 6 persen daratan Indonesia. Seiring dengan masih adanya kesenjangan kesempatan perekonomian antarwilayah, mobilitas penduduk di Indonesia diperkirakan terus meningkat dan belum merata arus perpindahannya. Sebagian kecil provinsi mempunyai arus perpindahan yang positif, banyak penduduk pendatang, seperti di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sementara sebagian besar lainnya memiliki *net migration* yang negatif dan banyak penduduk yang berpindah meninggalkan wilayah asalnya, terutama di sebagian provinsi di Indonesia Bagian Timur.

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah memberikan pengaruh pola mobilitas penduduk serta memungkinkan komunikasi jarak jauh dan kerja sama jarak jauh (termasuk *outsourcing*). Hal ini tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitas penduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan

kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan mobilitas penduduk yang akurat, seimbang, dan memperhatikan pola kependudukan per wilayah (baik provinsi maupun kabupaten dan kota). Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan *mobile positioning data* (MPD) menuju satu data kependudukan yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah serta perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi kependudukan melalui *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GPDK).

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni.

Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi, seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran, agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai kendala seperti permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama, menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran secara non-tunai, untuk mempercepat integrasi bantuan sosial.

Selain bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penduduk diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Program jaminan sosial menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: (a) perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima

Upah (PBPU) melambat; (b) jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU; (c) regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis; (d) kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); (e) respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan; (f) lembaga aktuaria yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik serta lembaga yang independen belum tersedia; dan (g) sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Gambar 4.1
Cakupan JKN Berdasarkan Kelompok Peserta (dalam juta jiwa)

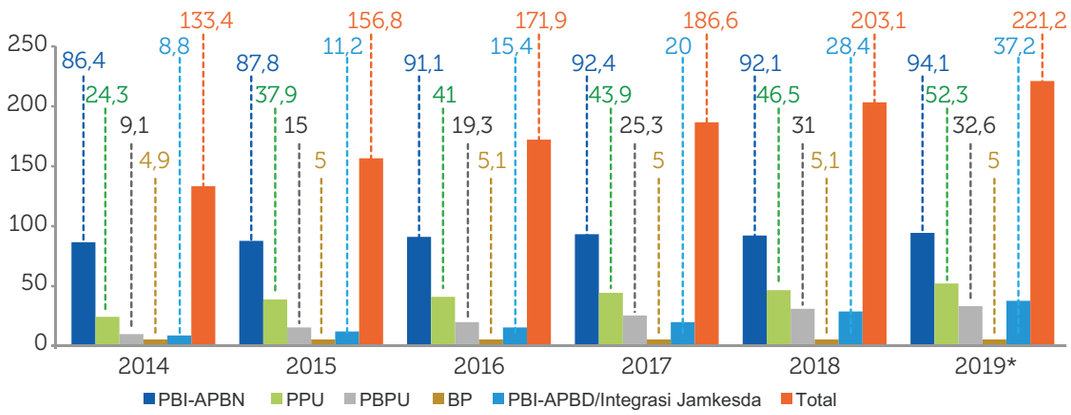

Keterangan: **PBI**: Penerima Bantuan Iuran **PBPU**: Peserta Bukan Penerima Upah Sumber: BPJS Kesehatan
PPU: Peserta Penerima Upah **BP**: Bukan Pekerja

Terlepas dari semakin seringnya kejadian bencana alam serta adanya perubahan iklim di beberapa tempat, perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang. Sistem yang ada saat ini belum mampu untuk merespon kebutuhan penduduk yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, penduduk yang berada pada daerah rawan bencana menjadi rentan miskin. Terlebih lagi, penduduk yang mengalami perubahan iklim yang secara pasti belum mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam penyesuaian mata pencaharian atau penyesuaian produksi sesuai iklim yang berubah. Perlindungan sosial pun masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Kesejahteraan kelompok penduduk tersebut masih cukup rentan dan belum sepenuhnya diperhatikan. Bertambahnya usia penduduk berkaitan erat dengan penurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitas fungsional. Penduduk lansia yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari sebesar 7,9 persen dan sebesar 11,4 persen yang tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat, dan mendengar (SUPAS 2015). Selain itu, tingkat kesejahteraan lanjut usia masih rendah, dan tingkat kemiskinannya relatif lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Penduduk lanjut usia juga rentan terhadap kekerasan, kejahatan, penipuan, diskriminasi, dan eksklusi.

Kondisi yang dialami oleh kelompok lansia tersebut pada dasarnya juga terjadi pada penyandang disabilitas. Berdasarkan SUPAS 2015, terdapat 8,56 persen atau sekitar 21,84 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas, di mana 48,5 persen dari jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan serta kurang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang menyebabkan penyandang disabilitas berisiko lebih tinggi hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemenuhan Layanan Dasar

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan *maternal*, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi *stunting* masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebanyak 54,1 persen dengan akses terhadap air minum layak sebesar 87,8 persen, dan sanitasi layak sebesar 74,6 persen (BPS 2018, diolah Bappenas 2019).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi, misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Gambar 4.2
10 Peringkat Teratas dan Perubahan Beban Penyakit (*Disability Adjusted Life Years*/ DALYs) Tahun 1990 dan 2017 di Indonesia

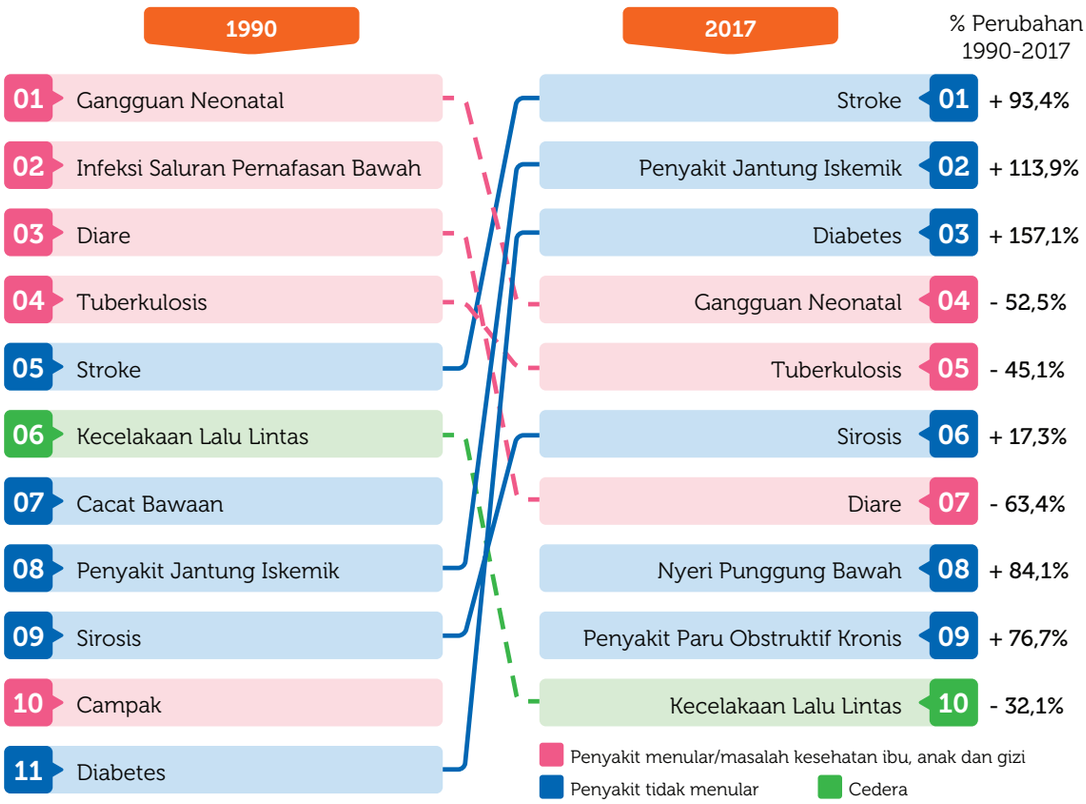

Sumber: *Global Burden of Disease*, 2017

Di bidang pendidikan, pada tahun 2018, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19 persen (Susenas, 2018). Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil *Program for International Student Assessment* (PISA), menunjukkan bahwa proporsi siswa

Gambar 4.3
Kesenjangan Taraf Pendidikan Antarwilayah dari Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas per Provinsi, 2018

Sumber: Susenas BPS

yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika, sains, dan literasi, pada periode 2006-2018, menunjukkan perkembangan yang masih rendah. Pada PISA 2018, proporsi siswa yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Gambar 4.4
Proporsi Anak Kelas 9 di Atas Standar Minimum Kemampuan Matematika, Sains, dan Membaca pada Tes PISA

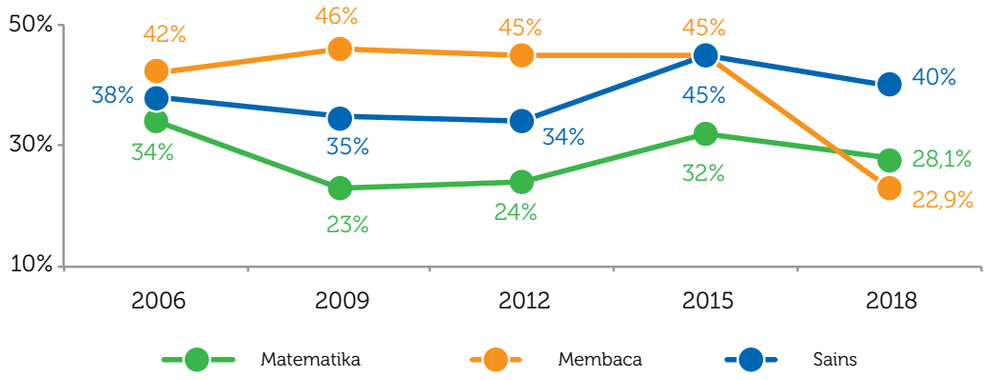

Sumber: PISA 2018

Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen). Kualitas pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata

Gambar 4.5
Perbandingan Beberapa Negara Mengenai Proporsi Anak di Bawah Standar Minimum Kemampuan Matematika pada Tes PISA

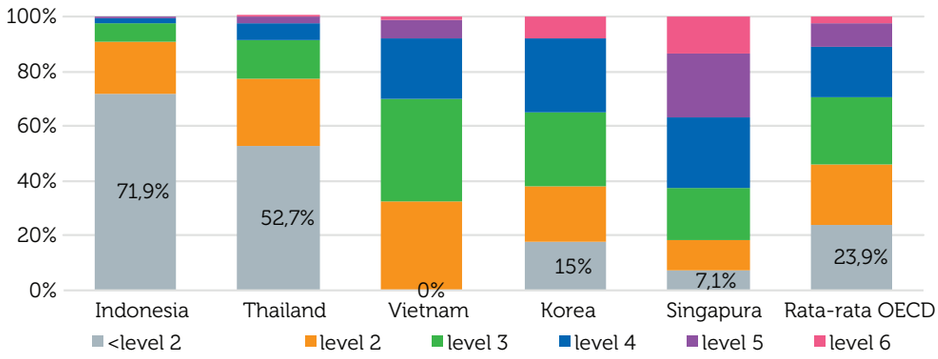

Sumber: PISA 2018

sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimum sebesar 60,0. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 14,1 persen dari 290.687 dosen yang berkualifikasi doktor/S-3 (Kemristekdikti, 2018).

Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi yang begitu besar, yakni 4.650 lembaga, menyebabkan upaya tata kelola di pendidikan tinggi belum berjalan optimal. Persoalan kualitas juga terkait erat dengan belum terwujudnya diferensiasi misi perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selama ini, perguruan tinggi belum fokus dalam mengemban tiga fungsi tersebut, yakni apakah sebagai *research university* yang menekankan pada aspek *knowledge production* melalui riset multi dan lintas disipliner; sebagai *teaching university* yang fokus pada pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau sebagai *vocational university* yang menekankan pada kemitraan dengan industri dan penyiapan lulusan berkeahlian dan berketerampilan.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Indeks Perlindungan Anak yang mengukur pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak baru mencapai 62,7 pada tahun 2018. Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar. Masih ada sekitar 59,2 persen anak di dalam lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2019) dan 16,4 persen anak belum memiliki akta kelahiran (Susenas, 2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak masih terjadi. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 61,7 persen laki-laki dan 62 persen perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR, 2018), dan sekitar 7,05 persen anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (Sakernas,2018). Di samping itu, sekitar 23 persen pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS, 2015), 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Susenas, 2018), dan meningkatnya laporan *cyber crime* yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahun 2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (KPAI). Sementara itu, pengasuhan anak juga belum optimal, antara lain ditandai oleh balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak sekitar 3,73 persen dan sekitar 4,84 persen anak tidak tinggal bersama kedua orangtuanya (Susenas, 2018). Selanjutnya, perilaku berisiko perlu ditangani sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak. Saat ini terdapat sekitar 4,71 persen anak usia 5-17 tahun merokok (integrasi Susenas - Riskesdas, 2018) dan sekitar 1,9 persen pelajar di bawah usia 15 tahun yang menggunakan narkotika dalam satu tahun terakhir (SPPGN, 2016).

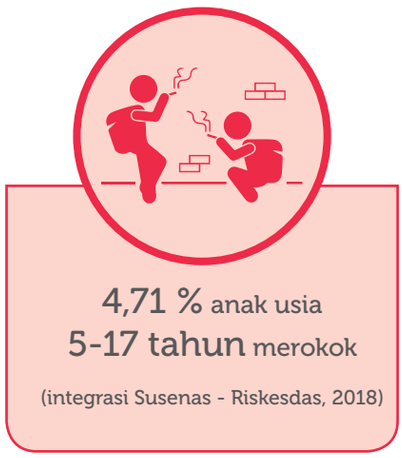

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. IPG dan IDG pada tahun 2018 baru mencapai 90,99 dan 72,10, *Gender Inequality Index* Indonesia berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur dan merupakan negara ketiga terendah di ASEAN, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 51,89 persen dibandingkan laki-laki sebesar 83,13 persen (Sakernas, Agustus 2019). Partisipasi perempuan di lapangan kerja formal juga masih sangat rendah yaitu 34,22 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 65,78 persen (Sakernas, Agustus 2018). Selanjutnya, pelaksanaan strategi PUG menghadapi berbagai tantangan, diantaranya penerapan kebijakan, peranti analisis, serta komitmen dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender masih belum optimal, pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan desa masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Jumlah KTP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual. Di dalam KDRT, kasus inses adalah bentuk kekerasan seksual yang paling dominan dan anak perempuan paling rentan menjadi korban. Kasus inses sering tidak terungkap dan sulit dilaporkan karena pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban. Perempuan juga semakin rentan mengalami kekerasan pada situasi darurat dan bencana. Selain itu, kekerasan pada pekerja migran perempuan juga masih terjadi mulai dari pemberangkatan, transit, dan pemulangan (Komnas Perempuan, 2019). Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih tinggi dengan modus yang semakin kompleks. Jumlah korban TPPO pada tahun 2018 mencapai 297 orang di mana 70 persen diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan (Bareskrim Polri, 2019). Selanjutnya, perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya kasus kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sepanjang 2017, terdapat 65 kasus KBGO dalam berbagai bentuk, antara lain pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*).

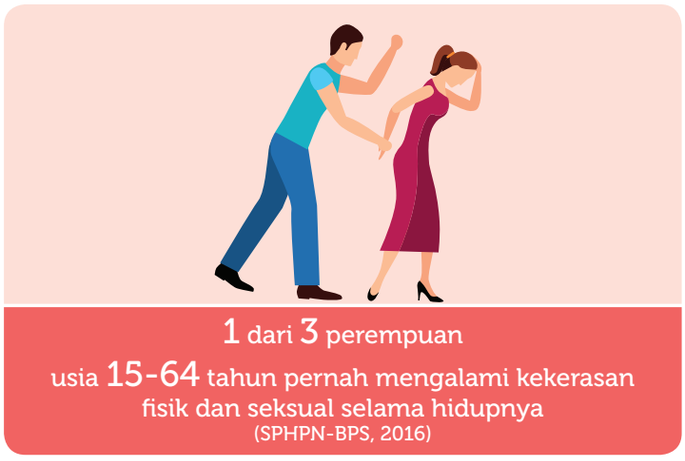

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,7 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,4 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi (Susenas, 2018). Sebagian pemuda cenderung memiliki perilaku berisiko yang berakibat pada terjadinya cedera, penyakit, dan kurangnya produktivitas. Sebanyak 26,3 persen pemuda tercatat pernah merokok (Susenas, 2017). Penyalahguna narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017). Sebesar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru terjadi pada rentang usia 15–19 tahun dan sekitar 56,5 persen terjadi pada pemuda dengan rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes, 2018).

Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah, rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp. 743.399,- sementara sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan hanya sekitar 25,6 persen (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha dengan kegiatan yang memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor *Global Innovation Index* (GII) 29,72 dari skala 0-100 (2019). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, jumlah paten, serta publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrastruktur litbang masih terbatas. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08 persen diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat. Kolaborasi *triple helix* belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi (*center of excellence*).

Gambar 4.6
Jumlah dan kualifikasi SDM Iptek tahun 2018

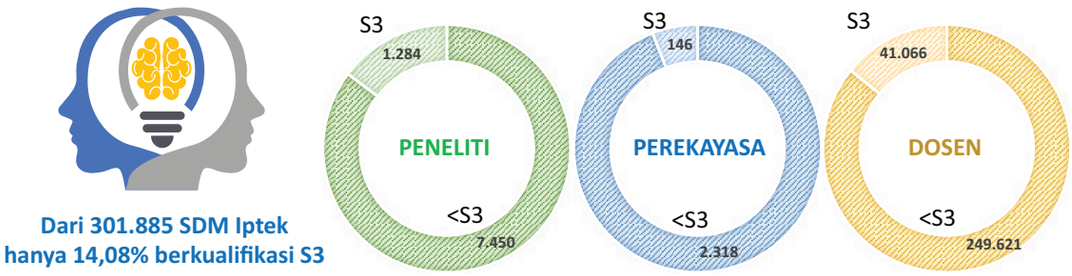

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren LIPI, Pusbindiklatren BPPT, dan Kemristekdikti, Juni 2018

Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri. Dari sisi produktivitas penelitian, jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi pada tahun 2018 baru mencapai 31.708 (peringkat 22 dari 233 negara).

Tabel 4.1
Perkembangan jumlah aplikasi pendaftaran paten dan paten yang diberikan (2015-2019)

Indikator		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Aplikasi pendaftaran paten	1244	1391	1777	1362	760
2	Jumlah paten yang diberikan	233	399	568	790	991
3	Paten diberikan berdasarkan tahun pendaftaran:					
	2019					17
	2018				27	276
	2017			17	169	253
	2016		9	64	141	129
	2015	0	13	85	138	131
	2014	9	34	80	82	65
	2013	23	95	87	95	53
	2012	28	78	57	66	25
	2011	51	71	63	31	21
	2010	45	49	51	14	9
	2009	26	20	23	9	2
	2008	19	15	18	7	3

*) per 18 Oktober 2019

Sumber: https://pdki-indonesia.dgip.go.id [diakses 18 Oktober 2019]

Meskipun jumlah paten yang diberikan (*granted*) terus meningkat dan mencapai 991 paten di tahun 2019, jumlah aplikasi pendaftaran paten dari warga negara Indonesia masih rendah dan berfluktuasi setiap tahunnya. Untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan belanja litbang nasional.

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Indonesia. Namun, capaian prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal dan belum didukung oleh budaya olahraga yang baik. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah pada Asian Games 2018 dan berhasil memperoleh peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di tingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperoleh satu medali emas pada Olimpiade tahun 2016 di Brazil. Budaya olahraga masyarakat yang belum naik ditunjukkan oleh penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir sebesar 31,39 persen pada tahun 2018, meningkat sedikit dari 27,61 persen pada tahun 2015 (MSBP-BPS). Pembangunan budaya olahraga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pendampingan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya program-program yang berorientasi peningkatan kualitas hidup manusia. Berbagai program pembangunan telah menempatkan pendamping di lapangan, seperti penyuluh, fasilitator, konsultan pertanian, dan pendamping lainnya yang menjadi kunci keberhasilan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah selama ini. Pendampingan masih menghadapi tantangan terutama terkait dengan kompetensi, baik sebagai pemandu proses (*process guide*) maupun sebagai penyedia alat bantu (*tool giver*). Dibutuhkan upaya yang lebih sistematis untuk penguatan pendampingan pembangunan agar berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi lebih efisien, efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain talenta unggul dari dalam negeri, manajemen talenta akan memanfaatkan diaspora bertalenta tinggi Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sampai Juli 2019 terdapat sekitar 8.828 warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri di profesi berkeahlian tinggi di berbagai bidang seperti pertambangan dan minyak, hukum, industri pengolahan, penerbangan, pendidikan, teknologi informasi, industri mode, dan seni budaya.

Sasaran, Indikator, dan Target

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)	2,28 (SUPAS, 2015)	2,10
2	Persentase cakupan kepemilikan NIK	96	100
	Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	83,55	100
	Persentase kepemilikan akta kematian	N.A	100
	Persentase kepemilikan buku nikah	N.A	100
	Persentase kepemilikan akta perceraian	N.A	100
	Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100
3	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35	100
4	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16	100
5	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15	100
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
1	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7	98
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 (Susenas, 2018)	80
2	Cakupan penerima bantuan sosial non-tunai dan subsidi tepat sasaran:		
	a. Bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan (juta KK)	10	10
	b. Bantuan Pangan Melalui Program Sembako (juta KK)	15,6	15,6
	c. Bantuan elpiji 3 kg (juta KK)	31,4	31,4
	d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA (juta KK)	31,4	31,4
3	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah (juta penduduk)	96,8 (Desember 2019)	112,9
4	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas (%)	92,1 (Supas, 2015)	94

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
5	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan melihat, membaca dan mendengar (%)	88,6 (Supas, 2015)	90
6	Cakupan kepesertaan JKN (%)	84,1 (13 Desember 2019)	98
7	Cakupan kepesertaan BPJS TK a. Pekerja formal (%) b. Pekerja informal (%)	 40 5	 > 30 > 30
8	Jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja)	-	20
9	Persentase instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif (%)	0	30
10	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,34	0,41
11	Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,26	0,34
12	Indeks keberfungsian sosial anak	0,34	0,41
13	Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA	0,34	0,41
14	Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang	0,34	0,41
15	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	18,9	25
16	Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	37,5	50
17	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	2,7	20
3. Terpenuhinya layanan dasar			
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS, 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24 (SDKI, 2017)	16
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) (%)	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) (%)	10,6 (SDKI, 2017)	7,4
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	36 (SDKI, 2017)	18
6	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
7	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global Tuberculosis Report, 2017)	190
10	Eliminasi malaria (kab/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
11	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7
12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
13	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas, 2018)	90
14	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
15	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	63 (Kemkes, 2018)	100
16	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
17	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0
18	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96
19	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,6 (BPOM, 2019)	92,3
20	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
22	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89
23	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) c. SD/MI/ sederajat d. SMP/MTs/ sederajat e. SMA/SMK/MA/sederajat	 91,80 81,70 61,52 (Susenas 2018)	 94,78 89,49 76,47
24	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63
25	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
26	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	 0,67 0,16 (Susenas 2018)	 0,78 0,23

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
27	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	 371 379 396	 396 388 402
28	Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%): a. Membaca b. Matematika c. Sains	 30,1 28,1 40,0	 34,1 30,9 44,0
29	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%): a. Literasi b. Numerasi	 53,2 22,9	 61,2 30,1
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72 (2018)	73,49
2	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
3	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7 Perempuan: 62 (SNPHAR, 2018)	Menurun
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,99 (2018)	91,39
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,10 (2018)	74,18
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51,89	55,00
7	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 (SPHPN, 2016)	Menurun
8	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (2018)	57,67
5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan			
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	27,9	40
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha (%)	25,6	50
3	Luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat (juta ha)	5,5	12,1
4	Luas bidang tanah yang diredistribusi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	553.140	3.946.860
5	Luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	0	4.500.000
6	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (juta Ha)	1,5	4,1
7	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan (juta Ha)	4	8
8	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri	100	500*

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8
2	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 (Sakernas, 2019)	43,1
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6
4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78 (13 K/L, 2018)	2,8
5	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,3 (Sakernas, 2019)	66,7
6	Jumlah PT yang Masuk ke dalam *World Class University* a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500	 - 1 (UI) 2 (ITB dan UGM)	 1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB, Unair, Unpad)
7	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional a. Jumlah Publikasi (Artikel) Internasional b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	 14.606 38.586 (Kemristekdikti, 2018)	 31.159 59.770
8	Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemristekdikti, 2017)	304
9	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762 (Kemristekdikti, 2017)	1.812
10	Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemristekdikti, 2018)	700
11	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52 (Kemristekdikti, 2018)	210
12	Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas KI (Domestik)	1.362 (Kemhukham, 2018)	3.000
13	Pemberian paten (Domestik)	790 (Kemhukham, 2018)	1.000
14	Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3	14,08 (Kemristekdikti, LIPI, BPPT)	20*

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
15	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81 (Kemristekdikti, 2018)	138*
16	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48 (KNAPP, 2018)	75*
17	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10
18	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh:	45	8**
	a. Berbasis Perguruan Tinggi b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	17 28	5 3
19	Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	N/A	40*
20	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	 12 35	 24 35
21	Persentase anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42
22	Budaya dan prestasi olahraga:		
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,39 (2018)	40
	b. Peringkat *Asian Games*	4 (2018)	5 (2022)
	c. Peringkat *Asian Para Games*	5 (2018)	4 sampai 6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*	1 (2016)	3
	e.Jumlah perolehan medali emas pada *Paralympic Games*	-	3
23	Tersedianya Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan (SP3) a. Standar nasional pendampingan pembangunan (%) b. Penyetaraan jenjang kualifikasi pendampingan pembangunan (%) c. Skema sertifikasi kompetensi pendampingan pembangunan (%)	 N/A N/A N/A	1 100 100 100
24	Tersedianya kebijakan pendukung penguatan pendampingan pembangunan a. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan b. Basis Data dan Sistem Informasi Pendampingan Pembangunan		1 1

Keterangan:
*) angka kumulatif
**) indikasi lokasi: UI, UGM, ITB, IPB, ITS, CSTP LIPI, Puspiptek Serpong Kemristekdikti, NSTP Pasar Jumat BATAN

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan,** melalui:
   1.1) **Percepatan cakupan administrasi kependudukan**, mencakup:
      a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: (a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; (b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; (c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan (d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
      b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: (a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan (b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
      c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
   1.2) **Integrasi sistem administrasi kependudukan,** mencakup:
      a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: (a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan (b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
      b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: (a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan (b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
   1.3) **Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk,** mencakup:
      a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
      b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan
      c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

2. **Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,** melalui:
   2.1) **Penguatan pelaksanaan jaminan sosial,** mencakup:
      a) Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*) berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*);

b) Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial;
c) Peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan *active purchasing* termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme *cost-sharing*, penguatan *health technology assessment* (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan; dan
d) Penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, dan integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN Ketenagakerjaan.

2.2) **Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran,** mencakup: a) integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan melalui Program Sembako yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan LPG) ke dalam satu kartu; b) integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan; c) peningkatan sinergi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; d) perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang menyediakan berbagai pilihan saluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi, dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital, didukung dengan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; e) pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi protein nabati dan hewani seperti sayuran, daging, ikan, dan Makanan Pendamping ASI (MPASI), untuk menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, anak usia dibawah dua tahun dan perbaikan gizi anak usia sekolah dari keluarga penerima bantuan sosial serta memastikan bantuan tidak dipergunakan untuk konsumsi rokok; f) penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitasi pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); dan g) peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.

2.3) **Perlindungan sosial adaptif,** mencakup: a) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam; c) pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.

2.4) **Peningkatan kesejahteraan sosial,** mencakup: a) pengembangan sistem perawatan jangka panjang (*long term care*) terintegrasi dan holistik; b) penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk; (c) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; e) implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan inklusif; f) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, g) pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia, h) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia; dan i) penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS serta korban penyalahgunaan napza.

2.5) **Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu,** mencakup: a) penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, terutama standar kompetensi dan mekanisme insentif; b) perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; c) peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; d) peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga; dan e) penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:

3.1) **Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,** mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan; peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pascapersalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat; dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi (kespro) sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan konseling KB dan Kespro; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya

kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

3.2) **Percepatan perbaikan gizi masyarakat** untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

3.3) **Peningkatan pengendalian penyakit,** dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real time,* pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; d) pengendalian resistensi antimikroba; e) pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

3.4) **Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,** mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup

sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan.

3.5) **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan,** mencakup:

a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya; pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan; pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia; penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying* dan *sailing health care*) dan gugus pulau; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);

b) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang

ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas; penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c) **Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan** yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

d) **Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan** yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;

e) **Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan** yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; penguatan data rutin; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk *big data,* media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:

4.1) **Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,** mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran *online*; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

4.2) **Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,** mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

4.3) **Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,** mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

4.4) **Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah,** mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

4.5) **Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan,** mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.

5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui:

5.1) **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya,** mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

5.2) **Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

5.3) **Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,** mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b)peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

5.4) **Peningkatan kualitas pemuda,** mencakup: (a) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; (b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

6. Mengentaskan kemiskinan, melalui:

6.1) **Akselerasi penguatan ekonomi keluarga,** mencakup: (a) pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; dan (b) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; (c) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; (d) pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan (e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.

6.2) **Keperantaraan usaha dan dampak sosial**, mencakup: (a) penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; (b) pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial; (c) transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD); (d) penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan; dan (e) penyuluhan dan/ atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan (mencakup peningkatan kapasitas penyuluh dan pembentukan kelompok tani hutan (KTH) mandiri untuk pengembangan usaha produktif.

6.3) **Reforma agraria**, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; (c) pemberian sertipikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

6.4) **Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial**, mencakup: (a) pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan kemitraan kehutanan; (b) peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat; (c) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (d) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan (e) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:

7.1) **Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri,** mencakup:

a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;

b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;
d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan lembaga *single oversight* di tingkat nasional yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja

7.2) **Penguatan pendidikan tinggi berkualitas** mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e) Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; g) Penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan (h) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

7.3) **Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi** mencakup: a) Pemanfaatan Iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup integrasi pelaksanaan riset dengan skema *flagship* Prioritas Riset Nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem *fast charging*, kereta cepat, pesawat amphibi, pesawat terbang tanpa awak, bahan baku obat, dan pabrik garam industri, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan

multidisiplin, inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik), penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana, pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi, dan penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan *cyber security*, material maju, energi baru terbarukan, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan; b) Pengembangan *Research Power-House* yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, penguatan Pusat Unggulan Iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri; c) Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/KI, penguatan *Science Techno Park* (STP) utama, perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); serta d) Peningkatan kualitas belanja litbang melalui koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, penguatan pendataan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.

7.4) **Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional,** mencakup: (a) Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; (b) Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan; (c) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; (d) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; (e) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; (f) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan (g) Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga.

7.5) **Penguatan pendamping pembangunan**, mencakup: (a) Pengembangan standar kompetensi dan jenjang kualifikasi nasional pendamping pembangunan; (b) Program pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi dan jenjang kualifikasi; (c) Sertifikasi kompetensi pendamping yang mengacu pada skema sertifikasi pendamping pembangunan; dan (d) pengembangan komponen pendukung yaitu sistem insentif, rekognisi, regulasi, dan basis data pendamping yang terpadu.

7.6) **Pengelolaan manajemen talenta nasional,** mencakup: (a) Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi; (b) Pengelolaan *database* persediaan dan kebutuhan talenta (*talent pool*); (c) Peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja, serta pengembangan karir dan prestasi talenta; (d) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta; dan (e) Pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia.

BAB V

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Pendahuluan

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Untuk itu dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

Indeks Pembangunan Masyarakat yang menunjukkan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil terus meningkat dari 0,55 pada tahun 2015 menjadi 0,61 pada tahun 2018.

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya telah mencapai 53,7 pada tahun 2018

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,4 pada tahun 2015 menjadi 75,5 pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 73,8.

Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018; dan tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada tahun 2014 menjadi 365.633 perkara di tahun 2016 (Statistik Indonesia, 2017). Sementara median usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia – SDKI 2017).

Lingkungan dan Isu Strategis

Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi ruh bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi politik transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Secara kelembagaan pada tahun 2017 Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila yang dilaksanakan perlu ditingkatkan untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat mempengaruhi budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan masyarakat *silih asah* (saling bertukar pikiran), *silih asih* (saling mengasihi), dan *silih asuh* (saling menjaga dan melindungi) melemah di beberapa daerah digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Padahal nilai dan modal sosial tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat.

Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Ekosistem kebudayaan merupakan jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan dan unsur kebudayaan lainnya. Saat ini ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Hal ini tercermin dari masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya. Berdasarkan data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2018, persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan hanya sebesar 0,31 persen dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Produk-produk tradisional sebagai hasil karya budaya juga masih sepi peminat, hanya 59,81 persen rumah tangga yang masih menggunakan produk tradisional.

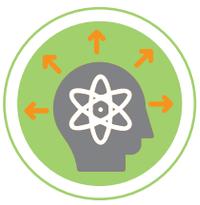

Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Namun, pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat terwujud dalam lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional (UN), yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah – SNKBS, 2015). Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari 82,0 (Susenas MSBP, 2015) menjadi 81,4 (Susenas MSBP, 2018).

Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama

Dalam kerangka pembangunan nasional agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun, karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan keagamaan yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama. Pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun belum semua kecamatan memiliki KUA. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi. Sampai saat ini baru 5.820 kecamatan dari

7.094 kecamatan yang telah memiliki KUA. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan juga masih belum optimal. Berdasarkan kajian BAZNAS diperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 286 triliun per tahun (BAZNAS, 2017), namun pengumpulan zakat yang tercatat oleh BAZNAS pada tahun 2017 baru mencapai Rp 6 triliun. Penyelenggaraan jaminan produk halal dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan SDM, serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Sementara itu, kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat, yang ditandai dengan indeks kepuasan jamaah haji pada tahun 2019 sebesar 85,9 atau naik 0,7 poin dari tahun 2018 sebesar 85,2.

Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama menurun dari 75,4 pada tahun 2015 menjadi 73,8 pada 2019. Penurunan indeks ini menggambarkan masih lemahnya toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat. Untuk memperkukuh kerukunan berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.

Belum Optimalnya Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui internalisasi nilai dalam proses pengasuhan, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga merupakan pengasuh utama dan pertama bagi anak sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Sebagai orang tua, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan mengasuh anak di dalam keluarga.

Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (SUPAS, 2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen (61,75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 24 persen (19,45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018); (b) meningkatnya angka perceraian rata-rata 3 persen pertahun (Pengadilan Agama, 2017); dan (c) masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen berupa kehamilan tidak direncanakan, dan 1,3 persen perempuan yang menikah menganggap hamil bukan pada waktu yang tepat (SUPAS, 2015).

Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Pada era ini wajah dunia akan banyak berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak. Akibatnya akan banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin, meskipun di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasiskan pada inovasi dan kreativitas yang didasarkan pada akal budi dan karya budaya manusia.

Sementara itu literasi sebagai bentuk kemampuan kognitif (*cognitive skills)* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, dan relasi sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah. Salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat literasi suatu bangsa antara lain melalui budaya kegemaran membaca yang mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Tingkat literasi bangsa Indonesia memang masih perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data Susenas MSBP tahun 2018, penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,7 persen, sementara penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,5 persen. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan memperluas akses informasi dan pengetahuan ke seluruh pelosok negeri.

Sasaran, Indikator, dan Target

No	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
1	**Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya**		
	Indeks Capaian Revolusi Mental	67,0 (2018)	74,3
	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	N/A	77,0
2	**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan**		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	62,7
3	**Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial**		
	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,65
4	**Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat**		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,8	75,8
5	**Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa**		
	Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	61,0
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,8 (2017)	22,1
6	**Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif**		
	Nilai Budaya Literasi	55,0 (2018)	71,0

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter,** melalui:
   a. **Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti,** mencakup: (a) pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*); (b) penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan (c) peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan.

   b. **Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif,** mencakup: (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward)* dan sanksi (*punishment)* dalam birokrasi.

   c. **Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran,** mencakup: (a) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup; (b) peningkatan kualitas keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; dan (c) perwujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi media dan dunia usaha.

   d. **Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental,** mencakup: (a) pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu; dan (b) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah.

   e. **Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila,** mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan *platform* koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

   f. **Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme,** mencakup: (a) pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; (b) peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); (c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (d) membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

2. **Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,** melalui:
   a. **Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga,** mencakup: (a) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal; (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip; dan (c) pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.

   b. **Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat,** mencakup: (a) pengembangan produk seni, budaya, dan film; (b) penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional; (c) pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (d) pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, gerakan cinta laut, gerakan Indonesia bersih dan pengembangan sumber daya maritim.

   c. **Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,** mencakup: (a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (c) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

   d. **Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia,** mencakup: (a) pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara; dan (b) penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri.

   e. **Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan,** mencakup: (a) pengelolaan dana perwalian kebudayaan; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan; (c) peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan; (d) pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu; dan (e) pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan.

3. **Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,** melalui:
   a. **Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama,** mencakup: (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; (d) pengelolaan rumah ibadah

sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

b. **Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama,** mencakup: (a) pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

c. **Penyelarasan relasi agama dan budaya,** mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

d. **Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama,** mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

e. **Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan,** mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

4. **Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,** melalui:
   a. **Peningkatan budaya literasi,** mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; dan (c) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.

   b. **Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra** mencakup: (a) peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; (b) pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas; dan (c) revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa.

   c. **Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta,** mencakup: (a) peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini; dan (b) pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi.

   d. **Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,** mencakup: (a) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (b) pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi.

BAB VI

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness Report* tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71 dari 140 negara, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur 2020-2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal sosial dan budaya.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun sementara kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai alternatif sumber pendanaan terakhir.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

Perumahan dan Pemukiman

54,1%
Persentase RT yang Menempati Rumah Layak Huni

74,6%
Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi Layak*

87,8%
Persentase RT yang Memiliki Akses Air Minum Layak*

*Capaian sampai dengan 2018

Sumber Daya Air

16
Bendungan Baru

1 Juta Ha
Irigasi Baru

330
Pengendali sediman dan lahar

30 m³/detik
Tambahan kapasitas air baku

3 Juta Ha
Rehabilitasi Irigasi Eksisting

1.485
Pengendali banjir dan pengaman pantai

1.212
Embung

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

2,02 (2018)
Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas per 10.000 Kendaraan (baseline 2010: 3,93)

1,07 (2018)
Rasio Fatalitas Kecelakaan Pelayaran per 10.000 Pelayaran (baseline 2015: 1,38)

2,79 (2018)
Rasio Kejadian Kecelakaan Penerbangan per 1 juta Penerbangan (baseline 2015: 16,7)

2,02 (2018)
Rasio Kejadian Kecelakaan KA per 1 Juta km Perjalanan KA (baseline 2015: 1,15)

Konektivitas

Laut

120
Fasilitas Pelabuhan*

18
Rute Angkutan Barang Tol Laut

*Capaian sampai dengan 2018

Udara

14
Bandara Baru

88%
On Time Performance

Darat

3.387 km
Jalan Baru

92%
Kondisi Mantap Jalan Nasional 2019

BRT di **38** Kota

947 km
Jalan Tol Baru

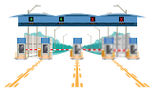

1.147 km
Jalan KA Baru

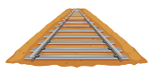

1
KA Perkotaan

Energi dan Ketenagalistrikan

98,86%
Rasio Elektrifikasi

1.077 kWh/kapita
Konsumsi Listrik

66,13 GW
Kapasitas Pembangkit

12,24%
Bauran EBT di Pembangkit

Teknologi Informasi dan Komunikasi

64,8%
Penetrasi Pengguna Internet 2018

Seluruh Ibukota Kabupaten/Kota telah tersambung jaringan tulang punggung *fiber optic*

90,8%*
Jangkauan Jaringan 4G

*466 Kab/Kota telah terjangkau jaringan 4G

Lingkungan dan Isu Strategis

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Meskipun tingkat kepemilikan rumah berada pada kisaran 80 persen dalam dasawarsa terakhir, namun masih terdapat 45,9 persen rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

Pada sisi permintaan, akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan diindikasikan dengan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap PDB Indonesia masih di bawah 3 persen (2017) dan cukup tertinggal dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 38,4 persen. Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan bagi yang membangun rumah secara swadaya.

Salah satu tantangan dalam perluasan akses tersebut adalah belum mapannya pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk masih terjadinya *maturity mismatch* sumber pembiayaan. Kebijakan pemerintah dalam pemberian kemudahan dan bantuan belum berjalan optimal dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah. Pada sisi lainnya jumlah bantuan yang diberikan belum proporsional dengan besar pendapatan penerima yang beragam.

Pada sisi pasokan, lokasi rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung tersebar serta menjauh dari pusat kota sehingga menyebabkan tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kondisi tersebut disebabkan oleh manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta tidak terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman. Di samping itu, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan untuk menjamin keandalan dan tertib bangunan dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana, serta mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

Dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan perumahan dan permukiman yang multisektor, masih diperlukan peningkatan keterpaduan kebijakan dan program

baik antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional keterpaduan kebijakan sangat diperlukan pada seluruh rantai pasok (*supply chain*) penyediaan perumahan terutama terkait pertanahan dan pembiayaan.

Di tingkat daerah, meskipun seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman namun keberadaannya belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.
Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non revenue water* dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDAM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen PDAM baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan keterbatasan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang lebih dapat meningkatkan minat investasi dan kerja sama badan usaha.

Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman.
Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61 persen rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R). Di sisi lain, upaya pengangkutan sampah di perkotaan mengalami tantangan karena masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis.

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas. Laporan *Urban Sanitation Development* Program tahun 2017 menunjukkan hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2 persen dari total APBD.

Fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, baru 77 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018).

Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman juga belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang, serta implementasi perencanaan yang belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah disusunnya dokumen SSK di 489 kabupaten/kota (di 33 provinsi) namun masih terdapat 9 provinsi yang memerlukan percepatan peningkatan akses sanitasi yang signifikan.

Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30 persen dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45 persen air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri *E.coli*. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif.

Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa.

Pemanfaaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.

Gambar 6.1
Bauran Sumber Air untuk Keperluan Domestik (2019)

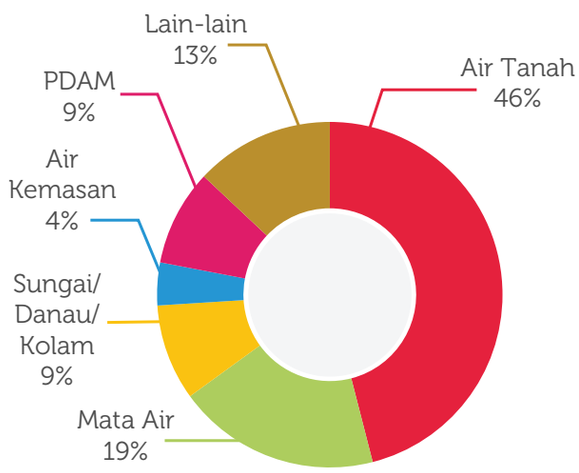

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Isu utama keselamatan moda transportasi jalan adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 29.478 orang, atau rata-rata mencapai 3-4 orang setiap jam. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ke-3 terbesar di Indonesia, setelah penyakit jantung dan stroke. Tingginya tingkat fatalitas mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, mengingat sebagian besar korban (77 persen) berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang pada umumnya merupakan pencari nafkah. Tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek, meliputi kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan. Koordinasi yang kurang optimal dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kendala terwujudnya sistem lalu lintas jalan yang lebih berkeselamatan.

Di bidang perkeretaapian, permasalahan utama keselamatan adalah kurangnya kelaikan kondisi sarana dan prasarana yang meliputi sarana kereta, prasarana rel, sistem persinyalan, telekomunikasi dan listrik kereta api. Pada saat ini, sebagian dari lokomotif maupun sarana KRL yang ada telah berusia di atas 30 tahun, sementara, berdasarkan tolok ukur internasional usia laik operasi bagi lokomotif dan sarana kereta api adalah di bawah 25 tahun. Selain itu, panjang jalur KA yang memenuhi standar (*Track Quality Index*/TQI kategori 1 dan 2) baru mencapai 81,5 persen dari keseluruhan jaringan KA. Data kecelakaan KA pada kurun 2015-2017 menunjukkan bahwa kecelakaan KA didominasi oleh kejadian tergelincir keluar jalur (anjlok) yang menggambarkan kondisi prasarana KA yang kurang memadai. Alokasi pendanaan untuk pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana kereta api (*infrastructure maintenance and operation*/IMO) baru mencapai 64 persen dari kebutuhan.

Tantangan utama keselamatan moda transportasi perairan yang meliputi angkutan laut serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah belum efektifnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran, belum optimalnya kelaikan prasarana dan sarana, belum terbangun atau berjalannya sistem informasi dan tiket, serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pada otoritas dan operator layanan angkutan. Belum optimalnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran terlihat dari belum efektifnya kewenangan syahbandar untuk memastikan muatan kapal sesuai aspek kapasitas penumpang maupun jenis barang. Permasalahan kapasitas sumber daya manusia adalah masih lemahnya kompetensi nahkoda dan awak kapal serta kapasitas syahbandar dalam melakukan inspeksi kelaikan pelayaran masih lemah. Selain itu, belum berkembangnya sistem informasi dan tiket mengakibatkan jumlah penumpang belum dapat terkendali sesuai dengan kapasitas kapal. Di samping itu, ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti peralatan navigasi dan pemantau cuaca masih terbatas.

Dari aspek pencarian dan pertolongan korban pada kejadian kecelakaan transportasi termasuk bencana, isu yang dihadapi adalah masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan. Kebutuhan tenaga penyelamat (*rescuer*) saat ini mencapai

3.564 personel, namun yang tersedia saat ini baru sejumlah 1.673 personel (46,94 persen). Aspek lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana pertolongan dan penyelamatan yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, jenis bencana, serta kemampuan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database*, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20 persen GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (*catchment area*). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m^3 dari target 14,7 miliar m^3 pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19 persen, bahkan di pulau Jawa mencapai 31 persen.

Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28 persen dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3 persen dari keseluruhan luas daerah irigasi.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara *online* dan *real time*. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa.

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total panjang jaringan jalan mencapai 582.200 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.183 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8 persen dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92 persen, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92 persen dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68 persen untuk provinsi, dan 57 persen untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Konektivitas Kereta Api

Isu utama konektivitas KA adalah masih rendahnya peran KA dalam mendukung angkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota secara lebih cepat dan efisien. Porsi angkutan barang yang diangkut oleh KA baru mencapai 2 persen dari jumlah barang yang diangkut oleh seluruh moda transportasi. Angkutan barang yang diangkut oleh KA masih didominasi oleh barang tambang. Sementara angkutan peti kemas yang berperan penting dalam sistem logistik belum memanfaatkan moda KA secara optimal. Peran KA juga masih terbatas dalam mendukung angkutan penumpang aglomerasi perkotaan dan koridor konurbasi kota-kota utama yang memiliki tingkat permintaan perjalanan antarkota yang tinggi. Waktu tempuh koridor aglomerasi Jakarta-Surabaya melalui KA saat ini masih 9 jam, demikian juga koridor Jakarta-Bandung yang masih memerlukan waktu 3-4 jam, sehingga tidak kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.

Konektivitas Laut

Isu strategis transportasi laut adalah belum terwujudnya efisiensi kinerja angkutan logistik yang antara lain disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang belum memenuhi standar (panjang dermaga, kedalaman kolam, dan alur pelayaran), jaringan pelayaran yang masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan *hinterland*, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Di samping itu, armada kapal niaga dalam negeri masih didominasi oleh kapal berumur di atas 25 tahun. Isu strategis lainnya adalah kebutuhan peran angkutan laut yang lebih besar dalam menjangkau daerah kepulauan dan 3T dalam rangka mengurangi disparitas harga barang antarwilayah. Moda angkutan laut yang melayani wilayah 3T masih belum mengoptimalkan keterpaduan antarmoda transportasi termasuk moda jalan, angkutan perintis darat, dan udara. Keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T juga disebabkan oleh belum memadainya fasilitas pelabuhan termasuk ketersediaan peralatan bongkar muat.

Konektivitas Udara

Isu strategis pembangunan transportasi udara adalah belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama. Kapasitas bandara termasuk landasan dan terminal masih belum optimal dalam memenuhi peningkatan pertumbuhan volume angkutan udara nasional yang mencapai 9 persen per tahun pada periode 2015-2017. Di samping itu, peran angkutan udara perintis belum optimal dalam mendukung pergerakan penumpang dan distribusi barang yang dapat menjangkau daerah 3T. Prasarana lapangan terbang kecil (*airstrip*) untuk mendukung angkutan di wilayah 3T, khususnya di wilayah Papua kondisinya kurang memadai, belum dikelola dengan baik, serta belum memenuhi standar keselamatan. Peran angkutan udara untuk mendukung sektor pariwisata masih terbatas. Kualitas pelayanan bandara serta rute angkutan udara yang mendukung pariwisata belum optimal. Selain itu, pengembangan bandara perairan (*waterbased airport*) dalam mendukung peningkatan destinasi pariwisata perairan belum berkembang.

Konektivitas Darat

Isu penting dalam penyelenggaraan transportasi darat adalah masih tingginya angka pelanggaran muatan berlebih (*overloading*) di jalan. Pada jalur Pantura Jawa, terdapat rata-rata 12.000 truk barang yang melintas per harinya, dimana sebanyak 67,5 persen truk yang diperiksa melanggar ketentuan batas maksimal kapasitas angkut. Pada sisi lain,

angkutan feri jarak jauh (*long distance ferry*/LDF) yang berpotensi untuk menurunkan beban angkutan jalan belum cukup berkembang. Pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih terbatas, khususnya untuk mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3T yang berbasis kepulauan. Selain itu, terdapat isu penggunaan kapal penyeberangan yang belum memenuhi spesifikasi dan berumur di atas 25 tahun, termasuk untuk mendukung angkutan perintis.

Infrastruktur Perkotaan

Transportasi Perkotaan

Isu strategis transportasi perkotaan adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan beberapa kota di Asia, jaringan MRT yang terbangun di Jakarta baru sepanjang 15 km, masih jauh di bawah Tokyo (304 km), Singapura (200 km), Hong Kong (187 km), dan Kuala Lumpur (52 km). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pangsa angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia. Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih di bawah 20 persen, sementara kota-kota besar lain di Asia telah memiliki pangsa angkutan umum di atas 50 persen, seperti Hong Kong (92 persen), Singapura (61 persen), dan Tokyo (51 persen). Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data *Tomtom Traffic Index* (2019), Jakarta menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia dari 403 kota yang disurvey di 56 negara. Nilai kerugian akibat kemacetan lalu lintas lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Upaya pengembangan angkutan umum massal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi dan berdaya jangkau di luar batas administrasi kota/daerah. Di samping itu, kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan yang modern.

Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan jika tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih menggunakan sumber energi fosil. Potensi tenaga surya yang merupakan salah satu sumber energi bersih di perkotaan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut karena pemanfaatan atap panel surya (*solar rooftop*) masih terkendala keterbatasan produksi sel surya dalam negeri, kebijakan harga yang belum mendukung, sifat energi surya yang tidak stabil (*intermitten*) dan jaringan listrik yang belum sepenuhnya dapat menerima pembangkit listrik yang berasal dari EBT.

Pemanfaatan energi bersih di sektor transportasi masih belum berkembang. Hal itu terlihat dari belum dimanfaatkannya kendaraan listrik dan angkutan masal bertenaga listrik. Demikian pula infrastruktur pengisian kendaraan listrik (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum/SPKLU) di berbagai kota juga masih terbatas.

Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan di berbagai kota besar. Pengembangan kota cerdas, sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan, saat ini belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan TIK di berbagai kota di tanah air saat ini masih rendah. Baru sedikit kota yang terlayani sistem layanan darurat 112 terintegrasi, sistem pelaporan masyarakat terpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR), serta layanan pemerintah berbasis digital lainnya. Selain itu, penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal. Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar di perkotaan masih rendah yaitu di bawah 9 persen dari rumah tangga perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan akses nirkabel. Di samping itu, pemanfaatan akses nirkabel tersebut juga masih lebih banyak dipergunakan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah atau kegiatan yang produktif, sehingga manfaat dari layanan TIK yang telah disediakan pemerintah menjadi kurang maksimal.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak di kawasan perkotaan baru mencapai 51,54 persen, termasuk di dalamnya cakupan layanan akses air minum perpipaan yang baru mencapai 29,30 persen. Begitu halnya dengan layanan air limbah domestik yang layak di perkotaan hanya 69,36 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses aman 11,12 persen. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (3,85 persen), dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/ sawah/sungai/danau/laut dan/ atau pantai/tanah lapang/kebun) sebesar 8,52 persen di perkotaan. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan *stunting*.

Di sisi lain, rendahnya akses air limbah yang aman di perkotaan disebabkan oleh pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota dan penyediaan layanan pengolaan lumpur tinja (*Fecal Sludge Management*) yang belum optimal. Perlu upaya dan kerja lebih keras dalam percepatan pembangunan penyediaan air minum dan air limbah khususnya di perkotaan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi.

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Saat ini terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan dibutuhkan upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada daerah tertentu, dibutuhkan konsolidasi tanah vertikal dalam rangka menangani permukiman kumuh sekaligus menyediakan pasokan rumah baru di perkotaan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

Energi dan Ketenagalistrikan

Pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu: (i) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; (ii) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; serta (iii) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara, dan gas bumi) yang mencapai 81,3 persen di 2018. Selain semakin terbatasnya ketersediaan energi fosil dari waktu ke waktu, hal tersebut berdampak pada penurunan mutu lingkungan akibat emisi CO_2 dan bahan partikulat yang cukup besar. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih jauh dari target bauran EBT pada penyediaan energi primer sebesar 23 persen di 2025 sesuai dengan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Isu penting lainnya adalah susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masih besar (9,55 persen pada tahun 2018). Hal ini menunjukkan pemanfaatan energi yang belum efisien. Hal tersebut akibat belum berkembangnya pengelolaan kualitas bahan bakar, penggantian mesin dan perangkat lunak untuk perangkat kontrol, serta belum berkembangnya pembangkit listrik yang menggunakan teknologi batubara yang lebih bersih. Begitu pula penggunaan gas bumi masih perlu tetap ditingkatkan untuk mengurangi penggunaan BBM (pengganti PLTD) dan menekan emisi karbon.

Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Tingkat keandalan pelayanan ketenagalistrikan juga masih perlu ditingkatkan. Rasio gangguan listrik tahunan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 15,97 jam per pelanggan. Artinya dalam satu tahun setiap pelanggan rata-rata masih mengalami gangguan pemadaman selama 15,97 jam. Sebagai salah satu contoh, di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu, rasio gangguan ini masih sangat tinggi mencapai 73,92 jam per pelanggan per tahun. Tingginya rasio gangguan tahunan tersebut menunjukkan masih rendahnya keandalan akses listrik di Indonesia.

Untuk kegiatan memasak, penduduk yang masih menggunakan kayu bakar juga masih cukup banyak (21,57 persen di 2017) karena pertimbangan harga dan keterjangkauan pelayanan. Di sisi lain, konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terutama untuk bahan bakar memasak sebagian besar masih berasal dari impor (75 persen) yang disebabkan karena penurunan produksi bahan baku dalam negeri, dan peningkatan konsumsi. Hingga tahun 2018, konsumsi LPG nasional per tahun mencapai 7,5 juta metrik ton (MT).

Untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil, pemerintah menyusun kebijakan subsidi energi. Namun, kebijakan dimaksud masih belum tepat sasaran, sehingga konsumsi energi cenderung belum efisien.

Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Indikator konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pembangunan sosial ekonomi dan produktivitas masyarakat suatu negara. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia saat ini baru mencapai 1.064 kWh pada tahun 2018, jauh dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 4.460 kWh pada tahun 2016. Pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas menjadi penyebab penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain.

Tata kelola industri ketenagalistrikan juga masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Di sisi lain, pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efisien dan berkembang.

Pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi juga masih menjadi tantangan. Pasokan dalam negeri belum sepenuhnya memadai akibat tata kelola sistem perdagangan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Demikian pula halnya dengan kapasitas infrastruktur kilang bahan bakar minyak yang relatif stagnan. Hal ini mengakibatkan besarnya impor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*). Tingkat kecepatan jaringan tetap dan jaringan bergerak pitalebar di Indonesia masih rendah. Kecepatan rata-rata jaringan tetap pitalebar baru mencapai 14,9 Mbps (2018) dibandingkan rata-rata dunia 46,1 Mbps (2018). Sementara rata-rata tingkat kecepatan jaringan bergerak pitalebar juga masih tergolong lambat, yaitu 10,4 Mbps (2018) dibandingkan rata-rata dunia berada pada 22,8 Mbps (2018). Jumlah pelanggan jaringan tetap pita lebar di Indonesia pada tahun 2018 juga masih sangat rendah (2,3 persen dari total populasi), jauh di bawah rata-rata dunia yang sudah mencapai 12,4 persen.

Jaringan tetap pitalebar perlu diperluas hingga menjangkau kecamatan sementara akses telekomunikasi dan internet melalui jaringan pitalebar perlu diperluas hingga seluruh desa. Saat ini masih terdapat 7.971 desa belum terlayani akses telekomunikasi dan internet karena tantangan geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Perluasan jaringan tetap pitalebar dan jaringan bergerak pitalebar akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Di samping itu, migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital divident*).

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Pemanfaatan TIK sudah diterapkan untuk perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa, maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyaknya data yang belum teringrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan pemerataan kualitas layanan. Meskipun demikian, saat ini penerapan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan khususnya di perdesaan masih belum maksimal sehingga pemerataan kualitas

pendidikan melalui TIK masih belum efektif. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan juga masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti *telemedicine, telediagnosis* dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif.

Dalam bidang ekonomi, industri, maupun jasa, pemanfaatan TIK juga dapat memberikan dampak yang besar. Namun demikian, saat ini pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim, sehingga manfaat TIK bagi petani dan nelayan belum signifikan seperti memberikan informasi harga yang paling aktual dan memperluas jaringan penjualan kepada nelayan. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi kreatif, pemanfaatan TIK berdampak besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kajian menunjukkan kontribusi mitra *start up ridesharing* mencapai Rp 44,2 triliun terhadap perekonomian nasional. Inovasi *start up digital* tersebut perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mempertimbangkan besarnya potensi pemanfaatan TIK tersebut, pemanfaatan TIK diharapkan dapat diperluas untuk digitalisasi seluruh sektor pembangunan.

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Perkembangan TIK disamping mempercepat penyediaan barang dan jasa, juga menghasilkan berbagai barang dan jasa baru yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut seperti Mahadata (*Big Data*). Agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan barang dan jasa hasil TIK, perlu ditingkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi.

Luasnya pemanfaatan TIK membutuhkan berbagai keahlian dalam mengelola perangkat TIK maupun memanfaatkan informasi. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK. Pengembangan TIK juga membutuhkan SDM yang berasal dari berbagai bidang khususnya *Science, Technology, Engineering*, dan *Mathematics* (STEM). Jumlah lulusan SDM bidang STEM di Indonesia masih tertinggal, hanya 0,8 lulusan per 1.000 penduduk, jauh dibandingkan India (2,0), China (3,4), bahkan Iran (4,2).

Pengembangan SDM TIK tersebut juga sejalan dengan besarnya pasar TIK di Indonesia. Pengembangan kemampuan SDM dalam memproduksi barang dan jasa TIK diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasar TIK. Peningkatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) TIK serta penyempurnaan kebijakan industri seperti insentif pasar dan fiskal perlu diberlakukan agar dapat mendorong peningkatan kemampuan industri TIK dalam negeri terutama menghadapi industri 4.0.

Di era digital, berbagai jenis data dan informasi dapat disimpan di jaringan internet yang saling terinterkoneksi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Terobosan teknologi tersebut telah memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian berbagai kemudahan tersebut juga memiliki konsekuensi potensi penyalahgunaan data dan informasi. Jaminan keamanan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mempertukarkan data dan informasi di jaringan internet menjadi tantangan yang perlu dimitigasi seperti melalui peningkatan keamanan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat.

Sasaran, Indikator, dan Target

No	Sasaran/Indikator*	*Baseline* 2019	Target 2024
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70
	2. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	3. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	4. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	5. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	6. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
	7. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	8. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	9. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	10. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta
	11. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	1 juta	500 ribu
	12. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	13. Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	25
	14. Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m^3/detik)	81,36	131,36
	15. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	16. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m^3/kg)	N/A	3
	17. Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20

No	Sasaran/Indikator*	*Baseline* 2019	Target 2024
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	1.461	2.500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
	4. Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65
	5. Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	6.164	7.451
	6. Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,5	94,0
	7. Rute pelayaran yang paling terhubung (*loop*) (%)	23	27
	8. Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	7
	9. Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25
	10. Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24	36
	11. Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	21
	12. Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	43
3.	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan		
	1. Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6
	2. Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	3	6
4.	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien		
	1. Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga (kumulatif) (Sambungan Rumah/SR)	537.936	4.000.000
	2. Jumlah Kapasitas Kilang Minyak (kumulatif) (*Barrel per Calendar Day*/BPCD)	1.151.000	1.276.000
	3. Kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita nasional (kWh)	1.077	1.400
	4. Rasio Elektrifikasi (%)	98,86	~ 100
5.	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi		
	1. Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	35,71	60
	2. Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	87,4	95
	3. Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	52,28	80
	4. Fasilitasi *start up unicorn* baru (perusahaan)	5	8

Arah Kebijakan dan Strategi

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:
1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
4) Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:
1) Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
2) Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
3) Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
5) Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), dilakukan melalui:
1) Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
2) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
3) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
4) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
5) Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Proyek prioritas mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi: i) Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru; ii) Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan; iii) Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah; iv) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; v) Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF); vi) Penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan (*Major Project*); dan vii) Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (a) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (b) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; dan (c) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (d) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (a) Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (b) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (c) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; dan (d) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (a) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; dan (b) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

Proyek prioritas mendukung Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan meliputi: i) Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah termasuk *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah); ii) Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA; dan iii) Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (*smart water management*).

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah:

1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui: (a) Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah; (b) Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai; (c) Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; (d) Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi

(Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi (e) Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta (f) Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui: (a) Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta (b) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).
3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:
(a) Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan; (b) Peningkatan dan pembangunan SPAM; (c) Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan); (d) Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan (e) Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; (f) Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
4) Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;

Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*); dan (h) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu

NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).

4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman meliputi: i) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi; v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90 persen RT) (*Major Project*); vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (*Major Project*).

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Kebijakan keselamatan transportasi difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Kebijakan ini diperkuat dengan penerbitan regulasi Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) yang memuat rencana aksi keselamatan jalan pada masing-masing pilar. Manajemen keselamatan jalan perlu berfokus pada penguatan koordinasi antarunit kerja pemangku kepentingan pada kementerian/lembaga tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan penelitian, badan usaha dan organisasi masyarakat. Diperlukan penguatan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dilakukan melalui keterpaduan koordinasi, pemanfaatan data dan informasi, dan kegiatan penelitian yang dapat menjadi basis bagi perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi keselamatan jalan nasional.

Untuk moda transportasi lainnya, kebijakan keselamatan diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan. Peningkatan keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kelaikan, termasuk sarana kereta, prasarana rel dan persinyalan. Untuk menjamin kondisi prasarana perkeretaapian maka kebutuhan perawatan prasarana harus dipenuhi. Tingkat keselamatan sarana perkeretaapian dipenuhi melalui peremajaan

armada kereta api sesuai dengan usia laik operasi yaitu dibawah 25 tahun. Keselamatan transportasi laut dan penyeberangan ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan syahbandar, penyediaan infrastruktur keselamatan, standardisasi kapal yang memenuhi aspek keselamatan, dan pengembangan sistem informasi penumpang (tiket) dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih.

Proyek prioritas mendukung keselamatan dan kemanan transportasi meliputi: i) Pelaksanaan rencana aksi lima pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; ii) Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR; serta iii) Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan transportasi dan SAR.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (a) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (b) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (c) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; dan (d) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (a) Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (b) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (c) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (d) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; dan (e) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (a) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (b) Konservasi kawasan rawa dan gambut; dan (c) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

Proyek prioritas yang mendukung. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur meliputi: i) Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketangguhan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana; ii) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana termasuk *Major Project* “Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis” dan “Pengelolaan Terpadu Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa”; iii) Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana; dan iv) Restorasi dan konservasi infrastruktur alami.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (a) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (b) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (c) Rehabilitasi bendungan kritis; dan (d) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (a) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (b) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (c) Revitalisasi danau kritis; dan (d) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (a) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (b) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (c) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; dan (d) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (a) Pembangunan jaringan irigasi baru; (b) Rehabilitasi jaringan irigasi; (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; (d) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; dan (e) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi rawa.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (a) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (b) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; dan (c) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

Proyek prioritas mendukung waduk multiguna dan modernisasi irigasi meliputi: i) Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami; ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan termasuk komponen *Major Project* "18 Waduk Multiguna"; iii) Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan; iv) Peningkatan OP dan keamanan bendungan; v) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi; vi) Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi.

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas Jalan

Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan. Di samping itu, diperlukan penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah. Sedangkan untuk penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan perlu dikembangkan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Proyek prioritas mendukung konektivitas jalan meliputi: i) Pembangunan jalan strategis, contoh: Jalan Trans Papua Merauke – Sorong (*Major Project*) dan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (*Major Project*); ii) Pembangunan jalan tol, contoh: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung (*Major Project*); iii) Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan); iv) Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal); v) Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran); serta vi) Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah.

Konektivitas Kereta Api

Pembangunan konektivitas kereta api diprioritaskan pada pengembangan KA Makassar-Parepare dan KA kecepatan tinggi Pulau Jawa. Pengembangan KA Makassar-Parepare dilaksanakan melalui keterpaduan pembangunan jaringan KA, pembangunan kawasan,

dan akses KA ke pelabuhan. Pendekatan terpadu ini diterapkan dengan skema KPBU yang terhubung dengan kawasan industri di Makassar dan sepanjang koridor KA serta dengan Pelabuhan Makassar *New Port* dan Pelabuhan Garongkong. Pembangunan KA kecepatan tinggi penumpang antarkota difokuskan pada koridor konurbasi Pulau Jawa khususnya antara Jakarta–Bandung dan Jakarta–Semarang. Pembangunan jalur KA pada koridor lain termasuk melanjutkan pembangunan jalur KA Trans Sumatera serta pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam rangka mendukung transportasi antarmoda menuju bandara dan pelabuhan, akan dilaksanakan pembangunan KA akses bandara dan pelabuhan.

Sementara, untuk memenuhi pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana serta fasilitas perkeretaapian dilaksanakan melalui mekanisme *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) perkeretaapian. Dalam rangka penyediaan layanan perkeretaapian dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat, diselenggarakan melalui skema PSO dan subsidi perintis.

Proyek prioritas mendukung konektivitas KA meliputi: i) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung) (*Major Project*); ii) Kereta Api Makassar-Pare Pare (*Major Project*); iii) pembangunan jalur KA baru (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) dan peningkatan jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera; iv) Pembangunan jalur KA akses bandara dan pelabuhan; v) Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilias perkeretaapian (IMO), serta vi) Penyediaan PSO dan perintis KA

Konektivitas Laut

Pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional dilaksanakan melalui standardisasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada sejumlah pelabuhan utama, antara lain meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat. Standardisasi kinerja yang disertai dengan pengembangan kawasan pada sejumlah pelabuhan utama diharapkan meningkatkan konsolidasi angkutan barang domestik serta memungkinkan kapal-kapal berukuran lebih besar untuk singgah membentuk rute jaringan saling terhubung (*loop*). Terdapat tujuh pelabuhan utama yang dirancang menjadi titik konsolidasi barang domestik yaitu pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar New Port, Bitung, dan Sorong.

Kelembagaan koordinasi antara operator pada ketujuh pelabuhan tersebut perlu dibangun untuk menjamin tingkat standardisasi dan kompatibilitas infrastruktur dan pelayanan pada tujuh pelabuhan, sehingga mendorong terwujudnya efisiensi pelayaran. Peningkatan kinerja logistik juga perlu dilakukan melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara seluruh pelaku logistik serta pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda yang lebih efisien untuk akses maupun pada kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*). Selain itu perlu dilakukan peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri untuk pembuatan kapal. Untuk mendukung pembangunan di wilayah 3T, pembangunan konektivitas laut diarahkan pada penguatan keterpaduan angkutan tol laut bersubsidi dengan moda transportasi lain termasuk angkutan barang udara bersubsidi (jembatan udara) dan angkutan perintis darat.

Proyek prioritas mendukung konektivitas laut meliputi: i) Pengembangan pelabuhan utama, contoh: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Major Project*), ii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung tol laut, iii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas, contoh: pelabuhan *cruise*, iv) Penyelenggaraan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, v) Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut, dan vi) Pengembangan teknologi informasi pelayaran.

Konektivitas Udara

Pembangunan transportasi udara difokuskan pada peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T. Pembangunan/peningkatan kapasitas bandara dilakukan melalui pembangunan bandara baru pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan pengembangan bandara, pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI), serta serta pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata perairan. Dukungan aksesibilitas daerah 3T dilaksanakan melalui peningkatan cakupan layanan penerbangan perintis, implementasi Program Jembatan Udara terpadu dengan Tol Laut di Papua, serta revitalisasi skema subsidi perintis penerbangan yang menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan (*multiyears*), termasuk menggali potensi pemanfaatan skema pembiayaan KPBU-AP. Kebutuhan konektivitas udara di wilayah terpencil, terutama di Papua yang tergambar dari keberadaan lapangan terbang (*airstrip*) yang cukup dominan, perlu diakomodasi melalui dukungan regulasi, pembinaan dan pengawasan termasuk aspek keselamatan.

Proyek prioritas konektivitas udara meliputi: i) Jembatan Udara 37 Rute di Papua (*Major Project*), ii) Pembangunan 21 bandara baru, iii) Pengembangan 10 bandara hub primer, iv) Rehabilitasi dan pengembangan 175 bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI), serta v) Pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) di 5 lokasi mendukung destinasi pariwisata perairan.

Konektivitas Darat

Pembangunan transportasi darat diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP), pengembangan fasilitas dan perlengkapan jalan, serta pembangunan terminal antarnegara untuk mendukung kemudahan arus penumpang dan barang di wilayah perbatasan negara, pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, pembangunan kapal penyeberangan untuk mendukung daerah 3T, dan penyediaan subsidi perintis untuk angkutan penyeberangan, sungai, danau dan bus. Selain itu, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan transportasi antarmoda akan dilaksanakan penyediaan angkutan bus yang terhubung dengan simpul-simpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Proyek prioritas konektivitas darat meliputi: i) Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara, ii) Pembangunan 26 unit kapal penyeberangan, iii) Pembangunan 36 pelabuhan penyeberangan baru, serta iv) Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang.

Infrastruktur Perkotaan

Transportasi Perkotaan

Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan diprioritaskan pada 6 (enam) kota metropolitan utama, yaitu kawasan metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Dalam upaya percepatan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan metropolitan, disiapkan program pembangunan angkutan umum massal perkotaan yang mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sejumlah kriteria. Kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu tersedianya rencana mobilitas perkotaan terpadu dan keberadaan kelembagaan otoritas transportasi perkotaan yang berbasis wilayah metropolitan (lintas batas administratif).

Proyek prioritas transportasi perkotaan meliputi: i) Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (*Major Project*); ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan.

Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan adalah:

1) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui (a) pemberian kemudahan perijinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar; (b) meningkatkan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar; dan (c) mendorong pengembangan layanan, aplikasi, maupun konten yang mencerdaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan;
2) Pengembangan sistem layanan panggilan darurat 112, melalui (a) pengembangan sistem layanan panggilan darurat dan pedoman penyelenggaraan bagi kabupaten/kota; (b) implementasi dan pendampingan sistem layanan panggilan darurat mandiri pada kabupaten/kota terpilih; dan (c) memperluas penggunaan sistem layanan panggilan ke kabupaten/kota;
3) Pengembangan sistem *Public Protection and Disaster Relief* (PPDR), melalui (a) pengembangan *pilot project* sistem PPDR dan ujicoba penggunaan spektrum frekuensi khusus untuk kebencanaan; (b) penyusunan regulasi, standar layanan dan perangkat untuk sistem PPDR; dan (c) implementasi sistem PPDR terutama pada kabupaten/kota rawan bencana

Proyek prioritas mendukung infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan adalah Pengembangan TIK Perkotaan.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan adalah:

1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui (a) penguatan fungsi operator dan regulator; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (*Fecal Sludge Management*); (c) penyediaan layanan terintegrasi air minum, air limbah dan persampahan; (d) pengembangan kawasan dengan layanan air siap minum (*portable water*) / Zona Air Minum Prima (ZAMP); dan (e) peningkatan keandalan pengelolaan jaringan air minum melalui *Smart Grid Water Management*.
2) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan adalah Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

Proyek prioritas yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

Energi dan Ketenagalistrikan

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui (a) peningkatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa, serta EBT lainnya; (b) pengembangan *mini/micro grid* berbasis energi bersih; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai; serta (d) pemanfaatan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS terapung (*floating solar power plant*) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan *Energy Service Company* (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi; (c) pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*) dan (e) pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*high efficiency and low emission*/HELE).
3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui (a) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (b) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (c) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (d) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (e) peningkatan infrastruktur gas bumi, khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non pipa khususnya LNG *receiving terminal*; (f) pengembangan cadangan penyangga/operasional BBM dan LPG; (g) pembangunan jaringan gas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik; (h) peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; (i) perluasan penyaluran BBM satu harga; dan (j) pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.
4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, ditempuh melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; serta (c) mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi; (c) memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen dan *leverage asset*; serta (d) pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan meliputi: perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan meliputi: i) Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; ii) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*); dan iii) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM) (*Major Project*). Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik adalah peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk di dalamnya dua *Major Project*; i) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA (*Major Project*); dan ii) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (*Major Poject*).

Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung penuntasan infrastruktur TIK adalah:

1) Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
2) Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan
3) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar.
4) Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra pemerintah yang aman;
5) Pengembangan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional;
6) Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut;
7) Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan; dan
8) Mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.

Proyek prioritas mendukung penuntasan infrastruktur TIK meliputi: i) Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; ii) Pengembangan infrastruktur penyiaran termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; dan iii) Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK adalah:

1) Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian;

2) Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan *start up* yang ada, terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari investor global; dan
3) Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

Proyek prioritas mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK meliputi: i) Pemanfaatan TIK layanan pemerintah; dan ii) Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha.

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi digital adalah:

1) Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui (a) harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; (b) peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (c) peningkatan literasi digital masyarakat; dan (d) membangun industri perangkat TIK (5G, IoT, AI, dan lain-lain) di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi.
2) Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui (a) mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan; (b) mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan; dan (c) mendorong terbentuknya dashboard data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan.

Proyek prioritas mendukung fasilitas pendukung transformasi digital meliputi: i) Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; ii) Pengembangan literasi dan keahlian TIK; dan iii) Pengembangan dan fasilitasi industri TIK.

BAB VII

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Pendahuluan

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

01

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berfluktuasi dari 64,8 di tahun 2015; menjadi 65,7 di tahun 2016; 66,5 di tahun 2017; dan 65,1 di tahun 2018

02

Pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, dari 2.611.411 ha di tahun 2015, menjadi 510.564 ha di tahun 2018

03

Penurunan laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,1 juta ha di tahun 2015 menjadi 0,5 juta ha di tahun 2017

04

Terkelolanya 27,4 juta ha kawasan hutan konservasi dan 20,9 juta ha kawasan konservasi laut hingga tahun 2018

05

Penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dari 169,4 di tahun 2015, menjadi 135,8 di tahun 2018

06

Pembentukan 34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan 481 BPBD di tingkat kabupaten/kota

07

Peningkatan jumlah informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang disampaikan kepada masyarakat, dari 850 kali di tahun 2015 menjadi 37.230 kali di tahun 2016, dan akurasinya meningkat 1% dibanding Tahun 2014

08

Peningkatan jumlah informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami yang disampaikan kepada masyarakat, dari 151 kali di tahun 2015 menjadi 181 kali di tahun 2016, dan akurasinya meningkat 13,8% dibanding Tahun 2014

09

Terlaksananya uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim (RAN-API) pada 15 daerah percontohan dan kaji ulang pada 4 sektor prioritas (Kelautan dan pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan);

10

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 22,6% di tahun 2018

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Walaupun mengalami peningkatan di tahun 2018, kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum kurang menunjukkan peningkatan sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, serta hanya kualitas tutupan lahan yang mengalami perbaikan.

Penanganan sumber pencemar belum optimal. Realisasi penanganan dan pengurangan sampah domestik masih di bawah target RPJMN 2015-2019. Begitu pula kinerja pengendalian pencemaran sampah plastik dan limbah industri masih perlu lebih ditingkatkan.

Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan kritis di dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan daerah aliran sungai (DAS) belum memenuhi target akibat terkendala hak dan status lahan kritis yang akan direhabilitasi, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar DAS. Namun demikian, laju deforestasi di dalam kawasan hutan berhasil diturunkan. Luas hutan dan lahan terbakar juga telah berkurang secara signifikan melalui penanggulangan yang efektif.

Upaya konservasi kawasan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati menunjukkan capaian yang positif. Luas serta efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi laut terus ditingkatkan. Selain itu, sampai tahun 2018 telah dilakukan penetapan serta pembinaan terhadap 35 unit kawasan ekosistem esensial (KEE) meliputi *karst, mangrove*, koridor hidupan liar, dan taman kehati dengan luas total 1.447.576,3 ha sehingga ~73 persen dari target kumulatif di tahun 2019 (48 unit) sudah tercapai.

Capaian kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta penegakan hukum pidana. Penegakan hukum yang diberikan dapat membuat perubahan perilaku dan efek jera sehingga dapat melindungi hutan dan lingkungan hidup. Namun demikian, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dari denda maupun nilai pengganti kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan akibat beberapa proses eksekusi putusan pengadilan belum berhasil dilaksanakan. Kedepannya dalam penyelesaian eksekusi akan dicoba melalui pendekatan kerja sama dengan melibatkan institusi penegakan hukum lainnya.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya (>75 persen) merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi

Gambar 7.1
Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019

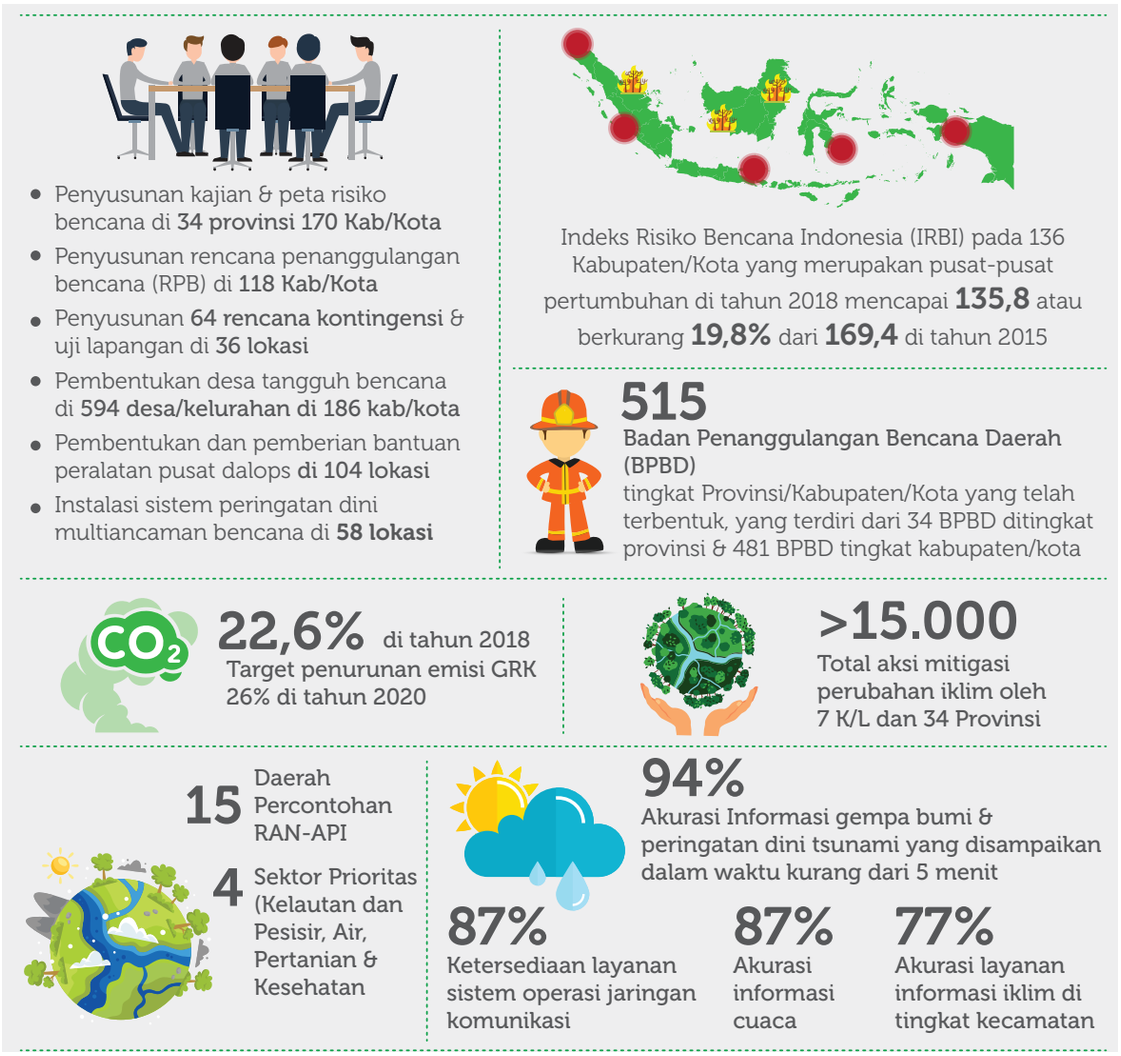

perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB), maka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkan (Gambar 7.1). Capaian tersebut dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha.

Capaian lain yang telah diwujudkan dalam kerangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*) adalah upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas adaptif, yakni kemampuan/kesiapan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak bencana di daerah-daerah rawan bencana. Upaya mitigasi dan peningkatan peningkatan kapasitas adaptif dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor prioritas; peningkatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan dan simulasi situasi bencana (*drill*); serta peningkatan regulasi terkait ketahanan terhadap bencana dan iklim pada sektor prioritas.

Peningkatan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana dilakukan melalui beberapa perbaikan kerangka peraturan perundangan dan kelembagaan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada beberapa lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang didukung oleh basis data yang kuat dari pilar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi bencana geologi dalam penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan infrastruktur tahan bencana. Hal lain yang dicapai adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontingensi, pembentukan desa tangguh bencana (destana) dan inisiasi program keluarga tangguh bencana (katana), penguatan sumber daya penanggulangan bencana, yang diantaranya melalui pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi (PUSDALOP), pelatihan relawan kebencanaan, dan penyediaan peringatan dini gelombang tinggi saat terjadinya siklon tropis dan cuaca ekstrem lainnya. Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan akurasi layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit, serta instalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana. Dalam kerangka pembiayaan, telah dilanjutkan komitmen Pemerintah dalam pembiayaan penanggulangan bencana, khususnya dalam rangka investasi pengurangan risiko bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta inisiasi berbagai inovasi pembiayaan kebencanaan.

Adapun dalam rangka meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap perubahan iklim telah dilaksanakan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada empat sektor prioritas (air, pertanian, pesisir dan laut, serta kesehatan) di 15 daerah percontohan. Peningkatan ketahanan iklim juga didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Kedepannya, agenda konvergensi antara adaptasi perubahan iklim (API) dengan pengurangan risiko bencana (PRB) akan semakin ditingkatkan, baik melalui kegiatan perencanaan dan upaya terintegrasi secara lintas sektor, antar wilayah dan para pemangku kepentingan serta kerja sama di tingkat global.

Pembangunan Rendah Karbon

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) semakin mendekati target penurunan emisi GRK 26 persen di tahun 2020. Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 22,59 persen dari Baseline akumulatif hingga tahun 2018. Capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2018 adalah sebesar 23,18 persen atau 452.613 Ribu Ton CO_2e. Adapun intensitas Emisi GRK pada tahun 2017 adalah sebesar 412 ton CO_2e/miliar rupiah.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan RAN-GRK dengan membandingkan antara target dan capaian penurunan emisi GRK tahun 2018 menunjukkan tiga sektor (bidang berbasis lahan, energi, dan IPPU) telah mencapai, bahkan melebihi target tahunan. Perbandingan capaian dan target penurunan emisi GRK tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Selain penurunan emisi GRK, program-program pembangunan rendah karbon berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai

contoh, pembangunan rendah karbon sektor energi yang dilakukan melalui 3 (tiga) program inti yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, dan substitusi bahan bakar minyak telah menunjukkan beberapa hasil positif. Penggunaan bahan bakar nabati B20 sebagai subtitusi BBM yang tercatat menyumbang penghematan negara sebesar USD385.926.208 diantara periode 2018/2019. Penghematan ini menjadi angin segar dalam upaya pemerintah Indonesia menangani *Current Account Deficit*. Selain itu, melalui upaya efisiensi energi yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, Pemerintah Indonesia mampu mencatat penurunan intensitas energi (konsumsi energi per miliar PDB) sebesar rata-rata 2 persen per tahun. Hal ini menunjukkan fluktuasi konsumsi energi sektor industri yang relatif stabil serta efisiensi sektor industri dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat.

Pada bidang kehutanan, penurunan emisi GRK paling tinggi diturunkan dari adanya kebijakan moratorium hutan, pengendalian kebakaran hutan, dan upaya rehabilitasi hutan. Berdasarkan data BPS tahun 2018, luas areal kelapa sawit perkebunan dari tahun 2000 hingga tahun 2018 terus meningkat. Luasan areal kelapa sawit pada tahun 2018 diperkirakan telah mencapai 12,7 juta Ha. Optimalisasi produktivitas lahan sawit yang dapat ditingkatkan diperkirakan dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi maupun menekan laju deforestasi hutan menjadi lahan sawit. Selain peningkatan produktivitas lahan sawit, upaya sertifikasi penjaminan kelestarian sawit melalui sertifikasi RSPO apabila terus ditingkatkan juga memiliki dampak positif bagi upaya tata kelola lahan berkelanjutan.

Sementara di bidang Pengelolaan Limbah potensi penurunan emisi GRK utamanya berasal dari kegiatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah (pembangunan TPA dan pembangunan TPS3R/TPST). Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon dari bidang pengelolaan limbah, selain berkontribusi dalam penurunan emisi GRK juga berpotensi dalam peningkatan akses sanitasi serta melindungi kualitas lingkungan dari pencemaran sampah dan limbah domestik. Melalui Jakstranas dan Jakstrada terkait pengelolaan sampah rumah tangga, kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada Tahun 2025, upaya tersebut diharapkan dapat menjadi program pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir.

Tabel 7.1
Perbandingan antara Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK

No	Bidang	Target Penurunan Emisi GRK 2018	Potensi Penurunan Emisi GRK 2018	Persentase Pemenuhan Target (Efektivitas)
1	Kehutanan dan Lahan Gambut serta Pertanian	1.141.745,26	377.634,56	33,1%
2	Energi, Transportasi dan Industri	733.834,99	70.030,83	9,5%
3	Pengelolaan Limbah	168.106,64	4.948	2,9%

Catatan:
- Target Penurunan Emisi GRK menggunakan hasil pemodelan sistem dinamik (Indoclimos) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas
- Capaian penurunan emisi GRK merupakan pelaporan dari K/L dan pemerintah daerah pada tahun 2018

Lingkungan dan Isu Strategis

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan.

Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 45 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi

Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran air yang berasal dari permukiman, industri, pertanian serta kegiatan pertambangan. Kajian Bappenas (2018) menunjukkan kandungan *Biological*

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 juta ha) tahun 2017 hingga tinggal 45% (84,7 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045.

Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.

Luas habitat ideal
satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045.

Oxygen Demand (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) rata-rata (mg/L) secara nasional diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai rata-rata BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal. Beberapa sumber pencemar yang perlu menjadi prioritas penanganan antara lain adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan limbah B3.

Pada tahun 2018, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 68,8 persen dari total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 65,8 juta ton, sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,8 persen. Sebagai dampaknya, terdapat timbulan sampah yang tidak tertangani sebesar 28,4 persen atau sekitar 18,7 juta ton yang dibuang langsung ke lingkungan (*leakage*) dan menimbulkan pencemaran. Dari timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut, sekitar 0,7 juta ton/tahun terbawa hingga ke laut, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan sampah plastik.

Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sampah plastik juga mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung laut, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan laut kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan dampak dan masalah kesehatan di kemudian hari.

Kondisi tersebut disebabkan sistem pengelolaan sampah secara nasional yang masih belum optimal, baik dari sisi infrastruktur, sarana prasarana penunjang, retribusi pengelolaan sampah, kapasitas SDM, kelembagaan, maupun penegakan hukumnya. Untuk itulah diperlukan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir menuju ekonomi sirkular.

Isu Limbah B3 dan Limbah Medis juga perlu menjadi prioritas penanganan secara nasional. Pada tahun 2018, jumlah timbulan limbah B3 dari RS adalah 294,7 ton/hari sementara jumlah rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3 adalah sebanyak

69 rumah sakit dengan kapasitas pengolahan 54,2 ton/hari dan jumlah jasa pengolah limbah medis (pihak ketiga) berizin: 6 jasa dengan kapasitas 115,7 ton/hari. Mengacu kepada data tersebut, diperkirakan terdapat 41.9 persen limbah B3 medis yang belum terkelola dan berpotensi terbuang langsung ke lingkungan atau ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti *illegal logging*, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, *illegal logging*, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar Rp7,3 triliun per tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar Rp66,8 triliun per tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan, skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi, besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan, serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Tingginya Risiko Bencana di Indonesia

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75 persen

Gambar 7.2
Grafik Perbandingan Bencana dan Jumlah Kejadian
Bencana Hidrometeorologi

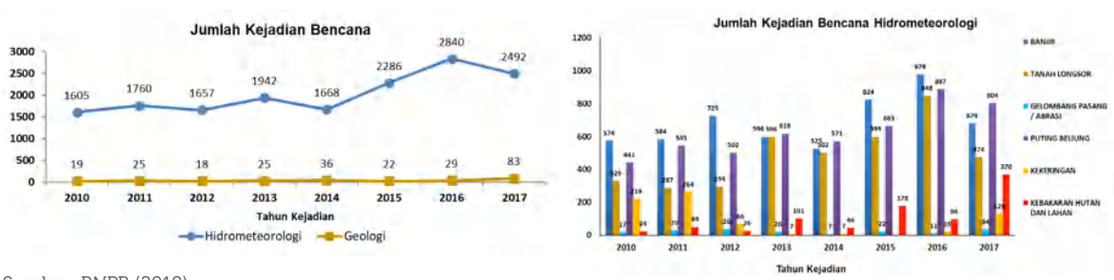

Sumber: BNPB (2018)

infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

Berdasarkan data pada Gambar 7.2 dapat dikenali perbandingan jumlah dan tren peningkatan antara dua jenis kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan bencana akibat aktivitas geologi.

Gambar 7.3
Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017

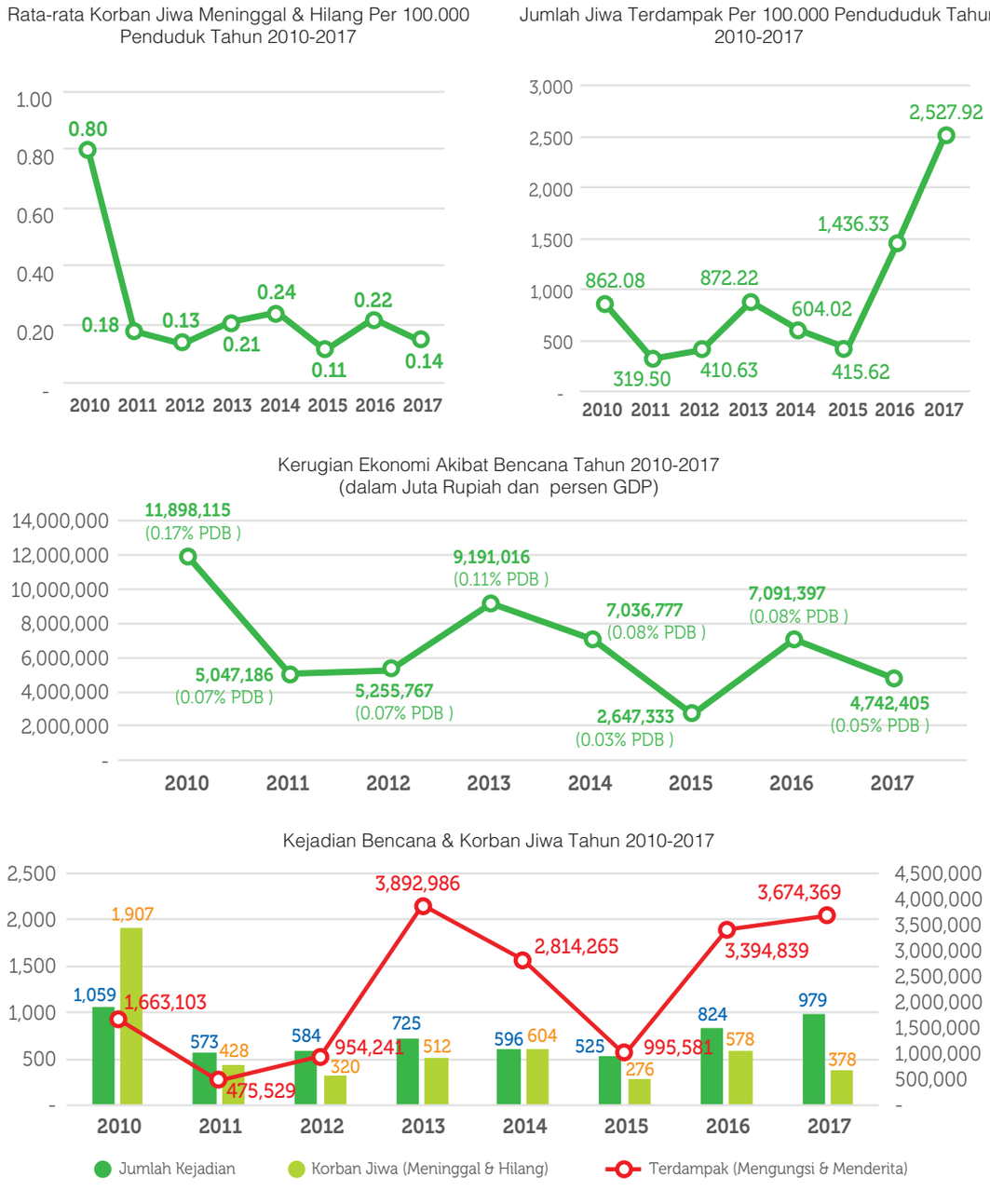

Sumber: BNPB (2018)

Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi jauh lebih besar dan cenderung semakin meningkat dibandingkan bencana geologi.

Selama kurun waktu 8 tahun (2010-2017) terjadi peningkatan 887 kejadian bencana hidrometeorologi; sementara dalam kurun waktu yang sama, bencana geologi meningkat 64 kejadian. Jenis bencana hidrometereologi dengan peningkatan jumlah kejadian terbesar selama kurun waktu 2010-2017 adalah puting beliung (363 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (346 kejadian), tanah longsor (145 kejadian), banjir (105 kejadian), dan gelombang pasang/abrasi (17 kejadian).

Meskipun sebagian besar kejadian bencana dipicu oleh faktor iklim, namun karakteristik geologi yang berada di pertemuan antarlempeng juga menjadikan Indonesia menjadi kawasan yang rawan dengan bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api dan potensi tsunami. Secara frekuensi bencana geologi ini memang jarang, namun lebih berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam skala besar akibat banyaknya pemukiman penduduk dan infrastruktur penting yang dibangun di sekitar sesar aktif (Gambar 7.3).

Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi

Indonesia adalah wilayah yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa (Pusgen 2018) segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitude 6,5 diidentifikasi mencapai 280 sesar (Gambar 7.4). Hal ini menunjukan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya goncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 5 SR juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada sesar tektonik di kedalaman

Gambar 7.4
Paparan dan Kerentanan
terhadap Bahaya Bencana Gempa bumi dan Sesar Aktif

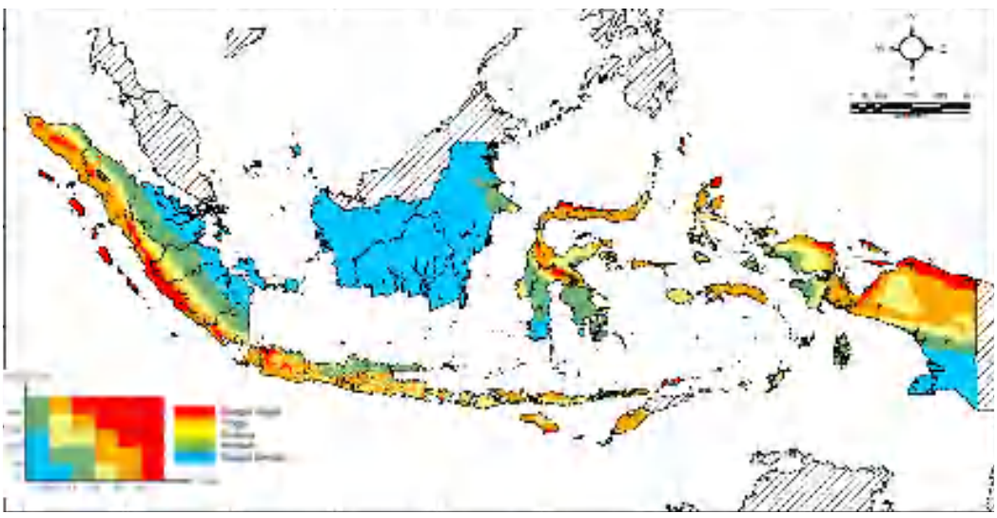

Sumber: Pusgen (2018)

yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat. Upaya pengamatan gempa bumi dengan magnitudo kecil tersebut hingga saat ini masih belum optimal sehingga informasinya pun tidak tersampaikan dengan baik. Masih dibutuhkan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas peralatan pemantauan *short period seismograph* sensor yang peka terhadap gempa skala kecil, terutama pada lokasi yang berada di sekitar sesar aktif.

Risiko tinggi karena goncangan yang tinggi (>0,5 g) diestimasi pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua yang diberi warna merah. Sementara itu, wilayah berisiko tinggi dengan bahaya goncangan lebih dari 0,1 g dan memiliki densitas populasi tinggi berada pada kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banda Aceh, dan sekitarnya.

Sebaran penduduk terdampak oleh gempa bumi adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, yakni sekitar 50 persen penduduk Indonesia (±130 juta jiwa). Pulau Sumatera (±48 juta jiwa), Pulau Sulawesi (±21 juta jiwa), Kepulauan Nusa Tenggara (±7 juta jiwa), Kepulauan Maluku (±6 juta jiwa), dan Pulau Papua (±4 juta jiwa). Sementara itu, Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk terdampak gempa bumi paling sedikit, yakni ±2 juta jiwa.

Indonesia juga tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami (Gambar 7.5).

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Penduduk yang terdampak bahaya bencana tsunami pada tahun 2015 berjumlah 3,7 juta jiwa dan pada tahun 2030 diproyeksikan berpotensi bertambah menjadi 4,4 juta jiwa atau naik 19 persen (BNPB 2019).

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di masyarakat masih belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempa bumi dan tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat serta masih kurangnya penelitian 'prekursor' (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat.

Jangkauan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Peningkatan frekuensi kejadian gempa bumi termasuk yang berpotensi tsunami menjadi peringatan bahwa keterpaparan masyarakat akan bencana tersebut masih tinggi.

Gambar 7.5
Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Gempa bumi dan Tsunami

Lokasi Riwayat Kejadian Gempa bumi dan Tsunami

Peta Risiko Tsunami di Indonesia

Sumber: BNPB (2019)

Tidak hanya gempa dan tsunami, Indonesia juga berpotensi terdampak bencana geologi yang berasal dari erupsi gunung api. Tercatat sebanyak 127 gunung api (sekitar 13 persen gunung api di dunia) tersebar di wilayah Indonesia. Gunung api tersebut membentuk busur kepulauan yang membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangir Talaud (Gambar 7.6 dan Tabel 7.2).

Erupsi gunung api dapat menyebabkan bencana bagi penduduk di sekitarnya. Tidak kurang dari 5 juta jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunung api aktif, sehingga risiko bila terjadi bencana erupsi gunung api sangat besar. Dalam beberapa tahun ke depan, potensi

Gambar 7.6
Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Erupsi Gunung Api

Sumber: PVMBG (2015)

Tabel 7.2
Gunung Api Aktif di Indonesia

No	Kategori	Jumlah Gunungapi Aktif			Jumlah
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	
1	Sumatera	13	11	6	30
2	Jawa	19	10	5	34
3	Lombok	1	-	-	1
4	Bali	2	-	-	2
5	Sumbawa	2	-	-	2
6	Flores	17	3	5	25
7	Laut Banda	7	2	-	9
8	Sulawesi	6	2	5	13
9	Kepulauan Sangihe	5	-	-	5
10	Halmahera	5	1	-	6
	Jumlah	77	29	21	127

Sumber: Renas PB 2015-2019

risiko bencana gunung api yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon. Sedangkan kawah gunung api yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen dan Gunung Dempo.

Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim

Tren bencana hidrometereologi semakin meningkat di Indonesia dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrem jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrem semakin sering terjadi, sementara dalam jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.

Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan di wilayah Indonesia terus meningkat secara konsisten. Tren kenaikan temperatur juga sudah mulai dirasakan saat ini, dengan peningkatan mencapai 0,5°C di tahun 2020 dibanding rata-rata temperatur tahun 2000. Kenaikan temperatur antara tahun 2020-2024 berbeda-beda antar wilayah di Indonesia. Pada daerah perkotaan dan daerah dengan struktur terbangun yang masif peningkatan temperatur dapat lebih tinggi lagi, hingga memunculkan fenomena *urban heat island*.

Upaya antisipatif terhadap kenaikan temperatur permukaan perlu dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi dampak dan risiko yang akan terjadi dalam jangka panjang. Peningatan temperatur udara secara terus menerus akan berakibat pada meningkatnya cuaca ekstrem serta periode dan intensitas kekeringan, menghambat pertumbuhan tanaman pertanian utama, hingga menimbulkan gangguan kesehatan akibat tekanan panas (*heat stress*). Oleh karena itu, upaya penanganan kenaikan temperatur akibat dampak perubahan iklim sudah harus menjadi prioritas sejak periode RPJMN 2020-2024 ini.

Selain kenaikan temperatur, perubahan iklim juga mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Besarnya pengaruh perubahan iklim terhadap curah hujan di Indonesia ditunjukkan dengan semakin tingginya curah hujan pada bulan-bulan basah dan semakin rendah curah hujan pada bulan-bulan kering dengan rentang nilai perbedaan curah hujan berkisar -2,5 hingga 2,5 mm/hari.

Gambar 7.7
Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Kering Tahun 2020-2025

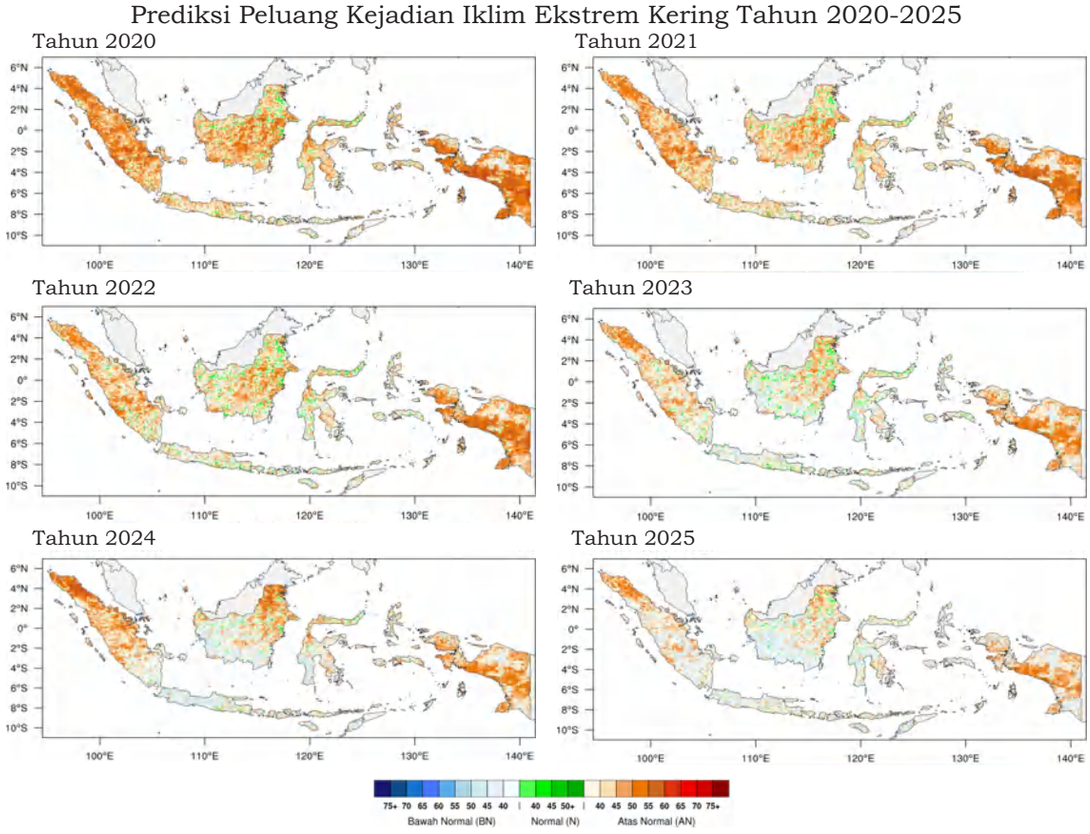

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Hasil prediksi iklim dasawarsa untuk Indonesia menunjukkan bahwa di masa mendatang akan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan pada saat *El Nino* berlangsung, baik secara independen atau saat *El Nino* berbarengan dengan fenomena *Indian Ocean Dipole* (IOD) positif. Prediksi dasawarsa untuk periode RPJMN juga menunjukkan kejadian iklim ekstrem kering akan lebih sering berpeluang di atas normal (AN), yang diprediksi meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Gambar 7.7). Sementara itu, prediksi indeks ekstrem basah (Gambar 7.8) menunjukkan adanya variasi selama periode RPJMN, dimana beberapa wilayah diprediksi akan lebih sering berada dalam kondisi di atas normal (AN) terutama di wilayah selatan Indonesia, meliputi bagian selatan Sumatera dan Sulawesi, sebagian besar Pulau Jawa serta sebagian Nusa Tenggara dan Maluku.

Pada peristiwa iklim ekstrem kering, perhatian lebih perlu ditujukan terutama pada wilayah-wilayah yang berpotensi besar mengalami bencana seperti kebakaran hutan, kegagalan panen dan kekurangan air bersih. Selain itu, untuk antisipasi dampak lainnya yang mungkin terjadi seperti masalah polusi udara, kesehatan dan keselamatan transportasi akibat gangguan asap. Sementara pada wilayah yang mengalami kejadian iklim ektrem basah diperlukan adanya langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Gambar 7.8
Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Basah Tahun 2020-2025

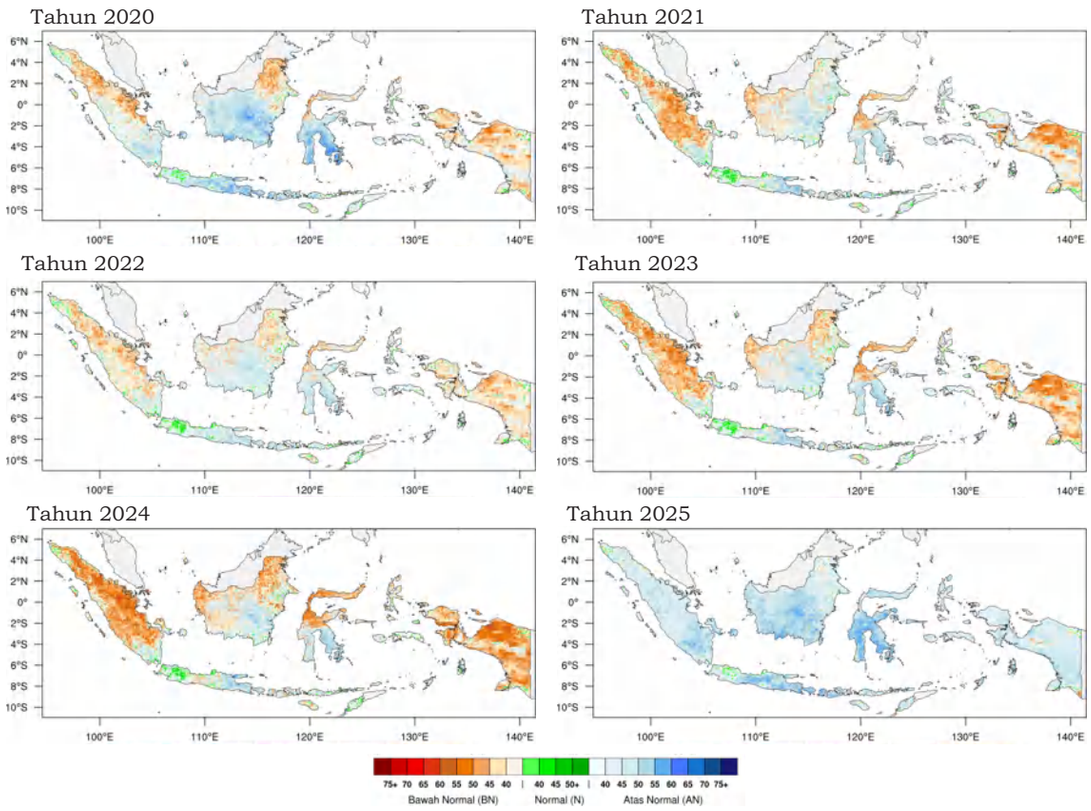

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Gambar 7.9
Peta Proyeksi Bahaya Iklim Gelombang di Perairan Indonesia Tahun 2045

(a) Bahaya iklim gelombang

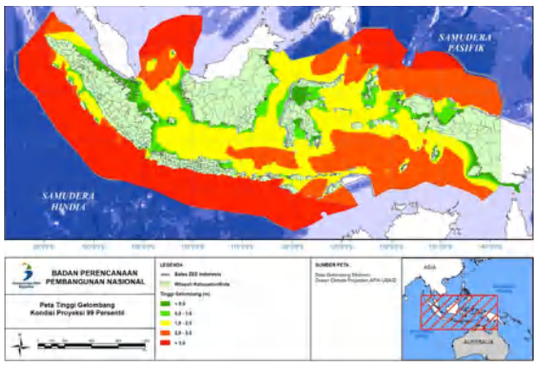

(b) Bahaya keselamatan pelayaran bagi kapal berbobot kurang dari 10 GT

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Antisipasi juga diperlukan untuk mencegah bertambahnya angka jiwa terdampak bencana dan kerugian ekonomi akibat tingginya ancaman bencana hidrometeorologis di Indonesia. Tercatat sekitar 100 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah berpotensi banjir. Dalam periode 2005-2018 kejadian banjir banyak terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, kejadian longsor sering terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Papua dengan potensi jiwa terdampak mencapai 14 juta. Sedangkan untuk kebakaran lahan dan hutan yang berdampak pada gangguan asap terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Temperatur permukaan laut diproyeksikan naik 1^{o}C dan 2^{o}C dibandingkan tahun 2000 dan 1961. Sementara itu, salinitas permukaan terus menurun dari 33,2 psu pada tahun 2000 menjadi 32,1 psu pada 2040. Kondisi lautan yang semakin panas dan asam memicu timbulnya berbagai gangguan terhadap organisme laut, khususnya pemutihan terumbu karang. Diperkirakan luas terumbu karang akan berkurang sebesar 70-90 persen hingga tahun 2030-2045 bila terdapat kenaikan 1,5^{o}C (IPCC, 2018).

Perubahan temperatur permukaan laut juga menyebabkan peningkatan tinggi gelombang laut (Gambar 7.9), terutama pada Laut Banda, Laut Sulawesi, Selatan Jawa, barat Sumatra dan bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Kenaikan luasan wilayah yang memiliki tinggi gelombang rata-rata di atas 1 meter per tahun akan mengurangi daya jelajah atau wilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakan keselamatan pelayaran dengan ukuran kapal di bawah 10GT. Peningkatan tinggi gelombang juga akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh perubahan suhu dan curah hujan secara ekstrem meliputi perubahan neraca air yang mempengaruhi analisis dalam memproyeksikan bahaya banjir, ketersediaan air, dan kekeringan air; peningkatan bahaya penerbangan; penurunan produksi pertanian; hingga meningkatkan perkembangbiakan vektor penyakit DBD di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut turut andil terhadap meningkatnya risiko kejadian bencana di Indonesia.

Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah

Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Saat ini, upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp32,370 triliun, tanggap darurat sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menyasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi). Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami.

Pembangunan Rendah Karbon

Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung berbagai upaya dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan menjadi penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah *baseline* emisi GRK tahun 2030.

Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target pembangunan. Integrasi kebijakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional sekaligus juga sebagai implementasi dari

Article 3.4. UNFCCC. Dalam konteks ini, perubahan iklim tidak hanya menyangkut isu lingkungan semata, namun juga terkait erat dengan pembangunan ekonomi dari setiap negara sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim dari semula hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK menjadi penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui platform pembangunan rendah karbon.

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam PRK adalah Intensitas Emisi. Intensitas Emisi (IE) didefinisikan sebagai jumlah emisi Gas Rumah Kaca (CO_2e) per satuan output ekonomi (miliar rupiah PDB). Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Emisi GRK semakin meningkat pada kondisi *baseline*, sedangkan intensitas emisi meskipun cenderung menurun namun belum mampu mendukung upaya penurunan emisi secara keseluruhan. Untuk menuju pencapaian target penurunan emisi 29 persen (skenario *fair*) maka emisi GRK harus dipertahankan di bawah 1,56 Gton CO_2e per tahun pada tahun 2024 (penurunan 27,3 persen dari *baseline*). Adapun intensitas emisi GRK harus dipertahankan di bawah 333,7 ton CO_2e/miliarRp pada tahun 2024 (penurunan 31,6 persen dari *baseline*) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7.10.

Penurunan emisi GRK dan Intensitas Emisi akan sangat tergantung dari implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian, serta pesisir dan kelautan (*blue carbon)*. Untuk itu, kelima sektor tersebut perlu menjadi prioritas Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024.

Pada sektor energi, Indonesia masih bergantung kepada sumber energi yang tinggi emisi. Pada tahun 2018, produksi pembangkit listrik Indonesia sebagian besar bersumber dari bahan bakar fosil, hanya sebesar 17,1 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (Kementerian ESDM, 2019). Apabila kita tinjau dari sisi ketahanan energi, Indonesia perlu melakukan transisi sumber energi menuju energi baru terbarukan, terutama sejak Indonesia menjadi net importir minyak di tahun 2014. Transisi yang dilakukan tidak hanya dari sektor ketenagalistrikan tetapi juga dari sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga.

Pada sektor lahan dan gambut, pemerintah telah menerbitkan moratorium alih fungsi hutan alam primer dan lahan gambut untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelamatkan 66

Gambar 7.10
Batasan Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi yang diperbolehkan

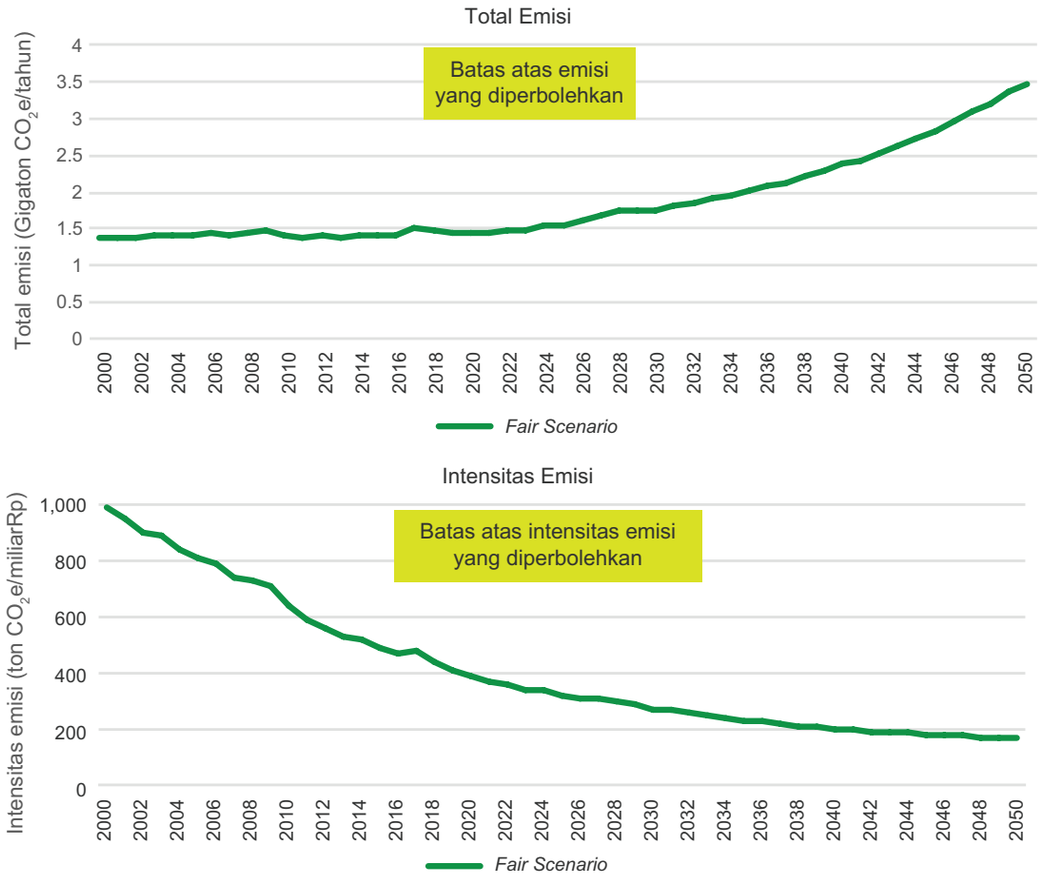

Sumber: Bappenas, 2019

juta ha hutan alam dan gambut dari ancaman kerusakan. Ancaman yang seringkali terjadi berkaitan dengan lahan gambut adalah kebakaran, terutama jika bersamaan dengan periode *El Nino* yang melanda Indonesia. Potensi emisi GRK yang dihasilkan pada saat kebakaran gambut sangat besar. Sebagai gambaran, emisi GRK yang dilepaskan pada saat terjadi kebakaran hutan dan gambut pada tahun 2015 adalah sebesar 1,54 Gton CO_2e.

Pada sektor limbah industri dan sampah, pengelolaan limbah industri dan sampah yang tepat diyakini berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK sebesar 1,69 persen. Secara jangka panjang, pengelolaan limbah industri dan sampah dapat memperbaiki kualitas air dan udara yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon

Penerapan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional; bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak. Dalam upaya ini maka kepentingan nasional perlu dijadikan sebagai prioritas utama.

Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir. Tidak hanya pada lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah yang diwakili oleh pemerintah provinsi menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Komitmen dan upaya tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dengan Pemerintah Provinsi tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon perlu semakin ditingkatkan khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) pada tingkat provinsi. RPRKD akan menjadi dokumen rujukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Di sisi lain, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Kondusivitas dan stabilitas politik nasional perlu menjadi perhatian mengingat risiko dan potensi dukungan terhadap kebijakan rendah karbon dan tata kelola lingkungan hidup secara keseluruhan bergantung kepada situasi politik. Perumusan kebijakan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan hanya dapat terwujud bila situasi politik berlangsung kondusif.

Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi. Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong sehingga teknologi rendah karbon dapat semakin terjangkau dan memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan. Kemajuan teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien. Hal ini akan memungkinkan intervensi pembangunan rendah karbon dapat terlaksana dengan biaya, koordinasi, dan waktu yang lebih sedikit.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Sasaran, Indikator, dan Target

Sasaran, target, dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019[a]	Target 2024
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,8	84,5
		Indeks Kualitas Air (IKA)	47,0	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	60,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	60,6	65,5
1.1	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	1.048	1.141
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)	1.705[b]	3.750
		Luas area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value*/HCV) yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	52	70
		Luas kawasan konservasi yang dikelola (juta ha)	27	27
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	22,68	26,9
		Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun (persen)	942.485 ha area terbakar	2
		Akurasi informasi meteorologi (persen)	77	80
		Akurasi informasi klimatologi (persen)	77	79

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019[a]	Target 2024
1.2	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	67,45[b]	339,4[c]
		Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen)	N/A	60
		Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	367,3[b]	539,8[c]
1.3	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan (ton)	475.676[b]	1.200.000[c]
		Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	17	26
		Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	25	25
1.4	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	30	70
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	193	540
		Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	4.384.918	10.000.000[c]
		Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (provinsi)	N/A	34[c]
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB)	N/A	0,10
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB)	N/A	1,15
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	3,0
2.1	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)	0,04	1,36
		Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi (persen)	87	100
2.2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen PDB)	N/A	0,732
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen PDB)	N/A	0,072
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen PDB)	N/A	0,251
		Persentase potensi penurunan kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen PDB)	N/A	0,093

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019[a]	Target 2024
3	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi (persen)	10,3[b]	13,2
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan (persen)	36,4[b]	58,3
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah (persen)	8,0[b]	9,4
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU (persen)	0,6[b]	2,9
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	N/A	7,3
3.1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	8,55[b]	menuju 23
		Intensitas Energi Primer (SBM/miliar Rp)	141,0	133,8
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/ miliar Rp)	0,9	0,8
3.2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	122.833	330.000 ha per tahun
		Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	206.000	420.000 ha per tahun
		Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	50	100
3.3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	67,5[b]	339,4[c]
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan *standar sanitary landfill* (KK)	N/A	3.885.755
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	N/A	409.078
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	N/A	494.152
3.4	Pengembangan Industri Hijau	Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH (perusahaan)	N/A	10
		Jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri (rancangan standar)	3	20
		Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan (rancangan standar)	3	20
3.5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai (ha)	1.000	50.000[c]

Keterangan:
[a] *baseline* 2019 menggunakan capaian sementara sampai Triwulan III 2019 (kecuali dicantumkan keterangan lain);
[b] *baseline* menggunakan capaian tahun 2018;
[c] target kumulatif selama lima tahun (2020-2024)

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. **Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. **Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan Bencana**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
2. **Peningkatan Ketahanan Iklim**, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. **Pemulihan Lahan Berkelanjutan** yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
3. **Pengelolaan Limbah** yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. **Pengembangan Industri Hijau** yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. **Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

BAB VIII

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pendahuluan

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

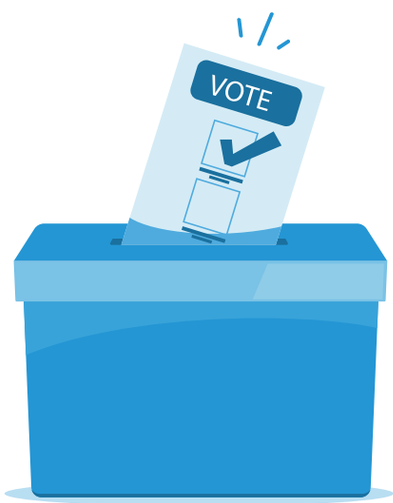

Capaian Pembangunan Tahun 2015-2019

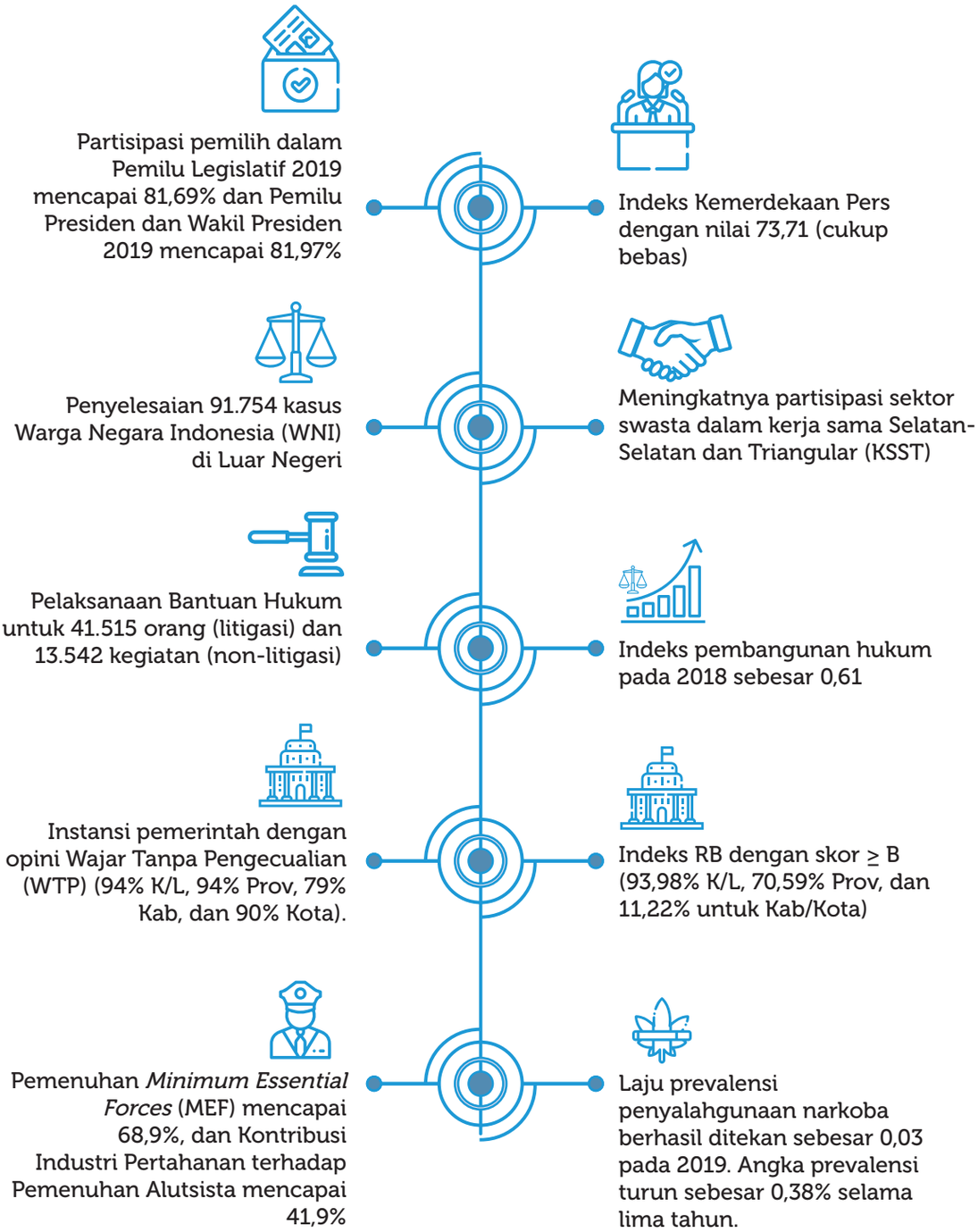

Lingkungan dan Isu Strategis

Dinamika Geopolitik Global

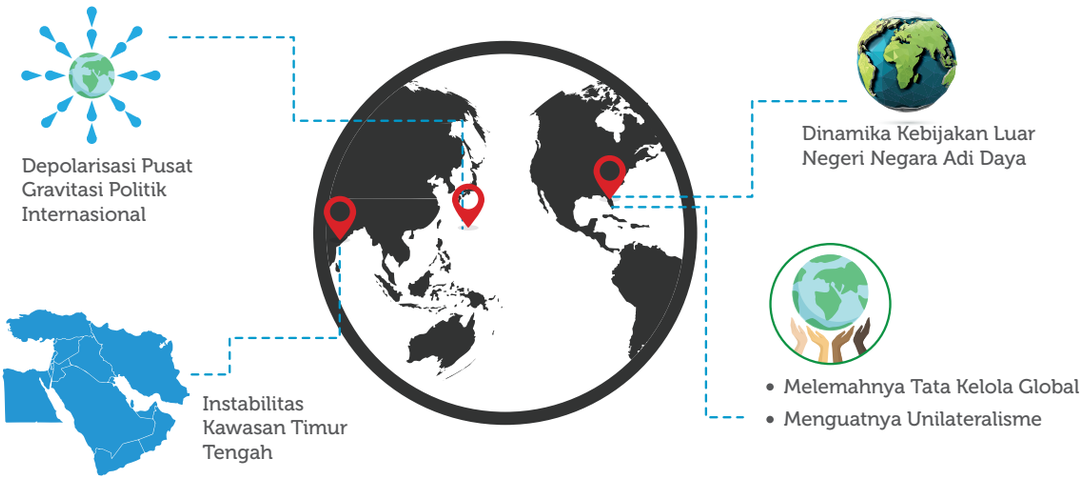

Sumber: Diolah Bappenas, 2019

Dinamika geopolitik global akan mempengaruhi masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia) diantaranya sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan ekspansi militer Tiongkok di LTS.

Dinamika ekonomi politik global juga terjadi dengan adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, persaingan antarnegara juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia - Afrika, di mana Tiongkok mendorong kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI), sementara Amerika Serikat menginisiasi pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan Asia - Afrika dengan investasi *Better Utilization of Investments Leading to Development* (BUILD) *Act*.

Mudahnya pergerakan aktor non-negara secara transnasional mengakibatkan adanya dinamika ancaman nontradisional. Ancaman nontradisional yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia; (3) Penyalahgunaan narkotika; (4) Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported and Unregulated fishing*/IUUF); dan (5) Serangan siber.

Lingkungan Strategis Nasional

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Demokrasi prosedural terlihat dari nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) aspek Kebebasan Sipil (78,46), dan Lembaga Demokrasi (75,25) yang lebih tinggi dibandingkan aspek Hak-Hak Politik (65,79).

Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari skor indeks RB "B ke atas", baru mencapai 11,22 persen sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, perilaku koruptif masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional. Selain itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan.

Sumber: Diolah Bappenas, 2019

Kerangka Pembangunan Polhukhankam

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap dampak pencapaian tujuan pembangunan merupakan umpan balik bagi aspirasi masyarakat pada tahap berikutnya. Siklus tersebut akan berlangsung apabila didukung oleh situasi yang kondusif berdasarkan tata kelola yang baik dan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional.

Isu Strategis

Konsolidasi Demokrasi

Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi terdapat empat isu yang perlu diperhatikan. **Pertama**, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Dalam mewujudkan optimalisasi kebijakan luar negeri, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah yang masih dirundingkan, baik penetapan batas laut dan penegasan batas darat, untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Selain itu, Pemerintah juga masih menghadapi ancaman transnasional, seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga IUUF.

Gambar 8.1
Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke Luar Negeri dengan Kasus WNI di Luar Negeri

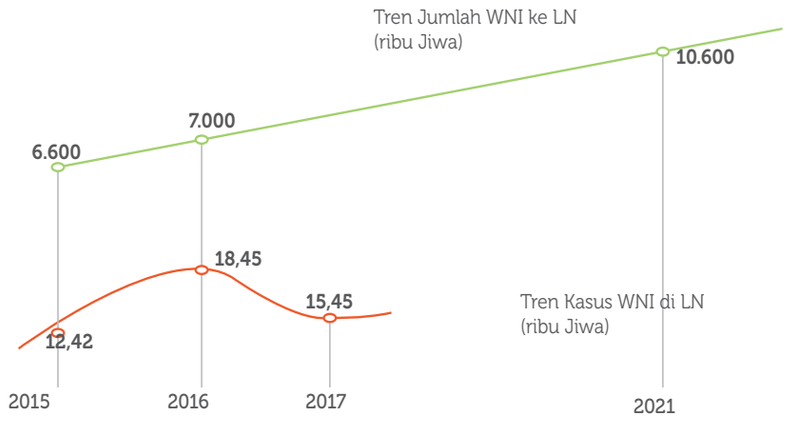

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018)

Kedua, belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan–Selatan. Untuk itu perlunya penguatan kerja sama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi. Kelembagaan pelaksana pemberian bantuan dan kerja sama pembangunan internasional diperkuat, adapun sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru terus dikembangkan, misalnya skema kredit ekspor yang disalurkan melalui lembaga penyedia pembiayaan ekspor.

Partisipasi aktor non pemerintah, terutama pihak swasta perlu ditingkatkan. Hal ini dalam upaya memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta meningkatkan citra dan pengakuan produk nasional secara global.

Ketiga, perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya, seperti: kuliner, kebhinekaan, dan toleransi, guna meningkatkan citra positif Indonesia di pergaulan internasional. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Keempat, perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total. Penataan peran dan fungsi K/L diperlukan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan luar negeri.

Penegakan Hukum Nasional

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.

Gambar 8.2
Isu Strategis Pemantapan Sistem Hukum Nasional

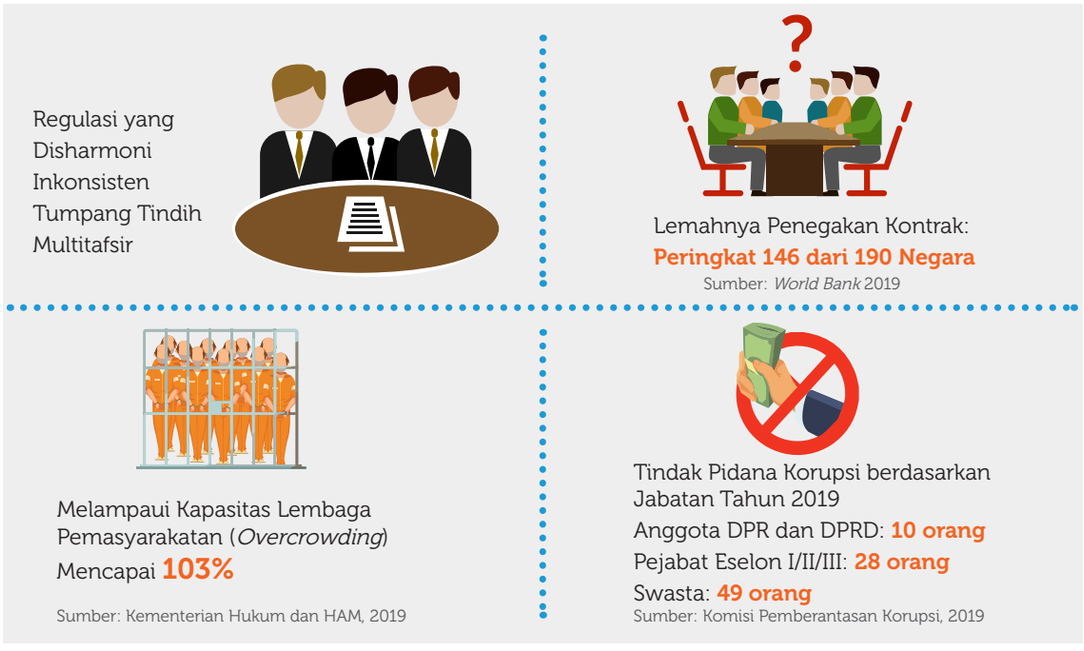

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*) hingga 103 persen.

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masih ada beberapa permasalahan isu strategis selama 5 tahun ke depan. **Pertama**, terkait dengan profesionalitas ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian, baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik. Selanjutnya, hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Selain itu, masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Dari sisi kesejahteraan, perlu terus diupayakan perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.5/2014 tentang ASN.

Kedua, dari aspek kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS)). Tumpang tindih tersebut disebabkan oleh belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antarlembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

Ketiga, pada aspek pelayanan publik, data Ombudsman RI menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dari 6.859 di tahun 2015 menjadi 8.314 pada tahun 2018, mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Terkait pelayanan terpadu, perlu adanya pelimpahan/pendelegasian kewenangan pelayanan kepada Mal Pelayanan Publik dan Unit Pelayanan Publik (UPP) di desa, kelurahan, dan kecamatan. Persoalan lain adalah belum adanya integrasi proses bisinis dan pemanfaatan data terpadu dalam penyediaan layanan. Selain itu, penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (*e-service*) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam.

Keempat, dari sisi akuntabilitas, data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan *money follow program* sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dinamika Ancaman Pertahanan

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleks, dan ambiguistas. Meskipun terdapat upaya proliferasi senjata pemusnah massal, tren pengadaaan persenjataan di regional Asia masih tinggi, seiring dengan ketegangan yang berlarut di Semenanjung Korea, dan Laut Tiongkok Selatan, dapat memicu konflik terbuka. Pada lingkup nasional pertahanan negara masih dihadapkan pada gangguan kedaulatan di wilayah tertentu.

Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal

Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alpalhankam. Dengan demikian industri pertahanan dapat meningkatkan daya saing internasional sekaligus guna menjadi bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).

Dinamika Ancaman Siber

Penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber. Jumlah serangan siber berbentuk *malware* yang sangat tinggi ke Indonesia merupakan cerminan dari dinamika ancaman keamanan nasional yang terus meningkat. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.

Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika
Pasar narkotika di Indonesia menarik sindikat internasional, karena jumlah penduduk yang besar dan harga jual yang tinggi. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk penyelundupan narkotika. Penyelundupan paling rentan terjadi di laut karena terbatasnya pengawasan di wilayah perbatasan.

Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan
Terbatasnya infrastruktur dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi penyebab tingginya kasus kejahatan. Di samping itu, pelanggaran di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Perairan Natuna juga menjadi salah satu ancaman nyata bagi hak berdaulat (*Sovereign Right*) Indonesia untuk mengeksplorasi SDA. Ancaman lainnya adalah konflik di negara lain yang memaksa terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah lain mendorong peningkatan migrasi ilegal dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan tujuan perlindungan suaka, walapun Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), mengenai Status Pengungsi.

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat
Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan perdagangan manusia masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus.

Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut
Banyaknya kapal yang melintas berpotensi menjadi objek tindak kejahatan, seperti: perompakan, penyelundupan, dan pembuangan limbah atau minyak kapal. Penegakan hukum yang belum optimal berdampak pada tingginya perompakan dan penyelundupan. Selain itu, tindak pidana terkait sumber daya alam juga masih tinggi berupa IUUF dan pembuangan sampah atau limbah ke laut. Untuk merespons permasalahan di atas diperlukan penguatan regulasi, infrastruktur, dan kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam
Meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Sasaran, Indikator, dan Target

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, ditetapkan Sasaran, Target, dan Indikator sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (2018)	78,37*
		2. Indeks Kerawanan Pemilu	49	39
		3. Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70	72
		4. Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	37.000	50.000
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	92,46* (2018)	90*
		2. Jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular	76	152
		3. Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)	112	190
		4. Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional (%)	2,23	2,96-3,16
		5. Indeks Citra Indonesia di dunia Internasional	3,8 (2018)	4,0
		6. Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	8	16
3	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum	0,61 (2018)	0,73*
		2. Persentase *judicial review* yang dikabulkan (%)	13,15 dan 12,05 (2018)	8,15 dan 7,05
		3. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	146	70
		4. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	36	20

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		5. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	44	20
		6. Persentase pelaku residivis (%)	9,06	6,56
		7. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	4,14
		8. Indeks Akses terhadap Keadilan (%)	69,6	71-80
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik*		
		a. Kementerian/Lembaga (%)	93,98 (2018)	85
		b. Provinsi (%)	70,59 (2018)	85
		c. Kabupaten/Kota (%)	11,22 (2018)	70
		2. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori ≥ Baik		
		a. Kementerian (%)	32 (2018)	100
		b. LPNK (%)	24 (2018)	100
		c. Provinsi (%)	15 (2018)	85
		d. Kabupaten/Kota (%)	0,58 (2018)	30
		3. Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)	90 per 277	164 per 623
		4. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik		
		a. Kementerian/Lembaga (%)	43,3 (2018)	100
		b. Provinsi (%)	32,4 (2018)	80
		c. Kabupaten/Kota (%)	6,1 (2018)	50
		5. Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP		
		a. Kementerian/Lembaga (%)	94 (2018)	95
		b. Provinsi (%)	94 (2018)	95
		c. Kabupaten (%)	79 (2018)	85
		d. Kota (%)	90 (2018)	95

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
		6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:		
		1. Kementerian/Lembaga (%)	92,77 (2018)	100
		2. Provinsi (%)	94,12 (2018)	100
		3. Kabupaten/Kota (%)	46,85 (2018)	80
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	*1. Global Fire Power* Index	0,28	0,20
		2. Global Terrorism Index	5,07	4,24
		3. Proporsi orang yang merasa aman berjalan Sendirian (%)	53,32 (2017)	>60
		4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	3,4
		5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,24 (2018)	37,80
		6. Indeks Risiko Terorisme (target)	54,46 (2018)	54,00
		7. Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	332	<150
		8. Angka Kejadian Konflik	60	35
		9. Angka Korban Pengungsi Internal	16.000 (2018)	14.000
		10. Terpenuhinya *Minimum Essential Force* (MEF) (%)	68,9	100
		11. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista (%)	41,9	≥50
		12. Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut	300	202
		13. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,8	1,69
		14. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	113 (2018)	111
		15. Pelayanan Publik Polri yang Prima (%)	61	65
		16. Skor *Global Cyber Security Index*	0,776 (2018)	0,838

(*pembaruan metode perhitungan pada tahun 2020-2024)

Arah Kebijakan dan Strategi

Konsolidasi Demokrasi

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:
1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
4. Penguatan penyelenggara Pemilu.

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan melalui:
1. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
3. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui:
1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
2. Peningkatan literasi TIK masyarakat;
3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui:
1. Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;
2. Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;
3. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
4. Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri;
5. Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.

Memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui:
1. Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
2. Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional;
3. Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi;
4. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.

Meningkatkan citra positif indonesia di dunia internasional melalui:
1. Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat nasional;
2. Peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.

Meningkatkan peran indonesia di tingkat regional dan global melalui:
1. Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;
2. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;
3. Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional;
4. Penataan Peran, Struktur, SDM, dan Fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.

Penegakan Hukum Nasional

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
   a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses *monitoring* dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;
   b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:
   a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
   b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
   c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum;
   d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
   a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
   b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
   a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
   b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Gambar 8.3
Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

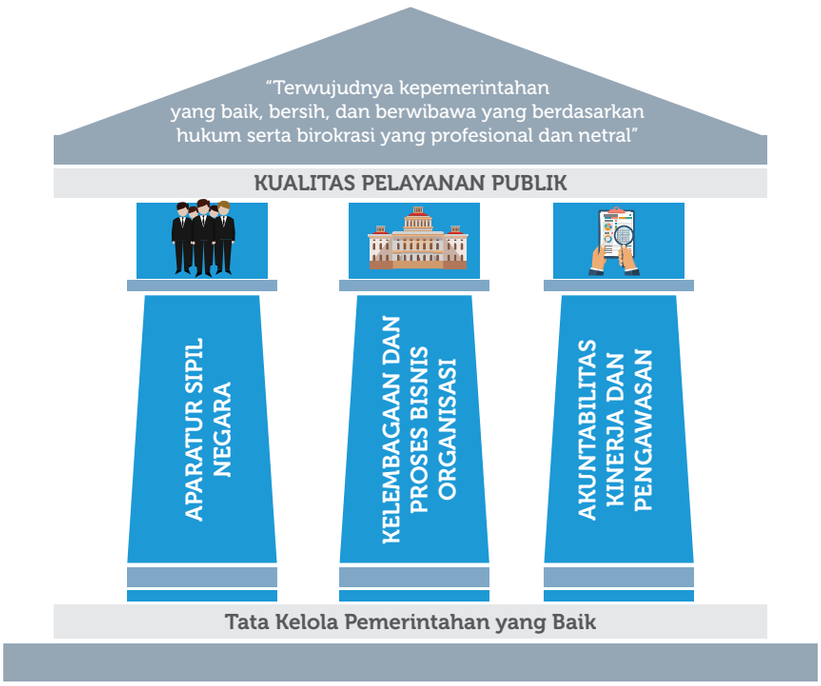

Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Stabilitas Keamanan Nasional dicapai melalui:

1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri diwujudkan dengan:
   (1) Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme;
   (2) Pengamanan obyek vital dan target rentan;
   (3) Penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar;
   (4) Penyelamatan di wilayah rawan dan bencana; dan
   (5) Penanganan konflik secara humanis.

2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran diwujudkan dengan:
   (1) Penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri;
   (2) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan;
   (3) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;
   (4) Pembangunan pertahanan siber; dan
   (5) Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang inhan.

3. Penguatan Keamanan Laut diwujudkan dengan:
   (1) Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu;
   (2) Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
   (3) Peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut; dan
   (4) Penyempurnaan regulasi tentang keamanan laut.

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diwujudkan dengan:
   (1) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
   (2) Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya;
   (3) Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan
   (4) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri;

5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber diwujudkan dengan:
   (1) Pembangunan dan penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber;
   (2) Penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber;
   (3) Penyelesaian kejahatan siber; dan
   (4) Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber.

BAB IX
KAIDAH PELAKSANAAN

Pendahuluan

RPJMN 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan program-program RPJMN perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMN.

Perencanaan dan penganggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dilaksanakan melalui:

a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
b. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai RPJPN 2005-2025, visi dan misi Presiden/Wakil Presiden, serta arahan Presiden dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).
c. Pelaksanaan kaidah pelaksanaan melalui: i) kerangka regulasi, ii) kerangka kelembagaan, iii) kerangka pendanaan, serta iv) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menjamin konsistensi dan keterpaduan antara RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L atau RPJMD sesuai kewenangan masing-masing. Di samping itu, seluruh pemangku kepentingan melakukan kerjasama dan membangun keterpaduan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMN 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMN dalam Renstra K/L dan RPJMD serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMN.

Gambar 9.1
Kerangka Pelaksanaan RPJMN 2020-2024

Kerangka Regulasi

Regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi di Indonesia (hasil penelitian *Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: Identifying The Binding Constraint to Growth in Indonesia*, Bappenas, 2018). Untuk itu, kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tercantum pada Gambar 9.2.

Gambar 9.2
Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi yang Menjadi Koridor Penyusunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2019

Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan membuat regulasi sebanyak-banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Analysis*), didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan (2020-2024).

Pendekatan tersebut akan mengurangi jumlah regulasi yang tidak perlu dan menghemat biaya pembentukan peraturan perundangan sehingga terlihat jelas kontribusi kerangka regulasi untuk mendukung Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, sebagaimana pada Gambar 9.3.

Berdasarkan Gambar 9.3 terlihat bahwa regulasi merupakan faktor pengintegrasi kebijakan dalam rangka pencapaian pembangunan nasional termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Gambar 9.3
Peran Regulasi Dalam Pembangunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Sebagai salah satu strategi penataan regulasi, pendekatan *Omnibus Law* dapat diterapkan yaitu dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi (Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi serta Kabupaten/Kota) yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih dan konflik.

Pendekatan *Omnibus Law* dalam praktiknya telah dilakukan melalui simplifikasi regulasi dan deregulasi paket kebijakan ekonomi. Contoh konkrit, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mencabut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 57,dan 60 Ayat (1),(2), dan Ayat (4). Contoh lain, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang telah mencabut beberapa pasal pada PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan beberapa pasal pada PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga yang konflik dan menghambat pencapaian target pembangunan nasional.

Inti pendekatan omnibus law adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, fleksibel, namun akuntabel.

Sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi serta penyederhanaan regulasi, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membuat 1 (satu) regulasi baru harus mencabut paling sedikit 2 (dua) regulasi yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama.

Pendekatan *Omnibus Law* dapat diterapkan salah satunya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan Cipta Lapangan Kerja dimana identifikasi awal menunjukkan terdapat 177 UU terkait Cipta Lapangan Kerja dimana terdapat 11 klaster atau pembidangan terkait yang berpotensi dilakukan pendekatan *Omnibus Law* yaitu: 1) Perizinan Berusaha; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan Perlindungan UMKM; 5) Kemudahan Berusaha; 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Pengadaan Lahan; 10) Kemudahan Proyek Pemerintah; dan 11) Kawasan Ekonomi.

Gambar 9.4
Pendekatan *Omnibus Law*

Gambar 9.5
Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi

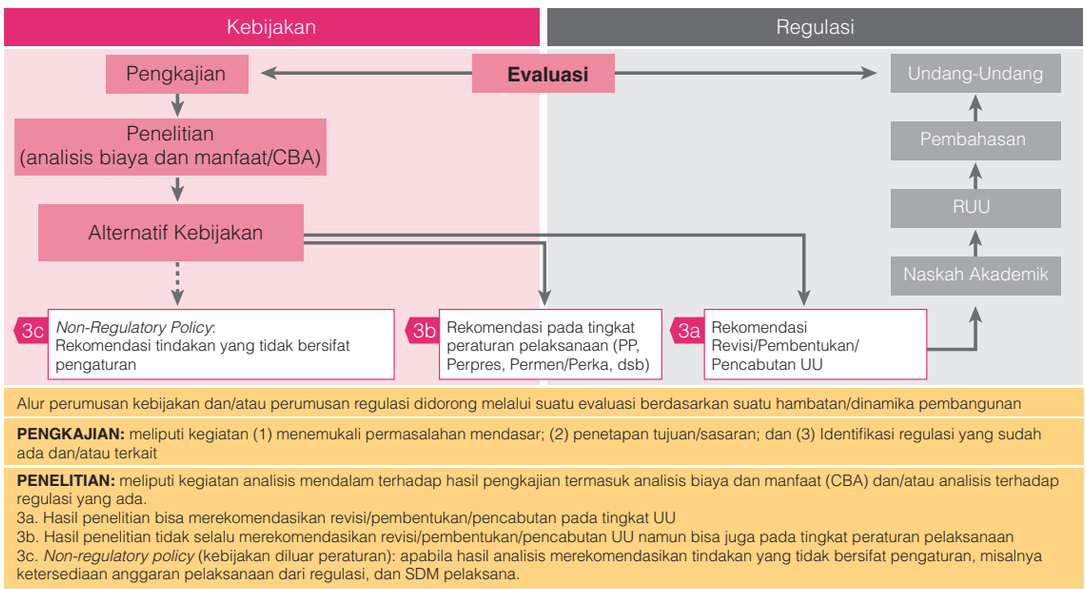

Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya melalui RKP setiap tahun.

Pendekatan *Omnibus Law* harus dipahami sebagai upaya menyeluruh dan terpadu dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas regulasi sebagaimana tergambarkan pada Gambar 9.4.

Dari alur pikir di atas, efektifitas atau hambatan suatu regulasi dapat dideteksi sejak dini.

Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik beberapa batu uji diperlukan sebagai berikut: 1) aspek legalitas, 2) aspek kebutuhan dan 3) aspek kemanfaatan, sebagaimana tercantum pada Gambar 9.6.

Gambar 9.6
Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi (KR)

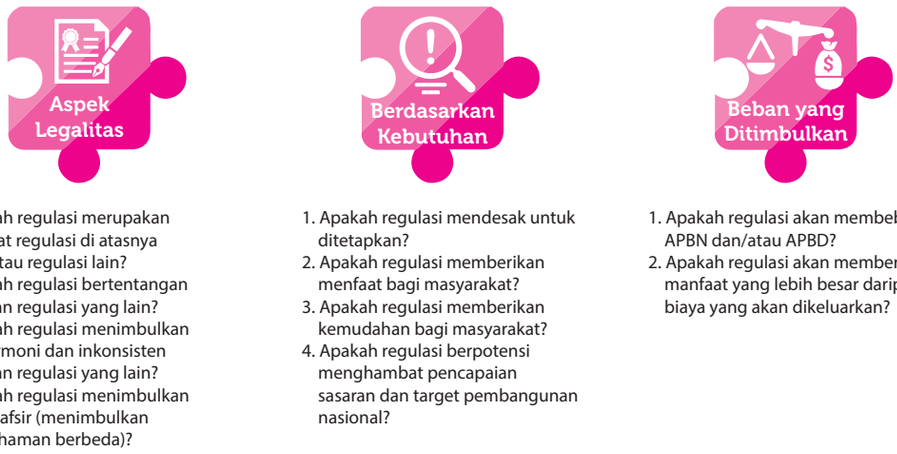

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Kebutuhan Regulasi pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Tabel 9.1
Rekapitulasi Kerangka Regulasi (KR) Agenda Pembangunan
Terkait RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan	Kerangka Regulasi		
	UU	PP	Perpres
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	4	8	4
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	8	9	18
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	20	24
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	3	3

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	8	1
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	13	1	3
TOTAL REKAPITULASI KR	**37**	**49**	**53**

Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

a. Undang-Undang (UU)

1) RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
2) Revisi UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
3) RUU Cipta Lapangan Kerja (termasuk didalamnya UU terkait UMKM, dengan pendekatan omnibus law)
4) RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (pendekatan omnibus law)

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
2) RPP Tata Cara Penanganan Perkara dan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha;
3) RPP Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
4) RPP tentang tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
5) RPP tentang Koperasi Syariah
6) RPP tentang Penjaminan Simpanan Koperasi
7) RPP tentang tentang Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi
8) RPP tentang Aturan Pemberdayaan Koperasi

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres Rencana Induk Pariwisata Terpadu / *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)
2) RPerpres tentang Asuransi Pertanian
3) RPerpres Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani
4) RPerpres Perlindungan Lahan Pertanian

Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2) Revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3) Revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
4) RUU tentang Ibu Kota Negara
5) Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
6) Revisi UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan
7) RUU tentang Perkotaan
8) Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2) RPP Pedoman Pemberian Nama dan Perubahan Nama Rupabumi
3) Revisi PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
4) RPP Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5) Revisi PP No.96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7) RPP Perkotaan dan peraturan turunannya terkait Standar Pelayanan Perkotaan
8) RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara
9) RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
2) RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN)
3) RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pemerintahan IKN
4) RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN
5) RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) 2020-2024 (mencabut Perpres tentang STRANAS PPDT 2015-2019
6) RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Setiap Tahun
7) RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024 (mencabut Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019)
8) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Wilayah Metropolitan Palembang)
9) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Wilayah Metropolitan Banjarmasin)
10) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado (Wilayah Metropolitan Manado)
11) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Wilayah Metropolitan Jakarta)
12) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) (Wilayah Metropolitan Surabaya)
13) RPerpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) (Wilayah Metropolitan Denpasar)
14) Revisi Perpres tentang RTR Pulau /Kepulauan
15) RPerpres tentang RDTR Kawasan Perbatasan Negara
16) RPerpres tentang RTR Kawasan Strategi Nasional
17) RPerpres tentang Kebijakan Perkotaan Nasional
18) Revisi Perpres terkait Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) Revisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3) RUU tentang Pengasuhan Anak

4) RUU tentang Kesetaraan Gender
5) Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
6) Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
7) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
8) Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
9) Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
10) Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
2) Revisi PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun
3) Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT
4) Revisi PP Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)
5) Revisi PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
6) RPP tentang Pelaksanaan Rehabilitas Sosial
7) RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum
8) RPP tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin
9) RPP tentang Insentif dan Konsesi
10) RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
11) RPP Standar Mutu Pelayanan Kesehatan
12) RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah
13) RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan
14) RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
15) RPP tentang Label dan Iklan Pangan
16) Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
17) RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa
18) RPP tentang Keamanan Pangan
19) Revisi PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
20) Revisi PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) Revisi Perpres Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
2) RPerpres tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3) Revisi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai
4) Revisi Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5) Revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
6) RPerpres tentang Kartu Pra Kerja.
7) RPerpres tentang pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)/Holding BLU untuk pengelolaan *Science and Techno Park* (STP)/Lembaga Penelitian, dan Pengembangan/ Litbang dan pemasaran produk hasil riset STP/Lembaga Litbang
8) RPerpres tentang penyederhanaan proses perizinan dan peraturan perundangan komersialisasi produk inovasi

9) RPerpres tentang pemanfaatan prototype hasil riset untuk Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) dan BUMN
10) RPerpres tentang mekanisme kerjasama antar Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam dan luar negeri
11) RPerpres tentang mekanisme mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang serta dengan BUMN dan Swasta
12) RPerpres tentang Insentif pajak untuk Pengembangan dan Penelitian (*Research and Development*/R&D) swasta, pendapatan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Investasi R&D
13) RPerpres Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap)
14) RPerpes tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
15) RPerpres tentang Strategi Nasional Penanganan Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan
16) RPerpres tentang Penataan Perencanaan, Penganggaran, dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan
17) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat
18) RPerpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan
19) RPerpres tentang Pembangunan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi
20) RPerpres tentang Integrasi Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
21) Revisi Perpres Nomor 104 / Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg
22) Revisi Perpres Nomor 38 / Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran
23) RPerpres tentang Perlindungan Sosial Adaptif
24) RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

a. Undang-Undang (UU)
1) Revisi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah

b. Peraturan Pemerintah (PP)
1) RPP untuk Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
2) RPP terkait Sistem Pembiayaan Sekunder Perumahan
3) RPP Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

c. Peraturan Presiden (Perpres)
1) RPerpres Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan
2) RPerpres tentang Pengelolaan Terminal Peti Kemas Secara Terpadu
3) RPerpres Dukungan untuk Pengembangan Transportasi Perkotaan

Agenda Pembangunan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

a. Undang-Undang (UU)
1) Revisi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2) Revisi PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
3) Revisi PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4) Revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5) RPP tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup
6) RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7) RPP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung.
8) RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
3) Revisi UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4) Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
6) Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7) Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
9) RUU Jaminan Benda Bergerak
10) RUU Hukum Acara Perdata dalam HIR, Rbg dan RV
11) RUU Badan Usaha
12) Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
13) RUU Kitab UU Hukum Pidana

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres tentang Ketentuan Sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara
2) Revisi Perpres 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manejemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara
3) RPerpres *Grand Design* Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism)*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, sebagaimana telah digambarkan pada Kerangka Pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 (Gambar 9.1).

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai 'Struktur Mengikuti Strategi' (*structure follow strategy)*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup: (a) Lembaga Negara; (b) Kementerian; (c) Lembaga Pemerintah Non Kementerian; (d) Lembaga Non Struktural; (e) Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah; dan (f) Lembaga koordinasi lain seperti Badan Koordinasi, Komite Nasional, Tim Nasional dan lain-lain.

Dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019 total terdapat 313 Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan mandat dari peraturan perundangan, dengan detail sebagaimana Tabel 9.2. Selain itu, hasil penataan kelembagaan terhadap LNS menghasilkan sebanyak 13 LNS telah dihapuskan, sebagaimana Gambar 9.7.

Tabel 9.2
Jumlah Lembaga Non Struktural

Peraturan Perundangan	2015	2016	2017
Undang-Undang	72	73	73
Peraturan Pemerintah	5	5	5
Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden	31	29	20
Jumlah	108	107	98

Gambar 9.7
Laju Pembubaran Jumlah LNS

Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagaimana Gambar 9.8.

Gambar 9.8
Prinsip Kerangka Kelembagaan

Untuk memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian sebagai berikut: (a) aspek kesesuaian; (b) aspek urgensi dan; (c) aspek kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa sub kriteria sebagai berikut.

Aspek Kesesuaian

- Apakah usulan kerangka kelembagaan seusai dengan Tujuan/Sasaran pembangunan nasional (RPJMN) ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuai dengan kebijakan kerangka kelembagaan ?

Aspek Urgensi

- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada pencapaian target pembangunan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan amanat paraturan perundangan ?

Aspek Kelayakan

- Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak langsung dan positif terhadap masyarakat ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan realistis untuk diselesaikan (maksimal 3 tahun pertama RPJMN 2020 - 2024) ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung hasil kajian dan analisis biaya dan manfaat (*cost & benefit analysis*/ CBA) ?

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Kerangka Kelembagaan diarahkan guna mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, yang tergambar di bawah ini:

Prioritas Penataan Kelembagaan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Kebutuhan Penataan Kelembagaan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

1) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan
2) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung vokasi
3) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keuangan syariah

Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

1) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung kawasan ekonomi khusus
2) Tata kelola kelembagaan dalam rangka persiapan dan pemindahan ibu kota negara

Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1) Tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi
2) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung talenta nasional

Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi digital

Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional
2) Tata kelola kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan hukum
3) Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan nasional

Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup sumber pendanaan, arah pemanfaatan, dan prinsip pelaksanaan pendanaan pembangunan.

Sumber Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Pemerintah

Pendanaan pemerintah bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti obligasi, pinjaman dan hibah dari dalam maupun luar negeri yang berasal dari: (1) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Bilateral dan Multilateral; (2) Lembaga Keuangan (bank dan non bank); dan (3) Investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Sumber-sumber pendanaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut.

a) **Pajak**, merupakan penerimaan negara berasal dari masyarakat yang diantaranya bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak perdagangan internasional, dan pajak lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.
b) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, merupakan penerimaan negara di luar penerimaan pajak yang antara lain mencakup penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.
c) **Hibah**, merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan
d) **Pinjaman Luar Negeri (PLN)**, merupakan penerimaan negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu dalam bentuk utang pemerintah yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, yang bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor.
   Pinjaman Luar Negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit APBN dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga (K/L); mengelola portofolio utang; diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN; dan dihibahkan kepada Pemda dengan fokus pembiayaan pada infrastruktur ekonomi dan sosial dengan alih teknologi; praktik baik internasional dan berbagi pengetahuan; proyek *piloting* yang dapat dilakukan replikasi dengan pendanaan rupiah; serta memiliki daya ungkit yang tinggi.

e) **Pinjaman Dalam Negeri (PDN)**, adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pinjaman dalam negeri utamanya digunakan untuk pengembangan industri dalam negeri dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
f) **Surat Berharga Negara (SBN)**, merupakan surat berharga berupa pengakuan utang dalam mata uang Rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara. Penerbitan SBN digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah
g) **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**, ialah surat berharga negara yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang memiliki ciri khas menggunakan prinsip syariah dan memerlukan aset yang dijadikan sebagai jaminan (*underlying*). SBSN Sukuk Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk*) (SBSN-PBS) pemanfaatannya lebih diutamakan untuk pembangunan infrastrukur dan penyediaan sarana pelayanan umum.

Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sumber Pendanaan non-Pemerintah atau swasta dapat diperoleh dari: Badan Usaha (Swasta dan BUMN/D) dan masyarakat.

Potensi sumber-sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat dimanfaatkan beserta karakteristiknya diantaranya sebagai berikut:

a) **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),** merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta,termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta. Dengan skema KPBU ini, Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*). Untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan KPBU, terdapat beberapa skema pengembalian investasi yaitui: (i) pembayaran oleh pengguna layanan (*User Pay*) yang dapat didukung pemerintah melalui fasilitas Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund* - VGF) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset; (ii) pengembalian melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah berdasarkan prinsip ketersediaan layanan (*Availability Payment*); (iii) bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
b) **Pendanaan Badan Usaha** dalam bentuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing yang berasal dari kekayaan badan usaha yang bersangkutan maupun yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.
c) **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR)**, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak terfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.
d) **Filantropi,** adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara

sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.

e) **Dana Keagamaan** merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Pendanaan Pembangunan

I. Pengelolaan Belanja

Pendanaan dari berbagai sumber tersebut dikelola dengan fokus pada: (a) Pengelolaan Belanja Pusat dan (b) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

a) Pengelolaan Belanja Pusat

Arah Kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat adalah meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non-Kementerian/Lembaga. Pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip *money follows program* dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS).

Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggung jawabnya.

Peningkatan kualitas alokasi pada prioritas juga harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik sehingga rencana pembangunan yang direncanakan dapat dipastikan ketepatan pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah akan mengendalikan rencana pembangunan hingga tingkat proyek prioritas dimana lokasi dan penanggung jawab kegiatannya jelas terukur. Penyempurnaan proyek prioritas juga terus diupayakan baik pada kriteria pemilihan maupun didalam mekanisme pengendalian pelaksanaannya.

Di dalam RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang dirinci hingga target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. *Major Project* ini menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Pendanaan *Major Project* mensinergikan berbagai sumber pendanaan

Gambar 9.9
Arah Pengelolaan Belanja Pemerintah

meliputi Belanja Pusat baik Belanja K/L maupun Non-K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Masyarakat/Badan Usaha.

Integrasi dan sinergi antar sumber pendanaan ini dilakukan sejak dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah hingga RAPBN tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh berbagai agenda koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Perkuatan sinergi pusat dan daerah juga dilakukan melalui pengembangan dan perluasan mekananisme hibah ke Daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian prioritas nasional di daerah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas juga dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi program yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu dilakukan tinjau ulang (*review*) secara berkala terhadap program pembangunan. Tinjau ulang dilakukan dengan mengacu hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran. Hasil dari tinjau ulang ini kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian perencanaan pembangunan serta sebagai bagian dari perbaikan mekanisme pendanaan dan pelaksanaan program (*delivery mechanism*).

Untuk mendukung langkah integrasi, penguatan sinergi, serta meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, pemerintah melakukan pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara.

b) Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa; serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, dan (4) Dana Desa.

Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa secara penuh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab;
2. Mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan;
3. Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka *stunting*, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs);
4. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja kementerian/ lembaga (K/L) dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (*value for money*);
5. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

Arah kebijakan bagi setiap komponen adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Dana Bagi hasil (DBH) sebagai berikut: (1) Meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab dan efektif berbasis peningkatan kinerja; (2) Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar; serta (3) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut: (1) Menyempurnakan formulasi alokasi DAU dengan memperhitungkan perubahan bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD), serta kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimum dan kapasitas fiskal; (2) mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap

memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; (3) mempertimbangkan afirmasi kepada daerah konservasi dengan memperhitungkan kemampuan daerah dalam mempertahankan luas hutan tanaman nasional; (4) menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataan antardaerah dan keseimbangan alokasi provinsi dan kabupaten/kota melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah; serta (5) mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah.

Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi;
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan global melalui skema yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan (skema penugasan); serta mendorong tindakan afirmatif (skema afirmasi) bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan;
3. Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK dengan memperhitungkan: (1) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan daerah; (2) realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja pembangunan dengan insentif pencapaian kinerja (*reward*); serta (4) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran anggaran DTK dengan APBD;
5. Mendorong skema alokasi hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*), bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur;
6. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK dengan mengembangkan: (1) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis *website*, (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (3) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (4) pelaporan secara rutin;
7. Memperkuat peran APIP dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

Arah Kebijakan Dana Inesntif Daerah (DID) sebagai berikut:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah;
2. Menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah.

Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus sebagai berikut:
1. Dana Otonomi Khusus Aceh untuk: (1) meningkatkan pemanfaatan dana bagi

penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan adil; pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta (2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana;

2. Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat untuk: (1) penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil; pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; (2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta (3) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan.
3. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta untuk: (1) meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta (2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana.

Arah Kebijakan Dana Desa sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk: (a) mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi; (b) meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana dasar desa; (c) meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang baik; (d) mengembangkan sistem informasi desa terpadu termasuk penataan wilayah desa dan penetapan batas desa; (e) transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama; dan (f) penguatan dan pengembangan desa adat, kampung adat, nagari dan sebutan lain setara dengan desa;
2. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal dan pemberian insentif bagi desa yang mempunyai kinerja sangat baik;

3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi dana desa dengan mengembangkan: (a) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (b) pendampingan pemerintah daerah, termasuk pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan dan pertumbuhan, melalui Dana APBD dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa, (c) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (d) pelaporan secara rutin;
4. Meningkatkan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan antardesa termasuk pembagian kewenangan dan batas desa, kepemilikan aset, dan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan.

II. Perluasan Kapasitas Pendanaan

Pengembangan potensi ruang/sumber pendanaan baru dilakukan dengan mengembangkan pendanaan kreatif (*creative financing*). Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah. Dari pengembangan pendanaan keatif (*creative financing*) tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan badan usaha) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Di samping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta alokasi risiko yang proporsional.

Selain itu, Pemerintah dapat melakukan eksplorasi dan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendanaan baru dari sumber pendanaan non-konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan arsitektur keuangan global untuk menarik investasi swasta. Secara khusus, Pemerintah perlu mencari pendanaan sektor swasta untuk beberapa jenis proyek investasi publik, pemanfaatan dan sekuritisasi aset Pemerintah, mengundang aktor- aktor pembangunan lainnya seperti filantropis, pemanfaatan peningkatan nilai tanah (*land value capturing*), skema konsesi terbatas, dan pendanaan lain yang dapat dikembangkan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah juga dapat mengandalkan dan mengembangkan pendanaan hijau (*green funding*) di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar, sejalan dengan pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs) di Indonesia.

Untuk mendanai penanganan bencana, Pemerintah mengembangkan skema asuransi pembiayaan tanggap darurat dan mempersiapkan skema pembiayaan bersama melalui *pooling of fund* untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk pembiayaan program di pusat maupun di daerah, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ *Public Private Partnership* (KPBU/PPP), peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR), pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, dan Dana Pembangunan Daerah (*Municipal Development Fund*/MDF) akan terus dikembangkan.

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan terus diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain- lain. Pengembangan pemanfaatan KPBU di sektor sosial disertai dengan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah. Pinjaman langsung dengan penjaminan pemerintah dapat menekan biaya menjadi lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu, pinjaman yang bersumber dari luar negeri dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang mendapatkan jaminan dapat diperuntukkan untuk membantu permodalan BUMN. Namun demikian pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan prioritas serta perlu didukung oleh evaluasi teknis yang memadai berupa kajian kelayakan dan rekayasa desain (*feasibility assessment, engineering designs*), analisis ekonomi, keuangan, dan lingkungan.

Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi di semua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (*leverage*), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non- Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik).

Peningkatan kapasitas pembiayaan dan kualitas investasi Pemerintah dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan kebijakan investasi publik, manajemen, tata kelola dan kebijakan, serta pemilihan proyek yang didasarkan pada kriteria keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk itu strategi pembangunan nasional, wilayah dan sektoral akan diperjelas dengan menyertakan rencana investasi untuk memandu investasi publik maupun swasta dalam jangka panjang. Pemerintah menyusun strategi dan kebijakan termasuk mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon yang diselaraskan dengan komitmen Perjanjian Paris dan mengintegrasikannya dalam rencana ekonomi dan pembangunan nasional.

Dari sisi mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*), Pemerintah juga terus mengembangkan dan mengimplementasikan proses pengadaan Pemerintah yang memasukkan kriteria keberlanjutan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan konsisten didasarkan pada praktik yang baik (*best practice*).

Selain efisiensi investasi publik, Pemerintah juga akan menetapkan syarat dan kondisi serta kerangka kerja dimana investasi swasta diharapkan berperan lebih besar, bahkan melebihi pembiayaan Pemerintah seperti misalnya di sektor energi. Untuk itu, dukungan dan kerjasama internasional dalam hal akses keuangan, akses ke teknologi bersih, peningkatan kapasitas dan tatakelola akan tetap diperlukan.

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendaaan pembangunan yaitu:

1. **Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan**, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu
   a. **Mengutamakan alokasi pada prioritas:** Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
   b. **Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan** dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L dan Non K/L (antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa) serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.

2. **Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.**
   Besarnya skala pembangunan nasional Indonesia membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja di antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

3. **Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek.**
   Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan:
   - Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;
   - Kesesuaian antara karakteristik sumber pendanaan dengan karakter investasi pemerintah;
   - Mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan
   - Tingkat kesiapan pelaksanaan (*implementation readiness*).

4. **Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.**
   Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti

dari pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan luar negeri lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan di antaranya: tingkat bunga, penyediaan barang dengan syarat dan ikatan (*tied* dan *untied*), serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.

Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dengan melakukan perkuatan pada beberapa aspek yaitu: regulasi; fungsi kantor bersama; peran empat pilar KPBU (regulator, penanggung jawab proyek kerjasama (*investee*), konsultan pendamping (*transaction advisor*), dan investor), perencanaan dan penyiapan proyek, serta internalisasi KPBU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Di samping itu, Pemerintah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

5. Mendorong inovasi pendanaan pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan:

a. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (*blended finance*)

Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan yang berbeda disesuaikan dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

b. Mengembangkan Prinsip Transfer Berbasis Kinerja (*Output Based Transfer*). Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme transfer berbasis kinerja (*output based transfer).* Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

Gambar 9.10
Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Landasan hukum evaluasi dan pengendalian pembangunan mencakup: (1) Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (2) Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (3) Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan (4) Peraturan Pemerintah No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Berdasarkan sejumlah landasan hukum tersebut, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan (mencakup masukan-*input*, keluaran-*output*, hasil-*result*, manfaat-*benefit*, dan dampak-*impact*), termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara garis besar kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional (termasuk aspek pemantauan yang melihat progres pelaksanaan program/kegiatan per triwulan) dapat digambarkan pada Gambar 9.11 berikut. Evaluasi mencakup: (1) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RPJMN (*on-going* dan *ex-post*); serta (2) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RKP (*on-going* dan *ex-post*). Sementara itu, pengendalian mencakup tindakan korektif atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk menilai kinerja pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 5 (lima) arahan Presiden melalui Sistem Informasi Terpadu Evaluasi dan Pengendalian (SITEP) yang pelaksanaannya diharapkan efektif pada pertengahan periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Penjelasan lebih rinci mengenai evaluasi dan pengendalian pada bagian berikut.

Gambar 9.11
Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

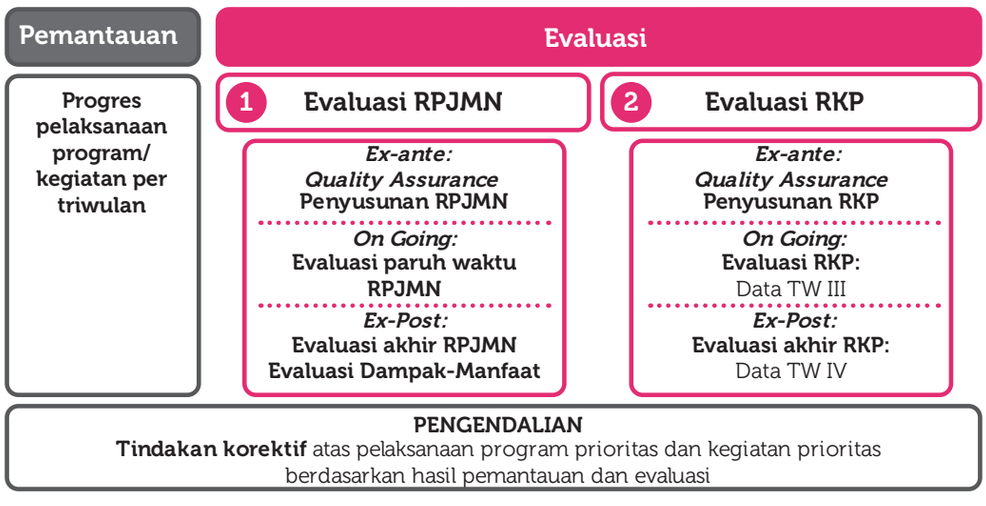

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektivitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi, antara lain: (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) membantu penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.
2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
   Evaluasi RPJMN 2020-2024 dilakukan minimal dua kali (Gambar 9.12), yaitu :
   a. Evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024 jika diperlukan. Pada setiap tahun dilakukan evaluasi RKP yang merupakan bagian tahapan dari pelaksanaan RPJMN. Evaluasi RKP ini menjadi bahan masukan untuk perencanaan RKP tahun berikutnya;
   b. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, yang hasilnya digunakan sebagai *input* dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2025-2029).
3. Sumber Data
   Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan dapat menggunakan data dari Sistem Informasi Terpadu Evaluasi dan Pengendalian (SITEP) yang memanfaatkan:
   a. Satu Data Indonesia
   b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Gambar 9.12
Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN

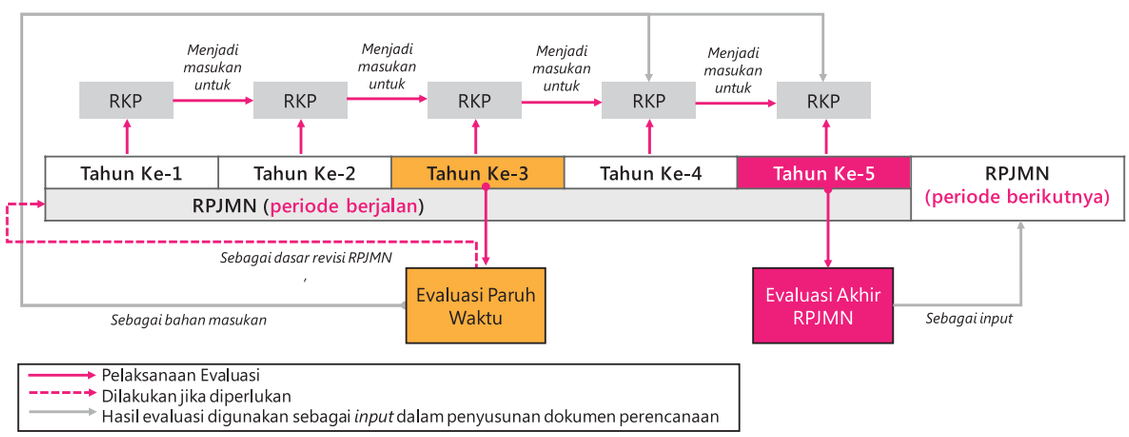

c. Data dan Informasi khusus, meliputi:
   i. Data dan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI);
   ii. Laporan Kinerja Pembangunan Daerah; serta
   iii. Hasil Survei dan Penelitian Tematik (Domestik dan Internasional).

4. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi
   Evaluasi RPJMN dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan laporan evaluasi Renstra seluruh K/L, laporan evaluasi RKP pada periode RPJMN berjalan, serta data pendukung lainnya dari hasil survei dan penelitian. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
5. Jenis Evaluasi
   Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis evaluasi, yaitu:
   a. Evaluasi Pengukuran Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*), baik di level *output*, *outcome*, dan *impact*.
   b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, antara lain: (i) deskripsi proses yang terjadi, telaah (*review)* berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa; (ii) deskripsi latar belakang program prioritas/kegiatan prioritas; serta (iii) deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.
   c. Evaluasi Kebijakan/Program Strategis, dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan atau program strategis dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap target *group*/masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Evaluasi meliputi keseluruhan aspek, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dari kegiatan/program.

   Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi, sehingga bisa digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan.
6. Mekanisme Evaluasi
   Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN berdasarkan hasil evaluasi Renstra K/L dan sumber data lain yang tersedia. Pelaksanaan evaluasi Renstra K/L dikoordinasikan oleh Kedeputian yang membidangi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan bersama-sama dengan Kedeputian yang membidangi sektor dan regional. Mekanisme evaluasi dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi (dapat menggunakan evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan atau evaluasi kebijakan/program strategis). Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk segera ditindaklanjuti, terutama pada kebijakan/program strategis yang masih belum mencapai sasaran/target. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RPJMN tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.13 berikut.
7. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
   Hasil evaluasi RPJMN 2020-2024 digunakan sebagai:
   a. Bahan masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya dan RPJMN 2025-2029; dan

Gambar 9.13
Mekanisme Evaluasi RPJMN

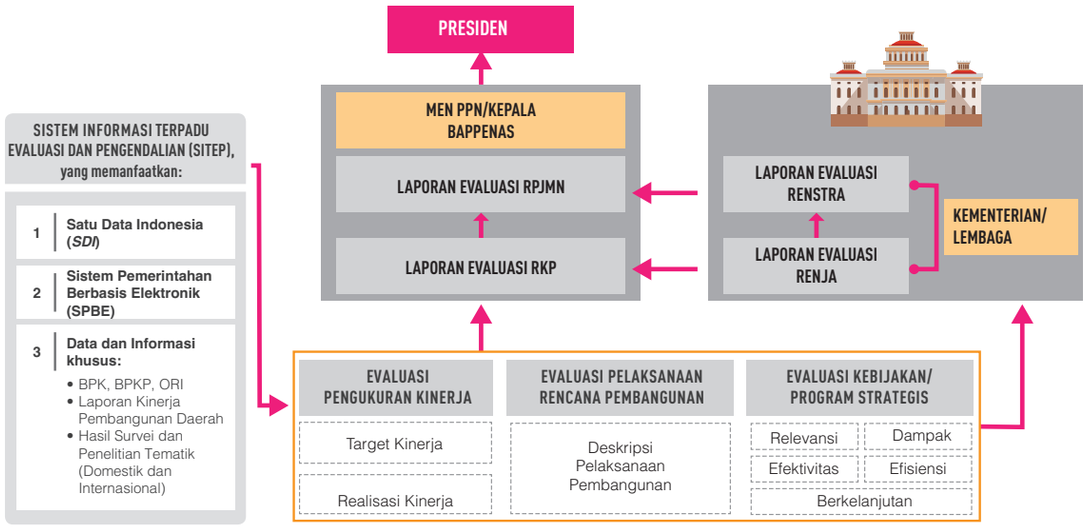

b. Dasar untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024, dengan pertimbangan: (i) terjadi perkembangan permasalahan pokok yang mendasar; dan (ii) terjadi perubahan arah kebijakan Presiden.

B. Pengendalian

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu perlu disusun kerangka pengendalian dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian adalah untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas sesuai dengan rencana (*on-track)* dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Ruang Lingkup Pengendalian, mencakup:
   a. Terdapat berbagai jenis pengukuran kinerja yang dapat dilakukan untuk kepentingan pengendalian, baik dilakukan secara bersamaan (komprehensif) atau hanya masing-masing jenis pengukuran tersendiri.
   b. Pengendalian yang dilakukan terdiri atas pengendalian pelaksanaan program prioritas dan atau kegiatan prioritas.
   c. Pengendalian tersebut merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan dilakukan oleh pimpinan K/L atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
   d. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.
   e. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai tindakan korektif (pelurusan), pada level program prioritas dan atau kegiatan prioritas pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

3. Waktu Pelaksanaan Pengendalian
   Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan seperti pada Gambar 9.14, mencakup:
   a. Berdasarkan hasil Evaluasi paruh waktu RPJMN pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dilakukan tindakan korektif untuk memastikan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas berjalan *on-track* sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN. Tindakan korektif pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN dilakukan pada program prioritas/kegiatan prioritas (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program prioritas/kegiatan prioritas) yang berdampak luas; dan
   b. berdasarkan butir a di atas dan atau hasil evaluasi RKP yang dilaksanakan setiap tahun dilakukan tindakan korektif pada semester kedua setiap pelaksanaan RKP pada program prioritas/kegiatan prioritas tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program prioritas/kegiatan prioritas).
4. Mekanisme Pengendalian, antara lain:
   a. Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk menjamin agar pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas sesuai dengan rencana. Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) program prioritas/kegiatan prioritas berdasarkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja. Sumber data dan informasi untuk melakukan penilaian (*assessment*) diperoleh dari Sistem Informasi Terpadu Evaluasi dan Pengendalian (SITEP).
   b. Proses verifikasi hasil penilaian (*assessment*) dilakukan melalui:
      (i) Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas,

Gambar 9.14
Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

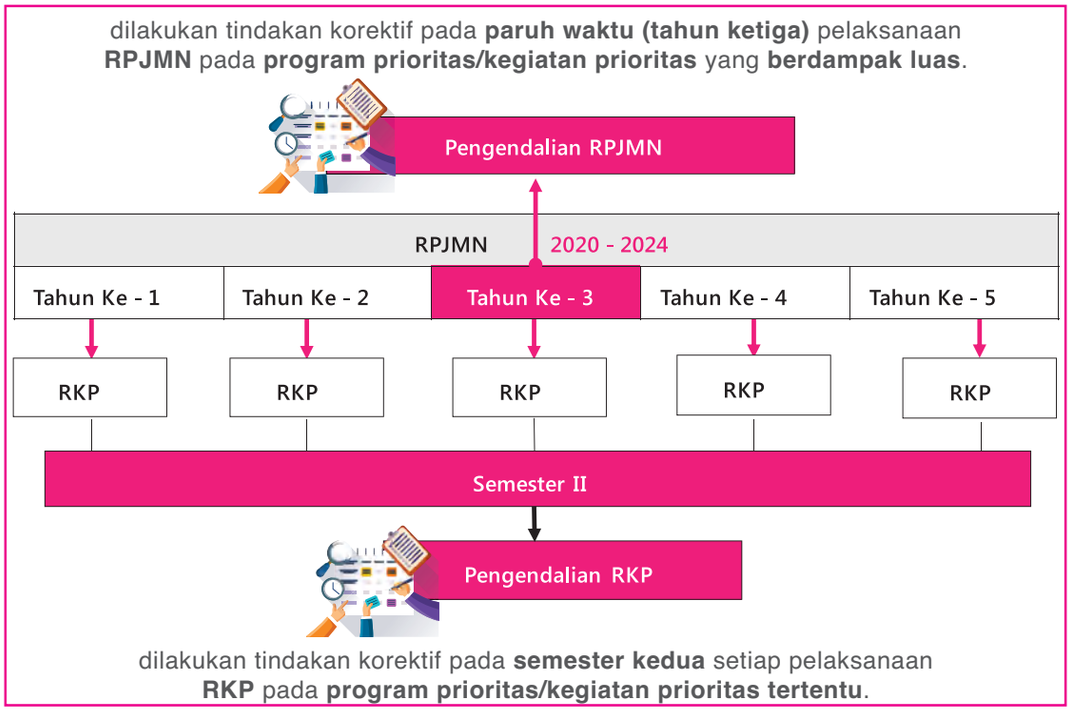

(ii) Konfirmasi atas pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, dan
(iii) Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas.

c. Keputusan untuk melakukan tindakan korektif pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN terhadap program prioritas/kegiatan prioritas mencakup 2 hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan:
(i) Kebijakan pemfokusan kembali (*refocusing*), yaitu pemfokusan langkah percepatan pencapaian target program prioritas/kegiatan prioritas;
(ii Kebijakan peninjauan ulang (reorientasi), yaitu peninjauan atau penyesuaian target dan langkah strategis pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas; dan
(iii) Kebijakan penataan kembali (restrukturisasi), yaitu perubahan atau perbaikan atas desain program prioritas/kegiatan prioritas.

Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas yang tidak sesuai target, yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas yang sifatnya penghentian sementara ataupun penghentian tetap apabila diperlukan (*suspend* definitif atau sementara dalam Sistem KRISNA).

Sementara untuk tindakan korektif pada semester kedua pelaksanaan RKP hanya mencakup tindakan konstruktif melalui kebijakan pemfokusan kembali (*refocusing*) atas langkah pencapaian target program prioritas/kegiatan prioritas.

Mekanisme pengendalian pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.15 berikut.

Gambar 9.15
Mekanisme Pengendalian Pembangunan

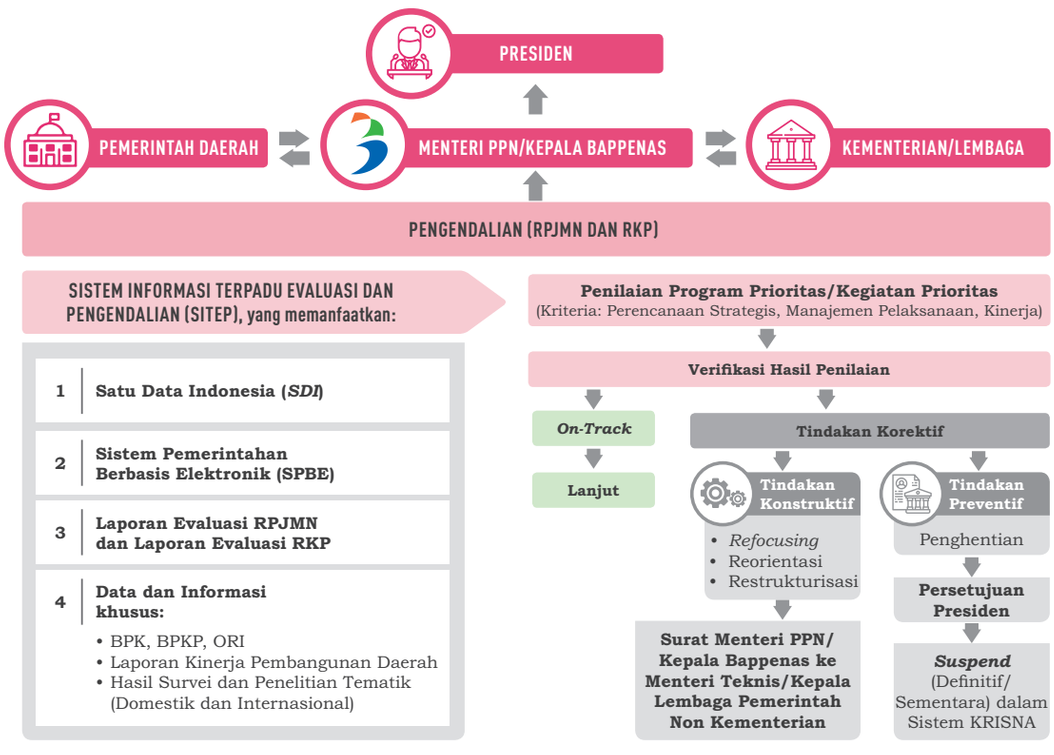

BAB 10
Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. RPJMN 2020-2024 terdiri dari narasi RPJMN dengan 3 (tiga) lampiran, yaitu: pertama, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*); kedua, Matriks Pembangunan; dan ketiga, Arah Pembangunan Wilayah, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Kesemuanya itu dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas.

Pembangunan dalam lima tahun ke depan yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS
(*MAJOR PROJECT)*
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	**Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:** Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	• Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0 %	**245,8** • APBN: 13 • BUMN: 125,9 • Swasta: 106,9	a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	**10 Destinasi Pariwisata Prioritas:** Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)	**161** (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	**9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 *Smelter***	• Industrialisasi di luar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa	**317,4** • APBN: 15,7 • Swasta: 176,0 • KPBU: 14,3 • BUMN: 111,4	a.l KemenESDM, Kemenperin, BKPM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	**Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun	**226,4** • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/Swasta), Perguruan Tinggi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
5	**Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit**	• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%	**32,0** • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19	a.l Kementan KemenESDM, Kemendagri, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
6	**Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	**25** • APBN: 3,3 • KPBU dan Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	**Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**	• Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	**30** • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	**Pembangunan Wilayah Batam – Bintan**	• Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	**69,9** • APBN: 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha: 54	a.l BP Batam, KemenPUPR, Kemenhub, Kemenperin, Kemenpar, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
9	**Pengembangan Wilayah Metropolitan:** Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	• Meningkatnya *share* PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	**222,9** (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	**Ibu Kota Negara (IKN)**	• Meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah	**466,98** • APBN: 91,29 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23	a.l KemenPPN/Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	**Pengembangan Kota Baru:** Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	• Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)	**134,6** (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	**Wilayah Adat Papua:** Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay • Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan	**27,4** (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kementan, KemenDesa PDTT, Kemenhub, Kemenkes, Pemda

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
13	**Pemulihan Pasca Bencana:** (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. • Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana	**15,2** • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, KemenESDM, KemenKUKM, Kemendikbud,Pemda
14	**Pusat Kegiatan Strategis Nasional:** PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	• Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya	**3,4** • APBN: 3,0 • KPBU: 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP
15	**Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***	• Menurunnya angka kematian lbu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi *stunting* balita hingga 14%	**187,1** (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
16	**Pembangunan *Science Techno Park*** (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)	• Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	**0,8** (APBN)	a.l Kemristek/BRIN, Kemdikbud, Kemenperin, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI), dan Swasta
17	**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**	• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	**29,1** (APBN)	a.l Kemenaker, Kemenperin Kemdikbud, BPS
18	**Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh**	• Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial • Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan	**406,5** (APBN)	a.l Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, KemenESDM, Kemendagri, BPS
19	**Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung**	• Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam • Menjadi *enabler* bagi pengembangan kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera	**308,5** • APBN: 105,5 • KPBU: 203,0	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
20	**KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)**	Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam • Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	**63,6** • APBN: 21,6 • KPBU: 42,0	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	**Kereta Api Makassar-Pare Pare**	• Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar *New Port* • Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun)	**6,4** • APBN: 3,8 • KPBU: 2,6	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
22	**Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**	• Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama • Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk *loop* secara teratur menjadi 27% • Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada *hinterland*	**113** (BUMN/Swasta)	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	**Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:** Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	• Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan	**118,8** (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
24	**Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak**	• Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta *Barrel* Per Hari di tahun 2026 • Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas	**637,0** (Badan Usaha)	a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN
25	**Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA**	• Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW • Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% • Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 • Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit sebesar 6,07 juta ton CO_2 pada 2024 • Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 • Terpenuhnya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	**1.121,0** (APBN dan Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
26	**Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital**	• Berkurangnya kesenjangan digital • Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	**435,2** • APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0	a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
27	**Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa**	• Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	**54,9** • APBN: 31,4 • KPBU: 18,7 • APBD: 4,8	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
28	**18 Waduk Multiguna**	• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m^3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan • Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	**92,9** • APBN: 12,9 • KPBU: 24 • Swasta : 60	a.l KemenPUPR, Swasta
29	**Jembatan Udara 37 Rute di Papua**	• Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50%	**7,7** (APBN)	a.l Kemenhub
30	**Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan**	• Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	**12,4** (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
31	**Jalan Trans Papua Merauke - Sorong**	• Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua • Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.	**15,4** (APBN)	a.l KemenPUPR
32	**Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)**	• Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	**140,9** • APBN: 73,5 • APBD: 1,7 • Masyarakat/Swasta: 65,7	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
33	**Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**	• Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	**123,5** • APBN: 77,9 • APBD: 15,6 • KPBU: 29,9	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
34	**Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)**	• Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh • Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota)	**397,9** • APBN: 18 ,0 • APBD: 109,2 • BUMN: 28,0 • Swasta: 237,5 • Masyarakat: 5,0	a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat
35	**Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah**	• Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun • Berkurangnya import LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun	**38,4** • APBN: 4,1 • BUMN: 6,9 • KPBU: 27,4	a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
36	**Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis**	• Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha • Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	**30,9** (APBN)	a.l. KemenPUPR, Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
37	**Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)**	• Tersambungnya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan) • Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan • Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara • Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna	**36,4** (Badan Usaha)	a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
38	**Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**	• Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun	**4,6** • APBN: 0,6 • KPBU: 3,0 • Swasta: 1,0	a.l KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
39	**Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**	• Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit	**13,0** (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG, BPPT
40	**Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT**	• Menurunnya insiden serangan siber; • Meningkatnya integrasi dan *sharing* data informasi antar *stakeholder* terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).	**8,0** **(APBN)**	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
41	**Penguatan Keamanan Laut di Natuna**	• Peningkatan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; • Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, *trans-national crimes* dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.	**12,2 (APBN)**	a.l. Kemenhan/TNI, Bakamla

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rincian Proyek Prioritas Strategis
(*Major Project*)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">• Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional.
• Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain
• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.
• Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="3">Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen
Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen
Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar</td><td colspan="3">Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen
Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif)</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,7%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0%</td><td>Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,8%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5%</td><td>Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5%</td><td>Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20,4%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5%</td><td>Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 21%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1%</td><td>Rp 245,8 T
• APBN: Rp 13 T
• Swasta: Rp 106,9 T
• BUMN: Rp 125,9 T</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas)
2. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenKP, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu)
3. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu)
4. Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian)
5. Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kemenparekraf)</td></tr>
</table>

2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritaslainnya</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024)
2. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024)
3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%)
• Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%)</td><td>• Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%)
• Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%)
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%)</td><td>• Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%)
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%)
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%)</td><td>• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%)
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%)</td><td>• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%)
• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%)</td><td>• 10 Kawasan Prioritas Selesai 100%</td><td>Rp 161 T
(APBN, KPBU, BUMN, Swasta)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="3">1.Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM)
2.Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda)
3.Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN)</td><td colspan="3">4.Pembanguan Desa Wisata dan Fasilitasi BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM)
5.Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda)
6.Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 *Smelter*

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional.
• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor indiustri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.
• Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku and produk antara untuk industri.
• Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh Global Value Chain.
• Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>KI beroperasi : 3
Smelter beroperasi: 4 smelter (kumulatif)</td><td>KI beroperasi : 4 (kumulatif)
Smelter beroperasi: 30 smelter (kumulatif)</td><td>KI beroperasi : 5 (kumulatif)
Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)</td><td>KI beroperasi : 7 (kumulatif)
Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)</td><td>KI beroperasi : 9 (kumulatif)
Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif)</td><td>KI beroperasi : 9 KI
Smelter beroperasi : 31 smelter (kumulatif)</td><td>Rp 317,4 T
• APBN: Rp 15,7 T
• Swasta: Rp 176,0 T
• KPBU: Rp 14,3 T
• BUMN: Rp 111,4 T</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, Kemendag, KPPU)
2. Pembangunan kawasan industri dan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, KemenATR/BPN)
3. Pengembangan infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN)
4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN)
5. Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenaker, KemenBUMN, KPPU)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani Dan Nelayan

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">• Belum terbentuk business model korporasi petani dengan skala ekonomi yang menerapkan konsep society 5.0
• Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar.
• Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23% dan keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi dan pasar.
• Rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal: harga beras di tingkat konsumen 2,1-2,7 kali dibandingkan harga petani (jeruk 4 kali lipat).
• Pengembangan 1.000 Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian.
• Jumlah koperasi nelayan yang aktif sekitar 1.907 unit dengan jumlah nelayan mencapai 2,6 juta jiwa (2016).</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">1. Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs).
2. Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.
3. Terjadinya perubahan prilaku masyarakat dalam penglolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis).</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Peningkatan produktivitas komoditas : 5 %
Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp49,20 juta/tenaga kerja
Peningkatan pendapatan nelayan:
Rp. 45,0 juta/nelayan/tahun
Terbentuk piloting 5 korporasi petani</td><td>Peningkatan produktivitas komoditas : 5 %
Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp51,70 juta/tenaga kerja
Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.50,4 juta/nelayan/tahun
Terbentuk 33 Korporasi petani</td><td>Peningkatan produktivitas komoditas : 5 %
Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp54,30 juta/tenaga kerja
Peningkatan pendapatan nelayan :
Rp.55,4 juta/nelayan/tahun
Terbentuk 65 klaster korporasi petani</td><td>Peningkatan produktivitas komoditas : 5 %
Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp57,00 juta/tenaga kerja
Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.61,0 juta/nelayan/tahun
Terbentuknya 150 korporasi petani</td><td>Peningkatan produktivitas komoditas : 5 %
Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp59,80 juta/tenaga kerja
Peningkatan pendapatan nelayan :
Rp 67,0 juta/nelayan/tahun
Terbentuknya 350 korporasi petani</td><td>Rp 226,4 T
• APBN = Rp 200,9 T
• Swasta = Rp 25,5 T</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">Kementan, KemenKP, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenperin, Perguruan Tinggi, dan Swasta</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="3">1. Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/ Agro Maritim 4.0
2. Penguatan kelembagaan petani
3. Investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan</td><td colspan="3">4. Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian dan perikanan
5. Fasilitasi pemasaran</td></tr>
</table>

5. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer per tahun 2018 baru mencapai 8,55 persen, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 23 persen (RUEN).
• Indonesia impor minyak mentah tahun 2018: 309.739 barel/hari (26,49% kapasitas Kilang) dan BBM: 395.386 BOPD (kebutuhan Indonesia: 1,3 Juta BOPD)
• Perkebunan sawit rakyat 5,8 juta ha (41%), namun hanya menghasilkan 14 juta ton (34%), perkebunan sawit swasta 8,1 juta ha
• Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun, dan minyak sawit merupakan ekspor komoditas andalan Indonesia saat ini.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen;
2. Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tahun;
3. Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia;
4. Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju (Tahapan Pembangunan)</td><td>Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)</td><td>Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)</td><td>EPC</td><td>EPC</td><td>Mid 2024 Start Up dan On Stream</td><td rowspan="3">Rp 32,0 Triliun
• APBN: Rp 1,1 Triliun
• BUMN: Rp 11,9 Triliun
• Swasta: Rp 19 Triliun</td></tr>
<tr><td>Volume produksi kelapa sawit (Ton CPO)</td><td>43,7 juta</td><td>44,6 juta</td><td>45,5 juta</td><td>46,4 juta</td><td>50,4 juta</td></tr>
<tr><td>Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju</td><td colspan="5">Perkiraan Capex USD 650-850 Juta = perkiraan Rp 11,9 Triliun (BUMN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">KemenESDM, Kementan, Kemendagri, BUMN, Swasta</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan BBN (KemenESDM)
2. Pembangunan kilang BBN berbahan baku minyak sawit 100% (Green Refinery Standalone) (BUMN)
3. Akselerasi, Replanting , Penerapan GAP, dan Pengolahan Sawit Rakyat (Kementan)
4. Sertifikasi ISPO dan RSPO (Kementan)
5. Pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan (demetalized palm oil mill) (Swasta)</td></tr>
</table>

6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Latar Belakang	• Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia • Pemanfaatan lahan budidaya air payau baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar. • Luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional.					
Manfaat	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun. • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun					
Durasi dan Lokasi	2020-2024 (5 tahun) : Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB					
	INDIKASI TARGET					**INDIKASI PENDANAAN**
Indikasi Target dan Pendanaan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
	• Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,45 Juta ton • Pertumbuhan ekspor udang 7 % per tahun	• Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,92 Juta ton • Pertumbuhan ekspor udang 8 % per tahun	• Produksi perikanan budidaya (ikan) 8,69 Juta ton • Pertumbuhan ekspor udang 10 % per tahun	• Produksi perikanan budidaya (ikan) 9,48 Juta ton • Pertumbuhan ekspor udang 12 % per tahun	• Produksi perikanan budidaya (ikan) 10,32 Juta ton • Pertumbuhan ekspor udang 15 % per tahun	**Rp 25 Triliun** • APBN: Rp 3,3 Triliun • KPBU dan Swasta: Rp 21,7 Triliun
Pelaksana	KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KemenLHK, LIPI, BPPT, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)					
***Highlight* Proyek**	1. Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KemenKP, Pemda) 2. Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta) 3. Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KemenKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN) 4. Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KemenKP, Swasta) 5. Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KemenKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KemenLHK, KemenESDM, Pemda)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Latar Belakang	• Produktivitas perikanan tangkap masih rendah; Jaringan sistem pemasaran produk perikanan Internasional belum memiliki • Dukungan infrastruktur produksi belum optimal; Tata kelola Perikanan perlu ditingkatkan						
Manfaat	1. Mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia, dengan fasilitas Internasional 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024. 3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024						
Durasi dan Lokasi	2020-2024 (5 tahun) : Lokasi Sulawesi Utara, Sumatera Utara/Riau, Maluku						
	INDIKASI TARGET						**INDIKASI PENDANAAN**
Indikasi Target dan Pendanaan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
	• Produksi perikanan tangkap 8,02 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,1 miliar	• Produksi perikanan tangkap 8,42 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,6 miliar	• Produksi perikanan tangkap 8,88 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,0 miliar	• Produksi perikanan tangkap 9,43 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,5 miliar	• Produksi perikanan tangkap 10,10 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 8,0 miliar	**3 lokasi integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market***	**Rp 30 Triliun** • APBN: 7,2 Triliun • KPBU dan Swasta: 22,8 Triliun
Pelaksana	KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenristek, KemenLHK, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)						
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan berskala internasional dan restrukturisasi armada kapal perikanan (KemenKP, Kemenperin, Pemda, BUMN/swasta) 2. Pembangunan infrastruktur pendukung, pasar, cold storage dan sistem logistik (KemenPUPR, KemenESDM, BUMN/Swasta , KemenKP, Kemendag, Pemda) 3. Penguatan data stock perikanan dan harmonisasi perijinan (KemenKP, Kemenhub, Kemenristek, Pemda) 4. Penguatan lembaga pengelola WPP (KemenKP, Pemda) 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan *fishing ground* (KemenKP, KemenLHK, Pemda)						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (1/2)

Latar Belakang	1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap *hub* di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018). 2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi. 3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta). 4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan klaster Bintan *offshore marine center* dan *New Bintan Airport.* Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021.				
Manfaat	1. Meningkatnya LPE di Kabupaten/Kota Wilayah Batam – Bintan dengan rata-rata mencapai 5,83 persen yang akan berkontribusi terhadap LPE Kepulauan Riau yang mencapai rata-rata 6,2 persen dan Nasional 6,0 persen 2. Meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) secara nasional 3. Meningkatnya nilai kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi makan minum Wilayah Batam - Bintan 4. Meningkatnya angka serapan tenaga kerja di Wilayah Batam – Bintan yang akan berpotensi menurunkan angka pengangguran di Kepulauan Riau 5. Meningkatnya nilai ekspor Wilayah Batam – Bintan yang akan berkontribusi terhadap nilai ekspor nasional				
Durasi	2020 – 2024 (5 Tahun)				
Target	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Provinsi Kepulauan Riau	a. LPE 4,7% b. LP Sektor Industri 5,4% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 5,8% b. LP Sektor Industri 5,3% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,8%	a. LPE 6,4% b. LP Sektor Industri 5,5% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 6,8% b. LP Sektor Industri 5,6% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 7,2% b. LP Sektor Industri 5,7% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 13%
Kota Tanjung Pinang	a. LPE 4,26%	a. LPE 4,25%	a. LPE 4,40%	a. LPE 4,52%	a. LPE 4,63%
Kota Batam	a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 4,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,0%	a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 5,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,3%	a. LPE 5,36% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%	a. LPE 5,58% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%	a. LPE 5,80% b. LPE Sektor Industri 6,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 7,0%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (2/2)

Target	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bintan	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,2% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,3% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,81% b. LPE Sektor Industri 5,4% c. LPE Sektor Akomodasi akan Minum 9,6%	a. LPE 6,93% b. LPE Sektor Industri 5,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,6%	a. LPE 7,05% b. LPE Sektor Industri 5,6% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,7%
Indikasi Pendanaan	**Rp 69,9 Triliun** APBN: Rp 6,4 Triliun KPBU: Rp 9,5 Triliun Badan Usaha : Rp 54,0 Triliun				
Pelaksana	BP Batam, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Bintan Aviation Investment, PT Pelindo II, PT. Bintan Alumina Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, PT. Bintan Resort Cakrawala				
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Potensi) 2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan) 3. Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri 4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI 5. Pengembangan KI Bintan Aerospace 6. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar 7. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim 8. Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional 9. Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil 10. Pengembangan kawasan Bintan Resort 11. Pengembangan KEK Galang Batang		12. Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang 13. Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase 14. Pembangunan infrastruktur energi gas 15. Pembangunan infrastruktur energi listrik 16. Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3 17. Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional 18. Jalan Batam 19. Jalan Bintan 20. Pembangunan Fly Over Sp. Kabil 21. Akses KEK Galang Batang I 22. Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.
DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.
BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%
MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional
2. Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan</td></tr>
<tr><td>Lokasi</td><td colspan="7">Wilayah Metropolitan PALEMBANG,DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional</td><td>Rp 222,92 Triliun
(APBN, APBD, KPBU, Swasta)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD)
2. Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)
3. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD)
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri)
5. Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (BPS)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10. Ibu Kota Negara (IKN) (1/2)

Latar Belakang	• Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa. • Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia
Manfaat	1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI 2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah • Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3; • Peningkatan Kesempatan Kerja (*Employment Multiplier* 2,9); • Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan *Price of capital* 0,23% dan Kenaikan *Price of Labour* 1,37%) 3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris 4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun 5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek
Lokasi	Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Durasi	2020-2024 (5 tahun)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10. Ibu Kota Negara (IKN) (2/2)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
Indikasi Target dan Pendanaan	• Perencanaan IKN • Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN • Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana • Perencanaan Teknis	• Pengadaan lahan (Tahap I) • Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan • Pembangunan akses dan infrastruktur dasar	• Pembangunan Istana Negara • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I) • Pengadaan lahan (Tahap II) • Penetapan PP RTRWN • Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN	• Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I) • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II)	• Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH • Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III).	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung selesai.	**Rp 466,98 Triliun** • APBN: Rp 91,29 Triliun • KPBU: 252,46 Triliun • Badan Usaha: 123,23 Triliun
Pelaksana	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta						
***Highlight* Proyek**	1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) 2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) 3. Penyusunan *Grand Design* Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) 5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (1/2)

Latar Belakang	**MAJA:** • Percontohan pengembangan *compact city*, sebagai opsi lokasi lahan termurah dan terdekat dengan Jakarta sebagai kota inti, dengan dukungan akses transportasi murah *commuter line.* • Telah disusun *Master Plan Development Plan* (2016), RDTR, DED dan Rencana Strategis Permukiman (2018), direncanakan untuk implementasi tahun 2018-2019 dengan tema perencanaan: *Compact City.* • Infrastruktur pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan (capaian akses air minum layak 27,62% dan sanitasi layak 50,84% di Tahun 2017 di Kab. Lebak) **TANJUNG SELOR:** • Tahap pembangunan di Kabupaten Bulungan, Inpres 09/2018, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi baru. • Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan negara dan berdekatan dengan PKN Tarakan yang merupakan pusat kegiatan regional. Potensi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024 (Kab. Bulungan). • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 74% dan sanitasi 67,57% di Tahun 2017 (Kab. Bulungan) **SOFIFI:** • Penyusunan RDTR untuk PKW Sofifi, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi • Posisi strategis dalam simpul transportasi nasional dengan adanya pelabuhan Ternate (dalam jaringan Tol Laut). Potensi kenaikan jumlah penduduk sekitar 6% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024. (Kota Tidore Kepulauan) • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 71% dan sanitasi 87,45% di tahun 2017 (Kota Tidore Kepulauan) • Daya dukung Kota Ternate yang telah melampaui batas. Sudah dibangun pusat pemerintahan di Sofifi, namun belum dimanfaatkan secara optimal **SORONG:** • Kota Sorong merupakan gerbang untuk Raja Ampat, penunjang dari Raja Ampat dan perbatasan dengan negara luar. • Delineasi Kota Baru Sorong terpacu pada penggerak ekonomi yang berada di sekitar KEK Sorong yang pusatnya adalah Distrik Aimas • BPIW sudah menyusun MPDP Sorong dengan fokus pembangunan awal pada KEK di sekitar kota Sorong • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 64,04% dan sanitasi 77,32% di Tahun 2017
Manfaat	Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)
Durasi	2020-2024 (5 tahun)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (2/2)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
Indikasi Target dan Pendanaan	• Maja, Sorong, Sofifi: Penyusunan Renaksi Kota Baru • Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20%	• Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20% • Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 40%	• Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 50% • Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 60%	• Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 75% • Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 80%	Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100%	Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100%	**Rp. 134,6 Triliun** (APBN, Badan Usaha, dan Swasta)
Pelaksana	Kemenhub, Kementerian PUPR, BUMN, Swasta						
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan Pelabuhan, Bendungan, Bandara (Kemenhub, BUMN, Swasta) 2. Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) 3. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, APBD, Masyarakat, Swasta, KPBU) 4. Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan (Kemenhub)						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">• Merupakan wilayah adat di kawasan pegunungan dengan tingkat kesulitan akses dan keterisolasian yang tinggi serta harus dikembangkan sesuai amanat Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
• Kabupaten di Kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal sehingga paling membutuhkan keberpihakan pembangunan
• Memiliki potensi pertanian berupa: Ternak Sapi, Kopi, Kacang Tanah dan tanaman Hortikultura. Potensi pertanian tersebut cukup besar dan sesuai dengan potensi agroklimat, kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di wilayah Adat Laa Pago dan 11 kabupaten di wilayah Adat Domberay
• Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 47,5
2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 62,6</td><td>1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 48,4
2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,3</td><td>1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 49,4
2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,9</td><td>1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 50,4
2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 64,5</td><td>1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 51,4
2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 65,2</td><td>Rp 27,4 Triliun (APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemendag, Kemendes PDTT, Pemda Provinsi Papua dan Pemda Provinsi Papua Barat</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (Kemenkes)
2. Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (Kemenristekdikti)
3. Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat (Komoditas Kakao dan Kopi) (Kementan)
4. Pembangunan Jalan Trans Papua (KemenPUPR)
5. Sarana prasarana air bersih (Kemendes PDT)
6. Penyediaan Energi Listrik (Kemen ESDM)</td></tr>
</table>

13. Pemulihan Pasca Bencana:
(Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">1. Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki akun kegiatan pasca bencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan per sektornya
2. Masih minimnya manajemen penanganan pasca bencana lintas sektor pembangunan</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
2. Mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 50%</td><td>Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 75%</td><td>Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 90%</td><td>Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 100%</td><td>-</td><td>Rp 15,2 Triliun
• APBN: Rp 14,8 T
• APBD: Rp 0,4 T</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">BNPB, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemensos, Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang social ekonomi (BNPB)
2. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana (Kementerian KUKM)
3. Rekonstruksi Jembatan Palu 4 (Kementerian PUPR)
4. Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru (Kementerian Dikbud)
5. Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemerintah Provinsi)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (1/2)

Latar Belakang	• Merupakan salah satu kawasan yang harus dikembangkan sesuai dengan arahan presiden untuk mengembangkan kawasan sekitar PLBN yang tercantum dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019 • PKSN ditetapkan sebagai Pusat pelayanan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Memiliki potensi destinasi wisata dengan didukung oleh adanya infrastruktur transportasi, dan Potensi pengembangan pertanian dan pariwisata					
Manfaat	• Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**					**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,40 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,47 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,43	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,41 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,49 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,45	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,44 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,52 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,47	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,46 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,54 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,50	1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,48 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,57 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,52	**Rp 3,36 Triliun** • APBN Rp 3,0 T • KPBU Rp 0,4 T

14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (2/2)

	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
		2021	2022	2023	2024	
Indikasi Target dan Pendanaan	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,37 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,38 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,49	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,38 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,39 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,51	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,40 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,41 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,53	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,42 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,43 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,56	4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,44 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,45 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,59	
Pelaksana	KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP					
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan (KemenPUPR) 2. Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN (Kemenhub) 3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dikembangkan (KemenKP) 4. Pengembangan Pelabuhan dan Bandar Udara (Kemenhub) 5. Penyediaan Moda Kapal Ternak (Kemenhub)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

15. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015)
• 27,7% balita di Indonesia stunting (tahun 2019)</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">Meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan:
1. Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup
2. Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• AKI menurun hingga 230/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita menurun hingga 24,1% (prioritas di 260 kab/kota)</td><td>• AKI menurun hingga 217/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita 21,1% (prioritas di 360 kab/kota)</td><td>• AKI menurun hingga 205/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita 18,4% (prioritas di 460 kab/kota)</td><td>• AKI menurun hingga 194/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita 16,0% (prioritas di 514 kab/kota)</td><td>• AKI menurun hingga 183/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita 14,0% (prioritas di 514 kab/kota)</td><td>• AKI 183/100.000 KH
• Prevalensi stunting balita turun menjadi 14,0%</td><td>Rp 187,1 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud, KKP, KemenPUPR, BPOM, KemenPPPA, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemda.</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan (BKKBN)
2. PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan (Kemendikbud)
3. Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR)
4. Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

16. Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)

Latar Belakang	• Skor *Global Innovation Index* (GII) tahun 2018 adalah 29,8 (peringkat 85 dari 126 negara). • Pembangunan *Science-Techno Park* (STP) tersebar di berbagai daerah namun tidak didukung dengan *source of knowledge* yang kuat • Hasil-hasil riset inovasi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial • Perlu optimaliasi STP di major universitas (UI, ITB, IPB, dan UGM) yang memiliki potensi sumber inovasi dan kandidat tenant (peneliti dan mahasiswa) yang besar untuk komersialisasi produk riset dan inovasi						
Manfaat	1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi 2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial 3. Peningkatan produk inovasi nasional						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Lokasi	2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
	• Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (25%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (25 %)	• Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (50%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (50 %) • Pemenuhan alat instalasi STP (35%)	• Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (75%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (75%) • Pemenuhan alat instalasi STP (65%)	• Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (100%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri *in wall* STP (100%) • Pemenuhan alat instalasi STP (100%)	• Pengembangan STP ITB, IPB, UI, dan UGM (100%)	• Beroperasinya 4 STP secara penuh dan menghasilkan startup (PPBT) • Produk riset yang dikomersialkan oleh industri - ITB : 10 Produk - UI: 19 Produk - IPB: 6 Produk - UGM: 22 Produk	**Rp 0,8 Triliun** (APBN)
Pelaksana	• Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta						
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di ITB 2. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di IPB 3. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di UI 4. Pembangunan dan Pengembangan Science Techno Park di UGM						

17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah.
• Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.
• Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%</td><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%</td><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%</td><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%</td><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%</td><td>• Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%</td><td>Rp 29,1 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel
(Survey ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).
2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0
Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing
3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik
Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik
4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/Skill Development Fund
Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (upskilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.
5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja
Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (skilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), pelatihan keahlian tambahan (upskilling), dan sertifikasi.</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (1/2)

Latar Belakang	1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima 3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program					
Manfaat	• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) • Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan • Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0					
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**					**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	2021	2022	2023	2024	
	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota	• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota	**Rp. 406,5 Triliun** (APBN)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (2/2)

	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikasi Target dan Pendanaan	• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen	• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen	• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen	• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen	• Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
***Highlight* Proyek**	a) Penyediaan layanan infrastuktur dan layanan internet b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran					

19. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Jalan arteri primer P. Sumatera (Lintas Barat, Lintas Timur, dan Lintas Tengah) kondisinya belum mantap seluruhnya, memiliki traffic cukup tinggi, dan terjadi kemacetan pada beberapa titik, dengan perkiraan waktu tempuh Aceh-Lampung 48 jam
• Jalan Tol Trans Sumatera memiliki total panjang 2.800 km, baru terbangun sepanjang 540 km (pada ruas Bakahuni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Palembang-Indralaya), memerlukan penyelesaian untuk mendorong pengembangan wilayah Sumatera.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam
2. Menjadi enabler bagi pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera
3. Menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td>INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td><td rowspan="2">Rp 308,5 Triliun
• APBN: 105,5
• KPBU: 203,0</td></tr>
<tr><td>472 km</td><td>590 km</td><td>495 km</td><td>325 km</td><td>149 km</td><td>2.031 km</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian PUPR dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Koridor I Banda Aceh-Medan (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Langsa; Langsa-Binjai; Binjai-Medan
2. Koridor II Medan-Pekanbaru (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; Tebing Tinggi-Kisaran; Kisaran-Rantau Prapat; Rantau Prapat-Sp. Sigambali-Dumai; Dumai-Kandis-Pekanbaru)
3. Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-Betung; Betung-Palembang-Kayu Agung)
4. Koridor IV Palembang-Bakauheni (Kayu Agung-Pematang Panggang; Pematang Panggang-terbanggi besar; Terbanggi Besar-Bakauheni)
5. Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga (Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga)
6. Koridor VI Pekanbaru-Padang (Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi; Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang)
7. Koridor VII Palembang-Bengkulu (Palembang-Indralaya; Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta - Bandung)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Tingginya urbanisasi di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung) belum diimbangi dengan ketersediaan konektivitas KA berkecepatan tinggi untuk melayani mobilitas penumpang pada koridor antarkota metropolitan (konurbasi)
• Koridor Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang diperkirakan akan jenuh memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan jarak 158 km ditempuh dengan kendaraan umum 4 – 5 jam dan menggunakan kereta api regular 3 – 4 jam
• Frekuensi penerbangan Jakarta-Surabaya sangat padat (peringkat ke-9 di Dunia), mencapai 150 pergerakan pesawat terbang per hari dan diperkirakan ada 3,849 juta kursi dalam penerbangan per tahun</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Mendorong pertumbuhan koridor ekonomi dan kota-kota lain (Semarang, Cirebon, Bandung)
2. Mendorong pertumbuhan TOD di sekitar stasiun
3. Mengurangi waktu tempuh Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit dan pada Koridor Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3 jam 30 menit</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>KA cepat Jakarta – Surabaya Phase 1 (Jakarta – Semarang)</td><td>Persiapan</td><td>Persiapan</td><td>Persiapan</td><td>Konstruksi</td><td>Konstruksi</td><td>• Panjang jalur KA: 435 km
• Target konstruksi selesai akhir 2024</td><td rowspan="2">Rp 63,6 Triliun
• APBN: Rp 21,6 Triliun
• KPBU: Rp 42,0 Triliun</td></tr>
<tr><td>KA cepat Jakarta - Bandung</td><td>Konstruksi</td><td>Konstruksi</td><td>Operasi</td><td>Operasi</td><td>Operasi</td><td>• Target 142,3 km (selesai akhir 2021)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPPT, dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Penyiapan dan pengadaan lahan
2. Pembangunan infrastruktur (bangunan Rel dan Flyover/Underpass lintas Jakarta-Semarang 226 unit)
3. Sistem persinyalan dan kelistrikan
4. Pembangunan Depo dan Stasiun
5. Pembangunan 13 terowongan pada Lintas Jakarta-Bandung</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

21. Kereta Api Makassar-Pare Pare

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Jalan nasional koridor Makassar – Pare-pare merupakan jalur utama angkutan batubara dari Kalimantan melalui pelabuhan Pare-pare menuju kawasan industri di Makassar sebagai pusat industri di Pulau Sulawesi dengan proyeksi permintaan angkutan barang umum/industri sebesar 6.33% per tahun
• Jalan arteri lintas barat Sulawesi koridor Makassar – Barru – Pare-pare memiliki kapasitas yang kurang memadai untuk mendukung logistik sehingga terjadi beban muatan lebih</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Terhubungkannya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port melalui Jalur Kereta Api
2. Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi sebesar 20-30% pada tahun 2045 dengan target 1,5 juta ton per tahun
3. Dalam jangka panjang Jaringan KA Makassar-Pare-Pare bagian dari jaringan KA Kawasan Metropolitan Makassar</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Konstruksi Segmen B, C dan D
• Konstruksi Segmen F</td><td>• Penyiapan Segmen A dan E</td><td>• Konstruksi Segmen A dan E</td><td>Konstruksi segmen A dan E</td><td>Konstruksi Segmen A dan E</td><td>Full Operasional pada tahun 2024</td><td>Rp 6,4 Triliun
• APBN: Rp 3,8 Triliun
• KPBU: Rp 2,6 Triliun</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="3">1. Penyiapan readiness criteria dan lahan
2. Pembangunan badan jalan/track segmen BCDE (termasuk siding Pelabuhan Garongkong)
3. Pembangunan stasiun barang, penumpang segmen BCDF
4. Pembangunan Siding track Segmen F
5. Pengadaan Rolling Stock dan Sistem persinyalan dan kelistrikan
6. Pembangunan Depo, Stasiun, dan Balai Yasa</td><td colspan="4">Target 142 km, meliputi:
Segmen A: Pare-Pare - Palanro
Segmen B: Palanro - Barru
Segmen C: Barru - Pangkep
Segmen D: Pangkep - Mandai
Segmen E: Mandai - Makassar
Segmen F : Pangkep - Pabrik Tonasa, dan Mandai - Pabrik Bosowa</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

22. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

(Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">• Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam
• 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi
• 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi port to port, sedangkan rute loop hanya 23%
• Belum adanya standardisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama transhipment domestik.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">• Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standardisasi pelabuhan utama (nilai turn round time maksimum 24 jam)
• Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27%
• Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">• Tahun 2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td>Tahun 2020</td><td>Tahun 2021</td><td>Tahun 2022</td><td>Tahun 2023</td><td>Tahun 2024</td><td>INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>1 pelabuhan utama</td><td>2 pelabuhan utama</td><td>4 pelabuhan utama</td><td>6 pelabuhan utama</td><td>7 pelabuhan utama</td><td>Rp 113 Triliun
(BUMN/Swasta)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas)
2. Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater
3. Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs
4. Pengembangan Kawasan Industri</td></tr>
</table>

23. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Urbanisasi berkembang pesat, diperkirakan pada 2045, 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dimana 6 metropolitan menyumbang sebesar 41% PDB nasional (setara Rp 5.554 triliun)
• Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain masih di bawah 20%
• Emisi yang masih tinggi dan dampak biaya kesehatan akibat emisi sektor transportasi mencapai 4,2 miliar dolar/tahun
• Jakarta kota termacet ke-7 di dunia, dengan kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">• Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitas
• Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO_2-eq
• Meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">• 2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td>INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td><td rowspan="2">Rp 118,8 Triliun
(APBN, APBD, Badan Usaha)</td></tr>
<tr><td>3 Kota</td><td>4 kota</td><td>5 kota</td><td>6 kota</td><td>6 kota</td><td>6 Kota Metropolitan (Metropolitan Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian Perhubungan, Pemda, dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Penyiapan studi, readiness criteria, dan lahan
2. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal perkotaan
3. Pengoperasian angkutan umum massal perkotaan oleh Badan Usaha</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

24. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (1/2)

Latar Belakang	1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia.							
Manfaat	1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9Juta Barrel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas.							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	**INDIKASI PENDANAAN**
	Pembangunan kilang baru (grass root) Tuban	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat *General Engineering Design, Site Development*	*Financing* dan EPC	*Financing* dan EPC	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	+300 Ribu BCPD (2026)	**Rp 637,0 Triliun** (Badan Usaha)
	Pembangunan kilang baru (grass root) Bontang	*Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development*	AMDAL, *BED-FEED*	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*	+300 Ribu BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Cilacap	BEDP *(Basic Engineering Design Package)/ FEED (Front and Engineering Design, Site Development*	*Early Works*	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*	+ 50 Ribu BCPD (2026)	
	Kilang RDMP Balongan Phase I	Proses *Dual FEED sd Contract Award EPC, Site Development*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction) Works*	*Commissioning & Start Up, Operational Acceptance* 25 ribu BCPD			+100 Ribu BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Balongan Phase II	BEDP *(Basic Engineering Design Package)*, site development	BEDP *(Basic Engineering Design Package), Dual FEED sd Contract Award EPC*	*EPC Works stage* II	*EPC Works stage* II	*EPC Works stage* II		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

24. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2/2)

	INDIKASI TARGET	2020	2021	2022	2023	2024	Total	INDIKASI PENDANAAN
Indikasi Target dan Pendanaan	Kilang RDMP Balikpapan Phase I	*RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracker) FEED Tank Completed*	*OA (Operational Acceptance) Sub Sea Pipe Plan* Lawe-Lawe RFSU (*Ready For Start Up*)	*OA EPC Lawe-Lawe* dan RFSU *Boiler*	*Commissioning & Start Up, Operational Acceptance* 100 Ribu BCPD		+100 Ribu BCPD (2025)	**Rp 637,0 Triliun** (Badan Usaha)
	Kilang RDMP Balikpapan Phase II	BEDP *(Basic Engineering Design Package)*	*Dual FEED Process*	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC		
	Kilang RDMP Dumai	BFS (*Bankable Feasibility Study*)	BEDP *(Basic Engineering Design)*	Dual Feed Process	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	EPC *(Engineering, Procurement, and Construction*)	+100 Ribu BCPD (2026)	
Pelaksana	1. Pertamina, Badan Usaha, KESDM, KEMENKEU, BUMN							
***Highlight* Proyek**	1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan migas (KESDM); 2. Penyediaan dukungan fasilitas fiskal (Kemenkeu); 3. Pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi (BUMN).							

25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="8">1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai (rasio elektrifikasi) 98,86 %;
2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau jawa dengan luar Jawa;
3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="8">1. Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW;
2. Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%;
3. Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 (kWh per kapita) di 2024;
4. Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO_2 pada 2024;
5. Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024;
6. Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru, dan IKN Baru).</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="8">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="7">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Tambahan Kapasitas Pembangkit (MW)</td><td>5.452,5</td><td>6.446,1</td><td>3.442,8</td><td>6.209,2</td><td>5.727,7</td><td>27.277 MW</td><td rowspan="3">Rp 1.121 Triliun
(APBN dan Badan Usaha)</td></tr>
<tr><td>Kapasitas Jaringan Transmisi (kms)</td><td>4.459,6</td><td>4.765,9</td><td>4.632,1</td><td>3.519,5</td><td>1.692,0</td><td>19.069,10 kms</td></tr>
<tr><td>Kapasitas Gardu Induk (MVA)</td><td>14.247,0</td><td>8.460,0</td><td>7.510,0</td><td>3.900,0</td><td>4.490,0</td><td>38.607 MVA</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="8">KESDM, BUMN dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="8">1. Pengembangan mini grid off grid di daerah terisolir terutama pulau-pulau kecil Indonesia Timur (KESDM);
2. Pemanfaatan dan Pembangunan Bendungan Multifungsi (KPUPR);
3. Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk (BUMN, IPP).</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

26. Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="8">1. Terdapat 7.971 desa blankspot (tidak terlayani akses telekomunikasi dan internet);
2. Investasi pembangunan jaringan dengan teknologi serat optik untuk melayani daerah rural dan yang sulit terjangkau sangat mahal;
3. Belum terintegrasinya data pemerintahan yang memiliki standar kehandalan dan keamanan yang ideal;
4. Pemanfaatan infrastruktur untuk digitalisasi layanan masih terbatas pada 5 sektor strategis rencana pita lebar (e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Pengadaan, dan E-Logistik) serta e-Commerce sehingga digitalisasi belum dirasakan secara masif.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="8">1. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK
2. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan
3. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi, dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa Big Data dari berbagai sumber data yang tersedia.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="8">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="7">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>Target Kumulatif</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Pembangunan BTS/Lastmile (desa non komersial)</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5,052 desa</td><td rowspan="5">Rp 435,2 Triliun
APBN: Rp 7,2 Triliun
Swasta: Rp 428 Triliun</td></tr>
<tr><td>Kapasitas satelit Satria (Gbps)</td><td>Konstruksi</td><td>Konstruksi</td><td>Konstruksi</td><td>150</td><td>150</td><td>150 Gbps</td></tr>
<tr><td>Persentase kecamatan yang terjangkau serat optik(%)</td><td>36,42</td><td>37,15</td><td>42,85</td><td>50,00</td><td>60,60</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>Penyelenggaraan Pusat data nasional</td><td>K/L:30%
Pemprov/kab/kot:30%</td><td>K/L:50%
Pemprov/kab/kot:50%</td><td>K/L:80%
Pemprov/kab/kot:80%</td><td>K/L:100%
Pemprov/kab/:100%</td><td>K/L:100%
Pemprov/kab/kot:100%</td><td>K/L:100%
Pemprov/kab/kot:100%</td></tr>
<tr><td>Sistem infrastruktur penyiaran digital</td><td>44 lokasi satuan transmisi</td><td>50 lokasi satuan transmisi</td><td>60 lokasi satuan transmisi</td><td>74 lokasi satuan transmisi</td><td>55 lokasi satuan transmisi</td><td>283 lokasi satuan transmisi</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="8">Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kemendagri, KemenPAN, BSSN, BPPT, dan Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="8">1. Perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (BTS/Last Mile) (Kemenkominfo, BUMN, Swasta)
2. Satelit Satria (Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenhan/Polri, Kemendagri)
3. Peningkatan jangkauan jaringan tetap pitalebar hingga ke tingkat kecamatan (Kemenkominfo, BUMN, Swasta)
4. Penyediaan Infrastruktur SPBE (Kemenkominfo, BSSN, BPPT)
5. Penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital (Kemkominfo, LPP TVRI)</td></tr>
</table>

27. Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Latar Belakang	1. Banjir rob masih terjadi beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, Gerbangkertosusila) 2. Kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat 3. Belum terhubungnya konektivitas JIPS Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas						
Manfaat	1. Mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, Cirebon 2. Meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II 3. Menurunkan waktu tempuh Semarang - Demak (dari 1 jam menjadi 25 menit) 4. Meningkatkan konektivitas Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
• Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah	• 16 unit	• 19 unit	• 36 unit	• 28 unit	• 5 unit	• **104 unit**	**Rp 54,9 Triliun** APBN: Rp 31,4 Triliun KPBU: Rp 18,7 Triliun APBD: Rp 4,8 Triliun
• Terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	• 12,8 Km	• 21,4 Km	• 21,8 Km	• 22,6 Km	• 22,5 Km	• **100,9 Km**	
• Terbangunnya SPALDT permukiman dan perkotaan	• 66.611 KK	• 105.205 KK	• 105.205 KK	• 157.808 KK	• 157.808 KK	• **592.637 KK**	
• Terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu/ONLIMO	• 47 unit	• 16 unit	• 14 unit	• 12 unit	• 11 unit	• **100 unit**	
• Terbangunnya jalan Tol Semarang-Demak					• 27 Km	• **27 Km**	
Pelaksana	KemenPUPR, KemenESDM, Pemda, & Badan Usaha						
***Highlight* Proyek**	1. Alat pemantauan penurunan tanah (KemenESDM) 2. Tanggul Laut dan bangunan pengaman pantai (KemenPUPR) 3. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (KemenPUPR) 4. Jalan Tol Semarang-Demak (KemenPUPR)						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

28. 18 Waduk Multiguna

Latar Belakang	1. Berkurangnya total volume tampungan sebesar 19% akibat sedimentasi (Pulau Jawa hingga 31%) 2. Sekitar 59% bendungan eksiting hanya memiliki fungsi tunggal, terutama untuk irigasi 3. Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi (tingkat kehandalan jaringan irigasi 70%) 4. Semakin tingginya kompetisi air seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama di Pulau Jawa						
Manfaat	1. Tersedianya tampungan air untuk mereduksi risiko bencana banjir sebesar 12.999,41 m^3/detik 2. Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,48 m^3/detik 3. Tersedianya pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri yang bersumber dari waduk sebesar 2.437,55 MW 4. Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan 5. Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukkulu, DI Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komering) 6. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebesar rata-rata 25% di 9 DI						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
• Jumlah waduk multiguna yang dibangun	• 0 unit	• 4 unit	• 3 unit	• 2 unit	• 9 unit	• **18 unit (10 APBN, 6 KPBU, 2 SWASTA/BUMN)**	**Rp 92,9 Triliun** APBN: Rp 12,96 Triliun KPBU: Rp 20 Triliun Swasta: Rp 60 Triliun
• Alat ukur air (water accounting) yang terpasang	• 1 DI	• 2 DI	• 3 DI	• 2 DI	• 1 DI	• **9 DI**	
Pelaksana	KemenPUPR dan Swasta						
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan waduk multiguna 2. Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (*water accounting*)						

29. Jembatan Udara 37 Rute di Papua

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">• Keterbatasan sistem jaringan jalan di Papua dan masih sangat tergantung dengan moda udara untuk distribusi barang dan mobilitas manusia mengakibatkan tingginya harga bahan pokok dan barang lainnya.
• Distribusi logistik di wilayah Pegunungan Tengah dilakukan melalui moda udara melalui bandara di Timika, Dekai, Wamena, Oksibil, dan Tanah Merah
• Kondisi bandara yang ada memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi perintis baik untuk penumpang maupun kargo</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">• Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50 persen
• Mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui kepastian ketersediaan angkutan untuk hasil komoditas di daerah</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">• 2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>• 9 bandara dikembangkan
• Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM)
• Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute</td><td>• 9 bandara dikembangkan
• Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi
• Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM)
• Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute</td><td>• 9 bandara dikembangkan
• Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi
• Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM)
• Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute</td><td>• 9 bandara dikembangkan
• Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM)
• Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute</td><td>• 7 bandara dikembangkan
• Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM)
• Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute</td><td>Rp 7,7 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="6">Kementerian Perhubungan</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="6">1. Penyediaan subsidi perintis angkutan penumpang, kargo, dan BBM
2. Peningkatan kapasitas 11 bandara pendukung jembatan udara (Manokwari, Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Timika, Tanah Merah, Yahukimo)
3. Integrasi dengan Tol Laut melalui pengembangan pelabuhan Pomako dan Agat
4. Penyediaan Subsidi Perintis Tol Laut pada 2 Rute</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

30. Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="4">• Terbatasnya sistem jaringan jalan di pulau-pulau terluar/tertinggal
• Pulau-pulau terluar/tertinggal sebagian besar belum didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai
• Kemantapan jalan eksisting di pulau-pulau terluar/tertinggal masih rendah</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="4">• Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas
• Meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah
• Mendukung percepatan pembangunan di daerah</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="4">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="3">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020-2024</td><td>Total Volume</td></tr>
<tr><td>Peningkatan/pembangunan jalan Lingkar/Trans Pulau:
• Simelue
• Nias
• Mentawai
• Enggano
• Natuna
• Sumba</td><td>• Muna
• Buton
• Aru
• Babar
• Buru
• Seram</td><td>• Kei Besar
• Selaru
• Moa
• Wetar
• Morotai
• Biak</td><td>974,36 km</td><td>Rp 12,46 Triliun (APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="4">Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="4">1. Penyiapan proyek dan lahan
2. Rekonstruksi Jalan dan Jembatan
3. Pembangunan Jalan dan Jembatan</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

31. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="8">• Pulau Papua memiliki keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan koridor dari Marauke hingga Sorong, termasuk koridor penghubung ke pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan permukiman di Kabupaten/Kota.
• Jalan Trans Papua dengan panjang total 3.416,02 km (2.345,40 km di Papua dan 1.070,62 km di Papua Barat), masih terdapat ruas jalan yang belum terhubung dan memerlukan penanganan agar dapat berfungsi dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="8">• Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua
• Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="8">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="7">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Pembangunan Jalan</td><td>109,54 km</td><td>109,54 km</td><td>89,54 km</td><td>89,54 km</td><td>89,54 km</td><td>487,68 km</td><td rowspan="2">Rp 15,38 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>• Pembangunan/Penggantian Jembatan</td><td>4.027 m</td><td>4.197 m</td><td>3.647 m</td><td>3.212 m</td><td>3.276 m</td><td>18.361 m</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="8">Kementerian PUPR</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="8">1. Pembangunan Jalan Ruas Waghete - Timika; Oksibil - Seredala; Wamena - Habema - Mumugu; Wamena - Elelim - Jayapura; Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Tiwara - Bofuer; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)
2. Pembangunan/penggantian jembatan ruas Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Wamena - Elelim - Jayapura (Yetti); Wamena - Habema - Mumugu; Kenyam - Dekai; Dekai - Oksibil; Wagete - Timika; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)</td></tr>
</table>

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

32. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Latar Belakang	Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58% termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42%. Selain itu, 9,36% rumah tangga masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58% untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.						
Manfaat	1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman) 2. Menurunkan persentase rumah tangga yang BABS di tempat terbuka menjadi 0% 3. Menurunkan angka stunting akibat akses sanitasi buruk menjadi kurang dari 10%						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 303.028 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 24 unit	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 77 unit	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 101 unit	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 152 unit	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 151 unit	• SPALD-Terpusat Skala Kota: 311.760 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 1,4 juta SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 505 unit di 374 kab/kota	**Rp 140,9 Triliun** • APBN: Rp 73,5 Triliun • APBD: Rp 1,7 Triliun • Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 Triliun
Pelaksana	KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Swasta, Masyarakat						
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem offsite) skala regional, kota, dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK, Masyarakat) 2. Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK) 3. Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda) 4. Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda) 5. Peningkatan perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Kementerian Kesehatan)						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

33. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">1. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61%
2. Defisit air baku 2018 mencapai 181,3 m^3/detik
3. Baru 59,6% PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018).
4. Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga.
2. Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%
3. Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m^3/detik)
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan
5. Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan stunting</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Pembangunan air baku: 4,27 m3/detik</td><td>• Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik</td><td>• Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik</td><td>• Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik</td><td>• Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik</td><td>• Pembangunan air baku: 50 m3/detik</td><td>Rp 123,4 Triliun
APBN : 77,9 Triliun
APBD : 15,6 Triliun
KPBU : 29,9 Triliun</td></tr>
<tr><td>• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): 1.000.000 SR</td><td>• Pembangunan SPAM: 1.500.000 SR</td><td>• Pembangunan SPAM: 2.000.000 SR</td><td>• Pembangunan SPAM: 2.500.000 SR</td><td>• Pembangunan SPAM: 3.000.000 SR</td><td>• Pembangunan SPAM: 10.000.000 Sambungan Rumah di 34 Provinsi</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1.Menyediakan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar sebanyak 0,96 m^3/s.
2.Menyediakan air baku di kawasan prioritas daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebanyak 17,62 m^3/s
3.Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m^3/s.
4.Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m^3/s.
5.Menyediakan air baku di Kawasan pantai utara Jawa sebesar 2,45 m^3/s.
6.Penyediaan air baku di kawasan rawan air sebanyak 16.54 m^3/s.
7.Penurunan tingkat kebocoran hingga 25% (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah, PDAM)
8.Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
9.Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
10.Pembangunan SPAM regional 10.150 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah)
11.Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat (Ditjen CK - Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah)</td></tr>
</table>

34. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">• Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1%
• Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian
• Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan
• Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh
2. Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota)</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>145.978</td><td>160.853</td><td>194.260</td><td>223.560</td><td>275.439</td><td>• 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa
• 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik
• Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur)</td><td>Rp. 397,9 Triliun
APBN: Rp 18 Triliun
APBD: Rp 109,2 Triliun
BUMN: Rp 28 Triliun
SWASTA: Rp 237,5 Triliun
Masyarakat: Rp 5 Triliun</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, & Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN (Kementerian PUPR)
2. Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR (KPBU)
3. Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik oleh Pengembang (Dunia Usaha)
4. Peremajaan Kota (Urban Renewal)
5. Pengembangan Kawasan Berbasis Transit (Transit Oriented Development)</td></tr>
</table>

35. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Latar Belakang	1. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri 2. Jaringan gas kota terbangun saat ini masih cukup rendah (537.000 SR)							
Manfaat	1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 M per tahun dan penghematan pengeluran energi masyarakat sebesar Rp 386 M per tahun (setara 1 juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang							
Durasi	2020-2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	**INDIKASI PENDANAAN**
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN) (Sambungan Rumah/SR)	266.070 SR	100.000 SR	-	-	-	**366.070 SR**	**Rp 38,4 Triliun** APBN: Rp 4,1 Triliun BUMN: Rp 6,9 Triliun KPBU: Rp 27,4 Triliun
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (KPBU) (Sambungan Rumah/SR)		50.000	839.555	800.000	800.000	**2.489.555 SR**	
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (BUMN) (Sambungan Rumah/SR)	50.000	583.930				**633.930 SR**	
Pelaksana	KESDM, dan Badan Usaha							
***Highlight* Proyek**	1. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui APBN (KESDM) 2. Review dokumen FEED-DEDC pembangunanan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (KESDM) 3. Penyediaan dukungan pemerintah (Kemenkeu) 4. Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga (BUMN)							

36. Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis

Latar Belakang	1. Lahan di Indonesia dengan kondisi kritis seluas 24,3 juta hektar 2. Kualitas sungai pada DAS Kritis tercemar sedang-berat 3. Monitoring kualitas air di DAS Kritis masih sangat rendah dan bersifat konvensional 4. Frekuensi bencana banjir di DAS Kritis semakin meningkat						
Manfaat	1. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. 2. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. 3. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. 4. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	**INDIKASI TARGET**						**INDIKASI PENDANAAN**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**	
• Penghijauan lahan kritis	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• 30.000 Ha	• **150.000 Ha**	**Rp 30,9 Triliun (APBN)**
• Jumlah IPAL Industri yang dibangun	• 121 unit	• 121 unit	• 138 unit	• 138 unit	• 48 unit	• **566 unit**	
• Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman	• 28.888 KK	• 96.121 KK	• 96.121 KK	• 144.181 KK	• 144.181 KK	• **509.492 KK**	
• Infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	• 3 unit kolam retensi • 2 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 15 unit check dam	• 10 unit kolam retensi • 20 unit check dam	• 36 unit kolam retensi • 52 unit check dam	
• Panjang normalisasi sungai	• 23,66 km	• 25 km	• 25 km	• 25 km	• 25 km	• **122,66 km**	
Pelaksana	KemenPUPR dan Pemerintah Daerah						
***Highlight* Proyek**	1. Penghijauan Lahan Kritis (KemenLHK) 2. IPAL Industri (KemenLHK) 3. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman (KemenPUPR) 4. Infrastruktur pengendali banjir (KemenPUPR) 5. Normalisasi sungai (KemenPUPR)						

37. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="3">1. Kebutuhan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber gas dengan pengguna baik untuk rumah tangga, transportasi, industri, serta kelistrikan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur;
2. Diperkirakan sumber daya gas bumi di region V Kalimantan akan mengalami surplus dari tahun 2018-2027.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="3">1. Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan);
2. Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan;
3. Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara;
4. Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="2">2020-2024 (5 tahun)</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="2">INDIKASI TARGET</td></tr>
<tr><td>Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (Bontang-Banjarmasin)</td><td rowspan="4">2.219 km</td><td rowspan="4">Rp 36,4 Triliun
(Badan Usaha & APBN)</td></tr>
<tr><td>Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (Banjarmasin-Palangkaraya)</td></tr>
<tr><td>Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (Palangkaraya-Pontianak)</td></tr>
<tr><td>Ruas Pipa Transmisi Natuna-Kalbar (Natuna D Alpha-Pontianak)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="3">KESDM, Badan Usaha, Skema Pembiayaan: Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highligt Proyek</td><td colspan="3">1. Alokasi gas, penetapan, dan pengawasan jaringan pipa (KESDM);
2. Pembangunan pipa transmisi (Badan Usaha)</td></tr>
</table>

38. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">1. Peningkatan timbulan limbah B3 di Indonesia menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, namun ketersediaan fasilitas pengolahannya masih sangat terbatas sehingga biaya pengolahan menjadi tinggi, terutama dari segi komponen transportasi
2. Jumlah dan sebaran fasilitas pengolahan limbah B3 medis masih terbatas (kebutuhan minimal 34 unit atau 1 unit di setiap provinsi) sedangkan pengolahan limbah B3 secara terpadu belum tersedia (kebutuhan minimal 1 unit di tiap 4 pulau utama: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa)</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 medis yang terolah hingga mencapai 26.880 ton/tahun</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 4.200 ton/tahun</td><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 9.240 ton/tahun</td><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 15.120 ton/tahun</td><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 21.000 ton/tahun</td><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun</td><td>Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun</td><td>Rp 4,6 Triliun
APBN: Rp 0,6 Triliun
KPBU : Rp 3,0 Triliun
Swasta : Rp 1,0 Triliun</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Kalimantan (KPBU – koordinasi KLHK)
2. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua/Sumapapua (KPBU – koordinasi KLHK)
3. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Jawa Timur (Swasta – koordinasi KLHK)
4. Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 terintegrasi yang berasal dari berbagai sumber fasilitas pelayanan kesehatan (KLHK)</td></tr>
</table>

39. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">1. Ancaman bencana semakin masif, kompleks, dan tidak dapat diprediksi seiring dengan perubahan lingkungan; terutama ancaman bencana hidrometeorologi-(akibat perubahan iklim dan cuaca), bencana geologi (akibat aktivitas tektonik dan vulkanik); serta bencana lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara).
2. Kelengkapan peralatan serta akurasi dan kecepatan dari sistem peringatan dini yang tersedia belum cukup memadai untuk mengantisipasi tingginya frekuensi dan banyaknya jenis ancaman bencana di Indonesia, selain itu belum terbentuk sistem peringatan dini yang terintegrasi dan efisien.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="7">Meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit, sehingga dapat mengurangi kerusakan dan/atau kerugian akibat bencana.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 5,0 menit</td><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,5 menit</td><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,0 menit</td><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,5 menit</td><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit</td><td>• Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit</td><td>Rp 13,0 Triliun (APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">BMKG, BNPB, KLHK, BIG, Kemen ESDM, LAPAN, LIPI, BPPT</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Informasi gempabumi dan tsunami dengan pemasangan seismograf (BMKG)
2. Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (BMKG)
3. Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (KLHK)
4. Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi (Kemen ESDM)
5. Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun (BIG)
6. Sistem Peringatan Dini Bencana (BNPB)</td></tr>
</table>

40. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="7">1. Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
2. Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
3. BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
4. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
5. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="3">1. Menurunnya insiden serangan siber;
2. Meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;</td><td colspan="4">3. Meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat;
4. Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="7">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="6">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>Total</td></tr>
<tr><td></td><td>• Penguatan NSOC BSSN
• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 800 orang
• Pembentukan dan penguatan CSIRT 15 KLD</td><td>• Penguatan NSOC BSSN
• Penguatan SOC Tahap I
• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang
• Pembentukan dan penguatan CSIRT 25 KLD</td><td>• Penguatan NSOC BSSN
• Penguatan SOC Tahap II
• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang
• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD</td><td>• Penguatan NSOC BSSN
• Penguatan SOC Tahap III
• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang
• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD</td><td>• Penguatan NSOC BSSN
• Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber700 orang
• Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD</td><td>• Kapasitas SDM Kamsiber 3600 orang
• Penguatan SOC di 5 KL 100%
• Pembentukan CSIRT 121 KLD 100%</td><td>Rp 8,0 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>Pelaksana</td><td colspan="7">Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Nasional R.I; Kementerian Pertahanan/TNI; Badan Intelijen Negara; Kejaksaan Agung.</td></tr>
<tr><td>Highlight Proyek</td><td colspan="7">1. Peningkatan Kapasitas SDM CSSA (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan)
2. Perluasan cakupan NSOC (BSSN)
3. Pembangunan SOC (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan)
4. Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah (BSSN)</td></tr>
</table>

41. Penguatan Keamanan Laut di Natuna (1/2)

<table>
<tr><td>Latar Belakang</td><td colspan="6">1. Adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna;
2. Masih adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), trans-national crimes serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi.</td></tr>
<tr><td>Manfaat</td><td colspan="6">1. Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna;
2. Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, trans-national crimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.</td></tr>
<tr><td>Durasi</td><td colspan="6">2020-2024 (5 tahun)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Indikasi Target dan Pendanaan</td><td colspan="5">INDIKASI TARGET</td><td rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 40%</td><td>Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 55%</td><td>Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 70%</td><td>Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 85%</td><td>Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 100%</td><td rowspan="2">Rp 12,2 Triliun
(APBN)</td></tr>
<tr><td>Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 40%</td><td>Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 47%</td><td>Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 60%</td><td>Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 80%</td><td>Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 100%</td></tr>
</table>

41. Penguatan Keamanan Laut di Natuna (2/2)

Pelaksana	1. Kementerian Pertahanan/TNI 2. Bakamla
***Highlight* Proyek**	1. Pengadaan Alutsista TNI AL 2. Pembangunan Sarpras Pertahanan dan Dukungannya 3. Sistem Peringatan Dini Kamla 4. Pengadaan Alpalkamla 5. Pembangunan Sarpras Kamla

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	**Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)**	**13,4**	**14,5**	**15,7**	**17,9**	**19,5**	**177.775,2**			
	Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	**68,0**	**68,0**	**68,8**	**69,2**	**70,3**				
KP : Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	**Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)**	**686,5**	**1.001,1**	**1.921,8**	**1.778,2**	**3.662,7**	**165.677,1**			
ProP : Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan							**165.677,1**			
PLTA	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*165,2*	*440,3*	*955,9*	*397,0*	*1.951,4*	*74.996,7*	*Tersebar*		*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Panas Bumi (PLTP)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*140,0*	*80,0*	*132,0*	*300,0*	*375,0*	*42.270,0*	*Tersebar*		*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Bioenergi	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*246,7*	*152,0*	*484,8*	*159,0*	*252,6*	*24.656,0*	*Tersebar*		*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Surya (PLTS)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*134,6*	*328,8*	*339,1*	*643,2*	*643,7*	*17.931,6*	*Tersebar*		*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Bayu (PLTB)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*-*	*-*	*10,0*	*279,0*	*440,0*	*5.797,9*	*Tersebar*		*KESDM, BUMN, Swasta*

A.1.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan PLTN Komersial (Tambahan Baru)	*PLTN Komersial yang Dibangun*	*Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan*	*Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia*	*Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN*	*Melakukan analisis multikriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder.*	*Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.*	*25,0*	*Pusat*		*KESDM*
KP : Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	**Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter)**	**10,0**	**10,2**	**14,2**	**14,6**	**17,4**	**11.969,0**			
ProP : Akselerasi Pengembangan BBN							**11.969,0**			
Kilang BBN	*Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju (Tahapan)*	*Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)*	*Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)*	*EPC*	*EPC*	*Mid 2024 Start Up dan On Stream*	*11.900,0*	*Pusat*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Pertamina*

A.1.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan (Demetalized Palm Oil Mill) (mill)	*Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan (Demetalized Palm Oil Mill) (mill)*	*1.520,0*	*1.520,0*	*1.520,0*	*1.520,0*	*1.520,0*	*19,0*	*Sentra Sawit*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Swasta*
Pengembangan Teknologi FCC untuk Pembuatan Green Gasoline Berbasis CPO 100%	*Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial (Unit)*	*-*	*1 (Penyempurnaan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur))*	*1 (Simulasi menggunakan bahan baku Olein (Co-Product CPO))*	*1 (Simulasi menggunakan bahan baku RBDPO (refine, bleached, deodorized, palm oil) (Main Product CPO))*	*1 (FS dan DED skala komersial dan simulasi konversi minyak nabati menjadi green gasoline)*	*50,0*	*Pusat*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Kemen ESDM*
KP : Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	**Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)**	**139,5**	**138,0**	**136,6**	**135,2**	**133,8**	**2,1**			
	penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,8**	**0,8**				
ProP : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi							**2,1**			
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	*Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (Peralatan)*	*3,0*	*2,0*	*1,0*	*-*	*-*	*2,1*	*34 Provinsi*		*Kemen ESDM*
KP : Peningkatan pemenuhan energi domestik	**Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)**	**155,0**	**168,0**	**177,0**	**184,0**	**187,0**	**37,5**			
	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)	**64,0**	**65,0**	**66,0**	**67,0**	**68,0**				
ProP : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Energi							**37,5**			
DMO Batubara	*DMO Batubara (Juta Ton)*	*155,0*	*168,0*	*177,0*	*184,0*	*187,0*	*5,0*	*Pusat*		*KESDM, Kemen PUPR*
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	*Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)*	*64,0*	*65,0*	*66,0*	*67,0*	*68,0*	*15,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Produksi Gas Bumi	*Produksi Gas Bumi (Ribu BOPD)*	*1.191,0*	*1.234,0*	*1.241,0*	*1.199,0*	*1.163,0*	*17,0*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen ESDM*
KP : Pengembangan industri pendukung EBT	**TKDN sektor pembangkit EBT (Persen)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,5**			
ProP : Pengembangan Industri EBT							**89,5**			
TKDN Pembangkit PLT Bayu	*TKDN Pembangkit PLT Bayu (Persen)*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
TKDN Pembangkit PLT Surya	*TKDN Pembangkit PLT Surya (Persen)*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
TKDN Pembangkit PLT Air	*TKDN Pembangkit PLT Air (Persen)*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	*TKDN Pembangkit PLT Bioenergi (Persen)*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	*TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi (Persen)*	*30,0*	*30,0*	*33,0*	*33,0*	*35,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Proyek Bangunan dan Fasilitas Pabrik Solar Module							*57,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*PT. LEN*
PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	**Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)**	**4,0**	**4,4**	**4,7**	**5,1**	**5,4**	**283.664,7**			
KP : Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	**Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (Juta ha)**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**6.220,7**			
ProP : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	**Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (Ekoregion)**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**1.996,4**			
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (Juta ha)*	*65,0*	*65,0*	*65,0*	*65,0*	*65,0*	*73,3*	*Pusat*		*KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa*
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif (Provinsi)*	*7,0*	*10*	*8*	*6*	*3*	*91,6*	*Pusat*		*KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa*
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	*Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta ha)*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*1.831,5*	*Pusat*		*KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa*
ProP : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	**Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi**	**500**	**1.500,0**	**2.500,0**	**3.500,0**	**4.500,0**	**4.224,3**			
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	*Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)*	*552,0*	*552,0*	*552,0*	*552,0*	*552,0*	*122,1*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	*Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)*	*500*	*1.500,0*	*2.500,0*	*3.500,0*	*4.500,0*	*2.747,3*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	*Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KEE)*	*11*	*22*	*33*	*44*	*55*	*54,9*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	*Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (Juta Ha)*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1.000,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	*Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)*	*1*	*1,6*	*1*	*-*	*-*	*300,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
KP : Pengelolaan hutan berkelanjutan	**Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)**	**33,9**	**34.1**	**34,3**	**34,5**	**34,7**	**1.288,4**			
ProP : Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	**Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan (juta m3)**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**197,8**			
Produksi HHBK	*Jumlah Produksi HHBK (Ton)*	*353.000,0*	*378.000,0*	*403.000,0*	*428.000,0*	*453.000,0*	*107,8*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon)	*Jumlah unit pemanfaatan (Unit)*	*20,0*	*20*	*20*	*20*	*20*	*10,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	*Jumlah pilot IPTEK yang dimanfaatkan oleh satuan kerja terkait (Unit)*	*-*	*10*	*10*	*10*	*10*	*80,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	**Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya (KPH)**	**20**	**40**	**60**	**80**	**110**	**1.090,7**			
KPH yang masuk kategori Maju	*Jumlah KPH yang masuk kategori Maju (Unit)*	*20*	*40*	*60*	*80*	*110*	*180,0*	*Pusat*		*KLHK, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag*
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	*Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)*	*4*	*8,5*	*9*	*9*	*3*	*830,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak	*Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang kompeten (Orang)*	*2310*	*3210*	*3210*	*3210*	*3210*	*80,7*	*Pusat*		*Kemen LHK*
KP : Penyediaan air untuk pertanian							**101.185,4**			
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	**Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare) (Hektare)**	**45.000,0**	**113.750,0**	**113.750,0**	**113.750,0**	**113.750,0**	**99.833,1**			
	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)	**874.469,8**	**281.382,5**	**281.382,5**	**281.382,5**	**281.382,5**				
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Hektare) (Hektare)*	*15.000,0*	*79.625,0*	*79.625,0*	*79.625,0*	*79.625,0*	*50.925,0*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah	*Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (Hektare) (Hektare)*	*30.000,0*	*34.125,0*	*34.125,0*	*34.125,0*	*34.125,0*	*11.655,0*	*Tersebar*		*Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)*
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)*	*80.000,0*	*115.403,3*	*115.403,3*	*115.403,3*	*115.403,3*	*14.820,3*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*

A.1.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah	*Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)*	*783.082,0*	*143.826,2*	*143.826,2*	*143.826,2*	*143.826,2*	*20.375,8*	*Tersebar*		*Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)*
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	*Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)*	*11.387,8*	*22.153,0*	*22.153,0*	*22.153,0*	*22.153,0*	*2.056,9*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	**Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare) (Hektare)**	**229,2**	**2.192,7**	**2.392,7**	**2.592,7**	**2.592,7**	**1.352,3**			
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (Unit)*	*-*	*1,0*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*24,0*	*Tersebar*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (Unit)*	*-*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*32,0*	*Tersebar*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (Unit)*	*-*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*44,0*	*Tersebar*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	*Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektare) (Hektare)*	*229,2*	*1.192,7*	*1.192,7*	*1.192,7*	*1.192,7*	*1.252,3*	*Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan* *Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*Kemen PU&PERA*
KP : Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	**Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik)**	**4,3**	**11,3**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**16.838,5**			
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	**Tambahan penyediaan air baku (m3/detik) (m3/detik)**	**4,3**	**11,3**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**16.838,5**			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	*Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik) (m3/detik)*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*0,3*	*0,2*	*360,2*	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulaewsi Utara, Riau, Kepulauan Riau*		*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	*Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik) (m3/detik)*	*0,5*	*4,2*	*4,1*	*5,1*	*3,7*	*5.783,8*	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat*		*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	*Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik) (m3/detik)*	*1,1*	*2,0*	*2,3*	*2,3*	*2,1*	*3.320,8*	*Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara*		*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu (m3/detik) (m3/detik)*	-	*0,2*	*0,3*	-	-	*232,7*	*KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis DPP Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Morotai (m3/detik) (m3/detik)*	-	*0,1*	*0,2*	-	*0,0*	*134,4*	*DPP Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis lainnya (m3/detik) (m3/detik)*	*-*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,7*	*535,2*	*KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, DPP Padang-Bukittinggi, KI Kemingking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, KI Madura, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, DPP Raja Ampat, KI/KEK Sorong, KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru*		*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	*Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik) (m3/detik)*	*-*	*2,0*	*0,5*	*-*	*-*	*796,8*	*Kabupaten Cirebon, Pekalongan*		*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	*Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik) (m3/detik)*	*2,4*	*2,5*	*3,8*	*3,1*	*4,7*	*5.674,6*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	**Peningkatan tutupan hutan (Hektar)**	**375.000,0**	**385.000,0**	**425.000,0**	**450.000,0**	**475.000,0**	**7.224,7**			
ProP : Rehabilitasi hutan dan lahan	**Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional (Hektar)**	**375.000,0**	**385.000,0**	**425.000,0**	**450.000,0**	**475.000,0**	**7.097,7**			
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	*Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Hektar)*	*56.000,0*	*40.000,0*	*30.000,0*	*25.000,0*	*20.000,0*	*6.540,5*	*Pusat dan Daerah*		*KLHK, Pemerintah Daerah*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	*Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (Unit)*	*3.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*502,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemen LHK*
Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi	*Luas penanaman di hutan produksi (Hektar)*	*310.000,0*	*330.000,0*	*370.000,0*	*400.000,0*	*400.000,0*	*55,2*	*Pusat*		*Kemen LHK*
ProP : Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	**Indeks kualitas danau**						**127,0**			
Pengendalian Kerusakan Danau	*Jumlah danau yang dilakukan pengendalian kerusakannya (Danau)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*100,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Tampungan alami yang direvitalisasi	*Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (kumulatif) (Unit)*	*8,0*	*8,0*	*10,0*	*10,0*	*15,0*	*7,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemen PU&PERA*
Pengembangan perikanan tangkap darat (KemenKP)	*Jumlah usaha perikanan di luar danau (Unit)*	*45,0*	*90,0*	*90,0*	*90,0*	*90,0*	*0,0*	*Pusat*		*KKP*
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DAS pada wilayah sungai	*Jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS)*	*3,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*19,5*	*Pusat*		*Kemen ATR/BPN*
Fasilitasi Budidaya Pertanian berkaidah konservasi/ramah lingkungan (Kementan)	*Jumlah danau yang terfasilitasi pertanian ramah lingkungan (Danau)*	*15,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*0,0*	*Pusat*		*Kementan*
KP : Pengembangan waduk multiguna	**Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) (m3)**	**14,3**	**15,2**	**15,8**	**16,3**	**16,8**	**150.907,0**			
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	**Jumlah pembangunan bendungan multiguna (Unit)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,0**	**139.001,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan baru yang selesai dibangun	*Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (Unit)*	*45 lanjutan* *11 selesai*	*34 lanjutan* *11 selesai*	*23 lanjutan* *12 selesai*	*11 lanjutan* *7 selesai*	*4 selesai*	*42.415,1*	*Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadihadji, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna,*		*Kemen PU&PERA*
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (Unit)*	-	*4 baru*	*3 baru* *4 lanjutan*	*2 baru* *7 lanjutan*	*2 baru* *9 lanjutan*	*12.401,4*	*Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson*		*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (Unit)*	-	-	-	-	*6,0*	*24.000,0*	*Bendungan Merangin, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan*		*KPBU*
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (Unit)*	-	-	-	-	*2,0*	*60.000,0*	*Bendungan Kayan, Bendungan Mentarang*		*BUMN dan/atau Swasta*
Bendungan yang direhabilitasi	*Jumlah bendungan yang sedang direhabilitasi /ditingkatkan (Unit)*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	-	*185,0*	*Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami*		*Kemen PU&PERA*
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	**Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (Kumulatif) (Unit)**	**14,0**	**17,0**	**28,0**	**40,0**	**50,0**	**11.905,5**			
Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA	*Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW) (MW)*	*112,7*	*1,7*	*27,4*	*33,9*	*11,9*	*5.250,8*	*Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme,*		*BUMN dan/atau Swasta*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	*Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik) (m3/detik)*	*6,2*	*0,9*	*10,0*	*5,6*	*0,9*	*883,7*	*Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak,*		*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi	*Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha) (Hektare)*	*105.461,0*	*14.697,0*	*116.375,0*	*53.959,0*	*52.057,0*	*5.771,0*	*Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh,*		*Kemen PU&PERA*
PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	**Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))**	**90,4**	**91,6**	**92,8**	**94,0**	**95,2**	**235.053,8**			
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	**2.100,0**	**2.100,0**	**2.100,0**	**2.100,0**	**2.100,0**				
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**				
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	**6,2**	**5,8**	**5,5**	**5,2**	**5,0**				
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	**5,2**	**4,8**	**4,5**	**4,2**	**4,0**				

A.1.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	**Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/tahun)**	**58,3**	**58,9**	**59,5**	**60,2**	**60,9**	**4.319,3**			
	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	**13,5**	**13,8**	**14,1**	**14,4**	**14,7**				
	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	**260,2**	**273,2**	**286,9**	**301,3**	**316,3**				
	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	**10,7**	**10,7**	**10,8**	**10,9**	**11,0**				
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	**10-20%**	**40,0**	**60,0**	**80,0**	**100,0**				
	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	**85-95**	**85-95**	**85-95**	**85-95**	**85-95**				
	Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	**10.000,0**	**50.000,0**	**100.000,0**	**150.000,0**	**20.000,0**				
	Persentase pangsa pangan organik (Persentase)**	**5,0**	**8,0**	**10,0**	**15,0**	**20,0**				
ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan							**2.219,4**			
Kawasan Ubi Kayu	*Jumlah Kawasan Ubi Kayu (hektar)*	*20.000,0*	*20.700,0*	*21.425,0*	*22.174,0*	*22.950,0*	*136,8*	*18 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Ubi Jalar	*Jumlah Kawasan Ubi Jalar (hektar)*	*2.500,0*	*2.588,0*	*2.678,0*	*2.772,0*	*2.869,0*	*89,2*	*4 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Kacang Tanah	*Jumlah Kawasan Kacang Tanah (Ha)*	*30.000,0*	*31.050,0*	*32.137,0*	*33.262,0*	*34.426,0*	*645,2*	*24 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Kacang Hijau	*Jumlah Kawasan Kacang Hijau (Ha)*	*20.000,0*	*20.700,0*	*21.425,0*	*22.174,0*	*22.950,0*	*118,3*	*16 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	*Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya (Ha)*	*500,0*	*518,0*	*536,0*	*554,0*	*573,0*	*5,9*	*Jawa Barat, Banten*		*Kementan*
Benih sumber aneka umbi	*Jumlah Benih sumber aneka umbi (stek)*	*170.000,0*	*170.000,0*	*170.000,0*	*170.000,0*	*170.000,0*	*2,2*	*4 Provinsi*		*Kementan*
Benih sumber aneka kacang dan serea lain	*Jumlah benih sumber aneka kacang dan serea lain (kg)*	*65.000,0*	*65.000,0*	*65.000,0*	*65.000,0*	*65.000,0*	*5,0*	*17 Provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*30,4*	*Pusat*		*Kementan*
Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM	*Teroptimalkanya pangan lokal (Lokasi)*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*122,1*	*34 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pekarangan Pangan Lestari	*Terbinanya kelompok pemanfaatan pekarangan (Lokasi)*	*2.231,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.500,0*	*2.500,0*	*667,6*	*34 provinsi*		*Kementan*
Pekarangan Pangan Lestari Stunting	*Terlaksananya intervensi stunting (Lokasi)*	*1.369,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*500,0*	*500,0*	*396,7*	*260 Kab/Kota*		*Kementan*
ProP : Peningkatan Keamanan Pangan							**1.374,2**			
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	*Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar (Lokasi)*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*140,4*	*Pusat, 34 provinsi*		*Kementan*
Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	*Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan (Unit Usaha)*	*135,0*	*160,0*	*175,0*	*200,0*	*220,0*	*36,6*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Pengawasan mutu dan keamanan produk	*Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (Sampel)*	*29.800,0*	*40.000,0*	*40.000,0*	*40.000,0*	*40.000,0*	*115,4*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan	*Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Jumlah)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*24,4*	*Pusat*		*Kementan*
Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	*Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional (Kebijakan)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*18,9*	*Pusat*		*Kementan*
Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	*Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan (Kebijakan)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*13,4*	*Pusat*		*Kementan*
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	*Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Kebijakan)*	*41,0*	*41,0*	*41,0*	*41,0*	*41,0*	*56,8*	*Pusat*		*Kementan*
Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	*Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Kebijakan)*	*43,0*	*43,0*	*43,0*	*43,0*	*43,0*	*66,5*	*Pusat*		*Kementan*
Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	*Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Dokumen)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*9,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	*Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Dokumen)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*32,4*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Pengawasan dan Penindakan	*Pengawasan dan Penindakan (kasus)*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*54,9*	*33 Privinsi*		*Kementan*
Prasarana infrastruktur PLBN	*Prasarana infrastruktur PLBN (m2)*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*58,0*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Sarana PLBN	*Sarana PLBN (unit)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*34,2*	*4 Provinsi*		*Kementan*
Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	*Prasarana wilker sentra produksi, distribusi, dan importasi/pengembangan sapi/lainnya (M2)*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*52,5*	*3 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	*Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (laporan)*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*589,1*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	*Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Diseminasi)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*70,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	*Jumlah kab/kota fokus penurunan stunting (Kab/Kota)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*0,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan							**725,7**			
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	*Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (hektar)*	*10.000,0*	*50.000,0*	*100.000,0*	*150.000,0*	*200.000,0*	*707,4*	*Sentra padi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	*Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan (varietas)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*18,3*	*1 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
KP : Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	**Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)**	**60,0**	**65,0**	**70,0**	**75,0**	**80,0**	**191.890,3**			
	Ketersediaan Beras (Juta ton)	**39,2**	**42,7**	**44,0**	**45,4**	**46,8**				
	Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,8**	**2,9**				
	Produksi jagung (Juta ton)	**30,9**	**31,9**	**33,0**	**34,1**	**35,3**				
	Produksi daging (Juta ton)	**4,0**	**4,2**	**4,4**	**4,6**	**4,6**				
	Produksi umbi-umbian (Juta ton)	**24,3**	**24,6**	**24,9**	**25,2**	**25,5**				
ProP : Peningkatan Produksi Padi							**167.850,5**			
Kawasan Padi	*Jumlah Kawasan Padi (hektar)*	*791.000,0*	*791.000,0*	*791.000,0*	*791.000,0*	*791.000,0*	*6.766,1*	*Pusat, 32 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	*Jumlah areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat (hektar)*	*2.120.000,0*	*2.120.000,0*	*2.120.000,0*	*2.120.000,0*	*2.120.000,0*	*3.000,4*	*Pusat, 33 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih Sumber Padi	*Jumlah benih Sumber Padi (kg)*	*1.044.000,0*	*1.044.000,0*	*1.044.000,0*	*1.044.000,0*	*1.044.000,0*	*60,2*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Produsen Benih Padi	*Terlaksananya pemberdayaan produsen benih padi (unit)*	*5.560,0*	*5.560,0*	*5.560,0*	*5.560,0*	*5.560,0*	*70,2*	*Pusat, 4 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Areal sertifikat benih	*Jumlah areal sertifikat benih (hektar)*	*124.500,0*	*124.500,0*	*124.500,0*	*124.500,0*	*124.500,0*	*221,6*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*9,4*	*Pusat*		*Kementan*
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	*Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT (hektar)*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*1.353,8*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	*Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman (Sertifikat/LHP)*	*2.450,0*	*2.450,0*	*2.485,0*	*2.485,0*	*2.485,0*	*50,2*	*Pusat*		*Kementan*
Penerapan Penanganan DPI	*Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI (hektar)*	*550,0*	*560,0*	*570,0*	*580,0*	*590,0*	*17,8*	*22 Provinsi*		*Kementan*
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	*Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI (Lokasi)*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*303,9*	*Pusat*		*Kementan*
Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	*Jumlah areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT (hektar)*	*44.180,0*	*50.000,0*	*51.000,0*	*52.000,0*	*53.000,0*	*370,0*	*Pusat, 32 provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*36,5*	*Pusat*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*979,7*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	*Terlaksananya Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih (Metode)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*23,2*	*Pusat*		*Kementan*
Model Percontohan Pertanian Modern	*Jumlah Model Percontohan Pertanian Modern (Model)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*82,9*	*Jawa Barat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Model Peramalan OPT	*Jumlah Model Peramalan OPT (Model)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*24,3*	*Jawa Barat*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*6,6*	*Pusat*		*Kementan*
Galur Harapan Unggul Tanaman	*Galur Harapan Unggul Tanaman (Galur)*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*25,6*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	*Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG (Teknologi)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*9,2*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	*Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Teknologi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*18,9*	*1 provinsi*		*Kementan*
Benih Padi	*Benih Padi (ton)*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*49,6*	*32 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Teknologi Mektan	*Diseminasi Teknologi Mektan (Teknologi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*17,1*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Varietas Unggul Padi	*Varietas Unggul Padi (varietas)*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*15,3*	*1 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi produksi padi	*Teknologi produksi padi (Teknologi)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*22,0*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Mekanisasi Pertanian	*Teknologi Mekanisasi Pertanian (Teknologi)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*36,0*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	*Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan (Teknologi)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*62,3*			*Kementan*
Benih Padi	*Jumlah Benih Padi yang Diproduksi (Ton)*	*185,0*	*190,0*	*195,0*	*200,0*	*205,0*	*17,7*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Subsidi/Bantuan pupuk	*Subsidi/Bantuan pupuk*						*142.500,0*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Non KL*
Aplikasi teknologi pengolahan beras metode Buhler							*11.700,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
ProP : Peningkatan Produksi Jagung		**105,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**7.939,6**			
Kawasan jagung	*Jumlah kawasan jagung (hektar)*	*50.000,0*	*50.000,0*	*50.000,0*	*50.000,0*	*50.000,0*	*476,9*	*27 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Serealia Lainnya	*Jumlah Kawasan Serealia Lainnya (hektar)*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*29,8*	*20 Provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*49,7*	*33 Provinsi*		*Kementan*
Area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	*Jumlah area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat (hektar)*	*2.150.000,0*	*2.150.000,0*	*2.150.000,0*	*2.150.000,0*	*2.150.000,0*	*7.260,7*	*Pusat, 31 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih Sumber Jagung	*Jumlah Benih Sumber Jagung (kg)*	*71.000,0*	*71.000,0*	*71.000,0*	*71.000,0*	*71.000,0*	*6,1*	*16 Provinsi*		*Kementan*
Produsen Benih Jagung	*Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Jagung (hektar)*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*59,7*	*Pusat*		*Kementan*
Benih Jagung	*Benih Jagung (Ton)*	*158,0*	*158,0*	*158,0*	*158,0*	*158,0*	*22,6*	*10 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Budidaya Jagung	*Teknologi Budidaya Jagung (Teknologi)*	*3,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*9,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Varietas Unggul Jagung	*Varietas Unggul Jagung (Varietas)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*16,5*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Benih Jagung	*Jumlah Benih Jagung yang Diproduksi (Ton)*	*32,0*	*111,0*	*111,0*	*111,0*	*111,0*	*7,9*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Pro P : Peningkatan Produksi Kedelai							**3.306,7**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Kedelai	*Jumlah Kawasan Kedelai (Ha)*	*500.000,0*	*517.500,0*	*535.613,0*	*554.359,0*	*573.267,0*	*3.053,3*	*26 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Produsen Benih Kedelai	*Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai (Unit)*	*1.050,0*	*1.050,0*	*1.050,0*	*1.050,0*	*1.050,0*	*32,6*	*Pusat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara*		*Kementan*
Benih Sumber Kedelai	*Jumlah Benih Sumber Kedelai (kg)*	*192.600,0*	*192.600,0*	*192.600,0*	*192.600,0*	*192.600,0*	*14,4*	*25 Provinsi*		*Kementan*
Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	*Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya (ton)*	*150.000,0*	*150.000,0*	*150.000,0*	*150.000,0*	*150.000,0*	*95,0*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*26,5*	*Pusat*		*Kementan*
Benih Kedelai	*Benih Kedelai (Ton)*	*656,0*	*656,0*	*656,0*	*656,0*	*656,0*	*84,9*	*13 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Peningkatan Produksi Daging							**6.744,2**			
Hijauan Pakan Ternak	*Penanaman dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ha)*	*2.341,0*	*2.341,0*	*2.341,0*	*2.341,0*	*2.341,0*	*247,9*	*25 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pakan Olahan dan Bahan Pakan	*Produksi bahan pakan/pakan (ton)*	*8.000,0*	*8.500,0*	*9.000,0*	*9.500,0*	*10.000,0*	*271,1*	*9 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Mutu dan Keamanan Pakan	*Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan (Sampel)*	*5.000,0*	*6.000,0*	*7.000,0*	*8.000,0*	*9.000,0*	*65,9*	*24 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	*Surveilans Penyakit Hewan (sampel)*	*190.000,0*	*325.296,0*	*325.296,0*	*325.296,0*	*325.296,0*	*398,0*	*Pusat, 9 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	*Pencegahan dan Pengamanan PHMS (Dosis)*	*5.167.450,0*	*5.167.450,0*	*5.167.450,0*	*5.167.450,0*	*5.167.450,0*	*591,2*	*Pusat, 33 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	*Surveilans Obat Hewan (Sampel)*	*1.610,0*	*1.610,0*	*1.610,0*	*1.610,0*	*1.610,0*	*43,3*	*1 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Obat Hewan dan Bahan Biologik	*Penyedian vaksin dan bahan biologik (Dosis)*	*6.030.325,0*	*5.471.100,0*	*5.471.100,0*	*5.471.100,0*	*5.471.100,0*	*125,8*	*Pusat, 1 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kelembagaan Veteriner	*Penguatan Kelembagaan Veteriner (Unit)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*209,3*	*Pusat, 9 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Optimalisasi Reproduksi	*Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan Sinkronisasi (akseptor)*	*5.000.000,0*	*5.000.000,0*	*5.000.000,0*	*5.000.000,0*	*5.000.000,0*	*2.604,5*	*Pusat, 34 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih Ternak Unggul	*Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak (dosis)*	*5.450.945,0*	*5.450.945,0*	*5.450.945,0*	*5.450.945,0*	*5.450.945,0*	*242,0*	*2 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Bibit Ternak Unggul	*Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babi, Ayam dan Itik) (ekor)*	*956.054,0*	*956.054,0*	*956.054,0*	*956.054,0*	*956.054,0*	*359,0*	*Pusat, 8 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengembangan ternak ruminansia potong	*Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/ Domba) (ekor)*	*16.500,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*873,8*	*Pusat, 8 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengembangan ternak ruminansia perah	*Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah) (ekor)*	*400,0*	*500,0*	*500,0*	*700,0*	*700,0*	*44,8*	*Pusat, 13 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengendalian Pemotongan Betina produktif	*Penurunan Pemotongan Betina Produktif (RPH)*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*39,1*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengembangan unggas dan aneka ternak	*Pengembangan unggas dan aneka ternak (ekor)*	*501.000,0*	*501.000,0*	*501.000,0*	*501.000,0*	*501.000,0*	*303,9*	*Pusat, 1 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	*Terlaksananya fasilitasi sarana prasarana penjaminan keamanan produk hewan (Unit)*	*6,0*	*10,0*	*16,0*	*20,0*	*25,0*	*6,7*	*3 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan	*Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan (unit)*	*17,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*26,7*	*13 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pemasaran Peternakan	*Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Peternakan (unit)*	*6,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*14,1*	*6 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	*Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan (Lokasi)*	*112,0*	*115,0*	*117,0*	*120,0*	*120,0*	*87,3*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	*Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak (galur)*	*21,0*	*21,0*	*21,0*	*21,0*	*21,0*	*34,8*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi peternakan dan veteriner	*Teknologi peternakan dan veteriner (Teknologi)*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*57,4*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	*Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis) (ekor)*	*82.990,0*	*82.990,0*	*82.990,0*	*82.990,0*	*82.990,0*	*3,7*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Bibit sumber ternak	*Bibit Sumber Ternak (ekor)*	*45.250,0*	*45.250,0*	*45.250,0*	*45.250,0*	*45.250,0*	*55,6*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi teknologi	*Diseminasi dan penyiapan teknologi peternakan dan veteriner untuk dimanfaatkan pengguna (Kegiatan)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*38,5*	*3 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Peningkatan Produksi Cabai							**515,9**			
Kawasan Aneka Cabai	*Luas Kawasan Aneka Cabai (hektar)*	*13.328,0*	*13.328,0*	*13.328,0*	*13.328,0*	*13.328,0*	*489,6*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih bawang dan cabai	*Jumlah Produksi Benih Bawang dan Cabai (Kg)*	*39.744,0*	*39.744,0*	*39.744,0*	*39.744,0*	*39.744,0*	*26,3*	*20 Provinsi*		*Kementan*
Benih Cabai	*Jumlah produksi benih cabai (Kg)*	*100,0*	*110,0*	*120,0*	*130,0*	*140,0*	*0,0*	*1 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Peningkatan Produksi Bawang Merah							**955,4**			
Kawasan Bawang Merah	*Kawasan Bawang Merah (hektar)*	*5.704,0*	*5.704,0*	*5.704,0*	*5.704,0*	*5.704,0*	*925,5*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih Bawang merah	*Jumlah Benih Sumber dan Sebar Bawang Merah*	*34.400,0*	*35.890,0*	*37.380,0*	*38.870,0*	*40.360,0*	*0,0*	*1 Provinsi*		*Kementan*
VUB Bawang Merah dan Cabai	*Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai (VUB)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*6,1*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Benih bawang dan cabai	*Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai (Kg)*	*34.500,0*	*36.000,0*	*37.500,0*	*39.000,0*	*40.500,0*	*18,3*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Produksi Bawang Merah dan Cabai	*Jumlah Teknologi Budidaya Bawang Merah dan Cabai (Teknologi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*5,5*	*1 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Mutu Hasil Pangan							**4.577,9**			
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Tersalurnya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Unit)*	*6.191,0*	*7.245,0*	*8.245,0*	*9.344,0*	*10.454,0*	*4.300,1*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	*Jumlah Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Sertifikat/Register)*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*14,9*	*24 Provinsi*		*Kementan*
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	*Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Unit)*	*168,0*	*168,0*	*168,0*	*168,0*	*168,0*	*98,4*	*23 Provinsi*		*Kementan*
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Lokasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*16,6*	*Pusat*		*Kementan*
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	*Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Lokasi)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*85,1*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Teknologi Pertanian	*Jumlah Teknologi Pertanian Yang Dihasilkan (Teknologi)*	*17,0*	*18,0*	*19,0*	*20,0*	*21,0*	*39,7*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Teknologi Pertanian	*Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Teknologi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*23,2*	*1 Provinsi*		*Kementan*
KP : Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	**Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) (%)**	**65 - 80**	**70-80**	**75-80**	**80-90**	**80-95**	**22.396,3**			
	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)	**49,2**	**51,7**	**54,3**	**57,0**	**59,8**				
	Nilai tukar petani	**103,0**	**103,0**	**104,0**	**104,0**	**105,0**				
ProP : Asuransi Pertanian							**1.027,8**			
Asuransi Usaha Ternak (AUT)	*Jumlah ternak yang terlindungi asuransi (ekor)*	*120.000,0*	*150.000,0*	*175.000,0*	*200.000,0*	*225.000,0*	*161,0*	*Pusat dan 20 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Asuransi Pertanian	*Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi (hektar)*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*1.000.000,0*	*779,8*	*Pusat dan 24 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan pembiayaan dan asuransi Syariah sesuai fatwa DSN no 82							*87,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
ProP : Pendidikan Pertanian							**2.667,9**			
Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	*Terjalinnya Kemitraan dengan Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian dan KOSTRATANI (Orang)*	*1.215,0*	*1.300,0*	*1.400,0*	*1.500,0*	*1.600,0*	*354,4*	*Pusat, 8 Provinsi*		*Kementan*
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	*Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal S2 dan S3 (Orang)*	*300,0*	*300,0*	*300,0*	*300,0*	*300,0*	*127,0*	*Pusat*		*Kementan*
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (Siswa)*	*22.427,0*	*22.427,0*	*22.427,0*	*22.427,0*	*22.427,0*	*190,5*	*Pusat, 5 Provinsi*		*Kementan*
Tenaga Pendidik, dan Tenaga kependidikan vokasi Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	*Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan Kualitasnya (Orang)*	*315,0*	*350,0*	*400,0*	*450,0*	*500,0*	*63,1*	*Pusat, 11 Provinsi*		*Kementan*
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	*Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian yang ditumbuhkan sebagai pengusaha pertanian milenial (Kelompok)*	*2.090,0*	*2.100,0*	*2.110,0*	*2.120,0*	*2.130,0*	*423,6*	*Pusat, 11 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	*Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas (satker)*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*1.097,1*	*Pusat, 11 Provinsi*		*Kementan*
Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	*Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling) mendukung pengusaha pertanian milenial (Orang)*	*250,0*	*300,0*	*350,0*	*400,0*	*450,0*	*37,3*	*Pusat*		*Kementan*
Taman Teknologi Pertanian (TTP)	*Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*0,0*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	*Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian (kontrak)*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*164,2*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Pengembangan Sumberdaya Manusia	*Pengembangan Sumberdaya Manusia (Orang)*	*1.200,0*	*1.200,0*	*1.200,0*	*1.200,0*	*1.200,0*	*186,2*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	*Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi (Invensi)*	*45,0*	*45,0*	*45,0*	*45,0*	*45,0*	*9,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	*Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan (Lisensi)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*14,7*	*1 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang							**4.816,3**			
Penumbuhan dan penguatan P4S	*Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S dalam penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Unit)*	*240,0*	*240,0*	*240,0*	*240,0*	*240,0*	*29,9*	*Pusat, 7 Provinsi*		*Kementan*
Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkat Kompetensinya (Orang)*	*196,0*	*196,0*	*196,0*	*196,0*	*196,0*	*22,6*	*Pusat, 7 Provinsi*		*Kementan*
Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	*Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Poktan)*	*2.394,0*	*2.394,0*	*2.394,0*	*2.394,0*	*2.394,0*	*122,1*	*Pusat*		*Kementan*
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	*Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program KOSTRATANI (Orang)*	*35.322,0*	*35.322,0*	*35.322,0*	*35.322,0*	*35.322,0*	*575,7*	*Pusat, 7 Provinsi*		*Kementan*
Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	*Kinerja Penyuluh di KOSTRATANI yang ditingkatkan (orang)*	*43.150,0*	*43.150,0*	*43.150,0*	*43.150,0*	*43.150,0*	*2.512,2*	*34 Provinsi*		*Kementan*
SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	*SL Petani Mendukung Program KOSTRATANI (Poktan)*	*23.250,0*	*45.000,0*	*45.000,0*	*75.000,0*	*75.000,0*	*332,1*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Kelembagaan penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	*Balai Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan KOSTRATANI (Unit)*	*3.054,0*	*5.646,0*	*5.646,0*	*5.646,0*	*5.646,0*	*69,6*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	*Tumbuh dan Berkembangnya Pengusaha pertanian milenial melalui Korporasi Petani (Unit)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*61,1*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	*Penguatan Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian mendukung KOSTRATANI (Unit)*	*68,0*	*102,0*	*102,0*	*102,0*	*102,0*	*28,6*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	*Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi (model)*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*134,9*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	*Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (model)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*296,7*	*15 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	*Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (Paket Teknologi)*	*125,0*	*190,0*	*190,0*	*190,0*	*190,0*	*630,7*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
ProP : Korporasi Petani							**13.884,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Korporasi UsahaTani	*Terbentuknya korporasi usahatani (Lokasi)*	*13,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4,9*	*12 Provinsi*		*Kementan*
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	*Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial (Orang)*	*2.750,0*	*2.750,0*	*2.750,0*	*2.750,0*	*2.750,0*	*45,3*	*Pusat, 7 Provinsi*		*Kementan*
Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	*Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi (Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*91,6*	*1 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Digitalisasi rantai pasok pangan dgn ewallet syariah							*1.450,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
Grand desain model bisnis dan spasial							*650,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
Pembangunan korporasi petani berbasis Society 5.0							*767,6*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
Proyek Indonesia City Hajj							*10.875,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
Terminal Agro Bisnis Produk Pangan dan Pertanian Indonesia untuk Jamaah Haji di Mekah							*0,0*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Swasta*
KP : Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	**Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)**	**50,0**	**65,0**	**80,0**	**90,0**	**100,0**	**14.422,8**			
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)	**30 dan 8**	**30 dan 8**	**30 dan 8**	**30 dan 8**	**30 dan 8**				
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Aksesi)	**4.250,0**	**4.250,0**	**4.250,0**	**4.250,0**	**4.250,0**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian							**2.757,6**			
Jaringan Irigasi Tersier	*Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian (Ha)*	*135.600,0*	*269.884,0*	*269.884,0*	*269.884,0*	*269.884,0*	*1.536,0*	*32 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Irigasi Perpompaan	*Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan (Unit)*	*1.000,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*716,4*	*32 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Embung Pertanian	*Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian (Unit)*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*254,8*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	*Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (Unit)*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*134,2*	*Pusat dan 22 provinsi*		*Kementan*
Irigasi Perpipaan	*Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Unit)*	*138,0*	*138,0*	*138,0*	*138,0*	*138,0*	*84,3*	*21 provinsi*		*Kementan*
Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	*Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain irigasi pertanian yang tersedia (Dokumen)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*31,9*	*10 provinsi*		*Kementan*
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian							**11.665,2**			
e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan Kartu Tani	*Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten) dalam rangka penyusunan e-RDKK mendukung penerapan Kartu Tani (Lokasi)*	*521,0*	*521,0*	*521,0*	*521,0*	*521,0*	*1.623,0*	*Pusat dan 33 provinsi*		*Kementan*
Cetak Sawah	*Jumlah perluasan areal pertanian (Ha)*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*1.021,7*	*21 provinsi*		*Kementan*
Optimasi Lahan	*Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi (Ha)*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*2.309,2*	*15 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Data Lahan Pertanian	*Jumlah peta geospasial lahan cetak sawah yang tersedia (Dokumen peta)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*114,6*	*Pusat dan 7 provinsi*		*Kementan*
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	*Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia (Unit)*	*23.440,0*	*25.800,0*	*27.000,0*	*28.500,0*	*29.500,0*	*4.969,3*	*Pusat dan 33 provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	*Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia (Unit)*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*716,7*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	*Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (ha)*	*20.000,0*	*20.000,0*	*20.000,0*	*20.000,0*	*20.000,0*	*265,5*	*Pusat*		*Kementan*
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	*Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Rekomendasi)*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*143,9*	*Pusat dan 25 provinsi*		*Kementan*
Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	*Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain cetak sawah yang tersedia (Dokumen)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*95,2*	*10 Provinsi*		*Kementan*
Perbengkelan Alsintan	*Jumlah perbengkelan Alsintan yang tersedia (Unit)*	*18,0*	*18,0*	*18,0*	*18,0*	*18,0*	*68,5*	*Pusat*		*Kementan*
Teknologi Pertanian	*Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) (Teknologi)*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*199,0*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Teknologi Pertanian	*Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Teknologi)*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*97,1*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*3,1*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	*Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim (Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	*Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian (Peta)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*31,7*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	*Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan (Teknologi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*4,9*	*1 Provinsi*		*Kementan*
KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	**Global food security index**	**64,0**	**65,5**	**66,9**	**68,4**	**69,8**	**2.025,1**			
ProP : Stabilisasi Harga Pangan							**743,2**			
Lumbung Pangan Masyarakat	*Terbinanya lumbung pangan masyarakat (Unit)*	*300,0*	*220,0*	*220,0*	*220,0*	*225,0*	*109,9*	*28 provinsi*		*Kementan*
Lembaga Distribusi Pangan	*Terbinanya lembaga distribusi pangan (Unit)*	*962,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*603,8*	*22 provinsi*		*Kementan*
Pengelolaan Informasi Pemasaran	*Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran (Lokasi)*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*23,2*	*Pusat, 34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional	*Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Pokok (Permendag)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*6,3*	*pusat*		*Kemendag*
ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat							**1.281,9**			
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	*Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi)*	*389,0*	*135,0*	*135,0*	*135,0*	*135,0*	*160,2*	*Pusat, 34 provinsi*		*Kementan*
Pengembangan Pertanian Keluarga/ Family Farming	*Terbentuknya pertanian keluarga/family farming (Lokasi)*	*727,0*	*646,0*	*565,0*	*485,0*	*404,0*	*992,3*	*17 provinsi*		*Kementan*
Pertanian Masuk Sekolah	*Terbentuknya pertanian masuk sekolah (Lokasi)*	*340,0*	*340,0*	*340,0*	*340,0*	*340,0*	*129,4*	*34 provinsi*		*Kementan*
PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	**Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)**	**23,4**	**24,2**	**25,1**	**26,0**	**26,9**	**15.942,0**			
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	**<64**	**<67**	**<72**	**<76**	**≤80**				
KP : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	**Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**600,3**			
	Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**				
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	**14,0**	**24,0**	**26,0**	**26,0**	**12,0**				
ProP : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	**Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga (WPP)**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**283,4**			
Data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	*Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (WPP)*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*137,5*	*11 WPP*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*
Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	*Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan (%)*	*60,0*	*70,0*	*80,0*	*90,0*	*100,0*	*12,7*	*11 WPP*		*KKP*
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	*Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*101,1*	*11 WPP*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	*Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) (KPP-PUD)*	*8,0*	*10,0*	*12,0*	*14,0*	*14,0*	*32,1*	*15 PUD*		*KKP*
ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	**Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)**	**14,0**	**24,0**	**26,0**	**26,0**	**12,0**	**257,6**			
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	*Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Perairan laut)*	*6,0*	*6,0*	*4,0*	-	-	*19,7*	*10 perairan laut*		*KKP*
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	*Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)*	*25,0*	*28,0*	*19,0*	*9,0*	*5,0*	*41,9*	*75 kawasan*		*KKP*
Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	*Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K (Provinsi)*	*13,0*	*24,0*	*29,0*	*24,0*	*31,0*	*28,0*	*31 Provinsi*		*KKP*
Pemetaan garis pantai prioritas	*Panjang garis pantai terpetakan*	*10.000,0*	*6.000,0*	*6.000,0*	*6.000,0*	*6.000,0*	*165,5*	*Lombok, Selat Sunda, Bali, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Kendari, Kolaka, Labuan Bajo, Maumere, Manokwari, Makassar, Pare-Pare, Selayar, Poso, Kaimana, Nabire, Biak, Serui, Merauke, Bontang, Tarakan, Tegal, Pekalongan, pemalang, Madura, Probolinggo, Jakarta, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Rembang, Jepara, Padang, Mamuju, Gorontalo, Manado, Bengkulu, Batam, Singkawang, Palopo, Toli-Toli, Waingapu, Amahae*		*BIG*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sinkronisasi antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	*Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (daerah)*	*5,0*	*10,0*	*20,0*	*30,0*	*34,0*	*2,5*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut							**59,4**			
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	*Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)*	*10,0*	*12,0*	*14,0*	*16,0*	*18,0*	*41,5*	*34 Provinsi*		*KKP*
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	*12,0*	*27,0*	*26,0*	*40,0*	*46,0*				
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	*Jumlah Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*17,9*	*Daerah*		*KKP*
KP : Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan							**292,7**			
ProP : Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim							**250,6**			
Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	*Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT (Kawasan)*	*12,0*	*14,0*	*16,0*	*18,0*	*20,0*	*85,0*	*18 Provinsi*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KKP*
Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	*Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Hektare)*	*10.000.000,0*	*14.500.000,0*	*17.500.000,0*	*19.000.000,0*	*20.000.000,0*	*143,6*	*34 Provinsi*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman	*Jumlah Bahan Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang dikoordinasikan (Dokumen) (Dokumen)*	*9,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*22,0*	*Pusat*		*Kemenko Marin*
ProP : Pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi							**42,1**			
Pengelolaan Biofarmakologi	*Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun (Unit)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*20,0*	*10 Provinsi*		*KKP*
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	*Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Paket)*	*6,0*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*22,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
KP : Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	**Produksi ikan (Juta ton)**	**15,5**	**16,3**	**17,6**	**18,5**	**20,4**	**12.794,2**			
	Produksi rumput laut (Juta ton)	**11,0**	**11,6**	**11,9**	**12,1**	**12,3**				
	Produksi garam (Juta ton)	**3,0**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**				
ProP : Peningkatan Produksi Perikanan	**Jumlah Produksi Ikan**	**15,5**	**16,3**	**17,6**	**18,5**	**20,4**	**11.159,8**			
Produksi induk unggul	*Jumlah produksi induk unggul (ekor, non kumulatif) (Ekor)*	*1.000.000,0*	*1.100.000,0*	*1.200.000,0*	*1.300.000,0*	*1.400.000,0*	*327,1*	*34 provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	*Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)*	*48.960.722,0*	*50.000.000,0*	*51.000.000,0*	*52.000.000,0*	*54.000.000,0*	*137,1*	*34 provinsi*		*KKP*
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	*Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)*	*158520000*	*159000000*	*160000000*	*161000000*	*162000000*	*90,5*	*34 provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	*Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat (Ekor)*	*8.277.000,0*	*9.000.000,0*	*9.500.000,0*	*10.000.000,0*	*10.500.000,0*	*219,8*	*34 provinsi*		*KKP*
Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	*Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana UPT (Lokasi)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*369,1*	*10 provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	*Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan (Paket)*	*80,0*	*110,0*	*120,0*	*140,0*	*150,0*	*42,6*	*18 provinsi*		*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang bersertifikat	*Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi (Unit)*	*60,0*	*70,0*	*80,0*	*90,0*	*100,0*	*148,0*	*33 provinsi*		*KKP*
Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan	*Jumlah monitoring residu (Paket)*	*10.000,0*	*14.000,0*	*18.000,0*	*22.000,0*	*26.000,0*	*256,0*	*24 Provinsi*		*KKP*
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	*Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha (Paket)*	*551,0*	*800,0*	*900,0*	*1.000,0*	*1.100,0*	*506,7*	*34 provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	*Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (Paket)*	*38,0*	*100,0*	*110,0*	*120,0*	*125,0*	*552,9*	*10 provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan	*Jumlah Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan (lokasi)*	*10,0*	*20,0*	*30,0*	*40,0*	*50,0*	*302,5*	*10 Provinsi*		*KKP*
Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri	*Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri (Paket)*	*91,0*	*101,0*	*110,0*	*120,0*	*130,0*	*177,0*	*20 provinsi*		*KKP*
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	*Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (Unit)*	*30,0*	*50,0*	*70,0*	*90,0*	*110,0*	*183,4*	*34 Provinsi*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun	*Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (Unit)*	*500,0*	*750,0*	*1.000,0*	*1.250,0*	*1.500,0*	*150,5*	*34 Provinsi*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	*Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (Lokasi)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*199,7*	*7 lokasi*		*KKP*
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat	*Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%)*	*80,0*	*81,0*	*82,0*	*83,0*	*84,0*	*127,9*	*7 lokasi*		*KKP*
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	*Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (Lokasi)*	*17,0*	*18,0*	*19,0*	*20,0*	*21,0*	*326,3*	*21 lokasi*		*KKP*
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat	*Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%)*	*80,0*	*81,0*	*82,0*	*83,0*	*84,0*	*132,9*	*21 lokasi*		*KKP*
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya	*Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (lokasi)*	*12,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*423,7*	*18 lokasi*		*KKP*
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya	*Jumlah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi)*	*1,0*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*444,5*	*15 lokasi*		*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	*Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional (lokasi)*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*750,0*	*3 lokasi*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*
Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	*Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) (Unit)*	*12.000,0*	*15.000,0*	*16.000,0*	*18.000,0*	*20.000,0*	*21,7*	*UPT Pusat dan UPT Daerah*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) - Menu DAK Bidang KP	*Jumlah pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (unit)*	*60,0*	*70,0*	*80,0*	*90,0*	*100,0*	*1.670,0*	*32 Provinsi*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*Pemda/DAK*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil - Menu DAK Bidang KP	*Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil (lokasi)*	*350,0*	*350,0*	*350,0*	*350,0*	*350,0*	*3.600,0*	*34 Provinsi*		*Pemda/DAK*
ProP : Peningkatan Produksi rumput laut	**Jumlah Produksi Rumput Laut (Juta ton)**	**11,0**	**11,6**	**11,9**	**12,1**	**12,3**	**73,6**			
Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat	*Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (kg)*	*200.000,0*	*350.000,0*	*400.000,0*	*450.000,0*	*500.000,0*	*73,6*	*18 provinsi*		*KKP*
ProP : Peningkatan Produksi garam	**Jumlah Produksi Garam (Juta ton)**	**3,0**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**751,7**			
Lahan Garam yang difasilitasi	*Jumlah lahan garam yang difasilitasi (Ha)*	*600,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*381,0*	*12 Provinsi*		*KKP*
Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	*Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi (Unit)*	*70,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*170,7*	*12 Provinsi*		*KKP*
	Jumlah sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (Unit)	*4,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*80,0*	*4 Provinsi*		*KKP*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam - Menu DAK	*Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tambak garam (Provinsi)*	*13,0*	*13,0*	*13,0*	*13,0*	*13,0*	*120,0*	*13 Provinsi*		*Pemda/DAK*
ProP : Karantina Ikan dan jaminan mutu							**809,2**			
Sarana dan prasarana pengawasan karantina	*Jumlah sarana dan prasarana pengawasan karantina (Lokasi)*	*25,0*	*28,0*	*30,0*	*32,0*	*32,0*	*296,8*	*10 Provinsi*		*KKP*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional pengawasan mutu hasil perikanan	*Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor (Persentase)*	*98,0*	*98,0*	*98,0*	*98,0*	*98,0*	*113,9*	*34 Provinsi*		*KKP*
Sarana dan prasarana pengujian mutu	*Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu (Lokasi)*	*33,0*	*35,0*	*37,0*	*38,0*	*38,0*	*148,8*	*34 Provinsi*		*KKP*
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	*Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit Kerja)*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*87,4*	*34 Provinsi*		*KKP*
	Jumlah unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI 8340:2016) (Unit Kerja)	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*0,0*	*34 Provinsi*		*KKP*
	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 (Unit Kerja)	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*0,0*	*34 Provinsi*		*KKP*
	Jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) (Unit Kerja)	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*0,0*	*34 Provinsi*		*KKP*
Laporan Penindakan Pelanggaran Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan	*Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (Persentase)*	*95,0*	*95,0*	*95,0*	*95,0*	*95,0*	*26,3*	*34 Provinsi*		*KKP*
Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik	*Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (Persentase)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*136,1*	*34 Provinsi*		*KKP*
KP : Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	**Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp Triliun)**	**3,0**	**3,3**	**3,6**	**3,9**	**4,2**	**523,5**			
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	**102,0**	**103,0**	**105,0**	**106,0**	**107,0**				
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (indeks)	**101,0**	**102,0**	**103,0**	**104,0**	**105,0**				
ProP : Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	**Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi (orang)**	**190.000,0**	**172.000,0**	**174.000,0**	**176.000,0**	**178.000,0**	**146,8**			
Bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	*Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (Orang)*	*150.000,0*	*120.000,0*	*120.000,0*	*120.000,0*	*120.000,0*	*107,7*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	*Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya (Hektar)*	*5.000,0*	*6.000,0*	*7.500,0*	*9.000,0*	*10.000,0*	*39,1*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	**Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp Triliun)**	**3,0**	**3,3**	**3,6**	**3,9**	**4,2**	**234,5**			
Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	*Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan) (Nelayan)*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*34,3*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	*Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi)*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*15,0*	*25 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Kampung Nelayan Maju	*Jumlah Kampung Nelayan Maju (Lokasi)*	*-*	*10,0*	*10,0*	*15,0*	*20,0*	*55,0*	*20 lokasi*		*KKP*
Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)	*Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)*	*13.000,0*	*13.000,0*	*13.000,0*	*13.000,0*	*13.000,0*	*8,5*	*23 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya	*Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (Bidang)*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*27,8*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya	*Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (Pelaku usaha)*	*1.510,0*	*1.620,0*	*1.730,0*	*1.840,0*	*1.950,0*	*30,7*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	*Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (Kelompok)*	*2.250,0*	*2.400,0*	*2.550,0*	*2.750,0*	*3.000,0*	*16,6*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Penumbuhan wirausaha KP	*Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*11,0*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP	*Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga usaha)*	*20,0*	*30,0*	*35,0*	*40,0*	*45,0*	*9,5*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	*Jumlah Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)*	*2.900,0*	*4.000,0*	*5.000,0*	*6.000,0*	*7.000,0*	*26,3*	*34 Provinsi*		*KKP*
ProP : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	**Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**142,2**			
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	*Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*84,1*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Alokasi Izin yang Diterbitkan	*Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan (Unit)*	*10.500,0*	*10.600,0*	*10.650,0*	*10.700,0*	*10.750,0*	*16,0*	*34 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*KKP*
Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	*Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya (Unit)*	*17.100,0*	*21.500,0*	*21.750,0*	*22.000,0*	*22.350,0*	*42,1*	*Pusat dan Daerah*		*KKP*
KP : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	**Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)**	**5,0**	**8,0**	**11,0**	**13,0**	**15,0**	**1.731,1**			
ProP : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	**(Mutu)**						**1.070,4**			
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	*Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (Orang)*	*25.200,0*	*26.000,0*	*27.000,0*	*28.000,0*	*30.000,0*	*289,3*	*34 Provinsi*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KKP*
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	*Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (Kelompok)*	*41.000,0*	*42.000,0*	*43.000,0*	*44.000,0*	*45.000,0*	*543,6*	*34 Provinsi*		*KKP*
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	*Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (unit)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*10,0*	*237,5*	*Tegal, Banyuwangi, Ambon, Medan, Sukamandi, Bitung, Palembang*		*KKP*
ProP : Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan							**660,8**			
Teknologi Hasil Riset Perikanan	*Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan (Paket)*	*23,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*105,2*	*5 Provinsi*		*KKP*
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan (Unit)*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*170,3*	*4 Provinsi*	*Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng*	*KKP*
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	*Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan (paket)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*35,3*	*Jakarta Utara*		*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan (Unit)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*207,2*	*7 Provinsi*		*KKP*
Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	*Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar (Scene)*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*87,9*	*BROL-Perancak*		*KKP*
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	*Jumlah Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar (Unit)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*32,9*	*BROL-Perancak*		*KKP*
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang Dihasilkan	*Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang dikoordinasikan (Dokumen) (Dokumen)*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*22,0*	*Pusat*		*Kemenko Marin*
PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	**Rasio kewirausahaan nasional (Persen)**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**6.006,8**			
	Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	**61,0**	**62,0**	**63,0**	**64,0**	**65,0**				
	Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**				
KP : Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	**Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan (Persen)**	**8,5**	**9,0**	**9,5**	**10,0**	**10,5**	**542,5**			
ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk							**297,0**			
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	*Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk (KUMKM)*	*1.703,0*	*2.000,0*	*2.100,0*	*2.205,0*	*2.315,0*	*31,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	*Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi (Produk/usaha)*	*250,0*	*270,0*	*330,0*	*230,0*	*200,0*	*41,1*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	*Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang (Pelaku)*	*430,0*	*430,0*	*430,0*	*430,0*	*430,0*	*9,5*	*Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulut,Sultra, Gorontalo, Jabar, Jatim, Sulsel, Jateng, Sumbar, DKI Jakarta*		*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	*Jumlah Pelaku Usaha dan LPK yang dibina penerapan SPK (Pelaku Usaha dan LPK)*	*225,0*	*350,0*	*430,0*	*585,0*	*628,0*	*41,1*	*Pusat*		*BSN*
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis	*Jumlah stakeholder yang terlayani standardisasi dan penilaian kesesuaian (Stakeholder)*	*1.800,0*	*1.800,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*25,0*	*Makassar, Riau, Palembang, Surabaya, Bekasi*		*BSN*
Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Berbasis Teknologi	*Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))*	*6,0*	*20,0*	*30,0*	*50,0*	*80,0*	*33,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Berbasis Teknologi	*Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))*	*8,0*	*20,0*	*40,0*	*60,0*	*100,0*	*33,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi	*Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))*	*6,0*	*20,0*	*30,0*	*50,0*	*80,0*	*28,4*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Pengembangan Layanan IKM Persepatuan melalui BPIPI	*Layanan BPIPI (layanan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*46,5*	*Sidoarjo, Jawa Timur*		*Kemenperin*
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan Making Indonesia 4.0	*Rekomendasi Kebijakan (Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*7,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
ProP : Perluasan Kemitraan Usaha							**141,1**			
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar	*TERFASILITASINYA KEMITRAAN strategis ANTARA KUMK DENGAN USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA BESAR (UB) (KUMK)*	*150 KUMK di 3 Lokasi*	*170 KUMK di 3 Lokasi*	*179 KUMK di 3 Lokasi*	*187 KUMK di 3 Lokasi*	*197 KUMK di 4 Lokasi*	*38,8*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
Advokasi Kemitraan	*Jumlah Advokasi Kemitraan (Advokasi)*	*12,0*	*13,0*	*14,0*	*15,0*	*16,0*	*6,5*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*KPPU*
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	*Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan (Perkara)*	*18,0*	*19,0*	*21,0*	*23,0*	*25,0*	*17,4*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*KPPU*
Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	*Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan (Laporan)*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*1,2*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*KPPU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri	*Terjalinnya kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak (Kemitraan)*	*3,0*					*3,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk Industri Besar dan Sedang	*Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*24,8*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang	*Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))*	*20,0*	*60,0*	*90,0*	*125,0*	*165,0*	*24,8*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang	*Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))*	*20,0*	*40,0*	*60,0*	*80,0*	*100,0*	*24,8*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra							**104,4**			
KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	*Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan (KUKM)*	*25,0*	*40,0*	*42,0*	*44,0*	*46,0*	*30,9*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
KUKM Sektor Perikanan dan Peternakan yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan	*Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan (KUKM)*	*25,0*	*40,0*	*42,0*	*44,0*	*46,0*	*33,4*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
KUKM bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan	*KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA MELALUI KEMITRAAN (KUKM)*	*25,0*	*40,0*	*42,0*	*44,0*	*46,0*	*30,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen KUKM*
Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	*Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism (KUMKM)*	*20,0*	*21,0*	*22,0*	*23,0*	*24,0*	*9,3*	*Pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	**Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (8.10.1(b)) (Persen)**	**25,2**	**26,5**	**27,8**	**29,3**	**30,8**	**586,8**			
	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (Persen)	**19,8**	**20,3**	**20,9**	**21,4**	**22,0**				
	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (Persen)	**2,4**	**2,8**	**3,4**	**4,1**	**5,0**				
	Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (Persen)	**60,0**	**65,0**	**70,0**	**75,0**	**80,0**				
ProP : Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha							**551,3**			
Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start Up Capital)	*Tersalurnya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula (Orang)*	*1.900,0*	*2.000,0*	*2.100,0*	*2.205,0*	*2.315,0*	*167,1*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	*Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi (Miliar)*	*255,0*	*270,0*	*320,0*	*240,0*	*220,0*	*255,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	*Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif (Miliar)*	*5.082,0*	*5.225,0*	*5.650,0*	*5.150,0*	*4.900,0*	*128,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit							**31,0**			
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR	*Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mangakses KUR (UMi)*	*3.000,0*	*5.000,0*	*5.250,0*	*5.513,0*	*5.788,0*	*24,6*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mengakses kredit melalui lembaga keuangan non	*Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan fintech (UMK)*	*-*	*750,0*	*788,0*	*827,0*	*868,0*	*6,5*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
ProP : Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM							**4,4**			
Desain skema pembiayaan usaha	*Jumlah skema pembiayaan yang dikembangkan (Skema)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*4,4*			*Kemen KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi							**216,4**			
	jumlah koperasi moderen yang dikembangkan (unit)	**25,0**	**75,0**	**200,0**	**340,0**	**500,0**				
ProP : Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi							**169,8**			
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	*Kenaikan jumlah PPKL (PPKL)*	*100,0*	*113,0*	*119,0*	*125,0*	*131,0*	*15,2*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi	*Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi (Orang)*	*3.360,0*	*4.000,0*	*4.200,0*	*4.410,0*	*4.631,0*	*103,0*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer koperasi	*Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi (Orang)*	*1.690,0*	*2.000,0*	*2.100,0*	*2.205,0*	*2.315,0*	*51,6*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
ProP : Pendampingan kelompok untuk membentuk koperasi							**9,9**			
Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi	*Terlaksananya Penyuluhan Pembentukan Koperasi (Kelompok Pra Koperasi)*	*500,0*	*300,0*	*331,0*	*347,0*	*599,0*	*9,9*	*Pusat*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
ProP : Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha							**21,6**			
Pengembangan akses dan jaringan koperasi	*Jumlah Koperasi yang dikembangkan jaringan dan akses ke dalam dan luar negeri (Koperasi)*	*-*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*4,3*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
Konferensi Koperasi Nasional	*Terselenggaranya Konferensi Koperasi (Forum)*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*17,2*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
ProP : Pengembangan Inovasi Koperasi							**15,1**			
Pengembangan inovasi koperasi	*Jumlah Koperasi model baru yang dikembangkan (Koperasi)*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*15,1*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
KP : Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	**Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,0**	**4.582,1**			
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)	**10,0**	**20,0**	**30,0**	**40,0**	**50,0**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)	**18,5**	**18,9**	**19,3**	**19,6**	**20,0**				
	Penumbuhan startup (unit)	**700,0**	**1.400,0**	**2.100,0**	**2.800,0**	**3500 (kumulatif)**				
ProP : Pelatihan Kewirausahaan							**2.309,0**			
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan	*Terlatihnya SDM KUMKM melalui pelatihan kewirausahaan (Orang)*	*6.500,0*	*7.500,0*	*7.875,0*	*8.269,0*	*8.682,0*	*194,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*
Wirausaha baru	*Jumlah wirausaha baru (orang)*	*43.340,0*	*45.057,0*	*47.782,0*	*50.171,0*	*52.680,0*	*981,4*	*34 Provinsi*		*KemenNaker*
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	*Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan (orang)*	*5.000,0*	*5.250,0*	*5.513,0*	*5.788,0*	*6.078,0*	*150,7*	*34 Provinsi*		*KemenNaker*
Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	*Jumlah wirausaha muda pertanian yang ditumbuhkan*	*1.513,0*	*1.763,0*	*2.013,0*	*2.263,0*	*2.513,0*	*486,6*	*Polbangtan (Medan, Bogor, Yogya, Magelang, Malang, Gowa, Manokwari) dan SMK PP (Sembawa Palembang, Banjarbaru Kalsel, Kupang NTT)*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Fasilitasi pemuda sebagai kader wirausaha	*Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*24,1*	*Pusat*		*Kemenpora*
Mahasiswa Mulai Berwirausaha	*Jumlah Mahasiswa Mulai Berwirausaha*	*3.000,0*	*4.000,0*	*4.500,0*	*5.000,0*	*5.500,0*	*100,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Wirausaha yang Meningkat Pendapatannya Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal	*Jumlah wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*41,8*	*Pusat*		*Kemendes, PDT & TRANS*
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	*Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi (Orang)*	*1.500,0*	*2.000,0*	*2.100,0*	*2.205,0*	*2.315,0*	*50,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	*Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))*	*810,0*	*2.800,0*	*4.200,0*	*5.600,0*	*7.000,0*	*79,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	*Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))*	*1.400,0*	*2.800,0*	*4.200,0*	*5.600,0*	*7.000,0*	*79,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	*Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB (Kumulatif))*	*1.200,0*	*2.400,0*	*3.600,0*	*4.800,0*	*6.000,0*	*79,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pelatihan bagi dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas	*Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan (Unit)*		*9,0*	*9,0*	*8,0*	*8,0*	*14,4*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	*Persentase Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Persen)*		*31,0*	*14,0*	*27,0*	*28,0*	*5,4*	*32 Provinsi*		*Kemen PPPA*
	Jumlah SDM pendamping perempuan pelaku kewirausahaan (Mekaar) yang ditingkatkan kapasitasnya tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Orang)		*18.000,0*	*18.000,0*	*18.000,0*	*18.000,0*	*21,1*	*32 Provinsi*		*Kemen PPPA*
ProP : Inkubasi Usaha							**531,9**			
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi	*Terlaksananya Jumlah Inkubator yang memberikan pendampingan pengembangan ide usaha (Inkubator)*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*6,0*	*6,0*	*14,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wirausaha baru inkubasi bisnis	*Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis (orang)*	*9.000,0*	*9.270,0*	*9.550,0*	*9.835,0*	*10.130,0*	*400,2*	*34 Provinsi*		*KemenNaker*
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Enterpreneurship, Pemagangan Internasional)	*Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi (Orang/ komunitas)*	*250,0*	*384,8*	*400,0*	*372,7*	*363,6*	*116,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha							**1.370,8**			
Sarana prasarana layanan usaha terpadu	*Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM) (Unit)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*154,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*
Pedagang skala mikro informal/pedagag kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi	*Tersedianya fasilitasi PKL untuk memperoleh kepastian tempat usaha (UMi)*	*350,0*	*368,0*	*386,0*	*405,0*	*425,0*	*23,0*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	*Jumlah BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*71,1*			*Kemendes, PDT & TRANS*
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	*Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*35,0*	*35,0*	*352,5*	*Pusat*		*Kemendes, PDT & TRANS*
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	*Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan (Unit)*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*644,8*	*Pusat*		*Kemendag*
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	*Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan (Pelaku Usaha/Aparatur)*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*2.000,0*	*74,7*			*Kemendag*
UMKM Go Online	*Jumlah (Active Selling) UMKM Go Online (UMKM)*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*100.000,0*	*2.000,0*	*50,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen Kominfo*
ProP : Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah							**370,3**			
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	*jumlah provinsi yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya (Provinsi)*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*370,3*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Peningkatan nilai tambah usaha sosial	**Kontribusi usaha sosial (Persen PDB)**	**1,9**	**2,1**	**2,2**	**2,4**	**2,5**	**79,2**			
ProP : Pendampingan akses permodalan bagi wirausaha sosial berbasis ekonomi kreatif							**56,8**			
Social Entrepreneur Mentoring Program	*Jumlah Social Entrepreneur yang difasilitasi (Orang/ komunitas)*	*-*	*685,0*	*725,0*	*690,0*	*650,0*	*56,8*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Pembinaan Wirausaha Sosial							**22,4**			
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga	*(Orang)*	*600,0*	*700,0*	*735,0*	*772,0*	*810,0*	*18,1*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
Forum Kewirausahaan Sosial	*(Forum)*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*4,3*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	**Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)**	**3,7**	**3,7**	**3,9**	**4,0**	**4,1**	**800.341,9**			
	Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	**6,5**	**6,9**	**7,2**	**7,5**	**7,8**				
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	**5,0**	**5,5**	**6,5**	**7,5**	**8,1**				
	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	**4,8**	**5,0**	**5,2**	**5,3**	**5,5**				
	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	**1.189-1.214**	**1.314-1.333**	**1.439-1.452**	**1.564-1.570**	**1.689**				
	Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	**5,6**	**6,2**	**6,9**	**7,8**	**8,4**				
	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	**2,7-3,0**	**2,7-3,0**	**2,7-3,0**	**2,7-3,0**	**2,7-3,0**				
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	**3,0-3,3**	**3,1-3,5**	**3,2-3,7**	**3,2-4,0**	**3,5-4,5**				
	Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	**14,2**	**14,6**	**15,0**	**15,3**	**15,7**				
	Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	**19,7**	**20,3**	**20,9**	**21,4**	**22,0**				
	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	**13,0**	**13,5**	**14,0**	**14,5**	**15,0**				
	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	**19,0**	**20,0**	**20,0**	**21,0**	**21,0**				
KP : Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	**Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)**	**8,09-8,22**	**8,21-8,37**	**8,33-8,51**	**8,45-8,65**	**8,57-8,79**	**152.101,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9.2.1*) (Persen)	**19,7**	**19,8**	**20,0**	**20,4**	**21,0**				
	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)	**5,5**	**6,1**	**6,9**	**7,7**	**8,4**				
	Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**				
	Peningkatan produksi kakao (Persen)	**2,1**	**2,3**	**2,5**	**2,6**	**2,7**				
	Peningkatan produksi kopi (Persen)	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**				
	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**6,0**	**6,0**				
	Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)	**5,8**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**6,0**				
	Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)	**3,9**	**4,3**	**4,7**	**5,2**	**5,7**				
	Peningkatan produksi sayuran (Persen)	**2,6**	**2,7**	**2,9**	**3,0**	**3,1**				
	Peningkatan produksi florikultura (Persen)	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5.5**				
ProP : Pengembangan Industri berbasis perkebunan							**5.929,6**			
Kawasan Kopi	*Kawasan Kopi (Ha)*	*11.750,0*	*11.750,0*	*11.750,0*	*11.750,0*	*11.750,0*	*87,7*	*15 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Kakao	*Kawasan Kakao (Ha)*	*10.150,0*	*10.150,0*	*10.150,0*	*10.150,0*	*10.150,0*	*139,3*	*11 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Karet	*Kawasan Karet (Ha)*	*8.300,0*	*8.300,0*	*8.300,0*	*8.300,0*	*8.300,0*	*153,8*	*9 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Kelapa	*Kawasan Kelapa (Ha)*	*13.005,0*	*13.005,0*	*13.005,0*	*13.005,0*	*13.005,0*	*89,2*	*12 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Area Tanaman Sagu	*Area Tanaman Sagu (Ha)*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*8,7*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	*Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Desa)*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*63,0*	*15 Provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	*Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (Pekebun)*	*7.400,0*	*7.400,0*	*7.400,0*	*7.400,0*	*7.400,0*	*40,8*	*14 Provinsi*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Kementan*
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	*Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (Ha)*	*1.245,0*	*1.245,0*	*1.245,0*	*1.245,0*	*1.245,0*	*84,7*	*15 Provinsi*		*Kementan*
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	*Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*6,2*	*13 Provinsi*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Kementan*
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	*Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (Ha)*	*11.425,0*	*11.425,0*	*11.425,0*	*11.425,0*	*11.425,0*	*459,7*	*13 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	*Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh (Ha)*	*32.030,0*	*32.030,0*	*32.030,0*	*32.030,0*	*32.030,0*	*219,5*	*25 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Nursery	*Nursery (Unit)*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*999,8*	*3 Provinsi*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Kementan*
Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	*Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan (Unit)*	*184,0*	*184,0*	*184,0*	*184,0*	*184,0*	*361,9*	*27 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	*Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)*	*251,0*	*251,0*	*251,0*	*251,0*	*251,0*	*440,8*	*28 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	*Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan (Ha)*	*1.920,0*	*1.920,0*	*1.920,0*	*1.920,0*	*1.920,0*	*195,1*	*33 Provinsi*		*Kementan*
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	*Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan (Batang)*	*41.195.600,0*	*41.195.600,0*	*41.195.600,0*	*41.195.600,0*	*41.195.600,0*	*2.261,2*	*32 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Benih Tebu	*Jumlah benih tebu yang dihasilkan (Budset)*	*540,0*	*540,0*	*540,0*	*540,0*	*540,0*	*1,8*	*4Provinsi*		*Kementan*
Benih Tanaman Palma	*Jumlah benih tanaman palma yang dihasilkan (Butir)*	*196.420,0*	*196.420,0*	*196.420,0*	*196.420,0*	*196.420,0*	*14,0*	*27 Provinsi*		*Kementan*
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	*Varietas Unggul Tanaman Perkebunan (Varietas)*	*8,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*25,6*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi Tanaman Perkebunan	*Teknologi Tanaman Perkebunan (Teknologi)*	*22,0*	*22,0*	*22,0*	*22,0*	*22,0*	*50,7*	*3 Provinsi*		*Kementan*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	*Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (Model)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*93,4*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	*Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan (Teknologi Diseminasi)*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*28,7*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Benih komoditas perkebunan non strategis	*Benih komoditas perkebunan non strategis (Pohon)*	*1.148.520,0*	*1.148.520,0*	*1.148.520,0*	*1.148.520,0*	*1.148.520,0*	*54,9*	*27 Provinsi*		*Kementan*
Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	*Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB (Model)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*37,2*	*3 Provinsi*		*Kementan*
VUB Bibit Tebu (Budset)	*Jumlah VUB Bibit Tebu (Budset)*	*3.370.000,0*	*3.400.000,0*	*3.450.000,0*	*3.500.000,0*	*4.000.000,0*	*5,5*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	*Jumlah Benih Unggul Tebu (Budset)*	-	-	-	-	-	*0,0*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	*Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)*		*6,0*	*12,0*	*18,0*	*25,0*	*2,5*	*Pusat*	*Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit*	*Kemendagri*
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	*Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*3,5*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
ProP : Pengembangan industri berbasis hortikultura							**4.218,0**			
Kawasan Bawang putih	*Luas Kawasan Bawang putih (hektar)*	*8.353,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*1.639,2*	*15 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Sayuran Lainnya	*Luas Kawasan Sayuran Lainnya (hektar)*	*760,1*	*760,1*	*760,1*	*760,1*	*760,1*	*78,1*	*Pusat, 12 provinsi*		*Kementan*
Benih Umbi	*Luas Produksi Benih Umbi (m2)*	*1.570.000,0*	*1.570.000,0*	*1.570.000,0*	*1.570.000,0*	*1.570.000,0*	*106,8*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Benih Batang	*Luas Produksi Benih Batang (batang)*	*4.808.000,0*	*4.808.000,0*	*4.808.000,0*	*4.808.000,0*	*4.808.000,0*	*188,0*	*33 Provinsi*		*Kementan*
Penerapan PHT (PPHT)	*Jumlah Penerapan PHT (PPHT) (Kelompok)*	*180,0*	*180,0*	*180,0*	*180,0*	*180,0*	*48,2*	*30 Provinsi*		*Kementan*
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim	*Jumlah Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim (hektar)*	*75,0*	*75,0*	*75,0*	*75,0*	*75,0*	*11,0*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	*Jumlah Kelembagaan Perlindungan Hortikultura (Unit)*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*26,9*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
GAP Buah dan Florikultura	*Jumlah GAP Buah dan Florikultura (Kelompok)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*29,3*	*20 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Registrasi Lahan Usaha	*(Lahan Usaha)*	-	-	-	-	-	*0,0*			*Kementan*
Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	*Jumlah Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura (Unit)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*20,1*	*17 Provinsi*		*Kementan*
Sertifikasi Benih Hortikultura	*Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura (unit)*	*4.000,0*	*4.000,0*	*4.000,0*	*4.000,0*	*4.000,0*	*152,6*	*32 Provinsi*		*Kementan*
Sarana Prasarana Benih Hortikultura	*Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura (Unit)*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*30,5*	*16 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Jeruk	*Luas Kawasan Jeruk (hektar)*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*	*48,8*	*9 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Florikultura	*Luas Kawasan Florikultura (M2)*	*300.000,0*	*300.000,0*	*300.000,0*	*300.000,0*	*300.000,0*	*274,7*	*12 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Mangga	*Luas Kawasan Mangga (hektar)*	*1.375,0*	*1.375,0*	*1.375,0*	*1.375,0*	*1.375,0*	*67,8*	*7 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Manggis	*Luas Kawasan Manggis (hektar)*	*1.600,0*	*1.600,0*	*1.600,0*	*1.600,0*	*1.600,0*	*109,9*	*6 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Pisang	*Luas Kawasan Pisang (hektar)*	*1.500,0*	*1.500,0*	*1.500,0*	*1.500,0*	*1.500,0*	*213,1*	*6 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Durian	*Luas Kawasan Durian (hektar)*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*87,9*	*10 Provinsi*		*Kementan*
Kawasan Buah Lainnya	*Luas Kawasan Buah Lainnya (hektar)*	*1.351,0*	*1.351,0*	*1.351,0*	*1.351,0*	*1.351,0*	*93,4*	*5 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Area Pengendalian OPT Hortikultura	*Jumlah Area Pengendalian OPT Hortikultura (hektar)*	*14.215,0*	*14.215,0*	*14.215,0*	*14.215,0*	*14.215,0*	*357,8*	*33 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
GHP Hortikultura	*Jumlah GHP Hortikultura (kelompok)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*12,8*	*16 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	*Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang teregistrasi (Unit)*	*1.100,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*1.100,0*	*13,4*	*9 Provinsi*		*Kementan*
Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	*Jumlah Sarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura (Unit)*	*462,0*	*462,0*	*462,0*	*462,0*	*462,0*	*305,9*	*34 Provinsi*		*Kementan*
Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	*Jumlah Fasilitasi Prasarana Produk Hortikultura (unit)*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*68,4*	*19 Provinsi*		*Kementan*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	*Benih Buah Tropika dan Sub Tropika (Batang)*	*19.000,0*	*19.000,0*	*19.000,0*	*19.000,0*	*19.000,0*	*4,9*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	*Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang (Model)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*93,4*	*2 Provinsi*		*Kementan*
Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	*Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura (Varietas)*	*17,0*	*20,0*	*23,0*	*25,0*	*27,0*	*26,9*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	*Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Teknologi)*	*10,0*	*10,0*	*11,0*	*11,0*	*12,0*	*44,6*	*3 Provinsi*		*Kementan*
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Hortikultura	*Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas Hortikultura (Teknologi Diseminasi)*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*63,5*	*3 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Pengembangan industri berbasis tanaman obat							**67,2**			
GAP Sayuran dan Tanaman Obat	*Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat (Kelompok)*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*6,7*	*5 Provinsi*	*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kementan*
Kawasan Tanaman Obat	*Luas Kawasan Tanaman Obat (hektar)*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	*47,6*	*11 Provinsi*		*Kementan*
Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	*Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu (Paket)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*12,8*	*1 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Pengembangan industri berbasis kehutanan							**146,9**			
Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR,	*Jumlah produksi hasil hutan kayu (juta m3/tahun)*	*47,0*	*50,0*	*55,0*	*57,0*	*60*	*50,0*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen LHK*
Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu	*Jumlah Produk Kayu Olahan Bersertifikat Legalitas Kayu (Juta m3)*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*6,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen LHK*
Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	*Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui Pembukaan Kran Ekspor Log Terbatas (Dokumen)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5,0*	*Pusat*		*KLHK, Kemenperin, Kemen Perdagangan, Kemenkeu*
Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu	*Jumlah industri primer kehutanan berbasis nonkayu (Unit)*	*6*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*13,0*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen LHK*
Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	*Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit) (Unit)*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*1.800,0*	*6,8*	*Pusat*		*Kemen LHK*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat	*Peningkatan Kapasitas produksi sektor Industri Kimia Hulu (Persentase)*	*2,5*	*3,5*	*4,5*	*6,0*	*7,0*	*46,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	*Persentase Rekomendasi yang Ditindak lanjuti (Rekomendasi)*	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*18,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
ProP : Pengembangan industri Kemaritiman	**Nilai ekspor perikanan (USD miliar)**	**6,2**	**6,6**	**7,0**	**7,5**	**8,0**	**1.407,7**			
Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan	*Berkembangnya industri antara baha baku hasil samping perikanan (industri)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*22,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	*Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan (Paket Kebijakan)*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*3,0*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan	*Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan (unit)*	*31,0*	*35,0*	*35,0*	*40,0*	*45,0*	*385,3*	*34 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan	*Jumlah sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan (unit)*	*41,0*	*41,0*	*41,0*	*45,0*	*50,0*	*171,9*	*34 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Sarana dan Prasarana pemasaran yang dibangun	*Jumlah pasar ikan yang dibangun (unit)*	*4,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*151,8*	*10 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
	Jumlah sentra kuliner yang dibangun (unit)	*2,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*0,0*			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	*Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun (unit)*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*450,0*	*3 Provinsi*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*KKP*
Keikutsertaan dalam promosi skala internasional	*Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)*	*250,0*	*275,0*	*300,0*	*325,0*	*350,0*	*63,7*	*5 negara*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	*Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen) (sertifikat)*	*2.250,0*	*2.500,0*	*2.750,0*	*3.000,0*	*3.250,0*	*54,6*	*34 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan (unit)*	*400,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*57,0*	*34 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	*Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste (lokasi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*34,4*	*5 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	*Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*200,0*	*13,3*	*34 Provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KKP*
ProP : Pengembangan industri Kimia, Farmasi dan Logam							**140.332,0**			
Alokasi Availability Payment KPBU Teluk Bintuni	*Jumlah Industri yang terbangun (Jumlah Industri)*			*1,0*	*1,0*	*1,0*	*825,0*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.54

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik	*Rasio impor bahan baku sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB sektor industri non migas (Persentase)*	*1,0*	*2,1*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*36,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pilot Project Produk Karet dalam rangka peningkatan utilisasi	*Jumlah Perusahaan Pilot Project (Perusahaan)*	*-*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*19,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	*Jumlah Industri yang Terbangun (Jumlah Industri)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*29,7*	*Pusat - Papua Barat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Pemanfaatan Limbah Sebagai Bahan Baku Industri Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	*Persentase Pemanfaatan Limbah sebagai Bahan Baku Industri Barang Galian Non Logam (Persentase)*	*20,0*	*22,5*	*25,0*	*27,5*	*30,0*	*17,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	*Jumlah industri antara sektro minuman, hasil tembakau dan bahany penyegar yang berkembang (industri)*		*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*7,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 -	*Tingkat utilisasi kapasitas produk (Persen)*	*75,0*	*80,0*	*85,0*	*90,0*	*95,0*	*25,3*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Ferronickel Stainless Steel							*11.139,2*			*Antam*
Konversi Batubara menjadi UDP							*74.075,7*			*Bukit Asam*
Rare Earth Element							*167,1*		*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Timah*
Pengembangan Pabrik NPK							*4.200,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.55

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pabrik Methanol							*12.400,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*
Pengembangan Pabrik Urea Senoro							*15.800,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*
Proyek Pabrik Soda Ash dan AIF2							*3.600,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*
Pabrik Asam Fosfat dan Asam Sulfat							*600,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*
Pabrik Ammonium Nitrat							*100,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Pupuk Indonesia*
Pabrik Semen Baturaja III Kapasitas 2,2 Juta Ton							*6.000,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Semen Baturaja*
Proyek Pabrik Insulin							*715,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Indofarma*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Proyek Fasilitas Pengembangan Produk skala pilot dan biosimilar (Trastuzumab)							*532,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Biofarma*
Proyek Fasilitas Yeast-Based (produksi bulk hepatitis B, insulin, HPV)							*126,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Biofarma*
Pengembangan Pabrik Wheelset Kereta Api							*35,0*			*Barata*
Pembangunan Pabrik Forging							*560,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Barata*
Penyertaan Pabrik AN Bontang							*270,0*			*Dahana*
Pembangunan Pabrik Elemented Detonator							*150,0*			*Dahana*
EDB, Composite, Rocket Motor (Fasell)							*7.700,0*			*Dahana*
Pengembangan Divisi Munisi, Alat Berat, Handakkom							*1.200,0*			*Pindad*
KP : Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	**Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)**	**5 KI - 8 KEK**	**9 KI - 8 KEK**	**12 KI - 8 KEK**	**15 KI - 8 KEK**	**16 KI - 8 KEK**	**370.385,2**			
ProP : Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi							**296.235,0**			
Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri	*Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)*	*3,0*	*27,0*	*27,0*	*27,0*	*27,0*	*21,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	*Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)*	*3,0*	*27,0*	*27,0*	*27,0*	*27,0*	*41,5*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	*Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (Unit)*	*1,0*	*4,0*	*7,0*	*10,0*	*13,0*	*460,0*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Jalan Trans Papua	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*109,5*	*109,5*	*89,5*	*89,5*	*89,5*	*5.123,6*	*Papua*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Trans Papua Barat	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*109,5*	*109,5*	*89,5*	*89,5*	*89,5*	*800,0*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*5,0*	*8,0*	*7,0*	*5,5*	*250,0*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*		*4,5*	*6,0*	*2,1*		*120,0*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Bandara Babo	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*38,1*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Bintuni	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*45,0*	*Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenhub*
Jalan akses KI Weda	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*25,0*	*275,0*	*Maluku Utara*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Bandara Weda	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*220,0*	*Maluku Utara*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenhub*
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*786,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.016,0*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*325,0*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*32,8*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI/KEK Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7,0*	*60,0*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*812,0*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenhub (PHLN)*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Mutiara	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*245,0*	*Sulawesi Tengah*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenhub*
Jalan Tol Maminasata	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*						*6.000,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Madura	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5,0*	*50,0*	*Jawa Timur*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemen PU&PERA*
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	*Luas lahan kawasan (ha)*	*50,0*	*50,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*384,8*	*Jawa Timur*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BPWS*
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*22,8*	*26,3*	*24,8*	*31,1*	*29,4*	*308,6*	*Jawa Timur*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BPWS*
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*180,0*	*Jawa Timur*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*BPWS*
Jalan Akses KI Brebes	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3,0*	*30,0*	*Jawa Tengah*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*			*5,0*	*5,0*		*80,0*	*Jawa Tengah*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Ketapang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*12,0*	*123,0*	*Kalimantan Barat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*250,0*	*Kalimantan Barat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenhub*
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*2,0*	*-*	*-*	*-*	*10,0*	*Kalimantan Barat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Surya Borneo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*10,0*	*Kalimantan Tengah*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (selesai)*	*3.001,4*	*Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Jalan Akses KI Jorong	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6,0*	*60,0*	*Kalimantan Selatan*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Batu Licin	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6,0*	*60,0*	*Kalimantan Selatan*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*-*	*1,0*	*-*	*-*	*45,0*	*Kalimantan Selatan*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenhub*
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*12,5*	*12,5*	*600,0*	*Kalimantan Utara*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*115,0*	*Kalimantan Utara*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.59

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	*Panjang jalan dibangun/ dipelihara (Km) (Km)*	*22,8 Km*	*26,3 Km*	*24,8 Km*	*31,1 Km*	*29,4 Km*	*308,6*	*Jawa Timur*		*BPWS*
Jalan akses KI Sadai	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*2,0*	*3,9*	*1,0*		*50,0*	*Bangka Belitung*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Trans Bangka	*Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)*						*100,0*	*Bangka Belitung*		*Kemen PU&PERA*
Jalan lintas Bintan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*25,0*	*-*	*250,0*	*Kepulauan Riau*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	*Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)*						*0,0*	*Kepulauan Riau*		*KemenPUPR (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*						*36,3*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Jalan Akses KEK Galang Batang I	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*1,8*	*-*	*-*	*-*	*11,8*	*Kepulauan Riau*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*						*75,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Jalan Akses KI Tanggamus	*Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)*					*2,0*	*20,0*	*Lampung*		*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KI Seimangke	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*10,0*	*30,0*	*Sumatera Utara*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25.000,0*	*Sumatera Utara*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta*
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk Linggau)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (Km)*	*8,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*6,0*	*438,8*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub*
Jalan akses KI Tanjung Enim	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*3,0*	*4,0*	*4,3*		*85,0*	*Sumatera Selatan*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (Km)*					*8,0*	*2.100,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub*
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	*Panjang jalan yang dibangun (km) (Km)*					*8,0*	*80,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemen PU&PERA*
Percepatan pembangunan smelter	*Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter (Kumulatif) (Unit Smelter)*	*4,0*	*30,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*23,5*	*Tersebar di Luar Pulau Jawa*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen ESDM*
Pecepatan hilirisasi mineral skala kecil	*Fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil (Unit Pengolahan)*	*32,0*	*39,0*	*51,0*	*42,0*	*41,0*	*5,0*	*Tersebar*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen ESDM*
Pembangunan smelter alumunium di Balungan	*Pembangunan smelter (Tahapan)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*12.196,2*	*Balungan, Kalimantan Utara*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*BUMN (PT.Antam-PT.Inalum)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan smelter tembaga di Gresik	*Pembangunan smelter (Tahapan)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement and Construction)*	*Operasional*	*-*	*38.938,8*	*Gresik, Jawa Timur*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta (PT.Freeport)*
PT Ketapang Bangun Sarana	*(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri dan Smelter Alumunium)*	*Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,5 Mtpa*	*Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,5 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 3,0 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 4,5 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 4,5 Mtpa*	*18.200,0*	*KI Ketapang*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
PT Bintan Alumina Indonesia	*(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri dan Smelter Alumunium)*	*Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa*	*Konstruksi Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa*	*Operasional Smelter Alumina Kapasitas 1,0 Mtpa*	*28.250,0*	*KI/KEK Galang Batang*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park	*(Pembangunan Infrastruktur Fisik KI, Smelter Nikel dan Pabrik Baterai)*	*Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan*	*Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan*	*Pembangunan Power Plant, Smelter FeNi dan infrastruktur kawasan*	*Pembangunan Smelter dan Pabrik Baterai*	*Pembangunan Smelter dan Pabrik Baterai*	*64.400,0*	*KI Teluk Weda*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
PT Surya Borneo Industri	*(Pembangunan Infrastruktur Fisik KI Surya Borneo)*						*2.070,0*	*KI Surya Borneo*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
PT Ration Bangka Abadi	*(Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Industri Aneka Industri)*						*5.000,0*	*KI Sadai*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
KPBU KI Teluk Bintuni	*(Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Pabrik Methanol)*			*Pembangunan infrastruktur kawasan*	*Pembangunan infrastruktur kawasan*	*Pembangunan infrastruktur kawasan*	*11.300,0*	*KI Teluk Bintuni*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*KPBU*
PT Bintan Inti Industrial Estate	*(Pembangunan infrastruktur Bintan Aerospace Park)*	*Pembangunan Runway Bintan Airport*	*Pembangunan Bandar Bintan*	*Pembangunan infrastruktur Aerospace*	*Pembangunan infrastruktur Aerospace*	*Pembangunan infrastruktur Aerospace*	*10.500,0*	*KI Bintan Aerospace*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
KI/KEK Sei Mangkei	*(Pembangunan Kawasan dan Investasi Tenant)*						*8.396,2*	*KI/KEK Sei Mangkei*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
KI/KEK Palu	*(Investasi Tenant)*						*276,3*	*KI/KEK Palu*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Swasta*
Konversi Batubara menjadi DMF							*46.900,0*			*Bukit Asam*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.61

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan nilai tambah							**74.150,2**			
Pengembangan Teknologi pembuatan logam neodymium (logam tanah jarang) dari monazite untuk bahan permanen magnet	*Pengembangan dan penelitian pembuatan strong magnet dari bahan baku monazite hingga rencangan skala komersial (Tahapan)*	*-*	*Penelitian Teknologi solvent ekstraksi pembuatan neodymium oksida*	*Pengembangan teknologi garam lebur dalam pembuatan logam neodymium*	*Penelitian pencampuran logam neodymium dengan boron dan besi untuk menjadi strong magnet permanen*	*Rancangan DED pembuatan strong magnet dari monazite skala komersial*	*11,0*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemen ESDM*
Teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil ,COG dan batubara kualitas tinggi	*Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial (Tahapan)*	*-*	*Pengadaan, perakitan, dan commisioning pilot plant pirolisis batubara di palimanan dengan kapasitas 25kg/jam*	*ujicoba formula produksi syncrude oil*	*ujicoba syncrude skala lab di Pertamina sebagai umpan kilang mini*	*desain scale up pirolisis batubara skala komersial dan pemanfaatan syncrude pada kilang pertamina (satu rancang bangun, 2 usulan paten)*	*9,8*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pengembangan katalis sintetik untuk proses konversi syngas batubara menjadi DME	*Pembuatan dan pengembangan katalis sintetik (Tahapan)*	*-*	*Pembuatan dan uji aktifitas Katalis*	*Optimalisasi Pembuatan dan uji aktifitas Katalis terpilih*	*scale up pemanfaatan katalis*	*-*	*8,5*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral	*Jumlah rekomendasi wilayah keprospekan mineral (Rekomendasi)*	*14,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*40,8*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung Kawasan Industri	*Jumlah dokumen studi kelayakan mineral untuk mendukung kawasan industri (Dokumen)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara	*Jumlah rekomendasi Sumber Daya batubara (Rekomendasi)*	*9,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*54,6*	*Pusat*		*Kemen ESDM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Gasifikasi Batubara Tanjung Enim	*Konversi Batubara menjadi Urea, Dimethyl Ether (DME), dan Polypropylene (Tahapan)*	*Front End Engineering Design (FEED)*	*Engineering Procurement Construction (EPC)*	*Engineering Procurement Construction (EPC)*	*Engineering Procurement Construction (EPC)*	*Operasional (500 kta Urea, 400 kta DME, 450 kta Polypropylene)*	*74.021,4*	*Tanjung Enim, Sumatera Selatan*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*BUMN (PT. Bukit Asam)*
KP : Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	**Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi)**	**5 (kumulatif)**	**10 (kumulatif)**	**10 (kumulatif)**	**10 (kumulatif)**	**10 (kumulatif)**	**175.879,7**			
	Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi)	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**				
	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas (Unit)	**25 (kumulatif)**	**25 (kumulatif)**	**25 (kumulatif)**	**25 (kumulatif)**	**25 (kumulatif)**				
	Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi)	**16 (kumulatif)**	**16 (kumulatif)**	**16 (kumulatif)**	**16 (kumulatif)**	**16 (kumulatif)**				
	Destinasi wisata bahari (Destinasi)	**6 (kumulatif)**	**6 (kumulatif)**	**6 (kumulatif)**	**6 (kumulatif)**	**6 (kumulatif)**				
ProP : Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	**Jumlah Destinasi wisata alam prioritas (Unit)**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**1.800,0**			
Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate)	*Jumlah Taman Nasional Laut (Unit)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*400,0*	*Taman Nasional (TN) Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KLHK, KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.63

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) = TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama)	*Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Unit)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*500,0*	*TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama)*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KLHK, Kemendikbud*
Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)	*Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Unit)*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*900,0*	*TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen LHK*
ProP : Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	**Destinasi Pariwisata (Destinasi Pariwisata Prioritas)**	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**169.582,0**			
	(Destinasi Pariwisata Pengembangan)	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**				
	(Revitalisasi Destinasi Bali)	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**				
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP)*	*2,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*33,0*	*Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.64

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan (DPP)*	*2,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*47,0*	*DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, kalimantan Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru (DPP)*	*4,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*65,0*	*Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Revitalisasi Bali	*Selesainya Revitalisasi Bali (Destinasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*5,0*	*Bali*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	*Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas (Destinasi)*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*9,0*	*29,4*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.65

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas	*Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas (Dokumen)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*21,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Market sounding di destinasi investasi	*Jumlah Market sounding di destinasi investasi (Event)*	*-*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*16,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	*Jumlah Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata (Rekomendasi Kebijakan)*	*-*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*21,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat	*Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat (Daerah)*	*-*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*8,4*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah	*Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah (Daerah)*	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*8,4*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	*Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)*	-	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*44,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayahTimur	*Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayahTimur (Daerah)*	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*8,4*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	*Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)*	-	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*44,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)	*Jumlah Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP) (Destinasi)*	*1,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*1,0*	*28,6*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	*Jumlah Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas (Lokasi)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*12,5*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata	*Jumlah Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata (Dokumen)*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*28,5*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)	*Jumlah Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage) (Dokumen)*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*5,0*	*-*	*29,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya	*Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya (Dokumen)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*3,0*	*23,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Penyusunan concept note Bidding MICE Internasional	*Jumlah Penyusunan concept note Bidding MICE Internasional (Dokumen)*	*6,0*	*10,0*	*12,0*	*15,0*	*18,0*	*61,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan	*Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan (Dokumen)*	*10,0*	*12,0*	*14,0*	*15,0*	*15,0*	*69,3*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Kajian Pengembangan Kepariwisataan	*Jumlah Kajian Pengembangan Kepariwisataan (Dokumen)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*15,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata	*Jumlah Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata (Dokumen)*	*-*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*2,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)*	*11,0*	*13,0*	*15,0*	*17,0*	*20,0*	*34,5*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas) (Taman Nasional Prioritas)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*8,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas) (Taman Nasional Prioritas)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*52,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	*Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas) (Taman Nasional Prioritas)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*84,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	*Panjang jalan yang dibangun (km) (km)*	-	-	-	-	*20,0*	*223,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*38 (berlanjut)*	*17 Selesai*	*90 (berlanjut)*	*90 (berlanjut)*	*90 (berlanjut)*	*3.007,3*	*pusat*		*Kemenhub*
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*24 (berlanjut)*	*24 (berlanjut)*	*1.010,0*	*pusat*		*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.70

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*24 (berlanjut)*	*24 (berlanjut)*	*1.010,0*	*pusat*		*Kemenhub (KPBU)*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*100,0*	*56,0*	*-*	*-*	*-*	*209,6*	*pusat*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*91,0*	*20,0*	*20,0*	*30,0*	*53,0*	*699,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*65,0*	*60,0*	*70,0*	*70,0*	*60,0*	*908,2*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	*KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)*	*2,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7,5*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.71

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*13 (berlanjut)*	*13 (berlanjut)*	*13 (selesai)*	-	-	*240,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	-	-	-	*10 (berlanjut)*	*10 (selesai)*	*300,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*10.000,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta*
Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*13,2*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.72

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	*Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)*	*60,0*	-	-	-	-	*600,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*150,1*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*85,0*	*Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3,0*	*3,0*	-	-	*45,0*	*Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.73

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*176,0*	*Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	-	*3,8*	-	-	*19,0*	*Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Bandara Sukabumi	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*400,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Jalan Akses KSPN Borobudur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*20,0*	-	-	-	*175,0*	*Yogyakarta*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*6 (berlanjut)*	*6 (selesai)*	-	-	-	*800,0*	*yogyakarta*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.74

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Kulon Progo	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*200,0*	*Yogyakarta*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*300,0*	*Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN*
Jalan Lintas Utara Bali	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*1.083,0*	*1.083,0*	*933,0*	-	*1.050,0*	*Bali*		*Kemen PU&PERA*
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3,0*	*2,3*	*5,0*		*215,0*	*Bali*		*Kemen PU&PERA*
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1,0*	-	-	-	*80,0*	*Bali*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	-	-	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*325,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	-	-	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*2.770,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Benoa	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*184,0*	*Bali*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*150,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Bali Baru	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.500,0*	*Bali*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*900,0*	*Bali*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BUMN*
Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Padangbai	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*3 (berlanjut)*	*3 (berlanjut)*	*3 (selesai)*	*-*	*255,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pengembangan Dermaga di Danau Batur	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*45,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*0,0*	*Sumatera Selatan*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KemenPUPR (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.76

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan By Pass Balige	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7,0*	*6,5*	*-*	*-*	*-*	*135,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Danau Toba	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5,0*	*16,5*	*12,5*	*12,5*	*12,5*	*1.333,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses Terminal Tipe A	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*1,5*	*-*	*36,0*	*Sumatera Barat*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*305,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*1.105,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.77

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Kualanamu	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*200,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Silangit	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	-	*1,0*	-	-	-	*100,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Bandara Sibisa	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*124,2*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*7 (berlanjut)*	*7 (selesai)*		-	-	*295,3*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.78

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Trans Bangka	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*10,0*	*12,0*	*16,0*	*12,0*	*350,0*	*Bangka Belitung*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Trans Belitung	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5,0*	*8,0*	*10,0*	*7,0*	*210,0*	*Bangka Belitung*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*120,0*	*Bangka Belitung*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Bangka Belitung*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.79

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Bangka Belitung*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*10,0*	*12,0*	*80,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemen PU&PERA*
Jalan lintas Bintan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*25,0*	-	*250,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemen PU&PERA*
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1,0*	-	-	-	*0,0*	*Kepulauan Riau*		*KemenPUPR (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*36,3*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*90,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Dompak	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*50,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Tambelan	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*62,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Natuna	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*49,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Jembatan Muna-Buton (Potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1,0*	-	*0,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.80

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses KSPN Wakatobi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*30,0*	*225,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*4,0*	*5,0*	*4,3*		*120,0*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KPBU*
Jembatan Kapota (Wakatobi)	*Jembatan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*1,0*	*250,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*3,0*	-	*72,0*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.81

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Trans Pulau Buton (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3,4*	*5,0*	*4,8*	*4,7*	*4,4*	*279,7*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KemenPUPR/Pemda*
Jalan Trans Pulau Muna (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5,3*	*7,8*	*7,5*	*7,3*	*6,9*	*436,8*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KemenPUPR/Pemda*
Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*244,3*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Wanci	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*90,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.82

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Likupang	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1,0*	-	-	-	-	*7,5*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1,0*	-	-	-	-	*5,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Hasanuddin	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*250,0*	*Kota Makassar-Sulawesi Selatan*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*288,2*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.83

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Sulawesi Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.84

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*30,0*	*Sulawesi Tenggara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Jalan perbatasan Kalbar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*12,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*98,4*	*Kalimantan Barat*		*Kemen PU&PERA*
Jembatan Sambas Besar	*jembatan yang dibangun (lokasi)*					*1,0*	*1.860,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*200,0*	*Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*115,0*	*Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Maratua	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*75,0*	*Prov. Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,5*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Prov. Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Temajuk	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*50,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*				*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*30,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Penanganan Jalan lingkar Nunukan	*Panjang Jalan lingkar yang dibangun/ditingkatkan (Km)*	*-*	*-*	*10,0*	*-*	*-*	*80,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*2,0*	*-*	*-*	*-*	*10,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	*Bandara baru yang dibangun (Lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.000,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.85

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Lingkar Pulau Morotai (Dukungan DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*14,0*	*9,7*	*9,7*	*9,7*	*-*	*422,8*	*Maluku Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*47,0*	*Maluku Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km) (km)*	*12,9*	*18,9*	*18,2*	*17,6*	*16,6*	*1.054,4*	*Papua*		*Kemen PU&PERA*
Pengembangan Pelabuhan Sorong	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (Lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30.000,0*	*Papua Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta*
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (Lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*30,0*	*Papua Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.86

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)*	*1,0*	-	-	-	-	*0,8*	*Papua Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (Lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Papua Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Papua Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*
Jalan Bypass BIL-Mandalika	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*17,4*	*10,2*	*11,2*	*12,6*	*1.392,0*	*Nusa Tenggara Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.87

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	*Panjang jalan yang dibangun (km) (km)*	*6,7*	*21,4*	*21,4*	*21,4*	*21,4*	*1.402,2*	*Nusa Tenggara Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PU&PERA*
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*4,5*	*4,0*	*5,0*	*4,2*	*150,0*	*Nusa Tenggara Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*KemenPUPR (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*28,5*	*Nusa Tenggara Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*150,0*	*Nusa Tenggara Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub*

A.1.88

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Lombok	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (Lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*350,0*	*Nusa Tenggara Barat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenhub, BUMN*
Investasi amenitas dan atraksi dalam kawasan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas	*Jumlah investasi amenitas dan atraksi dalam kawasan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Destinasi Pariwisata Prioritas)*	*3,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*10,0*	*94.208,2*	*10 DPP*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Swasta*
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	*Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata (Provinsi)*	*11,0*	*11,0*	*19,0*	*19,0*	*34,0*	*2,0*	*Pusat (alokasi Kementerian)*		*Kemendagri*
ProP : Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata							**788,4**			
Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	*Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah (Daerah)*	*-*	*10,0*	*20,0*	*34,0*	*34,0*	*49,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.89

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	*Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha (Kerjasama)*	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*4,0*	*19,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja	*Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja (Kerjasama)*	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*4,0*	*19,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	*Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (Kerjasama)*	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*4,0*	*19,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata	*Jumlah Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata (Jenis usaha)*	*10,0*	*15,0*	*17,0*	*10,0*	*10,0*	*27,9*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	*Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (Ruang Lingkup)*	*2,0*	*5,0*	*8,0*	*6,0*	*6,0*	*13,5*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	*Jumlah Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata (Dokumen)*	*1,0*	-	-	-	-	*1,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	*Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata (Kerjasama)*	-	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*26,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata (Sistem Informasi)*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*20,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat	*Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat (Orang)*	*-*	*500,0*	*750,0*	*1.000,0*	*1.250,0*	*10,5*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Assesor yang dilatih	*Jumlah Assesor yang dilatih (Orang)*	*1.000,0*	*1.500,0*	*2.000,0*	*1.750,0*	*1.500,0*	*77,5*	*pusat*		*Kemenparekraf*
SDM Tersertfikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata	*Jumlah SDM Tersertfikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata (Orang)*	*104.000,0*	*130.000,0*	*136.500,0*	*102.375,0*	*81.900,0*	*388,5*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata (Orang)*	*11.800,0*	*11.800,0*	*12.390,0*	*9.912,0*	*9.416,4*	*117,4*	*pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata							**3.613,2**			
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	*Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas (Daerah)*	*-*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*44,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	*Jumlah Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Potensial Investor)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*10,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.91

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	*Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Lokasi)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*1.629,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	*Jumlah Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Pasar Wisatawan)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*45,0*	*Sumatera Utara*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur	*Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur (Potensial Investor)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*15,0*	*DI Yogyakarta, Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur	*Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur (Lokasi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*693,5*	*DI Yogyakarta, Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.92

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur	*Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur (Pasar Wisatawan)*	*2,0*	*2,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*32,0*	*DI Yogyakarta, Jawa Tengah*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo	*Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo (Potensial Investor)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*3,7*	*Nusa Tenggara Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo	*Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo (Lokasi)*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*960,0*	*Nusa Tenggara Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo	*Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo (Pasar Wisatawan)*	*3,0*	*3,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*35,0*	*Nusa Tenggara Timur*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan	*Jumlah Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan (Dokumen)*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*42,0*	*pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	*Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan (Dokumen)*	*-*	*8,0*	*8,0*	*4,0*	*4,0*	*48,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan	*Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan (Dokumen)*	*-*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*56,0*	*pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark							**96,2**			
Pusat informasi Geopark	*Jumlah pusat informasi Geopark/ Geologi (Unit)*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*3,0*	*3,0*	*51,0*	*Geopark Kaldera Toba, Geopark Natuna, Geopark Silokek, Geopark Ngarai Sianok, Geopark Sawahlunto, Geopark Belitong, Geopark Pongkor, Geopark Cileteuh Pelabuhan Ratu, Geopark Karangsambung, Geopark Gunung Sewu, Geopark Banyuwangi, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, Geopark Maros-Pangkep, Geopark Raja Ampat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen ESDM*
Rekomendasi Penetapan Geoheritage	*Jumlah Rekomendasi Penetapan Geoheritage (Rekomendasi)*	*-*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*10,2*	*Pusat*		*Kemen ESDM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	*(Unit)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*10,0*	*Tersebar (16 Geopark dalam DPP)*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark	*Jumlah Fasilitasi Pengembangan Geopark (Geopark)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*15,0*	*Pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemen PPN/Bappenas*
Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	*Alternatif Pendanaan Pengembangan Geopark (Skema)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*10,0*	*Pusat*		*Kemen PPN/Bappenas*
KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	**Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)**	**5,3**	**5,34-5,5**	**5,38-5,7**	**5,42-5,9**	**5,45-6,10**	**100.326,6**			
	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (Kab/kota)	**7,26-7,54**	**7,40-7,95**	**7,40-8,22**	**7,54-8,37**	**7,54-8,78**				
	Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (Kab/kota)	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,0**	**3,0**				
	Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan (Lokasi)	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**11,0**				
	Revitalisasi ruang kreatif (Unit)	**30,0**	**31,5**	**34,0**	**31,0**	**27,0**				
	Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**				
ProP : Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand							**77,2**			
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/Pusat)	*Jumlah Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/pusat)*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*77,2*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI							**213,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	*Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)*	*4.650,0*	*4.850,0*	*5.250,0*	*4.650,0*	*4.450,0*	*77,5*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	*Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/Jasa) (Produk/jasa)*	*2.500,0*	*2.650,0*	*2.950,0*	*2.400,0*	*2.300,0*	*110,4*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	*Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha) (Orang/usaha)*	*200,0*	*220,0*	*245,0*	*195,0*	*165,0*	*25,7*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Fasilitasi Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan							**142,7**			
Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)	*Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (Kerjasama)*	*25,0*	*30,0*	*35,0*	*20,0*	*15,0*	*142,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif							**321,3**			
Kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	*Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (Kab/kota)*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*3,0*	*3,0*	*51,3*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi Cultural Heritage Regeneration	*Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif (Lokasi)*	*-*	*25,0*	*30,0*	*25,0*	*20,0*	*270,0*	*Pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
ProP : Pengembangan 'start-up parks' dan Center of Excellence							**138,6**			
Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)	*Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (Kerjasama)*	*5,0*	*6,0*	*6,0*	*4,0*	*4,0*	*138,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif							**784,2**			
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	*Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi (Orang)*	*8.500,0*	*9.000,0*	*10.100,0*	*8.500,0*	*7.500,0*	*274,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Unit)*	*4,0*	*5,0*	*7,0*	*4,0*	*3,0*	*41,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.97

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi (khususnya di lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif)	*Jumlah Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi (Unit)*	*30,0*	*31,5*	*34,0*	*31,0*	*27,0*	*419,9*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kebijakan)*	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*3,0*	*2,0*	*49,3*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)							**98.649,0**			
Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (Unit)*	*4,0*	*5,0*	*7,0*	*4,0*	*3,0*	*41,1*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi (Orang)*	*11.200,0*	*11.500,0*	*12.000,0*	*11.400,0*	*11.200,0*	*258,2*	*Pusat*	*10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*Kemenparekraf*
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)*	*5.000,0*	*5.400,0*	*5.875,0*	*5.300,0*	*5.000,0*	*131,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	*Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi (Miliar)*	*255,0*	*270,0*	*320,0*	*240,0*	*220,0*	*255,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.98

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	*Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)*	*1.700,0*	*1.800,0*	*2.000,0*	*1.650,0*	*1.550,0*	*38,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	*Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif (Miliar)*	*5.082,0*	*5.225,0*	*5.650,0*	*5.150,0*	*4.900,0*	*128,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan (Orang)*	*1.500,0*	*1.600,0*	*1.750,0*	*1.450,0*	*1.350,0*	*46,2*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI	*Jumlah Skemapembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan (Naskah)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*33,4*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	*Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi (Orang)*	*8.500,0*	*9.000,0*	*10.100,0*	*8.500,0*	*7.500,0*	*274,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Enterpreneurship, Pemagangan Internasional)	*Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi (Orang/ komunitas)*	*250,0*	*384,8*	*400,0*	*372,7*	*363,6*	*116,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	*Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)*	*4.650,0*	*4.850,0*	*5.250,0*	*4.650,0*	*4.450,0*	*77,5*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.99

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	*Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/Jasa) (Produk/jasa)*	*2.500,0*	*2.650,0*	*2.950,0*	*2.400,0*	*2.300,0*	*110,4*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	*Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha) (Orang/usaha)*	*200,0*	*220,0*	*245,0*	*195,0*	*165,0*	*25,7*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	*Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi (Produk/usaha)*	*250,0*	*270,0*	*330,0*	*230,0*	*200,0*	*41,1*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)	*Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (Kerjasama)*	*25,0*	*30,0*	*35,0*	*20,0*	*15,0*	*142,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pengembangan Be Creative District (BCD)	*Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) dikembangkan (Kawasan)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*445,0*	*Jawa Barat dan Banten*		*Kemenparekraf*
Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)	*Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (Kerjasama)*	*5,0*	*6,0*	*6,0*	*4,0*	*4,0*	*138,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	*Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik) (m3/detik)*	*1,1*	*2,0*	*2,3*	*2,3*	*2,1*	*3.320,8*	*Maja*		*Kemen PU&PERA*
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis KEK BCD Maja-Rangkas Bitung, KEK BCD Karawang (m3/detik) (m3/detik)*	*-*	*0,6*	*0,6*	*0,7*	*0,7*	*856,7*	*KEK BCD Maja-Rangkas Bitung, KEK BCD Karawang*		*Kemen PU&PERA*
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	*Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (PDAM)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*12,0*	*Maja*		*KPBU*
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai); 15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*800,0*	*Banten*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.100

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung-Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	*Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (Km)*	*-*	*17 (berlanjut)*	*17 (berlanjut)*	*17 Selesai*	*20 (berlanjut)*	*900,0*	*Banten*		*Kemenhub*
Pembangunan infrastruktur dalam kawasan BCD		*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*90.000,0*	*Jawa Barat dan Banten*		*BUMN dan Swasta*
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	*Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi (Orang)*	*1.500,0*	*2.000,0*	*2.100,0*	*2.205,0*	*2.315,0*	*50,6*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	*Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan (Orang)*	*5.000,0*	*5.250,0*	*5.513,0*	*5.788,0*	*6.078,0*	*150,7*	*34 Provinsi*		*KemenNaker*
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	*Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri (rencana investasi)*	*(Rp 1.022,8 Triliun)*	*(Rp 1.125,1 Triliun)*	*(Rp 1.237,6 Triliun)*	*(Rp 1.361,3 Triliun)*	*(Rp 1.497,4 Triliun)*	*47,6*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	*Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri (minat investasi)*	*350,0*	*450,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*40,7*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Gerakan menuju Smart City	*Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif) (Kab/kota)*	*40,0*	*70,0*	*100,0*	*125,0*	*150,0*	*18,5*	*Tersebar*		*Kemen Kominfo*
Digital technopreuner	*Jumlah startup aktif yang terbentuk (start-up)*	*30,0*	*60,0*	*90,0*	*120,0*	*150,0*	*140,5*	*Tersebar*		*Kemen Kominfo*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.101

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi startup menjadi unicorn	*Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif) (unicorn)*	*-*	*-*	*1,0*	*2,0*	*3,0*	*6,1*	*Tersebar*		*Kemen Kominfo*
KP : Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	**Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: -jumlah prosedur -waktu (Ranking EoDB)**	**menuju 40 -**	**menuju 40 -**	**menuju 40 -**	**menuju 40 -**	**menuju 40 5 prosedur 4 hari**	**1.573,3**			
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp triliun)	**886,0**	**991,3**	**1128,3**	**1294,1**	**1.500,0**				
	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	**47,4**	**47,8**	**48,3**	**48,9**	**49,5**				
	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	**246,3**	**316,3**	**422,2**	**573,2**	**782**				
	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	**45,6**	**46,2**	**47,4**	**48,5**	**49,67**				
	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	**bertahap**	**bertahap**	**bertahap**	**bertahap**	**Selesai**				
ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi							**394,9**			
Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	*Jumlah usulan standard tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah (dokumen usulan standard)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*5,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

A.1.102

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem informasi standardisasi NSPK perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	*Jumlah usulan standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah (dokumen usulan standard)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*4,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	*Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha (usulan rekomendasi)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*13,4*	*Jakarta, Surabaya, Pusat*		*BKPM*
Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi	*Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (usulan rekomendasi)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*22,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah	*Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi (usulan rekomendasi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*6,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.103

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan Persaingan Usaha	*Jumlah kajian pengawasan persaingan usaha (kajian)*	*7,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*15,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah	*Jumlah pengawasan pelaku usaha di daerah (pengawasan)*	*18,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*24,0*	*8,5*	*Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel*		*KPPU*
Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha	*Jumlah investigasi pelanggaran persaingan usaha (dugaan pelanggaran)*	*100,0*	*117,0*	*137,0*	*157,0*	*177,0*	*36,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah	*Jumlah rekomendasi perkara persaingan usaha di daerah (perkara)*	*36,0*	*36,0*	*40,0*	*46,0*	*46,0*	*17,6*	*Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel*		*KPPU*
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	*Jumlah laporan pemberkasan perkara persaingan usaha (perkara)*	*32,0*	*25,0*	*25,0*	*30,0*	*30,0*	*11,1*	*Pusat*		*KPPU*
Penilaian Merger dan Akuisisi	*Jumlah penilaian merger dan akuisisi (penilaian)*	*39,0*	*38,0*	*42,0*	*46,0*	*50,0*	*16,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Penanganan Perkara Persaingan Usaha	*Jumlah persidangan majelis dan penetapan/putusan perkara persaingan usaha (perkara)*	*45,0*	*47,0*	*50,0*	*52,0*	*55,0*	*58,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrologian	*Jumlah pejabat fungsional bidang kemetrologian yang diberikan pembinaan (orang)*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*400,0*	*3,1*	*Jawa Barat*		*Kemendag*
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label	*Jumlah pengawasan barang beredar terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label (produk)*	*660,0*	*670,0*	*680,0*	*690,0*	*700,0*	*34,8*	*Pusat*		*Kemendag*
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	*Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang diberikan pembinaan (orang)*	*115,0*	*115,0*	*115,0*	*115,0*	*115,0*	*17,7*	*Jawa Barat*		*Kemendag*
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	*Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang diberikan pembinaan (orang)*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*26,3*	*Jawa Barat*		*Kemendag*
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	*Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi (pelaku usaha)*	*150,0*	*160,0*	*170,0*	*180,0*	*190,0*	*34,2*	*Pusat*		*Kemendag*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan Perkara Merger dan Akuisisi	*Jumlah dugaan perkara merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti (perkara)*		*6,0*	*8,0*	*9,0*	*10,0*	*2,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	*Jumlah penuntutan perkara persaingan usaha (perkara)*		*19,0*	*21,0*	*23,0*	*25,0*	*23,2*	*Pusat*		*KPPU*
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	*Jumlah laporan litigasi perkara persaingan usaha (perkara)*		*12,0*	*14,0*	*16,0*	*18,0*	*7,7*	*Pusat*		*KPPU*
Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen	*Jumlah SDM LPK yang dibina (Orang)*	*330,0*	*330,0*	*330,0*	*330,0*	*330,0*	*21,5*	*Pusat*		*Kemendag*
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	*Jumlah Pengawasan (Pelaku Usaha)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*5,9*	*Pusat*		*Kemendag*
ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi							**1.018,3**			
Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	*Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ Annual Technical Support (ATS) (paket)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*109,9*	*Pusat*		*BKPM*
Pengembangan Data Center dan DRC yang mendukung OSS	*Jumlah pengembangan data center, DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal (paket)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*109,0*	*Pusat*		*BKPM*
Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal PTSP Pusat	*Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat (IKM dari skala 4)*	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*6,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Partisipasi dalam kerjasama internasional	*Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama Internasional (partisipasi)*	*14,0*	*23,0*	*24,0*	*24,0*	*25,0*	*22,1*	*Pusat*		*BKPM*
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	*Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal (bahan posisi)*	*14,0*	*23,0*	*24,0*	*24,0*	*25,0*	*3,2*	*Pusat*		*BKPM*
Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha	*Jumlah kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri (MoU)*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*6,0*	*4,2*	*Pusat*		*BKPM*
Penyelenggaraan fasilitasi minat outward investment	*Jumlah forum fasilitasi minat outward investment kepada perusahaan nasional (perusahaan)*	*15,0*	*15,0*	*18,0*	*18,0*	*20,0*	*4,4*	*Pusat*		*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.105

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	*Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi (peta potensi daerah)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*19,9*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di Luar Negeri	*Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri (minat investasi)*	*1.850,0*	*1.850,0*	*1.850,0*	*1.850,0*	*1.850,0*	*246,3*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Penyusunan analisis negara target dan negara pesaing	*Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (kajian)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*11,4*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;* *10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.106

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	*Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri (rencana investasi)*	*(Rp 1.022,8 Triliun)*	*(Rp 1.125,1 Triliun)*	*(Rp 1.237,6 Triliun)*	*(Rp 1.361,3 Triliun)*	*(Rp 1.497,4 Triliun)*	*47,6*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	*Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri (minat investasi)*	*350,0*	*450,0*	*500,0*	*500,0*	*500,0*	*40,7*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Keikutsertaan Pada Pameran Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah minat investasi yang dicapai melalui keikutsertaan pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri (minat investasi)*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*700,0*	*28,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.107

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	*Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I (perusahaan)*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*8,1*	*Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	*Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II (perusahaan)*	*33,0*	*41,0*	*44,0*	*47,0*	*50,0*	*8,0*	*Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	*Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III (perusahaan)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*7,7*	*Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	*Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV (perusahaan)*	*30,0*	*33,0*	*36,0*	*39,0*	*42,0*	*12,9*	*Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*

A.1.108

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	*Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi (proyek)*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*2,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Evaluasi Rencana Strategis BKPM	*Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM (dokumen evaluasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*		*2,3*	*Pusat*		*BKPM*
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	*Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya (profil proyek)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*12,5*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Fasilitasi rencana penanaman modal di bidang industri manufaktur	*Jumlah Proyek di Sektor Industri Manufaktur yang terfasilitasi (proyek)*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*3,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BKPM*
Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah	*Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (kegiatan)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*5,0*	*5,0*	*6,1*	*Daerah di 34 Provinsi*		*BKPM*
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)	*Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota (daerah)*	*20,0*	*24,0*	*28,0*	*32,0*	*36,0*	*2,8*	*Daerah di 34 Provinsi*		*BKPM*
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	*Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur (profil proyek)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*6,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.109

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	*Jumlah Proyek Prioritas Pemerintah yang Terfasilitasi (proyek)*	*7,0*	*8,0*	*9,0*	*10,0*	*10,0*	*17,1*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	*Jumlah Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan (kawasan)*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*2,9*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	*jumlah Fasilitasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (proyek)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*10,6*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Fasilitasi rencana investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	*Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU (proyek)*	*5,0*	*7,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*11,9*	*Pusat*		*BKPM*

A.1.110

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	*Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur (proyek)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*7,9*	*Pusat*		*BKPM*
Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur 2020-2024	*Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur (kajian)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*5,3*	*Pusat*		*BKPM*
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	*Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur (profil proyek)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*14,1*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*BKPM*
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SOP)*	*8,0*	*10,0*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*14,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Pusat dan Daerah (KL/D)*	*100,0*	*150,0*	*200,0*	*250,0*	*300,0*	*20,8*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

A.1.111

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*39,5*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (KL/D)*	*100,0*	*150,0*	*200,0*	*250,0*	*300,0*	*44,0*	*Daerah di 34 Provinsi*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Analisa dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah	*Jumlah kajian analisa kebijakan persaingan (kajian)*	*7,0*	*9,0*	*9,0*	*11,0*	*11,0*	*15,0*	*pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Advokasi Persaingan Usaha	*Jumlah advokasi persaingan usaha (advokasi)*	*15,0*	*15,0*	*16,0*	*17,0*	*18,0*	*10,9*	*pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	*Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan nilai persaingan usaha sehat (kebijakan daerah)*	*18,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*24,0*	*19,0*	*Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Fasilitasi Investasi pada Sektor Industri Barang Galian Non Logam	*Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi (Perusahaan)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*17,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	*Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti (Rekomendasi)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*24,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Harmonisasi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor dan Investasi	*Jumlah Kebijakan yang Diharmonisasikan (Jumlah Kebijakan)*	*-*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*11,9*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penyusunan dan Monitoring Surat Saran	*Jumlah surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L/D (surat saran pertimbangan)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*0,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*KPPU*
Penyusunan bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	*Jumlah bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment (paket)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*2,5*	*Pusat*		*BKPM*
ProP : Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial							**160,1**			
Perusahaan yang mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah	*Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan (perusahaan)*	*500,0*	*700,0*	*1.000,0*	*1.200,0*	*1.500,0*	*27,4*	*34 provinsi*		*KemenNaker*
Perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	*Jumlah perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3 (perusahaan)*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*5.000,0*	*50,7*	*34 provinsi*		*KemenNaker*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	*Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja (perusahaan)*	*8.000,0*	*8.400,0*	*8.820,0*	*9.261,0*	*9.724,1*	*62,0*	*34 provinsi*		*KemenNaker*
Koordinasi Kebijakan Cipta Lapangan Kerja	*Ditetapkannya Undang - undang dan Naskah Akademik UU Cipta Lapangan Kerja (UU / Naskah Akademik)*	*1 UU dan 1 Naskah Akademik*	*-*	*-*	*-*	*-*	*15,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
	Terselesaikannya Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Peraturan Perundang-undangan)	*15,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Paket Rekomendasi)	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*0,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	*Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*5,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
KP : Pengembangan industri halal	**Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**75,7**			
ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal							**75,7**			
Fasilitasi Kawasan Industri Tematik	*Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
Daerah Tertib Ukur	*Jumlah Daerah Tertib Ukur (Daerah Tertib Ukur)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*16,2*	*Pusat*		*Kemendag*
Pengawasan Kemetrologian	*Pengawasan Kemetrologian (Unit)*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*15.000,0*	*55,6*	*Pusat*		*Kemendag*
PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	**Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)**	**3,9**	**4,2**	**4,8**	**5,5**	**6,2**	**12.112,3**			
	Neraca perdagangan barang (USD miliar)	**0,3**	**1,0**	**3,0**	**7,5**	**15,0**				
	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	**21,0**	**23,0**	**25,0**	**27,5**	**30,0**				
KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	**Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)**	**9-10**	**9-10**	**9-10**	**9-10**	**9-10**	**650,7**			
	Ekspor hasil pertanian (US$ juta)	**30.305,03**				**33.327,1**				
	Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	**6,2**	**6,6**	**7,1**	**7,7**	**8,24**				
	Kontribusi ekspor industri pengolahan (Persen)	**76,0**	**76,5**	**77,0**	**77,5**	**78,0**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (Persen)	**10,8**	**11,4**	**11,9**	**12,5**	**13,0**				
	Pertumbuhan ekspor non migas (Persen)	**5,2**	**6,3**	**7,2**	**8,5**	**9,8**				
	Rasio ekspor jasa terhadap PDB (Persen)	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,9**	**3,0**				
	Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	**2,4**	**2,6**	**2,9**	**3,2**	**3,5**				
ProP : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa							**139,3**			
Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit	*Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)*	*1,0*					*1,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO	*Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)*		*1,0*				*1,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ILO	*Tersusunnya dokumen business plan (Dokumen)*			*1,0*			*1,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur	*Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)*	*20,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*24,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi	*Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi (IKM (Kumulatif))*	*6,0*	*20,0*	*30,0*	*50,0*	*80,0*	*28,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.115

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKMKimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	*Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)*	*20,0*	*30,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*24,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	*Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan (IKM)*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*24,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor	*(KUMKM)*	*400,0*	*500,0*	*525,0*	*551,0*	*579,0*	*32,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*
ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa							**511,4**			
Layanan Pengujian Mutu Barang	*Jumlah contoh/ sampel yang diuji mutu barang (Contoh)*	*4.500,0*	*4.600,0*	*4.700,0*	*4.800,0*	*4.900,0*	*57,4*	*DKI Jakarta*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	*Jumlah pejabat fungsional penguji mutu barang yang diberikan pembinaan (orang)*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*12,2*	*DKI Jakarta*		*Kemendag*
Pemantauan Mutu BOKOR	*Jumlah pemantauan mutu bokor (Komoditi)*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*9,0*	*10,0*	*15,1*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Layanan Kalibrasi	*Jumlah sertifikat/ sampel yang diuji layanan kalibrasi (Sertifikat)*	*7.100,0*	*7.120,0*	*7.140,0*	*7.160,0*	*7.180,0*	*20,3*	*DKI Jakarta*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.116

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Sertifikasi	*Jumlah layanan sertifikasi (Sertifikat)*	*169,0*	*179,0*	*189,0*	*199,0*	*209,0*	*13,1*	*DKI Jakarta*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	*Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC (Produk)*	*70,0*	*80,0*	*90,0*	*100,0*	*110,0*	*55,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	*Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk (Produk)*	*50,0*	*60,0*	*70,0*	*80,0*	*90,0*	*16,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan (Produk)*	*25,0*	*30,0*	*35,0*	*40,0*	*45,0*	*50,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	*Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor (Angkatan)*	*119,0*	*124,0*	*129,0*	*134,0*	*139,0*	*70,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Export Coaching Program	*Jumlah peserta export coaching program (Peserta)*	*125,0*	*150,0*	*175,0*	*200,0*	*225,0*	*26,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	*Jumlah fasilitasi kebijakan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan (Paket)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*26,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	*Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat (UKM)*	*500,0*	*550,0*	*600,0*	*650,0*	*700,0*	*99,4*	*Pusat*		*Kemendag*
Kebijakan Ekspor Produk Industri	*Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri (Permendag)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*10,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi	*Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk industri dan pertambangan (Paket)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*26,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	*Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Nomor Pendaftaran)*	*7.500,0*	*7.500,0*	*7.500,0*	*7.500,0*	*7.500,0*	*11,5*	*DKI Jakarta*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
KP : Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	**Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)**	**219,0**	**220,0**	**221,0**	**222,0**	**223,0**	**2.343,6**			
	Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen)	**0,8**	**1,3**	**1,8**	**2,3**	**2,8**				
	Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)	**3,0**	**3,3**	**3,6**	**3,9**	**4,2**				
ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia							**975,7**			
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri (Pusat promosi)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*40,9*	*Sydney, Jeddah, Lagos, Hongkong, Skow, Nunukan, Atambua*		*Kemendag*
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama	*Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama (Laporan Intel Bisnis)*	*6,0*	*10,0*	*15,0*	*20,0*	*25,0*	*41,4*	*Pusat*		*Kemendag*
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	*Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur (Laporan Intel Bisnis)*	*4,0*	*7,0*	*10,0*	*15,0*	*20,0*	*27,9*	*Pusat*		*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.118

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Ofline	*Jumlah export helpdesk (Kegiatan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*19,5*	*Pengumpulan data dilakukan di daerah(Jateng, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku)*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Pengembangan market place berorientasi ekspor	*Jumlah Layanan Market Place (Market Place)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*25,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	*Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama (Kegiatan promosi)*	*11,0*	*15,0*	*20,0*	*25,0*	*30,0*	*101,0*	*Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	*Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur (Kegiatan promosi)*	*4,0*	*10,0*	*15,0*	*20,0*	*25,0*	*138,8*	*Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Kegiatan Pencitraan	*Jumlah kegiatan pencitraan (Kegiatan)*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*27,5*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	*Jumlah Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*67,1*	*Jakarta, Surabaya*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.119

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	*Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor (MOU)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*12,6*	*Swiss, Amerika Serikat, RRT, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	*Jumlah kerjasama pengembangan ekspor (Pelaku usaha)*	*750,0*	*770,0*	*790,0*	*810,0*	*830,0*	*16,8*	*Jateng, Jatim, Kaltim, Sumut, Sumsel, Bali*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa	*Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa (Rekomendasi)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*3,2*	*Jabar, Banten*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	*Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama (Kegiatan)*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*7,0*	*Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar, Yogya, Jatim*		*Kemendag*
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	*(Submisi)*	*29,0*	*31,0*	*33,0*	*35,0*	*37,0*	*54,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	*Jumlah informasi standar mitra tujuan ekspor (Mitra)*	*10,0*	*11,0*	*12,0*	*13,0*	*14,0*	*4,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	*Jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar (Submisi)*	*29,0*	*31,0*	*33,0*	*35,0*	*37,0*	*54,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Buyer Inquiry	*Jumlah buyer inquiry (inquiry)*	*9,0*	*12,0*	*15,0*	*18,0*	*21,0*	*75,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.120

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Market Intelligence dan Co Working Space di Pasar Potensial	*Jumlah Market Intelligence dan Co Working Space (Paket)*	*21 Martel dan 5 Co Working Space*	*22 Martel dan 6 Co Working Space*	*23 Martel dan 7 Co Working Space*	*24 Martel dan 8 Co Working Space*	*25 Martel dan 9 Co Working Space*	*168,0*	*Canberra, Sydney, Singapore, KL, Bangkok, Manila, Hanoi, Hongkong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Seoul, Busan, Osaka, Tokyo, Chenai, New Delhi, Dubai, Riyadh, Jedah, Kairo, Johanesburg, Lagos, Moscow, Budapest, Roma, Barcelona, Madrid, Milan, Lyon, Jenewa, Paris, London, Denhag, Brussel, Hamburg, Berlin, Copenhagen, Santiago, Sao Paolo, Mexico, LA, Vancouver, Chicago, Washington, Ottawa*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri	*(KUMKM)*	*140,0*	*200,0*	*210,0*	*221,0*	*232,0*	*63,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemen KUKM*
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	*Negara*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*5,6*	*Pusat*		*Kemendag*
Penghargaan Pelaku Ekspor	*Jumlah Pelaku Usaha yang diberi penghargaan dan fasilitas (Pelaku Usaha)*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*17,5*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	*Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*2,5*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
ProP : Fasilitasi Ekspor							**503,6**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.121

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor untuk Pelaku/Usaha Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor (Orang/usaha)*	*1.500,0*	*1.650,0*	*1.775,0*	*1.450,0*	*1.250,0*	*141,2*	*Kabupaten/kota di 34 provinsi*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	*Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif (Kerjasama)*	*10,0*	*10,0*	*12,0*	*10,0*	*9,0*	*51,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri	*Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri (Produk)*	*32,0*	*34,0*	*40,0*	*30,0*	*28,0*	*231,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Inatrade	*Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Inatrade (Layanan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*10,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia	*Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya (Skema)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*8,3*	*DI Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu,Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.122

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	*Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan (Laporan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*6,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Dukungan terhadap Implementasi Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	*Jumlah layanan KNFP (Layanan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*13,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT)			*20,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*38,0*	*Pusat*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*Kemendag*
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	*Tersusunnya Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*2,5*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
ProP : Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor							**864,2**			
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	*Perusahaan Industri TPT yang difasilitasi/ didampingi/ diberikan insentif (SDM, Teknologi, Manajemen/ organisasi) dalam rangka penerapan industri 4.0 (perusahaan)*	*25,0*	*300,0*	*300,0*	*300,0*	*300,0*	*96,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala	*Rekomendasi dokumen dalam perundingan kerjasama internasional (Rekomendasi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*18,8*	*Pusat*		*Kemenperin*
Pelatihan Ekspor bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro	*Jumlah SDM industri agri yang dilatih (Orang)*	*180,0*	*185,0*	*190,0*	*190,0*	*190,0*	*50,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.123

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	*Terfasilitasinya Industri Agro dalam temu bisnis dan promosi dalam skala internasional (Perusahaan)*	*60,0*	*60,0*	*65,0*	*65,0*	*65,0*	*28,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Quick Wins Peningkatan Ekspor Produk (Komoditas) Prioritas Sektor ILMATE	*Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan (Industri)*	*2,0*					*2,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
Fasilitasi Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor	*Jumlah industri yang difasilitasi ekspor (Industri)*		*5,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*19,8*	*Pusat*		*Kemenperin*
Pengembangan Industri dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam	*Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan (Industri)*	*3,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*3,9*	*Pusat*	*9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter*	*Kemenperin*
Pengembangan Market Intelligence	*Rekomendasi Industrial dan Market Intelligence (Jumlah Rekomendasi Market Intelligence)*	*6,0*	*8,0*	*10,0*	*10,0*	*12,0*	*34,7*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penilaian Akreditasi Laboratorium	*Jumlah akreditasi laboratorium (Penilaian Akreditasi)*	*1.035,0*	*1.095,0*	*1.150,0*	*1.205,0*	*1.260,0*	*97,2*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Laboratorium SNSU	*Jumlah Laboratorium yang terakreditasi (Laboratorium)*	*1,0*					*70,0*	*Serang*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	*Jumlah Lembaga Inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi (Penilaian Akreditasi)*	*650,0*	*700,0*	*750,0*	*800,0*	*850,0*	*41,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Sistem dan Skema Akreditasi	*Jumlah total skema dan sistem yang dihasilkan pada tahun berjalan (Skema)*	*14,0*	*15,0*	*16,0*	*17,0*	*18,0*	*14,5*	*Pusat*		*BSN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.124

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	*Jumlah Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Sistem)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*15,0*	*Pusat*		*BSN*
Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	*Jumlah total penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dihasilkan pada tahun berjalan (Penelitian)*	*4,0*	*10,0*	*12,0*	*14,0*	*18,0*	*15,2*	*Pusat*		*BSN*
Roadmap Pengembangan SPK	*Jumlah dokumen roadmap yang diselesaikan (Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*				*1,0*	*Pusat*		*BSN*
Pelatihan dan Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	*Jenis Pendidikan dan Pelatihanuntuk SDM standardisasi (Pendidikan dan pelatihan)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*35,9*	*Pusat*		*BSN*
Pengembangan keahlian spesifik SPK bagi Standards Professionals Indonesia	*Jumlah Kegiatan pengembangan keahlian spesifik SPK (Kegiatan pengembangan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*15,0*	*Pusat*		*BSN*
Skema Penerapan Standar	*Jumlah kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian (kebijakan/ Skema)*	*275,0*	*375,0*	*480,0*	*600,0*	*725,0*	*14,1*	*Pusat*		*BSN*
Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	*Jenis Layanan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (layanan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*4,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	*Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi oleh SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi (Kemampuan Pengukuran)*	*62,0*	*62,0*	*65,0*	*65,0*	*65,0*	*110,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia	*Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi oleh SNSU Termoelektrik dan Kimia (Kemampuan Pengukuran)*	*71,0*	*71,0*	*73,0*	*73,0*	*73,0*	*169,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor	*Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor (Paket Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*3,5*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor	*Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*3,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.125

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pengelolaan Impor	**Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)**	**43,3**				**50,0**	**605,3**			
	Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)	**6.000,0**	**6.500,0**	**7.000,0**	**7.500,0**	**8.000,0**				
	Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)	**310,0**	**320-333**	**330-355**	**340-378**	**350-400**				
ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri							**605,3**			
Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri	*Jumlah alat Kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. (Alat Kesehatan)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*46,6*	*Industri Alkes di Provinsi/Kabupaten/Kota*		*Kemenkes*
Pengawasan Post Border	*Jumlah Pengawasan Post Border (Berita acara)*	*3.162,0*	*3.162,0*	*3.162,0*	*3.162,0*	*3.162,0*	*137,2*	*Medan, Surabaya, Bekasi, Makassar*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri (Peserta)*	*2.500,0*	*3.000,0*	*3.500,0*	*4.000,0*	*4.500,0*	*77,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border	*Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border (Laporan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*13,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Layanan fasilitasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	*Terciptanya layanan penyusunan RUU LPPI (layanan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*			*10,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Dalam Negeri	*Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)*	*37,7*	*38,5*	*39,2*	*40,0*	*40,8*	*15,1*	*Pusat*		*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.126

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri	*Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)*	*37,7*	*38,5*	*39,2*	*40,0*	*40,8*	*15,1*	*Pusat*		*Kemenperin*
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri	*Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)*	*37,7*	*38,5*	*39,2*	*40,0*	*40,8*	*15,1*	*Pusat*		*Kemenperin*
Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	*Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri (Jumlah Rekomendasi)*	*7,0*	*10,0*	*10,0*	*11,0*	*12,0*	*16,1*	*Pusat*		*Kemenperin*
Fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	*Industri Dalam Negeri (IDN) yang didampingi (Jumlah IDN)*	*12,0*	*12,0*	*13,0*	*14,0*	*15,0*	*13,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	*Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Event)*	*89,0*	*89,0*	*89,0*	*89,0*	*89,0*	*246,4*	*pusat*		*Kemenparekraf*
KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	**Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**100,5**			
ProP : Pengembangan sistem katalog							**100,5**			
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	*Rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (rekomendasi)*	*1 Rekomendasi dan fasilitasi 250 sertifikat*	*1 Rekomendasi dan fasilitasi 850 sertifikat*	*1 Rekomendasi dan fasilitasi 950 sertifikat*	*1 Rekomendasi dan fasilitasi 1150 sertifikat*	*1 Rekomendasi dan fasilitasi 1200 sertifikat*	*27,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral	*Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral (Kontrak Katalog Lokal /Sektoral)*	*20,0*	*30,0*	*40,0*	*50,0*	*60,0*	*20,2*	*Pusat dan daerah*		*LKPP*
Pengembangan Produk yang Masuk e-catalogue	*Jumlah Produk yang tersedia dalam e-catalogue (Produk)*	*125.000,0*	*150.000,0*	*175.000,0*	*200.000,0*	*225.000,0*	*12,8*	*Pusat*		*LKPP*
Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik (Dokumen)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*39,8*	*Pusat*		*LKPP*
KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	**Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)**	**3,0**	**4,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**350,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.127

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Investasi (inbound & outbound) Industri GPN berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi							**350,4**			
Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong	*Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong (Permendag)*	*9,0*	*8,0*	*7,0*	*6,0*	*5,0*	*11,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Penyusunan Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	*Tersusunnya dokumen profil investasi industri (Profil Investasi)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*14,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi	*Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi (Industri)*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*27,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi	*Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi (Industri)*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*27,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penguatan Struktur Industri Elektronika dan Telematika	*Industri Komponen yang difasilitasi (Industri Komponen)*	*5,0*	*7,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*27,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri	*Industri Yang Mendapatkan Pendampingan (Industri)*	*10,0*	*10,0*	*13,0*	*15,0*	*15,0*	*12,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Profil Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	*Tersedianya jumlah profil investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian (Profil investasi project)*	*4,0*	*3,0*	*3,0*	*2,0*	*2,0*	*17,9*	*Pusat*		*Kemenperin*

A.1.128

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi industri komponen	*Jumlah industri komponen yang difasilitasi (Industri komponen yang terfasilitasi)*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*15,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan (Dokumen Kebijakan)*	*2,0*					*3,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	*Jumlah Dokumen Peta Jalan (Peta Jalan)*	*2,0*					*6,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penyusunan Profil Investasi Industri Logam Dasar Non-Besi	*Industri Logam yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan subtitusi impor (Industri yang Terbangun)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*19,3*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Fasilitasi investasi dalam Global Value Chain	*Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global (Jumlah Kesepakatan)*	*10,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*91,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pendampingan investasi perusahaan Multinasional	*Jumlah perusahaan multinasional (Jumlah perusahaan multinasional)*	*2,0*	*3,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*12,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	*Jumlah Industri yang difasilitasi (Jumlah Perusahaan)*	*-*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*11,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Peningkatan utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	*Utilisasi Tarif Preferensi FTA/PTA/EPA (Persentase)*	*30*	*35*	*40*	*45*	*50*	*32,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Profil Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	*Tersedianya Profil Investasi (Profile Investasi Project)*	*3,0*					*12,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Implementasi Pilot Project Pengembangan AMMDES	*Jumlah Pilot Project yang dikembangkan (Pilot Project)*	*1,0*					*6,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	**Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (Juta orang)**	**18,0**	**19,0**	**20,0**	**21,0**	**22,3**	**4.752,3**			
	Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	**21,5-22,6**	**22,25-23,4**	**23-24,2**	**23,75-25**	**24,5**				
ProP : Branding Wonderful Indonesia							**1.739,6**			
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	*Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik (Media)*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*361,7*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	*Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak (Media)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*134,3*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	*Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang (Media)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*442,4*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	*Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital (Media)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*801,2*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru							**2.354,3**			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	*Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Pameran)*	*26,0*	*26,0*	*26,0*	*26,0*	*26,0*	*702,2*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	*Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Misi Penjualan)*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*265,1*	*Pusat*		*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.130

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	*Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding (Orang)*	*1.415,0*	*1.415,0*	*1.415,0*	*1.415,0*	*1.415,0*	*413,6*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	*Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE (Misi Penjualan)*	*24,0*	*24,0*	*24,0*	*24,0*	*24,0*	*107,4*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Kerjasama Pemasaran ke wilayah yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	*Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler (Orang)*	*195.359,0*	*195.359,0*	*195.359,0*	*195.359,0*	*195.359,0*	*385,1*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	*Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator (Kerjasama)*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*326,3*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
International MICE Bidding	*Jumlah International MICE Bidding (Forum)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*76,5*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Promosi Wisata Gastronomi	*Jumlah Promosi Wisata Gastronomi (Kegiatan)*						*76,6*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Partisipasi Indonesia dalam Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) oleh Magellan	*Promosi Perekonomian Maluku Utara melalui Partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (Circumnavigation) (Dokumen)*	*2,0*	-	-	-	-	*1,5*			*Kemenlu*
ProP : Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce							**145,5**			
Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (termasuk melalui platform e-commerce dan event promosi berkelas internasional dalam negeri)	*Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (Orang)*	*2.050,0*	*2.100,0*	*2.350,0*	*2.000,0*	*1.950,0*	*145,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
ProP : Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran							**512,8**			
Pelatihan pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce) (Orang)*	*1.500,0*	*1.600,0*	*1.900,0*	*1.480,0*	*1.200,0*	*38,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.131

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	*Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)*	*1.700,0*	*1.800,0*	*2.000,0*	*1.650,0*	*1.550,0*	*38,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan (Orang)*	*1.500,0*	*1.600,0*	*1.750,0*	*1.450,0*	*1.350,0*	*46,2*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi (Orang)*	*11.200,0*	*11.500,0*	*12.000,0*	*11.400,0*	*11.200,0*	*258,2*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)*	*5.000,0*	*5.400,0*	*5.875,0*	*5.300,0*	*5.000,0*	*131,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenparekraf*
KP : Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	**Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (Negara)**	**90,0**	**92,0**	**94,0**	**96,0**	**98,0**	**3.309,6**			
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Negara)	**82,0**	**82,0**	**86,0**	**92,0**	**94,0**				
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**				
	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**				
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati	**20 (kumulatif)**	**25 (kumulatif)**	**30 (kumulatif)**	**35 (kumulatif)**	**40 (kumulatif)**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.132

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center							**18,8**			
FTA Center di Daerah	*Jumlah FTA Center di Daerah (Daerah)*	*1,0*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*13,0*	*Jatim*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	*Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah (Dokumen)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*5,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional							**848,3**			
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra (Dokumen)*	*88,0*	*90,0*	*92,0*	*94,0*	*96,0*	*236,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	*Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional (Laporan)*	*13,0*	*15,0*	*17,0*	*19,0*	*21,0*	*17,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	*Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (Dokumen)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*40,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	*Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional (Dokumen)*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*7,3*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.133

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra (Dokumen)*	*40,0*	*42,0*	*44,0*	*46,0*	*48,0*	*33,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa	*Jumlah dokumen koordinasi perundingan bidang jasa (Dokumen)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*20,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Penyusunan Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	*Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa (Dokumen)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*41,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Fora Multilateral	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Multilateral (Dokumen)*	*29,0*	*31,0*	*33,0*	*35,0*	*29,0*	*41,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	*Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral (Laporan)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*6,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan Mitra ASEAN (Dokumen)*	*110,0*	*115,0*	*120,0*	*125,0*	*110,0*	*56,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	*Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN (Laporan)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*5,7*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.134

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Bilateral (Dokumen)*	*90,0*	*100,0*	*110,0*	*120,0*	*100,0*	*75,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan organisasi internasional (Dokumen)*	*76,0*	*81,0*	*86,0*	*91,0*	*96,0*	*38,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	*Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI (Laporan)*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*9,4*	*Pusat*		*Kemendag*
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	*Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra (Dokumen)*	*88,0*	*90,0*	*92,0*	*94,0*	*88,0*	*218,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
ProP : Promosi Terintegrasi							**2.442,5**			
Promosi penanaman modal dalam forum internasional	*Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) (rencana investasi)*	*(Rp 2.386,5 Triliun)*	*(Rp 2.625,1 Triliun)*	*(Rp 2.887,6 Triliun)*	*(Rp 3.176,4 Triliun)*	*(Rp 3.494,0 Triliun)*	*137,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.135

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional	*Jumlah minat investasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional (minat investasi)*	*800,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*	*47,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai*	*BKPM*
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Kegiatan, World Dubai Expo 2020	*Jumlah pelaksanaan WED 2020 (Kegiatan promosi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*330,5*	*Dubai*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
CA Expo Nanning China dan Penugasan Pameran Terintegrasi	*Jumlah promosi terintegrasi (Pameran)*	*7,0*	*7,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*50,1*	*China, Jerman,*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
FTA Center	*Jumlah layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center) (Pelayanan)*	*903,0*	*910,0*	*910,0*	*910,0*	*903,0*	*70,1*	*Jakarta, Jateng, Maluku, Sulsel, Sumut, Jabar*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
Pameran/Promosi dan Publikasi	*Jumlah Laporan Promosi yang dilakukan (Laporan)*	*1.800,0*	*1.850,0*	*1.900,0*	*1.950,0*	*2.000,0*	*1.764,4*	*Perwakilan RI*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenlu*
Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya	*Terciptanya posisi perundingan dalam kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama lain (Posisi Runding)*	*4,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*11,9*	*Pusat*		*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.136

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Pendirian Export Center	*Jumlah Export Center di Daerah (Export Center)*		*1,0*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*30,0*	*Medan, Bandung, Surabaya, Makassar*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemendag*
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	**Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**197.732,7**			
	Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	**23,2**	**22,2**	**21,1**	**20,1**	**18,0**				
	Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	**N.A.**	**34-39**	**N.A.**	**29-34**	**N.A.**				
KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	**Rasio M2/PDB (Persen)**	**41,6**	**41,8**	**42,2**	**42,5**	**43,2**	**34,2**			
	Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)	**55,8**	**56,3**	**56,7**	**57,1**	**57,5**				
	Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	**15,4**	**15,4**	**15,3**	**15,3**	**15,3**				
ProP : Peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan							**26,9**			
Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI	*Jumlah skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan (Skema)*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*26,9*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah							**7,4**			
Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien	*Jumlah daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien (Daerah)*	*50,0*	*55,0*	*60,0*	*65,0*	*70,0*	*6,1*	*Pusat*		*Kemendagri*
Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN dengan Skema Investasi Pemerintah	*Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah (Draft perubahan PP)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,6*	*Pusat*		*Kemenkeu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.137

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kajian Mengenai Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Pendalaman Pasar Keuangan	*Rekomendasi kebijakan terkait dampak dan kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap pendalaman pasar keuangan (Rekomendasi kebijakan)*	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,7*	*Pusat*		*Kemenkeu*
KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	**Kontribusi ekonomi digital (Persen)**	**3,2**	**3,5**	**3,9**	**4,3**	**4,7**	**189.295,2**			
	Nilai transaksi e-commerce (Rp triliun)	**260,0**	**345,0**	**430,0**	**515,0**	**600,0**				
	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)	**8.500,0**	**9.000,0**	**10.100,0**	**8.500,0**	**7.500,0**				
ProP : Penguatan Industri Fintech, e-commerce, on-demand Service, dan Internet Of Things							**18,2**			
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik	*Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik (Rancangan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*6,2*	*Pusat*		*Kemendag*
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	*Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (Fasilitator)*	*200,0*	*300,0*	*400,0*	*500,0*	*600,0*	*12,0*	*Pusat*		*Kemendag*
ProP : Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri							**189.277,0**			
Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0	*Tersusunnya dokumen perencanaan implementasi Making Indonesia 4.0 (Dokumen)*	*6,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*6,0*	*89,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Data dan Informasi Industri 4.0	*Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (Platform)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*25,5*	*Pusat*		*Kemenperin*
Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi	*Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Perusahaan)*	*-*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*27,7*	*Pusat*		*Kemenperin*
Transofrmasi 4.0 pada Sektor Industri Barang Galian Non-Logam	*Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Transformasi 4.0 (Jumlah Perusahaan)*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*36,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.138

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengoptimalan supply chain melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	*Jumlah perusahaan yang teroptimalisasi supply chain di Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar (industri)*		*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*7,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan	*Terverifikasinya kebutuhan bahan baku industri pangan (industri pangan)*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*25,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pendampingan dan Center of Excellence	*Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan) (Industri)*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*23,6*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pilot Project	*Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif) (Industri)*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*9,0*	*10,0*	*11,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Elektronika	*Industri Elektronika dan Telematika yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan) (Industri)*	*5,0*	*8,0*	*9,0*	*9,0*	*10,0*	*26,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Perluasan Akses Technopark ke Industri Elektronika	*Jumlah Tenant yang terfasilitasi (Tenant yang terfasilitasi)*	*3,0*					*2,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Kerja Sama Akselerasi Penerapan Industri 4.0 Dengan National Research Council (NRC) Korea	*Tersedianya rencana aksi dan kerjasama dengan NRC Korea (rencana aksi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*12,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.139

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Inovasi Produk Tanah Jarang	*produk inovasi (Produk tanah jarang)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*15,0*	*Pusat*		*Kemenperin*
Pengembangan Helpdesk Industri	*Helpdesk Industry (Jumlah Modul)*	*-*	*1,0*	*6,0*	*8,0*	*10,0*	*11,9*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Litbang PRN: Antioksidan, anti-aging dan fragrance untuk industri kosmetik berbasis minyak atsiri	*Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)*		*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*49,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Litbang PRN: Pengembangan Collaborative Robot Machine pada industri makanan/minuman dan farmasi/kesehatan	*Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)*		*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*49,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Litbang PRN: Material Serat, Tekstil dengan Fungsi Khusus dan Tekstil Hijau Berbahan Baku Ramie yang ramah Lingkungan (RM-SDA)	*Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN)*		*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*49,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penyusunan Kebijakan Ekosistem Inovasi Industri KFTLMATE untuk mendukung Industri 4.0	*Kebijakan teknis terkait Teknologi Industri KFTLMATE (Jumlah Rekomendasi Kebijakan)*	*2,0*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*9,5*	*Pusat*		*Kemenperin*
Fasilitasi Inkubasi dan Konsultansi Teknologi Industri KFTLMATE	*Paket Teknologi Industri KFTLMATE (Jumlah Paket Teknologi)*		*25,0*	*40,0*	*55,0*	*70,0*	*9,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri KFTLMATE	*Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)*	*7,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*33,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.140

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri	*Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)*	*11,0*	*13,0*	*15,0*	*16,0*	*20,0*	*88,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri KFTLMATE 4.0	*Pengadaan alat litbang (Jumlah alat litbang (unit))*	*-*	*35,0*	*25,0*	*24,0*	*23,0*	*58,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Litbang Prioritas Riset Nasional (PRN) Industri Agro	*Litbang PRN Agro (Jumlah Litbang PRN Industri Agro)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*51,1*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri Agro	*Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*9,0*	*67,9*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri Agro	*Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri)*	*6,0*	*15,0*	*16,0*	*19,0*	*20,0*	*30,7*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri agro 4.0	*Pengadaan alat litbang (Jumlah alat litbang (unit))*	*-*	*25,0*	*25,0*	*24,0*	*22,0*	*40,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pembangunan gedung BBPK	*Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))*	*-*	*300,0*	*4.471,0*	*3.500,0*	*300,0*	*35,0*	*Bandung, Jawa Barat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.141

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBPK	*Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2))*	-	-	-	*3.568,0*	*3.568,0*	*85,0*	*Bandung, Jawa Barat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengadaan lahan BBTPPI	*Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2))*	-	-	-	*8.000,0*	*8.000,0*	*35,0*	*Semarang, Jawa Tengah*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pembangunan gedung BBK dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	*Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))*	-	*400,0*	*4.000,0*	*3.000,0*	*200,0*	*30,0*	*Bandung, Jawa Barat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Renovasi gedung kantor, lab, layanan teknis	*Renovasi gedung (Luas Gedung (m2))*	-	*19.775,2*	*5.368,3*	*5.664,4*	*1.773,9*	*98,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pembangunan gedung B4T dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	*Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2))*	-	*300,0*	*4.000,0*	*3.000,0*	*200,0*	*28,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Makanan Minuman	*Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*39.607,7*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Swasta*
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Elektronika	*Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*17.947,3*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Swasta*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Otomotif	*Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*15.471,8*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Swasta*
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Kimia dan Farmasi	*Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*17.018,9*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Swasta*
Peningkatan investasi untuk penerapan teknologi 4.0 - Subsektor Industri Tekstil dan Busana	*Investasi Penerapan teknologi 4.0 (Jumlah Paket Teknologi)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*16.864,2*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Swasta*
Ev Battery Value Chain							*81.200,0*		*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Antam*
KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	**Skor Logistic Performance Index**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**4.354,7**			
	Tingkat inflasi (Persen)	**3,1**	**3,0**	**2,9**	**2,8**	**2,7**				
ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik							**4.036,9**			
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	*Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi (Unit)*	*49,0*	*70,0*	*72,0*	*68,0*	*48,0*	*3.712,6*	*Pusat*	*Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional*	*Kemendag*
Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	*Jumlah Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi (System Pembayaran di Pasar)*	*3,0*	*10,0*	*20,0*	*30,0*	*40,0*	*51,5*	*Pusat*		*Kemendag*
Penataan Perdagangan Antar Provinsi	*Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi (Kegiatan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*30,7*	*Pusat*		*Kemendag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	*Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System (Daerah)*	*6,0*	*12,0*	*17,0*	*22,0*	*27,0*	*28,0*	*Tanah Datar, Madiun, Kudus, Gorontalo, Tapin, Garut*		*Kemendag*
Analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/ sistem resi gudang/ pasar lelang	*Jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/ sistem resi gudang/ pasar lelang (Analisis)*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*23,2*	*Pusat*		*Kemendag*
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	*Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang (Lembaga)*	*50,0*	*55,0*	*60,0*	*65,0*	*70,0*	*19,5*	*Pusat*		*Kemendag*
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi	*Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit)*	*29,0*	*30,0*	*32,0*	*34,0*	*35,0*	*171,3*		*Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	*Kemen KUKM*
ProP : Pengendalian Inflasi							**317,8**			
Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang	*Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan Laporan Stok Barang di Gudang (Kegiatan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*75,0*	*Pusat*		*Kemendag*
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat	*Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat (Data dan informasi)*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*183,8*	*Pusat*		*Kemendag*
Stabilitasasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	*Jumlah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN (Kab/ Kota)*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*82,0*	*44,2*	*Pusat*		*Kemendag*
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional	*Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional (Rancangan)*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*13,6*	*Pusat*		*Kemendag*
Pengendalian Inflasi Daerah	*Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah (Daerah)*			*1,0*	*10,0*	*20,0*	*1,2*			*Kemendagri*
KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	**Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)**	**1.845,0**	**2.634,0**	**3.423,0**	**4.211,0**	**5.000,0**	**464,3**			
	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)	**12,0**	**15,0**	**17,0**	**20,0**	**22,0**				
ProP : Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan							**115,1**			
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	*Jumlah Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi) (Destinasi)*	*10,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*34,8*	*Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi branding*		*Kemenparekraf*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)	*Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO) (Sustainable Tourism Observatory)*	*3,0*	*5,0*	*5,0*	*6,0*	*6,0*	*58,3*	*Destinasi Pariwisata Prioritas*		*Kemenparekraf*
Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)	*Jumlah Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018) (Destinasi Pariwisata Prioritas)*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*9,0*	*17,5*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan	*Jumlah Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (Pedoman)*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*4,5*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
ProP : Penerapan Industri Hijau	**Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)**						**349,2**			
Penyusunan Regulasi Teknis Standardisasi Industri	*Rancangan Regulasi Teknis (Jumlah Regulasi Teknis)*	*21,0*	*23,0*	*23,0*	*23,0*	*23,0*	*19,3*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	*Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi (Persentase)*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*14,4*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	*Peningkatan Kapasitas Lab Uji (Jumlah Paket Peralatan dan Bangunan)*	*13,0*	*205,0*	*128,0*	*104,0*	*148,0*	*181,0*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*Kemenperin*
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	*Rancangan Standar (Jumlah Rancangan Standar)*	*5,0*	*4,0*	*12,0*	*16,0*	*20,0*	*11,4*	*Pusat*		*Kemenperin*
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri	*Rancangan Standar (Jumlah Rancangan Standar)*	*4,0*	*4,0*	*12,0*	*16,0*	*20,0*	*16,8*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*
Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	*Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (Persentase Perusahaan IndustriMenengah Besar)*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*10,0*	*10,0*	*24,2*	*Pusat*	*9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter*	*Kemenperin*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	*Jumlah SNI Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)*	*150,0*	*175,0*	*190,0*	*205,0*	*230,0*	*20,5*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah SNI Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)*	*150,0*	*170,0*	*190,0*	*210,0*	*230,0*	*20,5*	*Pusat*		*BSN*
Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal	*Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang berkekuatan hukum sesuai kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)*	*200,0*	*220,0*	*240,0*	*260,0*	*280,0*	*28,8*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
Restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru	*Jumlah Komtek yang difasilitasi (KOMTEK)*	*160,0*	*166,0*	*172,0*	*178,0*	*180,0*	*12,4*	*Pusat*	*Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi*	*BSN*
KP : Reformasi Fiskal	**Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen)**	**9,7-10,5**	**10,1 -10,7**	**10,3-11,2**	**10,5-11,7**	**10,7-12,3**	**2.581,0**			
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (Persen)	**1,5**	**9,5**	**52,4**	**100,0**	**Selesai**				
	Imbal hasil (yield) surat berharga negara (Persen)	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**				
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)	**10,6**	**13,1**	**15,6**	**18,1**	**20,6**				
ProP : Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan							**2.580,4**			
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	*(Persen)*	*1,5*	*9,5*	*52,4*	*100,0*	*Selesai*	*2.580,4*	*Pusat*		*Kemenkeu*
ProP : Layanan kepabeanan terkait e-commerce, transhipment, dan perbatasan							**0,6**			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kelancaran logistik dan perdagangan di perbatasan serta percepatan pelayanan e-commerce dan transhipment	*(Laporan)*	*9,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,6*	*Pusat*		*Kemenkeu*
KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	**Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base)**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**1.003,2**			
	Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base)	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**				
	Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**3,0**	**2,0**				
ProP : Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							**302,0**			
Big Data Ekonomi Kreatif	*Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga kerja (Publikasi/ Laporan)*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*130,9*	*Pusat*		*Kemenparekraf*
Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	*Jumlah publikasi/ laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*69,0*	*145,6*	*Pusat*		*BPS*
Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	*Jumlah publikasi/ laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*19,0*	*11,7*	*Pusat*		*BPS*
Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	*Jumlah publikasi/ laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/ Laporan)*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*13,8*	*Pusat*		*BPS*
ProP : Pengembangan Statistik e-commerce							**62,5**			
Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	*Jumlah publikasi/ laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*62,5*	*Pusat*		*BPS*
ProP : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan							**638,7**			
Publikasi/ Laporan Tanaman Pangan	*Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)*	*515,0*	*515,0*	*515,0*	*515,0*	*515,0*	*277,6*	*Pusat*		*BPS*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.1.147

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Publikasi/ Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	*Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)*	*506,0*	*506,0*	*506,0*	*506,0*	*506,0*	*361,1*	*Pusat*		*BPS*
*Publikasi/ Laporan Sensus Pertanian**	*Jumlah Publikasi/ Laporan Sensus Pertanian (Publikasi/ Laporan)*						*0,0*	*Pusat*		*BPS*
JUMLAH							**1.728.629,5**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	**Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)**	**78,7**				**98**	**3.992,5**			
	Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	**2,26**	**2,24**	**2,21**	**2,19**	**2,10**				
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	**65,2**				**80**				
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan							**175,0**			
ProP : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan							**140,0**			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	*Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun*	*92*	*95*	*97*	*98*	*100*	*35,0*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendagri*
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1)*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*100*	*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh	*Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*35,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang	*Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*35,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	*Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai*	*70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*35,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
ProP : Percepatan kepemilikan dokumen pendataran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus							**35,0**			
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	*Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T*	*112*	*112*	*112*	*112*	*112*	*35,0*	*23 Provinsi*		*Kemendagri*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan							**77,1**			
ProP : Penguatan integrasi data administrasi kependudukan							**35,0**			
Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	*Jumlah K/L yang mengintegrasikan data melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional*	*6*	*10*	*16*	*20*	*22*	*35,0*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendagri*
ProP : Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu							**42,1**			
Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	*Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB*	*50*	*60*	*68*	*75*	*80*	*7,1*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	*Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)*	*3*	*5*	*10*	*15*	*20*	*35,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	**Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)**	**25**	**50**	**60**	**70**	**80**	**2.906,2**			
	Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	**15**	**30**	**50**	**60**	**70**				
	Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	**15,69**	**30**	**40**	**50**	**60,95**				
ProP : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu							**1.519,5**			
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	*Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir*	*107.200.000*	*109.600.000*	*110.700.000*	*111.800.000*	*112.900.000*	*419,6*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Tersedianya Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	*Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*631,7*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*

A.3.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem layanan dan rujukan terpadu	*Daerah yang menyelenggarakan Sistem layanan dan rujukan terpadu (Kabupaten/Kota)*	*220*	*300*	*380*	*460*	*514*	*401,7*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	*Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial*	*600*	*760*	*920*	*1.028*	*900*	*66,5*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
ProP : Penguatan pendampingan masyarakat							**1.386,7**			
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial	*Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/dikembangkan profesinya*	*27.695*	*32.000*	*35.000*	*38.000*	*40.000*	*170,9*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	*Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*559,7*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	*Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi*	*5.000*	*12.000*	*18.000*	*20.000*	*23.000*	*310,9*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	*189*	*195*	*200*	*210*	*220*	*0,0*			*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang	*200*	*214*	*221*	*228*	*195*	*0,0*			*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*	*0,0*			*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0,0*			*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0,0*			*Kemensos*
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	*50*	*100*	*100*	*150*	*150*	*0,0*			*Kemensos*
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0,0*			*Kemensos*
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	*240*	*288*	*346*	*415*	*498*	*0,0*			*Kemensos*
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0,0*			*Kemensos*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	*44*	*44*	*44*	*44*	*44*	*0,0*			*Kemensos*
	Pendamping Rehabilitasi Sosial anak	*120*	*140*	*150*	*170*	*109*	*0,0*			*Kemensos*
	Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	*110*	*250*	*350*	*450*	*520*	*0,0*			*Kemensos*
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	*SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh peningkatan kapasitas*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*56,4*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	*SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan*	*7.201*	*7.201*	*7.201*	*7.201*	*7.201*	*288,8*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk							**834,2**			
ProP : Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang							**21,2**			
Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah	*Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah*	*30% prov & 21% kab/kota*	*45% prov & 27% kab/kota*	*60% prov & 33% kab/kota*	*75% prov & 38% kab/kota*	*100% prov % 45% kab/kota*	*21,2*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
ProP : Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	**Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)**	**90**	**90**	**95**	**95**	**100**	**141,3**			
Peningkatan Kab/Kota yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan	*Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan*	*30% prov & 21% kab/kota*	*45% prov & 27% kab/kota*	*60% prov & 33% kab/kota*	*75% prov & 38% kab/kota*	*100% prov % 45% kab/kota*	*29,0*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
Peningkatan efektivitas kelompok kerja KKBPK Provinsi dan	*Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif*	*10% prov & 10% kab/kota*	*20% prov & 20% kab/kota*	*30% prov & 30% kab/kota*	*40% prov & 40% kab/kota*	*50% prov & 50% kab/kota*	*21,2*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
Penyediaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	*Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk*	*30% prov & 10% kab/kota*	*45% prov & 20% kab/kota*	*60% prov & 30% kab/kota*	*75% prov & 40% kab/kota*	*100% prov & 50% kab/kota*	*91,0*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
ProP : Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	**Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**671,7**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Data dan Informasi KKBPK	*Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK*	*57,60*	*60,69*	*63,41*	*66,51*	*70,05*	*671,7*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	**Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial**	**78,7**				**98**	**821.547,7**			
	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	**65,2**				**80**				
KP : Sistem jaminan sosial nasional							**249.988,4**			
ProP : Pengembangan program jaminan sosial							**249.938,4**			
Peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	*Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)*	*107*	*109*	*110*	*111*	*113*	*249.938,4*	*34 Provinsi*		*Kemenkes*
ProP : Penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional							**50,0**			
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku	*Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan*	*10*	*7*	*5*	*3*	*3*	*50,0*	*181 Kab/Kota; 11 Provinsi*		*Kemenko PMK*
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	**Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**567.063,6**			
	Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**				
	Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**				
	Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**	**31.400.000**				
ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran							**567.063,6**			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	*Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*154.422,2*	*514 Kab/Kota; 34 Provinsi*		*Kemensos*
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	*Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako*	*5.513.785*	*5.513.785*	*5.513.785*	*5.513.785*	*5.513.785*	*49.853,7*	*11 Provinsi; 181 Kab/Kota*		*Kemensos*
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	*Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako*	*5.238.377*	*5.238.377*	*5.238.377*	*5.238.377*	*5.238.377*	*47.336,4*	*12 Provinsi; 151 Kab/Kota*		*Kemensos*
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	*Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako*	*4.847.877*	*4.847.877*	*4.847.877*	*4.847.877*	*4.847.877*	*43.861,7*	*11 Provinsi; 182 Kab/Kota*		*Kemensos*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan	*Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik*	*60.080*	*64.258*	*68.894*	*73.609*	*78.191*	*12,9*	*514 Kab/Kota; 34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemen ESDM*
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	*Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran*	*7.000*	*7.364 - 7.399*	*7.754 - 7.836*	*8.165 - 8.321*	*8.614 - 8.870*	*271.576,7*	*514 Kab/Kota; 34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemen ESDM*
Terwujudnya kemudahan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	*Realisasi capaian penambangan pembangkt tenaga listrik*	*4.920*					*0,0*			
KP : Perlindungan sosial adaptif	**Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif**						**1.668,5**			
ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif							**1.668,5**			
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana	*Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Jiwa)*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*595,1*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam	*Warga masyarakat di lokasi rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (Jiwa)*	*247.404*	*250.000*	*255.000*	*257.000*	*260.000*	*772,4*	*34 Provinsi*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemensos*
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	*Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Pelayanan Kebutuhan Dasar*	*120.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	*Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial*	*43.018*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*301,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
KP : Kesejahteraan Sosial	**Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)**	**18,9**	**20**	**22**	**24**	**25**	**2.827,2**			
	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	**37,5**	**42**	**45**	**48**	**50**				
	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)	**2,7**	**5**	**10**	**15**	**20**				
ProP : Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif							**1.009,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	*Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)*	*45.000*	*45.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Penyediaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas	*Literasi khusus bagi penyandang disabilitas*	*47000*	*50000*	*52000*	*53000*	*55000*	*0,0*			*Kemensos*
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi lanjut usia	*Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)*	*30200*	*31000*	*32000*	*33000*	*35000*	*644,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar	*Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)*	*27000*	*27000*	*27500*	*27500*	*27500*	*365,4*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
ProP : Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)							**97,0**			
Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	*Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*97,0*	*Pusat*		*BKKBN*
ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)							**116,9**			
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi	*Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia*	*9984*	*10215*	*10214*	*10214*	*10214*	*116,9*	*34 Provinsi*		*BKKBN*
ProP : Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya							**1.603,9**			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan	*Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Jiwa)*	*21.714*	*25.000*	*27.000*	*28.000*	*30.000*	*1.192,6*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Pemberdayaan bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (Keluarga)*	*2.667*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*411,3*	*Pusat*		*Kemensos*
PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	**Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)**	**230,0**	**217,0**	**205,0**	**194,0**	**183,0**	**303.770,9**			
	Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	**20,6**	**19,5**	**18,6**	**17,6**	**16,0**				
	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	**12,9**	**12,2**	**11,6**	**11,0**	**10,0**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4				
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4				
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0				
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0				
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0				
	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18				
	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0				
	Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09				
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7				
	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8				
	Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1				
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0				
	Persentase rumah sakit terakreditasi	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0				
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	64	68	71	75	90	14.299,1			
	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	25,11	25,93	26,75	27,57	28,39				
ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	87	89	91	93	95	12.614,5			
	Cakupan kunjungan antenatal (persen)	80	85	90	92	95				
	Cakupan kunjungan neonatal (persen)	86	88	90	92	95				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	**401**	**431**	**452**	**471**	**488**				
Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)	*Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)*	*5*	*8*	*11*	*14*	*17*	*120,2*	*17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pencatatan kematian ibu	*Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu*	*40*	*50*	*60*	*80*	*100*	*23,9*	*34 provinsi dan 514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	*Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap*	*92,9*	*93,6*	*94,1*	*94,6*	*95,0*	*267,5*	*32 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap*	*91*	*92*	*93*	*94*	*95*	*6.092,8*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*11,4*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	*Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal*	*960*	*960*	*960*	*960*	*960*	*165,5*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pelatihan tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	*Jumlah tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit yang dilatih*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*10,3*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pelaksanaan pelayanan operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit	*Jumlah RS dengan kemampuan melaksanakan operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit*	*66*	*132*	*198*	*264*	*331*	*33,6*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	*Persentase pelayanan KB pasca persalinan*	*29*	*32*	*35*	*38*	*40*	*241,0*	*Pusat dan 34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Peningkatan sarana cold chain imunisasi	*Jumlah puskesmas yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana cold chain imunisasi*	*684*	*1.230*	*-*	*-*	*-*	*339,2*	*684 puskesmas*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
Jaminan persalinan	*Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan jaminan persalinan*	*514*	*514*	*514*	*514*	*514*	*5.309,1*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
ProP : Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	**Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO)**	**25,79**	**24,50**	**23,10**	**21,59**	**20,00**	**1.684,6**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	*Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi*	*120*	*200*	*320*	*470*	*514*	*134,6*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	*Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP*	*38,32*	*46,12*	*53,92*	*61,72*	*69,52*	*1.507,5*	*Pusat dan 34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Peningkatan kualitas pelayanan KB	*Indeks Informasi Metode KB (method information index/MII)*	*77,50*	*79,50*	*81,50*	*83,50*	*85,50*	*10,7*	*Pusat dan 34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	*Persentase kesertaan KB di 100 kabupaten/kota dengan kesertaan KB rendah*	*37,96*	*38,46*	*38,96*	*39,46*	*39,96*	*12,6*	*Pusat dan 34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian Program KKBPK	*Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik*	*60*	*65*	*70*	*75*	*85*	*17,8*	*Pusat dan 34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	*Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak*	*-*	*50*	*55*	*60*	*70*	*1,5*	*Pusat*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemendagri*
KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	**Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**149.219,5**			
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	**16,0**	**14,5**	**13,0**	**11,5**	**10,0**				
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**8,08**	**7,8**	**7,52**	**7,26**	**7,00**				
ProP : Penurunan Stunting	**Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi**	**51**	**70**	**90**	**100**	**100**	**149.219,5**			
Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil	*Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)*	*16,0*	*14,5*	*13,0*	*11,5*	*10,0*	*1.016,0*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pemantauan tumbuh kembang balita	*Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya*	*60*	*70*	*75*	*80*	*85*	*1.280,5*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Penyediaan obat gizi	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*446,9*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Suplementasi gizi mikro pada balita	*Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro*	*90.000*	*140.000*	*190.000*	*240.000*	*290.000*	*284,6*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota	*Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi*	*51*	*70*	*90*	*100*	*100*	*481,3*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*

A.3.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan produk pangan fortifikasi	*Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*	*87*	*88*	*89*	*90*	*90*	*13,5*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BPOM*
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	*Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (keluarga)*	*4.122.784*	*4.122.784*	*4.122.784*	*4.122.784*	*4.122.784*	*179,4*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	*Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre*	*29.327*	*29.327*	*29.327*	*29.327*	*29.327*	*340,1*	*33 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*BKKBN*
Peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi keluarga	*Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan*	*35.000*	*51.000*	*65.000*	*75.000*	*51.000*	*280,5*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemendikbud*
Fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting bagi provinsi	*Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting*	*-*	*7*	*6*	*6*	*6*	*4,0*	*32 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PPPA*
Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional	*Persentase K/L/D yang melaksanakan urusan PIKP dan mitra strategis yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional*	*65*	*70*	*75*	*85*	*90*	*30,0*	*Pusat*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen Kominfo*
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	*Jumlah lokasi promosi Gemarikan*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*34,0*	*137,5*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KKP*
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting	*Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting*	*160*	*260*	*360*	*460*	*514*	*3,0*	*Pusat*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemendagri*
SPALD-T skala kota/regional	*Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala kota*	*62.352*	*62.352*	*62.352*	*62.352*	*62.352*	*19.965,0*	*28 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KemenPUPR, DAK, APBD*
SPALD-T skala permukiman	*Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala permukiman*	*303.028*	*284.145*	*284.145*	*284.145*	*284.145*	*40.611,0*	*168 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KemenPUPR, DAK, Pemda*
SPALD-S skala kota (IPLT)	*Jumlah IPLT terbangun (unit)*	*24*	*77*	*101*	*152*	*151*	*4.435,0*	*374 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PU&PERA*
SPALD-S skala individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)*	*2.940.304,0*	*2.940.304,0*	*2.940.304,0*	*2.940.304,0*	*2.940.304,0*	*74.220,0*	*514 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KemenPUPR, DAK, Pemda, Masyarakat*
Implementasi dokumen SSK	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kabupaten/kota)*	*66*	*66*	*62*	*62*	*52*	*385,0*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KemenPUPR, Pemda*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kabupaten/kota)*	*87*	*87*	*87*	*88*	*88*	*327,9*	*437 kabupaten/kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*KemenPUPR, Pemda*
Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting bagi provinsi	*Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4,0*	*20 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PPPA*
Penguatan intervensi stunting melalui Therapeutic Feeding Center, penyediaan obat, makanan tambahan dan alat antropometri	*Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan penguatan intervensi stunting*	*260*	*360*	*460*	*514*	*514*	*4.774,4*	*514 kabupaten/Kota*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	**Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**11.454,8**			
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	**325**	**345**	**365**	**385**	**405**				
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	**85**	**90**	**95**	**100**	**100**				
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	**416**	**436**	**458**	**482**	**514**				
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	**80**	**93**	**106**	**150**	**190**				
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	**11**	**15**	**19**	**24**	**28**				
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	**52**	**129**	**232**	**360**	**514**				
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	**324**	**374**	**424**	**474**	**514**				
ProP : Pengendalian Penyakit Menular	**Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV**	**77**	**80**	**85**	**90**	**95**	**9.537,4**			
	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	**80**	**85**	**90**	**90**	**90**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	**466**	**475**	**484**	**495**	**500**				
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	**85**	**90**	**95**	**100**	**100**				
	Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	**87**	**88**	**89**	**90**	**>90**				
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	**136**	**190**	**207**	**220**	**236**				
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	**11**	**15**	**19**	**24**	**28**				
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)*	*60*	*65*	*70*	*75*	*80*	*260,9*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Peningkatan kekarantinaan kesehatan	*Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*633,0*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Intensifikasi upaya eliminasi malaria	*Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria*	*141*	*130*	*119*	*110*	*95*	*315,5*	*32 provinsi*		*Kemenkes*
Intervensi eliminasi schistosomiasis	*Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi*	*11*	*15*	*19*	*24*	*28*	*22,0*	*28 desa di 2 kabupaten (Poso dan Siqi)*		*Kemenkes*
Intervensi eliminasi filariasis	*Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi filariasis*	*106*	*150*	*191*	*207*	*212*	*554,1*	*32 provinsi*		*Kemenkes*
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan	*Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV*	*77*	*80*	*85*	*90*	*95*	*519,4*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penemuan dan pengobatan TBC	*Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)*	*80*	*85*	*90*	*90*	*90*	*1.073,5*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pencegahan dan pengendalian ISPA	*Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana penumonia standar*	*50*	*52*	*55*	*57*	*60*	*35,6*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta	*Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*116,2*	*472 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis	*Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko*	*85*	*90*	*95*	*100*	*100*	*503,5*	*514 kabupaten/kota*		*Kemenkes*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	*Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan*	*86*	*89*	*93*	*97*	*100*	*753,9*	*49 KKP*		*Kemenkes*
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	*Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan*	*80*	*85*	*90*	*95*	*100*	*242,1*	*10 BTKLPP*		*Kemenkes*
Pengendalian anti microbial resistance	*Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang melakukan surveilan AMR sesuai standar*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*12,5*	*Pusat*		*Kemenkes*
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*1.718,0*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*2.693,4*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*84,0*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
ProP : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	**Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas**	**103**	**205**	**308**	**411**	**514**	**1.917,4**			
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	**324**	**374**	**424**	**474**	**514**				
Deteksi dini faktor risiko PTM	*Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%*	*52*	*129*	*232*	*360*	*514*	*545,5*	*52 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Pelaksanaan pengendalian PTM terpadu di Puskesmas	*Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas*	*103*	*205*	*308*	*411*	*514*	*173,4*	*103 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Pelayanan berhenti merokok (konseling dan terapi)	*Jumlah kabupaten/kota dengan ≥ 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)*	*50*	*100*	*175*	*275*	*350*	*204,8*	*50 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	*Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*	*324*	*374*	*424*	*474*	*514*	*9,7*	*277 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Deteksi dini gangguan indera	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi*	*155*	*206*	*308*	*360*	*514*	*140,4*	*155 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Deteksi dini kanker	*Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-59 tahun*	*283*	*309*	*360*	*411*	*514*	*170,0*	*283 kabupaten/kota*		*Kemenkes*

A.3.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa	*Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar*	*45*	*60*	*75*	*90*	*100*	*40,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pengawasan label dan iklan produk tembakau	*Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan*	*60.000*	*60.200*	*60.400*	*60.600*	*60.800*	*10,2*	*34 provinsi*		*BPOM*
Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular	*Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan alat deteksi dini penyakit tidak menular*	*274*	*120*	*120*	-	-	*623,1*	*35 provinsi*		*DAK/Pemda*
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	**Jumlah kabupaten/kota sehat**	**110**	**220**	**280**	**380**	**420**	**102.812,1**			
ProP : Pengembangan Lingkungan Sehat	**Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)**	**40**	**50**	**60**	**70**	**90**	**101.516,0**			
	Jumlah kabupaten/kota sehat	**110**	**220**	**280**	**380**	**420**				
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	*Jumlah kabupaten/kota sehat*	*110*	*220*	*280*	*380*	*420*	*76,0*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	*Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)*	*40*	*50*	*60*	*70*	*90*	*445,2*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pengawasan kualitas air minum	*Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar*	*60*	*64*	*68*	*72*	*76*	*291,2*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemenkes*
Pembangunan SPAM	*Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (LPD)*	*3225*	*3225*	*3225*	*3225*	*3225*	*8.272,3*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PU&PERA*
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM	*Jumlah SR*	*44258*	*44258*	*44258*	*44258*	*44258*	*4.425,8*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*25985*	*25985*	*25985*	*25985*	*25985*	*5.980,0*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PU&PERA*
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	*Jumlah SR*	*221290*	*221290*	*221290*	*221290*	*221290*	*2.212,9*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
Peningkatan kapasitas SPAM	*Kapasitas SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (LPD)*	*940*	*940*	*940*	*940*	*940*	*1.050,0*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*Kemen PU&PERA*
Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM	*Jumlah SR*	*36522*	*36522*	*36522*	*36522*	*36522*	*858,5*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal	*Kumulatif jumlah rumah tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal*	*16948228*	*18572179*	*20354341*	*22310323*	*24457290*	*0,0*	*34 provinsi*	*Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*	*DAK/Pemda*
Pembangunan rumah susun	*Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)*	*4153*	*10847*	*20000*	*25000*	*35000*	*61.880,0*	*34 provinsi*		*Kemen PU&PERA*
Fasilitasi peningkatan kualitas rumah	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)*	*156000*	*156000*	*156000*	*156000*	*156000*	*15.677,0*	*34 provinsi*		*Kemen PU&PERA*
Penerapan sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	*660*	*1330*	*2010*	*2700*	*3400*	*116,8*	*34 provinsi*		*BPOM*
Penerapan desa pangan aman	*Jumlah desa pangan aman*	*211*	*427*	*648*	*874*	*1.105*	*172,2*	*34 provinsi*		*BPOM*
Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya	*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya*	*84*	*165*	*255*	*350*	*450*	*58,1*	*34 provinsi*		*BPOM*
ProP : Penguatan Promosi Germas	**Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**1.296,1**			
	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	**25**	**35**	**50**	**60**	**70**				
Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas	*Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas*	*30*	*35*	*40*	*45*	*50*	*361,6*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja*	*308*	*334*	*360*	*385*	*411*	*195,4*	*Pusat dan 34 provinsi*		*Kemenkes*
Penyusunan pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	*Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas*	*3*	*6*	*9*	*12*	*15*	*24,3*	*Pusat*		*Kemenkes*
Pembinaan posyandu aktif	*Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif*	*51*	*70*	*90*	*100*	*100*	*182,7*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Promosi makanan dan minuman sehat nusantara	*Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat nusantara*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*	*62,5*	*34 provinsi*		*Kemendag*
Kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	*Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan*	*11274*	*11274*	*11274*	*11274*	*11274*	*25,1*	*Pusat*		*Kemenpora*
Kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	*Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal*	*17000*	*17000*	*17000*	*17000*	*17000*	*17,5*	*Pusat*		*Kemenpora*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kampanye olahraga rekreasi, massal, petualang, tantangan dan wisata	*Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata*	*14020*	*14020*	*14020*	*14020*	*14020*	*140,9*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*21,4*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi bantuan untuk sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi	*Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi*	*59*	*58*	*58*	*58*	*58*	*264,8*	*Pusat*		*Kemenpora*
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	**Persentase puskesmas tanpa dokter**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.985,3**			
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**35**	**47**	**59**	**71**	**83**				
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**				
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	**65**	**70**	**80**	**90**	**100**				
	Persentase rumah sakit terakreditasi	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**				
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	**85**	**90**	**92**	**94**	**96**				
	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	**25**	**35**	**45**	**55**	**65**				
	Persentase obat memenuhi syarat	**80,8**	**83,6**	**86,6**	**90,0**	**92,3**				
	Persentase makanan memenuhi syarat	**78**	**80**	**82**	**84**	**86**				
ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	**Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**14.298,7**			
	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	**75**	**83**	**90**	**95**	**100**				
Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	*Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar*	*75*	*83*	*90*	*95*	*100*	*15,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan rumah sakit yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	*Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar*	*80*	*85*	*90*	*95*	*100*	*25,9*	*34 provinsi*		*Kemenkes*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan fasilitas rujukan di Kawasan Timur Indonesia	*Jumlah RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1.727,5*	*3 lokasi*		*Kemenkes*
Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarananya RS UPT vertikal	*Jumlah RS UPT vertikal yang dikembangkan dan ditingkatkan sarana dan prasarananya*	*6*	*6*	*6*	*7*	*7*	*3.596,7*	*7 RS*		*Kemenkes*
Penyusunan rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	*Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan*	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*	*2,5*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan RSUD di DTTPK (Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan)	*Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina*	*7*	*14*	*21*	*28*	*35*	*24,1*	*15 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan yang ditingkatkan SPA sesuai standar	*Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*	*16,3*	*28 provinsi*		*Kemenkes*
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar*	*18*	*51*	*84*	*117*	*150*	*324,9*	*28 provinsi*		*Kemenkes*
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	*Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga*	*105*	*200*	*300,0*	*400,0*	*514,0*	*129,6*	*514 kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Pelayanan rujukan non spesialistik di FKTP	*Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik ≤ 2%*	*40,0*	*50,0*	*60,0*	*80,0*	*100,0*	*37,9*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan UTD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	*Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah*	*42*	*126*	*210*	*252*	*294*	*10,1*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penerapan telemedicine	*Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine*	*67*	*134*	*201*	*268*	*335*	*62,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	*Persentase rumah sakit rujukan yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*57,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penerapan sistem rujukan terintegrasi	*Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*25,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu FKTP untuk diakreditasi	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi*	*4.478*	*4.009*	*4.720*	*6.110*	*5.706*	*59,1*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pelayanan kesehatan lansia	*Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut lansia*	*45*	*50*	*55*	*60*	*65*	*115,4*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit untuk diakreditasi	*Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi*	*1028*	*851*	*1195*	*1169*	*991*	*65,5*	*34 provinsi*		*Kemenkes*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan RS Pratama	*Jumlah RS Pratama yang dibangun*	*15*	*10*	*10*	*10*	*10*	*2.466,2*	*15 kabupaten/kota*		*DAK/Pemda*
Penyediaan sarpras puskesmas DTPK	*Jumlah puskesmas DTPK yang mendapatkan dukungan peningkatan sarana prasarana*	*300*	*150*	*100*	*50*	*-*	*5.537,0*	*300 puskesmas*		*DAK/Pemda*
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	**Persentase puskesmas tanpa dokter**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.911,5**			
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	**35**	**47**	**59**	**71**	**83**				
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**				
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim	*Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim*	*1356*	*1493*	*1200*	*1200*	*1200*	*296,8*	*100 puskesmas*		*Kemenkes*
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	*Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu*	*4177*	*5487*	*4000*	*4000*	*4000*	*270,0*	*500 puskesmas*		*Kemenkes*
Pendayagunaan dokter spesialis	*Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*	*75,2*	*431 RS*		*Kemenkes*
Penyediaan bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	*Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)*	*2020*	*1885*	*1785*	*1650*	*1540*	*633,8*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	*Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK*	*0*	*500*	*1000*	*1500*	*1500*	*155,3*	*Pusat dan Poltekkes Kementerian Kesehatan*		*Kemenkes*
Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan	*Jumlah SDM kesehatan yang mendapat pelatihan strategis*	*2700*	*2700*	*2700*	*2700*	*2700*	*237,0*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	*Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan*	*52*	*104*	*156*	*208*	*260*	*221,8*	*Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan*		*Kemenkes*
Pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes di fasyankes Pemerintah	*Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah*	*0*	*500*	*1000*	*1500*	*1500*	*1.407,8*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pendayagunaan dokter pasca internsip	*Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan*	*0*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*613,8*	*34 provinsi*		*Kemenkes*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	**Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial**	**85**	**90**	**92**	**94**	**96**	**3.074,0**			
	Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**				
Pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasyankes	*Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar*	*3000*	*4000*	*5000*	*6000*	*7000*	*102,7*	*Fasyankes di provinsi/kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penggunaan obat sesuai FORNAS di rumah sakit	*Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS*	*70*	*75*	*80*	*85*	*90*	*33,2*	*RS provinsi/kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar	*Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*1.084,5*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi kabupaten/kota	*Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar*	*164*	*264*	*364*	*464*	*514*	*17,4*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penerapan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di instalasi farmasi provinsi dan kab/kota	*Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)*	*68*	*136*	*204*	*272*	*340*	*24,6*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penyediaan vaksin baru untuk pneumonia (PCV)	*Persentase ketersediaan PCV di provinsi rencana introduksi*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*1.673,1*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penyediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	*Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial*	*77*	*79*	*81*	*83*	*85*	*38,5*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	*Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,7*	*Jakarta*		*Kemenkes*
Pengawasan produk alkes dan PKRT	*Persentase produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat*	*90*	*90*	*90*	*95*	*95*	*31,7*	*Pusat/provinsi/ kabupaten/kota*		*Kemenkes*
Pemberian sertifikat CPOTB untuk UMKM OT	*Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap*	*42*	*54*	*65*	*76*	*87*	*13,7*	*33 provinsi*		*BPOM*
Penyelesaian permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	*Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu*	*16.300*	*16.500*	*16.700*	*16.900*	*17.100*	*5,3*	*33 provinsi*		*BPOM*
Produksi alat kesehatan di dalam negeri	*Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*46,6*	*Industri Alkes di provinsi/kabupaten/kota*		*Kemenkes*
ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	**Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan**	**25**	**35**	**45**	**55**	**65**	**1.786,8**			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				
	Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**				
Pendampingan tata kelola program kesehatan	*Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan*	*25*	*35*	*45*	*55*	*65*	*111,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Integrasi sistem informasi kesehatan	*Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)*	*10*	*25*	*45*	*70*	*100*	*137,2*	*Pusat*		*Kemenkes*
Peningkatan kualitas data rutin kesehatan	*Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin*	*0*	*5*	*10*	*20*	*30*	*12,6*	*Pusat*		*Kemenkes*
Penguatan sistem pencatatan data rutin program	*Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*48,5*	*35 provinsi*		*Kemenkes*
Penyusunan rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan	*Jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan yang dihasilkan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*50,2*	*Pusat*		*Kemenkes*
Penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	*Jumlah hasil penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan*	*3*	*4*	*4*	*4*	*4*	*104,7*	*DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat*		*Kemenkes*
Penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	*Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*256,2*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang upaya kesehatan masyarakat	*Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*116,0*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah II	*Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II*	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*219,9*	*Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku*		*Kemenkes*
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah V	*Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V*	*1*	*1*	*1*	*6*	*2*	*133,1*	*Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar*		*Kemenkes*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	*Jumlah hasil riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,6*	*28 provinsi*		*Kemenkes*
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah I	*Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I*	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*205,6*	*Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel*		*Kemenkes*
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah IV	*Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV*	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*108,2*	*Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar*		*Kemenkes*
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah III	*Jumlah hasil riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III*	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*241,1*	*Ada 7 provinsi : Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Malut, dan Papua*		*Kemenkes*
Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	*Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*31,5*	*Pusat*		*Kemenkes*
ProP : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	**Persentase obat memenuhi syarat**	**80,8**	**83,6**	**86,6**	**90,0**	**92,3**	**2.914,3**			
	Persentase makanan memenuhi syarat	**78**	**80**	**82**	**84**	**86**				
Sertifikasi pengawas obat dan makanan yang kompeten sesuai standar	*Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar*	*770*	*820*	*875*	*935*	*1.000*	*101,0*	*Pusat*		*BPOM*
Pengembangan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang real time dan terintegrasi	*Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan real time*	*35*	*55*	*70*	*85*	*100*	*246,7*	*33 provinsi*		*BPOM*
Penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan	*Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan*	*50*	*52*	*54*	*56*	*58*	*179,8*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai standar	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*75*	*77*	*80*	*83*	*85*	*192,5*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	*Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*	*82*	*85*	*88*	*91*	*94*	*262,0*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	*Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan*	*50*	*55*	*60*	*65*	*70*	*48,0*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	*Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan*	*60*	*63*	*66*	*68*	*71*	*301,1*	*33 provinsi*		*BPOM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	*Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice*	*70*	*75*	*80*	*85*	*90*	*1.282,9*	*33 provinsi*		*BPOM*
Penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan	*Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko*	*19*	*38*	*57*	*76*	*95*	*31,2*	*Pusat*		*BPOM*
Pemberian keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	*Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan*	*80*	*81*	*82*	*83*	*84*	*43,7*	*Pusat*		*BPOM*
Pemberian keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan sesuai standar	*Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu*	*78*	*80*	*82*	*84*	*86*	*5,6*	*Pusat*		*BPOM*
Pengawasan pangan olahan sesuai standar di kabupaten/kota	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar*	*50*	*125*	*200*	*275*	*350*	*26,0*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pengawasan fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat sesuai standar	*Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, dan bahan baku obat yang diawasi sesuai standar*	*84*	*86*	*88*	*90*	*92*	*18,2*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemberian keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	*Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar*	*78*	*79*	*80*	*81*	*82*	*46,8*	*Pusat*		*BPOM*
Pemberian keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	*Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar*	*60*	*63*	*66*	*69*	*72*	*49,9*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	*Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan*	*72*	*75*	*78*	*80*	*82*	*74,0*	*33 provinsi*		*BPOM*
Pengembangan grand design penguatan laboratorium dan balai POM	*Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dan penguatan balai POM*	*-*	*5*	*20*	*30*	*40*	*5,0*	*Pusat*		*BPOM*
PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	**Nilai rata-rata hasil PISA:** **a. Membaca** **b. Matematika** **c. Sains**	**NA** **NA** **NA**	**399,1** **388,7** **400,4**	**NA** **NA** **NA**	**NA** **NA** **NA**	**399,7** **392,3** **406,2**	**289.780,0**			
	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): **a. Membaca** **b. Matematika** **c. Sains**	**NA** **NA** **NA**	**34,4** **46,6** **49**	**NA** **NA** **NA**	**NA** **NA** **NA**	**35,6** **47,4** **51**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	**8,75**	**8,85**	**8,95**	**9,06**	**9,16**				
	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	**13,41**	**13,6**	**13,79**	**13,97**	**14,16**				
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	**Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen):** **a. Membaca** **b. Matematika** **c. Sains**	**57,2** **26,5** **30,4**	**58,2** **27,4** **31,4**	**59,2** **28,3** **32,4**	**60,2** **29,2** **33,4**	**61,2** **30,1** **34,4**	**9.390,5**			
	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	**67,5**	**70,9**	**74,6**	**78,2**	**81,8**				
ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif							**996,8**			
Kurikulum yang dikembangkan	*Jumlah Kurikulum dan pembelajaran pendidikan umum yang dikembangkan*	*148*	*148*	*148*	*148*	*148*	*75,4*			*Kemendikbud*
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	*Jumlah Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan*	*171*	*171*	*171*	*171*	*171*	*195,7*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku*	*2.259*	*2.259*	*2.259*	*2.259*	*2.259*	*174,6*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku*	*148.805*	*148.805*	*148.805*	*148.805*	*148.805*	*154,1*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku*	*15.383*	*15.383*	*15.383*	*15.383*	*15.383*	*184,7*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*20,7*			*Kemendikbud*
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	*Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*12,8*			*Kemenag*
Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	*Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan*	*0,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*79,0*			*Kemenag*
Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	*Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus*	*0,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,5*			*Kemenag*
Program Studi Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	*Jumlah Program Studi yang Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital*	*600*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*58,2*	*Pusat*		*Kemendikbud*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	*Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus*	*200*	*250*	*300*	*350*	*400*	*8,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	*Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	*29,0*			*Kemenag*
ProP : Peningkatan Kompetensi Pendidik							**6.121,4**			
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*105,2*			*Kemendikbud*
Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	*Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan*	*676*	*676*	*676*	*676*	*676*	*150,3*			*Kemendikbud*
Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*7.330*	*7.330*	*7.330*	*7.330*	*7.330*	*117,7*			*Kemendikbud*
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	*Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik*	*21.219*	*21.219*	*21.219*	*21.219*	*21.219*	*499,8*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*138,9*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*133,3*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*3.388*	*135,8*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*150,8*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*3.377*	*136,5*			*Kemendikbud*
Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*1.567*	*1.567*	*1.567*	*1.567*	*1.567*	*96,5*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB*	*3.069*	*3.069*	*3.069*	*3.069*	*3.069*	*116,3*			*Kemendikbud*
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	*Jumlah Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi*	*39.564*	*39.564*	*39.564*	*39.564*	*39.564*	*1.022,1*			*Kemendikbud*
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*58,1*			*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	*Jumlah Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis*	-	*4.212*	*4.212*	*4.212*	*4.212*	*82,8*			*Kemendikbud*
Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*1.508*	*1.508*	*1.508*	*1.508*	*1.508*	*49,2*			*Kemendikbud*
Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	*Jumlah Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi*	-	*900*	*900*	*900*	*900*	*27,2*			*Kemendikbud*
Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	*Jumlah Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*64,8*			*Kemendikbud*
Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*204*	*204*	*204*	*204*	*204*	*16,6*			*Kemendikbud*
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	*Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Memperoleh Pembinaan Kemahiran Berbahasa Indonesia*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*27,9*			*Kemendikbud*
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	*Jumlah Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan*	*40.510,00*	*40.510,00*	*40.510,00*	*40.510,00*	*40.510,00*	*829,4*			*Kemenag*
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	*Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya*	*3.950,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*49,7*			*Kemenag*
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*4.369,00*	*4.369,00*	*4.369,00*	*4.369,00*	*4.369,00*	*166,8*			*Kemenag*
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	*Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan*	*1.245,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*352,0*			*Kemenag*
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	*Jumlah Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan*	*0,00*	*78,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*5,1*			*Kemenag*
KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	*Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan*	*264,00*	*264,00*	*264,00*	*264,00*	*264,00*	*571,0*			*Kemenag*
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*4,2*			*Kemenag*
Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	*Jumlah Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan*	*0,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*2,3*			*Kemenag*
Penguatan KKG/MGMP	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Penguatan KKG/MGMP*	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*324,8*			*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kompetensi Guru	*Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya*	*5.712,00*	*5.712,00*	*5.712,00*	*5.712,00*	*5.712,00*	*62,7*			*Kemenag*
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*159,00*	*9,3*			*Kemenag*
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	*Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*71,9*			*Kemenag*
Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*163,00*	*170,00*	*175,00*	*180,00*	*185,00*	*11,1*			*Kemenag*
SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	*Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi*	*915*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*155,8*	*Pusat*		*Kemendikbud*
SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	*Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar*	*380*	*500*	*600*	*700*	*800*	*22,9*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	*Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya*	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*	*16,2*	*Pusat*		*Kemenag*
Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	*Jumlah Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*	*12,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya*	*42*	*42*	*42*	*42*	*42*	*13,5*	*Pusat*		*Kemenag*
Dosen yang Tersertifikasi	*Jumlah Dosen yang disertifikasi*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*11,5*	*Pusat*		*Kemenag*
Dosen yang bersertifikat	*Jumlah Dosen yang disertifikasi*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*2,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	*Jumlah Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi*	*1.952*	*1.952*	*1.952*	*1.952*	*1.952*	*75,0*	*Daerah*		*Kemenag*
Dosen PTA Katolik Tersertifikasi	*Jumlah Dosen PTA Katolik yang Disertifikasi*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*1,5*	*Pusat*		*Kemenag*
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	*Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya*	*635*	*635*	*635*	*635*	*635*	*55,6*	*Pusat*		*Kemenag*
Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa PTKH	*Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH yang Ditingkatkan Kompetensinya*	*921*	*921*	*921*	*921*	*921*	*40,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Sertifikasi Dosen	*Jumlah Dosen Yang Disertifikasi*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0,5*	*Pusat*		*Kemenag*
Dosen yang tingkatkan kompetensinya	*Jumlah Dosen yang ditingkatkan kompetensinya*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*	*8,5*	*Pusat*		*Kemenag*
SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	*Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen*	*8.000*	*9.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*62,5*	*Pusat*		*Kemendikbud*
SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	*Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*49,4*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Kompetensi Guru Agama Khonghucu	*Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*1,8*			*Kemenag*

A.3.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Agama Khonghucu Penerima Insentif	*Jumlah Guru yang Menerima Insentif*	*132,00*	*132,00*	*132,00*	*132,00*	*132,00*	*2,8*			*Kemenag*
ProP : Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan							**1.398,7**			
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	*Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*83,1*			*Kemendikbud*
Model Penilaian Pendidikan	*Jumlah Model Penilaian Pendidikan*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*49,3*			*Kemendikbud*
Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	*Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional*	*8.424.500*	*8.424.500*	*8.424.500*	*8.424.500*	*8.424.500*	*1.003,2*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	*Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT*	*90.000*	*105.000*	*120.000*	*135.000*	*150.000*	*86,8*			*Kemendikbud*
Soal yang dikembangkan	*Jumlah Soal yang dikembangkan*	*66.280*	*66.280*	*66.280*	*66.280*	*66.280*	*100,6*			*Kemendikbud*
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya*	*3.492,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*14,7*			*Kemenag*
Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	*Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA*	*1.575,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*25,1*			*Kemenag*
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	*Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*9,6*			*Kemenag*
Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*26,4*			*Kemenag*
ProP : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi							**821,6**			
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	*Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*180,0*			*Kemendikbud*
Model Media Pendidikan Berbasis TIK	*Jumlah Model Media Pendidikan Berbasis TIK*	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*	*21,0*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan Yang Menerapkan TIK untuk E-	*Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran*	*9.460*	*10.000*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*117,4*			*Kemendikbud*
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	*Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK*	*300*	*500*	*600*	*700*	*800*	*116,2*			*Kemendikbud*
Produksi Dokumenter	*Jumlah paket siaran dokumenter*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*17,0*	*Pusat*		*LPP RRI*
Kanal Pendidikan dan Budaya	*Jumlah jam siar konten pendidikan dan budaya*	*1.460*	*2.190*	*2.920*	*2.920*	*2.920*	*370,0*	*Pusat*		*LPP TVRI*
ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran							**52,0**			
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	*Jumlah Perangkat pembelajaran yang dikembangkan*	*106*	*106*	*106*	*106*	*106*	*52,0*			*Kemendikbud*
KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	**Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi**	**33,4**	**35,4**	**37,4**	**39,5**	**41,7**	**232.259,8**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	**105,5**	**105,5**	**104,4**	**104,4**	**104,4**				
ProP : Sarana dan Prasarana Pendidikan							**24.250,5**			
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/ Direvitalisasi	*Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/ Direvitalisasi*	*250*	*300*	*350*	*400*	*450*	*273,5*			*Kemendikbud*
Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/ Direvitalisasi	*Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/ Direvitalisasi*	*-*	*25*	*25*	*25*	*25*	*135,9*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	*Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana*	*-*	*500*	*500*	*500*	*500*	*150,2*			*Kemendikbud*
SD-SMP Satu Atap yang dibangun	*Jumlah SD-SMP Satu Atap yang dibangun*	*-*	*15*	*15*	*15*	*15*	*75,8*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Direnovasi	*Jumlah Sekolah Yang Direnovasi*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*49,8*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Direnovasi	*Jumlah Sekolah Yang Direnovasi*	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*	*459,0*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Direnovasi	*Jumlah Sekolah Yang Direnovasi*	*132*	*132*	*132*	*132*	*132*	*373,9*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Direnovasi	*Jumlah Sekolah Yang Direnovasi*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*59,4*			*Kemendikbud*
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	*Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*148,4*			*Kemendikbud*
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	*Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*131,0*			*Kemendikbud*
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	*Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*209,2*			*Kemendikbud*
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	*Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*316,2*			*Kemendikbud*
Asrama pada Madrasah yang dibangun	*Jumlah Asrama pada Madrasah yang dibangun*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*24,8*			*Kemenag*
Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	*Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun*	*256,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*63,5*			*Kemenag*
Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	*Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi*	*245,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*30,7*			*Kemenag*
Laboratorium Komputer MA yang dibangun	*Jumlah Laboratorium Komputer MA yang dibangun*	*0,00*	*160,00*	*170,00*	*180,00*	*190,00*	*178,4*			*Kemenag*
Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	*Jumlah Laboratorium Komputer MTs yang dibangun*	*0,00*	*160,00*	*170,00*	*180,00*	*190,00*	*178,4*			*Kemenag*
Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	*Jumlah Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya*	*14,00*	*15,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*	*25,1*			*Kemenag*
Madrasah yang direvitalisasi	*Jumlah Madrasah yang direvitalisasi*	*0,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*15,8*			*Kemenag*
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu UKS/M	*Jumlah Madrasah yang ditingkatan mutu UKS dan sanitasinya*	*58,00*	*58,00*	*58,00*	*58,00*	*58,00*	*11,7*			*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	*Jumlah MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan*	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*451,7*			*Kemenag*
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	*Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*72,2*			*Kemenag*
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	*Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*9,1*			*Kemenag*
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	*Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan*	*0,00*	*300,00*	*350,00*	*400,00*	*450,00*	*93,5*			*Kemenag*
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	*Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan*	*0,00*	*300,00*	*350,00*	*400,00*	*450,00*	*107,0*			*Kemenag*
Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang	*Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi*	*10,00*	*15,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*	*42,5*			*Kemenag*
Ruang kelas MA yang dibangun	*Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun*	*135,00*	*140,00*	*150,00*	*160,00*	*170,00*	*27,5*			*Kemenag*
Ruang kelas MA yang direhabilitasi	*Jumlah Ruang kelas MA yang direhabilitasi*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*229,8*			*Kemenag*
Ruang kelas MI yang dibangun	*Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun*	*159,00*	*170,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*	*28,0*			*Kemenag*
Ruang kelas MI yang direhabilitasi	*Jumlah Ruang kelas MI yang direhabilitasi*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*229,8*			*Kemenag*
Ruang kelas MTs yang dibangun	*Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun*	*180,00*	*190,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*26,2*			*Kemenag*
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	*Jumlah Ruang kelas MTs yang direhabilitasi*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*229,8*			*Kemenag*
Ruang kelas RA yang dibangun	*Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun*	*0,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*15,8*			*Kemenag*
Ruang kelas RA yang direhabilitasi	*Jumlah Ruang kelas RA yang direhabilitasi*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*76,6*			*Kemenag*
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*6,4*			*Kemenag*
Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	*Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana*	*74,00*	*80,00*	*85,00*	*90,00*	*95,00*	*21,0*			*Kemenag*
Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	*Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi*	*80*	*50*	*50*	*50*	*50*	*5.086,9*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	*Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya melalui SBSN*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*5.291,6*	*Pusat*		*Kemenag*
Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada PTKI	*Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarana Perpustakaannya*	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*	*43,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Sarana dan Prasarana PTKI	*Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya*	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*	*400,0*	*Pusat*		*Kemenag*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana PTK yang memenuhi Standar	*Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana dan Prasarana PTT/AK yang memnuhi standar*	*95*	*355*	*355*	*355*	*355*	*402,5*	*Pusat*		*Kemenag*
Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	*Jumlah Program Studi Di Luar Domisili (PDD)*	*2*	*5*	*5*	*5*	*5*	*17,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	*Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN*	*12*	*8*	*2*	*2*	*2*	*2.472,1*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Khonghucu	*Jumlah Sarana dan Prasarana*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*3,3*			*Kemenag*
Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama*	*136*	*136*	*136*	*136*	*136*	*5.871,4*			*Kemenag*
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan	*Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*39,8*			*Kemenag*
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana	*Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana*	*272,00*	*272,00*	*272,00*	*272,00*	*272,00*	*45,0*			*Kemenag*
ProP : Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat							**200.646,1**			
Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	*Jumlah Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan*	*135.581*	*135.581*	*135.581*	*135.581*	*135.581*	*1.373,7*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi*	*3.078*	*3.078*	*3.078*	*3.078*	*3.078*	*60,4*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi*	*12.150*	*12.150*	*12.150*	*12.150*	*12.150*	*94,6*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi*	*2.303*	*2.303*	*2.303*	*2.303*	*2.303*	*38,2*			*Kemendikbud*
Sekolah yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	*Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*27,9*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar*	*10.360.614*	*10.360.614*	*10.360.614*	*10.360.614*	*10.360.614*	*23.320,8*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar*	*1.368.243*	*1.368.243*	*1.368.243*	*1.368.243*	*1.368.243*	*6.558,7*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	*Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar*	*1.829.167*	*1.829.167*	*1.829.167*	*1.829.167*	*1.829.167*	*8.501,3*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	*Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP*	*4.369.968*	*4.369.968*	*4.369.968*	*4.369.968*	*4.369.968*	*15.065,5*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendikbud*
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	*Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade*	*5.168*	*5.168*	*5.168*	*5.168*	*5.168*	*280,9*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	*Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade*	*4.842*	*4.842*	*4.842*	*4.842*	*4.842*	*238,6*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	*Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade*	*5.683*	*5.683*	*5.683*	*5.683*	*5.683*	*443,1*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	*Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional*	*9.261*	*9.261*	*9.261*	*9.261*	*9.261*	*485,7*			*Kemendikbud*
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	*Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade*	*3.294*	*4.056*	*4.056*	*4.056*	*4.056*	*384,1*			*Kemendikbud*
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	*Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi*	*365.380*	*289.854*	*208.624*	*113.572*	-	*9.239,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	*Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)*	*5.148*	*7.798*	*8.198*	*8.898*	*9.148*	*658,4*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	*Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi*	*297*	*400*	*500*	*600*	*700*	*7,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	*Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa PPA*	*970*	*970*	*970*	*970*	*970*	*14,6*	*Pusat*		*Kemenag*
Beasiswa BIDIK MISI	*Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa BIDIK MISI*	*1.345*	*1.345*	*1.067*	*767*	*467*	*55,1*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Beasiswa Mahasiswa Miskin	*Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Mahasiswa Miskin*	*1.135*	*1.135*	*1.135*	*1.135*	*1.135*	*15,6*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Bidik Misi PTKI	*Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Bidik Misi PTKI*	*38.000*	*26.364*	*18.576*	*10.788*	*3.000*	*1.006,2*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	*Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*35,9*	*Pusat*		*Kemenag*
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	*Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi*	*1.768*	*1.768*	*1.607*	*1.107*	*607*	*77,8*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	*Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*100,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Mahasiswa penerima beasiswa PPA	*Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*2,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	*Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi*	*20*	*20*	*20*	*15*	*10*	*1,1*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	*Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*30,0*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	*Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi*	*250*	*250*	*100*	*150*	*100*	*12,5*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya, dan Utama Widya Pasraman	*Jumlah Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya, dan Utama Widya Pasraman*	*333*	*333*	*333*	*333*	*333*	*2,2*			*Kemenag*
PIP Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	*Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman*	*293*	*293*	*293*	*293*	*293*	*1,0*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP*	*30.176*	*30.176*	*30.176*	*30.176*	*30.176*	*79,7*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS*	*27.540*	*27.540*	*27.540*	*27.540*	*27.540*	*145,4*			*Kemenag*
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP*	*46.283,00*	*46.283,00*	*46.283,00*	*46.283,00*	*46.283,00*	*314,2*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS*	*18.562,00*	*18.562,00*	*18.562,00*	*18.562,00*	*18.562,00*	*153,9*			*Kemenag*
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP*	*105.203,00*	*105.203,00*	*105.203,00*	*105.203,00*	*105.203,00*	*462,4*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	*Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS*	*114.516,00*	*114.516,00*	*114.516,00*	*114.516,00*	*114.516,00*	*696,1*			*Kemenag*
Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	*Jumlah Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*7,4*			*Kemenag*
Siswa MA penerima Bantuan PIP	*Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP*	*320.372,00*	*320.372,00*	*320.372,00*	*320.372,00*	*320.372,00*	*1.879,5*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa MI penerima Bantuan PIP	*Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP*	*939.607,00*	*939.607,00*	*939.607,00*	*939.607,00*	*939.607,00*	*2.480,5*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa MTs penerima Bantuan PIP	*Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan PIP*	*745.086,00*	*745.086,00*	*745.086,00*	*745.086,00*	*745.086,00*	*3.278,3*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa SDTK Penerima BOS	*Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS*	*2.273,00*	*2.273,00*	*2.273,00*	*2.273,00*	*2.273,00*	*10,7*			*Kemenag*
PIP SDTK	*Jumlah Siswa SDTK Penerima KIP*	*1.032,00*	*1.032,00*	*1.032,00*	*1.032,00*	*1.032,00*	*2,7*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	*Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*3,5*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa SMPTK Penerima BOS	*Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS*	*3.088,00*	*3.088,00*	*3.088,00*	*3.088,00*	*3.088,00*	*18,1*			*Kemenag*
PIP SMPTK	*Jumlah Siswa SMPTK Penerima KIP*	*2.838,00*	*2.838,00*	*2.838,00*	*2.838,00*	*2.838,00*	*12,5*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa SMTK Penerima BOS	*Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS*	*8.725,00*	*8.725,00*	*8.725,00*	*8.725,00*	*8.725,00*	*71,7*			*Kemenag*
PIP SMTK/SMAK	*Jumlah Siswa SMTK penerima KIP*	*7.953,00*	*7.953,00*	*7.953,00*	*7.953,00*	*7.953,00*	*46,7*		*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	*Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*5,3*	*Pusat*		*Kemenag*
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	*Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah*	*400.000*	*800.000*	*1.200.000*	*1.600.000*	*2.000.000*	*63.320,0*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemendikbud*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	*Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah*	*17.565*	*37.565*	*62.565*	*92.565*	*145.130*	*3.733,3*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	*Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah*	*1.690*	*3.380*	*5.070*	*6.760*	*8.450*	*267,7*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	*Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah*	*100*	*200*	*300*	*400*	*500*	*15,9*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	*Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah*	*398*	*796*	*1.192*	*1.588*	*1.984*	*63,1*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	*Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah*	*180*	*360*	*540*	*720*	*900*	*28,6*	*Pusat*	*Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh*	*Kemenag*
Siswa MI penerima BOS	*Jumlah Siswa MI penerima BOS*	*3.894.365*	*3.894.365*	*3.894.365*	*3.894.365*	*3.894.365*	*20.562,0*			*Kemenag*
Siswa MTs penerima BOS	*Jumlah Siswa MTs penerima BOS*	*3.358.771,00*	*3.358.771,00*	*3.358.771,00*	*3.358.771,00*	*3.358.771,00*	*21.675,0*			*Kemenag*
Siswa MA penerima BOS	*Jumlah Siswa MA penerima BOS*	*1.497.606,00*	*1.497.606,00*	*1.497.606,00*	*1.497.606,00*	*1.497.606,00*	*13.158,4*			*Kemenag*
Siswa SMAK Penerima BOS	*Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan BOS*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*20,7*			*Kemenag*
ProP : Penanganan Anak Tidak Sekolah							**1.767,7**			
Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	*Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan*	*-*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*866,1*			*Kemendikbud*
SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	*Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan*	*-*	*500*	*500*	*500*	*500*	*84,8*			*Kemendikbud*
Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	*Jumlah Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan*	*-*	*30*	*30*	*30*	*30*	*80,5*			*Kemendikbud*
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	*Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional*	*-*	*549*	*549*	*549*	*549*	*52,2*			*Kemendikbud*
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	*Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*27,6*			*Kemendikbud*
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	*Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional*	*245*	*245*	*245*	*245*	*245*	*179,4*			*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	*Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*36,8*			*Kemendikbud*
Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	*Jumlah Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus*	*2.895*	*2.895*	*2.895*	*2.895*	*2.895*	*440,2*			*Kemendikbud*
ProP : Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah							**5.595,4**			
Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	*Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan*	*-*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*52,5*			*Kemendikbud*
Kabupaten/Kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	*Jumlah Kabupaten/Kota yang Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar*	*-*	*514*	*514*	*514*	*514*	*521,9*			*Kemendikbud*
Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	*Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*245,1*			*Kemendikbud*
Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	*Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif*	*-*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*83,7*			*Kemendikbud*
Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari	*Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*6,5*			*Kemenag*
BOP RA	*Jumlah Siswa RA penerima BOP*	*1.331.207,00*	*1.331.207,00*	*1.331.207,00*	*1.331.207,00*	*1.331.207,00*	*4.685,8*			*Kemenag*
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							**17.074,4**			
ProP : Revitalisasi LPTK							**100,5**			
Penyelenggaraan LPTK	*Jumlah Penyelenggaraan LPTK*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*10,9*	*Pusat*		*Kemenag*
LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	*Jumlah LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*	*89,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik							**13.865,5**			
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir*	*43.360*	*43.360*	*43.360*	*43.360*	*43.360*	*160,6*			*Kemendikbud*
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*11,6*			*Kemendikbud*
Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	*Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*19,3*			*Kemendikbud*

A.3.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	*Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru*	*24.697*	*24.697*	*24.697*	*24.697*	*24.697*	*1.058,3*			*Kemendikbud*
Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	*Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*9,9*			*Kemendikbud*
Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	*Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru*	*11.052*	*11.052*	*11.052*	*11.052*	*11.052*	*538,1*			*Kemendikbud*
Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	*Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru*	*4.251*	*4.251*	*4.251*	*4.251*	*4.251*	*210,2*			*Kemendikbud*
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	*Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas*	*899*	*899*	*899*	*899*	*899*	*168,4*			*Kemendikbud*
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	*Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*483,3*			*Kemendikbud*
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	*Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen*	*1.693*	*1.693*	*1.693*	*1.693*	*1.693*	*246,8*			*Kemendikbud*
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	*Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*243,8*			*Kemendikbud*
Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	*Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*18,7*			*Kemendikbud*
SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	*Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar*	*10.505*	*16.514*	*20.739*	*26.242*	*30.715*	*8.540,4*	*Pusat*		*Kemendikbud*
GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	*Jumlah GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)*	*1.000,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*84,9*			*Kemenag*
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	*Jumlah Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)*	*1.200,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*120,7*			*Kemenag*
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	*Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*3,5*			*Kemenag*
Guru yang mengikuti Program PPG	*Jumlah Guru yang mengikuti Program PPG*	*700,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*34,4*			*Kemenag*
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	*Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*	*240,00*	*15,3*			*Kemenag*
Guru/Pengawas Madrasah penerima beasiswa S2	*Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*44,2*			*Kemenag*
Guru/Pengawas/Dosen PAI penerima Beasiswa S2	*Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang menerima Beasiswa S2*	*0,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*	*118,9*			*Kemenag*
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	*Jumlah KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan*	*0,00*	*120,00*	*130,00*	*140,00*	*150,00*	*306,3*			*Kemenag*
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu*	*150,00*	*160,00*	*170,00*	*180,00*	*190,00*	*15,7*			*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah dan RA	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA yang Mendapatkan Pengembangan Karir*	*1.662,00*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*	*13,4*			*Kemenag*
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	*Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madra*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1.398,9*			*Kemenag*
ProP : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan							**3.108,4**			
Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	*Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus*	*17.797*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*1.629,3*			*Kemendikbud*
Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	*Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus*	*2.283*	*2.283*	*2.283*	*2.283*	*2.283*	*238,6*			*Kemendikbud*
Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	*Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus*	*893*	*893*	*893*	*893*	*893*	*94,4*			*Kemendikbud*
Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	*Jumlah Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus*	*630*	*630*	*630*	*630*	*630*	*79,8*			*Kemendikbud*
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	*Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)*	*800*	*800*	*850*	*900*	*950*	*148,3*			*Kemendikbud*
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	*Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)*	*500*	*500*	*550*	*600*	*650*	*74,7*			*Kemendikbud*
Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	*Jumlah Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*113,9*			*Kemendikbud*
Penataan Guru Dikdas	*Jumlah Penataan Guru Dikdas*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*52,6*			*Kemendikbud*
Penataan Guru Dikmen	*Jumlah Penataan Guru Dikmen*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*75,6*			*Kemendikbud*
Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	*Jumlah Daerah yang Melakukan Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*122,8*			*Kemendikbud*
Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	*Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus*	*4.514,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*427,7*			*Kemenag*
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	*Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*2,2*			*Kemenag*
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	*Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*48,4*			*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	**Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B:** **SD/MI** **SMP/MTS** **SMA/MA**	**80,11** **74,54** **73,65**	**81,19** **76,01** **74,53**	**82,28** **77,48** **75,41**	**83,37** **78,95** **76,29**	**84,46** **81,33** **80,86**	**11.352,5**			
	Perguruan Tinggi Terakreditasi A	**135,0**	**160,0**	**185,0**	**205,0**	**225,0**				
ProP : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi		**64**	**66**	**68**	**71**	**73**	**7.308,1**			
Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	*Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang Diakreditasi*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*1.185,1*			*Kemendikbud*
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional	*Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional*	*17.083*	*17.083*	*17.083*	*17.083*	*17.083*	*419,2*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	*Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Diakreditasi*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*1.525,1*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	*Jumlah Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP*	*15.943*	*15.943*	*15.943*	*15.943*	*15.943*	*2.155,0*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	*Jumlah Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP*	*214.312*	*214.312*	*214.312*	*214.312*	*214.312*	*959,2*			*Kemendikbud*
SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	*Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)*	*10.795*	*10.795*	*10.795*	*10.795*	*10.795*	*146,0*			*Kemendikbud*
Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	*Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*820,4*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Madrasah dan RA yang Terakreditasi	*Jumlah Madrasah dan RA yang Terakreditasi*	*532,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.600,00*	*42,6*			*Kemenag*
Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	*Jumlah Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi*	*52,00*	*55,00*	*60,00*	*65,00*	*70,00*	*13,0*			*Kemenag*
SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	*Jumlah SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*4,1*			*Kemenag*
Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	*Jumlah Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B*	*425*	*500*	*500*	*500*	*500*	*21,0*			*Kemenag*
PTKI yang Terakreditasi	*Jumlah PTKI yang Terakreditasi*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*17,5*			*Kemenag*
ProP : Perluasan Budaya Mutu Pendidikan							**4.044,4**			
Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	*Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*81,9*			*Kemendikbud*
Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	*Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*1.040*	*120,2*			*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	*Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*97,1*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	*Jumlah Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya*	*216.924*	*216.924*	*216.924*	*216.924*	*216.924*	*106,7*			*Kemendikbud*
Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya*	*216.974*	*216.974*	*216.974*	*216.974*	*216.974*	*651,5*			*Kemendikbud*
Sekolah Berbasis Komunitas	*Jumlah Sekolah Berbasis Komunitas*	*-*	*425*	*425*	*425*	*425*	*112,0*			*Kemendikbud*
Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	*Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan*	*514*	*514*	*514*	*514*	*514*	*59,4*			*Kemendikbud*
Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	*Jumlah Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan*	*-*	*280*	*280*	*280*	*280*	*66,0*			*Kemendikbud*
Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	*Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*	*514*	*514*	*514*	*514*	*514*	*83,6*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*	*409,7*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*380,6*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*	*9.871*	*9.871*	*9.871*	*9.871*	*9.871*	*198,0*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*	*-*	*125*	*125*	*125*	*125*	*30,8*			*Kemendikbud*
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*85,9*			*Kemendikbud*
Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	*Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)*	*-*	*200*	*200*	*200*	*200*	*28,6*			*Kemendikbud*
Program Studi Dibina Menjadi Prodi Unggul	*Jumlah Program Studi Dibina yang Menjadi Prodi Unggul*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*51,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	*Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya*	*360*	*400*	*400*	*400*	*400*	*780,4*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	*Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*29,3*			*Kemenag*
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	*Jumlah Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan*	*211,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*	*268,0*			*Kemenag*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*4,1*			*Kemenag*
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*5,2*			*Kemenag*
Siswa Madrasah yang Berdaya Saing	*Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing*	*1.535,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*61,8*			*Kemenag*
Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	*Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia*	*5*	*11*	*14*	*14*	*14*	*303,7*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Perguruan Tinggi Menerapkan SNDIKTI	*Jumlah Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*28,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan							**19.702,8**			
ProP : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan							**2.841,5**			
Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	*Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*119,2*			*Kemendikbud*
Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu	*Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan*	*-*	*34*	*34*	*34*	*34*	*71,8*			*Kemendikbud*
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	*Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*44,3*			*Kemendikbud*
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	*Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan*	*192*	*192*	*192*	*192*	*192*	*43,4*			*Kemendikbud*
Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	*Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*78,6*			*Kemendikbud*
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	*Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam*	*79,00*	*79,00*	*79,00*	*79,00*	*79,00*	*131,2*			*Kemenag*
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	*Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*2.351,0*			*Kemenag*
Peningkatan kapasitas kelembagaan UKS/M di daerah	*Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*2,0*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan							**16.709,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Perencanaan	*Jumlah Layanan Perencanaan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*124,5*			*Kemendikbud*
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN	*Jumlah PTA Katolik Negeri yang Menerima BOPTN*	*364*	*364*	*364*	*364*	*364*	*3,4*	*Pusat*		*Kemenag*
PTA Penerima BOPTN	*Jumlah PTA yang Menerima BOPTN*	*15.378*	*15.378*	*15.378*	*15.378*	*15.378*	*143,8*	*Pusat*		*Kemenag*
PTKIN Penerima BOPTN	*Jumlah PTKIN Penerima BOPTN*	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*	*5.315,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Buku Pustaka (BOPTN)	*Jumlah Buku yang diseragkan kepada PTN sebagai bantuan dari BOPTN*	*5.137*	*5.137*	*5.137*	*5.137*	*5.137*	*239,4*	*34 Propinsi*		*Kemendikbud*
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	*Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa PTN dengan bantuan dari BOPTN yang Dilaporkan*	*745*	*745*	*745*	*745*	*745*	*889,9*	*34 Propinsi*		*Kemendikbud*
Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	*Jumlah Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM yang Dikembangkan dengan bantuan dari BOPTN*	*192*	*192*	*192*	*192*	*192*	*372,1*	*34 Propinsi*		*Kemendikbud*
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	*Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui BOPTN*	*2.382*	*2.382*	*2.382*	*2.382*	*2.382*	*854,8*	*34 Propinsi*		*Kemendikbud*
Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	*Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat layanan bantuan operasional dari BOPTN*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*400,0*	*34 Propinsi*		*Kemendikbud*
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH)	*Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)*	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*	*8.366,5*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan							**151,8**			
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	*Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan*	*548*	*548*	*548*	*548*	*548*	*119,5*			*Kemendikbud*
Layanan Data dan Informasi	*Jumlah Layanan Data dan Informasi*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*32,3*			*Kemenag*
PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**66,34**	**68,1**	**69,87**	**71,66**	**73,49**	**971,8**			
	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	**Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**91,2116475**	**91,27794284**	**91,27896233**	**91,33469578**	**91,38627023**				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**73,24481017**	**73,50050042**	**73,74051922**	**73,96592027**	**74,17747551**				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	**52,512**	**53,134**	**53,756**	**54,378**	**55**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	**Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**	**Menurun**				
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	**55,33**	**56,5**	**56,5**	**58,17**	**57,67**				
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	**Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak**						**453,1**			
ProP : Penjaminan pemenuhan hak anak secara universalnnya	**a.Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun**	**10,19**	**9,8**	**9,44**	**9,08**	**8,74**	**260,1**			
	b. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	**3,64**	**3,59**	**3,55**	**3,51**	**3,47**				
	c. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	**64**	**65,79**	**67,6**	**69,44**	**71,34**				
	d. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA	**247**	**270**	**290**	**315**	**335**				
Peningkatan kapasitas dan peran forum anak	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak*	*34*	*17*	*17*	*17*	*17*	*9,0*	*548 Provinsi/Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak*	*34*	*17*	*17*	*17*	*17*	*8,0*	*34 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak*	*10*	*9*	*9*	*9*	*9*	*6,0*	*13 Prov/Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	*24*	*20*	*20*	*20*	*20*	*6,7*	*19 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan daycare	*5*	*10*	*25*	*25*	*25*	*18,0*	*40 Provinsi/ Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
pencegahan perkawinan anak	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*8,0*	*100 Provinsi/ Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
pengembangan lingkungan ramah anak	*jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak*	*10*	*10*	*10*	*10*	*12*	*8,2*	*11 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
promosi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*8,3*	*28 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	*10*	*4*	*5*	*5*	*6*	*4,7*	*13 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah ramah anak*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5,6*	*10 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pembangunan fasilitas kreativitas dan budaya anak*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7,6*	*10 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	*Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan Kebijakan KLA*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*15,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	*Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)*	*34*	*22*	*24*	*28*	*34*	*4,0*	*Pusat*		*Kemendagri*
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	*Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal*	*60*	*70*	*80*	*90*	*100*	*86,5*	*Daerah*		*KemenKumham*
Pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak di Luar Lembaga	*Persentase klien pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga*	*20*	*25*	*30*	*35*	*40*	*64,5*	*Daerah*		*KemenKumham*
ProP : Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya							**193,0**			
	a.Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	**6,03**	**5,53**	**5,02**	**4,51**	**4,00**				
	b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**				
	c. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	**74,46**	**76,13**	**77,77**	**79,39**	**81**				
Pelaksanaannya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	*Terlaksananya SNPHAR 2022*	*-*	*1*	*-*	*-*	*1*	*0,0*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kampanye perlindungan anak dari kekerasan	*jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kampanye perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*5,5*	*13 provinsi*		*Kemen PPPA*
Lembaga Layanan yang dilatih manajemen kasus dan pelayanan terpadu	*Jumlah provinsi yang lembaga Layanannya mendapatkan pelatihan manajemen kasus dan pelayanan terpadu*	*-*	*8*	*8*	*9*	*9*	*5,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
penyediaan hotline bagi korban (TeSA)	*jumlah layanan pengaduan melalui hotline bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	*7,0*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi*	*0*	*416*	*456*	*496*	*536*	*4,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.45

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	*Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam peneyelenggaran penangangan kekerasan dan eksploitasi pada anak*	*0*	*12*	*14*	*14*	*16*	*3,7*	*56 provinsi/kab/kota*		*Kemen PPPA*
Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	*Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak*	*-*	*1584*	*1742*	*1916*	*2108*	*5,0*	*514 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan	*Jumlah Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan*	*-*	*3*	*6*	*6*	*3*	*6,0*	*Kota malang, Kab. Bintan, Kota Kupang, Kota Samarinda, Kab. Deli Serdang, Kota Palu, Kota Banda Aceh, kab. Solok, Kab. Gorontalo*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi	*Jumlah Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi*	*-*	*2*	*4*	*4*	*2*	*4,5*	*Kab. Berau, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Tobasa, Kab. Magelang, Kab. Bogor*		*Kemen PPPA*
SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan*	*-*	*225*	*250*	*275*	*300*	*4,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	*Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,5*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	*Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi*	*600*	*670*	*680*	*690*	*700*	*3,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi	*Jumlah Desa Bebas Pornografi*	*-*	*7*	*7*	*8*	*8*	*5,2*	*30 Desa/Kelurahan*		*Kemen PPPA*
Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	*Jumlah provinsi yang lembaga layanannya sudah mendapat pelatihan dukungan psikososial*	*-*	*8*	*8*	*9*	*9*	*6,3*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	*Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja*	*-*	*8*	*8*	*8*	*8*	*3,8*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)	*Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)*	*2*	*30*	*34*	*40*	*50*	*78,0*	*208 Kab/Kota*		*Kemen PPPA*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	*Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebijakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*	*7*	*7*	*7*	*7*	*6*	*10,0*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH	*Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi tentang penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak*	*-*	*200*	*200*	*200*	*200*	*2,8*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	*Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*5,0*	*20Provinsi*		*Kemen PPPA*
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	*Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*2,2*	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	*Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*2,8*	*14 provinsi*		*Kemen PPPA*
Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	*Jumlah Wilayah yang Mendapat Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA*	*19*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2,0*	*provinsi*		*KemenKumham*
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instanse Teknis Lainnya	*Jumlah APH yang Mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA*	*270*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2,7*	*Pusat dan Daerah*		*KemenKumham*
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	*Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung*	*160*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2,1*	*Pusat dan Daerah*		*MA*
Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	*Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan*	*8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kejagung*
Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	*Persentase anak yang mengikuti pendidikan dan pengentasan anak*	*60*	*70*	*80*	*90*	*100*	*0,0*	*Pusat*		*KemenKumham*
Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	*Jumlah Pekerja sektor anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja*	*9000*	*9.500*	*10.000*	*-*	*-*	*16,0*	*Pusat*		*KemenNaker*
KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan							**254,8**			
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG							**61,7**			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di KL	*Jumlah K/L bidang polhukam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya*	*5*	*10*	*10*	*10*	*10*	*6,6*	*Pusat*		*Kemen PPPA*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di provinsi	*Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang polhukam*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*5,0*	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di KL	*Jumlah K/L bidang infrastruktur dan lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya*	*2*	*10*	*10*	*10*	*10*	*6,7*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di provinsi	*Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang infrastruktur dan lingkungan*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*11,9*	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di KL	*Jumlah K/L bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya*	*5*	*8*	*11*	*11*	*11*	*5,5*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di provinsi	*Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga*	*5*	*7*	*9*	*9*	*9*	*7,0*	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di KL	*Jumlah K/L bidang ekonomi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya*	*8*	*11*	*11*	*11*	*11*	*8,4*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di provinsi	*Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang ekonomi*	*4*	*8*	*8*	*8*	*8*	*6,1*	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	*Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)*	*-*	*22*	*24*	*28*	*34*	*4,6*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang							**193,1**			
peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO	*Jumlah K/L yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17,9*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
KIE Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui berbagai media	*Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui berbagai media*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9,4*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan korban TPPO	*Jumlah perempuan Korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*8,3*	*Pusat*		*Kemen PPPA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	*Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)*	-	20	22	26	32	4,3	*Pusat*		*Kemendagri*
Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	*Terlaksananya SPHPN*	-	1	-	-	1	0,0	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT	*Jumlah KL dan Provinsi yang yang difasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT*	10	10	10	10	10	24,9	*Pusat dan Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	*Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT*	10	10	10	10	10	5,5	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
	Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan bagi korban (UPTD dan P2TP2A) yang dilatih tentang penanganan korban dan pendataan	-	170	170	170	170	57,8	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
KIE Pencegahan dan Penanganan KDRT melalui berbagai media	*Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan KDRT melalui berbagai media*	-	1	1	1	1	7,7	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	*Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus*	15	15	15	15	15	10,7	*Pusat dan provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	*Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan dan pemberdayaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus*	180	180	180	180	180	7,1	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana	*Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana*	1	-	-	-	-	0,3	*Pusat*		*Kemen PPPA*
KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	*Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media*	-	1	1	1	1	7,7	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	*Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan*	11	11	11	11	11	11,3	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	*Jumlah perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan*	200	200	200	200	200	5,0	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI	*Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelompok BK-PMI*	15	8	8	8	6	5,6	*34 Provinsi*		*Kemen PPPA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui berbagai media	*Jumlah dokumen KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai Media*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	*7,7*	*Pusat*		*Kemen PPPA*
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP	*Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2,0*	*Pusat*		*Komnas Perempuan*
KP : Kualitas Pemuda							**263,9**			
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan							**44,6**			
Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan	*Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat*		*Kemenpora*
Koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	*Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*41,0*	*Pusat*		*Kemenpora*
Koordinasi penerapan RAD penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	*Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan*	*-*	*18*	*24*	*30*	*34*	*3,2*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Pencegahan Perilaku Beresiko							**56,4**			
Fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	*Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*28,2*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	*Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*28,2*	*Daerah*		*Kemenpora*
ProP : Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda							**162,9**			
Fasilitasi pemuda sebagai kader kewirausahaan	*Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*24,0*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi sentra kewirausahaan pemuda	*Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*20,0*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan	*Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*50,7*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	*Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*8,5*	*Pusat*		*Kemenpora*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	*Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*16,9*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi pengelola organisasi kepemudaan dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	*Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*42,8*	*Pusat*		*Kemenpora*
PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	**Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)**	**27,9**				**40**	**12.759,1**			
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	**25,6**				**50**				
	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	**630000**	**1600000**	**1850000**	**1350000**	**1100000**				
	Bidang tanah yang diredistribusi	**750.000**				**7.750.000**				
	Bidang tanah yang dilegalisasi	**6.286.087**				**56.286.087**				
KP : Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	**Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)**						**2.285,9**			
ProP : Fasilitasi Modal Usaha							**2.285,9**			
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	*Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*648,9*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	*Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*644,3*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	*Penduduk miskin dan rentan yang memperoleh bantuan kelompok usaha*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*661,4*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan ultra mikro (Umi)	*Jumlah Kelompok yang Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro*	*1.641.000*	*2.800.000*	*3.500.000*	*4.200.000*	*4.900.000*	*296,3*	*34 Provinsi*		*Kemenkeu*
Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	*Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)*	*334*	*334*	*334*	*334*	*334*	*35,0*	*34 Provinsi*		*Kemenkeu*
Bantuan Ekonomi Keluarga Sakinah	*Jumlah keluarga yang Memperoleh Pelatihan Keluarga Sakinah*						*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Bantuan Ekonomi Produktif melalui Zakat dan Wakaf	*Jumlah keluarga yang Memperoleh Zakat dan Wakaf Produktif*						*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	**Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha**	**11500**	**11600**	**11700**	**11800**	**11900**	**701,7**			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya	**8.687.613**	**8.687.613**	**8.687.613**	**8.687.613**	**8.687.613**				
	Pengembangan kewirausahaan sosial	**535**	**535**	**535**	**535**	**535**				
ProP : Fasilitasi keperantaraan usaha produktif							**218,5**			
Desa yang Memperoleh Keperantaraan Usaha	*Jumlah Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan terintegrasi dengan BUMDes*	*30 Desa*	*30 Desa*	*30 Desa*	*30 Desa*	*30 Desa*	*50,0*			*Kemendes, PDT & TRANS*
Desa yang Memperoleh Keperantaraan Usaha	*Jumlah BUMDes yang Dikembangkan Untuk Mendukung Produk Unggulan Desa*	*500 Desa*	*500 Desa*	*500 Desa*	*500 Desa*	*500 Desa*	*168,5*			*Kemendes, PDT & TRANS*
ProP : Penguatan pemberdayaan berdampak sosial							**26,2**			
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	*Dunia Usaha Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*	*170*	*220*	*250*	*300*	*350*	*26,2*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
ProP : Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	**Jumlah KTH Mandiri**	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**457,0**			
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	**10**	**180**	**210**	**250**	**300**				
	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi)	**5000**	**6000**	**6500**	**7000**	**7500**				
Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	*Jumlah KTH Mandiri*	*100*	*200*	*300*	*400*	*500*	*120,8*			*Kemen LHK*
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	*Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan wanawiyata widyakarya)*	*10*	*20*	*30*	*40*	*50*	*6,2*			*Kemen LHK*
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	*Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi*	*0*	*160*	*180*	*210*	*250*	*56,9*	*34 provinsi*		*Kemen LHK*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat	*Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi).*	*5000*	*6000*	*6500*	*7000*	*7500*	*273,0*			*Kemen LHK*
KP : Reforma Agraria	**Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria**	**1.502.135**	**1.766.315**	**1.766.315**	**1.766.315**	**1.766.315**	**7.573,2**			
	Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agraria (TORA) yang memperoleh pemberdayaan	**176**	**492**	**492**	**492**	**492**				
ProP : Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)							**1.682,1**			
Terlaksananya inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	*Jumlah bidang tanah yang diinventarisasi*	*1.161.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*650,3*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
Terlaksananya Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar	*Jumlah bidang tanah terlantar yang ditertibkan*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*52,2*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
Teridentifikasinya data HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian	*Jumlah bidang tanah hasil pengendalian HGU Habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*50,6*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
Terlaksannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	*Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA*	*130.000,0*	*600.000,0*	*600.000,0*	*600.000,0*	*600.000,0*	*929,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
ProP : Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora							**2.911,4**			
Terlaksananya redistribusi tanah	*Luas bidang tanah yang diredistribusi*	*602.135*	*866.315*	*866.315*	*866.315*	*866.315*	*2.911,4*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
Terlaksananya legalisasi tanah (sertipikat hak atas tanah)	*Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*0,0*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
ProP : Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA							**2.979,7**			
Terlaksananya operasional Gugus Tugas Reforma Agraria	*Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria*	*72*	*536*	*536*	*536*	*536*	*2.772,4*	*33 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat penerima TORA	*Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemberdayaan*	*176*	*492*	*492*	*492*	*492*	*207,3*	*34 Provinsi*		*Kemen ATR/BPN*
KP : Perhutanan Sosial	**Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)**	**500.000,0**	**1.000.000**	**1.250.000**	**750**	**500,0**	**2.198,3**			
ProP : Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	**Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Ha)**	**500.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**750**	**500**	**2.198,3**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	*Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan*	*500.000,0*	*1.000.000*	*1.250.000*	*750.000*	*500.000,0*	*648,4*			*Kemen LHK*
Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat	*Jumlah Kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya*	*2.077*	*3.150*	*3.600*	*3.300*	*3.250*	*1.388,6*			*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo*
Kemitraan investasi/usaha	*Jumlah mitra usaha perhutanan sosial (mitra)*	*125*	*150*	*175*	*200*	*225*	*46,4*			*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo*
Industri nilai tambah produk	*jumlah sentra pengelolaan produk unggulan (sentra industri kecil)*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*	*52,5*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pemasaran/ Promosi produk perhutanan sosial	*Jumlah fasilitasi pemasaran produk perhutanan sosial (kelompok usaha)*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*62,5*			*Kemen LHK*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	**Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas**	**44,8**	**46,6**	**48,4**	**50,2**	**52,1**	**135.227,1**			
	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University									
	a. Top 200	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**				
	b. Top 300	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**				
	c. Top 500	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**				
	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	**43,0**	**45,0**	**47,0**	**48,0**	**50,0**				
KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	**Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi**	**1.890.345**	**1.890.345**	**1.890.345**	**1.890.345**	**1.890.345**	**97.283,9**			
	PT Vokasi berakreditasi A	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**				
	Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)	**1.829.664**	**1.913.804**	**1.997.944**	**2.082.084**	**2.166.224**				
	Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)	**60.681,0**	**64.224,0**	**67.767,0**	**71.310,0**	**74.853,0**				
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	**2 juta**	**2,2 juta**	**2,4 juta**	**2,6 juta**	**2,8 juta**				
	Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)	**1.824.466 (SMK)**	**1.908.367 (SMK)**	**1.992.268 (SMK)**	**2.076.169 (SMK)**	**2.160.070 (SMK)**				
	Jumlah pemagangan luar negeri (orang)	**5.198 (SMK)**	**5.437 (SMK)**	**5.676 (SMK)**	**5.915 (SMK)**	**6.154 (SMK)**				
ProP : Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							**2.036,7**			
Analisis Pasar Kerja pada Sektor Prioritas	*Jumlah dokumen analisis pasar kerja pada sektor prioritas*	*8 Dokumen*	*8 Dokumen*	*8 Dokumen*	*8 Dokumen*	*8 Dokumen*	*35,4*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Layanan Informasi Pasar Kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, badan job portal swasta	*Jumlah informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, dan badan job portal swasta*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*55,8*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri	*Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*872,8*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	*Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri*	*1.822*	*3.000*	*5.000*	*7.500*	*8.000*	*248,7*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Migas	*Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Migas*	*5.245*	*6.294*	*7.552*	*9.063*	*10.876*	*134,5*			*Kemen ESDM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Geominerba	*Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Gominerba*	*5.103*	*6.123*	*7.348*	*8.817*	*10.581*	*107,1*			*Kemen ESDM*
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor KEBTKE	*Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE*	*1.722*	*2.066*	*2.479*	*2.975*	*357*	*26,1*			*Kemen ESDM*
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Migas	*Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Migas*	*300*	*360*	*432*	*518*	*622*	*22,6*			*Kemen ESDM*
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Geominerba	*Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Geominerba*	*120*	*144*	*173*	*207*	*249*	*15,4*			*Kemen ESDM*
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor KEBTKE	*Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor KEBTKE*	*160*	*192*	*230*	*276*	*332*	*9,9*			*Kemen ESDM*
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor BDTBT	*Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor BDTBT*	*154*	*185*	*222*	*266*	*319*	*16,1*			*Kemen ESDM*
Politeknik Bidang Energi dan Mineral	*Jumlah Mahasiswa Politeknik Bidang Akamigas*	*998*	*1.058*	*1.118*	*1.178*	*1.178*	*136,0*	*Cepu*		*Kemen ESDM*
Politeknik Bidang Energi dan Pertambangan	*Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan*	*262*	*532*	*720*	*840*	*900*	*106,4*	*Bandung, Prabumulih, Bali*		*Kemen ESDM*
Koordinasi Kebijakan Kartu Pra-Kerja	*Tersusunnya Rekomendasi kebijakan implementasi program Kartu Pra-Kerja*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*250,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
	Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,0*			
ProP : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							**81.638,8**			
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	*Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi*	*-*	*15*	*15*	*16*	*16*	*31,6*	*Pusat dan daerah*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	*Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi*	*-*	*15*	*15*	*16*	*16*	*638,4*	*Daerah*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*DAK/Pemda*
Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat	*Jumlah Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*360,7*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkat	*Jumlah Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkat*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*406,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat	*Jumlah Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*219,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat	*Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*643,6*	*Pusat*		*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.56

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkat	*Jumlah Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkat*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*	*65,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	*Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik	*Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*150,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa	*Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*150,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	*Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK*	*400*	*500*	*600*	*700*	*800*	*29.283,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan	*Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan*	*315*	*315*	*315*	*315*	*315*	*1.575,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory	*Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	*Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*156,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK	*Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang Didirikan*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*477,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	*Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*679,5*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	*Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*843,1*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan	*Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*25,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan	*Jumlah Lembaga yang MendapatkanPengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*10,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Fasilitasi Uji Kompetensi*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*25,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Terwujudnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)	*Jumlah Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)*	*50*	*55*	*55*	*55*	*55*	*53,3*			*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri	*Jumlah Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*	*101,8*			*Kemendikbud*
Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja	*Jumlah Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*	*58,3*			*Kemendikbud*
Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	*Jumlah Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*121,1*			*Kemendikbud*
Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	*Jumlah Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*86,9*			*Kemendikbud*
Penyelengaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	*Jumlah Penyelengaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*17,8*			*Kemendikbud*
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian	*Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan vokasi di Politeknik Pertanian*	*5.478*	*6.494*	*6.809*	*7.124*	*7.124*	*1.043,2*			*Kementan*
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	*Jumlah S2 dan S3 yang difasilitasi tugas belajar*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*143,2*			*Kementan*
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Kependidikan, serta Peserta Didik Pendidikan Vokasi Pertanian	*Jumlah tenaga pendidik, kependidikan serta peserta didik yang ditingkatkan kompetensinya*	*2.475*	*2.475*	*2.475*	*2.475*	*2.475*	*90,6*			*Kementan*
Pendampingan Program Prioritas Pembangunan Pertanian serta Fasilitasi Pengabdian Masyarakat di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	*Jumlah pendamping program prioritas pembangunan pertanian*	*1.750*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*396,5*			*Kementan*
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	*Jumlah wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenarasi petani*	*1.513*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*346,0*			*Kementan*
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	*Jumlah peserta pembelajaran pada SMK PP*	*22.427*	*22.500*	*22.600*	*22.700*	*22.700*	*114,9*			*Kementan*
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	*Jumlah sarana dan prasarana pendidikan (satker)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*1.418,4*			*Kementan*
Pemagangan bagi Mahasiswa dan Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian	*Jumlah peserta magang*	*250*	*300*	*400*	*500*	*500*	*39,0*			*Kementan*
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian	*Jumlah peserta pelatihan vokasi*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*607,1*			*Kementan*
Pelatihan dan Fasilitasi Penumbuhan Petani Milenial	*Jumlah peserta pelatihan*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*50,0*			*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.58

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	*Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkompeten (orang)*	*8.239*	*9.173*	*10.633*	*12.286*	*13.115*	*1.155,8*	*19 UPT*		*KKP*
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan	*Jumlah sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan*	*21*	*22*	*22*	*22*	*22*	*711,3*	*19 UPT*		*KKP*
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	*Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*34,4*	*14 UPT*		*KKP*
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	*Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya*	*433*	*423*	*423*	*424*	*424*	*3.358,6*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Pengembangan BLK Komunitas	*Jumlah BLK Komunitas yang dikembangkan*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*4.000,0*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi*	*228.820*	*225.000*	*250.000*	*260.000*	*275.000*	*9.559,4*	*34 Provinsi*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	*Jumlah tenaga teknis menengah kehutanan*	*472*	*473*	*473*	*473*	*473*	*628,0*	*SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.*		*Kemen LHK*
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	*Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*273,0*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi	*Dokumen Standardisasi Produk Iptek Nuklir*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*	*3,5*	*Pusat*		*BATAN*
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi	*Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nuklir*	*2*	*7*	*7*	*7*	*7*	*3,2*	*Pusat*		*BATAN*
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (retooling dosen dan sertifikasi mahasiswa, penguatan kelembagaan, dan penguatan prodi	*Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi*	*43*	*43*	*43*	*43*	*43*	*1.753,2*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Peningkatan Daya Tampung Politeknik Eksisting	*Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan Daya Tampungnya*	*10*	*43*	*43*	*43*	*43*	*2.400,0*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Penambahan Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU	*Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU yang Ditambah*	*43*	*43*	*43*	*43*	*43*	*495,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.59

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI	*Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat*	*472*	*473*	*473*	*473*	*473*	*612,9*	*SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.*		*Kemen LHK*
Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	*Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4,6*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	*Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill*	*100*	*200*	*250*	*300*	*350*	*40,8*			*Kemenag*
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri	*Renovasi Gedung Pendidikan Non-Formal*	*0*	*2*	*2*	*2*	*1*	*79,0*			*Kemenperin*
Pengadaan Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	*Peralatan Pendidikan Non Formal Industri*	*0*	*2*	*2*	*2*	*1*	*59,3*			*Kemenperin*
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Industri	*Renovasi Gedung Pendidikan Menengah*	*0*	*2*	*2*	*2*	*3*	*138,3*			*Kemenperin*
Pengadaan Peralatan Pendidikan Menengah Industri	*Peralatan Pendidikan Menengah Industri*	*0*	*2*	*2*	*2*	*3*	*138,3*			*Kemenperin*
Pilot Project Learning Factory 4.0	*Implementasi Iindustri 4.0 pada pendidikan vokasi*	*25*	*32*	*38*	*44*	*50*	*156,4*			*Kemenperin*
Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Industri melalui Renovasi gedung pendidikan satuan kerja	*Renovasi Gedung Pendidikan Tinggi Industri*	*0*	*3*	*3*	*3*	*3*	*177,8*			*Kemenperin*
Pengadaan Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	*Peralatan Pendidikan Tinggi Industri*	*0*	*2*	*2*	*2*	*3*	*138,3*			*Kemenperin*
Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	*Pilot Project Learning Factory 4.0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*313,5*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	*Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat*	*5.428*	*5.289*	*5.369*	*5.463*	*5.660*	*1.170,8*	*(Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)*		*Kemenhub*
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)*	*4.652*	*7.746*	*9.393*	*9.673*	*9.574*	*655,1*	*(Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)*		*Kemenhub*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*399,5*	*(Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)*		*Kemenhub*
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	*Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut*	*16.038*	*16.983*	*17.416*	*17.981*	*18.822*	*2.710,7*	*(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)*		*Kemenhub*

A.3.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut (orang)*	*168.637*	*171.523*	*173.228*	*173.570*	*179.545*	*2.248,1*	*(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)*		*Kemenhub*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut*	*-*	*12*	*12*	*12*	*12*	*431,0*	*(Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat)*		*Kemenhub*
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	*Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara*	*4.873*	*5.434*	*5.674*	*5.626*	*5.883*	*1.164,8*	*(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)*		*Kemenhub*
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara (orang)*	*7.145*	*7.169*	*7.906*	*8.017*	*8.303*	*1.672,5*	*(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)*		*Kementerian Perhubungan*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara*	*-*	*8*	*8*	*8*	*8*	*215,5*	*(Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua)*		*Kemenhub*
Layanan Pendidikan Vokasi Kemetrologian	*Jumlah lulusan Akademi Metrologi*	*165*	*165*	*215*	*265*	*315*	*38,2*			*Kemendag*
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	*Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*	*2.350*	*2.350*	*2.550*	*2.750*	*2.800*	*229,0*			*Kemenparekraf*
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	*Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*182,6*			*Kemenparekraf*
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan	*Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan*	*1.411*	*1.411*	*1.611*	*1.811*	*2.011*	*156,8*			*Kemenparekraf*
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar	*Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar*	*2.492*	*2.492*	*2.692*	*2.892*	*3.092*	*163,8*			*Kemenparekraf*
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang	*Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.600*	*1.700*	*162,6*			*Kemenparekraf*
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	*Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*129,2*			*Kemenparekraf*
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	*Jumlah Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang tersedia*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*97,5*			*Kemenparekraf*
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	*Luas Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*327,1*			*Kemenparekraf*
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	*Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali*	*2.033*	*2.033*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*160,2*			*Kemenparekraf*
Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang	*Jumlah Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang*	*14.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500,1*			*Kemenparekraf*
Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan	*Jumlah Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan*	*1.220*	*1.220*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*110,3*			*Kemenparekraf*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok	*Luas Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok*	*14.948*	*0*	*0*	*0*	*0*	*525,9*			*Kemenparekraf*
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombok	*Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombokyang tersedia*	*439*	*500*	*700*	*900*	*1.000*	*199,8*			*Kemenparekraf*
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang	*Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembangyang tersedia*	*500*	*500*	*700*	*900*	*1.000*	*177,3*			*Kemenparekraf*
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan	*Luas Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan*	*11.872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*218,4*			*Kemenparekraf*
Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar	*Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar yang tersedia*	*932*	*932*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*33,6*			*Kemenparekraf*
Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata	*Luas Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali*	*26.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*213,8*			*Kemenparekraf*
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata	*Luas Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar*	*10.656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*186,7*			*Kemenparekraf*
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	*Jumlah Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,0*			*Kemenparekraf*
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong	*Jumlah dokumen Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,0*			*Kemenparekraf*
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru	*Jumlah dokumen Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2,0*			*Kemenparekraf*
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara	*Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*14,0*			*Kemenparekraf*
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong	*Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*14,0*			*Kemenparekraf*
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru	*Jumlah dokumen Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*14,0*			*Kemenparekraf*
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara	*Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*106,0*			*Kemenparekraf*
Pembangunan PTNP Sorong	*Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*36,0*			*Kemenparekraf*
Pembangunan PTNP Destinasi Baru	*Jumlah PTNP Destinasi Baru yang dibangun*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*6,0*			*Kemenparekraf*
ProP : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi							**5.099,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.62

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik*	*743*	*743*	*743*	*743*	*743*	*91,3*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi*	*1.856*	*1.856*	*1.856*	*1.856*	*1.856*	*105,2*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri*	*556*	*556*	*556*	*556*	*556*	*94,6*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika*	*1.908*	*1.908*	*1.908*	*1.908*	*1.908*	*157,0*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata*	*1.997*	*1.997*	*1.997*	*1.997*	*1.997*	*145,8*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian*	*1.022*	*1.022*	*1.022*	*1.022*	*1.022*	*106,5*			*Kemendikbud*
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	*Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*3.432*	*125,1*			*Kemendikbud*
Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	*Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*265,8*			*Kemendikbud*
Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri	*Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri*		*200*	*200*	*200*	*200*	*32,0*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	*Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi*		*500*	*500*	*500*	*500*	*104,0*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	*Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi*		*500*	*500*	*500*	*500*	*52,0*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti	*Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*2.580,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	*Jumlah Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)*	*240*	*500*	*500*	*500*	*500*	*328,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Instruktur pemerintah dan swasta baru	*Jumlah instruktur pemerintah dan swasta baru yang dilatih*	*2.160*	*240*	*160*	*160*	*160*	*168,5*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	*Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya*	*7.693*	*8.890*	*9.620*	*10.350*	*11.080*	*743,5*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
ProP : Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							**3.633,5**			
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	*Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan*	*300*	*1000*	*1250*	*1500*	*1750*	*2.802,4*			*Kemendikbud*
Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/ Skill Development Fund	*Pengembangan pola pendanaan pelatihan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*28,7*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	*Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan kualitas mutu lembaga*	*1.513*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*378,3*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Pusat Pengembangan Keahlian/ Skill Development Center	*Jumlah pusat pengembangan keahlian*	*20*	*22*	*24*	*25*	*25*	*303,8*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
SKKNI dan KKNI berbasis okupasi dan KKNI yang disusun	*Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*31,7*			*Kemenperin*
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	*Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*9,9*			*Kemenperin*
Implementasi Iindustri 4.0 pada pendidikan vokasi	*Pilot Project Learning Factory 4.0*	*9*	*12*	*17*	*22*	*27*	*76,9*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	*Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*	*1,8*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi							**4.875,6**			
Siswa SMK yang Tersertifikasi	*Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi*	*128.000*	*130.000*	*135.000*	*140.000*	*145.000*	*346,1*			*Kemendikbud*
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	*Jumlah yang tersertifikasi*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*454,0*			*Kementan*
Tenaga kerja yang disertifikasi	*Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi*	*382.083*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*425.000*	*2.069,8*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI	*Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNI*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*15,4*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*KemenNaker*
Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan	*Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri*	*32.000*	*39.000*	*42.000*	*44.000*	*46.000*	*840,9*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Registrasi tenaga kesehatan	*Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi*	*150.000*	*155.000*	*160.000*	*165.000*	*170.000*	*194,3*			*Kemenkes*
Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	*Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*75,7*	*TUK Samarinda, TUK Makassar, TUK Kadipaten, TUK, Pekanbaru, TUK, Bogor, Jakarta*		*Kemen LHK*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	*Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*	*375*	*410*	*450*	*500*	*550*	*9,2*	*Pusat*	*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemendikbud*
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	*Tenaga kerja industri terampil yang kompeten*	*7.000*	*2.100*	*2.200*	*2.400*	*2.600*	*189,8*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	*Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten*	*13.000*	*2.600*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*411,4*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Mahasiswa dan Lulusan Program D1 Berbasis Kompetensi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis	*Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten*	*500*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*95,8*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	*Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas*	*16.219*	*19.463*	*23.356*	*28.027*	*33.632*	*51,3*			*Kemen ESDM*
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	*Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba*	*2.888*	*3.466*	*4.159*	*4.991*	*5.989*	*33,6*			*Kemen ESDM*
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	*Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE*	*3.768*	*4.522*	*5.426*	*6.511*	*7.813*	*38,8*			*Kemen ESDM*
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja industri	*Tenaga kerja industri yang mendapatkan serifikasi kompetensi*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*49,5*		*Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*	*Kemenperin*
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	**Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan**	**64,7**	**65,2**	**65,7**	**66,2**	**66,7**	**11.381,9**			
	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	**14300**	**15730**	**17303**	**19033**	**20937**				
	Jumlah sitasi di jurnal internasional	**5760**	**6336**	**6969**	**7666**	**8433**				
	Jumlah KI yang didaftarkan	**3751**	**4502**	**5402**	**6482**	**7779**				
ProP : Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan							**190,1**			
Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	*Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT*	*115*	*120*	*130*	*135*	*150*	*190,1*			*Kemen Ristek/BRIN*
ProP : Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian							**10.905,2**			
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	*Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	*Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	*Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*2.614,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/BRIN*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	*Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat*	*1.022*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*880,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH	*Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH*	*13.000*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*15.500*	*6.029,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk	*Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan*	*1.200*	*3.750*	*3.900*	*4.250*	*4.500*	*62,5*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	*Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional*	*800*	*2.650*	*2.800*	*3.000*	*3.150*	*74,7*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Teaching Industry)	*Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri*	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*	*750,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Penelitian pada PTKI	*Penelitian pada PTKI*	*1*	*5*	*10*	*15*	*20*	*66,3*	*Pusat*		*Kemenag*
Penelitian yang Bermutu	*Penelitian yang Bermutu*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*25,0*	*Daerah*		*Kemenag*
Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	*Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*10,7*	*Pusat*		*Kemenag*
Penelitian yang berkualitas	*Penelitian yang berkualitas*	*325*	*325*	*325*	*325*	*325*	*56,3*	*Pusat*		*Kemenag*
Penelitian yang mendapat HAKI	*Penelitian yang mendapat HAKI*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*1,0*	*Pusat*		*Kemenag*
Penelitian Dosen yang bermutu	*Penelitian Dosen yang bermutu*	*116*	*116*	*116*	*116*	*116*	*272,6*	*Pusat*		*Kemenag*
Penelitian Mahasiswa yang bermutu	*Penelitian Mahasiswa yang bermutu*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*3,1*	*Pusat*		*Kemenag*
Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	*Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
ProP : Peningkatan Kualitas Lulusan PT							**286,7**			
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	*Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir*	*150.000*	*200.000*	*250.000*	*300.000*	*350.000*	*150,0*			*Kemendikbud*
LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	*Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)*	*43*	*43*	*43*	*43*	*43*	*91,4*			*Kemendikbud*
Lulusan yang tersertifikasi di bidang nuklir	*Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir*	*96*	*68*	*107*	*96*	*96*	*31,9*	*Yogyakarta*		*BATAN*
	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	*15*	*20*	*20*	*20*	*20*	*13,4*			*BATAN*
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	**Peringkat Global Innovation Index**	**80-85**	**80-85**	**80-85**	**75-80**	**75-80**	**22.323,9**			
	Jumlah paten yang diberikan (resident)	**900**	**925**	**950**	**975**	**1.000**				
ProP : Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan							**15.927,5**			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	*Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR PRN)	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*35,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk Keselamatan Transportasi, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*95,0*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	*3650000*	*3650000*	*3650000*	*3650000*	*3650000*	*296,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	*4*					*10,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE KOMBATAN)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*275,0*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR PRN)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*250,1*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (KOORDINATOR PRN)	*1*	*1*				*844,2*			*LAPAN*
	Prototipe roket bertingkat 100 KM (KOORDINATOR PRN)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*975,0*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Decision Support Tools (DST) berbasis Sains dan Teknologi Atmosfer untuk mendukung Smart Water Management System	*-*	*3*	*3*	*3*	*3*	*100,5*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5,5*	*Lampung*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3,8*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*110,8*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	*1*	*1*	*1*	*1*	*-*	*1,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*8,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*173,7*	*Gresik, Jawa Timur*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan Hortikultura	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*17,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Bioteknologi untuk Pengembangan Bahan Baku Obat	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*17,3*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	UJi Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk mendukung Bidang Maritim dan Transportasi	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*8,7*	*Yogyakarta*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*13,4*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government dan e-Business)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*24,6*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4,1*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,8*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*83,4*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Propulsi Kendaraan Berbasis Listrik	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*607,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,9*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*77,3*	*Provinsi Riau*		*BPPT*
	Produk bidang Transportasi Perkeretapian	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1.308,2*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium dan Gigi	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*120,2*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan Murah	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*11,4*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*

A.3.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1,1*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*13,7*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*8,6*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4,2*			*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*331,6*	*Kamojang*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Industri Perkapalan	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*363,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Vaksin Rekombinan dan HPV	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*79,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat						*14,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*109,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat Amoksilin		*1*	*1*	*1*	*1*	*98,6*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin						*67,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi		*3*	*3*	*2*	*2*	*26,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi		*1*	*1*	*1*	*1*	*4,1*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi		*1*	*1*	*1*	*1*	*7,5*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi		*2*	*2*	*1*	*1*	*19,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Perbanyakan massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih		*2*	*2*	*2*	*2*	*19,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul		*1*	*2*	*0*	*0*	*18,8*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul		*1*	*1*	*1*	*1*	*2,8*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api		*1*	*1*			*55,8*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Hasil Penelitian tentang Perubahan Masyarakat dalam Revolusi Digital	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	*102,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Demokrasi Indonesia		*1*	*1*	*1*	*1*	*82,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Penelitian tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif dan Maritim	*1*	*11*	*11*			*95,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Nasional	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	*63,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan yang Terintegrasi		*1*	*1*	*1*	*1*	*12,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Radar Pertahanan Udara Nasional			*1*	*1*	*1*	*36,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Baterai Lithium Berlisensi Indonesia			*1*	*1*	*1*	*44,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi Untuk Produksi Greenfuel		*1*	*1*	*1*	*1*	*16,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut	*5*					*13,1*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Penguatan Riset Samudra Nasional	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*102,2*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	*Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs)*	*19*	*2*	*2*	*2*	*2*	*25,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh	*100*	*3*	*3*	*3*	*3*	*29,8*	*Pusat*		*LAPAN*
	Satelit Mikro LAPAN-A4	*1*					*1,0*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	*Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion*		*2*	*2*	*2*	*2*	*84,0*	*DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Indonesia		*1*	*1*	*1*	*1*	*12,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	*5*	*5*		*0*	*0*	*263,1*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
	Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah		*1*	*1*	*1*	*1*	*26,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.70

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)		*1*	*1*	*1*	*1*	*42,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	*Produk Litbangyasa Teknologi dan Data Penginderaan Jauh*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*10,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15,0*	*Pusat*		*LAPAN*
	Informasi cuaca antariksa	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*47,9*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Tersedianya Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (detektor radiasi yang beroperasi dan terintegrasi)	*4*	*15*	*15*	*15*	*15*	*157,9*			*BAPETEN*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*1*	*1*	*1*	*1*		*14,1*	*Yogyakarta*		*BPPT*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*215,9*	*DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda*		*BPPT*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*2*	*2*	*2*			*7,1*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4,6*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*135,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*86,2*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	*3*		*16*	*16*	*16*	*26,5*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2.250,0*	*Kepulauan Mentawai dan Selat Sunda*		*BPPT*
	Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,0*	*Morowali*		*BPPT*
	Uji Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*101,0*	*Provinsi Riau*		*BPPT*
	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*23,7*	*DKI Jakarta*		*BPPT*
	Pengadaan armada pendukung modifikasi Cuaca dan Peralatannya						*355,0*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*
	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Kelautan untuk Kajian Potensi Bencana	*3*					*4,1*			*LIPI*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	*Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir*						*0,0*	*Prov Banten*		*BATAN*
	Prototipe RF Radiosinovektori		*1 Data Riset*	*1 Data Riset*	*1 Data Riset*	*1 Prototipe*	*4,2*	*Prov Banten*		*BATAN*
	Prototipe Senyawa Bertanda untuk Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis	*1 Data Riset*	*1 Data Riset*	*1 Data Riset*	*1 Data Riset*	*1 Prototipe*	*23,7*			*BATAN*
	Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka	*5*	*5*	*7*	*7*	*7*	*31,3*	*Prov Banten*		*BATAN*
	Dokumen Pengoperasian, Pemeliharaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*17,6*	*Prov Banten*		*BATAN*
	Dokumen Teknis Teknologi dan Keselamatan PLTN Besar dan SMR	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*32,7*	*Prov Banten*		*BATAN*
	Teknologi Operasi Terbang dan Diseminasi	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5,0*	*Jawa barat*		*LAPAN*
	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus	*2*					*5,0*			*LAPAN*
	Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarisma untuk implan bedah otak, implan tulang, dan karteter diagnostik jantung	*0*	*3*	*3*	*3*	*3*	*90,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Hasil pengembangan dan aplikasi Alat Kesehatan						*60,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*11,5*	*DKI Jakarta*		*LIPI*
	Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional		*3*	*3*	*3*	*3*	*32,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Repositori ilmiah nasional (RIN)	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*26,0*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang Maritim	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*29,5*	*Jawa Timur*		*BPPT*
	Hasil Pengungkapan dan Pemanfataan Biodiversitas Nusantara	*21*	*4*	*5*	*5*	*7*	*107,5*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Teknologi Kendaraan Listrik	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*873,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	*1*					*315,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
Penelitian Flagship Riset Nasional	*Penelitian Flagship Riset Nasional*	*22*	*43*	*43*	*43*	*43*	*2.100,0*	*Pusat*		*Kemen*
	Penelitian Insentif Sistem Inovasi	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*	*405,2*			*Kemen*
	Penelitian Pengembangan Teknologi Industri	*24*	*50*	*60*	*70*	*80*	*316,4*			*Kemen Ristek/BRIN*
	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur						*138,5*	*Serpong, Tangerang Selatan-Banten*		*BPPT*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.72

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengembangan Research Power-House							**3.908,4**			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/ kompetensi) SDM Iptek	*Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/ S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir*	*15*	*20*	*20*	*20*	*20*	*12,7*	*Pusat*		*BATAN*
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*	*9,2*	*Pusat*		*BATAN*
	Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*8,0*	*Pusat*		*BATAN*
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Sertifikasi Personel	*3.25*	*3.25*	*3.26*	*3.26*	*3.27*	*30,6*	*Pusat*		*BATAN*
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/ kompetensi)	*Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa DN*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*	*192,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa LN	*250*	*200*	*230*	*260*	*260*	*470,5*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Pengembangan Research Power-House	*Program Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis*	*220*	*240*	*300*	*350*	*500*	*176,9*	*Provinsi Banten*		*LIPI*
	Peraturan Jabatan Fungsional Baru	*5*					*5,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	*5*					*3,7*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
	Procurement of Multi Purposes Research Vessels	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*0,1*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/ kompetensi)	*Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S3*	*103*	*103*	*103*	*103*	*103*	*77,5*	*Pusat*		*BPPT*
	Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S2	*54*	*54*	*54*	*54*	*54*	*0,0*			*BPPT*
	Program Pembinaan Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa						*2,8*	*Pusat*		*BPPT*
	IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh UKM/ Masyarakat	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*20,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	*Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek*	*138*	*138*	*138*	*138*	*138*	*225,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan	*114*	*120*	*126*	*131*	*138*	*184,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Penjaminan mutu Pranata Litbang	*Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi*	*55*	*60*	*65*	*70*	*75*	*20,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	*Pengembangan PLTN Skala Industri*	*5*	*6*	*6*	*6*	*7*	*168,3*			*BATAN*
	Infrastruktur Produktif Cibinong Science and Technology Park (C-STP)	*1*					*100,0*	*Kab. Bogor (Cibinong STP)*		*LIPI*
	Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	*1*	*1*	*1*			*496,5*	*Kab. Bogor (Cibinong STP)*		*LIPI*
	Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	*1*	*1*				*259,0*	*Kab. Bogor (Cibinong STP)*		*LIPI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Laboratorium proses dan pendukungnya untuk pangan tradisional yang berstandar current Good Manufacturing Practices (c-GMP)	*1*	*1*				*145,0*	*Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta*		*LIPI*
	Teknologi Pengemasan Makanan Olahan	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*67,0*	*Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta*		*LIPI*
	Fasilitas kawasan geodiversitas Indonesia - Karang Sambung		*1*	*0*	*0*	*0*	*78,0*	*Provinsi Jawa Tengah*		*LIPI*
	Bandar Antariksa Skala Kecil	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3,2*	*Papua*		*LAPAN*
	Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional	*-*	*4*	*4*			*270,0*			*LAPAN*
	Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT	*1*		*-*	*-*	*-*	*164,5*	*Provinsi NTT*		*LAPAN*
	Pembangunan Laboratorium Pengujian Komponen Pesawat Udara Berdasarkan Standar Internasional DO-160	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*125,0*	*Jawa Barat*		*LAPAN*
	Laboratorium Terbang Nasional	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*125,0*			*LAPAN*
Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	*Jumlah Perguruan Tinggi yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek*	*28*	*28*	*28*	*28*	*28*	*100,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek	*Jumlah Lembaga litbang yang dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek*	*100*	*110*	*120*	*130*	*140*	*369,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
ProP : Penciptaan ekosistem inovasi							**2.480,0**			
Implementasi RIRN dan ARN	*Infrastruktur STP Berbasis PT/ LPNK Iptek Eksisting Yang Dikembangkan*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*750,0*	*Pusat*	*Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)*	*Kemen Ristek/ BRIN*
	Inkubator pada STP Eksisting yang Fungsional	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*50,0*	*Pusat*	*Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)*	*Kemen Ristek/ BRIN*
Produk Inovasi Litbang di Industri	*Jumlah Produk Inovasi Litbang di*	*60*	*65*	*70*	*75*	*80*	*394,5*	*Pusat*		*Kemen*
Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	*Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*22,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan	*Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dikembangkan*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*628,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis	*Jumlah Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi*	*297*	*250*	*250*	*250*	*250*	*605,5*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Klaster Inovasi	*Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*30,0*			*Kemen Ristek/ BRIN*
ProP : Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang							**8,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.74

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei belanja litbang industri	*Persentase industri manufaktur yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen)*		*80*	*90*	*100*	*100*	*0,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/BRIN*
Fasilitasi platform kolaborasi multisumber pendanaan	*Persentase kontribusi matching grant non APBN dalam pelaksanaan litbang di Kemenristek/BRIN*						*0,0*			
Fasilitasi forum pendanaan inovasi (pitching)	*Jumlah start-up teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi*		*10*	*10*	*10*	*10*	*4,0*			*Kemen Ristek/BRIN*
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian	*Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Iptek*		*25*	*50*	*75*	*100*	*4,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/BRIN*
KP : Prestasi Olahraga	**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir**	**meningkat**	**35,40**	**meningkat**	**meningkat**	**40**	**4.237,3**			
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	**2**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**3**				
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	**1**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**3**				
	Peringkat pada Asian Games	**N/A**	**N/A**	**5**	**N/A**	**N/A**				
	Peringkat pada Asian Para Games	**N/A**	**N/A**	**4 s/d 6**	**N/A**	**N/A**				
ProP : Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan							**1,3**			
Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi	*Jumlah naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,6*	*Pusat*		*Kemenpora*
Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus	*Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan yang disusun dan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,7*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Pengembangan budaya olahraga							**204,9**			
Kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	*Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan*	*11.274*	*11.274*	*11.274*	*11.274*	*11.274*	*25,1*	*Pusat*		*Kemenpora*
Kampanye olahraga olimpik di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal	*Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17,5*	*Pusat*		*Kemenpora*
Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan	*Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*140,9*	*Pusat*		*Kemenpora*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penyelenggaraan dan KeikutsertaanKejuaraan Olahraga Rekreasi	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan kejuaraan olahraga rekreasi*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*21,4*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade							**3.525,6**			
Fasilitasi peserta PPLP/PPLM dalam pembinaan dan pengembangan	*Jumlah peserta PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan*	*1381*	*1381*	*1381*	*1381*	*1381*	*623,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenpora*
Peningkatan kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan	*Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan*	*253*	*253*	*253*	*253*	*253*	*183,5*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi olahragawan andalan	*Jumlah olahragawan andalan nasional*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1.409,3*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)*	*44*	*44*	*44*	*44*	*44*	*50,7*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)*	*2*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*2*	*328,2*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional (Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, ASEAN Para Games)*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*868,9*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi	*Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62,0*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Penataan kelembagaan olahraga							**24,2**			
Fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	*Jumlah pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*24,2*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional							**123,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.3.76

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi pengelola organisasi keolahragaan olimpik dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	*Jumlah pengelola organisasi keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*29,6*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi tenaga keolahragaan olimpik dalam pengembangan tenaga keolahragaan	*Jumlah tenaga keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*93,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenpora*
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional							**329,6**			
Fasilitasi bantuan untuk prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	*Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik*	*29*	*29*	*29*	*29*	*29*	*64,8*	*Pusat*		*Kemenpora*
Fasilitasi bantuan untuk sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	*Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasiberbasis cabang olahraga olimpik*	*59*	*58*	*58*	*58*	*58*	*264,8*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan							**28,6**			
Penyusunan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang dapat dimanfaatkan	*Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat*		*Kemenpora*
Koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	*Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*28,2*	*Pusat*		*Kemenpora*
JUMLAH							**1.568.049,2**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER							**3.237,5**			
KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti							**1.463,8**			
ProP : Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)							**538,5**			
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	*Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa*	*39423*	*39423*	*39423*	*39423*	*39423*	*77,3*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*	*174,4*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	*Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa*	*816*	*850*	*850*	*850*	*850*	*54,8*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	*Jumlah Siswa SMA Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa*	*5612*	*5612*	*5612*	*5612*	*5612*	*136,3*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	*Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan*	*20000*	*20000*	*20000*	*20000*	*20000*	*95,7*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan							**853,7**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	*Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*131,2*	*Pusat*		*Kemenag*
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	*Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu*	*200*	*210*	*220*	*230*	*240*	*15,3*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	*Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya*	*3950*	*4000*	*4500*	*5000*	*5500*	*49,7*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*4369*	*4369*	*4369*	*4369*	*4369*	*166,8*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	*Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*4,2*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Peningkatan Kompetensi Guru	*Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya*	*5712*	*5712*	*5712*	*5712*	*5712*	*62,7*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	*Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya*	*1900*	*1900*	*1900*	*1900*	*1900*	*71,9*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	*Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan*	*1245*	*8000*	*9000*	*10000*	*11000*	*352,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenag*
ProP : Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan							**71,6**			
Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	*Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda*	*1800*	*1800*	*1800*	*1800*	*1800*	*16,9*	*Pusat*		*Kemenpora*
Penguatan pendidikan pramuka	*Jumlah oganisasi kepramukaan (Kwarnas/Saka/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*50,7*	*Pusat*		*Kemenpora*
Penguatan penyelenggaran KKN Revolusi Mental	*Mahasiswa Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*4,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif							**23,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya							**9,1**			
Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	*Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat*	*3,2 dari 4*	*3,2 dari 4*	*3,2 dari4*	*3,2 dari 4*	*3,2 dari 4*	*6,7*	*Pusat*		*BKPM*
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	*Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik*	*-*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0,8*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	*Jumlah Intansi di Wilayah II yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik*	*-*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0,8*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	*Jumlah Intansi di Wilayah III yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik*	*-*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0,8*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
ProP : Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi							**14,0**			
Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan	*Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*0,5*	*Pusat*		*BKN*
Penyelesaian dan Penyelidikan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	*Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*	*10,0*	*Pusat*		*KASN*
Penegakan disiplin SDM Aparatur	*Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakan disiplin ASN*	*60*	*60*	*80*	*100*	*100*	*3,5*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter							**410,8**			
ProP : penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup							**61,9**			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	*Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja*	*75,72*	*76,22*	*76,72*	*77,22*	*77,72*	*30,9*	*Pusat*		*BKKBN*
Pengembangan karakter remaja yang berkualitas	*Indeks karakter remaja*	*67,92*	*68,42*	*68,92*	*69,42*	*69,92*	*30,9*	*Pusat*		*BKKBN*
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	*Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*	*241000*	*353000*	*452000*	*577000*	*738000*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	*Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	*Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia*	*805*	*805*	*805*	*805*	*805*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bimbingan Keluarga Sukinah	*Bimbingan Keluarga Sukinah*	*1559*	*1559*	*1559*	*1559*	*1559*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	*Pembinaan Keluarga Hittasukhaya*	*100*	*138*	*190*	*263*	*363*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga							**284,9**			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	*Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter*	*38,68*	*39,68*	*40,68*	*41,68*	*42,68*	*153,1*	*Pusat dan 34 Provinsi*		*BKKBN*
Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	*Persentase Keluarga yang berwirausaha*	*10,7*	*11,2*	*11,7*	*12,2*	*12,7*	*131,8*	*Pusat dan 34 rovinsi*		*BKKBN*
Keluarga Sakinah yang Terbina	*Keluarga Sakinah yang Terbina*	*18000*	*18000*	*18000*	*18000*	*18000*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha							**64,0**			
Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat Penguatan PUG dan PUHA di Bidang PPPA*	*10*	*50*	*70*	*100*	*150*	*15,3*	*Pusat/Daerah*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Sinergi Percepatan Program PPPA	*Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA*	*-*	*100*	*150*	*200*	*250*	*14,8*	*Pusat/30 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media	*Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA*	*-*	*130*	*160*	*200*	*250*	*14,2*	*Pusat/34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Fasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	*Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Keluarga yang Responsif Gender*	*-*	*10*	*20*	*25*	*34*	*12,8*	*Pusat/34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
Replikasi Inovasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Program PPPA	*Jumlah Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA*	*-*	*6*	*9*	*12*	*15*	*4,2*	*Pusat/34 Provinsi*		*Kemen PPPA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Program PPPA	*Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA*	*-*	*6*	*12*	*16*	*20*	*2,7*	*Pusat/34 Provinsi*		*Kemen PPPA*
KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental							**457,9**			
ProP : Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							**333,9**			
Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik untuk mendorong Gerakan Indonesia Melayani	*Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*3,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	*Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)*	*76*	*71*	*66*	*61*	*56*	*18,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	*Persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan*	*20*	*25*	*30*	*35*	*40*	*15,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*
Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	*Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik*	*15*	*20*	*25*	*30*	*35*	*15,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*
Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	*Persentase pengurangan sampah nasional*	*7*	*12*	*17*	*22*	*27*	*18,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	*Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendampingan terkait hidup bersih dan sehat*	*16*	*20*	*24*	*30*	*34*	*18,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*
Peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	*Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat*	*9*	*14*	*19*	*24*	*29*	*15,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemenko Marin*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	*Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*11,5*	*Pusat*		*Kemenko Polhukam*
Penguatan sinergi program peningkatan pendapatan melalui Gerakan Indonesia Mandiri	*Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Mandiri*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,0*	*Pusat*		*Kemenko Perekonomian*
Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	*Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*10,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemendagri*
Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat	*Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*148,4*	*Pusat*		*Kemenko PMK*
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	*Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental*	*49*	*49*	*49*	*49*	*49*	*45,8*	*Pusat*		*Kemenko PMK*
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15,8*	*Pusat*		*Kemenko PMK*
ProP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah							**124,0**			
Penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan dan menguatkan program GNRM*	*15*	*20*	*25*	*30*	*34*	*124,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenko PMK*
KP : Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila							**166,7**			
Kaderisasi pendamping/penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/kota dan desa	*Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi*	*3360*	*3360*	*3360*	*3360*	*3360*	*0,0*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
Kaderisasi pendamping/penyuluh untuk memperkuat pembentukan platform koperasi di tingkat kabupaten/kota dan desa	*Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi*	*3360*	*3360*	*3360*	*3360*	*3360*	*0,0*	*Pusat*		*Kemen KUKM*
ProP : Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong							**15,2**			
Pemasyarakatan Kewirausahaan	*Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*15,2*	*Pusat*		*Kemen KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri							**151,5**			
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri*	*2500*	*3000*	*3500*	*4000*	*4500*	*77,1*	*Pusat*		*Kemendag*
Edukasi Konsumen	*Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya*	*6500*	*6500*	*6500*	*6500*	*6500*	*71,0*	*Pusat*		*Kemendag*
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	*Jumlah pelaku usaha yang dibina*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*3,4*	*Pusat*		*Kemendag*
KP : Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme							**715,1**			
ProP : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara							**410,0**			
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*15,4*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*15,4*			*BPIP*
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*13,8*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*13,8*			*BPIP*
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*19,2*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*19,2*			*BPIP*
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	*Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*19,2*			*BPIP*
Penguatan ketahanan nasional	*Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara*	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*	*14,3*	*Pusat*		*Wantanas*
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	*Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*12,8*	*Pusat dan Daerah*		*Lemhanas*
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	*Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*12,8*	*Pusat dan Daerah*		*Lemhanas*
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	*Terselenggaranya Sosialisasi/ Dialog Wawasan Kebangsaan*	*190*	*400*	*400*	*400*	*400*	*12,5*	*Pusat dan Daerah*		*Lemhanas*
Pengembangan bela negara	*Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara*	*42700*	*43000*	*43000*	*43000*	*43000*	*181,7*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pengembangan bela negara	*Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara*	*-*	*875*	*875*	*875*	*875*	*51,9*	*Pusat*		*Polri*
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	*Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*8,0*	*Daerah*		*Kemendagri*
ProP : Peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)							**155,6**			
Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	*Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara,kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah ,organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainya yang diselesaikan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*91,7*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	*Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*30,6*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	*Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*11,1*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	*Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*11,1*			*BPIP*
Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah	*Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*11,1*			*BPIP*
ProP : Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.							**64,3**			
Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	*Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*13,8*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	*Persentase penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*13,8*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	*Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*36,7*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
ProP : Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara							**85,2**			
Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	*Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*28,4*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	*Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*28,4*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*
Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	*Jumlah evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*28,4*	*Pusat dan daerah*		*BPIP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA							**7.377,1**			
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal							**1.035,8**			
ProP : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal							**234,0**			
Penguatan integrasi Kebudayaan pada proses pembelajaran	*Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran*	*30.5*	*31*	*33*	*35*	*37*	*234,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip							**577,3**			
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	*Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan*	*75*	*76*	*77*	*78*	*79*	*59,1*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	*Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)*	*45*	*49*	*52*	*53*	*57*	*75,6*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	*Jumlah kunjungan museum*	*1861792*	*1861792*	*1861792*	*1861792*	*1861792*	*170,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	*Jumlah kunjungan Galeri*	*1200472*	*1200472*	*1200472*	*1200472*	*1200472*	*75,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	*Jumlah Kunjungan Cagar budaya*	*987000*	*987000*	*987000*	*987000*	*987000*	*140,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	*Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa*	*254.650*	*280.110*	*308.145*	*338.945*	*372.835*	*37,7*	*Pusat/ Daerah*		*Arsip Nasional*
Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	*Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa*	*10.120*	*10.120*	*10.120*	*10.120*	*10.120*	*19,8*	*Pusat/ Daerah*		*Arsip Nasional*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa							**224,5**			
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	*Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno dan budaya etnis nusantara*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*22,2*	*Pusat dan daerah*		*Perpusnas*
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	*Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi*	*34765*	*34765*	*34765*	*34765*	*34765*	*24,7*	*Pusat*		*Perpusnas*
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	*Jumlah alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno*	*39750*	*39750*	*39750*	*39750*	*39750*	*34,0*	*Pusat*		*Perpusnas*
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	*Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi*	*122.851*	*293.730*	*323.823*	*356.845*	*392.970*	*58,6*	*Pusat/Daerah*		*Arsip Nasional*
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	*Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan*	*347*	*347*	*347*	*347*	*347*	*85,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat							**1.310,0**			
ProP : Pengembangan produk seni, budaya, dan film							**511,9**			
Peningkatan pemanfaatan produk seni	*Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung*	*30*	*35*	*40*	*45*	*50*	*378,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan pemanfaatan produk seni	*Persentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang diterbitkan*	*30*	*33*	*35*	*37*	*39*	*46,5*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Peningkatan pemanfaatan produk seni	*Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung*	*45*	*47*	*49*	*50*	*51*	*47,4*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan pemanfaatan produk seni	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan*	*20*	*23*	*25*	*27*	*29*	*40,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional							**276,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan penyelenggaraan festival budaya	*Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional*	*218*	*230*	*231*	*239*	*238*	*276,5*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat							**427,2**			
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	*Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)*	*3,91*	*4,65*	*5,39*	*6,13*	*6,90*	*69,5*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	*Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)*	*34*	*37*	*40*	*43*	*45*	*217,7*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan pengelolaan cagar budaya	*Jumlah Kunjungan Cagar budaya*	*987000*	*987000*	*987000*	*987000*	*987000*	*140,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim							**94,4**			
Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Bahari	*Jumlah rumusan kebijakan dan rumusan tindak lanjut kebijakan bidang budaya, seni dan olahraga bahari yang dihasilkan*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*	*24,4*	*Pusat*		*Kemenko Marin*
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya maritim	*Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*40,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	*Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)*	*5*	*12*	*18*	*24*	*30*	*30,0*	*7 provinsi*		*KKP*
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif							**3.156,4**			
ProP : Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup							**3.001,4**			
Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan	*Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan*	*30*	*40*	*45*	*45*	*45*	*114,5*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Tersedianya data potensi konflik*	*48*	*55*	*60*	*65*	*70*	*47,3*	*Daerah*		*Kemen LHK*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Diterbitkannya SK Penetapan Hutan Adat*	*20*	*25*	*30*	*35*	*40*	*25,0*	*Daerah*		*Kemen LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*SK Kelompok Usaha Perhutanan Soaial (SK KUPS) dan RKU/RPH/RKT*	*1000*	*1500*	*2000*	*2500*	*3000*	*305,0*	*Daerah*		*Kemen LHK*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Berita acara serah terima bantuan ekonomi produktif*	*1393*	*1500*	*2000*	*2500*	*3000*	*634,2*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Meningkatnya kinerja kelompok usaha Perhutanan Sosial*	*200*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*600,0*	*Daerah*		*Kemen LHK*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Jumlah mitra pendamping Perhutanan Sosial*	*50*	*100*	*150*	*200*	*250*	*136,8*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Pelindungan dan pengembangan hutan adat	*Tersedianya pendamping dalam pengembangan Perhutanan Sosial*	*2500*	*3000*	*3500*	*4000*	*4500*	*887,5*	*Pusat*		*Kemen LHK*
Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat	*Jumlah provinsi yang dilaksanakan sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat ulayat*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*251,1*	*Pusat*		*Kemen ATR/BPN*
ProP : Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya							**100,0**			
Peningkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan	*Persentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan*	*40*	*45*	*49*	*53*	*56*	*100,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
ProP : Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta							**55,0**			
Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	*Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi*	*48*	*52*	*55*	*56*	*57*	*50,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Pembuatan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal	*Jumlah data KI komunal*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*5,0*	*Pusat*		*Kemenkumham*
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia							**185,0**			
ProP : Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara							**115,0**			
Penguatan diplomasi kebudayaan	*Jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia yang dikirim*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*85,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Penguatan diplomasi kebudayaan	*Jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*30,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri							**70,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri	*Jumlah Diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*50,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Penguatan kegiatan kebudayaan di luar negeri	*Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*20,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan							**1.690,0**			
ProP : Pengelolaan dana perwalian kebudayaan							**1.325,0**			
Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	*Jumlah pengelolaan dana perwalian kebudayaan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1.070,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	*Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan*	*189*	*189*	*189*	*189*	*189*	*255,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan							**95,0**			
Pengembangan SDM bidang kebudayaan	*Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*75,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Pengembangan SDM bidang kebudayaan	*Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/KBLI*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*20,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan							**150,0**			
Optimalisasi sarana dan prasarana publik menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	*Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat*	*126*	*135*	*135*	*135*	*135*	*150,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu							**30,0**			
Pengembangan sistem pendataan kebudayaan	*Jumlah pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*30,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan							**90,0**			
Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan	*Persentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Peningkatan kerja sama bidang kebudayaan	*Jumlah kerjasama galeri di tingkat internasional*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*40,0*	*Pusat*		*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**						**21.945,4**			
KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama							**6.931,6**			
ProP : Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat							**3.899,2**			
Tunjangan Penyuluh Honorer Konghucu	*Penyuluh Honorer Konghucu yang dapat tunjangan*	*145*	*145*	*145*	*145*	*145*	*10,2*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS	*Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang dapat tunjangan*	*45000*	*45000*	*45000*	*45000*	*45000*	*2.520,0*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	*Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas*	*5148*	*5148*	*5148*	*5148*	*5148*	*278,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	*Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan*	*9000*	*9000*	*9000*	*9000*	*9000*	*490,5*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	*Penyuluh Agama Kristen yang terbina*	*1370*	*2159*	*2159*	*2159*	*2159*	*94,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	*Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan*	*4042*	*4042*	*4042*	*4042*	*4042*	*222,4*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Penyuluh Agama Katolik yang Terbina	*Pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*6,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS	*Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS yang mendapat tunjangan*	*1700*	*1700*	*1700*	*1700*	*1700*	*102,0*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Kelompok Binaan Penyuluh Hindu	*Kelompok Binaan Penyuluh Hindu yang ditingkatkan*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*2,3*	*Daerah*		*Kemenag*
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Hindu	*Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensi*	*2565*	*2565*	*2565*	*2565*	*2565*	*25,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	*Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan*	*1182*	*1182*	*1182*	*1182*	*1182*	*121,7*	*34 Provinsi*		*Kemenag*
Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan	*Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*1,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	*Diklat Alumni Tenaga Teknis Keagamaan*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*0,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu	*Diklat Alumni Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*0,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siaran Pendidikan Agama	*Jumlah jam siar konten pendidikan agama*	*1318*	*1400*	*1485*	*1550*	*1600*	*22,5*			*LPP TVRI*
ProP : Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru							**1.538,3**			
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (lokasi)	*Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	*Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan*	*234*	*234*	*234*	*234*	*234*	*102,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	*Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan*	*40510*	*40510*	*40510*	*40510*	*40510*	*829,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	*Guru/Dosen/Pengawas PAI yang ditingkatkan keualitasnya*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*14,7*	*Daerah*		*Kemenag*
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu*	*133*	*133*	*133*	*133*	*133*	*14,7*	*Daerah*		*Kemenag*
Dokumen Standar Nasional Pendidikan	*Dokumen Standar Nasional Pendidikan*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*150,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	*KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan*	*0*	*120*	*130*	*140*	*150*	*306,3*	*Daerah*		*Kemenag*
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	*Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Beragama Hindu*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*9,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	*Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter*	*2160*	*2160*	*2160*	*2160*	*2160*	*48,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	*Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*12,8*	*Daerah*		*Kemenag*
Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	*Jumlah Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha*	*4000*	*4000*	*4000*	*4000*	*4000*	*15,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan							**469,9**			
Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	*Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*29,3*	*Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu*	*133*	*133*	*133*	*133*	*133*	*14,7*	*Daerah*		*Kemenag*
Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya	*Jumlah Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*17,6*	*Daerah*		*Kemenag*
Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan	*Jumlah Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*8,8*	*Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	*Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*29,3*	*Daerah*		*Kemenag*
Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa	*Jumlah Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa*	*0*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*13,5*	*Daerah*		*Kemenag*
Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya	*Jumlah Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*	*25,2*	*Daerah*		*Kemenag*
Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional	*Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional*	*4000*	*4000*	*4000*	*4000*	*4000*	*331,4*	*Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran							**912,2**			
Rumah Ibadah yang suci dan damai	*Rumah Ibadah Agama Islam yang yang suci dan damai*	*590*	*1500*	*1500*	*1500*	*1500*	*639,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
	Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*	*82,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
	Rumah Ibadah Agama Katolik yang yang suci dan damai	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	*17,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
	Rumah Ibadah Hindu yang suci dan damai	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*56,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
	Rumah Ibadah Agama Buddha yang suci dan damai	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*75,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
	Rumah Ibadat Agama Khonghucu yang suci dan Damai	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*41,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa							**112,1**			
Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	*Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*29,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Siswa Madrasah yang Berdaya Saing	*Jumlah Siswa Madrasah yang Berdaya Saing*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*58,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	*Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*24,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama							**621,4**			
ProP : Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama							**57,8**			
Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	*Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan*	*546*	*546*	*546*	*546*	*546*	*19,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	*Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*24,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Desa Sadar Kerukunan	*jumlah Desa Sadar Kerukunan*	*52*	*52*	*52*	*52*	*52*	*13,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa							**433,5**			
Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	*Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan*	*546*	*546*	*546*	*546*	*546*	*19,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	*Kerukunan Hidup Umat Beragama yang dikembangkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*45,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	*Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama yang dibina*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*24,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	*Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu yang dikembangkan*	*0*	*19*	*19*	*19*	*19*	*0,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	*Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam yang dikembangkan*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*6,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	*Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen yang dikembangkan*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	*Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik yang dikembangkan*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*9,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	*Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang dikembangkan*	*100*	*115*	*115*	*115*	*115*	*11,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	*Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang dikembangkan*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Ormas dan Lembaga Keagamaan	*Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*292,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong							**130,1**			
Operasional SEKBER FKUB Provinsi	*SEKBER FKUB Provinsi yang dioperasionalkan*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*10,0*			*Kemenag*
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	*SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang dioperasionalkan*	*512*	*512*	*512*	*512*	*512*	*120,1*			*Kemenag*
KP : Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya							**565,8**			
ProP : Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama							**57,7**			
Budaya Keagamaan Islam yang Terbina	*Budaya Keagamaan Islam yang Terbina*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*			*Kemenag*
Budaya Keagamaan Kristen yang Terbina	*Budaya Keagamaan Kristen yang Terbina*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*			*Kemenag*
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	*Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	*Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*15,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Paham Keagamaan	*Jumlah Pembinaan Paham Keagamaan*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*41,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama							**190,2**			
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	*Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	*Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	*Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*59,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	*Jumlah Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*	*93,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bahan Bacaan Tafsir dan Literatur Ke-Al-Qur'anan	*Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	*Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Direktori Pustaka Islam	*Jumlah Direktori Pustaka Islam*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*28,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi							**317,9**			
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	*Jumlah event Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*150,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pesparawi Nasional	*jumlah event Pesparawi Nasional*		*1*			*1*	*57,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Internalisasi Dharma Gita	*Internalisasi Dharma Gita*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	*Jumlah Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*15,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Event Keagamaan Buddha yang terselenggara	*Jumlah Event Keagamaan Buddha yang Terselenggara (Suvayamvara Tripitaka Gatha/ STG)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dakwah dan Hari Besar Islam	*Dakwah dan Hari Besar Islam yang terselenggara*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*43,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Sarati Banten	*Jumlah Pembinaan Sarati Banten*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama							**13.440,3**			
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan							**6.551,4**			
Penghulu yang Terbina	*Penghulu yang Terbina*	*3000*	*3000*	*3000*	*3000*	*3000*	*102,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	*KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal*	*2500*	*3000*	*3500*	*4000*	*4500*	*3.637,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembangunan Balai Nikah	*Balai Nikah yang terbangun*	*228*	*128*	*128*	*128*	*128*	*2.090,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengadaan Tanah KUA	*Jumlah Pengadaan Tanah KUA*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*117,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Buku dan Kartu Nikah	*Buku dan Kartu Nikah yang diedarkan*	*11000000*	*11000000*	*11000000*	*11000000*	*11000000*	*58,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Rehabilitasi KUA	*Jumlah KUA yang terehabilitasi*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*88,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Sarana dan Prasarana KUA	*Sarana dan Prasarana KUA yang ditingkatkan*	*750*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*75,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Layanan Syariah	*Layanan Syariah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*20,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Kitab Suci	*Kitab Suci Agama Islam yang dicetak*	*650000*	*650000*	*650000*	*650000*	*650000*	*46,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengelolaan Hisab Rukyat	*Pengelolaan Hisab Rukyat*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*37,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Gedung Pusat Observasi Bulan	*Gedung Pusat Observasi Bulan yang ditingkatkan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*32,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan	*Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*51,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	*Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya	*Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya yang dicetak*	*14100*	*14100*	*14100*	*14100*	*14100*	*7,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	*Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi*	*274*	*274*	*274*	*274*	*274*	*46,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*3,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	*Dukungan Layanan Keagamaan Katolik*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*	*0,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	*Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina*	*397*	*397*	*397*	*397*	*397*	*20,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Sarana Peribadatan Katolik yang Terfasilitasi	*Jumlah Sarana Peribadatan Katolik yang terfasilitasi*	*0*	*2200*	*2200*	*2200*	*2200*	*4,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu	*Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu yang ditingkatkan*	*1289*	*1289*	*1289*	*1289*	*1289*	*12,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu	*Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang mendapatkan bantuan operasional*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*36,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	*Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan*	*44*	*44*	*44*	*44*	*44*	*57,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	*Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*0,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	*Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana*	*27*	*27*	*27*	*27*	*27*	*3,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga							**678,1**			
Keluarga Sakinah yang Terbina	*Keluarga Sakinah yang Terbina*	*18000*	*18000*	*18000*	*18000*	*18000*	*91,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	*Jumlah pasangan yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah*	*241000*	*353000*	*452000*	*577000*	*738000*	*534,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	*Bimbingan bagi keluarga Kristiani*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*12,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	*Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia*	*805*	*805*	*805*	*805*	*805*	*9,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bimbingan Keluarga Sukinah	*Keluarga Sukinah yang mendapat bimbingan*	*1559*	*1559*	*1559*	*1559*	*1559*	*27,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	*Keluarga Hittasukhaya yang mendapat pembinaan*	*100*	*138*	*190*	*263*	*363*	*3,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							**51,1**			
Register Halal	*Register Halal*	*88000*	*88000*	*88000*	*88000*	*88000*	*4,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Sertifikat Halal	*Sertifikat Halal*	*220000*	*220000*	*220000*	*220000*	*220000*	*4,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	*Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*7,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Naskah Standardisasi Halal	*Naskah Standardisasi Halal*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*9,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	*Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi*	*220000*	*220000*	*220000*	*220000*	*220000*	*8,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Stakeholder JPH Yang Terbina	*Stakeholder JPH Yang Terbina*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*9,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Stakeholder JPH Yang Terawasi	*Stakeholder JPH Yang Terawasi*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*7,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah							**6.159,7**			
Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	*Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*25,4*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	*Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*24,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	*Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus*	*75*	*150*	*150*	*150*	*150*	*17,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	*Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji*	*231000*	*231000*	*231000*	*231000*	*231000*	*123,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengelolaan Asrama Haji	*Pengelolaan Asrama Haji*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*16,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji	*Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji yang terselenggara*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*43,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	*Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang terselenggara*	*10000*	*204000*	*204000*	*204000*	*204000*	*85,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	*Asrama Haji yang dikembangkan dan direvitalisasi*	*10*	*8*	*13*	*16*	*16*	*2.625,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	*Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun dan direvitalisasi*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*624,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Petugas haji yang profesional	*Petugas haji yang ditingkatkan profesionalismenya*	*50*	*2288*	*2288*	*2288*	*2288*	*1.641,3*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bimbingan Jemaah Haji	*Bimbingan Jemaah Haji yang terselenggara*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*171,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Advokasi Haji	*Advokasi Haji yang terselenggara*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*10,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	*Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*124,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Petugas Haji di Arab Saudi	*Terselenggaranya ibadah haji oleh Petugas Haji di Arab Saudi*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*594,6*	*Arab Saudi*		*Kemenag*
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	*Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi di Arab Saudi*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*13,0*	*Arab Saudi*		*Kemenag*
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	*Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi di Arab Saudi*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*10,0*	*Arab Saudi*		*Kemenag*
Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	*Jamaah haji yang mendapatkan Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*214000*	*8,9*	*Arab Saudi*		*Kemenag*
KP : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan							**386,3**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pemberdayaan dana sosial keagamaan							**160,8**			
Pengamanan Aset Wakaf	*Aset wakaf terlindungi*	*200*	*250*	*300*	*350*	*400*	*66,6*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Legalitas Tanah Wakaf	*Tanah wakaf tersertifikasi*	*350*	*400*	*450*	*500*	*550*	*15,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bantuan Operasional BWI	*BWI yg memanfaatkan bantuan operasional*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*44,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Bantuan Operasional BAZNAS	*Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*13,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Lembaga zakat yg terakreditasi	*Lembaga zakat yg terakreditasi*	*407*	*400*	*350*	*300*	*250*	*21,2*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat							**143,1**			
Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	*Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat*	*816*	*850*	*900*	*950*	*1000*	*57,1*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Literasi Perekonomian dan Keuangan Syariah	*Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah*	*1500000*	*2000000*	*2500000*	*3000000*	*3500000*	*85,9*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
ProP : Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel							**82,4**			
Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji	*Jumlah Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*30,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji	*Jumlah Pengelolaan Keuangan Operasional Haji*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*51,7*	*Pusat dan Daerah*		*Kemenag*
PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER							**3.583,7**			
KP : Peningkatan Budaya Literasi							**2.835,0**			
ProP : Pengembangan budaya kegemaran membaca							**1.123,5**			
Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	*Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*500,4*	*Daerah*		*Perpusnas*
Pengembangan budaya gemar membaca	*Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca (Lokasi)*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*132,7*	*Pusat dan daerah*		*Perpusnas*
Pengembangan budaya literasi melalui TBM	*Perluasan Akses Sumber Belajar Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*	*6,4*	*34 Provinsi*		*Kemendikbud*
Pengembangan budaya literasi melalui TBM	*Penguatan Kapasitas Fasilitator*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*1,5*	*34 Provinsi*		*Kemendikbud*
Pengembangan budaya literasi melalui TBM	*Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*2,0*	*34 Provinsi*		*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan literasi dalam pembelajaran	*Persentase jumlah siswa yang melakukan kegiatan membaca untuk kesenangan/ membaca buku nonteks pelajaran 60 menit sehari*	*5*	*10*	*5*	*15*	*10*	*110,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Penguatan literasi dalam pembelajaran	*Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran*	*10*	*20*	*10*	*30*	*20*	*220,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Penguatan literasi dalam pembelajaran	*Rasio minimal ketersediaan buku nonteks pelajaran terhadap jumlah siswa 1*	*5*	*10*	*5*	*15*	*10*	*110,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Peningkatan indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	*Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah*	*53,00*	*54,75*	*56,50*	*58,50*	*60,00*	*1,5*	*Pusat*		*Kemendagri*
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	*Jumlah regulasi penggunaan dan pengendalian Dana Desa*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*	*39,1*	*33 Provinsi*		*Kemendes, PDT & TRANS*
Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat	*Jumlah peserta literasi digital bagi masyarakat (termasuk peserta online)*	*10000*	*20000*	*30000*	*40000*	*50000*	*0,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemen Kominfo*
ProP : Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi							**481,7**			
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	*Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-jurnal yang dilanggan*	*574139*	*631553*	*688967*	*746381*	*746381*	*277,0*	*Pusat*		*Perpusnas*
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	*Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun*	*350000*	*355000*	*360000*	*365000*	*365000*	*46,0*	*Pusat*		*Perpusnas*
Penilaian dan Pengawasan Perbukuan	*Jumlah Penilaian dan Pengawasan Perbukuan*	*4010*	*4050*	*4100*	*4200*	*4300*	*102,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan*	*112*	*150*	*160*	*170*	*180*	*56,3*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial							**1.229,8**			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	*Jumlah perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial (Daerah)*	*681*	*1048*	*1267*	*1634*	*2248*	*1.121,9*	*Daerah*		*Perpusnas*
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	*Jumlah layanan Perpusnas berbasis inklusi sosial di Perpusnas (Perpusnas Jakarta)*	*13*	*15*	*17*	*19*	*21*	*65,4*	*Pusat*		*Perpusnas*
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (UPT Bung Karno Blitar)*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*12,0*	*Pusat*		*Perpusnas*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*12,0*	*Pusat*		*Perpusnas*
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	*Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (eksemplar)*	*46000*	*48000*	*50000*	*52000*	*54000*	*18,5*	*BLBI Abiyoso (Jawa Barat)*		*Kemensos*
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra							**289,3**			
ProP : Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional							**98,8**			
Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi	*Jumlah Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*7,2*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	*Jumlah Penugasan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*91,7*	*Pusat*		*Kemendikbud*
ProP : Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas							**190,4**			
Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	*Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra*	*18710*	*19000*	*19000*	*19000*	*19000*	*144,5*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	*Jumlah Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra*	*5000*	*5000*	*5000*	*5000*	*5000*	*45,9*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
Perlindungan bahasa daerah yang terancam punah	*Jumlah bahasa daerah terancam punah yang terlindungi*	*72*	*112*	*152*	*192*	*232*	*0,0*	*Pusat dan daerah*		*Kemendikbud*
KP : Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta							**105,8**			
ProP : Peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini							**97,8**			
Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)	*Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award (paket)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*27,1*	*Pusat*		*LIPI*
Pembinaan dan pengiriman Tim Nasional pada Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	*Jumlah medali dan/atau penghargaan yang diperoleh dari Kompetisi Matematika dan Sains Internasional*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4,8*	*34 Provinsi*		*Kemen Ristek/ BRIN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.4.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan peneliti remaja oleh fungsional peneliti	*Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*40,0*	*34 Provinsi*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	*Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat*	*2864*	*3000*	*3000*	*3000*	*3000*	*25,9*	*Pusat*		*Kemen Ristek/ BRIN*
ProP : Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi							**8,0**			
Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal	*Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*4,0*	*34 Provinsi*		*Kemen Ristek/ BRIN*
Dukungan perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa	*Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*4,0*	*34 Provinsi*		*Kemen Ristek/ BRIN*
KP : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi							**353,7**			
ProP : Pengembangan mitra perpustakaan (library supporter)							**141,9**			
Pengembangan Mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	*Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*40,4*	*Daerah*		*Perpusnas*
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	*Jumlah tenaga Perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan*	*1417*	*1500*	*1600*	*1700*	*1800*	*85,2*	*Pusat dan daerah*		*Perpusnas*
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	*Jumlah pustakawan yang tersertifikasi*	*440*	*700*	*700*	*700*	*700*	*12,5*	*Pusat dan daerah*		*Perpusnas*
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	*Peningkatan Pelibatan Publik di TBM*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*2,8*	*34 Provinsi*		*Kemendikbud*
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	*Penguatan Tata Kelola TBM*	*27*	*27*	*27*	*27*	*27*	*1,0*	*34 Provinsi*		*Kemendikbud*
ProP : Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi							**211,8**			
Perluasan layanan perpustakaan berbasis digital	*Jumlah Pojok Baca Digital (Lokasi)*	*250*	*300*	*360*	*432*	*500*	*211,8*	*Provinsi/Kabupaten/Kota*		*Perpusnas*
JUMLAH							**36.143,8**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	1.383.141,9			
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87				
	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60				
	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)				
	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)				
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15				
	Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1				
	Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083				
	Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20				
	Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325				
	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65				
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)	48391	154310	164310	241415	261565	615.989,8			
	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157762	194763	253986	291403	355387				
	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	58460	85000	110000	135000	161540				
	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	112500	216154	200000	220000	220000				
	Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	219005	152510	152510	208765	212210				
	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48				
	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	**1221**	**5779**	**1000**	**1000**	**1000**				
ProP : Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru	**Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)**	**48391**	**154310**	**164310**	**241415**	**261565**	**431.169,5**			
	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	**157762**	**194763**	**253986**	**291403**	**355387**				
	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)	**0**	**10000**	**10000**	**10000**	**10000**				
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah (Unit)*	*12750*	*2700*	*2700*	*4000*	*4000*	*1.500,0*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan (unit)*	*0*	*3000*	*3000*	*4500*	*4500*	*1.125,0*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya Mendukung KSPN	*Jumlah pembangunan baru rumah swadaya mendukung KSPN (unit)*	*300*	*440*	*440*	*660*	*660*	*250,0*	*10 KSPN Super Prioritas*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan ASN	*Jumlah Rumah Susun yang Terbangun (unit)*	*3341*	*4600*	*4600*	*6900*	*6900*	*13.300,1*	*34 Provinsi*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Rumah Susun Menggunakan Skema KPBU	*Jumlah Rumah Susun yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU (unit)*	*0*	*0*	*0*	*5000*	*10000*	*0,0*	*6 Metropolitan*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*KPBU*
Pembangunan rumah ASN di ibu kota negara	*Jumlah rumah yang dibangun (unit)*	*0*	*2000*	*2000*	*3000*	*3000*	*4.750,0*	*Ibu Kota Negara*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN, termasuk Perumnas dan holding	*Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)*	*20253*	*20253*	*42660*	*42660*	*67449*	*28.000,0*	*6 Metropolitan*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*BUMN*
Pembangunan Rumah Layak Huni oleh BUMN, termasuk Perumnas dan holding	*Jumlah rumah yang terbangun (unit)*	*35125*	*70510*	*106326*	*142743*	*179938*	*20.000,0*	*34 Provinsi*		*BUMN*
Pembangunan hunian tetap in situ	*Jumlah hunian tetap yang terbangun (unit)*	*100000*	-	-	-	-	*5.000,0*	*Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala*		*Pemerintah Daerah*
Pembangunan Rumah Khusus	*Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)*	*2000*	*1570*	*1570*	*2355*	*2505*	*2.030,1*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni secara	*Jumlah rumah swadaya baru yang terbangun (unit)*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*2.887,5*	*34 Provinsi*		*DAK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)*	*0*	*100000*	*100000*	*150000*	*150000*	*500,0*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh Pemerintah Daerah	*Jumlah Rumah Susun Sewa yang dibangun (unit)*	*20000*	*30000*	*40000*	*60000*	*80000*	*109.250,0*	*34 Provinsi*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*Pemerintah Daerah*
Pembangunan Rumah Susun oleh Swasta/Dunia Usaha	*Jumlah Rumah Susun yang dibangun (unit)*	*100000*	*100000*	*100000*	*100000*	*100000*	*237.500,0*	*34 Provinsi*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*Swasta/Dunia Usaha*
Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh Masyarakat	*Jumlah Rumah Susun Sewa yang dibangun (unit)*	*2384*	*4000*	*5000*	*6000*	*8000*	*5.076,8*	*34 Provinsi*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	*Masyarakat*
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	**Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)**	**102812**	**225842**	**200000**	**220000**	**220000**	**142.351,8**			
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	**58460**	**85000**	**110000**	**135000**	**161540**				
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	*Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga)*	*312*	*68342*	*0*	*0*	*-*	*2.796,2*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	*Jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)*	*58460*	*85000*	*110000*	*135000*	*161540*	*10,2*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	*Jumlah rumah tangga yang terverifikasi untuk mendapatkan subsidi perumahan (rumah tangga)*	*102500*	*157500*	*200000*	*220000*	*220000*	*45,4*	*Pusat*		*KEMEN PU&PERA*
Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERA	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)*	*50000*	*75000*	*100000*	*125000*	*150000*	*60.000,0*	*Pusat*		*TAPERA (Badan Hukum Milik Negara)*
Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)*	*8460*	*10000*	*10000*	*10000*	*11540*	*10.000,0*	*Pusat*		*PT. SMF (BUMN)*
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	*Jumlah rumah tangga yang mendapatkan FLPP (rumah tangga)*	*102500*	*157500*	*200000*	*220000*	*220000*	*69.500,0*	*34 Provinsi*		*SDI (Subsidi-Belanja Non KL)*
ProP : Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	**Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)**	**219005**	**152510**	**152510**	**208765**	**250910**	**27.708,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)*	*166000*	*72000*	*72000*	*108000*	*146700*	*13.470,2*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tangga miskin yg memperoleh bantuan rehab RTLH (unit)*	*14000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*237,8*	*34 Provinsi*		*Kementerian Sosial*
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Bantuan peningkatan kualitas (unit)*	*0*	*40000*	*40000*	*60000*	*60000*	*10.000,0*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung KSPN	*Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)*	*2450*	*510*	*510*	*765*	*765*	*250,1*	*10 KSPN Super Prioritas*		*KEMEN PU&PERA*
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni secara	*Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya (unit)*	*36555*	*40000*	*40000*	*40000*	*43445*	*3.750,0*	*34 Provinsi*		*DAK*
ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	**Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar (unit)**	**22500**	**40000**	**50000**	**62500**	**75000**	**3.905,5**			
Pembangunan PSU Perumahan	*Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU (unit)*	*22500*	*47970*	*47970*	*71950*	*71955*	*3.905,5*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	**Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (kabupaten/ kota)**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**512,0**			
Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	*Jumlah NSPK terkait penataan bangunan dan lingkungan (NSPK)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Pusat*		*KEMEN PU&PERA*
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan	*Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*480,0*	*Kawasan Metropolitan*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi Pengaturan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	*Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Kab/Kota)*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*12,0*	*Kawasan Metropolitan*		*Kemendagri*
ProP : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	**Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)**	**1221**	**5779**	**1000**	**1000**	**1000**	**10.342,9**			
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah luasan kawasan permukiman yang dibangun dan dikembangkan (Hektar)*	*258*	*742*	*1000*	*1000*	*1000*	*5.459,6*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	*Jumlah luasan permukiman yang dibangun infrastruktur berbasis masyarakat (Hektar)*	*963*	*5037*	*0*	*0*	*0*	*4.703,3*	*34 Provinsi*		*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi	*Jumlah unit rumah (Unit)*	*0*	*600*	*800*	*1000*	*1200*	*180,0*	*34 Provinsi*		*DAK*
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	**Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)**	**62352**	**62352**	**62352**	**62352**	**62352**	**333.278,1**			
	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	**303028,2607**	**284145,2607**	**284145,2607**	**284145,2607**	**284145,2607**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	**1730314**	**1730314**	**1730314**	**1730314**	**1730314**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	**39**	**56**	**74**	**74**	**76**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	**223005,1183**	**255938,3636**	**316629,6299**	**376144,709**	**409077,9543**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	**144127,6836**	**164717,3527**	**308845,0364**	**473562,3891**	**494152,0582**				
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	**87**	**87**	**87**	**88**	**88**				
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	**83**	**83**	**83**	**84**	**84**				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	**15600000**	**17100000**	**19100000**	**21600000**	**24600000**				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	**48309000**	**48808000**	**49309000**	**49813000**	**50465000**				
	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	**5030000**	**5858000**	**7100000**	**8772000**	**10892000**				
	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	**67,2**	**75,4**	**83,6**	**91,8**	**100**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	**5,95**	**4,46**	**2,98**	**1,49**	**0**				
ProP : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	**Pembangunan SPAM Regional (lpd)**	**2030**	**2030**	**2030**	**2030**	**2030**	**329.539,6**			
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM (lpd)	**4041,6**	**6062,4**	**8083,2**	**10104,0**	**12124,8**				
	Perluasan SPAM (SR)	**288711,7**	**433067,6**	**577423,5**	**721779,3**	**866135,2**				
	Penurunan Non Revenue Water (NRW) PDAM (%)	**31**	**30**	**28**	**27**	**25**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	**21**	**28**	**28**	**28**	**28**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	**82**	**168**	**168**	**168**	**168**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	**24**	**50**	**74**	**113**	**113**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	**39**	**56**	**74**	**74**	**76**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	**78**	**108**	**113**	**116**	**116**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	**12**	**13**	**25**	**37**	**37**				
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	*Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/ Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota ,SPAM Regional, SPAM berbasis Masyarakat (lpd)*	*2214*	*2827*	*3440*	*4052*	*4665*	*25.411,3*	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*87560*	*131339*	*175119*	*218899*	*262679*	*8.028,9*	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan baru dan peningkatan SPAM bagi daerah yang belum memiliki layanan air	*Jumlah Sambungan Rumah (lpd)*	*1093*	*1639*	*2186*	*2732*	*3278*	*19.045,1*	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*DAK*
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	*Jumlah Sambungan Rumah (SR)*	*78065*	*117098*	*156130*	*195163*	*234196*	*7.158,4*	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*DAK*
Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	*Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (RT)*	*496464*	*498974*	*501484*	*503995*	*651729*	*22.547,5*	*Seluruh provinsi*		*DAK dan Pemerintah Daerah*
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	*Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,SPAM Regional, SPAM berbasis Masyarakat (lpd)*	*487*	*730*	*973*	*1217*	*1460*	*8.482,6*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*Pemerintah Daerah*
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*34770*	*52155*	*69540*	*86925*	*104310*	*3.188,3*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*Pemerintah Daerah*
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*43307*	*64960*	*86614*	*108267*	*129920*	*3.971,1*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*Pemerintah Daerah melalui hibah*
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	*Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,SPAM Regional (lpd)*	*2278*	*2896*	*3514*	*4133*	*4751*	*25.816,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KPBU, dana lainnnya*
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*45010*	*67516*	*90021*	*112526*	*135031*	*4.127,3*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KPBU, dana lainnnya*
SPALD-T Skala Kota/Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)*	*6270*	*6270*	*6270*	*6270*	*6270*	*18.682,0*	*28 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
SPALD-T Skala Kota/Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)*	*56082*	*56082*	*56082*	*56082*	*56082*	*1.283,0*	*28 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*APBD; Masyarakat Lainnya*
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*125000*	*106117*	*106117*	*106117*	*106117*	*8.241,0*	*168 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*DAK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)*	*21663*	*21663*	*21663*	*21663*	*21663*	*25.894,0*	*168 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)*	*156365,4*	*156365,4*	*156365,4*	*156365,4*	*156365,4*	*6.346,0*	*168 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)*
SPALD-S Skala Individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)*	*2347304*	*2347304*	*2347304*	*2347304*	*2347304*	*59.396,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)*
SPALD-S Skala Individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)*	*593000*	*593000*	*593000*	*593000*	*593000*	*14.825,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*DAK*
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	*Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)*	*24*	*77*	*101*	*152*	*151*	*4.435,0*	*374 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
Truk Tinja	*Jumlah truk tinja (unit)*	*86*	*86*	*173*	*259*	*259*	*383,0*	*374 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*DAK*
Truk Tinja	*Jumlah truk tinja (unit)*	*28*	*28*	*56*	*85*	*85*	*125,0*	*374 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)*	*39*	*46*	*46*	*46*	*47*	*25.391,0*	*224 kab/kota*		*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)*		*10*	*28*	*28*	*29*	*10.750,0*	*95 kab/kota*		*KPBU*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah kabupaten/kota yang menyediakan dukungan pembangunan TPA (kab/kota)*	*39*	*56*	*74*	*74*	*76*	*13.645,0*	*319 kab/kota*		*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Truk Sampah	*Jumlah truk sampah yang tersedia (unit)*	*1600*	*1600*	*1600*	*1601*	*1601*	*2.801,1*	*448 kab/kota*		*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	*Jumlah alat berat di TPA (unit)*	*39*	*46*	*46*	*46*	*47*	*1.120,0*	*224 kab/kota*		*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	*Jumlah alat berat di TPA (unit)*		*10*	*28*	*28*	*29*	*570,0*	*95 kab/kota*		*KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*283*	*283*	*565*	*848*	*848*	*1.036,1*	*120 kab/kota*		*DAK*
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*189*	*189*	*377*	*565*	*565*	*691,0*	*120 kab/kota*		*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*83*	*83*	*166*	*250*	*250*	*304,9*	*Tersebar*		*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	*Jumlah TPST yang terbangun (unit)*	*7*	*8*	*15*	*23*	*22*	*5.844,0*	*55 kab/kota*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	**Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%)**	**5**	**25**	**45**	**65**	**100**	**3.023,6**			
	Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%)	**50**	**63**	**75**	**88**	**100**				
	Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll) (%)	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**				
	Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**				
	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik (provinsi)	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**				
	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)	**40**	**55**	**70**	**85**	**90**				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM	*Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di kabupaten/kota (kab/kota)*	*509*	*509*	*509*	*509*	*509*	*1.055,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka kerjasama investasi (BUMN/BUMD)*	*14*	*11*	*21*	*21*	*23*	*76,4*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja (BUMN/BUMD)*	*30*	*32*	*32*	*32*	*30*	*261,3*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Penyusunan Business Plan pada BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Business Plan (BUMN/BUMD)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*38,9*	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	*Jumlah PDAM yang melakukan penyusunan bussiness plan (PDAM)*	*30*	*124*	*76*	*77*	*77*	*13,4*	*Seluruh provinsi*		*Pemerintah Daerah*
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	*Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen rencana daerah (provinsi)*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*4,0*	*Seluruh provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	*Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen daerah dan kapasitas(provinsi)*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*4,0*	*Seluruh provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam Dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	*Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan Daerah melalui Sistem Informasi(provinsi)*	*0*	*34*	*34*	*34*	*34*	*4,0*	*Seluruh provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman (APBD	*Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan kebijakan nasional air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah (kab/kota)*	*0*	*514*	*514*	*514*	*514*	*61,6*	*514 kab/kota*		*Pemerintah Daerah*
Implementasi Dokumen SSK (APBN)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)*	*66*	*66*	*62*	*62*	*52*	*308,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
Implementasi Dokumen SSK (APBD Provinsi)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)*	*66*	*66*	*62*	*62*	*52*	*77,0*	*308 kab/kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*Pemerintah Provinsi*
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)*	*87*	*87*	*87*	*88*	*88*	*218,5*	*437 kab/kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)*	*87*	*87*	*87*	*88*	*88*	*109,4*	*437 kab/kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*Pemerintah Provinsi*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBN)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)*	*83*	*83*	*83*	*84*	*84*	*208,5*	*417 kab/kota*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBD Provinsi)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)*	*83*	*83*	*83*	*84*	*84*	*104,4*	*417 kab/kota*		*Pemerintah Provinsi*
Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi di daerah	*Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34,0*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	*Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)*	*40*	*55*	*70*	*85*	*90*	*445,1*	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*Kementerian Kesehatan*
ProP : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	**Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi (provinsi)**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**344,2**			
	Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun (NSPK)	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**				
	Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun (NSPK)	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**				
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota)	**101**	**102**	**102**	**102**	**102**				
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)	**101**	**102**	**102**	**102**	**102**				
Penyusunan Rancangan NSPK	*Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*16,0*	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	*Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)*	*66*	*66*	*64*	*58*	*54*	*15,4*	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	*Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*15,4*	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*Kemendagri*
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBD)	*Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)*	*66*	*66*	*64*	*58*	*54*	*154,0*	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*Pemda*

A.5.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Peraturan pengembangan SPAM yang tersusun(NSPK)*	*3*	*4*	*4*	*3*	*2*	*11,2*	*Pusat*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)*	*101*	*102*	*102*	*102*	*102*	*66,1*	*508 kab/kota untuk pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta*		*Pemerintah Daerah*
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada (Kab/Kota)*	*101*	*102*	*102*	*102*	*102*	*66,1*	*508 kab/kota untuk pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta*		*Pemerintah Daerah*
ProP : Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	**Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)**	**101**	**102**	**102**	**102**	**102**	**370,7**			
	Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)	**514**	**514**	**514**	**514**	**514**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)		**33**	**40**	**60**	**60**				
Pengawasan Kualitas Air Minum	*Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (%)*	*60*	*64*	*68*	*72*	*76*	*291,2*	*Seluruh provinsi*		*Kementerian Kesehatan*
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	*Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (Kab/Kota)*	*101*	*102*	*102*	*102*	*102*	*50,0*	*509 Kab/Kota*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)	*Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)*	*0*	*33*	*40*	*60*	*60*	*29,5*	*Seluruh provinsi*		*Kemen LHK*
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	**Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)**	**4,27**	**11,43**	**11,43**	**11,43**	**11,43**	**38.748,0**			
	Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	**0**	**5**	**17**	**21**	**21**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	**0**	**7**	**8**	**9**	**10**				
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	**Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)**	**4,27**	**11,43**	**11,43**	**11,43**	**11,43**	**37.938,7**			
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)	**3**	**5**	**7**	**9**	**10**				
	Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah (unit)	**3**	**5**	**7**	**9**	**10**				
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	*Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*0,3*	*0,2*	*360,2*	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulaewsi Utara, Riau, Kepulauan Riau*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	*Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)*	*0,5*	*4,2*	*4,1*	*5,1*	*3,7*	*5.783,8*	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	*Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)*	*1,1*	*2,0*	*2,3*	*2,3*	*2,1*	*3.320,8*	*Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)*	*0*	*0,58*	*0,64*	*0,70*	*0,72*	*856,7*	*KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, DPP Danau Toba, DPP Padang-Bukittinggi, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, DPP Borobudur dsk, KI Madura, DPP Bali, KEK/DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Palu, DPP Manado-Likupang, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, KI Teluk Weda, DPP Raja Ampat,*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KEK Be Creative District Karawang, KEK Be Creative District Maja-Rangkas, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh, DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya, DPP Baru Sambas-Singkawang		
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	*Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)*	*0*	*1,98*	*0,47*	*0*	*0*	*796,8*	*Kabupaten Cirebon, Pekalongan*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	*Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)*	*2,44*	*2,53*	*3,84*	*3,06*	*4,67*	*5.674,6*	*Tersebar*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	*Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)*	*11,49*	*11,49*	*11,49*	*11,49*	*11,49*	*17.235,0*	*Wilayah Metropolitan Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila*		*KPBU*
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku	*Jumlah unit infrastruktur penyedia air baku yang direhabilitasi (unit)*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*1.016,8*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Sumur Air Tanah untuk Air Baku	*Jumlah titik pembangunan sumur air tanah untuk air baku (unit)*	*1000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*1.854,0*	*Kawasan 3T dan rawan air*		*Kemen ESDM*
Pengawetan dan pengisian kembali air tanah	*Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan recharge air tanah (unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*340,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi (conjunctive use)	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*510,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas (Kab./kota)*	*19*	*19*	*19*	*19*	*19*	*190,0*	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*Kemen ESDM*
ProP : Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	**Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**136,3**			
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki kebijakan PSDA terpadu (wilayah sungai)	**0**	**5**	**17**	**21**	**21**				
Penetapan peraturan pemerintah terkair SDA	*Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*4,0*	*Pusat*		*KEMEN PU&PERA*
Pembuatan dokumen pola dan rencana PSDA	*Jumlah dokumen kebijakan PSDA wilayah sungai kewenangan pusat yang ditetapkan (dokumen)*	*29*	*38*	*47*	*56*	*64*	*105,3*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Penyusunan dokumen penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	*Jumlah pedoman penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai (dokumen)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,0*	*Pusat*		*KEMEN PU&PERA*
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	*Jumlah wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya (wilayah sungai)*	*0*	*2*	*2*	*3*	*3*	*15,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	*Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air (provinsi)*	*-*	*34*	*34*	*34*	*34*	*10,0*	*Tersebar*		*Kemendagri*
ProP : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	**Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi SDA (unit)**	**0**	**7**	**8**	**9**	**10**	**673,0**			
	Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (unit)	**0**	**7**	**8**	**9**	**10**				
Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan ICT pengelolaan infrastruktur SDA (unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*68,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pengembangan GIS (Geographic Information System) dan Pemodelan Sumber Daya Air	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan GIS dan pemodelan sumber daya air (unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*170,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air (unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*170,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pengembangan sistem informasi air tanah	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi air tanah(unit)*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*	*170,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pengembangan sistem informasi hidrogeologi	*Jumlah CAT dengan sistem pengelolaan hidrogeologi terpadu(unit)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*95,0*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	**a. Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)**	**1,27**	**1,25**	**1,23**	**1,21**	**1,19**	**41.541,7**			
	b. Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)	**70**	**65**	**60**	**55**	**50**				
	c. Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)	**0,26**	**0,25**	**0,24**	**0,24**	**0,23**				
	d. Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	**30**	**29**	**29**	**28**	**28**				
ProP : Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR							**28.561,0**			
Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum, ATCS)	*Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (Provinsi)*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*	*7.500,0*	*Pusat*		*Kemenhub*
Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu di	*Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya (kawasan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*255,4*	*Jawa Barat, DKI, Banten*		*Kemenhub*
Pengembangan Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perkotaan	*Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya dikembangkan (kawasan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*234,5*	*Jawa Barat, DKI, Banten*		*Kemenhub*
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraaan bermotor (UPPKB) (Dukungan APBN)	*Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*		*295,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraaan bermotor (UPPKB) (Dukungan KPBU)	*Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*		*1.750,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	*Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)*	*1*	*10*	*10*	*10*	*10*	*1.095,0*	*Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	*Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)*	*67*	*70*	*73*	*75*	*77*	*1.118,2*	*Pusat*		*Kemenhub*
Penyediaan kapal navigasi	*Jumlah kapal navigasi yang dibangun (unit)*	*10*	*14*	*18*	*22*	*25*	*1.000,0*	*Pusat*		*Kemenhub*
Penyediaan Vessel Traffic Services Terintegrasi	*Jumlah Vessel Traffic Services Terintegrasi yang disediakan (unit)*	*15*	*20*	*25*	*30*	*35*	*452,6*	*Pusat*		*Kemenhub*
Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNS/ATM	*Jumlah sarana navigasi CNS/ATM disediakan dan dimodernisasi (Communication, Navigation, Surveilance/air traffic management system) (unit)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	*335,3*	*Pusat*		*Kemenhub*
Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi	*Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang dibangun (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*1.110,0*	*Pusat*		*Kemenhub*
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan										
Pengadaan Peralatan SAR	*Jumlah peralatan SAR yang disediakan (paket)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*60,9*	*Pusat*		*Basarnas*
Pembangunan Prasarana SAR	*Jumlah Prasarana SAR yang disediakan (paket)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*60,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra darat										
Penyediaan Rescue Truck Tipe I	*Jumlah Rescue Truck Tipe I yang disediakan (unit)*	*6*	*20*	*20*	*20*	*20*	*161,3*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rescue Truck Tipe II	*Jumlah Rescue Truck Tipe II SAR yang disediakan (unit)*	*32*	*34*	*34*	*34*	*34*	*126,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rescue CarTipe I	*Jumlah Rescue CarTipe I yang disediakan (unit)*	*4*	*15*	*15*	*15*	*15*	*345,6*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rescue CarTipe II	*Jumlah Rescue CarTipe II yang disediakan (unit)*	*31*	*33*	*33*	*33*	*33*	*307,1*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra laut										
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1	*Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 yang disediakan (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.120,0*	*Pusat*		*Basarnas*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2	*Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 yang disediakan (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1.960,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1	*Jumlah Rescue Boat Kelas 1yang disediakan (unit)*	*1 (berlanjut)*	*3 (1 selesai dan 2 berlanjut)*	*3 (2 selesai dan 1 berlanjut)*	*3 (1 selesai dan 2 berlanjut)*	*2 (2 selesai)*	*1.880,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2	*Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*1.752,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	*Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)*	*12*	*15*	*15*	*15*	*15*	*354,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	*Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)*	*8*	*15*	*15*	*15*	*15*	*301,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Landing Craft	*Jumlah Landing Craft yang disediakan (unit)*	*100*	*70*	*70*	*80*	*80*	*170,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Rafting Boat	*Jumlah sRafting Boat yang disediakan (unit)*	*-*	*30*	*30*	*40*	*40*	*28,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan perlengkapan pencarian dan pertolongan matra udara										
Penyediaan Pesawat Fixed Wing	*Jumlah Pesawat Fixed Wing yang disediakan (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1*	*1*	*1.800,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Penyediaan Medium Helicopter	*Jumlah Medium Helicopter yang disediakan (unit)*	*1 (berlanjut)*	*3 (1 selesai dan 2 berlanjut)*	*3 (2 selesai dan 1 berlanjut)*	*3 (1 selesai dan 2 berlanjut)*	*2 (2 selesai)*	*1.880,0*	*Pusat*		*Basarnas*
Pengelolaan Operasi SAR										
Pengelolaan Operasi SAR	*Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (satker)*	*44*	*44*	*44*	*44*	*44*	*464,8*	*Pusat*		*Basarnas*
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR										
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	*Jumlah sistem komunikasi SAR yang disediakan (paket)*	*4*	*6*	*6*	*8*	*8*	*160,0*	*Pusat*		*Basarnas*
ProP : Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan							**12.980,7**			
Pendidikan Perhubungan Darat	**Jumlah SDM transportasi yang berkompeten**									
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	*Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat (orang)*	*5428*	*5289*	*5369*	*5463*	*5660*	*1.170,8*	*Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar*		*Kemenhub*
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)*	*4652*	*7746*	*9393*	*9673*	*9574*	*655,1*	*Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat	*Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat (orang)*	*19510*	*27731*	*27831*	*28361*	*29071*	*746,4*	*Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar*		*Kemenhub*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (paket)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*399,5*	*Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar*		*Kemenhub*
Pendidikan Perhubungan Laut	**Jumlah SDM transportasi yang berkompeten**									
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	*Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut (orang)*	*16038*	*16983*	*17416*	*17981*	*18822*	*2.710,7*	*Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat*		*Kemenhub*
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut (orang)*	*168637*	*171523*	*173228*	*173570*	*179545*	*2.248,1*	*Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat*		*Kemenhub*
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut	*Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut (orang)*	*82392*	*71573*	*73912*	*73572*	*73942*	*1.311,2*	*Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat*		*Kemenhub*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (paket)*	*-*	*12*	*12*	*12*	*12*	*431,0*	*Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat*		*Kemenhub*
Pendidikan Perhubungan Udara	**Jumlah SDM transportasi yang berkompeten**									
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	*Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara (orang)*	*4873*	*5434*	*5674*	*5626*	*5883*	*1.164,8*	*Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua*		*Kemenhub*
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	*Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara (orang)*	*7145*	*7169*	*7906*	*8017*	*8303*	*1.672,5*	*Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua*		*Kemenhub*
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara	*Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara (orang)*	*12495*	*8222*	*8287*	*8317*	*8452*	*255,1*	*Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua*		*Kemenhub*
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (paket)*	*-*	*8*	*8*	*8*	*8*	*215,5*	*Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua*		*Kemenhub*
Pembinaan Daerah untuk RUNK										

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan Road Safety Center/Sekretariat Keselamatan Jalan	*Jumlah kelembagaan Keselamatan Jalan yang dibentuk oleh Pemda (pemda)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*25,0*	*Pusat*		*Kemenhub*
Pembinaan Potensi SAR										
Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten	*Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*459,2*	*Pusat*		*Basarnas*
KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	**Jumlah Provinsi yang meningkatan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100.435,9**			
	Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restrorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**				
ProP : Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	**Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dan daerah yang menetapkan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana banjir (wilayah sungai)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**1.211,1**			
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami dan likuefaksi (kab./kota)	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**				
	Jumlah kabupaten/Kota dengan peta risiko penurunan muka tanah (kab./kota)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				
Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana	*Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (dokumen)*	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*4,0*	*Terpusat*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)*	*5*	*8*	*9*	*10*	*10*	*210,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang,Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung,*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)*	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*	*40,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang,Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung,*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (kab./kota)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (kab./kota)*	*1*		*1*		*1*	*9,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuifaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya*		*KEMEN PU&PERA*
Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara jawa	*Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu(kawasan perkotaan)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*40,0*	*Terpusat*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
Penyusunan peta risiko dan rencana induk penurunan tanah	*Jumlah peta risiko penurunan tanah di kawasan prioritas (unit)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,1*	*Terpusat*		*Kemen ESDM*
Peraturan penataan bangunan dan lingkungan	*Jumlah peraturan penataan bangunan dan lingkungan (unit)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,0*	*Terpusat*		*KEMEN PU&PERA*
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	*Jumlah kab/kota terselenggara pembinaan dan pengawasan bangunan gedung dan penataan lingkungan(kab./kota)*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*871,0*	*509 Kabupaten/Kota*		*KEMEN PU&PERA*
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	*Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (provinsi)*		*34*	*34*	*34*	*34*	*10,0*	*Tersebar*		*Kemendagri*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	**Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir (wilayah sungai)**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**46.961,9**			
	Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan bencana lumpur dan sedimen (wilayah sungai)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**				
	Jumlah provinsi yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir (provinsi)	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**				
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**				
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di WS kritis (Km)*	*23,7*	*13*	*15*	*15*	*18*	*2.991,5*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)*	*32,2*	*14*	*10*	*11*	*4*	*2.845,0*	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Prioritas lainnya (Km)*	*61,8*	*50*	*55*	*60*	*65*	*6.777,2*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir	*Panjang Infrastruktur pengendali banjir sungai kewenangan daerah yang dibangun (km)*	*14,4*	*20*	*25*	*30*	*35*	*746,4*	*Tersebar*		*Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)*
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)*	*3*	*5*	*8*	*10*	*10*	*1.003,5*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)*	*3*	*4*	*4*	*10*	*10*	*866,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	*Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*3.870,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	*Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)*	*5*	*8*	*8*	*10*	*10*	*3.480,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	*Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatakan di wilayah sungai kritis (unit)*	*2*	*5*	*10*	*15*	*20*	*525,0*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	*Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)*	*12*	*10*	*10*	*15*	*20*	*700,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai	*Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*	*1.145,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana	*Panjang tanggul dan infrastruktur penahan lumpur sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi (km)*	*28*	*10*	*8*	*7*	*5*	*130,0*	*Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)*	*12,8*	*14,1*	*14,5*	*15,3*	*15,2*	*641,5*	*Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta	*Pengaman pesisir pantai utara Jakarta dengan skema KPBU (km)*	*0*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*13.370,0*	*Provinsi DKI Jakarta*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KPBU*
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)*	*8,8*	*10*	*15*	*20*	*20*	*7.656,8*	*Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau terluar*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Ketahanan kawasan pesisir dan pulau kecil terluar	*Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kumulatif)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*124,0*	*Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar*		*KKP*
Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	*Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana(wilayah sungai)*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*	*90,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	**Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan penggunaan air tanah (kab./kota)**	**2**	**4**	**5**	**4**	**1**	**805,3**			
	Jumlah daerah aliran sungai yang melakukan pengembangan peringatan dini bencana banjir (DAS)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**				
	Jumlah kawasan yang membangun sistem peringatan dini bencana longsor (kawasan)	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**				
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	*Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (kab./kota)*	*16*	*19*	*19*	*19*	*19*	*312,0*	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*Kemen ESDM*
Pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	*Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penggunaan air tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (kab./kota)*	*16*	*19*	*19*	*19*	*19*	*280,8*	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*Kemen ESDM*
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*50,0*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*37,5*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*KEMEN PU&PERA*
Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor	*Jumlah sistem peringatan dini bencana longsor yang dibangun (unit)*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*125,0*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	**Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonservasi (wilayah sungai)**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**51.457,6**			
	Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air (kawasan)	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**				
Konservasi wilayah sungai	*Jumlah wilayah sungai yang dikonservasi*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*60,0*	*Tersebar*		*Kemen LHK*
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	*Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya*	*0*	*3*	*3*	*3*	*3*	*180,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*4442,8*	*4442,8*	*4442,8*	*4442,8*	*4442,8*	*5.090,7*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*21103,5*	*21103,5*	*21103,5*	*21103,5*	*21103,5*	*1.589,9*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*DAK/PEMDA*
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*29989,1*	*29989,1*	*29989,1*	*29989,1*	*29989,1*	*1.128,4*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*APBD/Masyarakat /Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Kota/ Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/ Regional (SR)*	*2056,24*	*2056,24*	*2056,24*	*2056,24*	*2056,24*	*6.160,8*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
SPALD-T Skala Kota/ Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/ Regional (SR)*	*18506,2*	*18506,2*	*18506,2*	*18506,2*	*18506,2*	*423,4*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*APBD/ Masyarakat / Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-S Skala Individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)*	*159,5*	*159,5*	*159,5*	*159,5*	*159,5*	*797,4*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*DAK/PEMDA*
SPALD-S Skala Individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)*	*637,9*	*637,9*	*637,9*	*637,9*	*637,9*	*3.189,6*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*APBD/Masyarakat /Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.34

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	*Jumlah TPA yang dibangun (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*5*	*5.954,2*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	*Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)*	*90,7*	*90,7*	*90,7*	*90,7*	*90,7*	*167,5*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*

A.5.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	*Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)*	*136,07*	*136,07*	*136,07*	*136,07*	*136,07*	*251,3*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*DAK/PEMDA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	*Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)*	*40,02*	*40,02*	*40,02*	*40,02*	*40,02*	*73,9*	*Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kota Pasuruan*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*APBD/Masyarakat /Badan Usaha*
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*4832*	*4832*	*4832*	*4832*	*4832*	*4.537,0*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.36

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR)*	*22952*	*22952*	*22952*	*22952*	*22952*	*1.729,4*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*DAK/PEMDA*
SPALD-T Skala Kota/Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/Regional (SR)*	*0*	*628,4*	*628,4*	*628,4*	*628,4*	*14.473,0*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
SPALD-S Skala Individu	*Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)*	*53147,8*	*53147,8*	*53147,8*	*53147,8*	*53147,8*	*884,6*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*DAK/PEMDA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	*Jumlah TPA yang dibangun (unit)*	*3*	*0*	*1*	*2*	*1*	*4.566,0*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	*Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)*	*43,4*	*43,4*	*43,4*	*43,4*	*43,4*	*80,2*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*KEMEN PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	*Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari)*	*65,1*	*65,1*	*65,1*	*65,1*	*65,1*	*120,4*	*Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	*DAK/PEMDA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	**Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)**	**14,2**	**15,1**	**15,8**	**16,2**	**16,5**	**253.148,4**			
	Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (Kumulatif)	**14**	**17**	**28**	**40**	**50**				
	Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**				
	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif)	**2**	**7**	**13**	**19**	**25**				
	Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	**229,2**	**7192,7**	**7392,7**	**7592,7**	**7592,7**				
ProP : Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**70,0**			
Perencanaan pembangunan bendungan baru dengan protokol berkelanjutan	*Jumlah dokumen perencanaan bendungan protokol berkelanjutan (dokumen)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,0*	*Terpusat*		*KEMEN PU&PERA*
Perencanaan pembangunan bendungan dengan skema KPBU	*Jumlah dokumen perencanaan bendungan dengan skema KPBU (dokumen)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,0*	*Terpusat*		*KEMEN PU&PERA*
Perencanaan pengembangan tampungan alami	*Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*20,0*	*Terpusat*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	**Jumlah pembangunan bendungan multiguna (unit)**	**45**	**38**	**30**	**19**	**22**	**135.046,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.38

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan baru yang selesai dibangun	*Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (unit)*	*45 lanjutan 11 selesai*	*34 lanjutan 11 selesai*	*23 lanjutan 12 selesai*	*11 lanjutan 7 selesai*	*4 selesai*	*42.415,1*	*Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Tigadihadji, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Bener, Bendungan Sadawarna,*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.39

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Bulango Ulu, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Way Apu, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Jragung, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Budong-Budong		
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)*	*0*	*4 baru*	*3 baru 4 lanjutan*	*2 baru 7 lanjutan*	*2 baru 9 lanjutan*	*12.401,4*	*Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson*	*18 Waduk Multiguna*	*KEMEN PU&PERA*
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun dengan skema KPBU (unit)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*20.000,0*	*Bendungan Merangin, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Kusan*	*18 Waduk Multiguna*	*KPBU*
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*60.000,0*	*Bendungan Kayan, Bendungan Mentarang*	*18 Waduk Multiguna*	*BUMN dan/atau Swasta*
Bendungan yang direhabilitasi	*Jumlah bendungan yang direhabilitasi /ditingkatkan (unit)*	*2*	*1*	*1*	*1*	*0*	*230,0*	*Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	**Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit) (Kumulatif)**	**14**	**17**	**28**	**40**	**50**	**13.284,5**			
	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya (unit)	**8**	**9**	**11**	**11**	**16**				
Bendungan yang dimanfaatkan untuk PLTA	*Jumlah energi listrik yang bersumber dari bendungan (MW)*	*112,7*	*1,7*	*27,4*	*33,9*	*11,9*	*5.250,8*	*Bendungan Bajulmati, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas,*		*BUMN dan/atau Swasta*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Pamukkulu, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang		
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	*Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)*	*6,19*	*0,85*	*10,03*	*5,55*	*0,86*	*883,7*	*Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak,*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.42

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi	*Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha)*	*105461*	*14697*	*116375*	*53959*	*52057*	*5.771,0*	*Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh,*		*KEMEN PU&PERA*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Way Sekampung, Bendungan Ladongi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin, Bendungan Tamblang		
Tampungan alami yang direvitalisasi	*Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (unit) (kumulatif)*	*8*	*8*	*10*	*10*	*15*	*1.319,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya	*Jumlah tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya (unit)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*60,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Peningkatan OP dan keamanan bendungan	**Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (unit)**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**	**1.000,0**			
Peningkatan keamanan bendungan yang memiliki risiko tinggi	*Jumlah bendungan dengan risiko tinggi yang dirurunkan indeks resikonya (unit)*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*	*450,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Konservasi daerah tangkapan air bendungan	*Jumlah konservasi daerah tangkapan air bendungan (unit)*	*10*	*17*	*9*	*7*	*12*	*275,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Penyelesaian sertifikasi operasi bendungan	*Jumlah bendungan yang memiliki sertifikat operasi (unit)*	*10*	*17*	*9*	*7*	*12*	*275,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	**Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)**	**45000**	**113750**	**113750**	**113750**	**113750**	**101.833,1**			
	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (Hektare)	**874469,8**	**281382,5**	**281382,5**	**281382,5**	**281382,5**				
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Hektare)*	*15000*	*79625*	*79625*	*79625*	*79625*	*50.925,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah	*Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun (Hektare)*	*30000*	*34125*	*34125*	*34125*	*34125*	*11.655,0*	*Tersebar*		*Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Hektare)*	*80000,0*	*115403,3*	*115403,3*	*115403,3*	*115403,3*	*16.070,3*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah	*Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi (Hektare)*	*783082,0*	*143826,2*	*143826,2*	*143826,2*	*143826,2*	*21.125,8*	*Tersebar*		*Pemda (DAK Provinsi dan Kabupaten/kota)*
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	*Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Hektare)*	*11387,8*	*22153,0*	*22153,0*	*22153,0*	*22153,0*	*2.056,9*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	**Daerah Irigasi yang melaksanakan modernisasi irigasi (kumulatif)**	**2**	**3**	**6**	**8**	**9**	**562,0**			
Pengembangan sistem water accounting	*Jumlah sistem data pemantau ketersediaan air yang dibangun (unit) (kumulatif)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*60,0*	*Terpusat*	*18 Waduk Multiguna*	*KEMEN PU&PERA*
Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)	*Jumlah daerah irigasi dengan pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting) (daerah irigasi)*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*180,0*	*Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan*	*18 Waduk Multiguna*	*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	*Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi (daerah irigasi)*	*5*	*10*	*10*	*10*	*11*	*322,0*	*Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan*	*18 Waduk Multiguna*	*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	**Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)**	**229,2**	**2192,7**	**2392,7**	**2592,7**	**2592,7**	**1.352,3**			
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (unit)*	*0*	*1*	*1*	*2*	*2*	*24,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (unit)*	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*	*32,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (unit)*	*0*	*2*	*3*	*3*	*3*	*44,0*	*Tersebar*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	*Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Hektare)*	*229,2*	*1192,7*	*1192,7*	*1192,7*	*1192,7*	*1.252,3*	*Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB*		*KEMEN PU&PERA*
PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	**Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)**						**1.073.810,9**			
	Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)									
	Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)									
	Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)									
KP : Konektivitas Jalan	**a. Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)**						**758.029,5**			
	b. Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)									
	c. Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)									
	d. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (65%)									
ProP : Pembangunan Jalan Strategis	**Panjang Jalan Lintas Utama Pulau dibangun**						**45.469,4**			
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*14,9*	*14,9*	*8,0*	*8,0*	*1.099,0*	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Klarik Cs	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*107,3*	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*10*	*12*	*80,0*	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan lintas Bintan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*25*	*-*	*250,0*	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan perbatasan Kalbar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*12*	*-*	*-*	*-*	*-*	*98,4*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan perbatasan Kaltara	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*47,4*	*70,2*	*36,4*	*19,0*	*19,0*	*1.933,3*	*Kalimantan Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan perbatasan NTT	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*32,6*	*49,7*	*44,8*	*44,8*	*4,6*	*1.256,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Kepulauan NTT	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*7*	*-*	*-*	*30,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Barat Aceh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*10*	*100,0*	*Aceh*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Barat Jambi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*15*	*-*	*85,0*	*Jambi*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Pantura Banten	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*150*	*-*	*-*	*85,0*	*Banten*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penggantian Jembatan Pantura Banten (cs)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*75,0*	*Banten*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas penghubung Kalbar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6*	*29,0*	*57,2*	*57,2*	*57,2*	*2.330,7*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Penghubung Sumsel	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*5*	*10*	*-*	*111,0*	*Sumatera Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Penghubung Sumut	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*10*	*10*	*6*	*6*	*475,6*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Selatan Kalsel	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*7*	*7,5*			*348,0*	*Kalimantan Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Tengah Aceh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*32,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*1.790,4*	*Aceh*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Sp. Uning - Takengon	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*140,0*	*Aceh*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*1,5*	*-*	*-*	*11,8*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Tengah Kalteng	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*19,5478*	*13,0136*	*13,0136*	*5,8625*	*5,8625*	*562,6*	*Kalimantan Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Timur Riau	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*20*	*193,0*	*Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Timur Sumatera	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*64,5*	*387,0*	*Lampung*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Utara Bali	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*1083*	*1083*	*933*	*-*	*1.050,0*	*Bali*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*3*	*2,25*	*5*		*222,2*	*Bali*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*80,0*	*Bali*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Pansela Jawa Tengah	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3*	*8*	*10*	*15*	*12,9*	*496,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Pansela Jawa Timur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*38*	*53,6*	*59,9*	*59,9*	*35,5*	*2.496,6*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Pansela Yogyakarta	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5*	*17,6*	*6,0*	*6,0*		*495,1*	*Yogyakarta*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Selingkar Wilis Ring 1 (APBD/DAK)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*10*	*30*	*50*	*70*	*52*	*1.060,0*	*Jawa Timur*		*DAK/PEMDA*
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial (APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*19*	*48*	*75*	*75*	*45*	*786,0*	*Jawa Timur*		*KemenPUPR/Pemda*
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*786*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.218,7*	*Sulawesi Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*325,0*	*Sulawesi Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*23,2*	*Sulawesi Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Penghubung lintas timur dan barat Sumatera	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*7,5*	*15*	*-*	*200,0*	*Bengkulu*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*15*	*20*	*25*	*15*	*5*	*856,0*	*Gorontalo*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Gorontalo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*20*	*20*	*-*	*-*	*960,0*	*Gorontalo*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Jabar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*136,6*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Perbatasan Kaltim	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*62,6*	*54,7*	*32,3*	*5,9*	*5,9*	*1.580,3*	*Kalimantan Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Papua	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*59*	*59*	*39*	*39*	*39*	*3.155,0*	*Papua*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Papua Barat	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*50,5*	*50,5*	*50,5*	*50,5*	*50,5*	*2.768,6*	*Papua Barat*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.48

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jembatan di Jalan Trans Papua	*Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)*	*3140*	*3230*	*2680*	*2325*	*2389*	*7.245,6*	*Papua*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	*KEMEN PU&PERA*
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	*Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)*	*887,4*	*967,4*	*967,4*	*887,4*	*887,4*	*2.206,5*	*Papua Barat*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Perbatasan Papua	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*200,0*	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*0,0*	*Sulawesi Utara*		*KemenPUPR (KPBU)*
Jembatan Samota	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*150,0*	*Nusa Tenggara Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Batam-Bintan (Potensi/penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*10,0*	*Kepulauan Riau*		*KemenPUPR (KPBU)*
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi/penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*10,0*	*Sumatera Selatan*		*KemenPUPR (KPBU)*
Jembatan Muna-Buton (Potensi/Penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*	*10,0*	*Sulawesi Tenggara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*549,3*	*Kalimantan Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Pulau Laut (potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*1*	*-*	*0*	*0,0*	*Kalimantan Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Lewamori	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*500,0*	*Nusa Tenggara Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura - Sarmi)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*15*	*15*	*15*	*15*	*750,0*	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Kapuas 3	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*300,0*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Srandaan	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*700,0*	*Yogyakarta*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Kahayan 2	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*300,0*	*Kalimantan Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Sambas Besar	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*1.860,0*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*2*	*2*	*-*	*-*	*120,0*	*Sulawesi Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana - Windesi)	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	*-*	*-*	*5*	*5*	*-*	*120,0*	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	*-*	*4*	*5*	*5*	*-*	*135,0*	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Bangka	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*10*	*12*	*16*	*12*	*350,0*	*Bangka Belitung*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Belitung	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*5*	*8*	*10*	*7*	*210,0*	*Bangka Belitung*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Rembang - Lasem	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5*	*5*	*5,5*	*5*	*5*	*249,9*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar Sidareja)(Pansela)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*25,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Inari	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*900,0*	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan By Pass Balige	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7*	*6,5*	*-*	*-*	*-*	*135,0*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*150,1*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*85,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Pangarengan)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*2,9*	*2,9*	-	*50,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3*	*3*	-	-	*45,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Ploso	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1*	-	-	-	*200,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*176,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Siantar By Pass	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3,6*	*3,6*	*3,6*		*96,0*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Koordinasi penerapan Rencana Aksi dan pembinaan pelaksanaan pengembangan infrastruktur di bidang	*jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi dan pembinaan pelaksanaan di bidang transportasi (daerah)*	-	*167*	*323*	*479*	*633*	*18,5*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Pembangunan Jalan Tol	**Panjang jalan yang dibangun (2.500 km)**						**682.903,8**			
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*3,18*	*3,18*	*3,18*	*3,18*	*3,18*	*3.903,5*	*Tersebar (Jawa)*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*102,5*	*102,5*	*102,5*	*102,5*	*102,5*	*125.858,0*	*Tersebar (Jawa)*		*KPBU*
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*60*	*75*	*80*	*75,04*	*57,9*	*110.823,0*	*Jabodetabek*		*KPBU*
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*30*	*50*	*60*	*50*	*57*	*43.309,0*	*Tersebar (Jawa)*		*KPBU*
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*472*	*590*	*495*	*325*	*149*	*105.524,0*	*Tersebar (Sumatera)*	*Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*472*	*590*	*495*	*325*	*149*	*203.026,0*	*Tersebar (Sumatera)*	*Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung*	*KPBU*
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,13*	*2.661,8*	*Tersebar (Kalimantan)*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*15*	*20*	*25*	*25*	*12,1*	*25.514,1*	*Tersebar (Kalimantan)*		*KPBU*
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3.061,0*	*Tersebar (Sulawesi)*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	*10*	*15*	*20*	*20*	*11,2*	*15.153,5*	*Tersebar (Sulawesi)*		*KPBU*
Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*11,5*	*5.300,0*	*Jawa Tengah*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KPBU*
Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*15,5*	*7.100,0*	*Jawa Tengah*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Tol Samarinda - Bontang (Potensi)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*5*	*2.970,0*	*Kalimantan Timur*		*KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.50

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder (Potensi)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	10	1.700,0	*Jawa Timur*		*KPBU*
Jalan Tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	25	8.500,0	*Jawa Timur*		*KPBU*
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	8	3.500,0	*Jawa Timur*		*KPBU*
Jalan Tol Perkotaan Medan	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	10	20	15.000,0	*Sumatera Utara*		*KPBU*
ProP : Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	**Panjang jalan yang dibangun (KM)**						**9.659,0**			
Jalan Akses KEK Galang Batang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	1,8	-	-	-	11,8	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Bypass BIL-Mandalika	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	17,4	10,2	11,2	12,6	1.392,0	*Nusa Tenggara Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Seimangke	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	10	30,0	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KEK Sorong	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	6,8	6,8	6,8	6,8	444,1	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		5	8	7	5,5	249,9	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*		4,5	6	2,13		120,0	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Gresik	*Panjang jalan yang dibangun (km)*					5	60,0	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Madura	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	5	50,0	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Brebes	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	3	30,0	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Jorong	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	6	60,0	*Kalimantan Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Batu Licin	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	6	60,0	*Kalimantan Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Surya Borneo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	1	10,0	*Kalimantan Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Ketapang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	12	123,0	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Kemingking	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	5	50,0	*Jambi*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI Tanggamus	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	2	20,0	*Lampung*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KI/KEK Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	7	60,0	*Sulawesi Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	12,5	12,5	600,0	*Kalimantan Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Borobudur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	20	-	-	-	175,0	*Yogyakarta*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	6,7	21,4	21,4	21,4	21,4	1.402,2	*Nusa Tenggara Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Wakatobi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	30	225,0	*Sulawesi Tenggara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	20	223,0	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		4	5	4,33		120,0	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub (KPBU)*
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		4,5	4	5	4,15	150,0	*Nusa Tenggara Barat*		*KemenPUPR (KPBU)*
Jalan Akses wisata Samota (Dukungan DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	150	-	300,0	*Nusa Tenggara Barat*		*Pemda/KemenPUPR*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan akses KEK Arun	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	8	-	-	48,0	*Aceh*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	10	10	-	165,0	*Banten*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses KI Sadai	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	2	3,9	1		58,5	*Bangka Belitung*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Nibung 1-2	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	1	-	-	40,0	*Bangka Belitung*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses KI Tanjung Enim	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		3	4	4,3		85,0	*Sumatera Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		2	4	5,2		95,0	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko - Kelampok), Kab. Brebes	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		3	5	3,0		95,0	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab.	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*			5	5		80,0	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses KSPN Danau Toba	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	5	16,5	12,5	12,5	12,5	1.333,0	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses KI Weda	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	25	275,0	*Maluku Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Halmahera (Dukungan DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		5	6	8	12	745,8	*Maluku Utara*		*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Lingkar Pulau Morotai	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	14	9,7	9,7	9,7	-	422,8	*Maluku Utara*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Kapota (Wakatobi)	*Jembatan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	1	250,0	*Sulawesi Tenggara*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	**Panjang jalan yang dibangun**						**3.700,8**			
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk Sigintung)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		4	5			90,0	*Kalimantan Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Bandara Bima	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	4	-	-	45,0	*Nusa Tenggara Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	2	-	20,0	*Kalimantan Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Bandara Tambelan (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	5	-	-	42,0	*Kepulauan Riau*		*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Akses Bandara Waingapu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	2	3	-	-	120,0	*Nusa Tenggara Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	1	1	1	1	67,2	*Kalimantan Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Depapre	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	2	3	-	-	72,0	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	5	-	60,0	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Kuala	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	4	-	40,0	*Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	*Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)*			1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	400,0	*Jambi*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	2,5	2,5	2,5	2,5	240,0	*Jambi*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Pancur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-		3,5	-	-	30,0	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*4*	*5,625*	*5,625*	*5,625*	*5,625*	*636,0*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Patimban	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*8*					*130,0*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*5*	*-*	*50,0*	*Kalimantan Selatan*		*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan (dari PKN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*20*	*193,0*	*Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Sangata	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*2*	*-*	*-*	*-*	*48,0*	*Kalimantan Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Sintete	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*120,0*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api- Api	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8*	*80,0*	*Sumatera Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*8*	*8*	*8*	*8*	*816,0*	*Sumatera Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*6,1*	*2,02*	*-*	*-*	*193,6*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Terminal Tipe A	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*3*	*-*	*72,0*	*Sulawesi Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Terminal Tipe A	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*1,5*	*-*	*36,0*	*Sumatera Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*2*	*-*	*-*	*-*	*10,0*	*Kalimantan Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*3,8*	*-*	*-*	*30,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*3*	*3*	*-*	*-*	*60,0*	*Sulawesi Barat*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	**Persentase mantap jalan nasional (97%)(persen)**						**423,0**			
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*3,8*	*-*	*-*	*-*	*30,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*4*	*4*	*4,71*	*-*	*89,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer/Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*	*30,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*3*	*4,1*	*-*	*-*	*50,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*3*	*5*	*5,1*		*85,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*-*	*3,8*	*-*	*-*	*19,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas (Mamasa - Bts Sulsel)	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*-*	*3*	*5*	*5,3*	*-*	*120,0*	*Sulawesi Barat*		*KEMEN PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.53

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	**Persentase mantap jalan provinsi, Kab/kota (persen)**	**70/59**	**71/60**	**72/62**	**73/63**	**75/65**	**13.154,1**			
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	*Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	*-*	*5*	*8*	*10*	*12*	*164,5*	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Penanganan jalan lingkar Danau Anggi Giji dan Anggi Gida	*Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	*-*	*4*	*4*	*-*	*-*	*60,0*	*Papua Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Penanganan Jalan lingkar Nunukan	*Panjang Jalan lingkar yang dibangun/ ditingkatkan (km)*	*-*	*-*	*10*	*-*	*-*	*80,0*	*Kalimantan Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan lingkar Utara Lamongan (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*7*	*-*	*-*	*91,0*	*Jawa Timur*		*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*2,3*	*2,3*	*-*	*-*	*30,0*	*Yogyakarta*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lintas Seram	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*250,0*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Mentawai (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*8,7*	*12,8*	*12,3*	*12,0*	*11,3*	*716,5*	*Sumatera Barat*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Nias	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3,7*	*5,5*	*5,3*	*5,1*	*4,8*	*305,9*	*Sumatera Utara*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Pulau Buton (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3,4*	*5,0*	*4,8*	*4,7*	*4,4*	*279,7*	*Sulawesi Tenggara*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Muna	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5,3*	*7,8*	*7,5*	*7,3*	*6,9*	*436,8*	*Sulawesi Tenggara*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Pulau Simeleu (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5,8*	*8,5*	*8,2*	*8,0*	*7,5*	*476,0*	*Aceh*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans pulau Enggano	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5,3*	*7,8*	*7,5*	*7,3*	*6,9*	*436,8*	*Bengkulu*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Pulau Kei Besar (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*15,5*	*22,8*	*21,9*	*21,3*	*20,1*	*1.274,2*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Wetar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*11,7*	*17,2*	*16,5*	*16,0*	*15,1*	*960,2*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Pulau Moa (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6,9*	*10,2*	*9,8*	*9,5*	*8,9*	*567,6*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Trans Pulau Selaru (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6,6*	*9,7*	*9,3*	*9,0*	*8,5*	*541,4*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Aru (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6,1*	*9,0*	*8,6*	*8,4*	*7,9*	*502,2*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Babar (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6,9*	*10,2*	*9,8*	*9,5*	*8,9*	*567,6*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Buru	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6,1*	*9,0*	*8,6*	*8,4*	*7,9*	*502,2*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Pulau Sumba (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*18,1*	*26,6*	*25,5*	*24,8*	*23,4*	*1.483,5*	*Nusa Tenggara Timur*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*12,9*	*18,9*	*18,2*	*17,6*	*16,6*	*1.054,4*	*Papua*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu - Bonehau - Batuisi -	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*		*6*	*7*	*7,6*	*5,8*	*250,8*	*Sulawesi Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Trans Yapen	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*			*3*	*3,8*		*74,8*	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Pulau Weh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*4*	*-*	*-*	*40,0*	*Aceh*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan akses wisata religi Cut Mutiah (DAK/APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*21*	*-*	*-*	*148,0*	*Aceh*		*Pemda/KemenPUPR*
Jalan Pulau Terluar Maluku	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*25*	*25*	*25*	*25*	*1.680,0*	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	*KEMEN PU&PERA*
Jembatan Bian	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*	*180,0*	*Papua*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pengembangan Wilayah Suramadu							**2.719,4**			
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	*Luas lahan kawasan (ha)*	*50*	*50*	*25*	*25*	*25*	*384,8*	*Jawa Timur*		*BPWS*
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	*22,8*	*26,3*	*24,8*	*31,1*	*29,4*	*308,6*	*Jawa Timur*		*BPWS*
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*20*	*20*	*20*	*180,0*	*Jawa Timur*		*BPWS*
KP : Konektivitas Kereta Api	**Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)**						**120.266,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)	**81,5**	**83**	**87**	**90**	**94**				
	Panjang jalur KA yang beroperasi (km)									
	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)									
ProP : Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	**Panjang Jalur Kereta Api yang dibangun (km)**						**85.834,1**			
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhoksemawe)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*13 (berlanjut)*	*13 (Selesai)*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (Selesai)*	*458,5*	*Aceh*		*Kemenhub*
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*35 (Selesai)*	*30 (berlanjut)*	*30 (berlanjut)*	*30 (berlanjut)*	*30 (Selesai)*	*1.050,0*	*Aceh*		*Kemenhub*
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*33 (Selesai)*	*25 (berlanjut)*	*25 (berlanjut)*	*25 (Selesai)*	*30 (berlanjut)*	*1.215,0*	*Sumatera Utara- Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung -	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (Selesai)*	*20 (berlanjut)*	*550,0*	*Sumatera Selatan - Jambi*		*Kemenhub*
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*6 (berlanjut)*	*6 (berlanjut)*	*207,8*	*Bengkulu*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*432 (berlanjut)*	*432 (berlanjut)*	*432 (berlanjut)*	*432 (berlanjut)*	*16.280,0*	*Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah*	*KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)*	*Kemenhub*
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*142 (berlanjut)*	*142 (berlanjut)*	*142 (Selesai)*	*-*	*-*	*42.000,0*	*Jakarta, Jawa Barat*	*KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)*	*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung -	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*38 (berlanjut)*	*17 Selesai*	*90 (berlanjut)*	*90 (berlanjut)*	*90 (berlanjut)*	*3.007,3*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (lselesai)*	*550,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang-Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*17 (berlanjut)*	*17 (berlanjut)*	*17 Selesai*	*20 (berlanjut)*	*900,0*	*Banten*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.56

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*24 (berlanjut)*	*24 (berlanjut)*	*1.010,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub (KPBU)*
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*24 (berlanjut)*	*24 (berlanjut)*	*1.010,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*6 (berlanjut)*	*6 (selesai)*	*12 (berlanjut)*	*12 (berlanjut)*	*12 (selesai)*	*2.638,7*	*Sulawesi Selatan*	*Kereta Api Makassar-Pare Pare*	*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*43 (selesai) 64 (berlanjut)*	*64 (selesai)*	*12 (berlanjut)*	*12 (berlanjut)*	*12 (selesai)*	*3.790,4*	*Sulawesi Selatan*	*Kereta Api Makassar-Pare Pare*	*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*23 (selesai)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai)*	*25 (berlanjut)*	*25 (selesai)*	*1.210,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*325,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*14 (berlanjut)*	*2.770,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balik papan -	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai)*	*450,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*305,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*15 (selesai)*	*1.105,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (berlanjut)*	*96 (selesai)*	*3.001,4*	*Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Pembangunan Jalur Ganda KA Banjar - Kroya	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*			*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai)*	*500,0*	*Jawa Tengah, Jawa Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai); 15 (berlanjut)*	*15 (berlanjut)*	*800,0*	*Banten*		*Kemenhub*
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	*Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)*	*-*	*-*	*8 (berlanjut)*	*8 (berlanjut)*	*8 (selesai)*	*700,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.57

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	**Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan (km)**						**12.905,3**			
	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)									
Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan*	*15*	*15*	*15*	*15*	*9*	*676,4*	*Banten*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Utara (Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan*	*128*	*40*	*40*	*20*	*4*	*1.456,2*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang- Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan*	*14*	*5*	*20*	*20*	*10*	*1.017,1*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*8*	*20*	*20*	*20*	*6*	*438,8*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*100*	*56*	*-*	*-*	*-*	*209,6*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*91*	*20*	*20*	*30*	*53*	*699,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-	*Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)*	*65*	*60*	*70*	*70*	*60*	*908,2*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	*Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*7.500,0*	*Pusat*		*Kemenhub*
ProP : Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara:	**Terbangunnya KA akses Pelabuhan dan Bandara (km)**						**2.622,2**			
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	*KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)*	*2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7,5*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong	*KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (selesai)*		*200,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tarahan (KPBU)	*KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*5 (berlanjut)*	*5 (selesai)*	*500,0*	*Lampung*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong	*KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*5 (berlanjut)*	*5 (selesai)*	*-*	*500,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.58

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*13 (berlanjut)*	*13 (berlanjut)*	*13 (selesai)*	*-*	*-*	*240,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*1,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*74,7*	*Lampung*		*Kemenhub*
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*6 (berlanjut)*	*6 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*800,0*	*yogyakarta*		*Kemenhub*
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	*KA akses Bandara yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*-*	*10 (berlanjut)*	*10 (selesai)*	*300,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
ProP : Penyediaan PSO dan Subsidi							**18.904,9**			
Penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik Perkeretaapian (APBN Non Kemenhub)	*Tersedianya Dana PSO Perkeretaapian (paket)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*17.000,0*	*Pusat*		*Kemenhub, Kemenkeu*
Penyediaan Subsidi Perintis KA	*Tersedianya Layanan Subsidi Perkeretaapian (lintas)*	*7*	*9*	*9*	*10*	*10*	*1.904,9*	*Pusat*		*Kemenhub*
KP : Konektivitas Laut	**Jumlah pelabuhan pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi)**	**14**	**18**	**22**	**26**	**28**	**150.364,5**			
	Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**				
ProP : Pengembangan pelabuhan utama (hub)	**Terselenggaranya standardisasi infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan utama (hub)**						**113.000,0**			
Pengembangan Pelabuhan Belawan/ Kuala Tanjung	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/ Kuala Tanjung (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25.000,0*	*Sumatera Utara*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta*
Pengembangan Pelabuhan Kijing	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*12.500,0*	*Kalimantan Barat*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*5.000,0*	*DKI Jakarta*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*5.500,0*	*Jawa Timur*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta*
Pengembangan Pelabuhan Makassar	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*10.000,0*	*Sulawesi Selatan*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta*
Pengembangan Pelabuhan Bitung	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25.000,0*	*Sulawesi Utara*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Sorong	*Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30.000,0*	*Papua Barat*	*Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*	*Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta*
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	**Terselenggaranya pengembangan pelabuhan laut**						**21.833,1**			
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*10.000,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta*
Pembangunan Pelabuhan Patimban	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*4.832,2*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Kendal	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*90,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Nabire	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*39,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan baru di NTT (KPBU)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*400,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Pengembangan Pelabuhan Merauke	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*45,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan baru di Ambon (KPBU)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*560,0*	*Maluku*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajau	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*42,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Mansalean	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*27,7*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*36,3*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Gane Dalam	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*26,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Pulau Bunyu	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Mesuji	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*	*35,0*	*Lampung*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Sarmi	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*49,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tahuna	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*22,5*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Seba	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*110,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*244,3*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Wanci	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*90,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.60

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Ba'a	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*33,8*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Soasio	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*37,5*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*67,5*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Sebuku	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*50,0*	*Kalimantan Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tual	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*45,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Namlea	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Larantuka	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*45,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Moor	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*22,5*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Jampea	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*25,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Geser	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*25,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Gorom	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*22,5*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Raijua	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*22,5*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Wini	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*45,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Moa	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*25,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Jambi*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Pelaihari	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1*	-	*11,3*	*Kalimantan Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Maloy	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*40,5*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Depapre	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*				*50,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Malarko	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*90,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.61

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Dompak	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*50,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*75,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Serui	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*75,0*	*Papua*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Kilo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*50,0*	*Nusa Tenggara Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Anggrek	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*259,6*	*Gorontalo*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*90,0*	*Sulawesi Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tobelo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*90,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Kaimana	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*90,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Pomako	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Dobo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Banggai	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*28,5*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub (KPBU)*
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*812,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub (PHLN)*
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*130,5*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub (PHLN)*
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*101,5*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub (PHLN)*
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan (KPBU)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*600,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub, BPWS, KPBU*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api (KPBU)	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.000,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*70,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tegal	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*140,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.62

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Meranti	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*3,1*	*Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Kedindi Reo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*15,5*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembagan Pelabuhan Waikelo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*1,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Likupang	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*7,5*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Miangas	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*24,5*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*5,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Bajoe	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*5,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Molu	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*16,9*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Wasior	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	*5,5*	*papua Barat*		*Kemenhub*
ProP : Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	**Terbangunnya pelabuhan pendukung kawasan prioritas (kumulatif)**						**764,0**			
Pengembangan Pelabuhan Benoa	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*184,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*150,0*	*Bali*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*90,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*150,0*	*Nusa Tenggara Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular	*Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100,0*	*Bangka Belitung*		*Kemenhub*
ProP : Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	**Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur mendukung Tol Laut (kumulatif)**						**8.935,4**			
Subsidi Tol Laut	*Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan teratur (trayek)*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*2.398,0*	*Tersebar*		*Kemenhub, BUMN, Swasta*
Subsidi Angkutan Laut Perintis	*Jumlah rute angkutan laut perintis (trayek)*	*113*	*113*	*113*	*113*	*113*	*6.498,9*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	*Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*38,5*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.63

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pegadaan sarana dan prasarana transportasi laut	**Tersedianya sarana dan prasana trasnportasi laut**						**4.500,0**			
Pengadaan peralatan bongkar muat	*jumlah pengadaan peralatan (unit)*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*2.500,0*	*Pusat*		*Kemenhub, BUMN, Swasta*
Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	*lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi)*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*2.000,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
ProP : Pengembangan teknologi informasi pelayaran	**Tersedianya teknologi informasi pelayaran (kumulatif)**						**1.332,0**			
Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	*terlaksanannya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)*	*20*	*22*	*24*	*19*	*20*	*1.332,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
KP : Konektivitas Udara	**Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (Rute)**						**36.652,2**			
	Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)									
	Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)									
	Jumlah bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)									
ProP : Jembatan udara							**7.762,5**			
Pembangunan Jembatan Udara di Papua							*0,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Elelim	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*397,5*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Wamena	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.367,2*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Tanah Merah	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.179,6*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Manggelum	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*31,1*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Korowai Batu	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*641,4*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Nop Goliath	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*525,8*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Korupun	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*50,0*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mozes Kolangin	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*748,5*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Oksibil	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*290,3*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Ilaga	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*470,5*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mulia	*Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*120,5*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	*Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM (rute)*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*1.940,1*	*Papua*	*Jembatan udara 37 rute di Papua*	*Kemenhub*
ProP : Pembangunan bandara baru	**Jumlah bandara baru yang dibangun**						**11.798,9**			
Pembangunan Bandara Buntu	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*131,1*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Nabire Baru	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*941,2*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Siboru	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*1.138,5*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Bukit Malintang	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*250,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*463,1*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Banggai Laut	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (lanjutan)*	*510,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Sobaham	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*380,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.000,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub (KPBU)*
Pembangunan Bandara Ngloram-Cepu	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*352,6*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Pahuwato	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*265,0*	*Gorontalo*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Weda	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*220,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*600,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub, Swasta*
Pembangunan Bandara Bali Baru	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.500,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*250,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Murung Raya-Kalteng	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*297,4*	*Kalimantan Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Wasior Baru	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (lanjutan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*600,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Manokwari Selatan	*Bandara baru yang dibangun (lokasi))*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*600,0*	*Papua*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.65

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Gorom	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*550,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Labuan Batu	*Bandara baru yang dibangun (lokasi))*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*700,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Sukabumi	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*400,0*	*Jawa Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Kolaka Utara	*Bandara baru yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*650,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
ProP : Pengembangan Bandara Hub Primer							**16.950,7**			
Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*6.500,0*	*Banten*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Kulon Progo	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*200,0*	*Yogyakarta*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*900,0*	*Bali*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Hasanuddin	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*250,0*	*Kota Makassar-Sulawesi Selatan*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Sentani	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*400,0*	*Papua*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Juanda	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*250,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Kualanamu	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*200,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Patimura	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*200,0*	*Maluku*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	*Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*180,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioitas (KSPN, KEK, dan KI)										
Pengembangan Bandara Lombok	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*350,0*	*Nusa Tenggara Barat*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Kalimarau	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28,4*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*47,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*288,2*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.200,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub (KPBU)*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.66

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Silangit	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*100,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub (KPBU)*
Pengembangan Bandara Sibisa	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*124,2*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*115,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*45,0*	*Kalimantan Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mutiara	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*245,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Babo	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*38,1*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Bintuni	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*45,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,8*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*300,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	*Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*120,0*	*Bangka Belitung*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana	**Jumlah bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)**									
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*60,0*	*Aceh*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Lasikin	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*85,0*	*Aceh*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Binaka	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*90,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasondre	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*55,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Rokot	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*465,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Enggano	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*75,0*	*Bengkulu*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.67

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Tambelan	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*62,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*85,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Letung	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*50,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Natuna	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*49,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Pangsuma	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*61,5*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Data Dawai	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*54,1*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Long Apung	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*48,4*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Yuwai Semaring	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*45,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Maratua	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*75,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Harun Thohir	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*65,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Naha	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*60,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*40,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Miangas	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*45,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Gebe	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*35,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.68

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rampi	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*80,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Seko	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*50,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tardamu	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*65,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara D.C. Saundale	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*64,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*72,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enarotali	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*		*86,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mindiptana	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*35,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri	*Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*68,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Muko Muko	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,8*	*Bengkulu*		*Kemenhub*
Peningkatan kapasitas bandara	**Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan**									
Pengembangan Bandara Tampa Padang	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77,6*	*Sulawesi Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*13,2*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1,5*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Namrole	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Dobo	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Saumlaki	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6,2*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Dumatubun-Langgur (Karel Sadsuitubun - Langgur)	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*50,0*	*Maluku*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.69

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara M. Salahuddin-Bima	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124,6*	*Nusa Tenggara Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mau-Alor	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41,2*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Soa-Bajawa	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*43,5*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6,4*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Bandanaira	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*99,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Oesman Sadik-Labuha	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*27,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Buli-Maba	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*90,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Sanana	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Rendani	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*250,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Kuffar	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Kepi	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Mopah	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*0*	*48,1*	*Papua*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Moa	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*64,9*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandar Udara Tiom	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Anggi	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*250,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Aceh*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100,0*	*Jambi*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*150,0*	*Kalimantan Utara*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga	*Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*500,0*	*Jawa Tengah*		*Kemenhub, BUMN*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	**Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)**						**140,0**			
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*30,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Bawah	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*0*	*30,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyang	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*0*	*25,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Senua	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*35,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Widi	*Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*20,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
KP : Konektivitas Darat	**Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)**						**8.498,2**			
ProP : Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	**Pelabuhan penyeberangan pada jalur logistik yang dibangun (lokasi)**						**3.671,3**			
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*85,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*		*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*85,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabaluan	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*85,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*85,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*85,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*85,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.71

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*85,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*85,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Sulawesi Tengah*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Papua*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Bangka Belitung*		*Kemenhub*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Sulawesi Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*60,0*	*Bangka Belitung*		*Kemenhub*
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*7 (berlanjut)*	*7 (selesai)*		-	-	*295,3*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Bangka Belitung*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	*jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*85,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pembangunan Dermaga 3 Pelabuhan Padangbai	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*255,0*	*Bali*		*Kemenhub, BUMN*
Pengembangan Dermaga di Danau Batur	*Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*45,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai	*Pelabuhan penyeberangan sungai dibangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*36,0*	*Papua*		*Kemenhub*
ProP : Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	**Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**351,9**			
Pembangunan Terminal Aruk	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	-	-	*1*	-	-	*76,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Nanga Badau	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*60,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Temajuk	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*50,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Jagoibabang	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*50,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Motaain	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*17,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Motamasin	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*50,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Wini	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*25,2*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan Terminal Skouw	*Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ ditingkatkan (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*23,8*	*Papua*		*Kemenhub*
ProP : Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	**kapal penyeberangan yang dibangun (unit)**					**0**	**780,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.73

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*30,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*30,0*	*Sulawesi Tenggara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*30,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*30,0*	*Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*30,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Kepulauan Riau*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Sumatera Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*30,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*30,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*30,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep.	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*30,0*	*Sumatera Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*30,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*30,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P. Tanah Jampea	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Sulawesi Selatan*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Maluku*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Kalimantan Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Sulawesi Selatan - Kalimantan Timur*		*Kemenhub*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Babang-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Maluku Utara*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Nusa Tenggara Timur*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahai-	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Papua Barat*		*Kemenhub*
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan	*kapal penyeberangan yang dibangun (unit)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*30,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
ProP : Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang							**3.695,0**			
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	*Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)*	*307*	*375*	*450*	*500*	*550*	*965,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	*Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)*	*234*	*300*	*315*	*325*	*335*	*2.650,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Pelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar - NTT	*Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*80,0*	*Jawa Timur*		*Kemenhub*
PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	**Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)**						**143.296,9**			
KP : Transportasi Perkotaan	**Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)**					**7**	**142.919,7**			
	Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (kota)									
	Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)									
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	**Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel dan jalur khusus BRT (kota)**					**6**	**118.760,5**			
Metropolitan Jakarta	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**									

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.75

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.670,0*	*DKI Jakarta*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*26.150,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*29.800,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*350,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*4.050,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
c. Perkeretaapian Jabodetabek	*Panjang jalur yang dibangun (km)*	*17 (berlanjut)*	*17 (selesai)*	*33 (berlanjut)*	*33 (berlanjut)*	*33 (selesai)*	*2.040,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
d. Elevated Loopline (Dukungan KPBU)	*Panjang jalur yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*8 (berlanjut)*	*8 (berlanjut)*	*8 (selesai)*	*4.140,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
d. Elevated Loopline (Dukungan APBD)	*Panjang jalur yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*8 (berlanjut)*	*8 (berlanjut)*	*8 (selesai)*	*23.460,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
e. KA Outer Jabodetabek	*Panjang jalur yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*10 (berlanjut)*	*10 (berlanjut)*	*10 (selesai)*	*500,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	*Jumlah Kawasan yang menerapkan Sistem ERP dan atau Pembatasan Sepeda Motor (kawasan)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	*120,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	*Jumlah Rute Angkutan Pemadu Moda yang ramah lingkungan yang Dibangun dan Dikembangkan (rute)*	*-*	*7*	*7*	*7*	*7*	*210,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Terminal Type A Jatijajar	*Jumlah Terminal Type A yang di bangun (terminal)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14,1*	*Jawa barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pengembangan Terminal Type A Pondok Cabe	*Jumlah Terminal Type A yang di kembangkan (terminal)*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*48,1*	*Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan di Jabodetabek	*Jumlah Sentra Logistik (Terminal Barang) Terintegrasi Angkutan Logistik Berbasis Jalan Rel dan Kanal yang dikembangkan di kawasan peri-peri Jabodetabek (terminal)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*75,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan APBN)	*Jumlah Kanal yang Dikembangkan Sebagai Alur Angkutan (paket)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*70,0*	*Jawa Barat, DKI*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan KPBU)	*Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.500,0*	*Jawa Barat, DKI*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Metropolitan Surabaya	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.78

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.710,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*336,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*670,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*500,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
c. Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	*Panjang jalur KA yang dibangun (km)*	*-*	*-*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai)*	*1.000,0*	*Jawa Timur*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Metropolitan Medan	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*3.000,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*670,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.330,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*125,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*500,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.80

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*500,0*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
c. Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	*Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)*	*20 (berlanjut)*	*20 (berlanjut)*	*20 (selesai)*	*-*	*-*	*244,3*	*Sumatera Utara*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Metropolitan Bandung	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**			**0**						
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*3.390,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*669,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.329,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*60,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*720,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*80,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	*Panjang jalur yang dibangun (km)*	*-*	*27 (berlanjut)*	*27 (berlanjut)*	*27 (berlanjut)*	*27 (selesai)*	*1.000,0*	*Jawa Barat*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
Metropolitan Semarang	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.500,0*	*Jawa Tengah*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.82

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.500,0*	*Jawa Tengah*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*310,0*	*Jawa Tengah*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*150,0*	*Jawa Tengah*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*510,0*	*Jawa Tengah*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Metropolitan Makassar	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**									
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.000,0*	*Sulawesi Selatan*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (KPBU)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*1.000,0*	*Sulawesi Selatan*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan (APBN)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*150,0*	*Sulawesi Selatan*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan (APBD)	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*510,0*	*Sulawesi Selatan*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub, Pemda, KPBU*
ProP : Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi							**8.470,0**			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	*Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)*	*-*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (selesai)*	*8.000,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	*Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)*	*-*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (berlanjut)*	*4 (selesai)*	*400,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*		*Kemenhub*
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	*Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)*	*-*	*2 (berlanjut)*	*2 (berlanjut)*	*2 (berlanjut)*	*2 (seelsai)*	*70,0*	*Jawa Barat, DKI, Banten*	*Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar*	*Kemenhub*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.84

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	**Jumlah sistem angkutan massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)**						**2.154,7**			
	Jumlah sistem angkutan massal berbasis jalan yang dibangun (perkotaan)									
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan berbasis rel di Ibu Kota Negara	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*454,7*	*Kalimantan Timur*		*Kemenhub*
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	*Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*6*	*500,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan	*Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*50,0*	*Sumatera Selatan*		*Kemenhub*
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan	*Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*	*50,0*	*Bali*		*Kemenhub*
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Berbasis Rel Kota Lainnya	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*500,0*	*Tersebar*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	*Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)*	*60*	*-*	*-*	*-*	*-*	*600,0*	*Jawa Tengah, Yogyakarta*		*Kemenhub*
ProP : Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan							**6.250,3**			
Pembangunan Fly Over Kemang dan Duplikasi Overpass	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*			*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*200,0*	*Banten*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Bitung	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*175,0*	*Banten*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Canguk	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*53,9*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Madiun (Yos Sudarso)	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*75,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*1 (selesai)*	*-*	*-*	*-*	*148,8*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Pinang Baris	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*-*	*151,6*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over/Underpass Mendukung Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta-	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	*-*	*-*	*-*	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*5.346,0*	*Jawa Barat, Jawa Tengah*	*KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)*	*KEMEN PU&PERA*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Pembangunan jalan perkotaan	**Panjang jalan yang terbangun**						**5.784,2**			
Jalan Lingkar Luar Selatan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*5*	*5*	*6*	*9*	*300,0*	*Sumatera Utara*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*30,0*	*30,0*	*18,5*	*17,5*	*2.530,2*	*Sulawesi Selatan*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan lingkar perkotaan Jawa	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7*	-	*15,6*	-	-	*350,1*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Pekalongan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3*	*5*	*6*	*4*	*180,0*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Jalan Lingkar Temanggung - Parakan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*5*	*4,4*	-	*98,8*	*Jawa Tengah*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Samarinda	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3,9*	*3,9*	*3,9*	*3,9*	*373,0*	*Kalimantan Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Jalan Lingkar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5*	*5*	*5*	*5*	*220,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Kopo	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*381,2*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	*379,0*	*Kepulauan Riau*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Gamping	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	*215,5*	*Yogyakarta*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	*Panjang Underpass terbangun (lokasi)*	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	*122,9*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Fly Over Aloha	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	*1 (berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100*	*180,0*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*4*	*5*	*2,1*	*94,4*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5*	*5*	*8,1*	-	*210,1*	*Jawa Timur*		*KEMEN PU&PERA*
Jalan Lingkar Kuningan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*4*	*5*	*5,2*	-		*149,1*	*Jawa Barat*		*KEMEN PU&PERA*
ProP : Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	**Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)**						**1.500,0**			
subsidi angkutan umum massal perkotaan	*Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*1.500,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	***Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)***	**13,3**	**16,3**	**21**	**25,4**	**30,00**	**41,0**			
ProP : Pengembangan TIK Perkotaan	***Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif)***	**13,3**	**16,3**	**21**	**25,4**	**30,00**	**41,0**			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kab./kota)(kumulatif)	**40**	**70**	**100**	**125**	**150**				
Penetrasi fixed broadband	*Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif)*	*13,3*	*16,3*	*21*	*25,4*	*30*	*26,0*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
Gerakan menuju Smart City	*Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif)*	*40*	*70*	*100*	*125*	*150*	*15,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	**Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**56,2**			
ProP : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	**Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**56,2**			
	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**				
	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan air minum dan air limbah yang terintegrasi (kab/kota/kawasan)	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**				
	Jumlah NSPK terkait layanan air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***				
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara	*Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (PDAM)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*12,0*	*15 PDAM*		*Pemerintah Daerah, PDAM*
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara	*Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)*	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*	*27,2*	*34 PDAM*		*Pemerintah Daerah, PDAM*
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	*Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*15,0*	*Kota Malang, Kota Palembang, dan DKI/ Kota Bogor*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	*Jumlah NSPK yang tersusun (unit)*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2,0*	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	*KEMEN PU&PERA*
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	**Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)**	**0**	**4**	**6**	**8**	**10**	**280,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.87

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	**Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)**	**0**	**4**	**6**	**8**	**10**	**280,0**			
Penyediaan Infrastruktur Permukiman dalam Rangka Peremajaan	*Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peremajaan (kawasan)*	*0*	*4*	*6*	*8*	*10*	*280,0*	*Kawasan Perkotaan*		*KEMEN PU&PERA*
PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN							**1.837.712,0**			
	Rasio elektrifikasi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**				
	Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	**1142**	**1203**	**1268**	**1336**	**1408**				
	Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	**4,71**	**4,92**	**5,36**	**5,91**	**6,07**				
KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan							**168.646,9**			
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,8**	**0,8**				
	Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)	**0,15**	**0,15**	**0,16**	**0,17**	**0,2**				
ProP : Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	**Kapasitas Terpasang EBT Tambahan (MW)**	**686,5**	**1001,1**	**1921,8**	**1778,2**	**3662,7**	**168.646,9**			
	Susut jaringan (%)	**9,2**	**9,01**	**8,93**	**8,78**	**8,6**				
Peningkatan standarisasi dan labelling	*Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi (Peralatan)*	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3,5*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	*Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pembangunan SPKLU	*Jumlah Penambahan SPKLU (Unit) (akumulasi)*	*168*	*390*	*693*	*1030*	*1558*	*7,5*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
Pengembangan smart grid	*Jumlah pengembangan smart grid (lokasi)*	*5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali*	*5 Sistem Distribusi tenaga Listrik di Jawa Bali*	*7,2*	*Sistem Jamali*		*Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.88

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan PLTP	*Jumlah kapasitas terpasang PLTP (MW)-kumulatif*	*140*	*80*	*132*	*300*	*375*	*42.270,0*	*Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Pembangunan PLTM, PLTA, PLTMH	*Kapasitas terpasang PLTM, PLTA, dan PLTMH (MW)-kumulatif*	*165,2*	*440,3*	*955,9*	*397*	*1951,4*	*74.996,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Pembangunan PLT Bioenergi	*Jumlah kapasitas terpasang dari PLT Bioenergi (MW) - kumulatif*	*246,7*	*152*	*484,8*	*159*	*252,6*	*24.655,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Pembangunan PLT Surya (PLTS)	*Jumlah kapasitas terpasang PLT Surya (MW) - kumulatif*	*134,6*	*328,8*	*339,1*	*643,2*	*643,7*	*17.933,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Pembangunan PLT Bayu (PLTB)	*Jumlah kapasitas terpasang PLT Bayu (MW) - kumulatif*	*-*	*-*	*10*	*279*	*440*	*5.798,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
PLTS Rooftop	*Pembangunan PLTS Rooftop (MW)*	*34,6*	*35,9*	*38,5*	*47,4*	*51,8*	*1.203,2*	*Kota Medan, Kota Palembang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Manado, Kota Makassar*		*Kemen ESDM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	*Jumlah instalasi PSEL (lokasi)*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*1.760,0*	*DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, Kota Manado, Kab. Bantul, Kab. Tuban, Kab. Banyumas*		*Pemda*
Penertiban pemakaian listrik ilegal	*Jumlah penertiban pemakaian listrik ilegal (regional)*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*4,5*	*Regional Sumatera, Jawa bagian barat, jawa bagian tengah, jawa bagian timur bali dan nusa tenggara, kalimantan, sulawesi, maluku dan papua*		*Kemen ESDM*
Peningkatan kualitas jaringan distribusi dan penambahan trafo distribusi sisipan baru	*Jumlah penambahan trafo distribusi sisipan baru (unit)*						*0,0*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	**SAIDI menjadi (jam/pelanggan)**	**15**	**10**	**5**	**3**	**1**	**288.384,4**			
	Penyediaan gas (SBM)	**176637**	**185530**	**194869**	**204680**	**214983**				
ProP : Perluasan Jaringan Gas Kota	**Pembangunan Jaringan Gas Kota (SR) (Kumulatif)**	**876515**	**1610445**	**2410445**	**3210445**	**4010445**	**38.494,3**			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui APBN	*Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (SR) (APBN)*	*266070*	*100000*	*0*	*0*	*0*	*4.096,0*	*Tersebar*	*Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah*	*Kemen ESDM*
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	*Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (SR) (KPBU)*	*0*	*50000*	*839555*	*800000*	*800000*	*27.385,1*	*Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Brat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara*	*Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah*	*KPBU*
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui BUMN (Konstruksi)	*Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (BUMN) (SR)*	*50000*	*583930*	*0*	*0*	*0*	*6.973,2*	*Tersebar*	*Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah*	*BUMN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	*Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (lokasi)*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*40,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
ProP : Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	**Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)**	**77107**	**79187**	**81217**	**83219**	**85216**	**249.890,2**			
	Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	**83**	**76**	**72**	**56**	**43**				
Peningkatan kehandalan sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB)	*Durasi pemadaman Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) (Penurunan Durasi Pemadaman (jam)*	*On going*	*On going*	*On going*	*On going*	*47,99*	*2.440,0*	*Sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Kalsel & Kaltim	*Durasi pemadaman Sistem Kalsel & Kaltim (Penurunan Durasi Pemadaman (jam)*	*On going*	*On going*	*On going*	*On going*	*14,29*	*815,0*	*Sistem Kalsel & Kaltim*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar	*Durasi pemadaman Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar (Penurunan Durasi Pemadaman (jam)*	*On going*	*On going*	*On going*	*On going*	*16,36*	*1.460,0*	*Sistem Sulsel, Sultra, Sulbar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Peningkatan kehandalan sistem Sistem Papua	*Durasi pemadaman Sistem Papua (Penurunan Durasi Pemadaman (jam)*	*On going*	*On going*	*On going*	*On going*	*26,41*	*384,0*	*Sistem Papua*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Jaringan Distribusi	*Jumlah Penambahan Jaringan Distribusi (kms)*	*46412*	*42714*	*50657*	*43065*	*43113*	*101.300,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan Jaringan Gardu Distribusi	*Jumlah Penambahan Gardu Distribusi (MVA)*	*3212*	*3022*	*3615*	*3206*	*3119*	*141.820,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	*Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi (rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,9*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Kemen ESDM*
Rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	*Jumlah rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*29,8*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Kemen ESDM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3	*Jumlah paket konversi mitan ke LPG (unit)*	*522616*	*250397*	*117289*	*50000*	*50000*	*509,3*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	*Jumlah Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga (layanan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*30,5*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Penambahan Penyalur BBM Satu Harga	*Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)*	*83*	*76*	*72*	*56*	*43*	*0,0*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T	*Jumlah PLTS Terpusat (Unit)*	*0*	*0*	*5*	*5*	*5*	*1.050,0*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	*Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik (rekomendasi)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*17,3*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	*Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran(Regulasi/ Kebijakan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,5*	*Pusat*		*KESDM*
Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi	*Jumlah Pengembangan Kebijakan Subsidi Energi (Regulasi/ Kebijakan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*12,9*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	**Produksi tenaga listrik (TWh)**	**339082,7**	**359946,1**	**382696,1**	**406325,0**	**431281,2**	**1.380.680,7**			
	Cadangan operasional BBM (hari)	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**				
ProP : Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	**Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit (GW)**	**5453**	**6446**	**3443**	**6209**	**5728**	**707.270,0**			
	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**				
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU	*Jumlah Penambahan PLTU (MW)*	*1194,5*	*855,5*	*576*	*471*	*65*	*63.240,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU USC	*Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)*	*1950*	*2950*	*-*	*1000*	*2000*	*197.500,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan kapasitas pembangkit PLTU MT	*Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)*	*0*	*840*	*600*	*900*		*46.800,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Penambahan kapasitas pembangkit PLTG/GU/MG	*Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)*	*2384*	*370*	*990*	*880*	*70*	*93.880,0*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Jaringan Transmisi	*Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi (kms)*	*4459,6*	*4765,9*	*4632,1*	*3519,5*	*1692*	*132.855,5*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Pengembangan Gardu Induk	*Jumlah penambahan gardu induk (MVA)*	*14247*	*8460*	*7510*	*3900*	*4490*	*172.752,8*	*Tersebar*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Badan Usaha*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	*Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*24,7*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Kemen ESDM*
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	*Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk (Rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*24,3*	*Pusat*	*Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA*	*Kemen ESDM*
Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	*Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/ Rekomendasi)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*6,7*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Peningkatan kebijakan harga	*Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif (rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*10,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pemetaan potensi PLTBayu	*Jumlah potensi terukur PLTBayu (MW)*	*-*	*200*	*200*	*200*	*200*	*32,0*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pemetaan potensi PLTA/Mini/Mikro	*Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro (MW)*	*-*	*120*	*120*	*120*	*120*	*28,8*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Pemetaan potensi PLTBio	*Jumlah potensi terukur PLTBio (MW)*	*-*	*60*	*60*	*60*	*60*	*14,4*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	*Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)*	*-*	*Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Nusa Lembongan*	*Pra FS di Nusa Lembongan*	*FS di Nusa Lembongan*	*Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Sumatera Barat dan Jawa Barat*	*8,0*	*Bali dan NTT*		*Kemen ESDM*
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	*Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider (dokumen)*		*Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Alas*	*Studi Site Selection dan Akuisisi data di perairan Selat Sape*	*Pra FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar*	*FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar*	*7,0*	*Selat Sunda dan NTT*		*Kemen ESDM*
Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	*Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan (wilayah)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,6*	*Kab. Bangli, Kab. Maluku Tengah*		*Kemen ESDM*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	*Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan (Wilayah)*	*5*	*5*	*5*	*4*	*3*	*4,3*	*Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Tegal, Kab. Manggarai Barat, Kab. Buru*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi	*Jumlah Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*55,6*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi	*Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Wilayah)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*1,9*	*Pusat*		*Kemen ESDM*
Rekomendasi Wilayah Kerja Geologi Migas	*Jumlah Rekomendasi Keprospekan Wilayah Kerja Geologi Migas (Rekomendasi)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*21,5*	*Tersebar*		*Kemen ESDM*
ProP : Pembangunan Kilang Minyak Bumi	**Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu BOPD)**	***1151***	***1151***	***1176***	***1276***	***1276***	**637.000,0**			
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi RDMP	*Jumlah RDMP (Balikpapan, Cilacap , Balongan dan dumai) (Unit)*	*On going*	*On going*	*1 (Stage-I Balongan 25 Ribu BCPD)*	*1 (Stage-II Balikpapan 100 Ribu BCPD)*	*on going*	*203.000,0*	*Balikpapan, Cilacap , Balongan, Dumai*	*Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak*	*Badan Usaha*
Peningkatan infrastruktur kilang minyak GRR Tuban	*Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR) Tuban (Unit)*	*Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development*	*Financing dan EPC*	*Financing dan EPC*	*EPC (Engineering, Procurement, and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement, and Construction)*	*224.000,0*	*Tuban*	*Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak*	*Badan Usaha*
Peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi GRR Bontang	*Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)*	*Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development*	*AMDAL, BED-FEED*	*EPC (Engineering, Procurement, and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement, and Construction)*	*EPC (Engineering, Procurement, and Construction*	*210.000,0*	*Bontang*	*Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak*	*Badan Usaha*
ProP : Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	**Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan (kms)**					**2219**	**36.410,7**			
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	*Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)*					*208,8*	*36.400,0*	*Bontang-Banjarmasin*	*Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)*	*Badan Usaha*
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	*Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)*					*76,8*	*0,0*	*Banjarmasin-Palangkaarya*	*Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)*	*Badan Usaha*
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	*Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)*					*407,2*	*0,0*	*Palangkaraya-Pontianak*	*Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)*	*Badan Usaha*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	*Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi(km)*	*15300*	*15800*	*16300*	*16800*	*17300*	*10,7*	*Tersebar*	*Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)*	*Kemen ESDM*
PP : TRANSFORMASI DIGITAL	**Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**444.613,3**			
	Persentase pengguna internet (Persentase)	**72,6**	**74,2**	**79,2**	**80,7**	**82,3**				
	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	**97,5**	**98**	**98,5**	**99**	**100**				
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	**70**	**72**	**73**	**74**	**75,7**				
KP : Penuntasan Infrastruktur TIK	**Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband**	**98**	**98,5**	**99**	**99,5**	**100**	**443.829,2**			
	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	**36,4**	**37,2**	**42,9**	**50**	**60**				
	Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**				
	Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	**0,45**	**0,4**	**0,35**	**0,3**	**0,25**				
	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	**53**	**60**	**70**	**75**	**80**				
	Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	**90**	**91**	**93**	**94**	**95**				
ProP : Pengembangan infrastruktur pitalebar	**Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)**	**36,42**	**37,15**	**42,85**	**50**	**60**	**441.850,0**			
	Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	**91,95**	**92,5**	**93**	**94**	**95**				
Penggelaran jaringan tetap pitalebar	*Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (persen)(kumulatif)*	*36,42*	*37,15*	*42,85*	*50*	*60*	*55,3*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Kemenkominfo*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.95

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penggelaran jaringan tetap pitalebar	*Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (persen)(kumulatif)*	*36,42*	*37,15*	*42,85*	*50*	*60*	*428.000,0*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Badan usaha*
BAKTI Palapa Ring	*Persentase pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95% (persen)*	*Barat : 35% Tengah : 10% Timur : 5%*	*Barat : 40% Tengah : 15% Timur : 10%*	*Barat : 45% Tengah : 20% Timur : 15%*	*Barat : 50% Tengah : 30% Timur : 20%*	*Barat : 60% Tengah : 40% Timur : 25%*	*2.545,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
Fasilitasi Ducting bersama	*Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan ducting bersama (kab/kota)*	*2*	*3*	*5*	*7*	*8*	*9,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
BAKTI Sinyal/Last mile	*Desa non komersial yang mendapatkan jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif) (desa)*	*5052*	*5052*	*5052*	*5052*	*5052*	*2.615,0*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Kemenkominfo*
BAKTI Satria Satelit Republik Indonesia	*Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi SATRIA (Gbps)*	*Konstruksi*	*Konstruksi*	*Konstruksi*	*150*	*150*	*2.802,0*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Kemenkominfo*
Bakti Akses Internet	*Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (Lokasi)(kumulatif)*	*12000*	*27000*	*42000*	*61000*	*91000*	*5.231,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
	Penyediaan perangkat komputer/laptop di sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan lain-lain (unit)						*0,0*	*Tersebar*		*Kemenkes, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenhan, Polri, Pemda*
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	*Penambahan spektrum Frekuensi Radio untuk broadband (MHz)(Kumulatif)*	*30 MHz (2.3%)*	*50 MHz (3.8%)*	*1050 MHz (80%)*	*1120 MHz (85.5%)*	*1310 MHz (100%)*	*136,5*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	*Jumlah penyediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio (unit) - SMFR transportable: 75 site - Stasiun bergerak: 6 unit - Perangkat portable: 47 unit*	*25*	*27*	*27*	*26*	*23*	*336,2*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.96

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan bidang telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital	*Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turannya (kebijakan):* *1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002)* *2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun 1999)* *3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009)* *4. RUU OMNIBUSLAW* *5. Aturan Turunan*	*1.Pengesahan RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002)* *2. Naskah akademik RUU OMNIBUSLAW (Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran)* *3. Naskah akademik RUU Telekomunikasi* *4. Naskah akademik RUU Pos*	*1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi* *2. Naskah dan DIM RUU Pos* *3. Naskah aturan turunan UU Penyiaran*	*1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi* *2. Naskah dan DIM RUU Pos* *3. Pengesahan aturan turunan UU Penyiaran*	*1. Pengesahan RUU Telekomunikasi* *2. Pengesahan RUU Pos*	*1. Naskah aturan turunan UU Telekomunikasi* *2. Naskah aturan turunan UU Pos*	*120,0*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
ProP : Pengembangan infrastruktur penyiaran	**Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital**	**53**	**60**	**70**	**75**	**80**	**1.603,2**			
Sistem infrastruktur penyiaran digital	*Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV digital (lokasi)*	*44 lokasi satuan transmisi*	*50 lokasi satuan transmisi*	*60 lokasi satuan transmisi*	*74 lokasi satuan transmisi*	*55 lokasi satuan transmisi*	*487,8*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Kemenkominfo*
Implementasi sistem penyiaran digital	*Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital (persen)*	*53*	*60*	*70*	*75*	*80*	*105,9*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
Masterplan penyiaran radio digital	*Tersedianya masterplan penyiaran radio digital (RPM)*	*1 Masterplan pita frekuensi radio Medium Frequency (MF) dan 1 masterplan pita frekuensi radio Very High Frequency (VHF) Band 2*	*1 masterplan pita frekuensi radio VHF Band 3*	*Implementasi digital sound broadcasting di pita frekuensi radio MF dan VHF Band 2*	*Implementasi digital broadcasting di pita frekuensi radio VHF Band 3*	*1 masterplan pita frekuensi radio HF*	*25,8*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.97

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	*Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital (layanan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*25,7*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
Sarana dan prasarana infrstruktur penyiaran TV publik	*Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV publik (unit)*	*70*	*80*	*90*	*100*	*100*	*858,0*	*Tersebar*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*LPP TVRI*
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran Radio	*Jumlah pengembangan infrastruktur stasiun radio publik (stasiun)*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,0*	*Tersebar*		*LPP RRI*
ProP : Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	**Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)**	**K/L:30% Pemprov/kab /kot:30%**	**K/L:50% Pemprov/kab /kot:50%**	**K/L:80% Pemprov/kab /kot:80%**	**K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%**	**K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%**	**376,0**			
Penyelenggaraan pusat data nasional	*Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network) (persen)*	*K/L:30% Pemprov/kab/ kot:30%*	*K/L:50% Pemprov/kab/ kot:50%*	*K/L:80% Pemprov/kab/ kot:80%*	*K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100%*	*K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100%*	*376,0*	*Pusat*	*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*	*Kemenkominfo*
KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	**Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**289,6**			
	Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	**40**	**60**	**80**	**90**	**100**				
ProP : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	**Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi**	**40**	**60**	**80**	**90**	**100**	**78,0**			
	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**				
Penyelenggaraan layanan e-government (SPBE) Nasional	*Persentase layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE (persen)*	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*58,0*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	*Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (aplikasi) (kumulatif)*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*20,0*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
ProP : Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	**Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**211,6**			
	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**	**4,5-5,7**				
Fasilitasi startup menjadi unicorn	*Jumlah penambahan unicorn baru (unicorn) (kumulatif)*	*0*	*0*	*1*	*2*	*3*	*6,1*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
Digital technopreuner	*Jumlah startup aktif yang terbentuk (start-up)*	*30*	*60*	*90*	*120*	*150*	*140,5*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.5.98

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan teknologi digital pada kawasan prioritas(kumulatif)	*Persentase fasilitasi adopsi teknologi digital di Kawasan Prioritas (persen):* *a. 12 KEK* *b. 13 SKPT* *c. 10 kawasan pariwisata* *d. 30 kawasan IKM*	*Kajian pemetaan teknologi dan penyedia platform teknologi digital*	*50*	*100*	*100*	*100*	*65,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
Fasilitasi scaling up UMKM	*Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah (dari total 4.4 juta UMKM bidang pengolahan) (UMKM)*	*Kajian pemetaan UMKM dan kebutuhan teknologi digital*	*11000*	*22000*	*33000*	*44000*	*0,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	**Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital**	**50000**	**50000**	**50000**	**50000**	**50000**	**494,5**			
ProP : Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi							**354,9**			
Pengendalian konten negatif	*Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun(konten)*	*120000*	*150000*	*175000*	*210000*	*250000*	*354,9*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
ProP : Pengembangan literasi dan keahlian TIK							**34,6**			
Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat	*Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat (peserta) (termasuk peserta online)*	*10000000*	*20000000*	*30000000*	*40000000*	*50000000*	*34,6*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
Pelatihan SDM bidang TIK	*Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (peserta)*	*50000*	*50000*	*50000*	*50000*	*50000*	*0,0*	*Tersebar*		*Kemenkominfo*
ProP : Pengembangan dan fasilitasi industri TIK							**105,0**			
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK	*Tahap penyelesaian laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional (tahapan)*	*Perencanaan*	*Penyiapan konstruksi*	*Transaksi dan penanda tanganan*	*Konstruksi*	*Balai Uji Rujukan Nasional*	*105,0*	*Pusat*		*Kemenkominfo*
JUMLAH							**4.882.575,0**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Udara (IKU)**	**84,10**	**84,20**	**84,30**	**84,40**	**84,50**	**32.352,9**			
	Indeks Kualitas Air (IKA)	**55,10**	**55,20**	**55,30**	**55,40**	**55,50**				
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	**58,50**	**59,00**	**59,50**	**60,00**	**60,50**				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	**61,60**	**62,50**	**63,50**	**64,50**	**65,50**				
KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)**	**1.139**	**1.141**	**1.141**	**1.141**	**1.141**	**14.513,0**			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	**1.668**	**2.625**	**3.000**	**3.375**	**3.750**				
	Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**				
	Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap baseline rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				
	Luas kawasan konservasi (juta ha)	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**				
	Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	**23,40**	**24,20**	**25,10**	**26,00**	**26,90**				
	Akurasi informasi meteorologi (persen)	**75,7**	**76,7**	**77,7**	**78,7**	**79,7**				
	Akurasi informasi klimatologi (persen)	**75,0**	**76,0**	**77,0**	**78,0**	**79,0**				
ProP : Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	**Jumlah stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)**	**111**	**188**	**197**	**153**	**130**	**1.807,2**			
	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)	**15**	**30**	**31**	**31**	**32**				
	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsi)	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	*Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS (unit)*	*10*	*25*	*26*	*26*	*27*	*249,1*	*Tersebar*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN LHK*
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	*Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)*	*71*	*148*	*157*	*113*	*90*	*889,6*	*15 DAS prioritas pemulihan*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN LHK*
Pemantauan Kualitas Air Laut	*Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya (provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*90,0*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	*Jumlah Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun (unit)*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*74,0*	*Provinsi Banten*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN LHK*
Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup	*Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan (sertifikat)*	*-*	*6*	*6*	*6*	*6*	*12,0*	*6 wilayah pulau*		*KEMEN LHK*
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas udara otomatis)	*Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS (unit)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*47,4*	*Tersebar*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*DAK LH*
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat pemantauan kualitas air otomatis)	*Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu (unit)*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*307,8*	*15 DAS prioritas pemulihan*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*DAK LH*
Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri)	*Jumlah kab/kota yang memperoleh penambahan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri (kab/kota)*	*37*	*37*	*37*	*37*	*37*	*137,3*	*Seluruh Indonesia*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*DAK LH*
ProP : Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	**Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi (unit usaha/kegiatan)**	**1.668**	**2.625**	**3.000**	**3.375**	**3.750**	**153,9**			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (unit usaha/kegiatan)	**1.668**	**2.625**	**3.000**	**3.375**	**3.750**				
	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**				
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (unit usaha/kegiatan)	**80**	**85**	**90**	**110**	**113**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (unit usaha/kegiatan)	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**				
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	*Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi (unit usaha/kegiatan)*	*1.668*	*2.625*	*3.000*	*3.375*	*3.750*	*20,5*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah (unit usaha/kegiatan)*	*1.668*	*2.625*	*3.000*	*3.375*	*3.750*	*75,8*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	*Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)*	*20*	*25*	*30*	*40*	*50*	*10,2*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (unit usaha/kegiatan)*	*80*	*85*	*90*	*110*	*113*	*11,4*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (unit usaha/kegiatan)*	*300*	*350*	*400*	*450*	*500*	*6,5*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	*Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)*	*-*	*33*	*40*	*60*	*60*	*29,5*	*Seluruh provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	**Persentase Informasi Meteorologi yang Berkualitas (persen)**	**80**	**81**	**82**	**82**	**83**	**2.606,4**			
	Persentase Informasi Klimatologi yang berkualitas (persen)	**76**	**77**	**79**	**80**	**82**				
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	*Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scalling up wheather capacity II (stasiun)*	*-*	*1*	*10*	*34*	*-*	*346,2*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	*Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*1.792,3*	*100 pelabuhan*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi peringatan dini windshear	*Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear (bandara)*	*4*	*3*	*2*	*2*	*3*	*278,5*	*14 bandara*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi Iklim Terapan di pusat	*Jumlah Informasi Iklim Terapan di pusat (informasi)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*189,5*	*pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	**Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.357,3**			
	Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/ neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG (KHG)	**100**	**125**	**150**	**200**	**300**				
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	*Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla (desa)*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*865,5*	*24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan*		*KEMEN LHK*
	Jumlah Provinsi Rawan Karhutla yang ditingkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penanganan karhutla (provinsi)	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*0,0*	*24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan*		*KEMEN LHK*
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Dalkarhutla di Provinsi Rawan Karhutla (orang)	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0,0*	*24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan*		*KEMEN LHK*
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	*Jumlah pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara (sorty)*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*	*179,0*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	*Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut (desa)*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*18,4*	*Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.*		*KEMEN LHK*
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	*Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (desa)*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*	*14,7*	*Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat*		*KEMEN LHK*
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	*Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (ha)*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*84,7*	*15 Provinsi*		*Kementan*
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	*Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya (wilayah sungai)*	*0*	*3*	*3*	*3*	*3*	*180,0*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	*Jumlah Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot (sistem)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15,0*	*pusat*		*LAPAN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	**Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)**	**518**	**730**	**840**	**960**	**1.080**	**682,4**			
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (produk)	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**				
Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	*Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (unit)*	*518*	*730*	*840*	*960*	*1.080*	*140,0*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	*Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) (dokumen)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*11,4*	*pusat*		*KEMEN LHK*
Dokumen Penerapan Standar	*Jumlah Dokumen Penerapan Standar (dokumen)*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*9,9*	*pusat*		*KEMEN LHK*
Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen)*	*5*	*10*	*15*	*20*	*25*	*7,6*	*pusat*		*KEMEN LHK*
Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)	*Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (dokumen)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1,0*	*pusat*		*KEMEN LHK*
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	*Persentase penurunan tingkat konsumsi bahan perusak ozon dari baseline (persen)*	*23,56*	*23,56*	*23,58*	*25,24*	*25,25*	*51,3*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Peningkatan Kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS	*Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya (lembaga/forum)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*340,0*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	*Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimanfaatkan (produk)*	*33*	*65*	*65*	*65*	*65*	*121,1*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
ProP : Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	**Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**5.086,9**			
	Luas kawasan konservasi (juta ha)	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**				
	Jumlah Kawasan Konservasi Laut yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	**10**	**14,5**	**17,5**	**19**	**20**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	**6**	**10**	**14**	**18**	**20**				
	Jumlah unit konservasi insitu yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem (unit)	**17**	**28**	**39**	**50**	**61**				
	Jumlah Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan (unit)	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**				
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*61,0*	*34 Provinsi*		*KEMEN LHK*
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif (provinsi)*	*7*	*10*	*8*	*6*	*3*	*88,4*	*34 Provinsi*		*KEMEN LHK*
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	*Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)*	*552*	*552*	*552*	*552*	*552*	*122,1*			*KEMEN LHK*
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	*Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)*	*500*	*1500*	*2500*	*3500*	*4.500*	*2.651,3*			*KEMEN LHK*
Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	*Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (unit KEE)*	*11*	*22*	*33*	*44*	*55*	*54,9*			*KEMEN LHK*
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	*Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*950,0*			*KEMEN LHK*
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	*Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)*	*1*	*1,6*	*1*	*0*	*0*	*260,0*			*KEMEN LHK*
Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	*Luasan kawasan konservasi baru (ha)*	*700.000*	*800.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*39,9*	*9 Provinsi*		*KKP*
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	*Luas Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif ha)*	*10.000.000*	*14.500.000*	*17.500.000*	*19.000.000*	*20.000.000*	*307,7*	*46 Lokasi*		*KKP*
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	*Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerjasama)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*60,0*	*Pusat*		*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (kelompok)	*20*	*5*	*5*	*5*	*5*	*0,0*			*KKP*
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	*Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)*	*6*	*10*	*14*	*18*	*20*	*30,8*	*Pusat*		*KKP*
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	*Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)*	*35*	*40*	*45*	*50*	*55*	*18,8*	*Daerah*		*KKP*
Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	*Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*5,8*	*Tersebar*		*KEMEN ESDM*
Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan	*Jumlah Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan (unit)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*86,2*	*Pusat*		*LIPI*
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	*Jumlah kawasan konservasi yang dibangun sarana dan prasarana (unit)*	*30*	*40*	*45*	*50*	*55*	*350,0*	*34 provinsi*		*Pemda/DAK*
ProP : Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	**Tersedianya data & informasi Sumber Daya Alam (SDA), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan Neraca SDA (NSDA)**	**14**	**24**	**24**	**28**	**28**	**2.818,9**			
	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**				
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	*Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*1.731,3*	*Pusat dan Daerah*		*KEMEN LHK*
Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	*Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (simpul data)*	*4*	*4*	*4*	*5*	*5*	*5,0*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	*Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (sistem)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15,0*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Pusat Informasi Geopark	*Jumlah pusat informasi geopark/geologi (unit)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*49,2*	*Tersebar*		*KEMEN ESDM*
Rekomendasi Penetapan Geoheritage	*Jumlah rekomendasi penetapan geoheritage (rekomendasi)*	*-*	*4*	*4*	*4*	*4*	*10,2*	*Tersebar*		*KEMEN ESDM*

A.6.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	*Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terdokumentasi (aksesi)*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*4,3*			*Kementan*
Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi	*Sumberdaya Genetik yang Terkarakterisasi (aksesi)*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*3,7*			*Kementan*
Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA	*Sistem penginderaan jauh yang terbangun (sistem)*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*35,0*			*LAPAN*
Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	*Jumlah Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual(unit)*	*1*	*1*	*1*			*496,5*	*Kab. Bogor (Cibinong STP)*		*LIPI*
Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	*Jumlah Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi (unit)*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*259,0*	*Kab. Bogor (Cibinong STP)*		*LIPI*
Hasil Pengungkapan dan Pemanfataan Biodiversitas Nusantara	*Jumlah Hasil Pengungkapan dan Pemanfataan Biodiversitas Nusantara (hasil riset)*	*21*	*4*	*5*	*5*	*7*	*107,5*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
Penguatan Riset Samudra Nasional	*Jumlah hasil riset (hasil riset)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*102,2*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
KP : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)**	**64,80**	**67,10**	**68,51**	**69,20**	**69,80**	**8.516,9**			
	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen)	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**				
	Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	**89,44**	**98,68**	**107,99**	**117,22**	**126,49**				
	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen)	**0,025**	**0,032**	**0,039**	**0,046**	**0,053**				
ProP : Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	**Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya (lokasi)**	**42**	**52**	**62**	**72**	**82**	**761,7**			
	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun (unit)	**53**	**60**	**70**	**70**	**70**				
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	*Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum (unit)*	*4*	*10*	*20*	*20*	*20*	*124,6*	*Sungai Citarum*		*KEMEN LHK*
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	*Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air (unit)*	*49*	*50*	*50*	*50*	*50*	*265,5*	*14 DAS Prioritas*		*KEMEN LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	*Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up (lokasi)*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	*25,2*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	*Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5,5*	*Batam, Bintan*		*KEMEN LHK*
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	*Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)*	*8*	*6*	*6*	*5*	*5*	*35,8*	*27 Lokasi*		*KKP*
Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	*Jumlah data status sumber daya pesisir yang disediakan (jumlah data)*	*5*	*5*		*0*	*0*	*263,1*	*Provinsi DKI Jakarta*		*LIPI*
Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)	*Jumlah teknologi yang dihasilkan (produk/temuan)*		*1*	*1*	*1*	*1*	*42,0*	*Provinsi Jawa Barat*		*LIPI*
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	**Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton)**	**14,00**	**16,40**	**17,99**	**18,90**	**19,70**	**3.042,9**			
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	**50,80**	**50,70**	**50,52**	**50,30**	**50,10**				
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)*	*5,65*	*6,23*	*6,81*	*7,14*	*7,48*	*100,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)*	*8,35*	*10,17*	*11,18*	*11,76*	*12,22*	*162,7*	*34 provinsi*		*Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)*	*19,26*	*19,19*	*19,12*	*19,05*	*18,97*	*673,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Penanganan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)*	*31,54*	*31,51*	*31,40*	*31,25*	*31,13*	*1.105,4*	*34 provinsi*		*Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	*Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun(unit)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1.000,0*	*Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)*		*KEMEN LHK*
ProP : Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	**Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline50 ton penggunaan merkuri (persen)**	**10% (5 ton)**	**10% (5 ton)**	**20% (10 ton)**	**20% (10 ton)**	**20% (10 ton)**	**70,1**			
	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin (unit)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**				
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	*Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin (unit)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*70,1*	*24 provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	**Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun (unit)**	**2**	**-**	**2**	**-**	**-**	**4.642,2**			
	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit)	**5**	**6**	**7**	**7**	**7**				
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	*Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit)*	*5*	*6*	*7*	*7*	*7*	*549,2*	*32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*KEMEN LHK*
Pengelolaan limbah medis	*Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medise sesuai standar*	*2.600*	*3.000*	*4.850*	*6.250*	*8.800*	*88,9*	*34 Provinsi*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*Kemenkes*
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	*Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1 unit)*	*pembangunan fisik*	*pembangunan fisik*	*operasi*	*operasi*	*operasi*	*1.000,0*	*Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun) / Sulawesi Selatan / Jambi*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*KPBU*
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua	*Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)*	*Studi/Kajian (OBC dan FBC)*	*pembangunan fisik*	*pembangunan fisik*	*operasi*	*operasi*	*1.001,0*	*Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab. Pangkajene Kepulauan/Kab. Bantaeng/Kab. Gowa)*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*KPBU*
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	*Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1 unit)*	*Studi/Kajian (OBC dan FBC)*	*pembangunan fisik*	*pembangunan fisik*	*operasi*	*operasi*	*1.001,0*	*Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai Kartanegara)*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*KPBU*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur	*Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1 unit)*	*Studi/ Kajian (SP)*	*Studi/ Kajian (OBC dan FBC)*	*pembangunan fisik*	*pembangunan fisik*	*operasi*	*1.002,0*	*Jawa Timur (Kab. Lamongan)*	*Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*	*SWASTA*
KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)**	**301.800**	**318.200**	**325.000**	**325.000**	**330.000**	**5.694,9**			
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)	**260.000**	**220.000**	**270.000**	**220.000**	**230.000**				
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	**20**	**21**	**22**	**24**	**26**				
	Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**				
ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	**Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.993,7**			
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	**1.800,0**	**18.200,0**	**25.000,0**	**25.000,0**	**30.000,0**				
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	*Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*1.858,7*	*7 provinsi*		*KEMEN LHK*
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	*Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)*	*1.800*	*18.200*	*25.000*	*25.000*	*30.000*	*1.135,1*	*12 provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	**Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional (ha)**	**7.077,5**	**7.105,0**	**7.140,0**	**7.165,0**	**7.190,0**	**1.029,3**			
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan (ton)	**250.000**	**200.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**				
	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan (ton)	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**30.000**				
Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	*Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya (ha)*	*77,5*	*80,0*	*90,0*	*90,0*	*90,0*	*381,1*	*4 provinsi*		*KEMEN LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lahan reklamasi pertambangan	*Luas lahan reklamasi pertambangan (ha)*	*7.000*	*7.025*	*7.050*	*7.075*	*7.100*	*50,0*	*17 provinsi*		*KEMEN ESDM*
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	*Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 non-institusi yang terpulihkan (ton)*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*30.000*	*560,0*			*KEMEN LHK*
Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi	*Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan (ton)*	*250.000*	*200.000*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*33,2*			*KEMEN LHK*
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	*Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan (teknologi)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5,0*	*1 Provinsi*		*Kementan*
ProP : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	**Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (lokasi)**	**20**	**21**	**22**	**24**	**26**	**37,9**			
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	*Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)*	*16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*0,0*	*60 Lokasi*		*KKP*
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	*Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*37,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	**Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya (juta ha)**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**950,0**			
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	*Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*950,0*			*KEMEN LHK*
ProP : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	**Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**684,0**			
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	*Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*493,2*	*Pusat dan Daerah*		*KEMEN LHK*
Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati	*Jumlah entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*6,8*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	*Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (unit)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*100,0*	*Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura*		*KEMEN LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.13

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary	*Jumlah Unit Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (unit)*		*2*	*2*	*2*	*2*	*84,0*			*LIPI*
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)**	**50**	**60**	**65**	**68**	**70**	**3.628,1**			
	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	**219**	**387**	**427**	**472**	**540**				
	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	**1.700.000**	**1.900.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.100.000**				
	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	**5**	**7**	**7**	**8**	**7**				
ProP : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	**Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung (kajian)**	**30**	**30**	**30**	**35**	**35**	**28,1**			
Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (provinsi)*	*5*	*7*	*7*	*8*	*7*	*23,1*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya tampung	*Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung (KLHS)*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*5,0*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (perusahaan)**	**1.000**	**1.500**	**1.700**	**1.950**	**2.100**	**2.374,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin Lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka Mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (provinsi/kab/ kota)	**20**	**50**	**100**	**100**	**100**				
	Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi peredaran hasil hutan illegal (operasi)	**210**	**380**	**440**	**540**	**580**				
Operasi pengamanan kawasan hutan	*Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan*	*100*	*130*	*140*	*160*	*180*	*548,4*	*33 provinsi*		*KEMEN LHK*
Operasi peredaran hasil hutan illegal	*Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan & satwa liar (operasi)*	*110*	*250*	*300*	*380*	*400*	*1.028,6*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	*Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (perusahaan)*	*1.000*	*1.500*	*1.700*	*1.950*	*2.100*	*489,2*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	*Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)*	*200*	*550*	*700*	*800*	*900*	*178,5*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)	*Pengembangan dan penerpaan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov) (laporan)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*46,7*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	*Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK (jenis)*	*0*	*1.050*	*1.150*	*1.250*	*1.350*	*50,0*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	*Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)*	*1.010*	*1.050*	*1.100*	*1.150*	*1.200*	*32,8*	*Pusat dan Daerah*		*KKP*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)**	**173**	**285**	**315**	**350**	**400**	**1.226,0**			
	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (kasus)	**46**	**102**	**112**	**122**	**140**				
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	*Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (kasus)*	*173*	*285*	*315*	*350*	*400*	*583,6*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	*Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (kasus)*	*46*	*102*	*112*	*122*	*140*	*330,6*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	*jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)*	*210*	*500*	*600*	*750*	*1.000*	*311,7*	*Pusat*		*KEMEN LHK*
PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	**Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**63.375,1**			
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	**0,34**	**0,59**	**0,81**	**1,00**	**1,15**				
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	**5,0**	**4,5**	**4,0**	**3,5**	**3,0**				
KP : Penanggulangan Bencana	**Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)**	**0,36**	**0,47**	**0,77**	**1,06**	**1,36**	**19.925,9**			
	Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis (persen)	**90,00**	**92,00**	**94,00**	**96,00**	**100,00**				
ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	**Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat (layanan)**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**278,0**			
	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan (kegiatan)	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**				
	Jumlah Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (kegiatan)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	*Jumlah peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri (peta)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,1*	*Pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	*Jumlah peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri (peta)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,1*	*Pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Penguatan Data Pemetaan Bencana Geologi	*Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema (peta)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*19,5*	*Pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	*Jumlah kabupaten/wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi (wilayah)*	*11*	*29*	*29*	*29*	*29*	*15,3*	*Pusat dan daerah*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	*Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi (lokasi)*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*58,0*	*34 Provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Penilaian Ketangguhan Desa/ Kelurahan	*Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (lokasi)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2,4*	*34 Provinsi*		*BNPB*
Budaya Sadar bencana	*Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana (lokasi)*	*81*	*81*	*81*	*81*	*81*	*12,2*	*34 Provinsi*		*BNPB*
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan Teknis Pengembangan Strategi PB	*Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan (kegiatan)*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*37,9*	*Pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Simulasi PB di Daerah	*Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah (kab/kota)*	*19*	*19*	*19*	*19*	*19*	*54,9*	*34 Provinsi*		*BNPB*
Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	*Jumlah Masyarakat Dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal (orang)*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*	*8,3*	*34 Provinsi*		*KEMENDES, PDT & TRANS*
Pengurangan risiko krisis kesehatan	*Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan (daerah)*	*117*	*123*	*124*	*124*	*124*	*65,2*	*6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten*		*Kemenkes*
ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	**Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana (kajian)**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**335,9**			
	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan (sistem)	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	*Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah (provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*6,6*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Sistem dan dukungan teknis sistem penanggulangan bencana	*Jumlah sistem yang dikembangkan (sistem)*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*29,0*	*Pusat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	*Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*9,1*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	*Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (daerah)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*5,4*	*34 Provinsi*		*Kemendagri*
Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	*Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara (peralatan)*	*828*	*828*	*828*	*828*	*828*	*272,5*	*Pusat*		*Kemen PU&PERA*
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (kab/kota)*	*1*		*1*		*1*	*9,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuifaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya*		*Kemen PU&PERA*
Rekomendasi Strategi Pengembangan Sistem Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	*Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Mitigasi Risiko Bencana (paket rekomendasi)*	*1 Paket Rekomendasi*	*1 Paket Rekomendasi*	*1 Paket Rekomendasi*	*1 Paket Rekomendasi*	*1 Paket Rekomendasi*	*4,3*	*34 Provinsi*		*Kemenko Perekonomian*
ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	**jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal Peralatan dan logistik kebencanaan (kab/kota)**	**200**	**225**	**250**	**275**	**300**	**7.938,1**			
	Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai (persen)	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**				
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	*jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB (kab/kota)*	*144*	*136*	*135*	*134*	*134*	*269,9*	*34 Provinsi*		*BNPB*
Distribusi Logistik dan Peralatan PB	*Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*52,2*	*34 Provinsi*		*BNPB*
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	*Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana (jiwa)*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*56,0*	*Pusat*		*KEMENSOS*
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	*Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)*	*5*	*8*	*8*	*10*	*10*	*3.480,0*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.18

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas	*Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*	*1.145,0*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	*Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana (wilayah sungai)*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*	*90,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis*		*Kemen PU&PERA*
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)*	*32*	*14*	*10*	*11*	*4*	*2.845,0*	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*		*Kemen PU&PERA*
ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	**Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian)**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**104,6**			
	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana (dokumen)	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**				
Master Plan Kawasan Rawan Bencana	*jumlah rekomendasi teknis kawasan rawan bencana yang disusun (rekomendasi teknis)*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*20,1*	*Pusat*		*KEMEN ATR/BPN*
Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	*Jumlah kajian pemetaan dan analisis risiko bencana tersusun (dokumen)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*26,3*	*Pusat*		*BNPB*
Penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi	*Jumlah peta geologi gunung api dan peta kawasan rawan bencana geologi (peta)*	*8*	*20*	*20*	*20*	*20*	*13,2*			*KEMEN ESDM*
Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	*Jumlah rekomendasi geologi terpadu untuk daerah perkotaan (kawasan)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*45,0*	*20 kota*		*KEMEN ESDM*
ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana	**Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa (jiwa)**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**2.503,3**			
	Persentase waktu Respon penanganan darurat kurang dari 24 jam (persen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**				
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	*Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (paket)*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0,0*	*34 provinsi*		*BASARNAS*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.19

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelola Infrastruktur Darurat	*Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya (personil)*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*6,1*	*34 provinsi*		*BNPB*
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan keposkoan	*Jumlah personil yang mendapat pendampingan SKPDB dan keposkoan (personil)*	*105*	*105*	*105*	*105*	*105*	*8,2*	*Pusat*		*BNPB*
Penanggulangan Krisis Kesehatan	*Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan (kab/kota)*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*34,7*	*Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK*		*Kemenkes*
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	*Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa)*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*503,9*	*34 Provinsi*		*KEMENSOS*
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi.	*Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi (orang)*	*214.952*	*214.952*	*214.952*	*214.952*	*214.952*	*838,0*	*34 Provinsi*		*KEMENSOS*
Pengelolaan Operasi SAR	*Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (dokumen laporan)*	*39*	*39*	*39*	*39*	*39*	*0,0*	*34 provinsi*		*BASARNAS*
Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	*jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan (kegiatan)*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*1.056,4*	*34 provinsi*		*BNPB*
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	*Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi (orang)*	*490 orang*	*490 orang*	*490 orang*	*490 orang*	*490 orang*	*56,0*	*34 provinsi*		*BNPB*
ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	**Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)**	**50**	**75**	**90**	**100**	**100**	**210,3**			
	Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana (persen)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**				
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	*Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*8,5*	*34 provinsi*		*BNPB*
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	*Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi (lokasi)*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*25,2*	*34 provinsi*		*BNPB*
Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	*Jumlah personil yang didampingi (personil)*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*7,9*	*Pusat*		*BNPB*
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca	*Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana (unit)*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*110,1*	*34 provinsi*		*KEMEN KUKM*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	*Jumlah penanganan dampak perubahan iklim (ha)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*5,5*	*34 Provinsi*		*KEMENTAN*
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	*Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (sekolah)*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*25,4*	*34 Provinsi*		*KEMENDIKBUD*
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	*Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana (jiwa)*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*27,6*	*34 provinsi*		*KEMENSOS*
ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	**Jumlah sistem mitigasi multi ancaman bencana (MHEWS) terpadu (sistem)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8.555,6**			
	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana (kelompok)	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**				
	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana (kab/kota)	**514**	**514**	**514**	**514**	**514**				
	Kenaikan indeks kesiapsiagaan bencana (indeks)	**0,0040**	**0,0044**	**0,0048**	**0,0053**	**0,0059**				
Informasi Gempabumi dan Tsunami dengan pemasangan seismograf	*Jumlah penambahan peralatan seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami (unit)*	*117*	*56*	*55*	*55*	*55*	*889,1*	*34 Provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	*Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas (sistem)*	*300*	*50*	*50*	*50*	*50*	*1.441,3*	*34 Provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Sekolah Lapang Geofisika untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan tsunami	*Jumlah peserta yang meningkat pemahaman terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui sekolah lapang geofisika (orang)*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*	*24,4*	*34 Provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	*Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik (kota)*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*11,8*	*13 kota*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Operasional Aloptama MKG yang Prima	*Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi (persen)*	*90*	*91*	*92*	*93*	*94*	*1.681,0*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Jaringan komunikasi yang handal	*Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi (persen)*	*92*	*93*	*94*	*95*	*96*	*812,5*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	*Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scalling up wheather capacity II (stasiun)*	*-*	*1*	*10*	*34*	*-*	*346,2*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	*Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim (pelabuhan)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*1.792,3*	*100 pelabuhan*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Informasi peringatan dini windshear	*Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear (bandara)*	*4*	*3*	*2*	*2*	*3*	*278,5*	*14 bandara*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BMKG*
Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	*jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan (unit)*	*10*	*13*	*13*	*13*	*14*	*141,8*	*Pusat dan Daerah*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	*Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan (lokasi)*	*8*	*17*	*17*	*17*	*17*	*303,0*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*KEMEN ESDM*
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	*Jumlah Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (lokasi)*	*3*		*16*	*16*	*16*	*26,5*	*Provinsi Jawa Barat*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*LIPI*
Sistem Peringatan Dini	*jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang termanfaatkan (sistem)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*22,0*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Desa Tangguh Bencana	*jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan (desa)*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*47,1*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Satuan Pendidikan Aman Bencana	*jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi)*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*19,5*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BNPB*
Stasiun InaCORS yang Terbangun	*Jumlah Stasiun CORS Pemetaan Skala Besar dan Geodinamika yang dibangun dalam Rangka Mendukung Mitigasi Bencana (InaTEWS) (titik)*	*30*	*45*	*45*	*45*	*45*	*242,5*	*Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BIG*
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	*Jumlah Stasiun Pasang Surut yang dibangun untuk pemetaan skala besar, serta dalam rangka mendukung program mitigasi bencana (InaTEWS) (titik)*	*26*	*31*	*31*	*31*	*31*	*136,6*	*Seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan peta sebaran multi bencana BMKG*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BIG*
Titik Pantau Geodinamika yang terkelola	*Jumlah stasiun CORS yang beroperasi di lokasi sebaran sesar gempa (titik)*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*8,0*	*34 provinsi*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*BIG*
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	*Jumlah Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS (inovasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*215,9*	*DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda*	*Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana*	*BPPT*
Radio Tanggap Bencana	*Jumlah lokasi Radio Early Warning System (EWS) (lokasi)*	*5*	*10*	*15*	*20*	*25*	*28,2*	*Pusat*	*Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana*	*LPP RRI*
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*50,0*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Penguatan sistem peringatan dini bencana*	*Kemen PU&PERA*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*37,5*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*	*Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana*	*Kemen PU&PERA*
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	**Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen)**	**0,256**	**0,412**	**0,543**	**0,650**	**0,732**	**43.449,3**			
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen)	**0,009**	**0,028**	**0,045**	**0,060**	**0,072**				
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen)	**0,054**	**0,107**	**0,156**	**0,207**	**0,251**				
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen)	**0,024**	**0,044**	**0,062**	**0,078**	**0,093**				
ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	**Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**24.346,5**			
	Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen (pelabuhan)	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**				
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	**22**	**31**	**37**	**43**	**42**				
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	*Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*130,0*	*Daerah*		*KKP*
Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	*Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir (kawasan)*	*10*	*10*	*12*	*12*	*13*	*25,0*	*34 provinsi*		*KKP*

A.6.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	*Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP (paket)*	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	*10,0*	*11 WPP*		*KKP*
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	*Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*17,9*	*Daerah*		*KKP*
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	*Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)*	*16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*187,4*	*60 Lokasi*		*KKP*
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)*	*12,75*	*14,1*	*14,5*	*15,3*	*15,2*	*641,5*	*Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*		*Kemen PU&PERA*
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta	*Pengaman pesisir pantai utara Jakarta dengan skema KPBU (km)*	*0*	*7,25*	*7,25*	*7,25*	*7,25*	*13.370,0*	*Provinsi DKI Jakarta*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)*	*8,75*	*10*	*15*	*20*	*20*	*7.656,8*	*Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau terluar*		*Kemen PU&PERA*
Rehabilitasi Hutan Mangrove	*Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)*	*5.000*	*11.250*	*11.250*	*11.250*	*11.250*	*1.000,0*	*tersebar*		*KEMEN LHK, KKP, Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	*Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya (provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*122,1*			*KEMEN LHK*
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	*Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*37,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	*Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/SLN (orang)*	*500*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*29,7*	*34 provinsi*		*BMKG*
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	*Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)*	*67*	*70*	*73*	*75*	*77*	*1.118,2*	*Pusat*		*Kemenhub*
ProP : Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	**Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)**	**2**	**3**	**4**	**3**	**5**	**17.850,6**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**				
Pengembangan Sistem Data dan Informasi DAS Realtime	*Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS Realtime yang dikembangkan (sistem)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*194,0*			*KEMEN LHK*
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	*Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)*	*56.000*	*40.000*	*30.000*	*25.000*	*20.000*	*5.740,5*	*33 provinsi*		*KEMEN LHK*
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	*Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*502,0*			*KEMEN LHK*
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	*Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)*	*2,44*	*2,53*	*3,84*	*3,06*	*4,67*	*5.674,6*	*Tersebar*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis*	*3*	*5*	*8*	*10*	*10*	*1.003,5*	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas*	*3*	*4*	*4*	*10*	*10*	*866,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*Kemen PU&PERA*
Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	*Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*3.870,0*	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		*Kemen PU&PERA*
ProP : Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	**Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**637,8**			
	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	**1.000**	**1.275**	**1.450**	**1.650**	**1.650**				
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	*Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun (ha)*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*1.245*	*84,7*	*15 Provinsi*		*Kementan*
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim	*Jumlah Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim (ha)*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*11,0*	*31 Provinsi*		*Kementan*
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	*Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*134,2*	*Pusat dan 22 provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.25

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	*Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (teknologi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3,1*	*1 Provinsi*		*Kementan*
Penerapan Penanganan DPI	*Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI (ha)*	*550*	*560*	*570*	*580*	*590*	*19,9*	*22 Provinsi*		*Kementan*
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	*Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI (lokasi)*	*5000*	*5000*	*5000*	*5000*	*5000*	*335,8*	*Pusat*		*Kementan*
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang	*Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)*	*1.000*	*1.275*	*1.450*	*1.650*	*1.650*	*49,1*	*281 lokasi*		*BMKG*
ProP : Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	**Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS) (kab/kota)**	**110**	**220**	**280**	**380**	**420**	**614,4**			
Pengendalian Penyakit Arbovirosis	*Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/ 100.000 penduduk (persen)*	*70*	*75*	*80*	*85*	*90*	*35,4*	*34 provinsi*		*Kemenkes*
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	*Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS) (kab/kota)*	*110*	*220*	*280*	*380*	*420*	*76,0*	*34 Provinsi*		*Kemenkes*
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) (kab./kota)*	*60*	*65*	*70*	*75*	*80*	*260,9*	*34 Provinsi*		*Kemenkes*
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	*Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan (persen)*	*80*	*85*	*90*	*95*	*100*	*242,1*	*10 BTKLPP*		*Kemenkes*
PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	**Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)**	**11,8**	**12,5**	**12,8**	**12,8**	**13,2**	**252.934,2**			
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	**45,8**	**50,7**	**53,1**	**57,2**	**58,3**				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	**8,5**	**9,0**	**9,3**	**9,4**	**9,4**				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	**2,0**	**2,3**	**2,5**	**2,6**	**2,9**				
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	**6,5**	**6,6**	**6,8**	**7,0**	**7,3**				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	**Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)**	**13,4**	**14,5**	**15,7**	**17,9**	**19,5**	**171.735,2**			
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	**139,5**	**138,0**	**136,6**	**135,2**	**133,8**				
	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,80**	**0,80**				
ProP : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	**Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT (MW)**	**686,5**	**1.001,1**	**1.921,8**	**1.778,2**	**3.662,7**	**167.774,1**			
	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)	**10,00**	**10,20**	**14,15**	**14,55**	**17,35**				
PLTA	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*165,2*	*440,3*	*955,9*	*397,0*	*1.951,4*	*74.996,7*			*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Panas Bumi (PLTP)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*140,0*	*80,0*	*132,0*	*300,0*	*375,0*	*42.270,0*			*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Bioenergi	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*246,7*	*152,0*	*484,8*	*159,0*	*252,6*	*24.656,0*			*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Surya (PLTS)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*134,6*	*328,8*	*339,1*	*643,2*	*643,7*	*17.931,6*			*KESDM, BUMN, Swasta*
PLT Bayu (PLTB)	*Kapasitas terpasang tambahan (MW)*	*0,0*	*0,0*	*10,0*	*279,0*	*440,0*	*7.919,8*			*KESDM, BUMN, Swasta*
Pembangunan kilang BBN (Untuk perkiraan Capex 650 sd 850 Juta USD)	*Tahapan Pembangunan Green Refinery Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per Day di RUIII Plaju (tahapan)*	*Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition)*	*Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision)*	*EPC*	*EPC*	*Start Up dan On Stream (Mid 2024)*	*0,0*			*KESDM, BUMN, Swasta*
ProP : Efisiensi dan Konservasi Energi	**Peningkatan Implementasi SKEM (peralatan)**	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**3.961,1**			
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	*Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (peralatan)*	*3*	*2*	*1*	*-*	*-*	*2,1*	*Pusat*		*KEMEN ESDM*
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	*Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (rekomendasi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9,0*	*Pusat*		*KEMEN ESDM*
Pembangunan SPKLU	*Jumlah Penambahan SPKLU (unit akumulasi)*	*168*	*390*	*693*	*1.030*	*1.558*	*0,0*	*Tersebar*		*Badan Usaha*
Pengembangan smart grid	*Jumlah pengembangan smart grid (lokasi)*	*5 di Bali*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Beberapa Distribusi di P. Jawa*	*Interkoneksi Smart Grid di Jamali*	*1.450,0*	*Sistem Jamali*		*Badan Usaha*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	*Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)*	*5*	*5*	*5*	*5*	*6*	*500,0*	*Tersebar*		*Kemenhub*
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Kota Lainnya	*Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) (perkotaan)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*500,0*	*Tersebar*		*Kemenhub, Pemda, KPBU*
Subsidi angkutan umum massal perkotaan	*Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*1.500,0*	*Tersebar*		*KEMENHUB*
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	**Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)**	**301.800**	**318.200**	**325.000**	**325.000**	**330.000**	**18.998,4**			
	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	**366.000**	**370.000**	**400.000**	**425.000**	**420.000**				
	Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**				
ProP : Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	**Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.993,7**			
	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	**1.800**	**18.200**	**25.000**	**25.000**	**30.000**				
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	*Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*1.858,7*	*7 provinsi*		*KEMEN LHK*
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	*Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)*	*1.800*	*18.200*	*25.000*	*25.000*	*30.000*	*1.135,1*	*12 provinsi*		*KEMEN LHK*
ProP : Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	**Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)**	**366.000**	**370.000**	**400.000**	**425.000**	**420.000**	**6.288,5**			
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	*Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)*	*56.000*	*40.000*	*30.000*	*25.000*	*20.000*	*5.740,5*	*33 provinsi*		*KEMEN LHK*
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	*Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun (unit)*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*502,0*			*KEMEN LHK*
Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi	*Luas penanaman di hutan produksi (ha)*	*310.000*	*378.000*	*403.000*	*428.000*	*453.000*	*46,0*			*KEMEN LHK*
ProP : Pengurangan Laju Deforestasi	**Laju Deforestasi (ha/tahun)**	**480.000**	**430.000**	**380.000**	**330.000**	**310.000**	**5.622,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.28

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*61,0*			*KEMEN LHK*
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	*Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif*	*7*	*10*	*8*	*6*	*3*	*88,4*			*KEMEN LHK*
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	*Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)*	*552*	*552*	*552*	*552*	*552*	*122,1*			*KEMEN LHK*
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	*Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)*	*500*	*1500*	*2500*	*3500*	*4500*	*2.667,3*			*KEMEN LHK*
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	*Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (unit KEE)*	*11*	*22*	*33*	*44*	*55*	*54,9*			*KEMEN LHK*
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	*Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (juta ha)*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*950,0*			*KEMEN LHK*
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	*Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)*	*1*	*1,6*	*1*	*0*	*0*	*260,0*			*KEMEN LHK*
Operasi pengamanan kawasan hutan	*Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan*	*100*	*130*	*140*	*160*	*180*	*548,4*	*33 provinsi*		*KEMEN LHK*
KPH yang masuk kategori Maju	*Jumlah KPH yang masuk kategori Maju (unit)*	*10*	*20*	*30*	*40*	*50*	*90,0*			*KEMEN LHK*
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	*Luas kawasan hutan yang ditetapkan (juta ha)*	*4*	*8,5*	*9*	*9*	*3*	*780,0*			*KEMEN LHK*
ProP : Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	**Jumlah Optimasi Lahan pertanian (ha)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4.094,2**			
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	*Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim (teknologi)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1,8*	*1 Provinsi*		*KEMENTAN*
Optimasi Lahan	*Jumlah optimasi Lahan pertanian (ha)*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*2.655,4*	*15 provinsi*		*Kementan*
Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah penanaman hijauan pakan ternak (ha)*	*2.341*	*2.341*	*2.341*	*2.341*	*2.341*	*247,9*			*Kementan*
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	*Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO (unit)*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*716,7*	*Pusat*		*Kementan*
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	*Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (desa)*	*69*	*69*	*69*	*69*	*69*	*63,0*	*15 Provinsi*		*Kementan*
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	*Luas terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (ha)*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*265,5*	*Pusat*		*Kementan*
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	*Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (rekomendasi)*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*143,9*	*Pusat dan 25 provinsi*		*Kementan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.29

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Pengelolaan Limbah	**Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)**	**64,80**	**67,10**	**68,51**	**69,20**	**69,80**	**60.800,9**			
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	**3.885.755**	**3.885.755**	**3.885.755**	**3.885.755**	**3.885.755**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	**223.005**	**255.938**	**316.630**	**376.145**	**409.078**				
	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	**144.128**	**164.717**	**308.845**	**473.562**	**494.152**				
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	**Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton)**	**14,00**	**16,40**	**17,99**	**18,90**	**19,70**	**60.800,9**			
	Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	**50,80**	**50,70**	**50,52**	**50,30**	**50,10**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	**39**	**33**	**67**	**101**	**97**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (lokasi)	**78**	**108**	**113**	**116**	**116**				
	Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (provinsi)	**12**	**13**	**25**	**37**	**37**				
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)*	*5,65*	*6,23*	*6,81*	*7,14*	*7,48*	*100,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah pengurangan timbulan sampah (juta ton)*	*8,35*	*10,17*	*11,18*	*11,76*	*12,22*	*162,7*	*34 provinsi*		*Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)*	*19,26*	*19,19*	*19,12*	*19,05*	*18,97*	*673,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
Penanganan Timbulan Sampah Nasional	*Jumlah penanganan timbulan sampah (juta ton)*	*31,54*	*31,51*	*31,40*	*31,25*	*31,13*	*1.105,4*	*34 provinsi*		*Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	*Jumlah fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun(unit)*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1.000,0*	*Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)*		*KEMEN LHK*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)*	*39*	*46*	*46*	*46*	*47*	*25.391,0*	*224 kab/kota*		*Kemen PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)*		*10*	*28*	*28*	*29*	*10.750,0*	*95 kab/kota*		*KPBU*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah kabupaten/kota yang menyediakan dukungan pembangunan TPA (kab/kota)*	*39*	*56*	*74*	*74*	*76*	*13.645,0*	*319 kab/kota*		*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*283*	*283*	*565*	*848*	*848*	*1.036,0*	*120 kab/kota*		*DAK*
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*189*	*189*	*377*	*565*	*565*	*691,0*	*120 kab/kota*		*Kemen PU&PERA*
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*83*	*83*	*166*	*250*	*250*	*305,0*			*APBD*
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	*Jumlah TPST yang terbangun (unit)*	*7*	*8*	*15*	*23*	*22*	*5.940,0*	*55 kab/kota*		*Kemen PU&PERA*
KP : Pengembangan Industri Hijau	**Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**52,4**			
ProP : Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	**Jumlah rancangan standar penurunan emisi GRK dan limbah B3 sektor industri (akumulasi rancangan standar)**	**9**	**8**	**24**	**32**	**40**	**52,4**			
Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	*Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)*	*9*	*9*	*9*	*10*	*10*	*24,2*			*Kemenperin*
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	*Jumlah Rancangan Standar (Rancangan Standar)*	*5*	*4*	*12*	*16*	*20*	*11,4*			*Kemenperin*
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri	*Jumlah Rancangan Standar (Rancangan Standar)*	*4*	*4*	*12*	*16*	*20*	*16,8*			*Kemenperin*
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	**Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)**	**5.000**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**1.347,4**			
ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	**Jumlah lokasi pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai (lokasi)**	**20**	**21**	**22**	**24**	**26**	**1.347,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.6.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi Hutan Mangrove	*Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)*	*5.000*	*11.250*	*11.250*	*11.250*	*11.250*	*1.000,0*	*tersebar*		*KEMEN LHK, KKP, Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya*
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	*Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)*	*16 (termasuk 200 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*16 (termasuk 400 ha rehabilitasi mangrove)*	*187,4*	*60 Lokasi*		*KKP*
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	*Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya (provinsi)*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*122,1*			*KEMEN LHK*
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	*Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*37,9*	*34 provinsi*		*KEMEN LHK*
JUMLAH							**348.662,2**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI							**17.049,8**			
KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	**Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)**	**75,30**	**75,35**	**75,40**	**75,45**	**75,50**	**14.100,7**			
ProP : Penguatan Penyelenggara Pemilu	**Terwujudnya penguatan penyelenggara Pemilu di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota**	**549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)**	**549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)**	**549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)**	**549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)**	**549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)**	**6.385,8**			
Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu	*Jumlah Badan Adhok yang terbentuk*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*2.235,0*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Ketersediaan Logistik Pemilu	*Persentase penyediaan logistik Pemilu*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*638,6*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	*Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*319,3*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu	*Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*638,6*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*1.277,2*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Bawaslu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.2

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	*Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*1.277,2*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Bawaslu*
ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	**Tersusunnya UU Bidang Politik yang lebih komprehensif**	**2**	**2**	**2**	**N/A**	**N/A**	**6,0**			
Kebijakan Politik Dalam Negeri	*Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik*	*2 kebijakan/peraturan*	*2 kebijakan/peraturan*	*2 kebijakan/peraturan*	*N/A*	*N/A*	*6,0*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	**Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik**	**126.376.418 suara sah**	**126.376.418 suara sah**	**126.376.418 suara sah**	**126.376.418 suara sah**	**126.376.418 suara sah**	**7.679,9**			
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	*Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR*	*126376418 suara sah*	*126376418 suara sah*	*126376418 suara sah*	*126376418 suara sah*	*126376418 suara sah*	*7.679,9*	*Pusat*		*Kemendagri*
ProP : Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	**Terlaksananya peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik**	**100 orang**	**200 orang**	**500 orang**	**700 orang**	**800 orang**	**11,5**			
Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	*Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik*	*100 orang*	*200 orang*	*500 orang*	*700 orang*	*800 orang*	*11,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemendagri*
ProP : Penguatan Demokrasi di Daerah	**Terlaksananya penguatan demokrasi di 34 provinsi**	**34 Provinsi**	**34 Provinsi**	**34 Provinsi**	**34 Provinsi**	**34 Provinsi**	**17,5**			
Penguatan Demokrasi di Daerah	*Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi*	*34 Provinsi*	*34 Provinsi*	*34 Provinsi*	*34 Provinsi*	*34 Provinsi*	*17,5*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Kemendagri*
KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	**Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)**	**82,00**	**82,50**	**83,00**	**83,50**	**84,00**	**795,3**			
	Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	**76,89**	**77,90**	**78,82**	**79,67**	**80,47**				
	Indeks Kerawanan Pemilu	**47**	**45**	**43**	**41**	**39**				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**22,52%**				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**20%**				

A.7.3

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**17%**				
ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	**Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota)**	**Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah**	**Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah**	**Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah**	**Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah**	**Rumah Pintar Pemilu: 549 Satker Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah**	**447,9**			
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	*Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*106,4*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	*Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*21,3*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	*Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*63,8*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	*Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*85,1*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Pendidikan Pengawasan Partisipatif	*Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*	*42,6*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Bawaslu*
Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	*Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif*	*Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah*	*Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah*	*Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah*	*Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah*	*Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah*	*63,8*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Bawaslu*
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	*Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu*	*19 Daerah*	*34 Daerah*	*34 Daerah*	*34 Daerah*	*34 Daerah*	*42,6*			*Bawaslu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.4

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	*Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik*	*3000 orang*	*5000 orang*	*6000 orang*	*8000 orang*	*10000 orang*	*11,2*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Kemendagri*
Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Penggerak Pembangunan Desa	*Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa*	*10 Provinsi*	*8 Provinsi*	*7 Provinsi*	*7 Provinsi*	*7 Provinsi*	*11,1*	*Provinsi*		*Kemen PPPA*
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	**Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis**	**Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota**	**Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota**	**Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota**	**Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota**	**Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota**	**283,9**			
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	*Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*85,2*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Bawaslu*
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	*Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*71,0*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
Peningkatan kompetensi SDM KPU	*Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota*	*127,8*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*KPU*
ProP : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan**	**400 orang**	**1800 orang**	**3000 orang**	**3300 orang**	**4200 orang**	**63,5**			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik*	*400 orang*	*1800 orang*	*3000 orang*	*3300 orang*	*4200 orang*	*63,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemdagri*
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	**Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah**	**70**	**71**	**71**	**72**	**72**	**2.153,7**			
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	**80**	**83**	**85**	**90**	**95**				
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	**50000 orang**	**50000 orang**	**50000 orang**	**50000 orang**	**50000 orang**				
ProP : Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	**Terintegrasinya tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik**	**6 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**93,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.5

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penata Kelolaan Komunikasi Publik	*Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D*	*6 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*13,8*	*Pusat*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	*Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku*	*65*	*70*	*75*	*85*	*90*	*0,5*	*Pusat*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
	Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/ Bako Humas, Petugas Informasi Publik/ PIP, dan lain-lain) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	*65*	*70*	*75*	*80*	*85*	*29,4*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)	*Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan* *(16.10.2 b)*	*72*	*80*	*90*	*100*	*110*	*8,3*	*Pusat*		*Komisi Informasi Pusat*
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (**)	*Jumlah Badan Publik yang Informatif* *(16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)*	*35*	*40*	*45*	*55*	*60*	*13,7*	*Pusat*		*Komisi Informasi Pusat*
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	*Indeks Keterbukaan Informasi Publik*	*1 Dokumen*	*35*	*40*	*45*	*50*	*27,4*	*Pusat*		*Komisi Informasi Pusat*
ProP : Penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	**Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik**	**60**	**63**	**65**	**68**	**70**	**17,7**			
Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	*Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik*	*500*	*550*	*600*	*650*	*700*	*1,1*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan	*Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T yang mendapat akses informasi publik*	*65*	*68*	*70*	*73*	*75*	*16,6*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik	*55*	*58*	*60*	*63*	*65*	*0,0*	*Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)*		*Ditjen IKP, Kemkominfo*
ProP : Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	**Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.851,9**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.6

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	*Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*1.687,7*	*Pusat*		*Balitbang, Kemkominfo*
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	*Persentase (%) penerima beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu*	*90*	*90*	*90*	*95*	*95*	*164,2*	*Pusat*		*Balitbang, Kemkominfo*
ProP : Peningkatan literasi TIK masyarakat	**Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK**	**2.000**	**2.200**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**8,3**			
Pengenalan TIK kepada masyarakat	*Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)*	*2.000*	*2.200*	*2.500*	*3.000*	*3.500*	*8,3*	*Pusat*		*Balitbang, Kemkominfo*
ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	**Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika**	**1 Kajian**	**1 Kajian**	**1 Kajian**	**1 Kajian**	**1 Kajian**	**7,0**			
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	*Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah*	*1 Kajian*	*1 Kajian*	*1 Kajian*	*1 Kajian*	*1 Kajian*	*7,0*	*Pusat*		*Balitbang, Kemkominfo*
ProP : Penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	**Indeks Kemerdekaan Pers**	**74**	**74,3**	**74,6**	**74,9**	**75**	**66,9**			
Pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	*Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan*	*85*	*85*	*90*	*90*	*90*	*3,5*	*Pusat*		*Dewan Pers*
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	*Persentase (%) provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73*	*78*	*80*	*83*	*85*	*90*	*28,4*	*Pusat*		*Dewan Pers*
Pendataan dan verifikasi perusahaan pers	*Jumlah perusahaan pers yang diverifikasi secara faktual*	*250*	*500*	*500*	*600*	*700*	*4,3*	*Pusat*		*Dewan Pers*
	Persentase (%) perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*0,0*			*Dewan Pers*
Sertifikasi Jurnalis	*Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis*	*490 orang*	*1500 orang*	*1500 orang*	*1500 orang*	*1500 orang*	*30,7*	*Pusat*		*Dewan Pers*
Pelatihan Jurnalis	*Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik*	*500 orang*	*1650 orang*	*1650 orang*	*1650 orang*	*1650 orang*	*0,0*	*Pusat*		*Dewan Pers*
	Persentase (%) jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*0,0*	*Pusat*		*Dewan Pers*
ProP : Peningkatan kualitas lembaga penyiaran	**Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas**	**23**	**57**	**58**	**59**	**59**	**108,8**			

A.7.7

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Standar Peraturan Perundangan Bidang Penyiaran	*Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)*	*23*	*57*	*58*	*59*	*59*	*74,9*	*Pusat*		*Komisi Penyiaran Indonesia*
Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV	*Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3*	*7*	*9*	*11*	*13*	*15*	*30,4*	*Pusat*		*Komisi Penyiaran Indonesia*
Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio	*Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan*	*96*	*97*	*98*	*99*	*99*	*3,5*	*Pusat*		*Komisi Penyiaran Indonesia*
PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	**Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional**	**95,07**	**95,27**	**95,47**	**95,67**	**95,67**	**4.389,7**			
KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	**Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim**	**43,2**	**46,8**	**50,5**	**56,3**	**57,8**	**1.722,1**			
	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	**86,0**	**87,0**	**88,0**	**89,0**	**90,0**				
ProP : Peningkatan dan Intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	**Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim**	**43,2**	**46,8**	**50,5**	**56,3**	**57,8**	**124,4**			
Perundingan batas dan Kerja Sama Kelautan Maritim INA dgn 9 negara tetangga	*Persentase perundingan batas dan kerja sama perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*15,6*	*Pusat*		*Kemenlu*
Perundingan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas	*Persentase penetapan batas dan kerja sama perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*22,5*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	*Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*26,5*	*Pusat*		*Kemendagri*
Tanda batas negara	*jumlah tanda batas negara*	*120*	*225*	*200*	*200*	*200*	*31,5*	*Pusat*		*BIG*
Peta batas negara	*jumlah peta batas negara*	*32*	*20*	*20*	*20*	*20*	*2,5*	*Pusat*		*BIG*
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	*Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut*	*6*	*20*	*20*	*17*	*15*	*1,4*	*Pusat*		*BIG*
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	*Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat*	*3*	*20*	*20*	*20*	*20*	*2,5*	*Pusat*		*BIG*
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum, dan Perjanjian Maritim	*Jumlah Rumasan Kebijakn dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim*	*9*	*10*	*10*	*10*	*10*	*21,9*	*Pusat*		*Kemenko Marin*
ProP : Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	**Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri**	**34,40**	**34,80**	**35,20**	**35,60**	**36,00**	**1.597,7**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	**12,90**	**13,05**	**13,20**	**13,35**	**13,50**				
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	**21,50**	**21,75**	**22,00**	**22,25**	**22,50**				
	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	**17,20**	**17,40**	**17,60**	**17,80**	**18,00**				
Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar	*Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan*	*55,9%*	*56,6%*	*57,2%*	*57,9%*	*50,9%*	*332,8*	*Pusat*		*Kemenlu*
	Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan	*30,1%*	*30,5%*	*30,8%*	*31,2%*	*27,7%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	*30,1%*	*30,5%*	*30,8%*	*31,2%*	*31,5%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Tingkat pengembangan sistem informasi.	*34,4%*	*34,8%*	*35,2%*	*35,6%*	*36,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Tingkat kepuasan pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel.	*17,2%*	*17,4%*	*17,6%*	*17,8%*	*18,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	*4,3%*	*4,4%*	*4,4%*	*4,5%*	*4,5%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Ditandatangani	*21,5%*	*21,8%*	*22,0%*	*22,3%*	*22,5%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan	*17,2%*	*17,4%*	*17,6%*	*17,8%*	*18,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yand Disahkan	*21,5%*	*21,8%*	*22,0%*	*22,3%*	*22,5%*	*0,0*			*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.9

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindunan WNI dan BHI di Luar Negeri	*17,2%*	*17,4%*	*17,6%*	*17,8%*	*18,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan	*8,6%*	*8,7%*	*8,8%*	*8,9%*	*9,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Rekomendasi Kemenlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional	*30,1%*	*30,5%*	*30,8%*	*31,2%*	*31,5%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan / Regulasi Nasional terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	*30,1%*	*30,5%*	*30,8%*	*31,2%*	*31,5%*	*0,0*			*Kemenlu*
	Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	*25,8%*	*26,1%*	*26,4%*	*26,7%*	*27,0%*	*0,0*			*Kemenlu*
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	*Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*3,0*	*Pusat*		*Kemenlu*
Perlindungan dan Pelayanan Konsuler WNI/ BHI (Perwakilan RI)	*Jumlah WNI/ BHI yang Mendapat Perlindungan (orang)*	*230000*	*241500*	*253575*	*266254*	*279566*	*726,9*	*Perwakilan RI*		*Kemenlu*
Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Atase di 12 negara	*Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural*	*250000*	*260000*	*270000*	*280000*	*300000*	*170,0*	*UEA, Brunei, Hong kong, Jeddah, Jordan, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Riyadh, Singapura, Taiwan*		*KemenNaker*

A.7.10

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	*Pelaksanaan pembekalan akhir keberangkatan*	*179.860 CTKI/TKI*	*200.000 CTKI/TKI*	*230.000 CTKI/TKI*	*260.000 CTKI/TKI*	*300.000 CTKI/TKI*	*190,0*	*Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta*		*BNP2TKI*
CTKI/TKI yang terlindungi	*Penanganan/pemulangan RKI Bermasalah*	*18.000 TKI*	*17.000 TKI*	*15.000 TKI*	*13.000 TKI*	*10.500 TKI*	*175,0*	*Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta*		*BNP2TKI*
KP : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	**Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular**	**86**	**100**	**115**	**133**	**152**	**642,6**			
ProP : Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional	**Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)**	**123,5**	**138,1**	**154,0**	**171,4**	**190,0**	**599,5**			
	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular	**86**	**100**	**115**	**133**	**152**				
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	*Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*	*135,0*	*Pusat*		*Kemen Ristek/BRIN*
Bantuan Kerja sama Teknis Indonesia	*Jumlah Kegiatan Bantuan teknis Indonesia*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*95,7*	*Pusat*		*Kemenlu*
Beasiswa Dharmasiswa	*Jumlah orang penerima beasiswa*	*650 orang*	*650 orang*	*650 orang*	*650 orang*	*650 orang*	*211,2*	*Pusat*		*Kemendikbud*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.11

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	*Jumlah penugasan pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri*	*220 penugasan*	*220 penugasan*	*220 penugasan*	*220 penugasan*	*220 penugasan*	*91,7*	*Pusat*		*Kemendikbud*
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pekerjaan Umum	*Jumlah kegiatan KSST Bidang Pekerjaan Umum*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	*14,0*	*Pusat*		*Kemen PU&PERA*
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	*Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan dibidang Obat dan Makanan dalam skema KSST*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5,3*	*Pusat*		*BPOM*
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kelautan dan Perikanan	*Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan dan Perikanan*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*8,3*	*Pusat*		*KKP*
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Pertanian	*Jumlah kegiatan KSST Bidang Pertanian*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2,9*	*Pusat*		*Kementan*
KSST Bidang Peningkatan Kapasitas	*Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*21,0*	*Pusat*		*Setneg*
Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	*Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*13,5*	*Pusat*		*Kemen PPN/ Bappenas*
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Keuangan	*Jumlah kegiatan KSST Bidang Keuangan*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,9*	*Pusat*		*Kemenkeu*
ProP : Penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	**Tingkat Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional**	**2,2-2,38%**	**2,48-2,55%**	**2,65-2,74%**	**2,84-2,96%**	**2,96-3,16%**	**43,1**			
Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	*Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*2,8*			*Kemenlu*
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*0,0*			*Kemenlu*
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	*Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi dan sosial di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*23,2*			*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.12

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	*Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*17,1*			*Kemenlu*
	Indeks respon positif stakeholders terhadap informasi database kebijakan perdagangan	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*0,0*			*Kemenlu*
	Peningkatan kemampuan melalui capacity building diplomasi ekonomi multilateral	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*0,0*			*Kemenlu*
KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	**Indeks citra Indonesia di dunia internasional**	**3,8**	**3,836**	**3,882**	**3,942**	**4**	**282,9**			
ProP : Penyusunan kebijakan diplomasi publik dan turunannya	**Indeks citra Indonesia di dunia internasional**	**3,8**	**3,836**	**3,882**	**3,942**	**4**	**282,9**			
Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran	*Persentase Dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia*	*95*	*95*	*96*	*97*	*97*	*213,6*			*Kemenlu*
	Persentase kehadiran konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia	*95*	*95*	*95*	*95*	*95*	*0,0*			
Diplomasi Digital dan Informasi hubungan luar negeri yang kuat	*Persentase peningkatan jumlah pengunjung portal situs Kemenlu*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*42,9*			*Kemenlu*
	Persentase peningkatan impresi dan engagement pada media sosial Kemenlu	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*0,0*			
	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	*91*	*92*	*93*	*94*	*95*	*0,0*			
	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	*85*	*85*	*86*	*86*	*86*	*0,0*			
	Nilai keterbukaan informasi publik	*80,5*	*81*	*81,5*	*82*	*82,5*	*0,0*			
Rekomendasi terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi strategis dan personil	*Persentase Penyusunan Laporan Keamanan Informasi, Personal, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik sesuai target*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*26,4*			*Kemenlu*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Penyusunan rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik sesuai target	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*0,0*			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi Keamanan Informasi, Personil, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik	*75*	*76*	*77*	*78*	*79*	*0,0*			
KP : Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global	**Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**1.742,1**			
ProP : Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	**Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**1.691,3**			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*37,3*	*Pusat*		*Kemenlu*
	Jumlah sidang/ pertemuan internasional di bidang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang diprakarsai oleh indonesia di forum multilateral	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*0,0*			
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	*Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*6,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan multilateral	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*0,0*			
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	*Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*4,6*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata*	*95*	*95*	*95*	*95*	*95*	*16,0*	*Pusat*		*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.14

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah sidang /pertemuan Internasional dibidang Keamanan Internasional dan perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di Forum Multilateral	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*0,0*			
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	*Persentase Rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah masal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara*	*93*	*93*	*93*	*93*	*93*	*2,6*	*Pusat*		*Kemenlu*
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	*Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral*	*93*	*93*	*93*	*93*	*93*	*15,0*	*Pusat*		*Kemenlu*
	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	*80*	*80*	*81*	*81*	*81*	*0,0*			
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*0,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan	*Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*5,7*	*Pusat*		*Kemenlu*
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	*Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Diplomasi Maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*1,8*	*Pusay*		*Kemenlu*
kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*3,5*	*Pusat*		*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.15

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan	*Presentase Rekomendasi dari forum kerjasama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*5,3*	*Pusat*		*Kemenlu*
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	*Presentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*	*2,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kepemimpinan dan Peran Aktif Indonesia pada Berbagai Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang*	*87*	*87*	*88*	*90*	*90*	*30,2*	*Pusat*		*Kemenlu*
Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	*Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang*	*90*	*90*	*91*	*92*	*92*	*0,5*	*Pusat*		*Kemenlu*
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	*Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional*	*72*	*73*	*74*	*75*	*76*	*10,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
	Persentase penyelesaian permohonan registrasi Organisasi Kemasyarakatan Asing	*70*	*71*	*72*	*73*	*74*	*0,0*			
Pemenangan Indonesia di Berbagai Pencalonan yang Pemilihannya dilakukan di Tahun 2020	*Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*7,9*	*Pusat*		*Kemenlu*
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	*Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN*	*64*	*94*	*94*	*95*	*94*	*24,5*	*Pusat*		*Kemenlu*
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	*Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN*	*37*	*44*	*97*	*51*	*50*	*26,9*	*Pusat*		*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.16

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	*Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional*	*130*	*135*	*140*	*146*	*151*	*36,1*	*Pusat*		*Kemenlu*
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	*Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan*	*140*	*178*	*180*	*191*	*190*	*87,3*	*Pusat*		*Kemenlu*
Layanan Setnas ASEAN Indonesia	*Dukungan Layanan Setnas ASEAN Indonesia*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*26,7*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan Kerjasama di kawasan Sub Sahara Afrika	*Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Sub Sahara Afrika*	*22*	*23*	*22*	*22*	*22*	*54,8*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	*Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah*	*29*	*29*	*29*	*29*	*29*	*32,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	*Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik*	*31*	*33*	*34*	*36*	*36*	*50,7*	*Pusat*		*Kemenlu*
Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intra kawasan Asia Pasifik dan Afrika	*Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama lntrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika*	*39*	*39*	*39*	*39*	*39*	*31,6*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Timur Tengah	*Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Timur Tengah*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*37,7*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Tenggara	*Jumlah Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*30,0*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II	*Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*19,6*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I	*Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I*	*24*	*29*	*29*	*29*	*29*	*26,2*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I	*Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*21,9*	*Pusat*		*Kemenlu*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.17

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II	*Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*33,0*	*Pusat*		*Kemenlu*
Prakarsa/ rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	*JumlahPrakarsa/ rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*	*24,4*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III	*Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III*	*34*	*35*	*35*	*35*	*35*	*33,2*	*Pusat*		*Kemenlu*
Kerjasama Bilateral/ Regional/ Multilateral	*Jumlah kerjasama yang dilaksanakan*	*4751*	*4851*	*4951*	*5051*	*5151*	*944,3*	*Perwakilan RI*		*Kemenlu*
ProP : Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB	**Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral**	**95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,0**			
Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB	*Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral*	*95*	*-*	*-*	*-*	*-*	*38,0*	*Pusat/ Perwakilan*		*Kemenlu*
ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	**Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia**	**10 besar**	**10 besar**	**10 besar**	**10 besar**	**10 besar**	**12,8**			
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	*Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia*	*10 besar*	*10 besar*	*10 besar*	*10 besar*	*10 besar*	*12,8*			*Kemenlu*
PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	**Indeks Pembangunan Hukum**	**0,65**	**0,67**	**0,69**	**0,71**	**0,73**	**1.633,3**			
KP : Penataan Regulasi	**Persentase judicial review yang dikabulkan MK dan MA**	**12,15% dan 11,05%**	**11,15% dan 10,05%**	**10,15% dan 9,05%**	**9,15% dan 8,05%**	**8,15% dan 7,05%**	**38,8**			
ProP : Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	**Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi**	**0,05**	**0,1**	**0,15**	**0,2**	**0,25**	**20,9**			
Tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	*Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum*	*1 Dokumen*					*0,1*	*Pusat*		*Kemenkumham*
Pedoman konsultasi publik	*Penyusunan pedoman konsultasi publik*	*1 Dokumen*					*0,2*	*Pusat*		*Kemenkumham*
Penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	*Aplikasi penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi*	*1 Paket*					*0,1*	*Pusat*		*Kemenkumham*
Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	*Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*4,0*	*Pusat*		*MK RI*
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	*Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK*	*15 Undang-Undang*	*15 Undang-Undang*	*15 Undang-Undang*	*15 Undang-Undang*	*15 Undang-Undang*	*1,5*	*Pusat*		*MK RI*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	*Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban*	*10 rekomendasi*	*10 rekomendasi*	*10 rekomendasi*	*10 rekomendasi*	*10 rekomendasi*	*15,0*	*Pusat*		*Komnas Perempuan*
ProP : Pembaruan Substansi Hukum	**Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah**	**1 UU (KUHP)**	**1 UU (Kepailitan)**	**1 UU (Fidusia)**	**1 UU (Badan Usaha)**	**1 (Hukum Acara Perdata)**	**17,9**			
RUU KUHP/KUHAP	*RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan*	*1 Dokumen*					*1,8*	*Pusat*		*Kemenkumham*
RUU Hukum Acara Perdata	*RUU Hukum Acara Perdata*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*9,0*	*Pusat*		*Kemenkumham*
RUU Badan Usaha	*Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*				*5,2*	*Pusat*		*Kemenkumham*
RUU Badan Usaha	*Penyusunan NA RUU Badan Usaha*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*			*0,5*	*Pusat*		*Kemenkumham*
RUU Jaminan Fidusia	*RUU Jaminan Fidusia*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*			*0,9*	*Pusat*		*Kemenkumham*
RUU Kepailitan	*RUU Kepailitan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*				*0,6*	*Pusat*		*Kemenkumham*
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	**1. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek enforcing contracts 2. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek resolving insolvency 3. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credits 4. Persentase Pelaku Residivis**	**1. Peringkat 120 2. Peringkat 30 3. Peringkat 30 4. 8,56%**	**1. Peringkat 110 2. Peringkat 28 3. Peringkat 28 4. 8,06%**	**1. Peringkat 100 2. Peringkat 26 3. Peringkat 26 4. 7,56%**	**1. Peringkat 80 2. Peringkat 24 3. Peringkat 24 4. 7,06%**	**1. Peringkat 70 2. Peringkat 20 3. Peringkat 20 4. 6,56%**	**817,9**			
ProP : Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	**Persentase eksekusi putusan perdata**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**10,2**			
Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	*Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*4,4*	*Pusat*		*MA*
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha	*Jumlah Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*5,8*	*Pusat*		*MA*
ProP : Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif	**Persentase pengenaan alternatif pemidanaan**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**40,0**			
Implementasi Keadilan Restoratif	*Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif*	*1 Juknis*					*0,3*	*Pusat*		*Kejagung*
Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	*Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*6,9*	*Pusat*		*Kejagung*
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	*Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan*	*320 Orang*	*320 Orang*	*320 Orang*	*320 Orang*	*320 Orang*	*16,4*	*Pusat*		*Kemenkumham*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat*	*35 pokmas*	*40 pokmas*	*30 pokmas*	*35 pokmas*	*35 pokmas*	*8,9*	*Wilayah*		*Kemenkumham*
Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	*Jumlah Surat Keterangan Korban Penanganan pelanggaran HAM yang berat*	*450 Surat Keterangan*	*450 Surat Keterangan*	*450 Surat Keterangan*	*450 Surat Keterangan*	*450 Surat Keterangan*	*7,5*	*Pusat*		*Komnas HAM*
ProP : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	**Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI**	**109 Wilayah Kerja**	**TBD**	**TBD**	**TBD**	**TBD**	**767,8**			
Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	*Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI*	*156 Satker*	*156 Satker*	*156 Satker*	*156 Satker*	*156 Satker*	*410,2*	*Daerah*		*Kejagung*
Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	*Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI*	*2 Sistem*	*2 Sistem*	*2 Sistem*	*2 Sistem*	*2 Sistem*	*45,8*	*Daerah*		*Kejagung*
Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	*Jumlah Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI*	*460 Satker*	*460 Satker*	*460 Satker*	*460 Satker*	*460 Satker*	*124,1*	*Daerah*		*Kejagung*
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	*Jumlah Wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*2,0*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	*Jumlah wilayah pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*33 Wilayah*	*2,0*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	*Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan*	*115 Pengadilan*	*115 Pengadilan*	*115 Pengadilan*	*115 Pengadilan*	*115 Pengadilan*	*5,1*	*Daerah*		*MA*
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	*Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi*	*4 Desain*	*4 Desain*	*4 Desain*	*4 Desain*	*4 Desain*	*3,8*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*16,7*	*Pusat*		*Kemenko Polhukam*
Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan	*Jumlah Unit Sistem Aplikasi e Manajemen Penyidikan*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*145,7*	*Pusat*		*POLRI*
Karakterisasi putusan	*Jumlah Putusan yang dilakukan Karakterisasi*	*35 putusan*	*35 putusan*	*35 putusan*	*35 putusan*	*35 putusan*	*12,5*	*Pusat*		*KY RI*
KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi	**IPAK**	**4,00**	**4,03**	**4,06**	**4,09**	**4,14**	**203,0**			
ProP : Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	**Survey Penilaian Integritas**	**0,68**	**0,70**	**0,72**	**0,74**	**0,76**	**144,3**			
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah I	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*1,3*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah II	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*0,9*	*Daerah*		*Kemenkumham*

A.7.20

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah IIII	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*3,7*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah IV	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*1,3*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah V	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*1,3*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM Wilayah VI	*Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang dibentuk*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*5 Satker*	*1,3*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	*Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*13,5*	*Pusat*		*Kemenkumham*
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	*Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor*	*31 Kegiatan*	*31 Kegiatan*	*31 Kegiatan*	*31 Kegiatan*	*31 Kegiatan*	*4,0*	*Pusat*		*Kejagung*
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	*Peningkatan Zona Integritas Wilayah I*	*106 LHP*	*106 LHP*	*106 LHP*	*106 LHP*	*106 LHP*	*9,2*	*Daerah*		*MA*
Peningkatan Zona Integritas Wilayah	*Peningkatan Zona Integritas Wilayah II*	*83 LHP*	*83 LHP*	*83 LHP*	*83 LHP*	*83 LHP*	*6,1*	*Daerah*		*MA*
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	*Peningkatan Zona Integritas Wilayah III*	*105 LHP*	*105 LHP*	*105 LHP*	*105 LHP*	*105 LHP*	*10,8*	*Daerah*		*MA*
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	*Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV*	*53 LHP*	*53 LHP*	*53 LHP*	*53 LHP*	*53 LHP*	*6,8*	*Daerah*		*MA*
Pembangunan Zona Integritas	*Pembangunan Zona Integritas*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*0,5*	*Pusat*		*MK RI*
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	*Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI*	*31 Satker*	*31 Satker*	*31 Satker*	*31 Satker*	*31 Satker*	*9,0*	*Daerah*		*Kejagung*
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	*Jumlah Instansi yang dilakukan Survei Penilaian Integritas*	*84 Instansi*	*84 Instansi*	*84 Instansi*	*84 Instansi*	*84 Instansi*	*28,8*	*Pusat*		*KPK*
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	*Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*2 laporan*	*45,7*	*Pusat*		*KPK*
ProP : Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	**Jumlah Aparat Penegak Hukum yang mengikuti Diklat Pemulihan Aset**	**160 orang**	**160 orang**	**160 orang**	**160 orang**	**160 orang**	**58,7**			
Diklat Pemulihan Aset	*Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset*	*4 Angkatan*	*4 Angkatan*	*4 Angkatan*	*4 Angkatan*	*4 Angkatan*	*9,5*	*Pusat*		*Kejagung*
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	*Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana*	*20 Laporan*	*20 Laporan*	*20 Laporan*	*20 Laporan*	*20 Laporan*	*49,1*	*Pusat*		*Kejagung*
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	**Indeks Akses terhadap Keadilan**	**65-70%**	**65-70%**	**71-80%**	**71-80%**	**71-80%**	**573,6**			
ProP : Penguatan layanan keadilan	**Indeks Akses terhadap Keadilan**	**65-70%**	**65-70%**	**71-80%**	**71-80%**	**71-80%**	**567,6**			

A.7.21

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pos Bantuan Hukum	*Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum*	*111.584 Jam Layanan*	*111.584 Jam Layanan*	*111.584 Jam Layanan*	*111.584 Jam Layanan*	*111.584 Jam Layanan*	*55,8*	*Pusat*		*MA*
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	*Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan*	*3888 Perkara*	*3888 Perkara*	*3888 Perkara*	*3888 Perkara*	*3888 Perkara*	*26,4*	*Pusat*		*MA*
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	*Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara*	*81 Perkara*	*81 Perkara*	*81 Perkara*	*81 Perkara*	*81 Perkara*	*0,4*	*Pusat*		*MA*
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	*Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara*	*11.293 perkara*	*11.293 perkara*	*11.293 perkara*	*11.293 perkara*	*11.293 perkara*	*20,4*	*Pusat*		*MA*
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	*Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung*	*25.489 perkara*	*25.489 perkara*	*25.489 perkara*	*25.489 perkara*	*25.489 perkara*	*58,7*	*Pusat*		*MA*
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	*Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama*	*127.365 jam layanan*	*127.365 jam layanan*	*127.365 jam layanan*	*127.365 jam layanan*	*127.365 jam layanan*	*58,2*	*Pusat*		*MA*
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	*Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu*	*3286 perkara*	*3286 perkara*	*3286 perkara*	*3286 perkara*	*3286 perkara*	*3,6*	*Pusat*		*MA*
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	*Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara*	*44 Perkara*	*44 Perkara*	*44 Perkara*	*44 Perkara*	*44 Perkara*	*0,1*	*Pusat*		*MA*
Pos Bantuan Hukum	*Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum*	*8.640 Jam Layanan*	*8.640 Jam Layanan*	*8.640 Jam Layanan*	*8.640 Jam Layanan*	*8.640 Jam Layanan*	*4,8*	*Pusat*		*MA*
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	*Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*2,5*	*Pusat*		*Komnas Perempuan*
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	*Jumlah Orang Penerima Bantuan Hukum Litigasi*	*5699 orang*	*7025 orang*	*7025 orang*	*7025 orang*	*9169 orang*	*286,6*	*Daerah*		*Kemenkumham*
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	*Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi*	*758 Kegiatan*	*938 Kegiatan*	*938 Kegiatan*	*938 Kegiatan*	*1221 Kegiatan*	*50,1*	*Daerah*		*Kemenkumham*
ProP : Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	**Indeks Akses terhadap Keadilan**	**65-70%**	**65-70%**	**71-80%**	**71-80%**	**71-80%**	**6,0**			
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	*Jumlah Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM*	*2 Standar Norma dan Setting*	*2 Standar Norma dan Setting*	*2 Standar Norma dan Setting*	*2 Standar Norma dan Setting*	*2 Standar Norma dan Setting*	*6,0*	*Pusat*		*Komnas HAM*
PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	**Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas***	**70**	**75**	**80**	**85**	**85**	**14.765,8**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.22

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	**50**	**60**	**70**	**80**	**85**				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	**30**	**35**	**45**	**55**	**70**				
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	**Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**264,4**			
	Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	**65**	**80**	**95**	**100**	**100**				
	Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	**37**	**49**	**61**	**73**	**85**				
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**				
ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	**Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN**	**-**	**-**	**-**	**87 K/L**	**34 Provinsi 100 Kab/Kota**	**146,9**			
Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	*Jumlah Data ASN Terpilah*	*1 Database*	*-*	*-*	*-*	*-*	*10,5*	*Pusat*		*BKN*
Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	*Jumlah dokumen gap analysis*	*1 dokumen*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5,0*	*Pusat*		*LAN*
Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	*Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional*	*-*	*1 Dokumen*	*-*	*-*	*-*	*5,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional	*Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional*	*-*	*-*	*1 Dokumen*	*-*	*-*	*5,0*	*Pusat*		*LAN*
Sistem Talent Pool ASN Nasional	*Jumlah Sistem Talent Pool JPT Nasional*	*-*	*-*	*-*	*1 Upgrade Sistem*	*-*	*3,0*	*Pusat*		*BKN*
Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	*Jumlah Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)*	*1 Sistem*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,5*	*Pusat*		*LAN*
Pemetaan kompetensi ASN melalui Assesment Center	*Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center*	*2000 Orang*	*100% jumlah JPT dan JA terpetakan kompetensinya*	*-*	*-*	*-*	*8,8*	*Pusat/Daerah*		*BKN*
Penerapan sekolah kader ASN	*Jumlah lulusan sekolah kader ASN*	*-*	*100 Peserta*	*100 Peserta*	*100 Peserta*	*100 Peserta*	*83,1*	*Pusat*		*LAN*
Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir Nasional	*Jumlah Instansi Pemerintah*	*3*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*18,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.23

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Manajemen Talenta ASN	*Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN*	*-*	*-*	*-*	*89 K/L*	*34 Provinsi 100 Kab/Kota*	*7,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	**Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas**	**54 IP**	**108 IP**	**162 IP**	**216 IP**	**270 IP**	**117,5**			
Skenario model kesejahteraan ASN (insentif untuk ASN High Performance, insentif untuk ASN di daerah 3T dan risiko tinggi)	*Laporan rekomendasi kebijakan*	*3 Kajian*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,2*	*Pusat*		*LAN*
Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	*Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi*	*72 IP*	*137 IP*	*137 IP*	*137 IP*	*138 IP*	*15,3*	*Pusat*		*BKN*
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	*Jumlah kebijakan*	*-*	*1 kebijakan*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Kebijakan/peraturanpelaksanaan PP pensiun ASN	*Jumlah kebijakan*	*-*	*1 kebijakan*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Kebijakan insentif untuk ASN High Performance, di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	*Jumlah kebijakan insentif untuk ASN di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi*	*-*	*-*	*1 Kebijakan*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	*Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit*	*73 IP*	*637 IP*	*637 IP*	*637 IP*	*637 IP*	*28,8*	*Pusat/Daerah*		*KASN*
Pembinaan Penerapan Sistem Merit	*Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit*	*67 IP*	*70 IP*	*70 IP*	*70 IP*	*70 IP*	*7,3*	*Pusat/Daerah*		*KASN*
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah*	*1500 Rekomendasi*	*1750 Rekomendasi*	*2000 Rekomendasi*	*2250 Rekomendasi*	*2500 Rekomendasi*	*11,0*	*Pusat/Daerah*		*KASN*
Penyusunan kebijakan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	*Jumlah kebijakan*	*4 Kebijakan*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,6*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Piloting penerapan sistem mananjemen kinerja	*Jumlah IP yang di-ujicoba penerapan sistem manajemen kinerja*	*7 IP Pusat 10 IP Daerah*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,9*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN	*Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019 menggunakan sistem informasi kinerja*	*25 IP*	*204 IP*	*204 IP*	*202 IP*	*-*	*15,0*	*Pusat/Daerah*		*BKN*
Kebijakan penataan jabatan fungsional	*Jumlah kebijakan*	*1 kebijakan*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	*Jumlah Rekomendasi*	*1 Rekomendasi*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*LAN*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.24

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	*Jumlah Kebijakan/modul/pedoman*	-	*2 kebijakan/ modul/ pedoman*	-	-	-	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*LAN*
Kebijakan Smart Office	*Jumlah Kebijakan*	*1 Kebijakan*	-	-	-	-	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pemetaan Integritas ASN	*Jumlah ASN yang mengisi survey integritas*	*428000*	-	-	-	*428000*	*2,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyusunan kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	*Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku*	*1 Peraturan Pemerintah*	-	-	-	-	*1,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN	*Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN*	*1 Permenpan*	-	-	-	-	*0,3*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyusunan kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN	*Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN*	*1 Perpres*	-	-	-	-	*0,3*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pengembangan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart	*Jumlah Kebijakan/modul/pedoman*	-	*1 kebijakan/ modul/ pedoman*	-	-	-	*1,0*	*Pusat*		*LAN*
Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	*Jumlah Kebijakan*	-	*1 Perpres*	-	-	-	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	*Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku*	*270 IP*	*390 IP*	*510 IP*	*630 IP*	*719 IP*	*19,3*	*Pusat*		*KASN*
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN*	*200 Rekomendasi*	*200 Rekomendasi*	*200 Rekomendasi*	*200 Rekomendasi*	*200 Rekomendasi*	*5,5*	*Daerah*		*KASN*
KP : Transformasi pelayanan publik	**Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik**	**135**	**142**	**150**	**157**	**164**	**166,7**			
Prop : Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	**1. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Pusat 2. Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 Portal**	**11,0**			
Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan)	*Jumlah sektor layanan strategis yang direview/dipetakan*	-	*2 sektor layanan strategis*	-	-	-	*1,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	*Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP*	-	*2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)*	-	-	-	*2,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat pusat	*Jumlah sektor pelayanan publik straategis yang distandarisasi proses bisnisnya*	*-*	*1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat*	*1 sektor pelayanan*	*1 sektor pelayanan*	*-*	*3,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pembangunan portal pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	*Jumlah portal pelayanan publik*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 portal*	*5,0*	*Pusat/Daerah*		*Kemen Kominfo*
Prop : Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	**Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik**	**135**	**142,0**	**150,0**	**157,0**	**164,0**	**103,1**			
Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-SP4N	*Prosentase laporan pengaduan yang diselesaikan*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*	*90%*	*8,3*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling)	*Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan*	*6000*	*6300*	*6600*	*6800*	*7000*	*90,8*	*Pusat/Daerah*		*OMBUDSMAN RI*
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	*Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional*	*-*	*1 indeks*	*1 indeks*	*1 indeks*	*1 indeks*	*4,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Prop : Penguatan ekosistem inovasi	**Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**36,6**			
Pembangunan hub (pusat pengetahuan) inovasi pelayanan publik	*Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi*	*50 inovasi*	*50 inovasi*	*50 inovasi*	*50 inovasi*	*50 inovasi*	*5,0*	*Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah	*Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penerapan replikasi inovasi daerah*	*34 provinsi*	*34 provinsi*	*34 provinsi*	*34 provinsi*	*34 provinsi*	*25,0*	*Daerah*		*Kemendagri*
Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik	*Jumlah lab inovasi pelayanan publik*	*4 Daerah*	*4 Daerah*	*4 Daerah*	*4 Daerah*	*4 Daerah*	*6,6*	*Daerah*		*LAN*
Prop : Penguatan pelayanan terpadu	**Jumlah Mal Pelayanan Publik di Kota Besar/Sedang/KEK**	**9 MPP**	**9 MPP**	**9 MPP**	**9 MPP**	**9 MPP**	**16,0**			
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Integrasi Data, Proses, dan Standar Pelayanan MPP	*Jumlah kebijakan integrasi data, proses, dan standar pelayanan MPP*	*1 Perpres*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	*Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK*	*9 Kab/Kota*	*9 Kab/Kota*	*9 Kab/Kota*	*9 Kab/Kota*	*9 Kab/Kota*	*15,0*	*Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.26

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
KP : Penataan kelembagaan dan proses bisnis	**Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas**	**70**		**80**		**100**	**13.659,9**			
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	**50**		**60**		**80**				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	**20**		**30**		**50**				
Prop : Penataan kelembagaan	**Jumlah instansi pemerintah yang tata kelembagaannya**	**23**	**21**	**21**	**21**	**21**	**75,9**			
Kebijakan penataan eselonisasi	*Jumlah kebijakan penataan eselonisasi*	*1 PermenPAN*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,3*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penataan kelembagaan bidang polhukam	*Jumlah K/L yang ditata*	*8 K/L*	*6 K/L*	*6 K/L*	*6 K/L*	*6 K/L*	*19,6*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penataan kelembagaan bidang perekonomian dan kemaritiman	*Jumlah K/L yang ditata*	*8 K/L*	*8 K/L*	*8 K/L*	*8 K/L*	*8 K/L*	*22,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penataan kelembagaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	*Jumlah K/L yang ditata*	*7 K/L*	*7 K/L*	*7 K/L*	*7 K/L*	*7 K/L*	*16,5*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang polhukam	*Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis*	*8 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*4,9*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman	*Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis*	*18 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5,4*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	*Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis*	*8 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*5 IP*	*4,7*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah	*Jumlah rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah*	*-*	*-*	*-*	*1 rancangan arsitektur*	*1 arsitektur*	*2,5*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Prop : Penerapan SPBE terintegrasi	**- Integrasi portal pelayanan publik - Integrasi portal administrasi pemerintahan**					**1 portal**	**13.584,0**			
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional	*Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional*	*1 Perpres*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1,8*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	*Jumlah Portal arsitektur SPBE*	*-*	*1 Portal*	*-*	*-*	*-*	*5,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyusunan Undang-Undang SPBE	*Jumlah UU SPBE*	*-*	*1 NA*	*1 RUU*	*1 RUU*	*1 UU*	*11,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.27

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan kebijakan tatakelola pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE	*Jumlah Permen PAN*	*1. PermenPAN RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Evaluasi SPBE*	*1. PermenPAN RB tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur SPBE 2. PermenPAN RB tentang Pedoman SDM SPBE*	*1. PermenPAN RB tentang Pedoman Manajemen Perubahan 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Proses Bisnis*	-	-	*4,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penyusunan kebijakan manajemen data dan informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	*Jumlah Permen PPN*	*1 Permen PPN tentang Manajemen Data dan Informasi*	-	-	-	-	*1,0*	*Pusat*		*Kemen PPN/Bappenas*
Penyusunan kebijakan infrastruktur dan aplikasi SPBE	*Jumlah Peraturan Menteri Kominfo yang mendukung implementasi SPBE*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*20,0*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Penyusunan kebijakan Manajemen Pengetahuan implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	*Jumlah Perka BPPT*	*3 Perka*	-	-	-	-	*1,0*	*Pusat*		*BPPT*
Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi di Pusat dan Daerah	*Jumlah Sistem Terintegrasi*	*Tersedianya aplikasi umum Perencanaan dan Penganggaran*	*Integrasi internal pemerintah daerah*	*Integrasi antara Kab/Kota dengan provinsi*	*Integrasi desa dengan kab/kota*	*Integrasi sistem tingkat pusat*	*10,0*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	*Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi*	*1 Sistem*	-	-	-	-	*10,7*	*Pusat*		*BPPT*
Penerapan e-Arsip terintegrasi	*Jumlah Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi*	*75 Instansi*	*167 Instansi*	*171 Instansi*	*168 Instansi*	*122 Instansi*	*25,9*	*Pusat/Daerah*		*Arsip Nasional*
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	*Jumlah penyediaan data center nasional*	*1 paket sewa cloud dan persiapan lahan*	*konstruksi*	*2 data center*	*konstruksi tambahan 2 data center*	*4 data center (kumulatif)*	*6.996,0*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanan Pengadaan	*Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanan Pengadaan*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*17,5*	*Pusat*		*LKPP*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Monev Pengadaan	*Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Monev Pengadaan*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*1 sistem*	*15,7*	*Pusat*		*LKPP*
Pengembangan SPSE Terpusat	*Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat*	*10 LPSE*	*150 LPSE*	*300 LPSE*	*450 LPSE*	*600 LPSE*	*465,3*	*Pusat dan Daerah*		*LKPP*
	Terselenggaranya jalur komunikasi yang berkualitas dan aman dalam penyelenggaran layanan SPBE	*Akses yang memadai bagi penyelenggaraan aplikasi umum*	*Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 100.000 ASN*	*Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 500 ribu ASN*	*Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 1 juta ASN*	*Jaringan Intra Pemerintah berbasis seluler bagi 4 juta ASN*	*5.930,0*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Persentase terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*20,0*	*Pusat*		*Kemen Kominfo*
Pembangunan Portal Data Nasional	*Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional*	*-*	*-*	*-*	*1 Data Terintegrasi*	*1 Data Terintegrasi*	*5,1*	*Pusat*		*KEMEN PPN/ BAPPENAS*
Audit Infrastruktur SPBE	*Terlaksanakannya audit infrastruktur nasional SPBE*	*1 Perangkat alat bantu/tools audit aplikasi*	*1 Perangkat alat bantu/tools audit infratsruktur*	*1 Audit Infrastruktur Nasional*	*1 Audit Infrastruktur Nasional*	*1 Audit Infrastruktur Nasional*	*44,0*	*Pusat*		*BPPT*
Audit Aplikasi Umum SPBE	*Terlaksanakannya audit aplikasi umum SPBE*	*-*	*4 Audit Aplikasi Umum*	*4 Audit Aplikasi Umum*	*4 Audit Aplikasi Umum*	*4 Audit Aplikasi Umum*	*0,0*	*Pusat*		*BPPT*
KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	**Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**674,8**			
	Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**				
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	**77**	**80**	**82**	**83**	**85**				
	Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**				
	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	**94**	**96**	**98**	**100**	**100**				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	**85**	**87**	**90**	**100**	**100**				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	**50**	**55**	**65**	**75**	**80**				
Prop : Perluasan implementasi sistem integritas	**Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis**	**100 WBK/ WBBM**	**100 WBK/ WBBM**	**120 WBK/ WBBM**	**140 WBK/ WBBM**	**160 WBK/ WBBM**	**39,8**			
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	*Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM*	*495 Unit Kerja*	*1000 Unit Kerja*	*1200 Unit Kerja*	*1400 Unit Kerja*	*1600 Unit Kerja*	*39,8*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Prop : Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	**Persentase Intansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3**	**- K/L =20,69% - Prov = 5% - Kab/Kota = 5%**	**-K/L = 42,53% - Prov = 15% - Kab/Kota = 10%**	**- K/L = 56,32% - Prov = 30% - Kab/Kota = 15%**	**- K/L = 68,97% - Prov = 40% - Kab/Kota = 25%**	**- K/L = 79,31% - Prov = 62% - Kab/Kota = 39%**	**602,0**			
	Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**35%**	**40%**	**45%**	**50%**	**55%**				
	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas	**94**	**96**	**98**	**100**	**100**				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas	**85**	**87**	**90**	**100**	**100**				
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas	**50**	**55**	**65**	**75**	**80**				
Penguatan tim pengelola RB Nasional	*Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*12,8*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Penguatan tim pengelola RB Daerah	*Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah*	*-*	*34*	*34*	*34*	*34*	*49,0*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko	*Jumlah kebijakan/pedoman pelaksanaan manajemen resiko*	*1 Kebijakan*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2,3*	*Pusat*		*BPKP*
Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian/Lembaga	*Jumlah Kementerian/Lembaga dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5*	*K/L = 18 IP (20,69%)*	*K/L = 37 IP (42,53%)*	*K/L = 49 IP (56,32%)*	*K/L = 60 IP (66,97%)*	*K/L = 69 IP (79,31%)*	*60,8*	*Pusat*		*BPKP*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Manajemen Risiko di Provinsi	*Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5*	*Provinsi = 2 IP (5%)*	*Provinsi = 6 IP (15%)*	*Provinsi = 10 IP (30%)*	*Provinsi = 14 IP (40%)*	*Provinsi = 23 IP (62%)*	*15,6*	*Daerah*		*BPKP*
Penerapan Manajemen Risiko di Kab/Kota	*Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5*	*Kab/kota = 25 IP (5%)*	*Kab/Kota = 51 IP (10%)*	*Kab/Kota = 76 IP (15%)*	*Kab/Kota = 127 IP (25%)*	*Kab/Kota = 200 IP (39%)*	*132,9*	*Daerah*		*BPKP*
Penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)	*Jumlah Badan Usaha dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5*	*355 BU (16.74%)*	*419 BU (19.75%)*	*524 BU (24.71%)*	*622 BU (29.33%)*	*741 BU (34.94%)*	*182,4*	*Pusat dan Daerah*		*BPKP*
Monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	*Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas Level 3*	*100 UKPBJ*	*350 UKPBJ*	*350 UKPBJ*	*350 UKPBJ*	*350 UKPBJ*	*11,1*	*Pusat/Daerah*		*LKPP*
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	*Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*	*616 IP*	*275 IP*	*245 IP*	*195 IP*	*135 IP*	*10,2*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	*Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*	*616 IP*	*625 IP*	*625 IP*	*625 IP*	*625 IP*	*40,0*	*Pusat/Daerah*		*KEMEN PAN DAN RB*
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	*Jumlah Instansi Pemerintah yang diriviu Perencanaan Kinerjanya*	*-*	*12 IP*	*30 IP*	*30 IP*	*30 IP*	*1,8*	*Pusat*		*KEMEN PAN DAN RB*
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	*Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas*	*K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prov/Kab/Kota*	*K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota*	*K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prov/Kab/Kota*	*K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota*	*K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota*	*76,0*	*Pusat*		*Arsip Nasional*
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	*Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti*	*75 Rekomendasi*	*121 Rekomendasi*	*121 Rekomendasi*	*121 Rekomendasi*	*122 Rekomendasi*	*7,2*	*Pusat*		*Arsip Nasional*
Prop : Penguatan perencanaan dan penganggaran	**Persentase Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pamantauan, Evaluasi, dan Audit**	**20**	**40,0**	**60,0**	**80,0**	**100,0**	**33,0**			
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	*Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat*	*75*	*100*	*-*	*-*	*-*	*21,0*	*Pusat*		*Kemen PPN/Bappenas*
	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	*50*	*75*	*100*	*-*	*-*	*0,0*	*Daerah*		*Kemen PPN/Bappenas*
	Persentase Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	*25*	*50*	*75*	*100*	*-*	*0,0*	*Pusat dan Daerah*		*Kemen PPN/Bappenas*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.31

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	*Jumlah Fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*12,0*	*Pusat*		*Kemen PPN/Bappenas*
PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	**Global Fire Power Index**	**0,26**	**0,25**	**0,24**	**0,22**	**0.20**	**292.853,8**			
	Global Terorism Index	**4.44**	**4.39**	**4.34**	**4.29**	**4.24**				
	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	**>55%**	**>55%**	**>55%**	**>60%**	**>60%**				
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,3**	**3,4**				
KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri	**Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)**	**38.24**	**38.14**	**38.00**	**37.90**	**37.80**	**11.169,5**			
	Indeks Risiko Terorisme (Target)	**54,46**	**54.36**	**54.26**	**54.16**	**54.00**				
	Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	**300**	**<300**	**<250**	**<200**	**<150**				
	Angka Kejadian Konflik	**55 Kejadian**	**50 Kejadian**	**45 Kejadian**	**40 Kejadian**	**35 Kejadian**				
	Angka Korban Pengungsi Internal	**≤16.000 Orang**	**≤15.500 Orang**	**≤15.000 Orang**	**≤14.500 Orang**	**≤14.000 Orang**				
ProP : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	**Clearance Rate Terorisme**	**75%**	**75%**	**77%**	**79%**	**80%**	**3.241,6**			
	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.		**187 Kegiatan**	**187 Kegiatan**	**187 Kegiatan**	**187 Kegiatan**				
	Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme		**134 Kegiatan**	**139 Kegiatan**	**141 Kegiatan**	**144 Kegiatan**				
	Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme	**38 Institusi**	**40 Institusi**	**44 Institusi**	**48 Institusi**	**50 Institusi**				
Penanganan Kasus Terorisme	*Jumlah Kasus Terorisme yang Ditangani*	*-*	*17 Kasus*	*20 Kasus*	*22 Kasus*	*25 Kasus*	*2.147,4*	*Pusat*		*POLRI*
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	*Jumlah kegiatan identifikasi dan sosialisasi Tindak Pidana Terorisme*	*-*	*157 Kegiatan*	*160 Kegiatan*	*162 Kegiatan*	*165 Kegiatan*	*102,0*	*Pusat*		*POLRI*
Pencegahan Terorisme	*Jumlah Kegiatan Pencegahan Terorisme*	*-*	*50 Kegiatan*	*55 Kegiatan*	*57 Kegiatan*	*60 Kegiatan*	*102,0*	*Pusat*		*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.32

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	*Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.*	-	*187 Kegiatan*	*187 Kegiatan*	*187 Kegiatan*	*187 Kegiatan*	*196,5*	*Pusat*		*BNPT*
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	*Jumlah Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*	-	*90 Koordinasi*	*93 Koordinasi*	*95 Koordinasi*	*97 Koordinasi*	*49,6*	*Pusat*		*BNPT*
Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	*Jumlah Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)*	-	*32 FKPT*	*32 FKPT*	*32 FKPT*	*32 FKPT*	*132,3*	*Pusat*		*BNPT*
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	*Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi*	-	*3 Wilayah*	*3 Wilayah*	*3 Wilayah*	*3 Wilayah*	*44,7*	*Pusat*		*BNPT*
Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	*Jumlah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme*	*1 Wilayah*	*1 Wilayah*	*1 Wilayah*	*1 Wilayah*	*1 Wilayah*	*30,4*	*Pusat*		*BNPT*
Kegiatan Kontra Radikalisasi	*Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi*	-	*48 Operasi*	*48 Operasi*	*48 Operasi*	*48 Operasi*	*192,6*	*Pusat*		*BNPT*
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	*Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional*	-	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*6,5*	*Pusat*		*BNPT*
Operasi Intelijen Kontra Teorisme	*Jumlah operasi intelijen terorisme*	*3670 Laporan*	*2898 Laporan*	*2999 Laporan*	*3104 Laporan*	*3104 Laporan*	*101,5*	*Pusat*		*BIN*
Operasi intelijen separatisme	*Jumlah operasi intelijen separatisme*	*5528 Laporan*	*5528 Laporan*	*5528 Laporan*	*5528 Laporan*	*5528 Laporan*	*76,5*	*Pusat*		*BIN*
Bekas Warga Binaan Pemasyarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	*Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial*	*50 Jiwa*	*50 Jiwa*	*50 Jiwa*	*50 Jiwa*	*50 Jiwa*	*5,6*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	*Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme (Jiwa)*	*10000 Jiwa*	*10000 Jiwa*	*10000 Jiwa*	*10000 Jiwa*	*10000 Jiwa*	*54,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
ProP : Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	**Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang mendapat Pengamanan**	**-**	**2229**	**2179**	**2129**	**2079**	**2.808,0**			
Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	*Jumlah Obyek Vital yang mendapat Pengamanan*	-	*861 Obyek Vital*	*911 Obyek Vital*	*961 Obyek Vital*	*1011 Obyek Vital*	*1.404,0*	*Pusat dan daerah*		*POLRI*
Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	*Jumlah Target Rentan yang Mendapat Pengamanan*	-	*234 Target Rentan*	*234 Target Rentan*	*234 Target Rentan*	*234 Target Rentan*	*1.404,0*	*Pusat dan daerah*		*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.33

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	**Jumlah Pos Pamtas, Posal, Pos Pol SubSektor dan PLBN yang dibangun**	**PLBN : 18 Unit Pos Pamtas: 12 Pos Pos AL: 15 Pos**	**Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 20 Unit Pos Pamtas: 8 Pos Pos AL: 16 Pos**	**Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 22 Unit Pos Pamtas: 9 Pos Pos AL: 16 Pos**	**Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 24 Unit Pos Pamtas: 7 Pos Pos AL: 16 Pos**	**Pos PolSubSektor: 9 Unit PLBN : 26 Unit Pos Pamtas: 7 Pos Pos AL: 16 Pos**	**4.165,3**			
	Panjang Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	**200 Km**	**200 Km**	**200 Km**	**200 Km**	**200 Km**				
	Jumlah Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam	**180 orang**	**180 orang**	**180 orang**	**180 orang**	**180 orang**				
	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan Sarana Prasarana Pertahanan dan Keamanannya	**36 PPKT**	**41 PPKT**	**49 PPKT**	**49 PPKT**	**49 PPKT**				
Pembangunan Pos Pamtas	*Jumlah Pos Pamtas yang dibangun*	*12 Pos*	*8 Pos*	*9 Pos*	*7 Pos*	*7 Pos*	*110,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan Pos AL	*Jumlah pos AL yang dibangun*	*15 Pos*	*16 Pos*	*16 Pos*	*16 Pos*	*16 Pos*	*300,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan	*Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan yan diabngun*	*-*	*9 Unit*	*9 Unit*	*9 Unit*	*9 Unit*	*28,8*	*Daerah*		*POLRI*
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	*Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun*	*10 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2.700,0*			*Kemen PU&PERA*
Pembangunan JIPP	*Panjang JIPP*	*200 Km*	*200 Km*	*200 Km*	*200 Km*	*200 Km*	*1.016,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam	*Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang difasilitasi pemberdayaan*	*180 orang*	*180 orang*	*180 orang*	*180 orang*	*180 orang*	*5,5*	*Pusat*		*BNPP*
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	*Jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk*	*36 PPKT*	*41 PPKT*	*49 PPKT*	*49 PPKT*	*49 PPKT*	*5,0*	*Pusat*		*BNPP*
ProP : Penanganan Konflik Secara Humanis	**Tertanggulanginya Potensi Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten**	**27 Kasus**	**25 Kasus**	**23 Kasus**	**21 Kasus**	**19 Kasus**	**411,2**			
	Jumlah Anggota Satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	**-**	**15.338 Orang**	**15.846 Orang**	**16.379 Orang**	**16.885 Orang**				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Brigade Mobil	*Jumlah anggota satuan Brigade Mobil yang mendapatkan pelatihan Harkatpuan dalam Penanganan Konflik Secara Humanis*	-	*10.168 Orang*	*10.676 Orang*	*11.209 Orang*	*11.715 Orang*	*42,7*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Samapta Baharkam	*Jumlah anggota Satuan Samapta yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis*	-	*170 Orang*	*170 Orang*	*170 Orang*	*170 Orang*	*5,2*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Binmas	*Jumlah anggota Satuan Binmas yang mendapatkan Peningkatan kemampuan personel Korbinmas*	-	*5.000 Orang*	*5.000 Orang*	*5.000 Orang*	*5.000 Orang*	*20,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif*	*61%*	*62%*	*63%*	*64%*	*65%*	*33,8*	*Pusat dan Daerah*		*Kemendagri*
Deteksi Dini oleh Aparat Pusat dan Daerah	*Jumlah aparatur pusat dan daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar*	*200 Orang*	*220 Orang*	*240 Orang*	*260 Orang*	*280 Orang*	*8,5*	*Pusat dan Daerah*		*Kemendagri*
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	*Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial*	*43018 Jiwa*	*44000 Jiwa*	*44000 Jiwa*	*44000 Jiwa*	*44000 Jiwa*	*301,0*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
ProP : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	**Jumlah Korban Bencana yang Diselamatkan**	**120.000 Orang**	**120.000 Orang**	**120.000 Orang**	**120.000 Orang**	**120.000 Orang**	**543,4**			
Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	*Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana*	-	*6 Kegiatan*	*6 Kegiatan*	*6 Kegiatan*	*6 Kegiatan*	*375,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh	*Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*4,9*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korpolair	*Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*4,9*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh	*Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana*	-	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*4,9*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	*Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar*	*120000 Jiwa*	*121000 Jiwa*	*121000 Jiwa*	*121000 Jiwa*	*121000 Jiwa*	*153,8*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	**Pemenuhan MEF**	**72%**	**79%**	**86%**	**93%**	**100%**	**186.623,3**			
	Persentase Kontribusi Industri Pertahanan	**≥50%**	**≥50%**	**≥50%**	**≥50%**	**≥50%**				
ProP : Pengadaan Alutsista	**Jenis Alutsista yang diadakan**	**30 Jenis**	**60 Jenis**	**59 Jenis**	**59 Jenis**	**59 Jenis**	**105.713,7**			
Alutsista Strategis Luar Negeri	*Jenis Alutsista Strategis Luar Negeri yang diadakan*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*66.273,8*	*Pusat*		*Kemenhan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.35

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista Strategis Luar Negeri untuk Pertahanan Laut Natuna	*Jenis Alutsista Pertahanan Laut Natuna yang diadakan*		*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*8.264,4*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Kemenhan*
Alutsista Mabes TNI	*Jenis Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*797,9*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista Mabes TNI	*Jenis munisi kaliber kecil Mabes TNI yang diadakan*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*506,9*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista Mabes TNI	*Jenis munisi khusus Mabes TNI yang diadakan*		*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*51,4*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista Mabes TNI	*Jenis munisi kaliber besar Mabes TNI yang diadakan*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*1 Jenis*	*428,8*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista Mabes TNI	*Jenis senjata Mabes TNI yang diadakan*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*366,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AD	*Jenis kendaraan tempur TNI AD yang diadakan*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*1.567,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AD	*Jenis pesawat terbang TNI AD yang diadakan*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*1.219,5*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AD	*Jenis senjata TNI AD yang diadakan*		*9 Jenis*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*1.100,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AL	*Jenis senlek dan amunisi TNI AL yang diadakan*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*3.497,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AL	*Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL yang diadakan*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*15.400,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AL	*Jenis pesud TNI AL yang diadakan*	-	*4 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*1.841,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AU	*Jenis pesawat udara/pendukungnya TNI AU yang diadakan*	-	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*1.200,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AU	*Jenis Radar, Psu dan Alat Komlek TNI AU yang diadakan*	-	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*1.200,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AU	*Jenis Senri/Senrat TNI AU yang diadakan*	-	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*2.000,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
ProP : Pemeliharaan dan perawatan alutsista	**Jenis Alutsista dengan Persentase Pemenuhan Norma Harwat 100%**	**41 Jenis**	**49 Jenis**	**49 Jenis**	**49 Jenis**	**49 Jenis**	**49.225,5**			
Alutsista TNI AD	*Jenis kendaraan tempur TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*1.175,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AD	*Jenis pesawat terbang TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*826,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AD	*Jenis senjata dan munisi/alpal TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*9 Jenis*	*1.824,5*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AL	*Jenis senlek dan amunisi TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*		*8 Jenis*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*8 Jenis*	*166,0*	*Pusat*		*Kemenhan*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AL	*Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*16.000,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AL	*Jenis pesud TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*6 Jenis*	*950,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AU	*Jenis pesawat udara, senjata, dan almatsus TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*13 Jenis*	*13 Jenis*	*13 Jenis*	*13 Jenis*	*13 Jenis*	*25.000,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Alutsista TNI AU	*Jenis radar, PSU, dan alat komlek TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3 Jenis*	*3.284,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
ProP : Pembangunan sarana-prasarana pertahanan	**Jumlah M2 pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan**	**88000**	**118000**	**121000**	**126000**	**129000**	**8.431,0**			
Pembangunan Sarpras Mabes TNI	*Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI*		*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*425,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan Sarpras TNI AD	*Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD*	*68000*	*88000*	*91000*	*96000*	*99000*	*4.000,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan Sarpras TNI AL	*Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*1.793,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna	*Jumlah Paket Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna*		*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*226,0*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Kemenhan*
Pembangunan Sarpras TNI AU	*Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*1.987,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	**Unit Rumah Dinas**	**1055 unit**	**2410 unit**	**3030 unit**	**3645 unit**	**3796 unit**	**8.093,0**			
	Jumlah Rumah Sakit meningkat Akreditasinya		**9 Unit**	**9 Unit**	**9 Unit**	**5 Unit**				
Pembangunan Rumah Negara Mabes TNI	*Jumlah Negara Rumah Negara Mabes TNI yang dibangun*	-	*22*	*40*	*55*	*56*	*90,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AD	*Jumlah Negara Rumah Negara TNI AD yang dibangun*	*693*	*1938*	*2090*	*2240*	*2390*	*5.729,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AL	*Jumlah Negara Rumah Negara TNI AL yang dibangun*	*215*	*300*	*600*	*900*	*900*	*640,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan dan Rehab Rumah Negara TNI AU	*Jumlah Negara Rumah Negara TNI AU yang dibangun*	*147*	*150*	*300*	*450*	*450*	*334,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	*Jumlah RS TNI AD yang di-Upgrade*	-	*5 Unit (Tahap 1)*	*5 Unit (Tahap 2)*	*5 Unit (Tahap 3)*	*5 Unit (Tahap 4)*	*600,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	*Jumlah RS TNI AL yang di-Upgrade*	-	*2 Unit (Tahap 1)*	*2 Unit (Tahap 2)*	*2 Unit (Tahap 3)*	-	*350,0*	*Pusat*		*Kemenhan*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.37

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU	*Jumlah RS TNI AU yang di-Upgrade*	-	*2 Unit (Tahap 1)*	*2 Unit (Tahap 2)*	*2 Unit (Tahap 3)*	-	*350,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
ProP : Pembangunan Pertahanan Siber	**Jumlah Sistem Siber Pertahanan**	**-**	**5 Sistem**	**5 Sistem**	**5 Sistem**	**5 Sistem**	**2.361,0**			
Pengembangan Sistem Pertahanan Siber	*Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan*	-	*6 sistem*	*3 sistem*	*2 sistem*	*3 sistem*	*55,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber	*presentase peningkatan kualitas jaringan*	-	*100%*	-	-		*65,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)	*Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan*	-	*1 pangkalan*	-	-	*1 pangkalan*	*64,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber	*Jumlah sub sistem dari Server Data Center*	-	*11 unit*	-	-	-	*2,5*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber	*waktu analisa ancaman/ serangan siber*	-	*15 menit*	-	-	-	*125,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber	*Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive*	-	*20 offensive dan 12 defensive*	-	-	-	*100,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	*Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT*	-	*3 paket*	-	-	-	*40,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pengadaan Anti Drone	*Jumlah Peralatan Anti Drone*	-	-	*1 paket*	-	-	*2,5*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber	*Jumlah SDM TIK Bidang Siber*	-	*100 lulusan*	*100 lulusan*	*100 lulusan*	*100 lulusan*	*52,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI	*Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI*	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*400,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD	*Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD*	-	*1 Sistem*	*18 Sistem*	*18 Sistem*	*18 Sistem*	*655,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AL	*Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AL*	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*400,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	*Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU*	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*400,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*Kemenhan*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	**Jenis Alpalhankam yang dikembangkan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**12.799,1**			
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan	*Jenis Alpalhan yang diadakan*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*4 Jenis*	*7.709,1*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan untuk Pertahanan Laut Natuna	*Jenis Alpalhan yang diadakan untuk Pertahanan Laut Natuna*		*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2 Jenis*	*2.760,0*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Kemenhan*
Propelan	*Terbangunnya Sarana Produksi Propelan*	*Tahap 1*	*Tahap 2*	*Tahap 3*	*Tahap 4*	*Tahap 5*	*2.150,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
IPTEKHAN bidang daya tempur	*Prototipe*	*-*	*Tahap 2*	*Tahap 3*	*Tahap 4*	*Tahap 5*	*180,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
KP : Penguatan Keamanan Laut	**Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut**	**285 Kasus**	**265 Kasus**	**246 Kasus**	**224Kasus**	**202 Kasus**	**11.647,6**			
ProP : Penguatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini Terpadu	**Relay Time**	**300 menit**	**240 menit**	**180 menit**	**120 menit**	**60 menit**	**480,0**			
Pembelian data AIS satelit	*Jumlah data AIS satelit yang dibeli*	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	*20,0*	*Pusat*		*Bakamla*
Sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna	*Jumlah sistem peringatan dini*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*460,0*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Bakamla*
ProP : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	**Persentase Cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing**	**54%**	**60%**	**65%**	**70%**	**75%**	**10.023,6**			
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Matra Laut	*Jumlah operasi*	*-*	*20 operasi*	*20 operasi*	*20 operasi*	*20 operasi*	*1.200,0*	*Pusat*		*Kemenhan*
Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut	*Jumlah kapal Patroli Keamanan Laut*	*-*	*2 Unit (Tahap 1)*	*2 Unit (Tahap 2)*	*2 Unit (tahap 3)*	*-*	*500,0*	*Pusat*		*Bakamla*
Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut	*Jumlah senjata yang Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut*	*332 Pucuk*	*51 Pucuk*	*51 Pucuk*	*51 Pucuk*	*51 Pucuk*	*568,4*	*Pusat*		*Bakamla*
Pengadaan Amunisi	*Jumlah Amunisi yang Diadakan*	*1 Paket*	*-*	*1 Paket*	*-*	*-*	*70,0*	*Pusat*		*Bakamla*
Pengadaan Boat Stopper	*Jumlah Boat Stopper yang diadakan*	*-*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*27,5*	*Pusat*		*Bakamla*
Pengadaan Sarana Prasarana operasi	*Jumlah sarana prasarana operasi yang diadakan*	*-*	*77 Unit*	*-*	*-*	*-*	*15,2*	*Pusat*		*Bakamla*
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	*Jumlah hari operasi keamanan dan keselamatan laut*	*16 Hari Operasi*	*90 Hari Operasi*	*90 Hari Operasi*	*90 Hari Operasi*	*90 Hari Operasi*	*330,8*	*Pusat*		*Bakamla*
Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral	*jumlah kegiatan operasi laut bersama terkoordinasi bilateral*	*5 Operasi*	*6 Operasi*	*6 Operasi*	*6 Operasi*	*6 Operasi*	*76,0*	*Pusat*		*Bakamla*
Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral	*Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral*	*4 Operasi*	*4 Operasi*	*4 Operasi*	*4 Operasi*	*4 Operasi*	*58,7*	*Pusat*		*Bakamla*
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	*Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*69,0*	*Pusat*		*KKP*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional Kapal Pengawas	*Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI*	*150 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*2.470,4*	*Pusat*		*KKP*
Operasional Pesawat Patroli	*Jumlah hari operasi pesawat patroli*	*150 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180 Hari Operasi*	*180,7*	*Pusat*		*KKP*
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	*Jumlah hari operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat*	*50 Hari Operasi*	*50 Hari Operasi*	*50 Hari Operasi*	*50 Hari Operasi*	*50 Hari Operasi*	*279,8*	*Pusat dan Daerah*		*KKP*
Kapal pengawas yang dibangun	*Jumlah kapal pengawas yang dibangun*	*2 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*846,7*	*Pusat*		*KKP*
Speed Boat Pengawas yang dibangun	*Jumlah speedboat pengawas yang dibangun*	*11 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*175,4*	*Pusat*		*KKP*
Armada Pengawasan yang siap operasi	*Jumlah armada pengawasan yang siap operasional*	*103 Unit*	*116 Unit*	*129 Unit*	*142 Unit*	*155 Unit*	*575,0*	*Pusat dan Daerah*		*KKP*
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	*Jumlah bangunan/pos pengawasan yang tersedia*	*18 Unit*	*15 Unit*	*15 Unit*	*15 Unit*	*15 Unit*	*259,0*	*Pusat*		*KKP*
Patroli Wilayah Perbatasan Laut	*Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Perbatasan*	*-*	*366 Jam*	*380 Jam*	*394 Jam*	*408 Jam*	*886,8*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Patroli Wilayah Selat Malaka	*Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Selat Malaka*	*-*	*1.088 Jam*	*1.123 Jam*	*1.158 Jam*	*1.193 Jam*	*868,8*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Operasi Keamanan Perairan	*Jumlah Operasi Keamanan Perairan*	*-*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*90,4*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna	*Jumlah Kapal*			*1 unit (20%)*	*1 unit (60%)*	*1 unit (100%)*	*450,0*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Bakamla*
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna	*Jumlah UAV*		*4 unit (tahap 1)*	*4 unit (tahap 2)*	*4 unit (tahap 3)*	*4 unit (tahap 4)*	*25,0*	*Pusat*	*Penguatan Keamanan Laut di Natuna*	*Bakamla*
ProP : Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	**Clearance Rate Tindak Pidana Laut**	**75%**	**75%**	**80%**	**80%**	**80%**	**1.144,0**			
Penyelesaian Tindak Pidana di laut	*Jumlah Kasus Keamanan Laut yang Ditangani*	*-*	*119 Kasus*	*131 Kasus*	*144 Kasus*	*158 Kasus*	*572,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing	*Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing yang Ditangani*	*-*	*156 Kasus*	*159 Kasus*	*164 Kasus*	*166 Kasus*	*572,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	**Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika**	**1,86%**	**1,86%**	**1,86%**	**1,69%**	**1,69%**	**77.698,4**			
	Crime Rate	**129 orang / 100.000 penduduk**	**112 orang / 100.000 penduduk**	**112 orang / 100.000 penduduk**	**111 orang / 100.000 penduduk**	**111 orang / 100.000 penduduk**				
	Pelayanan Publik Polri yang Prima	**62%**	**63%**	**64%**	**64%**	**65%**				
ProP : Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	**Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika**	**85%**	**86%**	**87%**	**88%**	**89%**	**564,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.40

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang	**3 Kawasan**	**3 Kawasan**	**3 Kawasan**	**3 Kawasan**	**3 Kawasan**				
Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	*Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika*	*1 Laporan*	-	-	-	-	*2,0*	*Pusat*		*BNN*
Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	*Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika*	*1 Laporan*	-	-	-	-	*4,0*	*Pusat*		*BNN*
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	*Jumlah Laporan Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan*	-	*1 Laporan*	-	-	*1 Laporan*	*4,0*	*Pusat*		*BNN*
Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	*Jumlah Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun*	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	-	-	*100,0*	*Pusat*		*BNN*
Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	*Jumlah Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional*	-	*1 Laboratorium*	*1 Laboratorium*	*1 Laboratorium*	*1 Laboratorium*	*182,7*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dari Luar Negeri	*Jumlah Laporan Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri*	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*	-	-	*4,0*	*Pusat*		*BNN*
Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	*Jumlah Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun*	-	-	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*100,0*	*Pusat*		*BNN*
Operasionalisasi Pos Interdiksi	*Jumlah Pos Interdiksi yang Operasional*	-	*7 Pos*	*9 Pos*	*11 Pos*	*13 Pos*	*58,0*	*Daerah*		*BNN*
Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternative	*Jumlah Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program Alternative Development*	*6 Kawasan*	-	-	-	-	*6,3*	*Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar*		*BNN*
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program Alternative Development	*Jumlah Kawasan yang Beralih ke Tanaman Pengganti (Alternative Development)*	-	*4 Kawasan*	*4 Kawasan*	*4 Kawasan*	*4 Kawasan*	*16,0*	*Daerah*		*BNN*
Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	*Jumlah Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan*	-	*12 Titik*	*12 Titik*	*12 Titik*	*12 Titik*	*29,0*	*Daerah*		*BNN*
Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	*Jumlah Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah*	-	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*25,0*	*Daerah*		*BNN*
Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	*Jumlah Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*	-	*2,6 Ton*	*2,5 Ton*	*2,4 Ton*	*2,3 Ton*	*9,3*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika	*Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika yang Terungkap*	-	*77 Jaringan*	*76 Jaringan*	*75 Jaringan*	*74 Jaringan*	*9,3*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.41

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan Kasus Kejahatan Narkotika	*Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang Ditangani*	-	*38.000 Kasus*	*37.000 Kasus*	*36.000 Kasus*	*35.000 Kasus*	*5,1*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Penanganan Kasus TPPU Terkait Narkotika yang Ditangani	*Jumlah Kasus TPPU terkait Narkotika yang ditangani*	-	*8 Kasus*	*9 Kasus*	*10 Kasus*	*11 Kasus*	*9,3*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
ProP : Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	**Indeks Ketahanan Diri Remaja**	**50,03**	**51**	**52**	**53**	**53,51**	**1.999,7**			
	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika									
	a. Aspek Fisik	**6,0%**	**6,5%**	**7,0%**	**7,5%**	**8,00%**				
	b. Aspek Psikologis	**6,0%**	**6,5%**	**7,0%**	**7,5%**	**8,00%**				
	c. Aspek Hubungan Sosial	**5,0%**	**5,5%**	**6,0%**	**6,5%**	**7,00%**				
	d. Aspek Sumber Daya Lingkungan	**4,0%**	**4,5%**	**5,0%**	**5,5%**	**6,00%**				
	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	**3,07**	**3,1**	**3,13**	**3,16**	**3,2**				
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	*Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi SPM*	*10 Fasilitas*	-	-	-	-	*1,7*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya*	*200 Orang*	-	-	-	-	*2,4*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	*Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial*	*21714 Jiwa*	*25000 Jiwa*	*27000 Jiwa*	*28000 Jiwa*	*30000 Jiwa*	*1.192,6*	*34 Provinsi*		*Kemensos*
Pelayanan rehabilitasi medis bagi pengguna napza	*Jumlah Penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis*	*9500*	*10000*	*10500*	*11000*	*11500*	*108,6*	*34 Provinsi*		*Kemenkes*
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	*Jumlah Pemkab/Pemkot yang diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba*	-	*75 Kabupaten/Kota*	*100 Kabupaten/Kota*	*125 Kabupaten/Kota*	*150 Kabupaten/Kota*	*383,0*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa	*Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa*	*173 Desa*	*346 Desa*	*346 Desa*	*346 Desa*	*346 Desa*	*33,6*	*Daerah*		*BNN*
"Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika yang Terbentuk	*Jumlah "Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika*	-	*1.730 Orang*	*1.730 Orang*	*1.730 Orang*	*1.730 Orang*	*129,3*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bagi SMP & SMU Sederajat	*Jumlah SMP & SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill*	-	*34 Sekolah*	*34 Sekolah*	*34 Sekolah*	*34 Sekolah*	*86,2*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	*Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)*	-	*20 Lembaga*	*20 Lembaga*	*20 Lembaga*	*20 Lembaga*	*13,2*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Pelatihan Kompetensi Teknis Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan	*Jumlah Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi*	-	*225 Orang*	*250 Orang*	*275 Orang*	*300 Orang*	*12,6*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	*Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional*	-	*45 Unit*	*50 Unit*	*55 Unit*	*60 Unit*	*8,4*	*Pusat dan Daerah*		*BNN*
Fasilitasi Pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	*Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif*	*1500*	*1500*	*1500*	*1500*	*1500*	*28,2*	*Pusat*		*Kemenpora*
ProP : Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	**Clearance Rate Tindak Pidana TPPO serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan**	**83%**	**83%**	**84%**	**84%**	**85%**	**129,0**			
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	*Jumlah RPK Sesuai SPM yang Dibangun*	*3 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*69,0*	*Daerah*		*POLRI*
Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	*Penyelesaian Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya yang Ditangani*	-	*83%*	*84%*	*84%*	*85%*	*60,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	**Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian**	**8,1**	**8,2**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**3.677,3**			
	Clearance Rate	**64%**	**64%**	**65%**	**66%**	**67%**				
	Clearance Rate Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan TPPU	**57%**	**58%**	**59%**	**59%**	**60%**				
Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	*Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online*	-	*2 Polres*	*2 Polres*	*2 Polres*	*2 Polres*	*24,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	*Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM*	-	*2 Polsek*	*2 Polsek*	*2 Polsek*	*2 Polsek*	*24,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pembangunan SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	*Jumlah SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online (Gedung BPKB Prototype)*		*5 Polda*	*5 Polda*	*5 Polda*	*5 Polda*	*495,6*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	*Jumlah M2 Sarana Prasarana Layanan Kepolisian*	-	*3000 M2 (40 Unit)*	*3000 M2 (40 Unit)*	*3000 M2 (40 Unit)*	*3000 M2 (40 Unit)*	*48,0*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Penanganan Tindak Pidana Umum	*Penyelesaian Tindak Pidana Umum*	-	*0,64*	*0,65*	*0,66*	*0,67*	*14,5*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU	*Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan dan TPPU*	-	*0,58*	*0,59*	*0,59*	*0,6*	*9,3*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
Pembangunan Command Centre	*Jumlah Command Center yang dibangun*	*5 Lokasi*	*2 Lokasi*	*2 Lokasi*	*2 Lokasi*	*2 Lokasi*	*1.287,0*	*Daerah*		*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.43

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Perangkat Data Center	*Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan*	*42 Unit*	*42 Unit*	*42 Unit*	*42 Unit*	*42 Unit*	*213,1*	*Daerah*		*POLRI*
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen	*Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*727 Unit*	*145,7*	*Daerah*		*POLRI*
Pembangunan SKCK Online	*Jumlah SKCK Online yang dibangun dan di upgrade*	*100 Unit dan 928 upgrade*	*496 upgrade*	*496 upgrade*	*496 upgrade*	*496 upgrade*	*61,2*	*Daerah*		*POLRI*
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	*Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK*	-	*5 Polda*	*5 Polda*	*5 Polda*	*5 Polda*	*304,8*	*Daerah*		*POLRI*
Pembangunan Big Data Polri	*Sistem Single Data Entry Polri*	-	*Tahap 1 (1paket)*	*Tahap 2 (1paket)*	*Tahap 3 (1 paket)*	*Tahap 4 (1 Paket)*	*1.050,0*	*Daerah*		*POLRI*
ProP : Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	**Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian**	**-**	**41 Paket**	**41 Paket**	**41 Paket**	**37 Paket**	**68.561,4**			
	Persentase Almatsus dan Alpalkam Kontribusi Industri Pertahanan	**-**	**25%**	**30%**	**35%**	**40%**				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal*	-	*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*	*5 Paket*	*94,9*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan*	-	*11 Paket*	*11 Paket*	*11 Paket*	*11 Paket*	*50.936,0*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan*	-	*10 Paket*	*10 Paket*	*10 Paket*	*6 Paket*	*1.374,9*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam TIK	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK*	-	*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*792,0*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas*	-	*1 Paket*	*1 Paket*	*1 Paket*	*1 Paket*	*44,7*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil*	-	*10 Paket*	*10 Paket*	*10 Paket*	*10 Paket*	*13.944,0*	*Pusat*		*POLRI*
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	*Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti Teror*	-	*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*1.374,9*	*Pusat*		*POLRI*
ProP : Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	**Jumlah Personel yang Tersertifikasi Diklat Profesional**	**-**	**8.157 Personel**	**9.517 Personel**	**10.876 Personel**	**12.236 Personel**	**2.767,0**			
	Jumlah Unit Pemenuhan Rumah Negara	**16 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**				
	Jumlah Rumah Sakit yang Dibangun/Meningkat Akreditasinya	**-**	**4 Unit**	**3 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**				
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	**76%**	**77%**	**78%**	**79%**	**80%**				
Sertifikasi Profesi Anggota Polri	*Jumlah Anggota yang memiliki Sertifikat Profesi*	-	*500 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	*500 Orang*	*567,0*	*Pusat*		*POLRI*
Pembangunan Rumah Susun	*Jumlah Rumah Susun yang Dibangun*	*16 Unit*	-	-	-	-	*162,9*	*Daerah*		*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.44

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Rumah Negara Polri	*Jumlah Unit Rumah Negara Polri*	-	*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*1.086,0*	*Daerah*		*POLRI*
Pemenuhan Rumah Sakit Polri	*Jumlah Rumah Sakit Polri yang Dibangun dan di Upgrade*	-	*Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit*	*Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 2 Unit*	*Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit*	*Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit*	*800,0*	*Pusat*		*POLRI*
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	*Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri*	-	*77%*	*78%*	*79%*	*80%*	*151,1*	*Pusat dan Daerah*		*POLRI*
KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	**Skor Global Cyber Security Index**	**0,792**	**0,792**	**0,826**	**0,826**	**0,838**	**5.715,0**			
ProP : Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber	**Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)**	**0,159**	**0,159**	**0,171**	**0,171**	**0,175**	**5.001,9**			
	Skor Pilar Organizational pada Global Cybersecurity Index (GCI)	**0,13**	**0,13**	**0,133**	**0,133**	**0,136**				
Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center	*Jumlah Cakupan Perluasan Area National Cybersecurity Operation Center*	*4 Titik*	*10 Titik*	*10 Titik*	*10 Titik*	*10 Titik*	*1.500,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pembangunan kapasitas National Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT)	*Jumlah sistem simulasi incident response*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	-	-	*743,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pembangunan Sistem Monitoring Pengendalian Informasi	*Jumlah sistem monitoring pengendalian informasi*	-	*1 Sistem*	*1 Sistem*	*1 Sistem*	-	*450,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Penguatan National Data Center	*Pusat data nasional berstandar internasional*	-	*1 DC berstandar Internasional (Tahap 1)*	*1 DC berstandar Internasional (Tahap 2)*	*1 DC berstandar Internasional (Tahap 3)*	-	*600,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pembangunan Infrastruktur Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	*Jumlah sistem VVDP*	-	*1 Sistem*	-	-	-	*50,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pembangunan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	*Jumlah sistem ISAC*	-	*1 Sistem*	-	-	-	*50,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Penyusunan Regulasi Manajemen Krisis Keamanan Siber Nasional	*Regulasi manajemen krisis siber*	*1 Regulasi*	-	-	-	-	*8,0*	*Pusat*		*BSSN*
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	*Nilai budaya keamanan siber masyarakat*	*4 Nilai*	-	-	-	-	*8,2*	*Pusat*		*BSSN*
Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas	*Jumlah PSE yang sudah menerapkan standar kriptigrafi*	*100 PSE*		-	-	-	*1,4*	*Pusat*		*BSSN*
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	*Jumlah sistem CIA*	*7 sistem*	*7 sistem*	*7 sistem*	*7 sistem*	*7 sistem*	*1.500,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BIN*

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembuatan Matriks Keamanan Siber	*Standar Matriks Keamanan Siber*	*1 Standar*	_	_	_	_	*8,9*	*Pusat*		*BSSN*
Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	*Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah*	*1 Regulasi*	_	_	_	_	*4,7*	*Pusat*		*BSSN*
Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020	*Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020*	*1 Kegiatan*	_	_	_	_	*5,0*	*Pusat*		*BSSN*
Penyusunan Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	*Jumlah Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)*	*1 Regulasi*	_	_	_	_	*7,0*	*Pusat*		*BSSN*
Penyusunan Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN	*Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN*	*1 Regulasi*	_	_	_	_	*3,0*	*Pusat*		*BSSN*
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber	*Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber*	*1 Regulasi*	_	_	_	_	*0,5*	*Pusat*		*BSSN*
Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	*Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi*	*1 Regulasi*	_	_	_	_	*4,2*	*Pusat*		*BSSN*
Pengadaan Peralatan Laboratorium Forensik	*Jumlah Peralatan Laboratorium Forensik yang diadakan*	_	_	*1 Paket*	_	*1 Paket*	*58,0*	*Pusat dan Bidlabfor Polda*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*POLRI*
ProP : Pembangunan dan Penguatan CERT (ComputerEmergency Response Team)	**Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI)**	**0,159**	**0,159**	**0,171**	**0,171**	**0,175**	**74,9**			
Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah	*Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah*	*15 K/L/D*	*25 K/L/D*	*27 K/L/D*	*27 K/L/D*	*27 K/L/D*	*31,6*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN	*Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor IIKN*	_	*1 Entitas*	*1 Entitas*	_	_	*7,5*	*Pusat*		*BSSN*
Membangun Kemampuan penanganan insiden di sektor ekodig (manajemen krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital (penguatan insiden siber. capacity	*Jumlah PSE yang memiliki kemampuan menangani insiden respon*	*100 PSE*	*100 PSE*	*100 PSE*	*100 PSE*	*100 PSE*	*4,5*	*Pusat*		*BSSN*
Penyusunan Regulasi Pembentukan CERT	*Jumlah Regulasi Pembentukan CERT*	*1 Regulasi*	_	_	_		*3,3*	*Pusat*		*BSSN*
Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber	*Jumlah tim respon ancaman intelijen siber yang dibentuk*	_	*1 tim*	*1 tim*	*1 tim*	*1 tim*	*28,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BIN*
ProP : Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	**Skor Pilar Cooperation pada Global Cybersecurity Index (GCI)**	**0,12**	**0,12**	**0,139**	**0,139**	**0,144**	**120,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.46

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilateral Bidang Keamanan Siber	*Jumlah kegiatan kerjasama bidang keamanan siber*		*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*	*60,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	*Jumlah kegiatan kerjasama intelijen keamanan siber*	*-*	*1 kegiatan*	*1 kegiatan*	*1 kegiatan*	*1 kegiatan*	*8,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BIN*
Penguatan Operasi Intelijen Siber	*Jumlah kegiatan operasi intelijen siber*	*550 Operasi*	*20 Operasi*	*20 Operasi*	*20 Operasi*	*20 Operasi*	*52,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BIN*
ProP : Penguatan Kapasitas SDM Keamanan Siber	**Skor Pilar Capacity Building pada Global Cybersecurity Index (GCI)**	**0,189**	**0,189**	**0,189**	**0,189**	**0,189**	**195,2**			
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	*Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk K/L/D*	*200 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*14,6*	*Jakarta*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber	*Jumlah Lulusan Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*100 Lulusan*	*37,7*	*Jakarta*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Penyelenggaraan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN	*Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN yang mengikuti Program Born to Defence*	*500 Lulusan*	*500 Lulusan*	*500 Lulusan*	*500 Lulusan*	*500 Lulusan*	*31,8*	*Jakarta*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
National Cyber Exercise Drill Test	*Jumlah peserta yang mengikuti National Cyber Excersice Drill Test*	*1230 Orang*	*1250 Orang*	*1300 Orang*	*1400 Orang*	*1450 Orang*	*60,7*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BSSN*
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Digital Forensik	*Jumlah CHFI dan ECIH yang terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda*	*57 lulusan*	*57 lulusan*	*57 lulusan*	*57 lulusan*	*57 lulusan*	*8,6*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*POLRI*
Peningkatan Kapasitas SDM Siber Polri	*Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan capacity building siber*	*269 lulusan*	*269 lulusan*	*269 lulusan*	*269 lulusan*	*269 lulusan*	*21,9*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*POLRI*
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	*Jumlah personel yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM intelijen siber*	*-*	*50 Personel*	*50 Personel*	*50 Personel*	*50 Personel*	*20,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*BIN*
ProP : Penyelesaian Kejahatan Siber	**Clearance Rate Tindak Pidana Siber**	**61%**	**62%**	**63%**	**64%**	**65%**	**322,9**			
Penanganan Tindak Pidana Siber	*Jumlah penanganan tindak pidana siber*	*1,247 Kasus*	*1,247 Kasus*	*1,247 Kasus*	*1,247 Kasus*	*1,247 Kasus*	*230,9*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*POLRI*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A.7.47

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelidikan Online Dittipidsiber	*Penyelidikan Online Dittipidsiber : 1080 Laporan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan*	*2712 laporan*	*2712 laporan*	*2712 laporan*	*2712 laporan*	*2712 laporan*	*92,0*	*Pusat*	*Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT*	*POLRI*
JUMLAH							**330.692,4**			

Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

001.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	205,4
Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	2.332,2
JUMLAH	**2.537,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

002.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	5.317,2
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	11.183,0
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	2.279,4
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	201,0
JUMLAH	**18.980,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

004.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.215,0
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	4.412,2
JUMLAH	**5.627,2**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	796,2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	6.855,5
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	177,1
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	728,7
Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	100,6
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	629,6
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	299,4
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	80,3
JUMLAH	**9.667,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung							**10,9**			
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan							10,9			
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha	Jumlah Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung kemudahan berusaha	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	5,8	Pusat		07
Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	115 Pengadilan	5,1	Daerah		07
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI							**32,8**			
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I							9,2			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	9,2	Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II							6,1			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	6,1	Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III							10,8			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	10,8	Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV							6,8			
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	6,8	Daerah		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung							**14,4**			
Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan							10,0			
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	160	-	-	-	-	2,1	Pusat		03
Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	Jumlah Peserta Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	80 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	7,9	Pusat		06
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan							4,4			
Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Jurusita	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,4	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							**82,6**			
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							82,6			
Layanan Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	55,8	Pusat		07
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	3888 Perkara	26,4	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

005.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	0,4	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							**140,9**			
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							140,9			
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	11.293 perkara	20,4	Pusat		07
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	25.489 perkara	58,7	Pusat		07
Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	127.365 jam layanan	58,2	Pusat		07
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3286 perkara	3,6	Pusat		07
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)							**4,9**			
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara							4,9			
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	44 Perkara	0,1	Pusat		07
Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	8.640 Jam Layanan	4,8	Pusat		07
JUMLAH							**286,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	1.664,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	8.429,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	122,1
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	776,9
Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	616,7
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	1.697,6
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	1.061,1
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	64,5
JUMLAH	**14.432,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI							**638,2**			
Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian							9,0			
Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	9,0	Daerah		07
Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi							580,0			
Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	156 Satker	410,2	Daerah		07
Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-TI	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	2 Sistem	45,8	Daerah		07
Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	Jumlah Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT TI	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	460 Satker	124,1	Daerah		07
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara							49,1			
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	Jumlah LaporanPenanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	49,1	Pusat		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan							**33,2**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional							33,2			
Diklat Pemulihan Aset	Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	9,5	Pusat		07
Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan	8 Angkatan	-	-	-	-	3,0	Pusat		03
Diklat Illegal Fishing	Jumlah Angkatan Diklat Illegal Fishing	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Diklat Mineral Batubara	Jumlah Angkatan Diklat Mineral Batubara	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Angkatan Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	4 Angkatan	6,9	Pusat		06
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum							**7,2**			
Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya							0,3			
Implementasi Keadilan Restoratif	Penyusunan Juknis Implementasi Keadilan Restoratif	1 Juknis					0,3	Pusat		07
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri							6,9			
Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,9	Pusat		07
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi							**4,0**			
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Agung RI							4,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

006.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Tuntutan Tipikor	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	4,0	Pusat		07
JUMLAH							**682,6**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

007.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	4.586,4
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.182,4
JUMLAH	**6.768,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

007.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

SEKRETARIAT NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden							**21,0**			
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri							21,0			
KSST Bidang Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar Negeri	8	10	11	12	13	21,0	Pusat		07
JUMLAH							**21,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	1.057,5
Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	183,2
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	97,4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	382,1
Program Bina Pembangunan Daerah	937,0
Program Bina Otonomi Daerah	215,0
Program Bina Administrasi Kewilayahan	1.043,7
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	216,7
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.804,2
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.053,8
Program Pendidikan Kepamongprajaan	923,0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Bina Pemerintahan Desa	874,8
JUMLAH	**10.788,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri							**42,5**			
Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah							42,5			
Kebijakan pemberian insentif bagi pelaksanaan inovasi daerah (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, dan Kemenkeu)		1	1	1	1	1	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	10	10	10	10	10	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	6	6	6	6	6	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Provinsi Nusa Tenggara Timur		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	5	5	5	5	5	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	7	7	7	7	7	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	2	2	2	2	2	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	3	3	2	-	-	4,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	4	1	3,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	2	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	2	-	-	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	-	-	-	-	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	2	1	-	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	-	-	-	1	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Aplikasi Umum Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (Alokasi Kemendagri)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (Alokasi Kemendagri)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	5	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	4	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	6	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	3	2	3	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	2	3	4	4	5	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	165	165	165	165	165	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	89	89	89	89	89	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	24	24	24	24	24	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	129	129	129	129	129	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	34	34	34	34	34	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	61	61	61	61	61	1,4	Pusat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	44	44	44	44	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri							**51,3**			
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri							51,3			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	60	60	60	60	60	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	30	30	30	30	30	0,4	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	36	36	36	36	36	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	12	12	12	12	12	0,2	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	42	42	42	42	42	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	40	50	60	68	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	0	40	50	60	68	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	320	320	320	320	320	4,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	192	192	192	192	192	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	64	64	64	64	64	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	106	120	135	150	166	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	39	41	43	43	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	160	160	160	160	160	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	64	64	64	64	64	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	46	47	48	49	50	4,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	24	24	24	24	24	2,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	36	36	36	36	36	3,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	34	35	36	37	38	3,2	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	12	12	12	12	1,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	24	24	24	24	24	2,1	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	40	40	40	40	40	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	28	28	28	28	28	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	24	24	24	24	24	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	20	20	20	20	20	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	8	8	8	8	8	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	20	20	20	20	20	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	14	14	14	14	14	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	12	12	12	12	12	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	10	10	10	10	10	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	4	4	4	4	4	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	80	80	80	80	80	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	56	56	56	56	56	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	48	48	48	48	48	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	40	40	40	40	40	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	16	16	16	16	16	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Bina Pembangunan Daerah							**206,5**			
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I							15,7			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	6	10	4	0	0	4,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	8	1	3	0	0,2	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	2	0	1	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	2	7	0	0	0	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	3	3	0	0	0	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	1	2	0	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	3	0	0	0	0	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6	12	18	25	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Kelembagaan perhutanan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan perhutanan sosial	4	8	12	15	20	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							37,0			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	34	34	34	34	9,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	129	129	129	129	129	6,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	34	34	34	34	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	61	61	61	61	61	4,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	87	87	87	87	87	5,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	23	23	23	23	23	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	44	44	44	44	44	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11	11	19	19	34	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian inflasi daerah	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah			10	20	34	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	160	260	360	460	514	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II							104,4			
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	34	34	34	34	34	6,1			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	129	129	129	129	129	4,2			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	34	34	34	34	34	1,2			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	61	61	61	61	61	3,0			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	87	87	87	87	87	3,6			02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	23	23	23	23	23	1,2			02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	44	44	44	44	44	1,2			02
Sinkronisasi antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	10	20	30	34	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen perencanaan daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi	0	34	34	34	34	4,0	Seluruh provinsi		05
Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sanitasi di daerah	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota)	34	34	34	34	34	34,0	Seluruh provinsi		05
Pengaturan penyelenggaraan bidang sanitasi di daerah	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	34	34	34	34	34	15,4	Pusat		05
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	0	34	34	34	34	10,0	Seluruh provinsi		05

010.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	0	34	34	34	34	10,0	Seluruh provinsi		05
Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							18,2			
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	10	10	10	10	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	7	7	7	7	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	5	5	5	5	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	6	6	6	6	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	10	10	10	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	7	7	7	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	5	5	5	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	10	10	10	10	10	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	7	7	7	7	7	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	5	5	5	5	5	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	6	6	6	6	6	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	2	2	2	2	2	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV							31,2			
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	34	34	34	34	34	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	129	129	129	129	129	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	34	34	34	34	34	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	61	61	61	61	61	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	87	87	87	87	87	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	23	23	23	23	23	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	44	44	44	44	44	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	6	7	7	7	7	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		03

010.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas kelembagaan UKS/M di daerah	jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7	7	7	7	7	2,0	Pusat		03
Peningkatan indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		04
Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	-	50	55	60	70	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Fasilitasi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	-	22	24	28	34	4,6	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	-	20	22	26	32	4,3	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	-	22	24	28	34	4,0	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Koordinasi penerapan RAD penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18	24	30	34	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		03
Program Bina Otonomi Daerah							**148,7**			
Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD							118,1			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	4	4	5	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	8	8	8	8	8	10,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	50	59	68	68	68	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	7	7	7	7	9,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	35	41	47	47	47	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	32	38	44	44	44	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	25	29	33	33	33	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	10	12	14	14	14	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	2	2	2	2	2	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	36	68	98	131	163	16,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	7	9	11	14	9,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	10	10				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	3	4	4	5	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	3	5	7	7	4,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	4	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	1	1	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	1	2	2	2	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	-	2	3	3	4	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

010.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus	4	4	4	4	4	5,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	1	1	1	1	7,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	2	2	2	2	2	15,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	-	2	2	2	2	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	2	2	-	-	-	4,2	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri		02
Revisi UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua	Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	1					1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah							30,6			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	5	7	39	43	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	1	1	1	1	1	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	2	2	2	2	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	3	3	5	5	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	82	102	122	138	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	-	-	-	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	0	0	0	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	9	9	9	9	9	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	0	4	5	5	5	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	5	5	5	5	5	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	6	6	6	6	6	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	6	6	6	6	6	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	23	23	23	23	23	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	5	5				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	2	2	0	0	0	0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	1	1				0,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	1	1	1	1	1	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Bina Administrasi Kewilayahan							**893,0**			
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah							785,6			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.32

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.33

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.34

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.35

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.36

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.37

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.38

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.39

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	13,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.40

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	16,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.41

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	2,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.42

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	19,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	2,573	2,573	2,573	2,573	12,865	13,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	12,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	17,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	15,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.43

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	1	1	1	1	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8	16	22	22	22	14,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	84	116	148	148	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	46	62	82	82	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten		10	14	18	22	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	72	99	128	129	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.44

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	-	39	49	61	61	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	-	25	34	44	44	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	`	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	1	1	1	1	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Denpasar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.45

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Banjarmasin	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Semarang		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Manado		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Bandung		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Jakarta		02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Palembang	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Medan		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.46

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Makassar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik			1	1	1	0,7	WM Surabaya		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	10	-	-	-	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	5	-	-	-	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	6	-	-	-	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.47

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	2	-	-	-	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	7	2	2	2	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	10	28	23	22	21	5,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	7	16	19	23	23	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	8	9	11	11	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	9	9	6	6	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	6	10	10	10	11	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	2	2	2	2	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	2	2	2	2	1,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.48

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	1	1	1	1	1	2,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	12	22	25	36	38	5,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	4	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.49

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	6	6	10	10	3,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	7	7	12	12	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	3	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	2	2	4	4	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	-	7	7	14	14	4,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	10,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	2	2	2	2	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	5	5	5	5	5,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.50

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	6,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	7	7	7	7	5,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	1	1	1	1	2,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	2	-	-	-	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	1	-	-	-	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	84	84	90	27,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.51

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	2	4	6	8	5,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	8	17	21	12,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	12	16	23	13,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	2	4	6	8	5,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	-	30	30	30	13,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.52

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	4	12	27	31	16,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	2	-	-	-	1,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	1	-	-	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	1	-	-	-	3,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara							26,5			
Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, dan budaya	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	5	5	5	5	26,5	Pusat		07
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							14,8			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	30	61	96	130	164	4,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	36	51	66	87	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	21	47	73	101	129	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.53

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran							66,2			
Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5	5	5	5	5	9,1	34 Provinsi		06
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	61	61	61	61	61	8,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Bimbingan teknis, monev dan pelaporan SPM bidang Trantibumlinmas	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	44	44	44	44	44	3,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34	34	34	34	34	6,6	34 Provinsi		06
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	30	61	96	130	164	4,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	36	51	66	87	2,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	107	119	130	143	155	3,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	13	19	27	34	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	30	61	96	130	164	5,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	36	51	66	87	3,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	10	15	19	23	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	23	34	47	59	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	15	27	39	49	61	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	16	25	34	44	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	3	5	7	9	11	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	13	19	27	34	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34	34	34	34	34	5,4	34 Provinsi		06
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah							**93,6**			
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah							24,7			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	32	32	32	32	32	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.55

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	30	61	96	130	164	2,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	36	51	66	87	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	10	15	19	23	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	17	48	75	102	129	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	15	27	39	49	61	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	33	49	108	125	142	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	30	61	96	130	164	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.56

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	21	47	73	101	129	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	30	61	96	130	164	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.57

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	21	47	73	101	129	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	36	51	66	87	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	13	19	27	34	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	27	39	49	61	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	16	25	34	44	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah							25,0			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	3	7	13	19	24	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.58

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	30	61	96	130	164	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	18	36	51	66	87	1,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	10	15	19	23	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.59

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	31	48	66	83	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	15	27	39	49	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	13	19	27	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	16	25	34	44	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	82	96	111	125	154	2,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	73	83	94	104	122	1,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	48	54	62	68	81	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.60

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	15	17	19	21	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	31	37	43	49	56	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	20	23	26	32	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	19	23	27	31	42	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	9	9	10	10	10	2,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	6	6	6	6	6	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	5	5	5	6	6	1,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	1	1	1	2	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.61

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	5	5	5	5	5	1,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	2	2	2	2	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah							8,2			
Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi dalam pengelolaan pinjaman daerah dan obligasi daerah	50	55	60	65	70	6,1	Pusat (alokasi Kementerian)		01
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	0	0	1	1	0	2,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah							17,6			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	75	99	123	143	164	1,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.62

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	33	47	62	75	87	0,9	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	4	9	14	19	23	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	27	36	46	52	61	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	17	21	26	30	34	0,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.63

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	2	13	23	34	44	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	10	10	10	10	10	0,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	6	6	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	6	6	6	6	6	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	5	5	5	5	5	0,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	2	2	2	2	2	0,1	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	10	10	10	10	10	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	6	6	6	6	6	2,0	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	7	7	7	7	7	2,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	5	5	5	5	5	1,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	2	2	2	2	2	0,7	Pusat (alokasi Kementerian)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.64

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah							18,0			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	93	110,75	128,5	146,25	164	5,2	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	37	49,5	62	74,5	87	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	7,25	12,5	17,75	23	1,3	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	74	85,25	96,5	107,75	119	3,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	45	49	53	57	61	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	24	26,5	29	31,5	34	0,8	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	2	12,5	23	33,5	44	2,5	Pusat (alokasi Kementerian)		02
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							**245,0**			
Pengelolaan Informasi Kependudukan							35,0			
Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	3	5	10	15	20	35,0	34 Provinsi		03
Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil							140,0			
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	35,0	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.65

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1*)	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	0,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun	90	95	97	98	100	0,0	34 Provinsi		02
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	20	40	60	80	100	35,0	34 Provinsi		03
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	70	100	100	100	100	35,0	34 Provinsi		03
Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk							35,0			
Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	112	112	112	112	112	35,0	23 Provinsi		03
Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan							35,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.66

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan integrasi data administrasi kependudukan melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	Jumlah instansi yang mengintegrasikan data melalui koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	6	10	16	20	22	35,0	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							**193,7**			
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan							63,5			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	400	1800	3000	3300	4200	63,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Fasilitasi Politik Dalam Negeri							46,2			
Penguatan Demokrasi di Daerah	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	34	34	34	34	34	17,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Kebijakan Politik Dalam Negeri	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	2	2	2	N/A	N/A	6,0	Pusat		07
Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	100	200	500	700	800	11,5	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	3000	5000	6000	8000	10000	11,2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							9,4			
Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Daerah yang Kerukunan Umat Beragamanya meningkat	34	34	34	34	34	9,4	Daerah		04
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional							54,1			
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61	62	63	64	65	32,0	Pusat dan Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.67

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Deteksi Dini oleh Aparat Pusat dan Daerah	Jumlah aparatur pusat dan daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	600	2000	2200	2400	3000	22,1	Pusat dan Daerah		07
Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan							20,5			
Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34	34	34	34	34	12,5	Pusat dan Daerah		04
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15	16	17	18	19	8,0	Daerah		04
Program Bina Pemerintahan Desa							**75,9**			
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional							38,9			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	440	700	730	750	676	12,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	265	420	442	450	408	7,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	90	140	148	152	136	2,5			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	225	350	370	375	340	6,3			02
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	270	420	444	450	408	7,6			02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.68

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	90	140	148	152	136	2,5	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa							18,2			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	20	30	32	35	30	4,8			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	12	20	24	24	18	3,2			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	4	8	8	8	6	1,1			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	10	20	20	20	20	2,9			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	17	24	24	24	24	3,7			02
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	6	8	8	8	8	1,2			02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.69

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	6	8	8	8	8	1,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa							18,8			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	10	10	10	10	10	5,1			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	6	6	6	6	6	3,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	5	5	5	5	5	4,6			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	6	6	6	6	6	3,0			02
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0			02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

010.B.70

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	2	2	2	2	2	1,0	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
JUMLAH							**1.950,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	2.515,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	5.974,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	70,5
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	240,2
Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	3.862,7
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	287,2
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	100,1
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	181,1
Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	84,9
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	458,4
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	386,2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	4.684,4
JUMLAH	**18.846,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN							**204,5**			
Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi							27,5			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Ekonomi ASEAN	64	94	94	95	94	27,5	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya							26,9			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN	37	44	97	51	50	26,9	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional							36,1			
Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	130	135	140	146	151	36,1	Pusat		07
Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan							87,3			
Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang disampaikan dalam setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan Keamanan	140	178	180	191	190	87,3	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN							26,7			
Layanan Setnas ASEAN-Indonesia		1	1	1	1	1	26,7	Pusat		07
Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral							**281,5**			
Kerja Sama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan							52,9			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	90	90	90	90	90	37,2	Pusat		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	80	80	80	80	80	6,4	Pusat		07
Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	90	90	90	90	90	4,7	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	80	80	80	80	80	4,5	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme							101,6			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	95	95	95	95	95	33,1	Pusat/ Perwakilan		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral	93	93	93	93	93	15,0	Pusat		07
Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	80	80	81	81	81	0,0	Pusat		07
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB (ProPN)	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	15,5	Pusat		07
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Peran Indonesia dalam Forum Multilateral	95	95	95	95	95	38,0	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup							34,7			
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	90	90	90	90	90	0,5	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	5,7	Pusat		07
Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Diplomasi Maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	90	90	90	90	90	1,7	Pusat		07
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi dan sosial di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral	90	90	90	90	90	26,8	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI)							30,4			
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	90	90	90	90	90	3,5	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	Persentase rekomendasi dari forum kerja sama multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	5,3	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diplomasi Maritim yang kuat di forum multilateral bidang perdagangan, komoditas, dan kekayaan intelektual	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	90	90	2,5	Pusat		07
Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di bidang perdagangan, komoditas dan kekayaan intelektual	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	90	90	19,1	Pusat		07
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang							54,2			
Kepemimpinan dan Peran Aktif Indonesia pada Berbagai Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	87	87	88	90	90	30,2	Pusat		07
Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	90	90	91	92	92	0,6	Pusat		07
Diplomasi sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi sosial dan budaya di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang di forum multilateral	87	87	88	89	90	12,9	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	72	73	74	75	76	10,4	Pusat		07
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Persentase penyelesaian permohonan registrasi Organisasi Kemasyarakatan Asing	70	71	72	73	74	0,0	Pusat		07
Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dan Dukungan Manajemen/Teknis pada Ditjen Kerja Sama Multilateral							7,9			
Pemenangan Indonesia di Berbagai Pencalonan yang Pemilihannya dilakukan di Tahun 2020	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral	75	75	75	75	75	7,9	Pusat		07
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							**237,2**			
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika							54,8			
Kesepakatan Kerjasama di kawasan Sub Sahara Afrika	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Sub Sahara Afrika	22	23	22	22	22	54,8	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah							32,4			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	29	29	29	29	29	32,4	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik							50,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	31	33	34	36	36	50,7	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							31,6			
Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intra kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	39	39	39	39	39	31,6	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah							37,7			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Timur Tengah	Jumlah Kesepakatan kerja sama di Kawasan Timur Tengah	11	12	13	14	15	37,7	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara							30,0			
Kesepakatan Kerjasama di Kawasan Asia Tenggara	Jumlah Kesepakatan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	25	25	25	25	25	30,0	Pusat		07
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional							**38,1**			
Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan							38,1			
Perundingan batas dan Kerja Sama Kelautan Maritim INA dgn 9 negara tetangga	Persentase perundingan batas dan kerja sama perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga	8	8	8	8	8	15,6	Pusat		07
Perundingan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas	Persentase penetapan batas dan kerja sama perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga	31	31	31	31	31	22,5	Pusat		07
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa							**158,3**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur							19,6			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika II	15	15	15	15	15	19,6	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah serta Karibia Barat							26,2			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Amerika I	24	29	29	29	29	26,2	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat dan Selatan							21,9			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa I	17	17	17	17	17	21,9	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Utara dan Tengah							33,0			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa II	19	20	21	22	23	33,0	Pusat		07
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa							24,4			
Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	JumlahPrakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	26	26	26	26	26	24,4	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara							33,2			
Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III	Jumlah Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan negara-negara di kawasan Eropa III	34	35	35	35	35	33,2	Pusat		07
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran							**335,8**			
Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri							335,8			
Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri							332,8	Pusat		07
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI	1	1	1	1	1	3,0	Pusat		07
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik							**293,8**			
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik							213,6			
Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia Terpromosikan dengan Baik dan Tepat Sasaran	Persentase Dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia	95	95	96	97	97	213,6	Pusat		07
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media							43,0			
Diplomasi Digital dan Informasi hubungan luar negeri yang kuat	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	91	92	93	94	95	43,0	Pusat		07
Pembentukan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi isu-isu strategis, dan personil							26,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

011.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekomendasi terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi strategis dan personil	Indeks citra positif Indonesia di dunia internasional	4	4	4	4	4	26,2	Pusat		07
Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Pemberian Bantuan Kerja Sama Teknik yang Berkualitas							11,0			
Bantuan Kerja sama Teknis Indonesia	Jumlah Kegiatan Bantuan teknis Indonesia	8	8	8	8	8	11,0	Pusat		07
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri							**1.675,6**			
Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional							1.675,6			
Kerjasama Bilateral/Regional/Multilateral	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	4751	4851	4951	5051	5151	944,3	Prewakilan RI		07
Perlindungan WNI/BHI	Jumlah WNI/BHI yang Mendapat Perlindungan (orang)	230000	241500	253575	266253,75	279566,438	726,9	Prewakilan RI		07
Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB 2020	Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam forum DK PBB	54	-	-	-	-	4,5	Prewakilan RI		07
JUMLAH							**3.225,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	11.059,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	81.078,5
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	103,7
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	2.525,3
Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	530,3
Program Strategi Pertahanan	175,6
Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	83,0
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	10.595,8
Program Potensi Pertahanan	907,7
Program Kekuatan Pertahanan	176,2
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	14.718,6
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	7.071,1
Program Profesionalisme Prajurit Integratif	3.008,5
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	18.556,8

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	35.308,6
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	12.204,5
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	23.480,6
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	27.644,7
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	4.028,1
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	30.798,8
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	16.404,3
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	4.783,9
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.727,9
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	40.970,7
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	16.279,5
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	11.872,2
Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan	553,8
JUMLAH	**379.648,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan							**76.854,2**			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan							1.016,0			
Pembangunan JIPP	Panjang JIPP	200 km	200 km	200 km	200 km	200 km	1.016,0	Pusat		07
Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan							75.838,2			
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AD	Jumlah RS TNI AD yang di-Upgrade		5 unit (Tahap 1)	5 unit (Tahap 2)	5 unit (Tahap 3)	5 unit (Tahap 4)	600,0	Pusat		07
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AL	Jumlah RS TNI AL yang di-Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0	Pusat		07
Pembangunan dan Upgrade RS TNI AU	Jumlah RS TNI AU yang di-Upgrade		2 unit (Tahap 1)	2 unit (Tahap 2)	2 unit (Tahap 3)		350,0	Pusat		07
Alutsista Strategis Luar Negeri	Jenis Alutsista Strategis Luar Negeri yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	66.273,8	Pusat		07
Alutsista Strategis Luar Negeri untuk Pertahanan Laut Natuna	Jenis Alutsista Pertahanan Laut Natuna yang diadakan		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	8.264,4	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan							**2.330,0**			
Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan							180,0			
IPTEKHAN bidang daya tempur	Tahap Prototipe		Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	180,0	Pusat		07
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan							2.150,0			
Propelan	Terbangunnya Sarana Produksi Propelan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	2.150,0	Pusat		07
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan							**10.469,1**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan							10.469,1			
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhan yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	7.709,1	Pusat		07
Pengadaan Alpalhan Industri Pertahanan untuk Pertahanan Laut Natuna	Jenis Alpalhan yang diadakan untuk Pertahanan Laut Natuna		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2.760,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Potensi Pertahanan							**181,7**			
Pembinaan Kesadaran Bela Negara							181,7			
Pengembangan bela negara	Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki Nilai-Nilai Bela Negara	42700	43000	43000	43000	43000	181,7	Pusat		04
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif							**375,0**			
Operasi Militer Selain Perang (OMSP)							375,0			
Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Bakti TNI di Wilayah Rawan dan Bencana		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	375,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif							**2.951,0**			
Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis							797,9			
Alutsista Mabes TNI	Jenis Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	797,9	Pusat		07
Pengadaan non-Alutsista/senjata							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber Mabes TNI	Jumlah Sistem Pertahanan Siber Mabes TNI		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengadaan munisi kaliber kecil							506,9			
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber kecil Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	506,9	Pusat		07
Pengadaan munisi khusus							51,4			
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi khusus Mabes TNI yang diadakan		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	51,4	Pusat		07
Pengadaan munisi kaliber besar							428,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista Mabes TNI	Jenis munisi kaliber besar Mabes TNI yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	428,8	Pusat		07
Pengadaan senjata							366,0			
Alutsista Mabes TNI	Jenis senjata Mabes TNI yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	366,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras pendukung							400,0			
Pembangunan Sarpras Mabes TNI	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras Mabes TNI		10000	10000	10000	10000	400,0	Pusat		07
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat							**3.825,5**			
Pemeliharaan/Perawatan Ranpur							1.175,0			
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.175,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang							826,0			
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	826,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal							1.824,5			
Alutsista TNI AD	Jenis senjata dan munisi/alpal TNI AD dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.824,5	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat							**8.651,5**			
Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur							1.567,0			
Alutsista TNI AD	Jenis kendaraan tempur TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.567,0	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)							1.219,5			
Alutsista TNI AD	Jenis pesawat terbang TNI AD yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1.219,5	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi							1.100,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AD	Jenis senjata TNI AD yang diadakan		9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.100,0	Pusat		07
Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista							655,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AD	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AD		1 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	18 Sistem	655,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat							4.110,0			
Pembangunan Pos Pamtas	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	12 Pos	8 Pos	9 Pos	7 Pos	7 Pos	110,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AD	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AD	68000	88000	91000	96000	99000	4.000,0	Pusat		07
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut							**18.316,0**			
Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut							166,0			
Alutsista TNI AL	Jenis senlek dan amunisi TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	166,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis							16.000,0			
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	16.000,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional							1.200,0			
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Matra Laut	Jumlah operasi		20 operasi	20 operasi	20 operasi	20 operasi	1.200,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Pesud							950,0			

012.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	950,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut							**23.457,0**			
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut							2.319,0			
Pembangunan Pos AL	Jumlah pos AL yang dibangun	15 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	300,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AL	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AL	10000	10000	10000	10000	10000	1.793,0	Pusat		07
Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna	Jumlah Paket Pembangunan Sarpras TNI AL untuk Pertahanan Natuna		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	226,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AL	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AL		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut							3.497,0			
Alutsista TNI AL	Jenis senlek dan amunisi TNI AL yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	3.497,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut							15.400,0			
Alutsista TNI AL	Jenis alpung, KRI, KAL, dan ranpur/rantis TNI AL yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	15.400,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut							1.841,0			
Alutsista TNI AL	Jenis pesud TNI AL yang diadakan		4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1.841,0	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara							**28.284,0**			
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya							25.000,0			
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara, senjata, dan almatsus TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	25.000,0	Pusat		07
Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya							3.284,0			
Alutsista TNI AU	Jenis radar, PSU, dan alat komlek TNI AU dengan Presentase Pemenuhan Norma Harwat 100%	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3.284,0	Pusat		07
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara							**6.787,0**			
Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara							1.200,0			
Alutsista TNI AU	Jenis pesawat udara/pendukungnya TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		07
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara							1.987,0			
Pembangunan Sarpras TNI AU	Jumlah M2 Pembangunan Sarpras TNI AU	10000	10000	10000	10000	10000	1.987,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya							1.200,0			
Alutsista TNI AU	Jenis Radar, Psu dan Alat Komlek TNI AU yang diadakan		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1.200,0	Pusat		07
Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat							2.000,0			
Alutsista TNI AU	Jenis Senri/Senrat TNI AU yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	2.000,0	Pusat		07
Pengadaan Peralatan Non Alutsista							400,0			
Pembangunan Pertahanan Siber TNI AU	Jumlah Sistem Pertahanan Siber TNI AU		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	400,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan							**506,0**			
Pengelolaan Pertahanan Siber							506,0			
Pengembangan Sistem Pertahanan Siber	Jumlah sistem pertahanan siber yang dikembangkan		6 sistem	3 sistem	2 sistem	3 sistem	55,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Revitalisasi infrastruktur dan jaringan siber Pushansiber	presentase peningkatan kualitas jaringan		1				65,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Sistem Pengamanan Pangkalan (Smart Building Pushansiber)	Jumlah pangkalan yang diberikan sistem pengamanan		1 pangkalan	_	_	1 pangkalan	64,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan 11 unit Server Data Center Pushansiber	Jumlah sub sistem dari Server Data Center		11 unit	_	_	_	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembangunan Sistem Cyber Intelegent Analytica Pushansiber	waktu analisa ancaman/ serangan siber		15 menit	_	_	_	125,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Laboratorium Offensive dan Defensive Pushansiber	Jumlah peralatan Laboratorium Offensive dan Defensive	_	20 offensive dan 12 defensive	_	_	_	100,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan Peralatan dan Kapasitas Tim CERT Pushansiber	Jumlah Peralatan dan kapasitas Tim CERT	_	3 paket	_	_	_	40,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengadaan Anti Drone	Jumlah Peralatan Anti Drone	_	_	1 paket	_	_	2,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

012.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan dan Pelatihan TIK di Bidang Siber	Jumlah SDM TIK Bidang Siber		100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	100 lulusan	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							**182.988,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	1.814,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	113,2
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	102,4
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2.149,6
Program Pembentukan Hukum	116,9
Program Administrasi Hukum Umum	3.032,1
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	14.217,2
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	771,8
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	7.110,5
Program Pemajuan HAM	127,3

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pembinaan Hukum Nasional	499,4
JUMLAH	**30.055,2**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM							**10,5**			
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II							1,0			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,0	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III							3,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	3,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI							1,5			
Pembentukan Wilayah ZI dan WBK dan WBBM	Wilayah ZI dan WBK dan WBBM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,5	Daerah		07
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM							**13,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan							13,5			
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,5	Pusat		07
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM							**19,1**			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM							16,4			
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	16,4	Pusat		07
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan							2,7			
Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instanse Teknis Lainnya	Jumlah APH yang Mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA	270	-	-	-	-	2,7			03
Program Pembentukan Hukum							**12,6**			
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan							12,5			
RUU Hukum Acara Perdata	RUU Hukum Acara Perdata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,0	Pusat		07
RUU Jaminan Fidusia	RUU Jaminan Fidusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0,9	Pusat		07
RUU Kepailitan	RUU Kepailitan	1 Dokumen	1 Dokumen				0,6	Pusat		07
RUU KUHP/KUHAP	RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan	1 Dokumen					1,8	Pusat		07
Pedoman konsultasi publik	Penyusunan pedoman konsultasi publik	1 Dokumen					0,2	Pusat		07
Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan							0,1			
Penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	Aplikasi penjaringan partisipasi publik berbasis teknologi informasi	1 Paket					0,1	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Administrasi Hukum Umum							**5,2**			
Administrasi Hukum Perdata							5,2			
RUU Badan Usaha	Kebijakan pendukung penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				5,2	Pusat		07
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan							**165,9**			
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak							159,9			
Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	35 pokmas	40 pokmas	30 pokmas	35 pokmas	35 pokmas	8,9	Wilayah		07
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	60	70	80	90	100	86,5	Wilayah		03
Pemenuhan Hak Pendidikan klien Anak di Luar Lembaga	Persentase klien pemasyarakatan yang melanjutkan pendidikan di luar lembaga	20	25	30	35	40	64,5	Wilayah		03
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama							4,0			
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	Jumlah Wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah		07
Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	Jumlah Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	33 Wilayah	2,0	Daerah		07
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							2,0			
Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	Jumlah Wilayah yang Mendapat Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA	19	-	-	-	-	2,0			03
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual							**5,0**			
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual							5,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

013.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem dan data kekayaan intelektual komunal	Jumlah data KI komunal	120	120	120	120	120	5,0	Pusat		04
Program Pembinaan Hukum Nasional							**337,2**			
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional							0,1			
Tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	1 Dokumen					0,1	Pusat		07
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional							0,5			
NA RUU Badan Usaha	Penyusunan NA RUU Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			0,5	Pusat		07
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							336,7			
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Orang Penerima Bantuan Hukum Litigasi	5699 orang	7025 orang	7025 orang	7025 orang	9169 orang	286,6	Daerah		07
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	758 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	938 Kegiatan	1221 Kegiatan	50,1	Daerah		07
JUMLAH							**569,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	15.632,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	213,5
Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	3.221,1
Program Pengelolaan Anggaran Negara	272,8
Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	288,8
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	38.698,8
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	1.420,8
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	397,8
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	15.928,9
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	9.019,9
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	307,6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window (INSW)	469,7
JUMLAH	**85.872,5**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara							**331,3**			
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman							35,0			
Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)	334	334	334	334	334	35,0	34 Provinsi		03
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro							296,3			
Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Jumlah Kelompok yang Memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro	1641000	2800000	3500000	4200000	4900000	296,3	34 Provinsi		03
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							**1,6**			
Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan							0,7			
Kajian mengenai Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Pendalaman Pasar Keuangan	Rekomendasi kebijakan terkait dampak dan kontribusi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) terhadap pendalaman pasar keuangan	1	0	0	0	0	0,7	Pusat		01
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral							0,9			
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Keuangan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Keuangan	1	0	0	0	0	0,9	Pusat		07
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak							**2.580,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

015.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpajakan							2.580,4			
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)		1,5	9,52	52,38	100	Selesai	2.580,4	Pusat		01
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai							**0,6**			
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan							0,6			
Peningkatan kelancaran logistik dan perdagangan di perbatasan serta percepatan pelayanan e-commerce dan transshipment		9	0	0	0	0	0,6	Pusat		01
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko							**0,6**			
Pengelolaan Pembiayaan Syariah							0,6			
Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui Penerbitan SBSN dengan Skema Investasi Pemerintah	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	1	0	0	0	0	0,6	Pusat		01
JUMLAH							**2.914,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	2.275,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	385,0
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	33.266,4
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	6.045,7
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	7.515,2
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	8.322,6
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	18.899,8
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	5.952,4
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	5.288,3
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.717,3
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	2.675,0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pendidikan Pertanian	3.362,6
JUMLAH	**97.705,9**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan							**30.670,6**			
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi							4.079,1			
Kawasan Kedelai	Jumlah Kawasan Kedelai	500000	517500	535613	554359	573267	3.053,3	26 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Ubi Kayu	Jumlah Kawasan Ubi Kayu	20000	20700	21425	22174	22950	136,8	18 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Ubi Jalar	Jumlah Kawasan Ubi Jalar	2500	2588	2678	2772	2869	89,2	4 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kacang Tanah	Jumlah Kawasan Kacang Tanah	30000	31050	32137	33262	34426	645,2	24 Provinsi		01
Kawasan Kacang Hijau	Jumlah Kawasan Kacang Hijau	20000	20700	21425	22174	22950	118,3	16 Provinsi		01
Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya	500	518	536	554	573	5,9	Jawa Barat, Banten		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	25	25	25	25	25	30,4	Pusat		01
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia							7.980,2			
Kawasan Padi	Jumlah Kawasan Padi	791000	791000	791000	791000	791000	6.766,1	Pusat, 32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan jagung	Jumlah kawasan jagung	50000	50000	50000	50000	50000	476,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	10000	50000	100000	150000	200000	707,4	Sentra padi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Serealia Lainnya	Jumlah Kawasan Serealia Lainnya	5000	5000	5000	5000	5000	29,8	20 Provinsi		01
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan							10.854,6			
Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	Jumlah areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat	2120000	2120000	2120000	2120000	2120000	3.000,4	Pusat, 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Benih Sumber Padi	Jumlah benih Sumber Padi	1044000	1044000	1044000	1044000	1044000	60,2	31 Provinsi		01
Benih Sumber Jagung	Jumlah Benih Sumber Jagung	71000	71000	71000	71000	71000	6,1	16 Provinsi		01
Benih Sumber Kedelai	Jumlah Benih Sumber Kedelai	192600	192600	192600	192600	192600	14,4	25 Provinsi		01
Produsen Benih Padi	Terlaksananya pemberdayaan produsen benih padi	5560	5560	5560	5560	5560	70,2	Pusat, 4 Provinsi		01
Produsen Benih Jagung	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	2000	2000	2000	2000	2000	59,7	Pusat		01
Benih sumber aneka umbi	Jumlah Benih sumber aneka umbi	170000	170000	170000	170000	170000	2,2	4 Provinsi		01
Benih sumber aneka kacang dan serea lain	Jumlah benih sumber aneka kacang dan serea lain	65000	65000	65000	65000	65000	5,0	17 Provinsi		01
Areal sertifikat benih	Jumlah areal sertifikat benih	124500	124500	124500	124500	124500	221,6	31 Provinsi		01
Area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Jumlah area yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	7.260,7	Pusat, 31 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Produsen Benih Kedelai	Terlaksananya Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai	1050	1050	1050	1050	1050	32,6	Pusat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara		01
Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	Benih bersertifikat yang diawasi peredarannya	150000	150000	150000	150000	150000	95,0	31 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	26,5	Pusat		01
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI							2.132,2			
Areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	Jumlah areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT	44180	50000	51000	52000	53000	370,0	Pusat, 32 provinsi		01
Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	2450	2450	2485	2485	2485	50,2	Pusat		01
Penerapan Penanganan DPI	Terlaksananya Penerapan Penanganan DPI	550	560	570	580	590	17,8	22 Provinsi		01
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Pengendalian OPT	100000	100000	100000	100000	100000	1.353,8	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Jumlah area yang mendapatkan Sarana Prasarana Penanganan DPI	5000	5000	5000	5000	5000	303,9	Pusat		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	36,5	Pusat		01
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan							979,7			
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	34	34	34	34	34	979,7	34 Provinsi		01
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih							23,2			
Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	Terlaksananya Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10	10	10	10	10	23,2	Pusat		01
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan							113,8			
Model Peramalan OPT	Jumlah Model Peramalan OPT	10	10	10	10	10	24,3	Jawa Barat		01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9	9	9	9	9	6,6	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Percontohan Pertanian Modern	Jumlah Model Percontohan Pertanian Modern	1	1	1	1	1	82,9	Jawa Barat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							4.507,9			
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	6191	7245	8245	9344	10454	4.300,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	168	168	168	168	168	98,4	23 Provinsi		01
Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	60	60	60	60	14,9	24 Provinsi		01
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	100	100	100	100	100	85,1	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6	6	6	6	6	9,4	Pusat		01
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura							**4.621,0**			
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat							3.108,7			
Kawasan Bawang Merah	Kawasan Bawang Merah	5704	5704	5704	5704	5704	925,5	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Aneka Cabai	Luas Kawasan Aneka Cabai	13328	13328	13328	13328	13328	489,6	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
GAP Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat	25	25	25	25	25	6,7	5 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Tanaman Obat	Luas Kawasan Tanaman Obat	600	600	600	600	600	47,6	11 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Bawang putih	Luas Kawasan Bawang putih	8353	5000	5000	5000	5000	1.639,2	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura							589,8			
Sertifikasi Benih Hortikultura	Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura	1570000	1570000	1570000	1570000	1570000	106,8	31 Provinsi		01
Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura	4808000	4808000	4808000	4808000	4808000	188,0	33 Provinsi		01
Benih Umbi	Luas Produksi Benih Umbi	1570000	1570000	1570000	1570000	1570000	106,8	31 Provinsi		01
Benih Batang	Luas Produksi Benih Batang	4808000	4808000	4808000	4808000	4808000	188,0	33 Provinsi		01
Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura							26,9			
Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	250	250	250	250	250	26,9		Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura							895,6			
Kawasan Buah Lainnya	Luas Kawasan Buah Lainnya	1351	1351	1351	1351	1351	93,4	5 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Jeruk	Luas Kawasan Jeruk	1000	1000	1000	1000	1000	48,8	9 Provinsi		01
Kawasan Florikultura	Luas Kawasan Florikultura	300000	300000	300000	300000	300000	274,7	12 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Mangga	Luas Kawasan Mangga	1375	1375	1375	1375	1375	67,8	7 Provinsi		01
Kawasan Manggis	Luas Kawasan Manggis	1600	1600	1600	1600	1600	109,9	6 Provinsi		01
Kawasan Pisang	Luas Kawasan Pisang	1500	1500	1500	1500	1500	213,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Durian	Luas Kawasan Durian	1800	1800	1800	1800	1800	87,9	10 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							0,0			
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan							**4.416,7**			
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar							478,8			
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi	11750	11750	11750	11750	11750	87,7	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao	10150	10150	10150	10150	10150	139,3	11 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Karet	Kawasan Karet	8300	8300	8300	8300	8300	153,8	9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Kelapa	Kawasan Kelapa	13005	13005	13005	13005	13005	89,2	12 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Area Tanaman Sagu	Area Tanaman Sagu	400	400	400	400	400	8,7	2 Provinsi		01
Dukungan Perlindungan Perkebunan							153,9			
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	1245	1245	1245	1245	1245	84,7	15 Provinsi		01
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	69	69	69	69	69	63,0	15 Provinsi		01
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	15	15	15	15	15	6,2	13 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	01
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah							679,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	32030	32030	32030	32030	32030	219,5	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	11425	11425	11425	11425	11425	459,7	13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan							843,5			
Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan	184	184	184	184	184	361,9	27 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	251	251	251	251	251	440,8	28 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	7400	7400	7400	7400	7400	40,8	14 Provinsi	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	01
Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan							2.261,2			
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	41195600	41195600	41195600	41195600	41195600	2.261,2	32 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat							**6.531,8**			
Peningkatan Produksi Pakan Ternak							584,9			
Hijauan Pakan Ternak		2341	2341	2341	2341	2341	247,9	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Produksi bahan pakan/pakan	8000	8500	9000	9500	10000	271,1	9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Mutu dan Keamanan Pakan	Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan	5000	6000	7000	8000	9000	65,9	24 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan							1.367,6			
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Surveilans Penyakit Hewan	190000	325296	325296	325296	325296	398,0	Pusat, 9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengamanan PHMS	5167450	5167450	5167450	5167450	5167450	591,2	Pusat, 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Obat Hewan dan Bahan Biologik	Penyedian vaksin dan bahan biologik	6030325	5471100	5471100	5471100	5471100	125,8	Pusat, 1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Surveilans Obat Hewan	1610	1610	1610	1610	1610	43,3	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelembagaan Veteriner	Penguatan Kelembagaan Veteriner	10	10	10	10	10	209,3	Pusat, 9 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak							4.428,0			
Optimalisasi Reproduksi	Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan Sinkronisasi	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	2.604,5	Pusat, 34 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Benih Ternak Unggul	Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak	5450945	5450945	5450945	5450945	5450945	242,0	2 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bibit Ternak Unggul	Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babi, Ayam dan Itik)	956054	956054	956054	956054	956054	359,0	Pusat, 8 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan ternak ruminansia potong	Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba)	16500	5000	5000	5000	5000	873,8	Pusat, 8 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan ternak ruminansia perah	Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah)	400	500	500	700	700	44,8	Pusat, 13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan unggas dan aneka ternak	Pengembangan unggas dan aneka ternak	501000	501000	501000	501000	501000	303,9	Pusat, 1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak							151,3			
Pengembangan Pemasaran Peternakan	Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Peternakan	6	10	10	10	10	14,1	6 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan	112	115	117	120	120	87,3	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengelolaan Informasi Pemasaran	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran	35	35	35	35	35	23,2	Pusat, 34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	17	20	20	20	20	26,7	13 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							**15.026,0**			
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian							2.757,6			
Jaringan Irigasi Tersier	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	135600	269884	269884	269884	269884	1.536,0	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Irigasi Perpompaan	Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	1000	1100	1100	1100	1100	716,4	32 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Embung Pertanian	Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian	400	400	400	400	400	254,8	31 Provinsi		01
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	200	200	200	200	200	134,2	Pusat dan 22 provinsi		01
Irigasi Perpipaan	Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	138	138	138	138	138	84,3	21 provinsi		01
Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain irigasi pertanian yang tersedia	10	10	10	10	10	31,9	10 provinsi		01
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian							3.950,1			
Cetak Sawah	Jumlah perluasan areal pertanian	10000	10000	10000	10000	10000	1.021,7	21 provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimasi Lahan	Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi	100000	100000	100000	100000	100000	2.309,2	15 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Jumlah dokumen Survei Investigasi dan Desain cetak sawah yang tersedia	10	10	10	10	10	95,2	10 Provinsi		01
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	20000	20000	20000	20000	20000	265,5	Pusat		01
Data Lahan Pertanian	Jumlah peta geospasial lahan cetak sawah yang tersedia	7	7	7	7	7	114,6	Pusat dan 7 provinsi		01
Rekomendasi Perlindungan dan antisipasi alih fungsi lahan Pertanian	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	17	17	17	17	17	143,9	Pusat dan 25 provinsi		01
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							5.037,8			
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia	23440	25800	27000	28500	29500	4.969,3	Pusat dan 33 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Perbengkelan Alsintan	Jumlah perbengkelan Alsintan yang tersedia	18	18	18	18	18	68,5	Pusat		01
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida							2.339,8			
e-RDKK mendukung penyaluran pupuk bersubsidi berbasis penerapan Kartu Tani	Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten) dalam rangka penyusunan e-RDKK mendukung penerapan Kartu Tani	521	521	521	521	521	1.623,0	Pusat dan 33 provinsi		01
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah unit pengolah pupuk organik yang tersedia	500	500	500	500	500	716,7	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian							940,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asuransi Pertanian	Jumlah luas pertanaman pertanian yang terlindungi asuransi	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	779,8	Pusat dan 24 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi	120000	150000	175000	200000	225000	161,0	Pusat dan 20 provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan							**3.024,6**			
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian							53,7			
Galur Harapan Unggul Tanaman	Galur Harapan Unggul Tanaman	17	17	17	17	17	25,6	1 Provinsi		01
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, serta Teknologi Pengelolaan SDG	5	5	5	5	5	9,2	1 Provinsi		01
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Diseminasi Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	3	3	3	3	3	18,9	1 provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian							131,3			
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian Yang Dihasilkan	17	18	19	20	21	39,7	1 Provinsi		01
Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	1	1	1	1	1	91,6	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian							337,6			
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian	50	50	50	50	50	31,7	1 Provinsi		01
Teknologi Pertanian	Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)	16	16	16	16	16	199,0	3 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Teknologi Pertanian	Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	9	9	9	9	9	97,1	3 Provinsi		01
Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan	2	2	2	2	2	4,9	1 Provinsi		01
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	3,1	1 Provinsi		01
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1,8	1 Provinsi		01
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian							635,7			
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	46	46	46	46	46	134,9	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagai Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	8	8	8	8	8	296,7	15 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)	3	3	3	3	3	0,0	3 Provinsi		01
Benih Padi	Benih Padi	700	700	700	700	700	49,6	32 Provinsi		01
Benih Jagung	Benih Jagung	158	158	158	158	158	22,6	10 Provinsi		01
Benih Kedelai	Benih Kedelai	656	656	656	656	656	84,9	13 Provinsi		01
Benih bawang dan cabai	Jumlah Produksi Benih Bawang dan Cabai	39744	39744	39744	39744	39744	26,3	20 Provinsi		01
Benih Tebu	Jumlah benih tebu yang dihasilkan	540	540	540	540	540	1,8	4Provinsi		01
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	19000	19000	19000	19000	19000	4,9	2 Provinsi		01
Benih Tanaman Palma	Jumlah benih tanaman palma yang dihasilkan	196420	196420	196420	196420	196420	14,0	27 Provinsi		01
Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian							53,1			
Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi Mekanisasi Pertanian	8	8	8	8	8	36,0	1 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Teknologi Mektan	Diseminasi Teknologi Mektan	3	3	3	3	3	17,1	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura							795,5			
Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	Varietas Unggul Baru Tanaman Hortikultura	17	20	23	25	27	26,9	3 Provinsi		01
Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	10	10	11	11	12	44,6	3 Provinsi		01
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Hortikultura	Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas Hortikultura	12	12	12	12	12	63,5	3 Provinsi		01
VUB Bawang Merah dan Cabai	Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	6,1	1 Provinsi		01
Benih Cabai	Jumlah produksi benih cabai	100	110	120	130	140	0,0	1 Provinsi		01
Benih Bawang merah	Jumlah Benih Sumber dan Sebar Bawang Merah	34400	35890	37380	38870	40360	0,0	1 Provinsi		01
Teknologi Produksi Bawang Merah dan Cabai	Jumlah Teknologi Budidaya Bawang Merah dan Cabai	2	2	2	2	2	5,5	1 Provinsi		01
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	125	190	190	190	190	630,7	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Benih bawang dan cabai	Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai	34500	36000	37500	39000	40500	18,3	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan							308,9			
VUB Bibit Tebu (Budset)	Jumlah VUB Bibit Tebu	3370000	3400000	3450000	3500000	4000000	5,5	2 Provinsi		01
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	8	6	6	6	6	25,6	3 Provinsi		01
Teknologi Tanaman Perkebunan	Teknologi Tanaman Perkebunan	22	22	22	22	22	50,7	3 Provinsi		01
Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	Model Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang	3	3	3	3	3	93,4	2 Provinsi		01
Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	Jumlah Benih Unggul Tebu	0	0	0	0	0	0,0	2 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	14	14	14	14	14	28,7	3 Provinsi		01
Benih komoditas perkebunan non strategis	Benih komoditas perkebunan non strategis	1148520	1148520	1148520	1148520	1148520	54,9	27 Provinsi		01
Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	Model Inovasi Perbenihan untuk Pengembangan Benih VUB	1	1	1	1	1	37,2	3 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	Penelitian dan Pengembangan Terapan Koordinatif Jamu	1	1	1	1	1	12,8	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Peternakan							189,9			
Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	21	21	21	21	21	34,8	3 Provinsi		01
Teknologi peternakan dan veteriner	Teknologi peternakan dan veteriner	31	31	31	31	31	57,4	3 Provinsi		01
Bibit sumber ternak	Bibit Sumber Ternak	45250	45250	45250	45250	45250	55,6	3 Provinsi		01
Diseminasi teknologi	Diseminasi dan penyiapan teknologi peternakan dan veteriner untuk dimanfaatkan pengguna	5	5	5	5	5	38,5	3 Provinsi		01
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non Strategis)	82990	82990	82990	82990	82990	3,7	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan							144,1			
Varietas Unggul Padi	Varietas Unggul Padi	2	3	3	3	3	15,3	1 Provinsi		01
Varietas Unggul Jagung	Varietas Unggul Jagung	2	2	2	2	2	16,5	1 Provinsi		01
Teknologi produksi padi	Teknologi produksi padi	7	7	7	7	7	22,0	2 Provinsi		01
Teknologi Budidaya Jagung	Teknologi Budidaya Jagung	3	2	2	2	2	9,8	1 Provinsi		01
Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	1	1	1	1	1	18,3	1 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	8	8	8	8	8	62,3			01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian							374,9			
Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	80	80	80	80	80	164,2	1 Provinsi		01
Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumberdaya Manusia	1200	1200	1200	1200	1200	186,2	1 Provinsi		01
Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	Invensi yang didaftarkan Perlindungan HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi	45	45	45	45	45	9,8	1 Provinsi		01
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	10	10	10	10	10	14,7	1 Provinsi		01
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian							**3.799,3**			
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian							795,6			
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial	2750	2750	2750	2750	2750	45,3	Pusat, 7 Provinsi		01
Penumbuhan dan penguatan P4S	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S dalam penumbuhan pengusaha pertanian milenial	240	240	240	240	240	29,9	Pusat, 7 Provinsi		01
Tenaga Kediklatan Pertanian yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkat Kompetensinya	196	196	196	196	196	22,6	Pusat, 7 Provinsi		01
Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Pemberdayaan masyarakat melalui Program READSI untuk Peningkatan Kapasitas Petani dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial	2394	2394	2394	2394	2394	122,1	Pusat		01
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program KOSTRATANI	35322	35322	35322	35322	35322	575,7	Pusat, 7 Provinsi		01
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian							3.003,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan	Kinerja Penyuluh di KOSTRATANI yang ditingkatkan	43150	43150	43150	43150	43150	2.512,2	34 Provinsi		01
Kelembagaan penyuluhan pertanian yang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Balai Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan KOSTRATANI	3054	5646	5646	5646	5646	69,6	34 Provinsi		01
Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Tumbuh dan Berkembangnya Pengusaha pertanian milenial melalui Korporasi Petani	100	100	100	100	100	61,1	34 Provinsi		01
Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian	Penguatan Adaptasi teknologi spesifik lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian mendukung KOSTRATANI	68	102	102	102	102	28,6	34 Provinsi		01
SL Petani Mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian	SL Petani Mendukung Program KOSTRATANI	23250	45000	45000	75000	75000	332,1	34 Provinsi		01
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							**3.327,4**			
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan							713,7			
Lumbung Pangan Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	300	220	220	220	225	109,9	28 provinsi		01
Lembaga Distribusi Pangan	Terbinanya lembaga Distribusi Pangan	962	1000	1000	1000	1000	603,8	22 provinsi		01
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan							1.286,9			
Pengembangan Korporasi UsahaTani	Terbentuknya korporasi usahatani	13	0	0	0	0	4,9	12 Provinsi		01
Pengembangan Pertanian Keluarga/Family Farming	Terbentuknya pertanian keluarga/family farming	727	646	565	485	404	992,3	17 provinsi		01
Pertanian Masuk Sekolah	Terbentuknya pertanian masuk sekolah	340	340	340	340	340	129,4	34 provinsi		01
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	389	135	135	135	135	160,2	Pusat, 34 provinsi		01
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							1.326,8			
Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM	Teroptimalkanya pangan lokal	34	34	34	34	34	122,1	34 Provinsi		01
Pekarangan Pangan Lestari	Terbinanya kelompok pemanfaatan pekarangan	2231	2000	2000	2500	2500	667,6	34 provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pekarangan Pangan Lestari Stunting	Terlaksananya intervensi stunting	1369	1000	1000	500	500	396,7	260 Kab/Kota		01
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	35	35	35	35	35	140,4	Pusat, 34 provinsi		01
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							**1.081,8**			
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan							56,8			
Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan	4	4	4	4	4	24,4	Pusat		01
Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	4	4	4	4	4	13,4	Pusat		01
Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	Kebijakan Kerjasama nasional/Internasional	4	4	4	4	4	18,9	Pusat		01
Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani							56,8			
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	41	41	41	41	41	56,8	Pusat		01
Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati							66,5			
Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	43	43	43	43	43	66,5	Pusat		01
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian							112,9			
Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	4	4	4	4	4	9,8	1 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	8	8	8	8	8	32,4	1 Provinsi		01
Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	10	10	10	10	10	70,8	1 Provinsi		01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							788,8			
Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	589,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pengawasan dan Penindakan	Pengawasan dan Penindakan	20	20	20	20	20	54,9	33 Privinsi		01
Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	Prasarana wilker sentra produksi, distribusi, dan importasi/pengembangan sapi/lainnya	750	750	750	750	750	52,5	3 Provinsi		01
Sarana PLBN	Sarana PLBN	100	100	100	100	100	34,2	4 Provinsi		01
Prasarana infrastruktur PLBN	Prasarana infrastruktur PLBN	400	400	400	400	400	58,0	3 Provinsi		01
Program Pendidikan Pertanian							**2.293,0**			
Pendidikan Pertanian							2.293,0			
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Formal S2 dan S3	300	300	300	300	300	127,0	Pusat		01
Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	Terjalinnya Kemitraan dengan Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian dan KOSTRATANI	1215	1300	1400	1500	1600	354,4	Pusat, 8 Provinsi		01
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian yang ditumbuhkan sebagai pengusaha pertanian milenial	2090	2100	2110	2120	2130	423,6	Pusat, 11 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

018.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	22427	22427	22427	22427	22427	190,5	Pusat, 5 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	12	12	12	12	12	1.097,1	Pusat, 11 Provinsi		01
Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling)	Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti Permagangan (Retooling) mendukung pengusaha pertanian milenial	250	300	350	400	450	37,3	Pusat		01
Tenaga Pendidik, dan Tenaga kependidikan vokasi Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan Kualitasnya	315	350	400	450	500	63,1	Pusat, 11 Provinsi		01
JUMLAH							**74.792,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.728,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	157,4
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	546,8
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	428,8
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	535,5
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	1.466,9
Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	444,6
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	2.036,4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	5.225,1
JUMLAH	**12.569,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian							**981,1**			
Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum							10,0			
Layanan fasilitasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	Terciptanya layanan penyusunan RUU LPPI	1	1	1	1		10,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional							825,0			
Alokasi Availability Payment KPBU Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang terbangun			1	1	1	825,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan							89,7			
Rencana Implementasi Making Indonesia 4.0	Tersusunnya dokumen perencanaan implementasi Making Indonesia 4.0	6	7	7	7	6	89,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal							28,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data dan Informasi Industri 4.0	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	1	1	1	1	1	25,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Keamanan Sistem Informasi	Tersedianya dokumen keamanan sistem informasi industri	1	1	1	1	1	3,3	Pusat		01
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							27,7			
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 Rekomendasi dan fasilitasi 250 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 850 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 950 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1150 sertifikat	1 Rekomendasi dan fasilitasi 1200 sertifikat	27,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							**328,5**			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki							96,1			
Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	Perusahaan Industri TPT yang difasilitasi/didampingi/diberikan insentif (SDM, Teknologi, Manajemen/organisasi) dalam rangka penerapan industri 4.0	25	300	300	300	300	96,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi							84,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Industri daur ulang sampah plastik	Rasio impor bahan baku sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB sektor industri non migas	1	2,06	2,04	2,02	1,99	36,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pilot Project Produk Karet dalam rangka peningkatan utilisasi	Jumlah Perusahaan Pilot Project	0	2	2	2	2	19,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pilot Project Industri 4.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi	Perusahaan yang melakukan transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	0	2	2	2	2	27,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu							76,2			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat	Peningkatan Kapasitas produksi sektor Industri Kimia Hulu	2,5	3,5	4,5	6	7	46,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Jumlah Industri yang Terbangun	2	2	2	2	2	29,7	Pusat - Papua Barat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil							17,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Limbah Sebagai Bahan Baku Industri Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persentase Pemanfaatan Limbah sebagai Bahan Baku Industri Barang Galian Non Logam	20	22,5	25	27,5	30	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam							54,4			
Fasilitasi Investasi pada Sektor Industri Barang Galian Non Logam	Jumlah	2	2	2	2	2	17,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Transofrmasi 4.0 pada Sektor Industri Barang Galian Non-Logam	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Transformasi 4.0	0	3	3	3	3	36,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro							**238,8**			
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan							41,4			
Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persentase Rekomendasi yang Ditindak lanjuti	3	3	4	4	4	18,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Dokumen Business Plan Green Gasoline Stand Alone Berbahan Baku Minyak Kelapa Sawit	Tersusunnya dokumen business plan	1					1,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Studi Kelayakan industri IVO/ILO	Tersusunnya dokumen business plan		1				1,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) industri IVO/ILO	Tersusunnya dokumen business plan			1			1,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	Rekomendasi dokumen dalam perundingan kerjasama internasional	3	3	3	3	3	18,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar							55,4			
Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya	Terciptanya posisi perundingan dalam kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama lain	4	6	6	6	6	11,9	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	7	7	7	7	7	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kenitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri	Terjalinnya kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak	3					3,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengoptimalan supply chain melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah perusahaan yang teroptimalisasi supply chain di Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar		3	3	3	3	7,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah industri antara sektro minuman, hasil tembakau dan bahany penyegar yang berkembang		1	1	1	1	7,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan							63,4			
Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan	Terverifikasinya kebutuhan bahan baku industri pangan	4	4	4	4	4	25,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Tersusunnya dokumen profil investasi industri	3	3	3	3	3	14,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan	Berkembangnya industri antara baha baku hasil samping perikanan	1	1	1	1	1	22,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Agro							78,7			
Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional	Terfasilitasinya Industri Agro dalam temu bisnis dan promosi dalam skala internasional	60	60	65	65	65	28,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan Ekspor bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro	Jumlah SDM industri agri yang dilatih	180	185	190	190	190	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							**292,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan							84,1			
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pendampingan dan Center of Excellence	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	15	15	15	15	15	23,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Otomotif Melalui Pilot Project	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif)	6	7	8	9	10	11,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan kemampuan industri kedirgantaraan (komponen pesawat terbang) melalui Bimbingan Teknis sertifikasi	Jumlah industri yang mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi	20	20	20	20	20	27,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Kemampuan Industri Perkapalan	1	2	2	2	2	3,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penyusunan Profil Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Tersedianya Profil Investasi	3					12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Pilot Project Pengembangan AMMDES	Jumlah pilot project yang dikembangkan	1					6,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika							68,5			
Penguatan Struktur Industri Elektronika dan Telematika	Industri Komponen yang difasilitasi	5	7	7	8	8	27,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri	Industri Yang Mendapatkan Pendampingan	10	10	13	15	15	12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perluasan Akses Technopark ke Industri Elektronika	Jumlah tenant yang terfasilitasi	3					2,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor Elektronika	Industri Elektronika dan Telematika yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)	5	8	9	9	10	26,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika							14,0			
Quick Wins Peningkatan Ekspor Produk (Komoditas) Prioritas Sektor ILMATE	Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan	2					2,0	Pusat		01
Kerja Sama Akselerasi Penerapan Industri 4.0 Dengan National Research Council (NRC) Korea	Tersedianya rencana aksi dan kerjasama dengan NRC Korea	1	1	1	1	1	12,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian							62,4			
Penyusunan Profil Investasi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Tersedianya jumlah profil investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian	4	3	3	2	2	17,9	Pusat		01
Fasilitasi Industri permesinan dan alat mesin pertanian yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor	Jumlah industri yang difasilitasi ekspor		5	7	8	8	19,8	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi industri komponen	Jumlah industri komponen yang difasilitasi	1	2	2	2	2	15,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah rekomendasi kebijakan	2					3,0	Pusat		01
Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah dokumen peta jalan	2					6,0	Pusat		01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam							63,5			
Penyusunan Profil Investasi Industri Logam Dasar Non-Besi	Industri Logam yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan subtitusi impor	1	1	1	1	1	19,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)	Tingkat utilisasi kapasitas produksi	75	80	85	90	95	25,3	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Pengembangan Industri dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam	Jumlah industri yang mendapatkan pendampingan	3	10	10	10	10	3,9	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Fasilitasi Inovasi Produk Tanah Jarang	Produk inovasi	1	1	1	1	1	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							**952,3**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur							177,7			
Pengembangan IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	33,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	15	15	15	15	15	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	810	2800	4200	5600	7000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	30	30	30	30	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka							177,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	8	20	40	60	100	33,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	20	60	90	125	165	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1400	2800	4200	5600	7000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKMKimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	30	40	40	40	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut							172,6			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Berbasis Teknologi	Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi	6	20	30	50	80	28,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	37,704096	38,4581779	39,2273415	40,0118883	40,8121261	15,1	Pusat		01
Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang	20	40	60	80	100	24,8	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	01
Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	1200	2400	3600	4800	6000	79,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan pendampingan ekspor IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	20	20	20	20	20	24,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							424,2			
Pengembangan Layanan IKM Persepatuan melalui BPIPI	Layanan BPIPI	1	1	1	1	1	46,5	Sidoarjo, Jawa Timur		01
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah provinsi yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	34	34	34	34	34	370,3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan Making Indonesia 4.0	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	7,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional							**304,3**			
Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri							41,4			
Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri	7	10	10	11	12	16,1	Pusat		01
Fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	Industri Dalam Negeri (IDN) yang didampingi	12	12	13	14	15	13,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Harmonisasi Kebijakan untuk Mendorong Ekspor dan Investasi	Jumlah Kebijakan yang Diharmonisasikan	-	2	3	3	4	11,9	Pusat		01
Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional							116,6			
Fasilitasi investasi dalam Global Value Chain	Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	10	2	2	2	2	91,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendampingan investasi perusahaan Multinasional	Jumlah perusahaan multinasional	2	3	3	4	5	12,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	Jumlah Industri yang difasilitasi	0	10	10	10	10	11,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Akses Industri Internasional							32,6			
Peningkatan utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Utilisasi Tarif Preferensi FTA/PTA/EPA	30	35	40	45	50	32,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri Serta Pengembangan Akses Industri Internasional							46,5			
Pengembangan Market Intelligence	Rekomendasi Industrial dan Market Intelligence	6	8	10	10	12	34,7	Pusat		01
Pengembangan Helpdesk Industri	Helpdesk Industry	-	1	6	8	10	11,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Wilayah Industri							67,3			
Fasilitasi Perizinan Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi	3	27	27	27	27	21,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi	3	27	27	27	27	41,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi Kawasan Industri Tematik	Kawasan Industri yang difasilitasi		3	3	3	3	4,0			01
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri							**1.117,7**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri							214,6			
Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	100	100	100	100	100	14,4	Pusat		01
Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Peningkatan Kapasitas Lab Uji	13	205	128	104	148	181,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Rancangan Regulasi Teknis	21	23	23	23	23	19,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau							52,4			
Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Rancangan Standar	5	4	12	16	20	11,4	Pusat		06
Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan	Rancangan Standar	4	4	12	16	20	16,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	06
Penyusunan dan Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	9	9	9	10	10	24,2	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	06
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas							120,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBPK	Pengadaan lahan	0	0	0	10000	10000	85,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan gedung BBPK	Pengadaan gedung	0	300	4471	3500	300	35,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik							30,0			
Pembangunan gedung BBK dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung	0	400	4000	3000	200	30,0	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik							28,5			
Pembangunan gedung B4T dalam rangka mendukung riset dan layanan teknis	Pengadaan gedung	0	300	4000	3000	200	28,5	Bandung, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri							35,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan lahan BBTPPI	Pengadaan lahan	0	0	0	1568	1568	35,0	Semarang, Jawa Tengah	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Riset dan Standardisasi Bidang Industri							98,8			
Renovasi gedung kantor, lab, layanan teknis	Renovasi gedung	0	19775,2	5368,3	5664,4	1773,9	98,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Industri Agro							189,7			
Litbang Prioritas Riset Nasional (PRN) Industri Agro	Litbang PRN Agro	1	1	1	1	1	51,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri Agro	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	6	15	16	19	20	30,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri Agro	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	10	10	10	10	9	67,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri agro 4.0	Pengadaan alat litbang	0	25	25	24	22	40,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika							348,8			
Fasilitasi Inkubasi dan Konsultansi Teknologi Industri KFTLMATE	Paket Teknologi Industri KFTLMATE		25	40	55	70	9,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Litbang PRN: Antioksidan, anti-aging dan fragrance untuk industri kosmetik berbasis minyak atsiri	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Litbang PRN: Pengembangan Collaborative Robot Machine pada industri makanan/minuman dan farmasi/kesehatan	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Litbang PRN: Material Serat, Tekstil dengan Fungsi Khusus dan Tekstil Hijau Berbahan Baku Ramie yang ramah Lingkungan (RM-SDA)	Litbang PRN		1	1	1	1	49,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyusunan Kebijakan Ekosistem Inovasi Industri KFTLMATE untuk mendukung Industri 4.0	Kebijakan teknis terkait Teknologi Industri KFTLMATE	2	1	2	2	2	9,5	Pusat		01
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Industri KFTLMATE	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	7	20	20	20	20	33,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan Teknologi Industri	Litbang dan Rekayasa Industri yang Dimanfaatkan Industri	11	13	15	16	20	88,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan alat riset untuk mendukung PRN dan mendukung transformasi industri KFTLMATE 4.0	Pengadaan alat litbang	0	35	25	24	23	58,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							**3.366,5**			
Peningkatan Kualitas SDM Industri							1.070,3			
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri	Tenaga kerja industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	20000	20000	20000	20000	20000	49,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Non-Formal	0	2	2	2	1	79,0	Pusat		03
Pengadaan Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	0	2	2	2	1	59,3	Pusat		03
Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	32000	39000	42000	44000	46000	840,9	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
SKKNI dan KKNI berbasis okupasi dan KKNI yang disusun	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	20	20	20	20	20	31,7	Pusat		03
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	20	20	20	20	20	9,9	Pusat		03
Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem							1.673,5			
Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten	13000	2600	2800	2900	3000	411,4	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Industri melalui Renovasi gedung pendidikan satuan kerja	Renovasi Gedung Pendidikan Tinggi Industri	0	3	3	3	3	177,8	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

019.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	Peralatan Pendidikan Tinggi Industri	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Mahasiswa dan Lulusan Program D1 Berbasis Kompetensi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi	Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten	500	800	900	1000	1100	95,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Implementasi Iindustri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project Learning Factory 4.0	9	12	17	22	27	76,9	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	Pilot Project Learning Factory 4.0	0,3	0,5	0,7	0,9	0,95	313,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI	1	4	7	10	13	460,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	03
Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem							622,7			
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan	Tenaga kerja industri terampil yang kompeten	7000	2100	2200	2400	2600	189,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Renovasi Bangunan/Gedung Pendidikan Menengah Industri	Renovasi Gedung Pendidikan Menengah	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Pengadaan Peralatan Pendidikan Menengah Industri	Peralatan Pendidikan Menengah Industri	0	2	2	2	3	138,3	Pusat		03
Pilot Project Learning Factory 4.0	Implementasi Iindustri 4.0 pada pendidikan vokasi	25	32	38	44	50	156,4	Pusat		03
JUMLAH							**7.581,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	1.404,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	895,6
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	2.562,3
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	3.897,7
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	17.099,9
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	377,9
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	2.733,6
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	4.889,1
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1.053,8
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	146,4
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	8.049,0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengelolaan MIGAS Aceh	114,2
JUMLAH	**43.223,9**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM							**25,0**			
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan							25,0			
Penyiapan Pembangunan PLTN Komersial (Tambahan Baru)	Penyiapan PLTN Komersial yang Dibangun	Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan	Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Melakukan analisis multikriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder.	Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.	25,0	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM							**174,5**			
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi							90,2			
Pemetaan potensi PLTBayu	Jumlah potensi terukur PLTBayu		200	200	200	200	32,0	Tersebar		05
Pemetaan potensi PLTA/Mini/Mikro	Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro		120	120	120	120	28,8	Tersebar		05
Pemetaan potensi PLTBio	Jumlah potensi terukur PLTBio		60	60	60	60	14,4	Tersebar		05
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider	0	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Nusa Lembongan	Pra FS di Nusa Lembongan	FS di Nusa Lembongan	Studi Site Selection dan akusisi data di perairan Sumatera Barat dan Jawa Barat	8,0	Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat		05
FS Commercial Plant Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut	Jumlah FS untuk ditawarkan kepada Technology provider	0	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Selat Alas	Studi site selection dan akuisisi data di perairan Selat Sape	Pra FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar	FS di Selat Alas/Selat Sape/Selat Pantar	7,0	NTB, NTT		05
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara							34,3			
Pengembangan Teknologi pembuatan logam neodymium (logam tanah jarang) dari monazite untuk bahan permanen magnet	Pengembangan dan penelitian pembuatan strong magnet dari bahan baku monazite hingga rencangan skala komersial	-	Penelitian Teknologi solvent ekstraksi pembuatan neodymium oksida	Pengembangan teknologi garam lebur dalam pembuatan logam neodymium	Penelitian pencampuran logam neodymium dengan boron dan besi untuk menjadi strong magnet permanen	Rancangan DED pembuatan strong magnet dari monazite skala komersial	11,0	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Teknologi pirolisis batubara untuk produksi syncrude oil ,COG dan batubara kualitas tinggi	Pembangunan dan pengembangan pilot plant teknologi pirolisis batubara hingga desain skala komersial	-	Pengadaan, perakitan, dan commisioning pilot plant pirolisis batubara di palimanan dengan kapasitas 25kg/jam	ujicoba formula produksi syncrude oil	ujicoba syncrude skala lab di Pertamina sebagai umpan kilang mini	desain scale up pirolisis batubara skala komersial dan pemanfaatan syncrude pada kilang pertamina (satu rancang bangun, 2 usulan paten)	9,8	Pusat		01
Pengembangan katalis sintetik untuk proses konversi syngas batubara menjadi DME	Pembuatan dan pengembangan katalis sintetik	-	Pembuatan dan uji aktifitas Katalis	Optimalisasi Pembuatan dan uji aktifitas Katalis terpilih	scale up pemanfaatan katalis	-	8,5	Pusat		01
Percepatan hilirisasi mineral skala kecil	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter	32	39	51	42	41	5,0	Pusat		01
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi							50,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Teknologi FCC untuk Pembuatan Green Gasoline Berbasis CPO 100%	Penelitian dan Pengembangan Teknologi FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO 100% hingga Pembuatan Desain Skala Komersial	0	1 (Penyempurnaan Pilot Plant (alat kontrol dan alat ukur))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku Olein (Co-Product CPO))	1 (Simulasi menggunakan bahan baku RBDPO (refine, bleached, deodorized, palm oil) (Main Product CPO))	1 (FS dan DED skala komersial dan simulasi konversi minyak nabati menjadi green gasoline)	50,0	Pusat		01
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM							**1.003,8**			
Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral							136,0			
Politeknik Bidang Energi dan Mineral	Jumlah Mahasiswa Politeknik Bidang Akamigas	998	1058	1118	1178	1178	136,0	Cepu		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur							306,1			
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Aparatur Sipil Negara sektor ESDM	Jumlah peserta pelatihan Aparatur Sipil Negara sektor ESDM	3827	6580	6796	6985	7302	306,1	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi							74,8			
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	3768	4522	5426	6511	7813	38,8	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri KEBTKE	1722	2066	2479	2975	357	26,1	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor KEBTKE	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor KEBTKE	160	192	230	276	332	9,9	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi							208,4			
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	16219	19463	23356	28027	33632	51,3	Pusat		03
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Migas	5245	6294	7552	9063	10876	134,5	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Migas	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Migas	300	360	432	518	622	22,6	Pusat		03
Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah							16,1			
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor BDTBT	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor BDTBT	154	185	222	266	319	16,1	Pusat		03
Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara							156,0			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	2888	3466	4159	4991	5989	33,6	Pusat		03
Sertifikasi dan/atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Gominerba	5103	6123	7348	8817	10581	107,1	Pusat		03
Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Geominerba	120	144	173	207	249	15,4	Pusat		03
Pendidikan Tinggi Energi dan Pertambangan							106,4			
Politeknik Bidang Energi dan Pertambangan	Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan Pertambangan	262	532	720	840	900	106,4	Bandung, Prabumulih, Bali		03
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi							**12.180,7**			
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi							333,7			
Penyediaan Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Jumlah Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	7000	7.364 - 7.399	7.754 - 7.836	8.165 - 8.321	8.614 - 8.870	333,7	Pusat		03
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi							32,3			
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik	64	65	66	67	68	15,5	Pusat		01
Produksi Gas Bumi	Produksi Gas Bumi	1191	1234	1241	1199	1163	16,8	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi							11.814,7			
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN) - penambahan	266070	100000	0	0	0	4.096,0	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Brat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	02, 05
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (APBN) - AP	0	50000	839555	800000	800000	3.938,5	Provinsi: Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Brat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	05
	PMC pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga	1	1	1	1	1	815,2	Pusat		05
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Jumlah Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (dokumen)	15	10	10	0	0	24,0	Pusat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (unit)	Progres Pembangunan RDMP	on going	on going	1 (Stage-I Balongan 25 Ribu BCPD)	1 (Stage-II Balikpapan 100 Ribu BCPD)	on going	15,0	Balikpapan, Cilacap , Balongan, Dumai		05
	Progres Pembangunan Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development	Financing dan EPC	Financing dan EPC	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	15,0	Tuban		05
	Progres Pembangunan Kilang Minyak Baru (Grass Root Refinery/ GRR)	Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development	AMDAL, BED-FEED	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction)	EPC (Engineering, Procurement, and Construction	15,0	Bontang		05
Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg	Jumlah paket konversi mitan ke LPG	522616	0	0	0	0	266,5	Tersebar		02, 05
Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Jumlah paket konverter kit	40000	40000	40000	40000	40000	2.136,8	Tersebar		02
Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Jumlah paket konverter kit	10000	10000	10000	10000	10000	492,7	Tersebar		02
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan							**160,4**			
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik							33,2			
Peningkatan Kebijakan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah rekomendasi peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik	4	4	4	4	4	9,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	1	1	1	1	10,5	Pusat		05
Penyediaan listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan	Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	60079,83	64257,8	68894,4	73608,75	78190,61	12,9	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan							89,7			
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik	1	1	1	1	1	24,7	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	Jumlah rekomendasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat	1	1	1	1	1	29,8	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi	1	1	1	1	1	10,9	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk	1	1	1	1	1	24,3	Pusat	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	05
Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik							37,5			
Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	1	1	1	1	9,0	Pusat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	3	3	3	3	3	6,7	Pusat		05
Penyusunan Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga listrik dan tarif tenaga listrik	2	2	2	2	2	17,3	Pusat		05
Penertiban pemakaian listrik ilegal	Jumlah penertiban pemakaian listrik ilegal	3	4	5	6	7	4,5	Pusat		05
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara							**198,0**			
Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara							50,0			
Lahan reklamasi pertambangan	Luas lahan reklamasi pertambangan	7000	7025	7050	7075	7100	50,0	17 provinsi		06
Pembinaan dan Pengusahaan Batubara							5,0			
DMO Batubara	DMO Batubara	155	168	177	184	187	5,0	34 Provinsi		01
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral							143,0			
Layanan Data dan Informasi Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral	Jumlah data dan informasi kegiatan pengusahaan dan pertambangan mineral	16	16	16	16	16	119,5	34 Provinsi		02
Percepatan pembangunan smelter	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Smelter (kumulatif)	4	30	31	31	31	23,5	Tersebar	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi							**3.350,5**			
Penelitian, Penyelidikan, Perekayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan							1.953,3			
Sumur air tanah untuk air baku	Jumlah titik pembangunan sumur air tanah untuk air baku (Titik)	1000	500	500	500	500	1.854,0	Tersebar		05
Pembangunan sistem pengelolaan hidrogeologi terpadu	Jumlah Cekungan Air Tanah dengan pengelolaan sistem hidrogeologi yang terpadu (Cekungan)	1	1	1	1	1	95,0	Pusat		05
Peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Jumlah peta potensi likuifaksi kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05
Peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Jumlah peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05
Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi							156,9			
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)	8	10	10	10	10	55,6	Pusat		06
Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi (Wilayah)	3	3	3	3	3	1,8	Pusat		06
Rekomendasi Wilayah Keprospekan Mineral	Jumlah rekomendasi wilayah keprospekan mineral	14	16	16	16	16	40,8	Pusat		06
Rekomendasi Sumber Daya Potensi Batubara	Jumlah rekomendasi Sumber Daya batubara	9	10	10	10	10	54,6	Pusat		06
Dokumen Studi Kelayakan Mineral untuk mendukung Kawasan Industri	Jumlah dokumen studi kelayakan mineral untuk mendukung kawasan industri	4	4	4	4	4	4,0	Pusat		06
Survei dan Pelayanan Geologi							88,4			
Layanan Pusat Informasi Terpadu Kegeologian	Jumlah pusat informasi geopark/geologi	2	3	4	3	3	50,9	Tersebar		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Survei pengembangan geoheritage	Jumlah rekomendasi penetapan geoheritage	-	4	4	4	4	10,2	Tersebar		06
Kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbuhan, dan kawasan cagar alam geologi	4	4	4	4	4	5,8	Tersebar		06
Rekomendasi wilayah kerja geologi migas	Jumlah rekomendasi wilayah kerja geologi migas	4	4	4	4	4	21,5	Pusat		06
Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi							1.147,2			
Peta Geologi Bersistem dan bertema	Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema	12	12	12	12	12	13,0	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	Jumlah kabupaten/wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi	11	29	29	29	29	15,3	Pusat dan daerah	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan	10	13	13	13	14	141,8	Pusat dan Daerah	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah peta geologi gunung api dan peta kawasan rawan bencana geologi	8	20	20	20	20	0,0	Pusat		06
Penegakkan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi geologi terpadu untuk daerah perkotaan	4	4	4	4	4	45,0	Pusat		06
Penguatan sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana geologi yang dikembangkan	8	17	17	17	17	303,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	16	19	19	19	19	312,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Pemasangan sistem peringatan dini di kawasan rawan longsor	Jumlah sistem peringatan dini bencana longsor yang dibangun	25	25	25	25	25	125,0	Tersebar	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	05
Penyusunan peta risiko dan rencana induk penurunan tanah	Jumlah peta risiko penurunan tanah di kawasan prioritas	2	2	2	2	2	2,1	Pusat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penegakan peraturan pengambilan air tanah	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengendalian ekstraksi air tanah di Kawasan Pesisir Utara Jawa dan Kawasan Prioritas	19	19	19	19	19	190,0	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	05
Penyelidikan dan Konservasi Air Tanah							4,8			
Pemantauan penurunan tanah	Jumlah titik pemantauan penurunan tanah (Titik)	200	200	200	200	200	4,8	Pusat		05
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa							**41,2**			
Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm							30,5			
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	Jumlah Layanan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga	1	1	1	1	1	30,5	Pusat		05
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa							10,7			
Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi(km)	15300	15800	16300	16800	17300	10,7	Trans Kalimantan	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	05
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi							**3.452,1**			
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi							6,5			
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Bioenergi	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan							29,5			
Peningkatan kebijakan harga	Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif (rekomendasi)	1	1	1	1	1	10,0	Pusat		06
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Bayu	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01
	TKDN Pembangkit PLT Surya	40	40	40	40	40	6,5	Pusat		01
	TKDN Pembangkit PLT Air	70	70	70	70	70	6,5	Pusat		01
Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi							2,1			
Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	3	2	1	-	-	2,1	Pusat		06
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi							13,4			
Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan (Wilayah)	5	5	5	4	3	4,3	Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Tegal, Kab. Manggarai Barat, Kab. Buru		05
Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan	Jumlah Wilayah Panas Bumi yang Ditetapkan (wilayah)	2	2	2	2	2	2,6	Kab. Bangli, Kab. Maluku Tengah		05
Layanan Dukungan Pengembangan Industri EBT	TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi	30	30	33	33	35	6,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

020.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi							3.400,6			
Layanan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	Jumlah layanan pembangunan infrasttruktur EBT	13	13	13	13	13	297,5	Pusat		05
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop	34,63	35,88	38,53	47,37	51,78	1.203,1	Kota Medan, Kota Palembang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara, Kota Manado, Kota Makassar		05
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Kawasan 4T	Jumlah PLTS Terpusat	0	0	5	5	5	1.050,0	Tersebar		05
Infrastruktur EBT	Jumlah Infrastruktur EBT yang terbangun	97	50	50	50	50	850,0	Pusat		05
JUMLAH							**20.586,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	2.836,0
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	500,0
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	619,3
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	19.958,1
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	30.705,7
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	77.802,8
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	47.472,9
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	45.264,6
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	2.213,0
JUMLAH	**227.372,4**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan							**12.980,7**			
Pendidikan Perhubungan Darat							2.971,8			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	5428	5289	5369	5463	5660	1.170,8	Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)	4652	7746	9393	9673	9574	655,1	Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat (orang)	19510	27731	27831	28361	29071	746,4	Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar		05
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (paket)	6	6	6	6	6	399,5	Sumsel, Jateng, Jatim,Jabar, Bali, Kalbar		03
Pendidikan Perhubungan Laut							6.701,0			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut (orang)	16038	16983	17416	17981	18822	2.710,7	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut (orang)	168637	171523	173228	173570	179545	2.248,1	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut	Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut (orang)	82392	71573	73912	73572	73942	1.311,2	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (paket)	-	12	12	12	12	431,0	Aceh, Sumbar, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Papua Barat		03
Pendidikan Perhubungan Udara							3.307,8			
Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara (orang)	4873	5434	5674	5626	5883	1.164,8	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara (orang)	7145	7169	7906	8017	8303	1.672,5	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara	Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara (orang)	12495	8222	8287	8317	8452	255,1	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		05
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (paket)	8	8	8	8	8	215,5	Sumut, Sumsel, Banten, Jatim, Sulsel, Papua		03
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat							**19.098,2**			
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan							7.525,0			
Penyediaan fasilitas keselamatan jalan (marka jalan, rambu jalan, pagar pengaman, dan penerangan jalan umum, ATCS)	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	33	33	33	33	33	7.500,0	Pusat		05
Pembentukan Road Safety Center/Sekretariat Keselamatan Jalan	Jumlah kelembagaan Keselamatan Jalan yang dibentuk oleh Pemda (pemda)	20	20	20	20	20	25,0	Pusat		05
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan							3.400,0			
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)	307	375	450	500	550	965,0	Tersebar		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	350,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	100,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	125,0	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	60,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	1	1	1	1	150,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terselenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	6	8	10	12	14	1.500,0	Tersebar		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan							1.246,9			
Pembangunan Balai uji kelaikan kendaraaan bermotor (UPPKB) (Dukungan APBN)	Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)		295,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	1	-	-	76,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	60,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Kalimantan Barat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Terminal Jagoibabang	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	17,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Motamasin	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	50,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,2	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Terminal Skouw	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	23,8	Papua		05
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	5	5	5	5	6	500,0	Tersebar	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	-	1	-	-	-	50,0	Sumatera Selatan		05
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	-	1	-	-	-	50,0	Bali		05
Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan							6.926,3			
Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	234	300	315	325	335	2.650,0	Tersebar		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sampelan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sikabaluan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dolong	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Makalehi	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Merauke	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pangkalaseang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	85,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Burung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dakal	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan P. Merbau	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	85,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Karimata	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Talise	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasokan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Waren	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Papua		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sei Guntung	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Riau		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Wairiang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kawio	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Seliu	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	60,0	Bangka Belitung		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	7(berlanjut)	7(selesai)	-	-	-	295,3	Sumatera Utara		05
Pembangunan Ppelabuhan Penyeberangan Tj. Kelayang	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Bangka Belitung		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	85,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Dermaga di Danau Batur	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	45,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Sawaerma	Pelabuhan penyeberangan sungai dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	36,0	Papua		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sulawesi Tenggara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tg Uban-Matak-Penagi	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Alai Insit-Pecah Buyung	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sri Menanti-Krg Baru	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	30,0	Sumatera Selatan		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk. Dalam-Tk Bungus	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sei Asam-Sunyat	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patani-Gebe	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Tk.Dalam-Gn.Sitoli-P.Pulau Batu	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bastiong-Moti	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sapudi-Kangean	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Jawa Timur		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Sumatera Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Dobo-Lamerang	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	30,0	Tersebar		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Patumbukan-P.Tanah Jampea	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Teor-Kesui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Penagi-Sintete	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Sulawesi Selatan - Kalimantan Timur		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-Pomako	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Babang-P.Mandioli	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku Utara		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Pamana-Kewapante	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Manokwari-Serui	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahai-Foley-Arar	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KTI	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Tersebar		05
Pelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar - NTT	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	1	1	1	1	1	80,0	Jawa Timur		05
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian							**68.537,6**			
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api							1.904,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Subsidi Perintis KA	Tersedianya Layanan Subsidi Perkeretaapian (lintas)	7	9	9	10	10	1.904,9	Pusat		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api							66.632,7			
Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	1	10	10	10	10	1.095,0	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhoksemawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	13 (berlanjut)	13 (Selesai)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (Selesai)	458,5	Aceh		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	35 (Selesai)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (berlanjut)	30 (Selesai)	1.050,0	Aceh		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	33 (Selesai)	25 (berlanjut)	25 (berlanjut)	25 (Selesai)	30 (berlanjut)	1.215,0	Sumatera Utara- Riau		05
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (Selesai)	20 (berlanjut)	550,0	Sumatera Selatan - Jambi		05
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	432 (berlanjut)	16.280,0	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	05
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	38 (berlanjut)	17 Selesai	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	90 (berlanjut)	3.007,3	Jawa Barat		05
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (lselesai)	550,0	Sumatera Barat		05
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	17 (berlanjut)	17 (berlanjut)	17 Selesai	20 (berlanjut)	900,0	Banten		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) APBN	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	24 (berlanjut)	24 (berlanjut)	1.010,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	elesai) 64 (berl	64 (selesai)	12 (berlanjut)	12 (berlanjut)	12 (selesai)	3.790,4	Sulawesi Selatan	Kereta Api Makassar-Pare Pare	05
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	23 (selesai)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	25 (berlanjut)	25 (selesai)	1.210,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	325,0	Bali		05
Pembangunan KA Trans Kalimantan (Balik papan - Samarinda)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	450,0	Kalimantan Timur		05
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	-	15(berlanjut)	15 (berlanjut)	15 (selesai)	305,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Jalur Ganda KA Banjar - Kroya	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)			20(berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	500,0	Jawa Tengah		05
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	-	20 (berlanjut)	20 (berlanjut)	elesai); 15 (berl	15 (berlanjut)	800,0	Banten		05
Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	15	15	15	15	9	676,4	Banten		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Utara (Araskabu - Tebing Tinggi - Rantau Prapat dan Tebing Tinggi - Siantar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	128	40	40	20	4	1.456,2	Sumatera Utara		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	14	5	20	20	10	1.017,1	Sumatera Barat		05
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk Linggau)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	8	20	20	20	6	438,8	Sumatera Selatan		05
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	100	56	-	-	-	209,6	Jawa Barat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	91	20	20	30	53	699,0	Jawa Tengah		05
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	65	60	70	70	60	908,2	Jawa Timur		05
Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)	1	1	1	1	1	7.500,0	Pusat		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	2	-	-	-	-	7,5	Jawa Tengah		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(selesai)		200,0	Jawa Timur		05
Pembangunan KA akses Pelabuhan Garongkong	KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)	-	-	5(berlanjut)	5(selesai)	-	500,0	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	KA akses Bandara yang dibangun (km)	13(berlanjut)	13(berlanjut)	13(selesai)	-	-	240,0	Jawa Tengah		05
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	KA akses Bandara yang dibangun (km)	1,3	-	-	-	-	74,7	Lampung		05
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun (km)	6(berlanjut)	6(selesai)	-	-	-	800,0	yogyakarta		05
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun (km)	-	-	-	10(berlanjut)	10(selesai)	300,0	Jawa Timur		05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.670,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkeretaapian Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	17(berlanjut)	17(selesai)	33(berlanjut)	33(berlanjut)	33(selesai)	2.040,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	-	10(berlanjut)	10(berlanjut)	10(selesai)	500,0	DKI Jakarta	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.710,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	Panjang jalur KA yang dibangun (km)	-	-	20(berlanjut)	20 (berlanjut)	20 (selesai)	1.000,0	Jawa Timur	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	3.000,0	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)	20(berlanjut)	20(berlanjut)	20 (selesai)	-	-	244,3	Sumatera Utara	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	3.390,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	Panjang jalur yang dibangun (km)	-	27(berlanjut)	27(berlanjut)	27(berlanjut)	27(selesai)	1.000,0	Jawa Barat	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Jawa Tengah	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.000,0	Sulawesi Selatan	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (km)	60	-	-	-	-	600,0	Jawa Tengah, Yogyakarta		05
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan berbasis rel di Ibu Kota Negara	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	454,7	Kalimantan Timur		05
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut							**25.320,9**			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian							2.570,8			
Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan (unit)	67	70	73	75	77	1.118,2	Pusat		05
Penyediaan kapal navigasi	Jumlah kapal navigasi yang dibangun (unit)	10	14	18	22	25	1.000,0	Pusat		05
Penyediaan Vessel Traffic Services Terintegrasi	Jumlah Vessel Traffic Services Terintegrasi yang disediakan (unit)	15	20	25	30	35	452,6	Pusat		05
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut							10.267,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Subsidi Tol Laut	Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan teratur (trayek)	21	22	23	24	25	2.398,0	tersebar		05
Subsidi Angkutan Laut Perintis	Jumlah rute angkutan laut perintis (trayek)	113	113	113	113	113	6.498,9	tersebar		05
Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	terlaksanannya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)	20	22	24	19	20	1.332,0	tersebar		05
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)	1	1	1	1	1	38,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan							12.482,7			
Pembangunan Pelabuhan Patimban (PHLN)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	4.832,2	Jawa Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Jawa Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	-	-	-	-	39,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	45,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajau	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	42,0	Sumatera Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Mansalean	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	27,7	Sulawesi Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Teluk Sasah	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	36,3	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Gane Dalam	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	26,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Pulau Bunyu	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Mesuji	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Lampung		05
Pengembangan Pelabuhan Sarmi	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	49,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Tahuna	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Sulawesi Utara		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Seba	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	110,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Wanci	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Pelabuhan Ba'a	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	33,8	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Soasio	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	37,5	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	67,5	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Sebuku	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	50,0	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Namlea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Larantuka	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	22,5	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Jampea	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Sulawesi Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Geser	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	25,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Gorom	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Raijua	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	22,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	45,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	25,0	Maluku		05
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Jambi		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pelabuhan Pelaihari	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1	-	11,3	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	40,5	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(selesai)				50,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Dompak	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Pelabuhan Kilo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	50,0	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Sulawesi Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tobelo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	90,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Kaimana	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	90,0	Papua Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Papua		05
Pengembangan Pelabuhan Dobo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Banggai	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Sulawesi Tengah		05
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	812,0	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	130,5	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	101,5	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	70,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Tegal, Kota Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	140,0	Jawa Tengah		05
Pengembangan Pelabuhan Meranti	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	3,1	Riau		05
Pengembangan Pel;abuhan Kedindi Reo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	15,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembagan Pelabuhan Waikelo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	1,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Likupang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	7,5	Sulawesi Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Miangas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	24,5	Sulawesi Utara		05
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Pelabuhan Bajoe	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,0	Sulawesi Selatan		05
Pengembangan Pelabuhan Molu	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	16,9	Maluku		05
Pengembangan Pelabuhan Wasior	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1	-	-	-	-	5,5	papua Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Bali		05
Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	90,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	150,0	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	-	-	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	100,0	Bangka Belitung		05
Pengadaan peralatan bongkar muat	lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi)	8	8	8	8	8	2.000,0	Pusat		05
Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	terlaksanannya pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu (lokasi)	20	22	24	19	20	1.332,0	tersebar		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara							**25.777,5**			
Pelayanan Angkutan Udara							1.940,1			
Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM (rute)	35	35	35	35	35	1.940,1	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara							22.392,1			
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Elelim	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	397,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Wamena	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	1.367,2	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Tanah Merah	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.179,6	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Magellum	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	31,1	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Korowai Batu	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	641,4	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Nop Goliath	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	525,8	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Korupun	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mozes Kolangin	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	748,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Oksibil	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	290,3	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Ilaga	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	470,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mulia	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	120,5	Papua	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	05
Pembangunan Bandara Buntu Kunik	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1	0	0	0	0	131,1	Sulawesi Selatan		05
Pembangunan Bandara Nabire Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	941,2	Papua		05
Pembangunan Bandara Siboru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	1.138,5	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Bukit Malintang	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Sumatera Utara		05
Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	463,1	Sulawesi Utara		05
Pembangunan Bandara Banggai Laut	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1 (lanjutan)	510,0	Sulawesi Tengah		05
Pembangunan Bandara Sobaham	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	380,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Ngloram-Cepu	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	352,6	Jawa Tengah		05
Pembangunan Bandara Pahuwato	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	265,0	Gorontalo		05
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	220,0	Maluku Utara		05
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.500,0	Bali		05
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Kalimantan Barat		05
Pembangunan Bandara Murung Raya-Kalteng	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	297,4	Kalimantan Tengah		05
Pembangunan Bandara Wasior Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	**0**	1(berlanjut)	1 (lanjutan)	1(berlanjut)	1 (selesai)	600,0	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Manokwari Selatan	Bandara baru yang dibangun (lokasi))	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	600,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Gorom	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	550,0	Maluku		05
Pembangunan Bandara Labuan Batu	Bandara baru yang dibangun (lokasi))	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	700,0	Sumatera Utara		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Sukabumi	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	400,0	Jawa Barat		05
Pembangunan Bandara Kolaka Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	0	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	650,0	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)	-	1(berlanjut)	1 (selesai)	-	-	180,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Kalimarau	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	28,4	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	47,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	288,2	Sulawesi Tenggara		05
Pengembangan Bandara Labuhan Bajo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	1.200,0	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	124,2	Sumatera Utara		05
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	115,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	45,0	Kalimantan Selatan		05
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	245,0	Sulawesi Tengah		05
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	38,1	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	0,8	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	60,0	Aceh		05
Pengembangan Bandara Lasikin	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	85,0	Aceh		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Binaka	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	90,0	Sumatera Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Lasondre	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	55,0	Sumatera Utara		05
Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	465,0	Sumatera Barat		05
Pengembangan Bandara Enggano	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	75,0	Bengkulu		05
Pengembangan Bandara Tambelan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	62,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	85,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Letung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	50,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	49,0	Kepulauan Riau		05
Pengembangan Bandara Pangsuma	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	61,5	Kalimantan Barat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Data Dawai	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	54,1	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Long Apung	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,4	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Yuwai Semaring	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	45,0	Kalimantan Utara		05
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	75,0	Kalimantan Timur		05
Pengembangan Bandara Harun Thohir	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Jawa Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Naha	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	60,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	40,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Miangas	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	45,0	Sulawesi Utara		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Gebe	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1	0	0	0	35,0	Maluku Utara		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Rampi	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	80,0	Sulawesi Selatan		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Seko	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	50,0	Sulawesi Selatan		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Tardamu	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	1	0	0	65,0	Nusa Tenggara Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara D.C. Saundale	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	64,0	Nusa Tenggara Timur		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	72,0	Papua Barat		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Enarotali	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0		86,0	Papua		05
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Mindiptana	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	35,0	Papua		05
Pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	0	0	0	1	0	68,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Muko Muko	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,8	Bengkulu		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Tampa Padang	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	77,6	Sulawesi Barat		05
Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	13,2	Jawa Tengah		05
Pengembangan Bandara Pangsuma-Putussibau	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	1,5	Kalimantan Barat		05
Pengembangan Bandara Namrole	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	30,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Dobo	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	25,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,2	Maluku		05
Pengembangan Bandara Dumatubun-Langgur (Karel Sadsuitubun - Langgur)	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	50,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara M. Salahuddin-Bima	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	124,6	Nusa Tenggara Barat		05
Pengembangan Bandara Mali-Alor	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	41,2	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Soa-Bajawa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	43,5	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1	0	0	0	0	6,4	Nusa Tenggara Timur		05
Pengembangan Bandara Bandanaira	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	99,0	Maluku		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Bandara Oesman Sadik-Labuha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	27,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Buli-Maba	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	90,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Sanana	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku Utara		05
Pengembangan Bandara Rendani	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		05
Pengembangan Bandara Kuffar	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Maluku		05
Pengembangan Bandara Kepi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	0	0	0	0	20,0	Papua		05
Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	0	48,1	Papua		05
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	64,9	Maluku		05
Pengembangan Bandar Udara Tiom	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Papua		05
Pembangunan Bandara Anggi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	250,0	Papua Barat		05
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Aceh		05
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	0	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	80,0	Kalimantan Timur		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Papua Barat		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Bawah	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	0	30,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Bandara Perairan Gili Iyang	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	0	25,0	Jawa Timur		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Senua	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	0	1(berlanjut)	1 (selesai)	35,0	Kepulauan Riau		05
Pembangunan Bandara Perairan Pulau Widi	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)	0	0	0	0	1	20,0	Maluku Utara		05
Pengawasan dan Pembinaan Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara							1.110,0			
Pengadaan Pesawat Udara Kalibrasi	Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang dibangun (unit)	4	4	4	4	4	1.110,0	Pusat		05
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan							335,3			
Pengadaan dan modernisasi sarana navigasi CNS/ATM	Jumlah sarana navigasi CNS/ATM disediakan dan dimodernisasi (Communication, Navigation, Surveilance/air traffic management system) (unit)	-	1	1	1	1	335,3	Pusat		05
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek							**1.497,1**			
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek							609,9			
Pembangunan dan Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) serta Sistem Informasi Terpadu di Jabodetabek	Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya (kawasan)	1	1	1	1	1	255,4	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pengembangan Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perkotaan	Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya dikembangkan (kawasan)	1	1	1	1	1	234,5	Jawa Barat, DKI, Banten		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	Jumlah Kawasan yang menerapkan Sistem ERP dan atau Pembatasan Sepeda Motor (kawasan)	-	1	1	1	1	120,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek							210,0			
Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	Jumlah Rute Angkutan Pemadu Moda yang ramah lingkungan yang Dibangun dan Dikembangkan (rute)	-	7	7	7	7	210,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek							677,2			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	-	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4(berlanjut)	4 (selesai)	400,0	Jawa Barat, DKI, Banten	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	05
Pembangunan Terminal Type A Jatijajar	Jumlah Terminal Type A yang di bangun (terminal)	1	-	-	-	-	14,1	Jawa Barat		05
Pengembangan Terminal Type A Pondok Cabe	Jumlah Terminal Type A yang di kembangkan (terminal)	1	-	-	-	-	48,1	Banten		05
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan di Jabodetabek	Jumlah Sentra Logistik (Terminal Barang) Terintegrasi Angkutan Logistik Berbasis Jalan Rel dan Kanal yang dikembangkan di kawasan peri-peri Jabodetabek (terminal)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	75,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah Kanal yang Dikembangkan Sebagai Alur Angkutan (paket)	-	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1(berlanjut)	1 (selesai)	70,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

022.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	-	-	1	-	1	70,0	Jawa Barat, DKI, Banten		05
JUMLAH							**153.212,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.159,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	458,9
Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.932,4
Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah	81.199,1
Program Pendidikan Tinggi	116.913,9
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.752,2
Program Pelestarian Budaya	5.483,0
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	53.379,5
Program Pendidikan Vokasi	61.736,7
JUMLAH	**339.015,4**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							**961,7**			
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri							407,6			
Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	0	34	34	34	34	71,8	Pusat		03
Layanan Perencanaan	Jumlah Layanan Perencanaan	1	1	1	1	1	124,5	Pusat		03
Beasiswa Dharmasiswa	Jumlah orang penerima beasiswa	650	650	650	650	650	211,2	Pusat		07
Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan							119,5			
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	548	548	548	548	548	119,5	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan							434,6			
Satuan Pendidikan Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran	9460	10000	10500	11000	11500	117,4	Pusat dan Daerah		03
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)	6150	6150	6150	6150	6150	180,0	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Model Media Pendidikan Berbasis TIK	Jumlah Model Media Pendidikan Berbasis TIK	11	11	11	11	11	21,0	Pusat		03
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	300	500	600	700	800	116,2	Pusat dan Daerah 3T		03
Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							**4.322,3**			
Penyempurnaan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran							52,0			
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	Jumlah Perangkat pembelajaran yang dikembangkan	106	106	106	106	106	52,0	Pusat		02, 03
Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan							319,8			
Soal yang dikembangkan	Jumlah Soal yang dikembangkan	66280	66280	66280	66280	66280	100,6	Pusat		03
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan CBT	90000	105000	120000	135000	150000	86,8	Pusat dan Daerah		03
Model Penilaian Pendidikan	Jumlah Model Penilaian Pendidikan	9	9	9	9	9	49,3	Pusat		03
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	7	7	7	7	7	83,1	Pusat		03
Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi							3.791,9			
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Diakreditasi	50000	50000	50000	50000	50000	1.525,1	Pusat		03
Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF yang Diakreditasi	35000	35000	35000	35000	35000	1.185,1	Pusat		03
Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Jumlah Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	8	8	8	8	8	78,6	Pusat		03
Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	8424500	8424500	8424500	8424500	8424500	1.003,2	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan dan Pengendalian Sistem Perbukuan							158,7			
Penilaian dan Pengawasan Perbukuan	Jumlah Penilaian dan Pengawasan Perbukuan	4010	4050	4100	4200	4300	102,3	Pusat		04
Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Perbukuan	112	150	160	170	180	56,3	Pusat		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah							**61.104,5**			
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama							16.879,9			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	4369968	4369968	4369968	4369968	4369968	15.065,5	Seluruh Indonesia		02, 03
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	20	20	20	20	20	316,2	Pusat dan Daerah		02, 03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	20	20	20	20	20	59,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	1120	1120	1120	1120	1120	380,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	39423	39423	39423	39423	39423	77,3	Pusat dan Daerah		04
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2303	2303	2303	2303	2303	38,2	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	3294	4056	4056	4056	4056	384,1	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	200	200	200	200	200	85,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	400	400	400	400	400	20,7	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Berbasis Komunitas	Jumlah Sekolah Berbasis Komunitas	0	425	425	425	425	112,0	Pusat dan Daerah		03
SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Jumlah SD-SMP Satu Atap yang dibangun	0	15	15	15	15	75,8	Pusat dan Daerah		03
SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang Mendapatkan Bantuan Pembinaan	0	500	500	500	500	84,8	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	245	245	245	245	245	179,4	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Sekolah Dasar							24.648,8			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10360614	10360614	10360614	10360614	10360614	23.320,8	Seluruh Indonesia		02, 03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	131,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	58	58	58	58	58	459,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan	514	514	514	514	514	59,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	540	540	540	540	540	174,4	Pusat dan Daerah		04
Sekolah yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Prestasi	1800	1800	1800	1800	1800	27,9	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	4842	4842	4842	4842	4842	238,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	514	514	514	514	514	83,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	148805	148805	148805	148805	148805	154,1	Pusat dan Daerah		03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah							262,3			
Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	386	386	386	386	386	143,1	Pusat dan Daerah		04
Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang telah dievaluasi capaian SPMnya	34	34	34	34	34	119,2	34 Provinsi		03
Penyediaan Layanan PAUD							1.477,1			
Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	0	6500	6500	6500	6500	52,5	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	8000	10000	10000	10000	10000	245,1	Pusat dan Daerah		03
Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas	1040	1040	1040	1040	1040	120,2	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) PAUD	35	35	35	35	35	44,3	Pusat		03
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T yang Dibangun/Direvitalisasi	250	300	350	400	450	273,5	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang Dibangun/Direvitalisasi	0	25	25	25	25	135,9	Pusat dan Daerah		03
Kabupaten/Kota Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	0	514	514	514	514	521,9	Pusat dan Daerah		03
Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	0	1200	1200	1200	1200	83,7	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan							1.389,8			
Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	0	100000	100000	100000	100000	866,1	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan mendapatkan Pembinaan, Pendampingan	350	350	350	350	350	97,1	Pusat dan Daerah		03
Lembaga Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan dan Penguatan Budaya Baca	Jumlah Lembaga Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan dan Penguatan Budaya Baca	471	471	471	471	471	150,1	Pusat dan Daerah		04
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	192	192	192	192	192	43,4	Pusat		03
Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	Jumlah Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang memperoleh Bimbingan Teknis	0	4212	4212	4212	4212	82,8	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	0	500	500	500	500	150,2	Pusat dan Daerah		03
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas							761,0			
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	Jumlah Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan	171	171	171	171	171	195,7	Pusat		03
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional	Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional	17083	17083	17083	17083	17083	419,2	Pusat dan Daerah		03
SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	10795	10795	10795	10795	10795	146,0	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus							2.835,5			
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	6	6	6	6	6	148,4	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	5	5	5	5	5	49,8	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5168	5168	5168	5168	5168	280,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	2259	2259	2259	2259	2259	174,6	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	40	40	40	40	40	48,9	34 Provinsi		06
Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	Jumlah Siswa berkebutuhan khusus penerima bantuan	135581	135581	135581	135581	135581	1.373,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	2895	2895	2895	2895	2895	440,2	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	0	549	549	549	549	52,2	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	Jumlah Sekolah Garis Depan yang mendapatkan bantuan pengembangan	0	30	30	30	30	80,5	Daerah Afirmasi		03
Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	500	500	500	500	500	36,8	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)	0	200	200	200	200	28,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Siswa Pendidikan dan Layanan Khusus Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	816	850	850	850	850	54,8	Pusat dan Daerah		04
Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	Jumlah Sekolah yang dibina menjadi Sekolah Rujukan	0	280	280	280	280	66,0	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Sekolah Menengah Atas							8.601,5			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1368243	1368243	1368243	1368243	1368243	6.558,7	Seluruh Indonesia		02, 03
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	8	8	8	8	8	209,2	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Direnovasi	Jumlah Sekolah Yang Direnovasi	132	132	132	132	132	373,9	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	650	650	650	650	650	409,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMA yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5612	5612	5612	5612	5612	136,3	Pusat dan Daerah		04
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	3078	3078	3078	3078	3078	60,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	5683	5683	5683	5683	5683	443,1	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	9871	9871	9871	9871	9871	198,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	15383	15383	15383	15383	15383	184,7	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	Jumlah Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional	7	7	7	7	7	27,6	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan							3.872,4			
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	216924	216924	216924	216924	216924	106,7	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	214312	214312	214312	214312	214312	959,2	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	15943	15943	15943	15943	15943	2.155,0	Pusat dan Daerah		03
Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	216974	216974	216974	216974	216974	651,5	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga							376,2			
Keluarga Mengikuti Peningkatan Pengetahuan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	35000	51000	65000	75000	51000	280,5	34 Provinsi		03
Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20000	20000	20000	20000	20000	95,7	Pusat dan Daerah		04
Program Pendidikan Tinggi							**59.944,3**			
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi							11.122,7			
Buku Pustaka (BOPTN)	Jumlah Buku yang diseragkan kepada PTN sebagai bantuan dari BOPTN	5137	5137	5137	5137	5137	239,4	34 Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa PTN dengan bantuan dari BOPTN yang Dilaporkan	745	745	745	745	745	889,9	34 Provinsi		03
Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Jumlah Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM yang Dikembangkan dengan bantuan dari BOPTN	192	192	192	192	192	372,1	34 Provinsi		03
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran melalui BOPTN	2382	2382	2382	2382	2382	854,8	34 Provinsi		03
Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan yang mendapat layanan bantuan operasional dari BOPTN	12	12	12	12	12	400,0	34 Provinsi		03
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH)	Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)	11	11	11	11	11	8.366,5	Pusat		03
Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan							31.254,3			
Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	2864	3000	3000	3000	3000	25,9	Pusat		04
Penguatan penyelenggaran KKN Revolusi Mental	Mahasiswa Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	300	300	300	300	300	4,0	Pusat		04
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir	150000	200000	250000	300000	350000	150,0	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi	365380	289854	208624	113572	0	9.239,3	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	5148	7798	8198	8898	9148	658,4	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi	297	400	500	600	700	7,6	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah	400000	400000	400000	400000	400000	21.080,0	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	375	410	450	500	550	9,2	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Studi Dibina Menjadi Prodi Unggul	Jumlah Program Studi Dibina yang Menjadi Prodi Unggul	2000	2000	2000	2000	2000	51,6	Pusat		03
Perguruan Tinggi Menerapkan SNDIKTI	Jumlah Perguruan Tinggi yang Menerapkan SNDIKTI	900	1000	1000	1000	1000	28,3	Pusat		03
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan							2.195,3			
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Jumlah Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	560	560	560	560	560	135,0	Pusat		07
Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang diakreditasi (BAN-PT)	2500	5000	5000	5000	5000	820,4	Pusat		03
Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat Mutu Kelembagaannya	360	400	400	400	400	780,4	Pusat		03
Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia	5	11	14	14	14	303,7	Pusat		03
LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	Jumlah LPTK yang Direvitalisasi (penyediaan dosen dan guru vokasi)	41	41	41	41	41	89,6	Pusat		03
Program Studi Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	Jumlah Program Studi yang Menerapkan Inovasi Proses Pembelajaran Digital	600	700	800	900	1000	58,2	Pusat		03
Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus	200	250	300	350	400	8,0	Pusat		03
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya							15.372,1			
SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	915	1000	1100	1200	1300	155,8	Pusat		03
SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti Pendidikan Non Gelar	380	500	600	700	800	22,9	Pusat		03
SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi Dosen	8000	9000	10000	11000	12000	62,5	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian Angka Kredit	3000	3000	3000	3000	3000	49,4	Pusat		03
Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi	80	50	50	50	50	5.086,9	Pusat		03
Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	Jumlah Item Sarana Prasarana yang dibiayai melalui PHLN	12	8	2	2	2	1.830,7	Pusat		03
SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	6034	16514	20739	26242	30715	8.163,9	Pusat		03
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							**339,3**			
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra							22,1			
Bahasa Terlindungi	Jumlah Bahasa Terlindungi	30	30	30	30	30	22,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Bahasa dan Sastra							73,9			
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Memperoleh Pembinaan Kemahiran Berbahasa Indonesia	1000	1000	1000	1000	1000	27,9	Pusat dan Daerah		03
Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	5000	5000	5000	5000	5000	45,9	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan							98,8			
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	Jumlah Penugasan Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	220	220	220	220	220	91,7	Pusat		04, 07
Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan Terfasilitasi	100	100	100	100	100	7,2	Pusat dan Daerah		04
Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah							144,5			
Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	18710	19000	19000	19000	19000	144,5	Pusat dan Daerah		04
Program Pelestarian Budaya							**4.093,8**			
Pengembangan Galeri Nasional							75,0			
Peningkatan kualitas layanan galeri	Jumlah kunjungan galeri	1200472	1200472	1200472	1200472	1200472	75,0	Pusat		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Permuseuman							245,6			
Peningkatan kualitas pengelolaan koleksi museum	Persentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	45	49	52	53	57	75,6	Pusat		04
Peningkatan kualitas layanan museum	Jumlah kunjungan museum	1861792	1861792	1861792	1861792	1861792	170,0	Pusat		04
Pelestarian Nilai Budaya							40,0			
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya maritim	Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan	5	5	5	5	5	40,0	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan							1.690,0			
Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	1	1	1	1	1.070,0	Pusat		04
Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	189	189	189	189	189	255,0	Pusat		04
Peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/atau sertifikasi	450	450	450	450	450	75,0	Pusat		04
Peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBJI/KBLI	5	5	5	5	5	20,0	Pusat		04
Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	126	135	135	135	135	150,0	Pusat		04
Pengembangan sistem pendataan kebudayaan	Pengembangan pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	1	1	1	1	1	30,0	Pusat		04
Pengembangan kerja sama bidang pemajuan kebudayaan	Persentase PPKD yang menjadi rujukan penyusunan RKP dan RPJMD	50	50	50	50	50	50,0	Pusat		04
Pengembangan kerja sama bidang pemajuan kebudayaan	Jumlah kerja sama galeri di tingkat internasional	4	4	4	4	4	40,0	Pusat		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala							187,4			
Peningkatan akses masyarakat terhadap cagar budaya	Jumlah Kunjungan Cagar budaya	987000	987000	987000	987000	987000	140,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan dukungan pemanfaatan ekonomi objek pemajuan kebudayaan	Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung	45	47	49	50	51	47,4	Pusat dan Daerah		04
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman							392,8			
Peningkatan penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (terhadap yang terdaftar)	3,91	4,65	5,39	6,13	6,9	69,5	Pusat		04
Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan (terhadap yang dilindungi)	34	37	40	43	45	217,7	Pusat		04
Peningkatan pemberian izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan CB	Persentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang diterbitkan	30	33	35	37	39	46,5	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan standardisasi museum	Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	75	76	77	78	79	59,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Kesenian							888,5			
Penguatan integrasikan Kebudayaan pada proses pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	30.5	31	33	34,6	37	234,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan produksi film, musik dan media baru	Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	30	35	40	45	50	378,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan penyelenggaraan festival budaya	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	218	230	231	239	238	276,5	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi							264,5			
Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	30	40	45	48	52	114,5	Pusat dan Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan dukungan terhadap komunitas adat dan penghayat kepercayaan	Persentase komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan	40	45	49	53	56	100,0	Pusat dan Daerah		04
Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	48	52	55	56	57	50,0	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Sejarah							125,0			
Peningkatan kajian dan pemetaan objek pemajuan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan	20	23	25	27	29	40,0	Pusat dan Daerah		04
Pemanfaatan dan inventarisasi manuskrip	Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	347	347	347	347	347	85,0	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya							185,0			
Penguatan misi dan karavan budaya	Jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia yang dikirim	300	300	300	300	300	85,0	Pusat		04
Penguatan peran Indonesia dalam forum internasional kebudayaan	Jumlah forum kebudayaan internasional yang diintervensi	10	10	10	10	10	30,0	Pusat		04
Penguatan peran diaspora Indonesia di luar negeri	Jumlah diaspora Indonesia yang terlibat dalam kegiatan budaya Indonesia di Luar Negeri	60	60	60	60	60	50,0	Pusat		04
Peningkatan peran Rumah Budaya Indonesia di luar negeri	Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang memiliki program kebudayaan dan dikelola secara berkelanjutan	8	8	8	8	8	20,0	Pusat		04
Program Guru dan Tenaga Kependidikan							**9.844,7**			
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							3.510,2			
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik	743	743	743	743	743	91,3	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPS	3388	3388	3388	3388	3388	135,8	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	3432	3432	3432	3432	3432	125,1	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika	3377	3377	3377	3377	3377	150,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi Ganda	0	2000	2000	2000	2000	265,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Penjaskes dan BK	3377	3377	3377	3377	3377	136,5	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB	3069	3069	3069	3069	3069	116,3	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	39564	39564	39564	39564	39564	1.022,1	Pusat dan Daerah		03
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14	14	14	14	14	58,1	Pusat		03
Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pengawas yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	0	900	900	900	900	27,2	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	1856	1856	1856	1856	1856	105,2	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri	556	556	556	556	556	94,6	Pusat dan Daerah		03
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	21219	21219	21219	21219	21219	499,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika	1908	1908	1908	1908	1908	157,0	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa	3377	3377	3377	3377	3377	138,9	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	1997	1997	1997	1997	1997	145,8	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA	3388	3388	3388	3388	3388	133,3	Pusat dan Daerah		03
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	1022	1022	1022	1022	1022	106,5	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas							759,1			
Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	893	893	893	893	893	94,4	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	Jumlah Penataan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas	34	34	34	34	34	113,9	34 Provinsi		03
Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti Sertifikasi Guru	4251	4251	4251	4251	4251	210,2	Pusat dan Daerah		03
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	60	60	60	60	60	11,6	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	899	899	899	899	899	168,4	Pusat dan Daerah		03
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	43360	43360	43360	43360	43360	160,6	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar							3.646,6			
Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	17797	18000	18000	18000	18000	1.629,3	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru Dikdas	Jumlah Penataan Guru Dikdas	34	34	34	34	34	52,6	34 Provinsi		03
Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru	24697	24697	24697	24697	24697	1.058,3	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikdas yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	50	50	50	50	50	19,3	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikdas	6300	6300	6300	6300	6300	483,3	Pusat dan Daerah		03
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	800	800	850	900	950	148,3	Daerah Afirmasi		03
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	2000	2000	2000	2000	2000	105,2	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	676	676	676	676	676	150,3	Pusat dan Daerah		03
Pembinaan Guru Pendidikan Menengah							1.301,4			
Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	2283	2283	2283	2283	2283	238,6	Pusat dan Daerah		03
Penataan Guru Dikmen	Jumlah Penataan Guru Dikmen	34	34	34	34	34	75,6	34 Provinsi		03
Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru	11052	11052	11052	11052	11052	538,1	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Guru Dikmen yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4	20	20	20	20	20	9,9	Pusat dan Daerah		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru Dikmen	1693	1693	1693	1693	1693	246,8	Pusat dan Daerah		03
Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	7330	7330	7330	7330	7330	117,7	Pusat dan Daerah		03
Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus (Gurdasus)	500	500	550	600	650	74,7	Daerah Afirmasi		03
Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen							627,2			
Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	Jumlah Daerah yang Melakukan Penataan Tenaga Kependidikan Dikdasmen	34	34	34	34	34	122,8	34 Provinsi		03
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala Sekolah	4300	4300	4300	4300	4300	243,8	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Pengawas	90	90	90	90	90	18,7	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1567	1567	1567	1567	1567	96,5	Pusat dan Daerah		03
Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Pengawas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1508	1508	1508	1508	1508	49,2	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	204	204	204	204	204	16,6	Pusat dan Daerah		03
Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Jumlah Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	630	630	630	630	630	79,8	Pusat dan Daerah		03
Program Pendidikan Vokasi							**56.105,8**			
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan							50.242,2			
Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1829167	1829167	1829167	1829167	1829167	8.501,3	Seluruh Indonesia		02, 03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan	300	1000	1250	1500	1750	2.802,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	12150	12150	12150	12150	12150	94,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Jumlah siswa SMK yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional	9261	9261	9261	9261	9261	485,7	Pusat dan Daerah		03
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	0	125	125	125	125	30,8	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMK yang Tersertifikasi	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	128000	130000	135000	140000	145000	346,1	Pusat dan Daerah		03
Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	0	15	15	16	16	31,6	31 Lokasi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Mutu Peserta Didiknya Meningkat	1100	1100	1100	1100	1100	360,7	Pusat		03
Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Sarana dan Prasarananya Meningkat	400	400	400	400	400	406,6	Pusat		03
Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat	Jumlah Sekolah yang Mutu Penilaiannya Meningkat	200	200	200	200	200	219,3	Pusat		03
Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat	Sekolah yang Tata Kelola Kelembagaannya Meningkat	500	500	500	500	500	643,6	Pusat		03
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkat	Jumlah Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkat	140	140	140	140	140	65,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	200	200	200	200	200	100,0	Pusat		03
Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja bagi Peserta Didik	300	300	300	300	300	150,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Minat Siswa	600	600	600	600	600	150,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	400	500	600	700	800	29.283,3	Pusat		03
Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan	315	315	315	315	315	1.575,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory	200	200	200	200	200	200,0	Pusat		03
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	125000	125000	125000	125000	125000	156,3	Pusat		03
Fasilitasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang Didirikan	15	15	15	15	15	477,3	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	60000	60000	60000	60000	60000	679,5	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	60000	60000	60000	60000	60000	843,1	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Sarana Praktik dan Prasarana Kursus dan Pelatihan	100	100	100	100	100	25,0	Pusat		03
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga yang MendapatkanPengembangan Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan	40	40	40	40	40	10,0	Pusat		03
Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Fasilitasi Uji Kompetensi	10000	10000	10000	10000	10000	25,0	Pusat		03
Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Usaha	Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling) dan Kepala Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Usaha	3200	3600	3600	3600	3600	2.580,0	Pusat		03
Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi							5.424,5			
Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan	1800	1800	1800	1800	1800	81,9	Pusat		03
Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi		500	500	500	500	52,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Daya Tampung Politeknik Eksisting	Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan Daya Tampungnya	10	43	43	43	43	2.400,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi	15000	15000	15000	15000	15000	64,8	Pusat		03
LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk (Pendidikan Vokasi)	43	43	43	43	43	91,4	Pusat		03
Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	Jumlah Program Studi Di Luar Domisili (PDD)	2	5	5	5	5	17,6	Pusat		03
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (retooling dosen dan sertifikasi mahasiswa, penguatan kelembagaan, dan penguatan prodi bidang prioritas)	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi	43	43	43	43	43	1.753,2	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi untuk kebutuhan industri	2	2	2	2	2	4,6	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penambahan Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU	Jumlah Program Studi Politeknik Eksisting dan PSDKU yang Ditambah	43	43	43	43	43	495,0	Pusat		03
Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Magang ke Industri		200	200	200	200	32,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		500	500	500	500	104,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	Jumlah Dosen Vokasi yang Mengikuti Pelatihan Berstandart Industri (Upskilling dan Reskilling)	240	500	500	500	500	328,0	Pusat		03
Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri							439,2			
Terwujudnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)	Jumlah Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif Industry, Pemilihan Program Pelatihan)	50	55	55	55	55	53,3	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

023.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri	Jumlah Pemetaan dan Penyelarasan Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Usaha/Industri	33	33	33	33	33	101,8	Pusat		03
Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja	Jumlah Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja	33	33	33	33	33	58,3	Pusat		03
Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	Jumlah Pengembangan Akreditasi dan pembinaan Kelembagaan Berstandart Kebutuhan Industri	60	60	60	60	60	121,1	Pusat		03
Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Pembentukan dan Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK)	1200	1200	1200	1200	1200	86,9	Pusat		03
Penyelengaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	Jumlah Penyelengaraan Job Fair di Lembaga Pendidikan Vokasi	50	50	50	50	50	17,8	Pusat		03
JUMLAH							**196.716,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.924,2
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	362,1
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2.785,2
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	7.629,4
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	75.519,2
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9.147,1
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	17.359,0
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	15.523,3
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	250.230,8
JUMLAH	**382.480,2**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan							**755,6**			
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan							111,2			
Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	25	35	45	55	65	111,2	34 Provinsi		03
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							149,7			
Integrasi sistem informasi kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	10	25	45	70	100	137,2	Pusat		03
Peningkatan kualitas data rutin kesehatan	Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin	0	5	10	20	30	12,6	Pusat		03
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji							344,6			
Pelayanan kesehatan haji	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	231000	231000	231000	231000	231000	344,6	34 Provinsi		04
Pengelolaan Krisis Kesehatan							99,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengurangan risiko krisis kesehatan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	117	123	124	124	124	65,2	1.Aceh Besar, 2.Aceh Singkil, 3.Pidie Jaya, 4.Kota Subulussalam, 5.Mandailing Natal, 6.Kota Gn.Sitoli, 7.Nias, 8.Nias Selatan, 9.Pasaman Barat, 10.Kota Pariaman, 11.Kota Solok, 12.Kota Pangkal Pinang, 13.BangkaTengah, 14.Bangka Selatan, 15.Bengkulu Selatan, 16.Kaur, 17.Seluma, 18.Kepahiang, 19.Bandung, 20.Sukabumi, 21.Cianjur, 22.Bandung Barat, 23. Klaten, 24.Boyolali, 25.Wonogiri, 26.Sukoharjo, 27.Kulon Progo,28.Gn.Kidul, 29.Malang, 30.Bojonegoro, 31.Gresik, 32.Tuban, 33.Pamekasan,		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								34.Sumenep, 35.Sumba Barat, 36.Sumba Timur, 37.Sumba Barat Daya, 38.Sumba Tengah, 39.Banggai, 40.Tojo Una Una, 41.Banggai Kep., 42.Banggai Laut, 43.Buton Utara, 44.Wakatobi, 45.Konawe Utara, 46.Kota Bau Bau, 47.Minahasa, 48.Minahasa Selatan, 49.Kota Tomohon, 50.Minahasa Tenggara, 51.Kota Tangerang, 52. Tangerang, 53.Kab.Tangerang Selatan, 54.Kep.Seribu, 55.Kota Jakarta Utara, 56.Pangandaran, 57.Tasikmalaya, 58.Ciamis, 59.Kota Banjar, 60.Garut, 61.Kota Tasikmalaya,62. Cilacap, 63.Banyumas,		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								64.Kebumen, 65.Purworejo, 66.Purbalingga, 67. Banjarnegara, 68.Wonosobo,69.Temanggung, 70.Magelang,71.Pacitan,72. Ponorogo, 73.Trenggalek, 74.Tulungagung, 75.Blitar, 76.Kediri, 77. Jember, 78.Banyuwangi,79. Lumajang, 80.Karangasem, 81.Klungkung, 82.Bangli, 83..50 Kota, 84..Solok, 85.Tanah Datar, 86.Muaro Jambi, 87.Kota Jambi, 88.Batanghari, 89.Bengkalis, 90.Rokan Hilir, 91.Kota Manado, 92.Kota Bitung, 93.Minahasa Utara, 94.Luwu Timur, 95.Luwu Utara,		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								96.Kota Palopo, 97.Raja Ampat, 98.Teluk Bintuni, 99.Manokwari, 100.Teluk Wondama, 101.Kota Sorong, 102.Gowa, 103.Maros, 104.Bintan, 105.Dumai, 106.Belitung Timur, 107.Karo, 108.Bantul, 109.Seram Bag.Barat, 110.Bima,111. Lombok Barat, 112.Prov.Aceh, 113.Prov.Sumatera Utara,114.Prov.Sumatera Barat, 115.Prov.Bangka Belitung, 116.Prov.Bengkulu, 117.Prov. Jawa Barat		
Penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan	35	35	35	35	35	34,7	Kabupaten/kota terdampak Bencana dan DTPK		06
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan							50,2			
Penyusunan Rancangan Kebijakan Determinan Pembangunan Kesehatan	Jumlah Rancangan Kebijakan Determinan Pembangunan Kesehatan yang dihasilkan	4	4	4	4	4	50,2	Pusat		03
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan							**1.564,2**			
Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan							360,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan life science bidang kesehatan	3	4	4	4	4	104,7	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat		03
Penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	1	1	1	1	1	256,2	34 provinsi		03
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat							469,1			
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang upaya kesehatan masyarakat	Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	116,0	34 provinsi		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah II	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II	1	1	1	7	2	219,9	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku		03
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah V	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V	1	1	1	6	2	133,1	Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar		03
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan							324,5			
Riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	Jumlah hasil riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	10,6	28 provinsi		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah I	Jumlah hasil status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I	1	1	1	7	2	205,6	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel		03
Riset status kesehatan masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional wilayah IV	Jumlah hasil status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV	1	1	1	7	2	108,2	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan							409,8			
Penguatan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian dalam mendukung pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H)	5	8	11	14	17	120,2	17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penguatan sistem pencatatan data rutin program	Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program	2	1	1	1	1	48,5	Pusat		03
Riset status kesehatan masyarakat pada riset kesehatan nasional wilayah III	Jumlah hasil Riset status Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III	1	1	1	7	2	241,1	Ada 7 Provinsi : Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Malut, dan Papua		03
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat							**4.938,0**			
Pembinaan Gizi Masyarakat							2.857,2			
Penanggulangan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil	Persentase ibu hamil kurang energi kronis	16	14,5	13	11,5	10	1.016,0	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Suplementasi gizi mikro pada balita	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	90000	140000	190000	240000	290000	284,6	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	60	70	75	80	85	1.075,3	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	51	70	90	100	100	481,3	514 kabupaten/Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga							195,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja	308	334	360	385	411	195,4	Pusat dan 34 provinsi		03
Pembinaan Kesehatan Keluarga							415,5			
Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	120	200	320	470	514	134,6	70 kabupaten/kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut lansia	45	50	55	60	65	115,4	34 Provinsi		03
Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	960	960	960	960	960	165,5	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							568,6			
Pembinaan Kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Germas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50	361,6	34 Provinsi		03
Penyusunan pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas	3	6	9	12	15	24,3	Pusat		03
Pembinaan posyandu aktif	Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	51	70	90	100	100	182,7	34 Provinsi		03
Penyehatan Lingkungan							901,3			
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	40	50	60	70	90	445,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03, 05
Pembinaan pelaksanaan kabupaten/kota sehat	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420	76,0	34 Provinsi		03, 05
Pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60	64	68	72	76	291,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03, 05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan limbah medis	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	2600	3000	4850	6250	8800	88,9	35 Provinsi	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							**6.250,1**			
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1.811,7			
Pengembangan fasilitas rujukan di Kawasan Indonesia Timur	Jumlah RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	2	2	2	2	2	1.727,5	3 Lokasi		03
Penyusunan rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	-	-	-	2,5	34 Provinsi		03
Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	75	83	90	95	100	15,2	34 Provinsi		03
Pembinaan rumah sakit yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	100	25,9	34 Provinsi		03
Pembinaan RSUD di DTTPK (Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan)	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina	7	14	21	28	35	24,1	15 provinsi		03
Pembinaan puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan yang ditingkatkan SPA sesuai standar	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	250	200	200	200	200	16,3	28 provinsi		03
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer							502,5			
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar	18	51	84	117	150	324,9	28 provinsi		03
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	105	200	300	400	514	129,7	34 Provinsi		03
Pelayanan rujukan non spesialistik di FKTP	Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik ≤ 2%	40	50	60	80	100	37,9	34 Provinsi		03

024.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan UTD yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah	42	126	210	252	294	10,1	34 Provinsi		03
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							190,7			
Penerapan telemedicine	Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine	67	134	201	268	335	62,2	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	Persentase rumah sakit rujukan yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi	20	40	60	80	100	57,2	34 Provinsi		03
Penerapan sistem rujukan terintegrasi	Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi	34	34	34	34	34	25,2	34 Provinsi		03
Pelaksanaan pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	Jumlah RS yang Melaksanakan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit	66	132	198	264	331	33,6	34 Provinsi		03
Pengendalian anti microbial resistance	Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang melakukan surveilan AMR sesuai standar	20	40	60	80	100	12,5	34 Provinsi		03
Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan							124,6			
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu FKTP untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survey akreditasi	4478	4009	4720	6110	5706	59,1	34 Provinsi		03
Pembinaan dalam rangka peningkatan mutu rumah sakit untuk diakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survey akreditasi	1028	851	1195	1169	991	65,5	34 Provinsi		03
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							3.620,6			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pencatatan kematian ibu	Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu	40	50	60	80	100	23,9	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarananya RS UPT vertikal	Jumlah RS UPT vertikal yang dikembangkan dan ditingkatkan sarana dan prasarananya	6	6	6	7	7	3.596,7	7 RS		03
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							**6.935,8**			
Surveilans dan Karantina Kesehatan							1.202,1			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92,9	93,6	94,1	94,6	95	267,5	32 Provinsi		03
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	92,9	93,6	94,1	94,6	95	40,6	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	60	65	70	75	80	260,9	34 Provinsi		03
Peningkatan kekarantinaan kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat	20	40	60	80	100	633,0	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik							1.031,9			
Intensifikasi upaya eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	141	130	119	110	95	315,5	32 Provinsi		03
Intensifikasi upaya eliminasi malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	10	15	20	25	30	62,9	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Intervensi eliminasi schistosomiasis	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28	22,0	28 Desa di 2 kabupaten (Poso dan Sigi)		03
Intervensi eliminasi filariasis	Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi filariasis	106	150	191	207	212	554,1	201 kabupaten/Kota		03
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis	6	8	14	21	25	42,0	Kab/Kota di Papua	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengendalian Penyakit Arbovirosis	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	70	75	80	85	90	35,4	34 Provinsi		06
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung							2.314,0			
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	90	90	90	90	116,2	32 Provinsi		03
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat	62	72	72	72	72	32,0	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	77	80	85	90	95	519,4	32 Provinsi		03
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	77	80	85	90	95	22,7	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penemuan dan pengobatan TBC	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	80	85	90	90	90	1.073,5	32 Provinsi		03
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat	65	70	75	80	85	11,2	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pencegahan dan Pengendalian ISPA	Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana penumonia standar	50	52	55	57	60	35,6	34 Provinsi		03
Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100	503,5	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular							1.243,1			
Deteksi dini kanker	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-59 tahun	283	309	360	411	514	170,0	34 Provinsi		03
Deteksi dini gangguan indera	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi	155	206	308	360	514	139,9	34 Provinsi		03
Deteksi dini faktor risiko PTM	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%	52	129	232	360	514	545,5	34 Provinsi		03
Pelaksanaan pengendalian PTM terpadu di Puskesmas	Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas	103	205	308	411	514	173,4	34 Provinsi		03
Pelayanan berhenti merokok (konseling dan terapi)	Jumlah kabupaten/kota dengan ≥ 40% FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	50	100	175	275	350	204,8	34 Provinsi		03
Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514	9,5	34 Provinsi		03
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah							753,9			
Pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	86	89	93	97	100	753,9	34 Provinsi		03

024.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							242,1			
Kewaspadaan dini kejadian penyakit	Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	80	85	90	95	100	242,1	34 Provinsi		03
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA							148,8			
Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	45	60	75	90	100	40,2	34 Provinsi		03
Pelayanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna napza	Jumlah penyalahguna Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	9500	10000	10500	11000	11500	108,6	34 Provinsi		07
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan							**14.052,1**			
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian							135,9			
Pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasyankes	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	3000	4000	5000	6000	7000	102,7	Fasyankes di Provinsi/kabupaten/ Kota		03
Penggunaan obat sesuai FORNAS di rumah sakit	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	70	75	80	85	90	33,2	RS Prov/kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan							13.835,2			
Penyediaan vaksin baru untuk pneumonia (PCV)	Persentase ketersediaan PCV di provinsi rencana introduksi	100	100	100	100	100	1.633,1	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penyediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	77	79	81	83	85	38,5	Pusat/Prov/ kabupaten/Kota		03
Penyediaan obat gizi	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	100	100	100	100	100	446,9	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak	100	100	100	100	100	11,4	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	100	100	100	100	100	1.718,0	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS	100	100	100	100	100	2.695,0	34 Provinsi		03
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian Malaria	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	100	100	100	100	100	84,0	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Penyediaan buffer obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar	Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan	10	10	10	10	10	1.084,5	34 Provinsi		03
Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	91	92	93	94	95	6.081,8	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar di instalasi farmasi kab/kota	Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	164	264	364	464	514	17,4	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Penerapan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di instalasi farmasi provinsi dan kab/kota	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	68	136	204	272	340	24,6	Pusat/Prov/ kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian							2,7			
Penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	1	1	1	1	1	2,7	Jakarta		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)							46,6			
Produksi alat kesehatan di dalam negeri	Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri	7	7	7	7	7	46,6	Industri Alkes di Provinsi/kabupaten/ Kota		03
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)							31,7			
Pengawasan produk Alkes dan PKRT	Persentase produk alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat	90	90	90	95	95	31,7	Pusat/Prov/ kabupaten/Kota		03
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)							**4.137,2**			
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan							633,8			
Penyediaan bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	2020	1885	1785	1650	1540	633,8	34 Provinsi		03
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan							247,3			
Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapat pelatihan strategis	2700	2700	2700	2700	2700	237,0	34 Provinsi		03
Pelatihan tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit yang dilatih	100	100	100	100	100	10,3	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pendidikan SDM Kesehatan							377,1			
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	155,3	Pusat dan Poltekkes Kementerian Kesehatan		03

024.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	221,8	Pusat dan 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan		03
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan							1.276,9			
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	1356	1493	1200	1200	1200	296,8	100 Puskesmas		03
Pendayagunaan dokter spesialis	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan	660	660	660	660	660	75,2	455 Rumah Sakit		03
Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat	40	40	40	40	40	6,8	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	4177	5487	4000	4000	4000	270,0	500 Puskesmas		03
Penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individudi Papua dan Papua Barat	395	270	200	200	200	14,3	2 Provinsi	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pendayagunaan dokter pasca internsip	Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	0	400	600	800	1000	613,8	34 Provinsi		03
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan							194,3			
Registrasi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	150000	155000	160000	165000	170000	194,3	Pusat		03
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							1.407,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

024.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes di fasyankes Pemerintah	Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	0	500	1000	1500	1500	1.407,8	34 Provinsi		03
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional							**249.969,9**			
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS							249.969,9			
Peningkatan kepesertaan PBI	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	107,2	108,6	110	111,4	112,9	249.938,4	34 Provinsi		03
Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional	2	2	2	2	2	31,5	Pusat		03
JUMLAH							**288.603,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	379,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	477,3
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	1.719,4
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	6.623,0
Program Pendidikan Islam	128.649,9
Program Bimbingan Masyarakat Islam	11.110,9
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	3.281,1
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1.715,8
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	1.403,7
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	905,6
Program Kerukunan Umat Beragama	322,8
Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	108,6
JUMLAH	**156.697,9**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama							**32,3**			
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan							32,3			
Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	32,3	Pusat		03
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama							**1.094,8**			
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an							3,4			
Bahan Bacaan Tafsir dan Literatur Ke-Al-Qur'anan	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		04
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan							1,2			
Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	Diklat Alumni Tenaga Teknis Keagamaan	30	30	30	30	30	0,7	Pusat dan Daerah		04
Alumni Diklat Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu	Diklat Alumni Teknis Keagamaan Penyuluh dan Penghulu	30	30	30	30	30	0,5	Pusat dan Daerah		04
Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi							5,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	1	1	1	1	1	3,0	Pusat dan Daerah		04
Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	2,2	Pusat dan Daerah		04
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan							931,6			
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	40510	40510	40510	40510	40510	829,4	Pusat dan Daerah		03, 04
Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	234	234	234	234	234	102,3	Pusat dan Daerah		04
Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan							153,3			
Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	18	18	18	18	18	59,6	Pusat dan Daerah		04
Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah Hasil Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	16	16	16	16	16	93,8	Pusat dan Daerah		04
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah							**6.242,1**			
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus							66,6			
Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina	30	100	100	100	100	25,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina	30	100	100	100	100	24,0	Pusat dan Daerah		04
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus	75	150	150	150	150	17,2	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Haji Dalam Negeri							3.518,2			
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	231000	231000	231000	231000	231000	123,6	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Asrama Haji	Pengelolaan Asrama Haji	1	1	1	1	1	16,1	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji	Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Haji yang terselenggara	2	2	2	2	2	43,3	Pusat dan Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang terselenggara	10000	204000	204000	204000	204000	85,9	Pusat dan Daerah		04
Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	Asrama Haji yang dikembangkan dan direvitalisasi	10	8	13	16	16	2.625,3	Pusat dan Daerah		04
Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun dan direvitalisasi	40	40	40	40	40	624,0	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Haji							1.823,9			
Petugas haji yang profesional	Petugas haji yang ditingkatkan profesionalismenya	50	2288	2288	2288	2288	1.641,3	Pusat dan Daerah		04
Bimbingan Jemaah Haji	Bimbingan Jemaah Haji yang terselenggara	500	500	500	500	500	171,8	Pusat dan Daerah		04
Advokasi Haji	Advokasi Haji yang terselenggara	12	12	12	12	12	10,8	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji							206,9			
Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji	Jumlah Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji	3	3	3	3	3	30,7	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji	Jumlah Pengelolaan Keuangan Operasional Haji	4	4	4	4	4	51,7	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu	12	12	12	12	12	124,5	Pusat dan Daerah		04
Pelayanan Atase Haji di Jeddah							594,6			
Petugas Haji di Arab Saudi	Terselenggaranya ibadah haji oleh Petugas Haji di Arab Saudi	1	1	1	1	1	594,6	Arab Saudi		04
Pelayanan Haji Luar Negeri							31,9			
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan akomodasi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	13,0	Arab Saudi		04
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	Jemaah Haji yang mendapatkan konsumsi di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	10,0	Arab Saudi		04
Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	Jamaah haji yang mendapatkan Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	214000	214000	214000	214000	214000	8,9	Arab Saudi		04
Program Pendidikan Islam							**101.077,2**			
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam							400,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	Jumlah Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	79	79	79	79	79	131,2	Pusat		03
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	200	210	220	230	240	15,3	Pusat dan daerah		03
Guru/Pengawas/Dosen PAI penerima Beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang menerima Beasiswa S2	0	500	600	700	800	118,9	Pusat dan Daerah		03
Guru PAI yang meningkat kompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya	3950	4000	4500	5000	5500	49,7	Pusat dan daerah		03
GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah GPAI yang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	1000	1500	2000	2500	3000	84,9	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam							2.567,9			
Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan Islam yang Berdaya Saing	500	500	500	500	500	29,3	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	150	160	170	180	190	15,7	Pusat dan Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu	133	133	133	133	133	14,7	Daerah		03
Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Menyelenggarakan Life Skill	100	200	250	300	350	40,8	Pusat dan Daerah		03
Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya	Jumlah Pondok Pesantren yang Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Sanitasinya	30	30	30	30	30	17,6	Daerah		03
Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan	Jumlah Santri Penerima Bantuan Pendidikan Terpadu Anak Harapan	1000	1000	1000	1000	1000	8,8	Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Dibangun	256	260	260	260	260	63,5	Pusat dan Daerah		03
Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren yang Direhabilitasi	245	250	250	250	250	30,7	Pusat dan Daerah		03
Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Keagamaan Islam yang Direhabilitasi	10	15	20	25	30	42,5	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	27540	27540	27540	27540	27540	145,4	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	114516	114516	114516	114516	114516	696,1	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	18562	18562	18562	18562	18562	153,9	Pusat dan Daerah		03
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12	12	12	12	12	29,3	Pusat		03
Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang Bermutu	12	12	12	12	12	29,3	Daerah		03
Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya	Jumlah Pondok Pesantren Daerah 3T yang Ditingkatkan Mutunya	10	12	14	16	18	25,2	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03
Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa	Jumlah Santri Hafidz Al Quran Penerima Beasiswa	0	1000	1000	1000	1000	13,5	Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu	250	250	250	250	250	4,1	Pusat dan Daerah		03
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah, Pendidikan Al Quran dan Pendidikan Pesantren yang Bermutu	170	170	170	170	170	5,2	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	30176	30176	30176	30176	30176	79,7	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	105203	105203	105203	105203	105203	462,4	Pusat dan Daerah		03
Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	46283	46283	46283	46283	46283	314,2	Pusat dan Daerah		03, 04
Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional	4000	4000	4000	4000	4000	331,4	Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah							79.655,2			
Madrasah dan RA yang Terakreditasi	Jumlah Madrasah dan RA yang Terakreditasi	532	1000	1200	1400	1600	42,6	Pusat dan Daerah		03
Siswa Madrasah yang Berdaya Saing	Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing	1535	1600	1700	1800	1900	61,8	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran RA yang ditingkatkan Kualitasnya	0	30	30	30	30	6,4	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas RA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas RA yang direhabilitasi	0	100	100	100	100	76,6	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MI yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun	159	170	180	190	200	28,0	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MTs yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun	180	190	200	210	220	26,2	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun	135	140	150	160	170	27,5	Pusat dan Daerah		03
Dokumen Standar Nasional Pendidikan	Dokumen Standar Nasional Pendidikan	35	35	35	35	35	150,0	Pusat dan Daerah		04
Ruang kelas MI yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MI yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MTs yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03

025.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Ruang kelas MA yang direhabilitasi	Jumlah Ruang kelas MA yang direhabilitasi	0	300	300	300	300	229,8	Pusat dan Daerah		03
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MTs yang diadakan	0	300	350	400	450	107,0	Pusat dan Daerah		03
Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada MA yang diadakan	0	300	350	400	450	93,5	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana madrasah Madrasah yang Diadakan (SBSN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama	136	136	136	136	136	5.871,4	Pusat dan Daerah		03
Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MTs yang dibangun	0	160	170	180	190	178,4	Pusat dan Daerah		03
Laboratorium Komputer MA yang dibangun	Jumlah Laboratorium Komputer MA yang dibangun	0	160	170	180	190	178,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa MI penerima BOS	Jumlah Siswa MI penerima BOS	3894365	3894365	3894365	3894365	3894365	20.562,0	Pusat dan Daerah		03
Siswa MTs penerima BOS	Jumlah Siswa MTs penerima BOS	3358771	3358771	3358771	3358771	3358771	21.675,0	Pusat dan Daerah		03
Siswa MI penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP	939607	939607	939607	939607	939607	2.480,5	Pusat dan Daerah		03
Siswa MTs penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan PIP	745086	745086	745086	745086	745086	3.278,3	Pusat dan Daerah		03
Siswa MA penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP	320372	320372	320372	320372	320372	1.879,5	Pusat dan Daerah		03
Siswa MA penerima BOS	Jumlah Siswa MA penerima BOS	1497606	1497606	1497606	1497606	1497606	13.158,4	Pusat dan Daerah		03
Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	Jumlah Siswa berprestasi pada madrasah penerima beasiswa	2500	2500	2500	2500	2500	7,4	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keagamaan	0	10	10	10	10	12,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	Jumlah Madrasah yang melaksanakan program keterampilan/Kejuruan	0	22	22	22	22	79,0	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu UKS/M	Jumlah Madrasah yang ditingkatan mutu UKS dan sanitasinya	58	58	58	58	58	11,7	Pusat dan Daerah		03
Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	14	15	20	25	30	25,1	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asrama pada Madrasah yang dibangun	Jumlah Asrama pada Madrasah yang dibangun	0	10	10	10	10	24,8	Pusat dan Daerah		03
BOP RA	Jumlah Siswa RA penerima BOP	1331207	1331207	1331207	1331207	1331207	4.685,8	Pusat dan Daerah		03
Ruang kelas RA yang dibangun	Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun	0	35	35	35	35	15,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang direvitalisasi	Jumlah Madrasah yang direvitalisasi	0	5	5	5	5	15,8	Pusat dan Daerah		03
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise)	4	4	4	4	4	2.351,0	Pusat dan Daerah		03
Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi/kebutuhan khusus	0	7	7	7	7	4,5	Pusat dan Daerah		03
MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	Jumlah MAN Insan Cendekia yang mendapatkan bantuan	27	27	27	27	27	451,7	Pusat dan Daerah		03
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1	1	1	1	1	1.398,9	Pusat dan Daerah		03
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam							16.103,2			
PTKI yang Terakreditasi	Jumlah PTKI yang Terakreditasi	1	1	1	1	1	17,5	Pusat		03
Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarana Perpustakaannya	58	58	58	58	58	43,0	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTKI	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya	58	58	58	58	58	400,0	Pusat		03
Penelitian pada PTKI	Penelitian pada PTKI	1	5	10	15	20	66,3	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan Prasarananya melalui SBSN	8	10	10	10	10	5.291,6	Pusat		03
Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	100	100	100	100	100	5,3	Pusat		03
Dosen yang Tersertifikasi	Jumlah Dosen yang disertifikasi	1000	1000	1000	1000	1000	11,5	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Mutunya	42	42	42	42	42	13,5	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	5300	5300	5300	5300	5300	100,0	Pusat		03
Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	Jumlah Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	425	500	500	500	500	21,0	Pusat		03
Bidik Misi PTKI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Bidik Misi PTKI	38000	26364	18576	10788	3000	1.006,2	Pusat		03
Penyelenggaraan LPTK	Jumlah Penyelenggaraan LPTK	7	7	7	7	7	10,9	Pusat		03
Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI yang Ditingkatkan Kompetensinya	99	99	99	99	99	16,2	Pusat		03
Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	115	115	115	115	115	12,0	Pusat		03
PTKIN Penerima BOPTN	Jumlah PTKIN Penerima BOPTN	58	58	58	58	58	5.315,0	Pusat		03
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal nasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan yang dipublikasikan pada jurnal internasional	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	17565	37565	62565	92565	145130	3.733,3	Pusat		03
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah							2.350,9			
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	3492	3500	4000	4500	5000	14,7	Pusat dan Daerah		03
Guru/Pengawas Madrasah penerima beasiswa S2	Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	200	200	200	200	200	44,2	Pusat dan Daerah		03
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	Jumlah Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	1200	1500	2000	2500	3000	120,7	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus	4514	4500	4500	4500	4500	427,7	Pusat dan Daerah		03
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Madrasah dan RA	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA yang Mendapatkan Pengembangan Karir	1662	1700	2000	2200	2400	13,4	Pusat dan Daerah		03
Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah dan RA	1575	1600	1700	1800	1900	25,1	Pusat dan Daerah		03
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	Jumlah KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang Diberdayakan	0	120	130	140	150	306,3	Pusat dan Daerah		03, 04
Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Jumlah Dokumen Madrasah Education Quality Reform (Realizing Education's Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan Madra	1	1	1	1	1	1.398,9	Pusat dan Daerah		03
Program Bimbingan Masyarakat Islam							**10.516,8**			
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah							6.144,1			
Penghulu yang Terbina	Penghulu yang Terbina	3000	3000	3000	3000	3000	102,5	Pusat dan Daerah		04
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	2500	3000	3500	4000	4500	3.637,6	Pusat dan Daerah		04
Keluarga Sakinah yang Terbina	Keluarga Sakinah yang Terbina	18000	18000	18000	18000	18000	91,8	Pusat dan Daerah		04
Pembangunan Balai Nikah	Balai Nikah yang terbangun	228	128	128	128	128	2.090,0	Pusat dan Daerah		04
Buku dan Kartu Nikah	Buku dan Kartu Nikah yang diedarkan	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	58,7	Pusat dan Daerah		04
Rehabilitasi KUA	Jumlah KUA yang terehabilitasi	100	100	100	100	100	88,0	Pusat dan Daerah		04
Sarana dan Prasarana KUA	Sarana dan Prasarana KUA yang ditingkatkan	750	1000	1000	1000	1000	75,6	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf							303,9			
Bantuan Operasional BWI	BWI yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	44,2	Pusat dan Daerah		04
Bantuan Operasional BAZNAS	Baznas yg memanfaatkan bantuan operasional	35	35	35	35	35	13,8	Pusat dan Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi Perekonomian dan Keuangan Syariah	Orang yang melek perekonomian dan keuangan syariah	1500000	2000000	2500000	3000000	3500000	85,9	Pusat dan Daerah		04
Pengamanan Aset Wakaf	Aset wakaf terlindungi	200	250	300	350	400	66,6	Pusat dan Daerah		04
Legalitas Tanah Wakaf	Tanah wakaf tersertifikasi	350	400	450	500	550	15,0	Pusat dan Daerah		04
Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	Lembaga yg mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	816	850	900	950	1000	57,1	Pusat dan Daerah		04
Lembaga zakat yg terakreditasi	Lembaga zakat yg terakreditasi	407	400	350	300	250	21,2	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam							3.292,2			
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS	Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang dapat tunjangan	45000	45000	45000	45000	45000	2.520,0	34 Provinsi		04
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas	5148	5148	5148	5148	5148	278,9	Pusat dan Daerah		04
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	Jumlah event Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist	35	35	35	35	35	150,4	Pusat dan Daerah		04
Dakwah dan Hari Besar Islam	Dakwah dan Hari Besar Islam yang terselenggara	35	35	35	35	35	43,7	Pusat dan Daerah		04
Ormas dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	100	100	100	100	292,9	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Islam yang dikembangkan	34	34	34	34	34	6,3	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah							776,6			
Layanan Syariah	Layanan Syariah	100	100	100	100	100	20,5	Pusat dan Daerah		04
Kitab Suci	Kitab Suci Agama Islam yang dicetak	650000	650000	650000	650000	650000	46,5	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan Hisab Rukyat	Pengelolaan Hisab Rukyat	1000	1000	1000	1000	1000	37,6	Pusat dan Daerah		04
Gedung Pusat Observasi Bulan	Gedung Pusat Observasi Bulan yang ditingkatkan	1	1	1	1	1	32,7	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Islam yang yang suci dan damai	590	1500	1500	1500	1500	639,3	Pusat dan Daerah		04
Program Bimbingan Masyarakat Kristen							**2.790,6**			
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen							884,5			
PIP SMTK/SMAK	Jumlah Siswa SMTK penerima KIP	7953	7953	7953	7953	7953	46,7	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
PIP SMPTK	Jumlah Siswa SMPTK Penerima KIP	2838	2838	2838	2838	2838	12,5	Pusat dan Daerah		03
PIP SDTK	Jumlah Siswa SDTK Penerima KIP	1032	1032	1032	1032	1032	2,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS	8725	8725	8725	8725	8725	71,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa SMPTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS	3088	3088	3088	3088	3088	18,1	Pusat dan Daerah		03
Siswa SDTK Penerima BOS	Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS	2273	2273	2273	2273	2273	10,7	Pusat dan Daerah		03
Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional	1158	1158	1158	1158	1158	26,4	Pusat dan Daerah		03
Guru yang mengikuti Program PPG	Jumlah Guru yang mengikuti Program PPG	700	800	800	800	800	34,4	Pusat dan Daerah		03
Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	1245	8000	9000	10000	11000	352,0	Pusat dan Daerah		03
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0	78	100	200	300	5,1	Pusat dan Daerah		03
Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Pengawas yang memperoleh Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	0	56	56	56	56	2,3	Pusat dan Daerah		03
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	Jumlah Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang Diberdayakan dan Dikembangkan	211	211	211	211	211	268,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	Jumlah Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK) yang memperoleh persiapan akreditasi	52	55	60	65	70	13,0	Pusat dan Daerah		03
Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan penyediaan Sarana dan Prasarana	74	80	85	90	95	21,0	Pusat dan Daerah		03
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen							876,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani	Bimbingan bagi keluarga Kristiani	17	17	17	17	17	12,4	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen yang dikembangkan	23	23	23	23	23	23,1	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	9000	9000	9000	9000	9000	490,5	34 Provinsi		04
Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan	21	21	21	21	21	51,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	Penyuluh Agama Kristen yang terbina	1370	2159	2159	2159	2159	94,4	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)	280	280	280	280	280	82,1	Pusat dan Daerah		04
Pesparawi Nasional	jumlah event Pesparawi Nasional		1			1	57,5	Pusat dan Daerah		04
Pesparawi Nasional	jumlah event Pesparawi Nasional	1	1	1	1	1	57,5	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	0	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen lainnya	Dukungan Layanan Agama dan Keagamaan Kristen	14100	14100	14100	14100	14100	7,0	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen							1.029,7			
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima Bidik Misi	1768	1768	1607	1107	607	77,8	Pusat		03
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa PPA	1361	1361	1361	1361	1361	35,9	Pusat		03
PTA Penerima BOPTN	Jumlah PTA yang Menerima BOPTN	15378	15378	15378	15378	15378	143,8	Pusat		03
Sarana dan Prasarana PTK yang memenuhi Standar	Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana dan Prasarana PTT/AK yang memnuhi standar	95	355	355	355	355	402,5	Pusat		03
Dosen yang bersertifikat	Jumlah Dosen yang disertifikasi	100	100	100	100	100	2,0	Pusat		03
Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi	1952	1952	1952	1952	1952	75,0	Daerah		03
Penelitian yang Bermutu	Penelitian yang Bermutu	150	150	150	150	150	25,0	Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	1690	3380	5070	6760	8450	267,7	Pusat		03
Program Bimbingan Masyarakat Katolik							**1.331,2**			
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik							118,1			
Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin	2150	2150	2150	2150	2150	30,0	Pusat		03
Mahasiswa Penerima Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi	20	20	20	15	10	1,1	Pusat		03
Dosen PTA Katolik Tersertifikasi	Jumlah Dosen PTA Katolik yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	1,5	Pusat		03
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	635	635	635	635	635	55,6	Pusat		03
Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu	35	35	35	35	35	10,7	Pusat		03
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN	Jumlah PTA Katolik Negeri yang Menerima BOPTN	364	364	364	364	364	3,4	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	100	200	300	400	500	15,9	Pusat		03
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik							867,2			
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP	600	600	600	600	600	3,5	Pusat dan Daerah		03
Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	4369	4369	4369	4369	4369	166,8	Pusat dan Daerah		03
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya	120	120	120	120	120	4,2	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	159	159	159	159	159	9,3	Pusat dan Daerah		03
KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	Jumlah KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	264	264	264	264	264	571,0	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK	30	30	30	30	30	9,6	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	55	55	55	55	55	72,2	Pusat dan Daerah		03
SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	Jumlah SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B	25	25	25	25	25	4,1	Pusat dan Daerah		03
Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari	52	52	52	52	52	9,1	Pusat dan Daerah		03
Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari	Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari	53	53	53	53	53	6,5	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya	163	170	175	180	185	11,1	Pusat dan Daerah		03
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik							345,9			
Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	805	805	805	805	805	9,0	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	4042	4042	4042	4042	4042	222,4	34 Provinsi		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik yang dikembangkan	35	35	35	35	35	9,5	Pusat dan Daerah		04
Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	274	274	274	274	274	46,7	Pusat dan Daerah		04
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	Dukungan Layanan Keagamaan Katolik	41	41	41	41	41	0,2	Pusat dan Daerah		04
Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	Jumlah Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		04
Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	45	45	45	45	45	3,4	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Katolik yang Terbina	Pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik	45	45	45	45	45	6,6	Pusat dan Daerah		04
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Katolik yang terbina dan dikembangkan	85	85	85	85	85	15,3	Pusat dan Daerah		04

025.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Katolik yang yang suci dan damai	62	62	62	62	62	17,7	Pusat dan Daerah		04
Program Bimbingan Masyarakat Hindu							**949,7**			
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu							400,9			
Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya	5712	5712	5712	5712	5712	62,7	Pusat dan Daerah		03
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan S2	30	30	30	30	30	3,5	Pusat dan Daerah		03
Penguatan KKG/MGMP	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penguatan KKG/MGMP	186	186	186	186	186	324,8	Pusat dan Daerah		03
PIP Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman	293	293	293	293	293	1,0	Pusat		03
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Beragama Hindu	0	34	34	34	34	9,0	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu							295,1			
Internalisasi Dharma Gita	Internalisasi Dharma Gita	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang dikembangkan	100	115	115	115	115	11,5	Pusat dan Daerah		04
Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga Sukinah yang mendapat bimbingan	1559	1559	1559	1559	1559	27,2	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Sarati Banten	Jumlah Pembinaan Sarati Banten	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	Budaya Keagamaan Hindu yang terbina dan dikembangkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Hindu yang suci dan damai	300	300	300	300	300	56,4	Pusat dan Daerah		04
Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS	Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Hindu Non PNS yang mendapat tunjangan	1700	1700	1700	1700	1700	102,0	34 Provinsi		04
Kelompok Binaan Penyuluh Hindu	Kelompok Binaan Penyuluh Hindu yang ditingkatkan	70	70	70	70	70	2,3	Daerah		04
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina	397	397	397	397	397	20,2	Pusat dan Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu	Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu yang ditingkatkan	1289	1289	1289	1289	1289	12,6	Pusat dan Daerah		04
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu	Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu yang mendapatkan bantuan operasional	330	330	330	330	330	36,8	Pusat dan Daerah		04
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu							253,8			
Beasiswa BIDIK MISI	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa BIDIK MISI	1345	1345	1067	767	467	55,1	Pusat		03
Beasiswa Mahasiswa Miskin	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa Mahasiswa Miskin	1135	1135	1135	1135	1135	15,6	Pusat		03
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa PPA	970	970	970	970	970	14,6	Pusat		03
Penelitian yang berkualitas	Penelitian yang berkualitas	325	325	325	325	325	56,3	Pusat		03
Sertifikasi Dosen	Jumlah Dosen Yang Disertifikasi	50	50	50	50	50	0,5	Pusat		03
Penelitian yang mendapat HAKI	Penelitian yang mendapat HAKI	5	5	5	5	5	1,0	Pusat		03
Kerjasama dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	Jumlah Kerjasama dalam dan Luar Negeri yang dilakukan	4	4	4	4	4	7,5	Pusat		03
Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa PTKH	Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH yang Ditingkatkan Kompetensinya	921	921	921	921	921	40,0	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	398	796	1192	1588	1984	63,1	Pusat		03
Program Bimbingan Masyarakat Buddha							**807,9**			
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha							288,4			
Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan	Penyuluh agama Buddha yang mendapatkan pembinaan	100	100	100	100	100	1,6	Pusat dan Daerah		04
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	1182	1182	1182	1182	1182	121,7	34 Provinsi		04
Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan	44	44	44	44	44	57,2	Pusat dan Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen	35	35	35	35	35	0,4	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya	Keluarga Hittasukhaya yang mendapat pembinaan	100	138	190,44	262,8072	362,673936	3,3	Pusat dan Daerah		04
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha yang dikembangkan	0	34	34	34	34	0,0	Pusat dan Daerah		04
Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha yang Menerima Bantuan Sarana dan Prasarana	27	27	27	27	27	3,5	Pusat dan Daerah		04
Event Keagamaan Buddha yang terselenggara	Jumlah Event Keagamaan Buddha yang Terselenggara (Swayamvara Tripitaka Gatha/STG)	1	1	1	1	1	25,3	Pusat dan Daerah		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadah Agama Buddha yang suci dan damai	0	200	200	200	200	75,5	Pusat dan Daerah		04
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha							192,1			
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1900	1900	1900	1900	1900	71,9	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	1500	1500	1500	1500	1500	48,4	Pusat dan Daerah		03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan	20	20	20	20	20	2,2	Pusat dan Daerah Afirmasi 3T		03
Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	139500	139500	139500	139500	139500	20,7	Pusat dan Daerah		03
Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	2160	2160	2160	2160	2160	48,9	Pusat dan Daerah		03

025.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha							327,4			
Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan Bidik Misi	250	250	100	150	100	12,5	Pusat		03
Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	75	75	75	75	75	2,0	Pusat		03
Dosen yang tingkatkan kompetensinya	Jumlah Dosen yang ditingkatkan kompetensinya	310	310	310	310	310	8,5	Pusat		03
Penelitian Dosen yang bermutu	Penelitian Dosen yang bermutu	116	116	116	116	116	272,6	Pusat		03
Penelitian Mahasiswa yang bermutu	Penelitian Mahasiswa yang bermutu	150	150	150	150	150	3,1	Pusat		03
Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah	180	360	540	720	900	28,6	Pusat		03
Program Kerukunan Umat Beragama							**259,3**			
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama							170,4			
Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	Penerapan Regulasi Kerukunan Umat Beragama	1	1	1	1	1	2,5	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama	1000	1000	1000	1000	1000	24,1	Pusat dan Daerah		04
Desa Sadar Kerukunan	jumlah Desa Sadar Kerukunan	52	52	52	52	52	13,7	Pusat dan Daerah		04
Operasional SEKBER FKUB Provinsi	SEKBER FKUB Provinsi yang dioperasionalkan	34	34	34	34	34	10,0	Pusat dan Daerah		04
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang dioperasionalkan	512	512	512	512	512	120,1	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu							36,9			
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khonghucu	19	19	19	19	19	29,0	Pusat dan Daerah		03
Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama Khonghucu	Jumlah Sarana dan Prasarana	24	24	24	24	24	3,3	Pusat dan Daerah		03
Kompetensi Guru Agama Khonghucu	Jumlah Guru yang Meningkat Kompetensinya	0	50	50	50	50	1,8	Pusat dan Daerah		03
Guru Agama Khonghucu Penerima Insentif	Jumlah Guru yang Menerima Insentif	132	132	132	132	132	2,8	Pusat dan Daerah		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

025.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu							52,0			
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu	Dialog Kerukunan Intern Umat Agama Khonghucu yang dikembangkan	0	19	19	19	19	0,5	Pusat dan Daerah		04
Tunjangan Penyuluh Honorer Konghucu	Penyuluh Honorer Konghucu yang dapat tunjangan	145	145	145	145	145	10,2	34 Provinsi		04
Rumah Ibadah yang suci dan damai	Rumah Ibadat Agama Khonghucu yang suci dan Damai	2	2	2	2	2	41,3	Pusat dan Daerah		04
Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							**51,1**			
Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							17,3			
Register Halal	Register Halal	88000	88000	88000	88000	88000	4,0	Pusat dan Daerah		04
Sertifikat Halal	Sertifikat Halal	220000	220000	220000	220000	220000	4,6	Pusat dan Daerah		04
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi	220000	220000	220000	220000	220000	8,7	Pusat dan Daerah		04
Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal							16,7			
Stakeholder JPH Yang Terbina	Stakeholder JPH Yang Terbina	60	60	60	60	60	9,1	Pusat dan Daerah		04
Stakeholder JPH Yang Terawasi	Stakeholder JPH Yang Terawasi	60	60	60	60	60	7,6	Pusat dan Daerah		04
Kerja Sama dan Standardisasi Halal							17,0			
Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	Naskah Kerjasama Jaminan Produk Halal	18	18	18	18	18	7,1	Pusat dan Daerah		04
Naskah Standardisasi Halal	Naskah Standardisasi Halal	32	32	32	32	32	9,9	Pusat dan Daerah		04
JUMLAH							**125.153,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	897,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	268,6
Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	464,1
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	26.655,4
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	3.579,2
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	833,3
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	863,2
JUMLAH	**33.561,7**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas							**21.747,5**			
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi							2.085,2			
Tenaga kerja yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	382083	400000	400000	400000	425000	2.069,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI	Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNI	50	50	50	50	50	15,4		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas							912,0			
Instruktur pemerintah dan swasta baru	Jumlah instruktur pemerintah dan swasta baru yang dilatih	2160	240	160	160	160	168,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta yang ditingkatkan kompetensinya	7693	8890	9620	10350	11080	743,5	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas							8.069,4			
Pengembangan BLK Komunitas	Jumlah BLK Komunitas yang dikembangkan	2000	500	500	500	500	4.000,0	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang ditingkatkan kualitas mutu lembaga	1513	1500	1500	1500	1500	378,3	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	433	423	423	424	424	3.358,6	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan/Skill Development Fund	Pengembangan pola pendanaan pelatihan	1	1	1	1	1	28,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center	Jumlah pusat pengembangan keahlian	20	22	24	25	25	303,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas							1.121,5			
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri	200000	200000	200000	200000	200000	872,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peserta yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri	1822	3000	5000	7500	8000	248,7	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas							9.559,4			
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	228820	225000	250000	260000	275000	9.559,4	34 Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja							**1.793,5**			
Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja							400,2			
Wirausaha baru inkubasi bisnis	Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis	9000	9270	9550	9835	10130	400,2	34 Provinsi		01
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri							170,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Atase di 12 negara	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural	250000	260000	270000	280000	300000	170,0	UEA, Brunei, Hong kong, Jeddah, Jordan, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Riyadh, Singapura, Taiwan		07
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja							1.132,1			
Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	5000	5250	5513	5788	6078	150,7	34 Provinsi		01
Wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	43340	45057	47782	50171	52680	981,4	34 Provinsi		01
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja							91,2			
Analisis Pasar Kerja pada Sektor Prioritas	Jumlah dokumen analisis pasar kerja pada sektor prioritas	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	35,4	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Layanan Informasi Pasar Kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, badan job portal swasta	Jumlah informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan instansi, kelembagaan, kementerian, dan badan job portal swasta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	55,8	Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							**27,4**			
Peningkatan Penerapan Pengupahan							27,4			
Perusahaan yang mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan struktur skala upah	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang telah menerapkan struktur dan skala upah dan mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan pengupahan	500	700	1000	1200	1500	27,4	Pusat		01
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan							**128,7**			
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak							16,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

026.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Jumlah Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	9000	9500	10000	-	-	16,0	Pusat		03
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja							50,7			
Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	5000	5000	5000	5000	5000	50,7	34 provinsi		01
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							62,0			
Perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma kerja dan jamsos tenaga kerja	8000	8400	8820	9261	9724,05	62,0	34 provinsi		01
JUMLAH							**23.697,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN SOSIAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	2.015,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	139,6
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	2.216,0
Program Rehabilitasi Sosial	3.889,5
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	157.247,9
Program Pemberdayaan Sosial	2.056,7
Program Penanganan Fakir Miskin	144.816,5
JUMLAH	**312.381,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN SOSIAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							**1.051,3**			
Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial							1.051,3			
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir	107200000	109600000	110700000	111800000	112900000	419,6	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Tersedianya Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	6	6	6	6	6	631,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							**1.040,9**			
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)							559,7			
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	12000	12000	12000	12000	12000	559,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial							481,2			
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/dikembangkan profesinya	27695	32000	35000	38000	40000	170,9	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	189	195	200	210	220	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	200	214	221	228	195	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	55	55	55	55	55	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	100	100	100	100	100	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak	300	300	300	300	300	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	50	100	100	150	150	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalanggunaan Napza	1200	1200	1200	1200	1200	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	240	288	346	415	498	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang	50	100	100	100	100	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV	44	44	44	44	44	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial anak	120	140	150	170	109	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	110	250	350	450	520	0,0			03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi	5000	12000	18000	20000	23000	310,3	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Program Rehabilitasi Sosial							**3.209,0**			
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza							1.192,6			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21714	25000	27000	28000	30000	0,0	34 Provinsi		03
Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21714	25000	27000	28000	30000	1.192,6	34 Provinsi		07
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas							1.001,8			
Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra (eksemplar)	47000	50000	52000	53000	55000	19,7	BLBI Abiyoso (Jawa Barat)		04
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	45000	45000	46000	46000	46000	982,1	34 Provinsi		03
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang							5,6			
Mantan Warga Binaan Pemasyarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Mantan Warga Binaan Pemasyarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	50	50	50	50	50	5,6	34 Provinsi		07
Rehabilitasi Sosial Anak							365,0			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi anak	Anak Balita, Anak/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	27000	27000	27500	27500	27500	365,0	34 Provinsi		03
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia							644,0			
Penjaminan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut yang terstandar bagi lanjut usia	Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	30200	31000	32000	33000	35000	644,0	34 Provinsi		03
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							**156.298,6**			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam							1.367,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana	Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	163500	163500	163500	163500	163500	595,1	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	247404	250000	255000	257000	260000	772,4	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Penanganan Darurat dan Pemulihan Sosial	Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana	500	2000	2000	2000	2000	0,0	Pusat		06
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	163500	163500	163500	163500	163500	0,0	34 Provinsi		06
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	247404	250000	255000	257000	260000	0,0	34 Provinsi		06
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial							508,8			
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	10000	10000	10000	10000	10000	54,0	34 Provinsi		07
Perlindungan sosial bagi korban bencana sosial	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	43018	44000	44000	44000	44000	301,0	34 Provinsi		03
Korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan	120000	121000	121000	121000	121000	153,8	34 Provinsi		07
Jaminan Sosial Keluarga							154.422,2			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	154.422,2	514 Kab/Kota; 34 Provinsi	1. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda; 2. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)	02, 03
Program Pemberdayaan Sosial							**1.252,0**			
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat							840,7			
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Dunia Usaha yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	170	220	250	300	350	26,2	34 Provinsi		03
Pengembangan Sistem layanan dan rujukan terpadu	Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT	220	300	380	460	514	401,7	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial	360	600	760	920	1028	66,6	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh peningkatan kapasitas	6000	6000	6000	6000	6000	57,3	34 Provinsi		03
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan	7201	7201	7201	7201	7201	288,9	34 Provinsi	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	03
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)							411,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	2667	3000	3500	4000	4500	411,3	Pusat		03
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	50	50	50	-	-	0,0	Kab. Nias Selatan		02
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)	90	90	50	-	-	0,0	Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya		02
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan	-	70	70	70	70	0,0	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Program Penanganan Fakir Miskin							**144.440,4**			
Penanganan Fakir Miskin Wilayah I							50.979,8			
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	648,9	34 Provinsi		03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	477,2	34 Provinsi		05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5513785	5513785	5513785	5513785	5513785	49.853,7	11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	02, 03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah II							48.458,0			
KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KUBe)	KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	1600	1700	1800	1900	2000	0,0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	644,3	34 Provinsi		03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	477,2	34 Provinsi		05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5238377	5238377	5238377	5238377	5238377	47.336,4	12 Provinsi; 151 Kab/Kota		03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III							45.002,6			
Bantuan Kelompok Usaha Bersama Bagi Fakir Miskin	KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	1000	1100	1200	1300	1300	0,0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	4847877	4847877	4847877	4847877	4847877	43.861,7	11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una,	- Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T), - Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay	02, 03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua,		
								Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika		
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin dan Rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	45000	45000	45000	45000	45000	661,4			03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6000	6000	6000	6000	6000	479,5			05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

027.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	1000	1000	1000	1000	1000	0,0	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	225	225	225	225	225	0,0	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una		02
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	75	75	75	75	75	0,0	Kab. Lombok Utara		02
JUMLAH							**307.292,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1.709,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	289,3
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	447,9
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	395,3
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	8.779,6
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	7.355,5
Program Planologi dan Tata Lingkungan	2.313,8
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2.244,0
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2.480,1
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.626,8
Program Pengendalian Perubahan Iklim	1.303,6
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	3.204,5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5.469,2
JUMLAH	**39.619,2**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK							**37,5**			
Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan							37,5			
Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	20	20	20	20	20	11,4	pusat		06
Dokumen Penerapan Standar	Jumlah Dokumen Penerapan Standar	25	25	25	25	25	9,9	pusat		06
Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	10	15	20	25	7,6	pusat		06
Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	5	15	20	30	40	7,6	pusat		06
Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)	Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	2	2	2	2	2	1,0	pusat		06
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan							**337,2**			
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan							28,1			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan	5	10	10	10	10	12,1	Pusat		06
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	Jumlah KHDTK yang mengimplementasikan pilot IPTEK	0	2	2	2	2	16,0	Pusat		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan							61,3			
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	Jumlah data spesies kayu pada aplikasi AIKO KLHK	0	1050	1150	1250	1350	50,0	Pusat		06
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan nilai tambah hasil hutan	5	10	10	10	10	11,3	Pusat		06
Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan							106,6			
Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan	Jumlah Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun	1	0	0	0	0	74,0	Provinsi Banten	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Sertifikasi laboratorium lingkungan hidup	Jumlah sertifikasi laboratorium lingkungan hidup daerah yang diterbitkan	-	6	6	6	6	12,0	6 wilayah pulau		06
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan	3	5	5	5	5	20,6	Pusat		06
Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Kehutanan dan Penanganan Perubahan Iklim							11,7			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan Perubahan Iklim	5	10	10	10	10	11,7	Pusat		06
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)							129,4			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan tematik daerah	15	30	30	30	30	65,4	Pusat		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati	Jumlah KHDTK yang mengimplementasikan pilot IPTEK	0	8	8	8	8	64,0	Pusat		06
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan							**284,2**			
Peningkatan Usaha Hutan Produksi							50,0			
Produksi hasil hutan kayu (hutan alam, hutan tanaman (termasuk hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)	Jumlah produksi hasil hutan kayu	47	50	55	57	60	50,0			01
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan							21,0			
Pengembangan industri kehutanan berbasis kayu	Jumlah Produk Kayu Olahan Bersertifikat Legalitas Kayu	45	45	45	45	45	6,2			01
Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Peraturan Perundangan terkait Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui Pembukaan Kran Ekspor Log Terbatas	1	1	1	1	1	4,8		9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan industri primer kehutanan berbasis nonkayu	Jumlah industri primer kehutanan berbasis nonkayu	6	6	7	7	7	10,0			01
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi							84,7			
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	10	30	50	70	100	84,7			01, 06
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							128,5			
Produksi HHBK	Jumlah Produksi HHBK	353000	375000	400000	425000	450000	82,5			01
Penanaman /pengkayaan pada hutan produksi	Luas penanaman di hutan produksi	310000	378000	403000	428000	453000	46,0			01, 06
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung							**7.489,9**			
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat							6.669,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	56000	40000	30000	25000	20000	5.740,5	33 Provinsi	-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana -Pemulihan 4 (empat) DAS kritis -Ibu Kota Negara (IKN)	01, 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	3000	5000	5000	5000	5000	502,0	33 Provinsi	-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana -Pemulihan 4 (empat) DAS kritis -Ibu Kota Negara (IKN)	01, 06
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove/pantai	1000	1250	1250	1250	1250	167,3	33 Provinsi		06
Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Jumlah kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	34	34	34	34	122,1	34 provinsi		06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	1500	1500	1500	1500	1500	137,8	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung							186,2			
KPH yang masuk kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk kategori Maju	10	20	30	40	50	90,0			01, 06
Produksi HHBK	Jumlah Produksi HHBK	3000	3000	3000	3000	3000	96,2			01
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS							534,0			
Pengembangan Sistem Data dan Informasi DAS Realtime	Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS Realtime yang dikembangkan	1	1	1	1	1	194,0	34 provinsi		06
Peningkatan Kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS	Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	34	34	34	34	340,0	34 provinsi		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat							100,0			
Pengendalian Kerusakan Danau	Jumlah danau yang dilakukan pengendalian kerusakannya	15	15	15	15	15	100,0			01
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							**7.173,5**			
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam							1.894,8			
Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	70	70	70	70	70	1.731,3	Pusat dan Daerah		01, 06
Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	552	552	552	552	552	122,1			01, 06
Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	4	4	4	5	5	5,0	Pusat		06
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Ha)	180,64	180,64	180,64	-	-	36,4	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pengelolaan Kawasan Konservasi							4.547,0			
Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (opened area)	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	950,0			01, 06
Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	500	1500	2500	3500	4500	2.651,3			01, 06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderawasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15	15	15	15	15	850,0			01
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1200	1200	1200	1200	1200	95,7	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Konservasi Spesies dan Genetik							621,8			
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	10	10	10	10	10	493,2	Pusat dan Daerah		06
Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1000	1000	1000	1000	1000	6,8	Pusat dan Daerah		06
Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	5	5	5	5	5	100,0	Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura		06
Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)	1800	1800	1800	1800	1800	6,8	Pusat		01
Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial							109,9			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	22	33	44	55	54,9			01
Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	11	22	33	44	55	54,9			06
Program Planologi dan Tata Lingkungan							**2.249,0**			
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan							2.073,7			
Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Luas kawasan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	65	65	65	65	65	61,0	34 Provinsi		01, 06
Terlaksannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	130000	600000	600000	600000	600000	929,0	Pusat		03
Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	1	1,6	1	0	0	260,0			01, 06
Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	4	8,5	9	9	3	780,0			06
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	175000	175000	175000	-	-	43,7	Provinsi Kalimantan Timur	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor							128,6			
Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7	7	8	7	23,1	34 provinsi		06
Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	Jumlah daerah yang melakukan verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara partisipatif	7	10	8	6	3	88,4			01, 06
KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya tampung	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung	30	30	30	30	30	5,0	34 provinsi		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN	1	-	-	-	-	12,2	Pusat	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan							46,7			
Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)	Pengembangan dan penerpaan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov)	3	3	3	3	3	46,7	34 provinsi		06
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM							**2.144,4**			
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK							306,6			
Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak	Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang kompeten	2310	3210	3210	3210	3210	75,7			01
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	7000	7000	7000	7000	7000	230,8		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							1.240,9			
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	472	473	473	473	473	628,0	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis SKKNI	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472	473	473	473	473	612,9	SMK kadipaten (jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan							203,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	518	730	840	960	1080	140,0	34 provinsi		06
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya)	10	20	30	40	50	6,2			03
Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi	0	160	180	210	250	56,9	34 provinsi		03
Peningkatan Penyuluhan							393,8			
Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat	Jumlah KTH Mandiri	100	200	300	400	500	120,8			03
Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi).	5000	6000	6500	7000	7500	273,0			03
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan							**2.198,3**			
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial							648,4			
Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan	500000	1000000	1250000	750000	500000	648,4			03
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat							1.550,0			
Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok pengelola kawasan hutan yang meningkat kinerjanya	2077	3150	3600	3300	3250	1.388,6			03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kemitraan investasi/usaha	Jumlah mitra usaha perhutanan sosial (mitra)	125	150	175	200	225	46,4			03
Industri nilai tambah produk	jumlah sentra pengelolaan produk unggulan (sentra industri kecil)	14	14	14	14	14	52,5			03
Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial	Jumlah fasilitasi pemasaran produk perhutanan sosial (kelompok usaha)	50	50	50	50	50	62,5			03
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan							**3.470,6**			
Pencegahan dan Pengamanan Hutan							1.576,9			
Operasi pengamanan Kawasan Hutan	Jumlah Operasi pengamanan Kawasan Hutan	100	130	140	160	180	548,4	33 provinsi		06
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	110	250	300	380	400	1.028,6	34 provinsi		06
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup							330,6			
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	46	102	112	122	140	330,6	Pusat		06
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi							667,6			
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK	1000	1500	1700	1950	2100	489,2	Pusat		06
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	550	700	800	900	178,5	Pusat		06
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan							895,4			
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	173	285	315	350	400	583,6	Pusat		06
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210	500	600	750	1000	311,7	Pusat		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengendalian Perubahan Iklim							**1.095,8**			
Mitigasi Perubahan Iklim							51,3			
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline	23,56	23,56	23,58	25,24	25,25	51,3	34 provinsi		06
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan							1.044,5			
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla	1200	1200	1200	1200	1200	865,5	24 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan		06
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pelaksanaan pemadaman udara /pemantauan dari udara	170	170	170	170	170	179,0	34 provinsi		06
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3							**2.987,2**			
Pengelolaan B3							70,1			
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	5	5	5	5	70,1	25 provinsi		06
Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3							549,2			
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	6	7	7	7	549,2	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3							593,2			
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah non-institusi yang terpulihkan	10000	20000	20000	20000	30000	560,0			06
Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	250000	200000	250000	200000	200000	33,2			06
Pengelolaan Sampah							1.774,8			
Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah pengurangan timbulan sampah	5,64989887	6,22516131	6,811364	7,14407293	7,4827549	100,9	34 provinsi		06
Peningkatan Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Nasional	Jumlah penanganan timbulan sampah	19,2610189	19,1942474	19,1242143	19,0508611	18,9741285	673,9	34 provinsi		06

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Tersedianya fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	0	1	1	1	1	1.000,0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan							**5.249,2**			
Pengendalian Pencemaran Udara							269,6			
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS	10	25	26	26	27	249,1	Tersebar	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	1668	2625	3000	3375	3750	20,5	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran Air							1.385,0			
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	4	10	20	20	20	124,6	Sungai Citarum		06
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu	71	148	157	113	90	889,6	15 DAS prioritas pemulihan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1668	2625	3000	3375	3750	75,8	34 provinsi		06
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air	49	50	50	50	50	265,5	14 DAS Prioritas		06
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)	-	33	40	60	60	29,5	Seluruh provinsi		05, 06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut							168,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	4	5	6	8	10	37,9	34 provinsi		06
Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya	34	34	34	34	34	90,0	34 provinsi		06
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	20	25	30	40	50	10,2	34 provinsi		06
Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up	40	50	60	70	80	25,2	34 provinsi		06
Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	2	2	2	2	2	5,5	Batam, Bintan		06
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka							392,5			
Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77,5	80	90	90	90	381,1	4 provinsi		06
Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	80	85	90	110	113	11,4	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut							3.033,3			
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300000	300000	300000	300000	300000	1.858,7	7 provinsi		06
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1800	35000	35000	35000	35000	1.135,1	12 provinsi		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

029.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	75	75	75	75	75	18,4	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.		06
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	60	60	60	60	60	14,7	Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat		06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	300	350	400	450	500	6,5	34 provinsi		06
JUMLAH							**34.716,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	1.744,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	265,6
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.656,7
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.266,0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.012,0
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2.321,3
Program Pengelolaan Ruang Laut	2.569,6
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.715,5
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.452,7
JUMLAH	**27.004,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP							**8,3**			
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri							8,3			
Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	2	2	2	8,3	Pusat		07
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							**3.837,3**			
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							1.070,4			
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	25200	26000	27000	28000	30000	289,3	34 Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	01
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	41000	42000	43000	44000	45000	543,6	34 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	7	7	7	7	10	237,5	Tegal, Banyuwangi, Ambon, Medan, Sukamandi, Bitung, Palembang		01
Pendidikan Kelautan dan Perikanan							1.901,5			
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	17	17	17	17	17	34,4	14 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkompeten (orang)	8293	9173	10633	12286	13115	1.155,8	19 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan	21	22	22	22	22	711,3	19 UPT	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							22,1			
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	6	6	7	7	7	22,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan							35,3			
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6	35,3	Jakarta Utara		01
Riset Perikanan							445,0			
Data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	11	11	11	11	11	137,5	11 WPP	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Teknologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan	23	30	30	30	30	105,2	5 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Perikanan	10	12	12	12	12	170,3	4 Provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	8	10	12	14	14	32,1	15 PUD		01
Riset Kelautan							363,0			
Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	8	10	10	12	12	25,0	34 provinsi		06
Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	2	2	3	3	3	10,0	11 WPP		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	7	7	7	7	7	207,2	7 Provinsi		01
Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	500	500	500	500	500	87,9	BROL-Perancak		01
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	Jumlah Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar	1	1	1	1	1	32,9	BROL-Perancak		01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							**3.300,5**			
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan							344,9			
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	30	50	70	90	110	183,4	34 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun	Jumlah alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun	500	750	1000	1250	1500	150,5	34 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	4	4	4	4	4	11,0	Kab. Maluku Tenggara Barat		02
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							2.416,0			
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera	7	7	7	7	7	199,7	7 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera	80	81	82	83	84	127,9	7 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara	17	18	19	20	21	326,3	21 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara	80	81	82	83	84	132,9	21 lokasi		01
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	12	3	4	5	6	423,7	18 lokasi		01
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	1	2	3	4	5	444,5	15 lokasi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	-	3	3	3	3	750,0	3 lokasi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke	4	4	4	4	5	11,0	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							393,7			
Alokasi Izin yang Diterbitkan	Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan	10500	10600	10650	10700	10750	16,0	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah	34	34	34	34	34	84,1	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang tersalurkan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	150000	120000	120000	120000	120000	107,7	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2000	2000	2000	2000	2000	34,3	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif)	2250	2400	2550	2750	3000	16,6	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	Jumlah fasilitasi kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata	40	40	40	40	40	15,0	25 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	4	4	4	4	4	11,0	Kab. Natuna		02
Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan yang difasilitas sertifikasinya	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	15000	15000	15000	15000	15000	27,8	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	Jumlah Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	2900	4000	5000	6000	7000	26,3	34 Provinsi		01
Kampung Nelayan Maju	Jumlah Kampung Nelayan Maju	-	10	10	15	20	55,0	20 lokasi		01
Pengelolaan Sumber Daya Ikan							145,9			
Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan (Persen)	60	70	80	90	100	12,7	11 WPP		01
Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	12000	15000	16000	18000	20000	21,7	UPT Pusat dan UPT Daerah	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	11	11	11	11	101,1	11 WPP	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik	4	4	4	4	4	10,4	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							**3.292,1**			
Pengelolaan Perbenihan Ikan							1.057,2			
Produksi induk unggul	Jumlah produksi induk unggul (ekor, non kumulatif)	1000000	1100000	1200000	1300000	1400000	327,1	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang mandiri (skala 1-5)	4	4	5	5	5	18,5	Rote Ndao		02
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	48960722	50000000	51000000	52000000	54000000	137,1	34 provinsi		01
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat	158520000	159000000	160000000	161000000	162000000	90,5	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat	8277000	9000000	9500000	10000000	10500000	219,8	34 provinsi		01
Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat	200000	350000	400000	450000	500000	73,6	18 provinsi		01
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan	80	110	120	140	150	42,6	18 provinsi		01
Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang bersertifikat	Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi	60	70	80	90	100	148,0	33 provinsi		01
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							1.480,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan	38	100	110	120	125	552,9	10 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan	Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya Berkelanjutan	10	20	30	40	50	302,5	10 Provinsi		01
Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan	Jumlah monitoring residu	10000	14000	18000	22000	26000	256,0	24 Provinsi		01
Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana UPT	15	15	15	15	15	369,1	10 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan							566,3			
Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi	Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya	5000	6000	7500	9000	10000	39,1	33 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	551	800	900	1000	1100	506,7	34 provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (Bidang)	Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya	13000	13000	13000	13000	13000	8,5	23 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang Mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha	4	4	4	4	5	12,0	Kab. Sumba Timur		02
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan							188,3			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan pakan mandiri	91	101	110	120	130	177,0	20 provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang	4	4	4	4	5	11,3	Kota Sabang		02
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							**1.611,9**			
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							586,7			
Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan	Jumlah Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan	31	35	35	40	45	385,3	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan	Jumlah Sarana Distribusi hasil perikanan yang disediakan	41	41	41	45	50	171,9	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika	4	5	5	5	5	29,6	Kab. Mimika		02
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							803,0			
Sarana dan Prasarana Pemasaran yang dibangun	Jumlah Pasar Ikan yang dibangun	4	2	2	2	2	151,8	10 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
	Jumlah Sentra Kuliner yang dibangun	2	10	10	10	10	0,0	10 Provinsi		01
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dibangun	0	3	3	3	3	450,0	3 Provinsi	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Keikutsertaan dalam Promosi Skala internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)	250	275	300	325	350	63,7	5 negara	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi Gemarikan	34	34	34	34	34	137,5	34 Provinsi		03
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan							146,0			
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (dokumen)	2250	2500	2750	3000	3250	54,6	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan yang disediakan	400	500	500	500	500	57,0	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	2	2	2	2	2	34,4	5 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan							76,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	20	30	35	40	45	9,5	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pelaku usaha yang diifasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	1510	1620	1730	1840	1950	30,7	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penumbuhan wirausaha KP	Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan	200	200	200	200	200	11,0	34 Provinsi	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Sentara Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak	4	5	5	5	5	25,0	Kab. Biak-Numfor		02
Program Pengelolaan Ruang Laut							**2.084,4**			
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut							593,1			
Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (ha, kumulatif)	10000000	14500000	17500000	19000000	20000000	143,6	34 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11,1	Kab. Kepulauan Mentawai		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luasan kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	39,9	9 Provinsi		06
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Luas Kawasan konservasi yang operasional (ha, kumulatif)	10000000	14500000	17500000	19000000	20000000	307,7	46 Lokasi		06
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	5	5	5	5	60,0	Pusat		06
	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	0,0	Pusat		06
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	30,8	Pusat		06
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							765,5			
Lahan Garam yang difasilitasi	Jumlah lahan garam yang difasilitasi (ha)	600	750	750	750	750	381,0	12 Provinsi		01
Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	70	100	100	100	100	170,7	12 provinsi		01
	Jumlah sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun	4	2	2	2	2	80,0	4 provinsi		01
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	Jumlah Kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	4	5	5	5	5	17,9	Daerah		01, 06
Pengelolaan Biofarmakologi	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun	2	2	2	2	2	20,0	10 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT	12	14	16	18	20	85,0	18 Provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud	4	4	4	4	4	11,0	Kepulauan Talaud		02
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							583,4			
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya	7	7	7	7	7	186,1	8 Provinsi		02
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	4	4	4	4	14,1	Kab. Morotai		02
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	12	12	12	12	12	130,0	Daerah		06
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	187,4	60 Lokasi		06
Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	5	12	18	24	30	30,0	7 provinsi		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	6	6	5	5	35,8	27 Lokasi		06
Perencanaan Ruang Laut							142,4			
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	41,5	34 Provinsi	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	01
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	0,0	34 Provinsi		01
Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi WP3K	13	24	29	24	31	28,0	31 Provinsi		01
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	6	6	4	0	0	19,7	10 perairan laut		01
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan	25	28	19	9	5	41,9	75 kawasan		01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	4 Tingkat Kemandirian (Skala 1-5)	11,3	Kab. Maluku Barat Daya		02
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							**4.949,7**			
Pemantauan dan Operasi Armada							4.888,8			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Operasional Kapal Pengawas	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	2.470,4	Pusat		07
Operasional Pesawat Patroli	Jumlah hari operasi pesawat patroli	150 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180 Hari Operasi	180,7	Pusat		07
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah hari operasional speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	50 Hari Operasi	279,8	Pusat dan Daerah		07
Kapal pengawas yang dibangun	Jumlah kapal pengawas yang dibangun	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	846,7	Pusat		07
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang tersedia	18 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	259,0	Pusat		07
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	69,0	Pusat		07
Speed Boat Pengawas yang dibangun	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	175,4	Pusat		07
Armada Pengawasan yang siap operasi	Jumlah armada pengawasan yang siap operasional	103 Unit	116 Unit	129 Unit	142 Unit	155 Unit	575,0	Pusat dan Daerah		07
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	1.010 Kelompok	1.050 Kelompok	1.100 Kelompok	1.150 Kelompok	1.200 Kelompok	32,8	Pusat dan Daerah		06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							18,8			
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	35	40	45	50	55	18,8	Daerah		06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							42,1			
Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	17100	21500	21750	22000	22350	42,1	Pusat dan Daerah		01
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							**822,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Karantina Ikan							459,2			
Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI	100	100	100	100	100	136,1	34 Provinsi		01
Sarana dan prasarana pengawasan karantina	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan karantina	25	28	30	32	32	296,8	10 Provinsi		01
Laporan penindakan pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan	95	95	95	95	95	26,3	34 Provinsi		01
Pengendalian Mutu							275,9			
Sarana dan prasarana pengujian mutu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	33	35	37	38	38	148,8	34 Provinsi		01
Operasional pengawasan mutu hasil perikanan	Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor	98	98	98	98	98	113,9	34 Provinsi		01
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	200	200	200	200	200	13,3	34 Provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							87,4			
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	150	150	150	150	150	87,4	34 Provinsi		01
	Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI 8340:2016)	7	7	7	7	7	0,0	34 Provinsi		01
	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016	3	3	3	3	3	0,0	34 Provinsi		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

032.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Jumlah Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)	7	7	7	7	7	0,0	34 Provinsi		01
JUMLAH							**19.906,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	1.164,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	2.871,0
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	652,1
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	2.743,5
Program Pembinaan Konstruksi	4.402,5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	139.740,0
Program Penyelenggaraan Jalan	290.514,6
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	195.311,8
Program Pengembangan Perumahan	54.373,0
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1.163,6
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.186,9
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	1.514,6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.922,8
JUMLAH	**701.560,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR							**68,0**			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air							49,5			
Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana	*Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (dokumen)*	-	*2*	-	-	-	2,0	*Terpusat*		05
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)*	-	*2*	*2*	*2*	*2*	40,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu,*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Cilegon, Serang,Singkawang, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Palopo, Konawe, Gorontalo, Sorong, Bandung, Jabodetabek		
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (Kab./Kota)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	7,5	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua*		05
Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman							18,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan pedoman rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana	*Jumlah dokumen pedoman peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan (dokumen)*	-	*2*	-	-	-	2,0	*Terpusat*		
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami (Kab./Kota)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	7,5	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua*		05
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana likuefaksi	*Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi (Kab./Kota)*	*1*		*1*		*1*	9,0	*Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuifaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya*		05
Program Pembinaan Konstruksi							**90,0**			
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi							90,0			
Pembangunan dan peningkatan ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana	*Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana (wilayah sungai)*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*	90,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis*		05
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman							**128.722,4**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							10.442,9			
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah luasan kawasan permukiman yang dibangun dan dikembangkan (Hektar)*	*258*	*742*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	5.459,6	*34 Provinsi*		05
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	*Jumlah luasan permukiman yang dibangun infrastruktur berbasis masyarakat (Hektar)*	*963*	*5.037*	*-*	*-*	*-*	4.703,3	*34 Provinsi*		05
Penyediaan Infrastruktur Permukiman dalam Rangka Peremajaan	*Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peremajaan (kawasan)*	*-*	*4*	*6*	*8*	*10*	280,0	*Kawasan Perkotaan*		05
Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan							500,0			
Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	*Jumlah NSPK terkait penataan bangunan dan lingkungan (NSPK)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	20,0	*Pusat*		05
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	*Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	480,0	*Kawasan Metropolitan*		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman							82.846,2			
SPALD-T Skala Kota/Regional	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)*	*6.270*	*6.270*	*6.270*	*6.270*	*6.270*	18.682,0	*28 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
SPALD-T Skala Permukiman	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)*	*21.663*	*21.663*	*21.663*	*21.663*	*21.663*	25.894,0	*168 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	*Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)*	*24*	*77*	*101*	*152*	*151*	4.435,0	*374 Kab/Kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	*Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)*	*39*	*46*	*46*	*46*	*47*	25.391,0	*224 kab/kota*		05
Sistem Pengelolaan Drainase	*Luas (hektar) yang difasilitasi sistem pengelolaan drainase*	*6*	*-*	*-*	*-*	*-*	5,8	*Kota Jayapura*		05
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Alat Berat	*Jumlah alat berat di TPA (unit)*	*39*	*46*	*46*	*46*	*47*	1.120,0	*224 kab/kota*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	*Jumlah kapasitas sampah yang terkelola unit TPS3R (ton/hari)*	*189*	*189*	*377*	*565*	*565*	691,0	*120 kab/kota*		05
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	*Jumlah TPST yang terbangun (unit)*	*7*	*8*	*15*	*23*	*22*	5.844,0	*55 kab/kota*		05
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	*Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)*	*-*	*-*	*1*	*1*	*1*	15,0	*Kota Malang, Kota Palembang, dan DKI/ Kota Bogor*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Implementasi Dokumen SSK (APBN)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota)*	*66*	*66*	*62*	*62*	*52*	308,0	*Seluruh provinsi*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)*	*87*	*87*	*87*	*88*	*88*	218,5	*437 kab/kota*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Sampah (APBN)	*Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota)*	*83*	*83*	*83*	*84*	*84*	208,5	*417 kab/kota*		05
Penyusunan Rancangan NSPK	*Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun (unit)*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	16,0	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)	*Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)*	*66*	*66*	*64*	*58*	*54*	15,4	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	*Jumlah NSPK yang tersusun (unit)*	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*	2,0	*Pusat*	*Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)*	05
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							34.556,4			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	*Kapasitas Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota , SPAM berbasis Masyarakat, SPAM Regional (lpd)*	*2.214*	*2.827*	*3.440*	*4.052*	*4.665*	25.411,3	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Perluasan SPAM	*Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)*	*87.560*	*13.140*	*175.120*	*218.899*	*262.679*	8.028,9	*Seluruh Provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM	*Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum di kabupaten/kota (kab/kota)*	*509*	*509*	*509*	*509*	*509*	1.055,0	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Peraturan pengembangan SPAM yang tersusun (NSPK)*	*3*	*4*	*4*	*3*	*2*	11,2	*Pusat*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	*Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (kab/kota)*	*101*	*102*	*102*	*102*	*102*	50,0	*508 kab/kota sebagai pemenuhan akses dasar air minum dan Provinsi DKI Jakarta*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum							376,9			
Peningkatan Kerjasama Investasi Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi (BUMN/BUMD)*	*14*	*11*	*21*	*21*	*23*	76,5	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja BUMN/BUMD (BUMN/BUMD)*	*30*	*32*	*32*	*32*	*30*	261,4	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Penyusunan Business Plan pada BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM	*Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Business Plan (BUMN/BUMD)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	39,0	*Seluruh provinsi*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Program Penyelenggaraan Jalan							**195.194,5**			
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							72.944,3			
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*15*	*15*	*8*	*8*	1.099,0	*Kepulauan Riau*		05
Jembatan Klarik Cs	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	107,3	*Kepulauan Riau*		05
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*10*	*12*	80,0	*Kepulauan Riau*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan lintas Bintan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	25	-	250,0	*Kepulauan Riau*		05
Jalan perbatasan Kalbar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	12	-	-	-	-	98,4	*Kalimantan Barat*		05
Jalan perbatasan Kaltara	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	47	70	36	19	19	1.933,3	*Kalimantan Utara*		05
Jalan perbatasan NTT	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	33	50	45	45	5	1.256,0	*Nusa Tenggara Timur*		05
Jalan Trans Kepulauan NTT	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	7	-	-	30,0	*Nusa Tenggara Timur*		05
Jalan Lintas Barat Aceh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	10	100,0	*Aceh*		05
Jalan Lintas Barat Jambi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	15	-	85,0	*Jambi*		05
Jalan Lintas Pantura Banten	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	150	-	-	85,0	*Banten*		05
Jalan Penggantian Jembatan Pantura Banten (cs)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	1	-	-	-	-	75,0	*Banten*		05
Jalan Lintas penghubung Kalbar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	6	29	57	57	57	2.330,7	*Kalimantan Barat*		05
Jalan Lintas Penghubung Sumsel	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	5	10	-	111,0	*Sumatera Selatan*		05
Jalan Lintas Penghubung Sumut	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	2	10	10	6	6	475,6	*Sumatera Utara*		05
Jalan Lintas Selatan Kalsel	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		7	8			348,0	*Kalimantan Selatan*		05
Jalan Lintas Tengah Aceh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	32	11	11	11	11	1.790,4	*Aceh*		05
Jembatan Sp. Uning - Takengon	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	1	-	-	-	140,0	*Aceh*		05
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	2	-	-	11,8	*Jawa Timur*		05
Jalan Lintas Tengah Kalteng	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	20	13	13	6	6	562,6	*Kalimantan Tengah*		05
Jalan Lintas Timur Riau	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	20	193,0	*Riau*		05
Jalan Lintas Timur Sumatera	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	65	387,0	*Lampung*		05
Jalan Lintas Utara Bali	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	1.083	1.083	933	-	1.050,0	*Bali*		05
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	3	2	5		222,2	*Bali*		05
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	1	-	-	-	80,0	*Bali*		05
Jalan Pansela Jawa Tengah	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	3	8	10	15	13	496,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Pansela Jawa Timur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	38	54	60	60	36	2.496,6	*Jawa Timur*		05
Jalan Pansela Yogyakarta	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	5	18	6	6		495,1	*Yogyakarta*		05
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial (APBN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	19	48	75	75	45	786,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	786	-	-	-	-	1.218,7	*Sulawesi Tengah*		05
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	1	-	-	-	-	325,0	*Sulawesi Tengah*		05
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan dampak bencana Palu	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	1	-	-	-	-	23,2	*Sulawesi Tengah*		05
Jalan Penghubung lintas timur dan barat Sumatera	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	8	15	-	200,0	*Bengkulu*		05
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	15	20	25	15	5	856,0	*Gorontalo*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Gorontalo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*20*	*20*	-	-	960,0	*Gorontalo*		05
Jalan Penghubung lintas utara - selatan Jabar	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*3*	-	-	-	-	136,6	*Jawa Barat*		05
Jalan Perbatasan Kaltim	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*63*	*55*	*32*	*6*	*6*	1.580,3	*Kalimantan Timur*		05
Jalan Trans Papua	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*59*	*59*	*39*	*39*	*39*	3.155,0	*Papua*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	05
Jalan Trans Papua Barat	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*	2.768,6	*Papua Barat*	*Jalan Trans Papua Merauke - Sorong*	05
Jembatan di Jalan Trans Papua	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	3.140	3.230	2.680	2.325	2.389	7.245,6	Papua	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	887	967	967	887	887	2.206,5	Papua Barat	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	
Jalan Perbatasan Papua	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	200,0	*Papua*		05
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	0,0	*Sulawesi Utara*		05
Jembatan Samota	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	*1*	-	-	-	-	150,0	*Nusa Tenggara Barat*		05
Jembatan Batam-Bintan (Potensi/ Penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1*	-	-	-	10,0	*Kepulauan Riau*		05
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi/ Penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	10,0	*Sumatera Selatan*		05
Jembatan Muna-Buton (Potensi/ Penyiapan)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1*	-	10,0	*Sulawesi Tenggara*		05
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1*	-	-	-	549,3	*Kalimantan Timur*		05
Jembatan Pulau Laut (potensi)	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1*	-	-	0,0	*Kalimantan Selatan*		05
Jembatan Lewamori	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	500,0	*Nusa Tenggara Barat*		05
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura - Sarmi)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*15*	*15*	*15*	*15*	750,0	*Papua*		05
Jembatan Kapuas 3	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	300,0	*Kalimantan Barat*		05
Jembatan Srandaan	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	700,0	*Yogyakarta*		05
Jembatan Kahayan 2	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	300,0	*Kalimantan Tengah*		05
Jembatan Sambas Besar	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	-	*1*	1.860,0	*Kalimantan Barat*		05
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*2*	*2*	-	-	120,0	*Sulawesi Barat*		05
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana - Windesi)	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	-	-	*5*	*5*	-	120,0	*Papua Barat*		05
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	-	*4*	*5*	*5*	-	135,0	*Papua Barat*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Trans Bangka	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*10*	*12*	*16*	*12*	350,0	*Bangka Belitung*		05
Jalan Trans Belitung	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5*	*8*	*10*	*7*	210,0	*Bangka Belitung*		05
Jalan Lingkar Rembang - Lasem	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5*	*5*	*6*	*5*	*5*	249,9	*Jawa Tengah*		05
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar Sidareja)(Pansela)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	-	-	-	-	25,0	*Jawa Tengah*		05
Jembatan Inari	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1*	-	-	900,0	*Papua Barat*		05
Jalan By Pass Balige	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7*	*7*	-	-	-	135,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*4*	*4*	*4*	*4*	150,1	*Jawa Tengah*		05
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*3*	*3*	*3*	85,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Pangarengan)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*3*	*3*	-	50,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3*	*3*	-	-	45,0	*Jawa Tengah*		05
Jembatan Ploso	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	*1*	-	-	-	200,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab. Purworejo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*6*	*6*	*6*	*6*	176,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Siantar By Pass	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*4*	*4*	*4*		96,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan Akses KEK Galang Batang I	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	-	-	-	11,8	*Kepulauan Riau*		05
Jalan Bypass BIL-Mandalika	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*17*	*10*	*11*	*13*	1.392,0	*Nusa Tenggara Barat*		05
Jalan Akses KI Seimangke	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*10*	30,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan Akses KEK Sorong	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*7*	*7*	*7*	*7*	444,1	*Papua Barat*		05
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*5*	*8*	*7*	*6*	249,9	*Papua Barat*		05
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*		*5*	*6*	*2*		120,0	*Papua Barat*		05
Jalan Akses KI Gresik	*Panjang jalan yang dibangun (km)*					*5*	60,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Akses KI Madura	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*5*	50,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Akses KI Brebes	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*3*	30,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Akses KI Jorong	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*6*	60,0	*Kalimantan Selatan*		05
Jalan Akses KI Batu Licin	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*6*	60,0	*Kalimantan Selatan*		05
Jalan Akses KI Surya Borneo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*1*	10,0	*Kalimantan Tengah*		05
Jalan Akses KI Ketapang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*12*	123,0	*Kalimantan Barat*		05
Jalan Akses KI Kemingking	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*5*	50,0	*Jambi*		05
Jalan Akses KI Tanggamus	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*2*	20,0	*Lampung*		05
Jalan Akses KI/ KEK Palu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*7*	60,0	*Sulawesi Tengah*		05
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*13*	*13*	600,0	*Kalimantan Utara*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses KSPN Borobudur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*20*	-	-	-	175,0	*Yogyakarta*		05
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7*	*21*	*21*	*21*	*21*	1.402,2	*Nusa Tenggara Timur*		05
Jalan Akses KSPN Wakatobi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*30*	225,0	*Sulawesi Tenggara*		05
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*20*	223,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*5*	*4*	*5*	*4*	150,0	*Nusa Tenggara Barat*		05
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*8*	-	-	48,0	*Aceh*		05
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*10*	*10*	-	165,0	*Banten*		05
Jalan akses KI Sadai	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	*4*	*1*		58,5	*Bangka Belitung*		05
Jembatan Nibung 1-2	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	*1*	-	-	40,0	*Bangka Belitung*		05
Jalan akses KI Tanjung Enim	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*3*	*4*	*4*		85,0	*Sumatera Selatan*		05
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*2*	*4*	*5*		95,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab. Brebes	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*3*	*5*	*3*		95,0	*Jawa Tengah*		05
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*			*5*	*5*		80,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Akses KSPN Danau Toba	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*5*	*17*	*13*	*13*	*13*	1.333,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan akses KI Weda	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*25*	275,0	*Maluku Utara*		05
Jembatan Kapota (Wakatobi)	*Jembatan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*1*	250,0	*Sulawesi Tenggara*		05
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk Sigintung)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*4*	*5*			90,0	*Kalimantan Tengah*		05
Jalan Akses Bandara Bima	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*4*	-	-	45,0	*Nusa Tenggara Barat*		05
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*2*	-	20,0	*Kalimantan Selatan*		05
Jalan Akses Bandara Waingapu	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	*3*	-	-	120,0	*Nusa Tenggara Timur*		05
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	67,2	*Kalimantan Timur*		05
Jalan Akses Pelabuhan Depapre	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	*3*	-	-	72,0	*Papua*		05
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*5*	-	60,0	*Jawa Timur*		05
Jalan Akses Pelabuhan Kuala Enok	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*4*	-	40,0	*Riau*		05
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	*Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)*			*1 (berlanjut)*	*1(berlanjut)*	*1(selesai)*	400,0	*Jambi*		05
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3*	*3*	*3*	*3*	240,0	*Jambi*		05
Jalan Akses Pelabuhan Pancur	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-		*4*	-	-	30,0	*Kepulauan Riau*		05
Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*4*	*6*	*6*	*6*	*6*	636,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan Akses Pelabuhan Patimban	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*8*					130,0	*Jawa Barat*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan (dari PKN)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*20*	193,0	*Riau*		05
Jalan Akses Pelabuhan Sangata	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	-	-	-	-	48,0	*Kalimantan Timur*		05
Jalan Akses Pelabuhan Sintete	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	120,0	*Kalimantan Barat*		05
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	-	*8*	80,0	*Sumatera Selatan*		05
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*8*	*8*	*8*	*8*	816,0	*Sumatera Barat*		05
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*6*	*2*	-	-	193,6	*Jawa Barat*		05
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*3*	-	72,0	*Sulawesi Utara*		05
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	-	*2*	-	36,0	*Sumatera Barat*		05
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	-	-	-	10,0	*Kalimantan Barat*		05
Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*4*	-	-	30,0	*Jawa Timur*		05
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*3*	*3*	-	-	60,0	*Sulawesi Barat*		05
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*4*	-	-	-	30,0	*Jawa Timur*		05
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*4*	*4*	*5*	-	89,0	*Jawa Tengah*		05
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer/Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*6*	-	-	-	30,0	*Jawa Timur*		05
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*3*	*4*	-	-	50,0	*Jawa Tengah*		05
Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*3*	*5*	*5*		85,0	*Jawa Tengah*		05
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	-	*4*	-	-	19,0	*Jawa Tengah*		05
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas (Mamasa - Bts Sulsel)	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*	-	*3*	*5*	*5*	-	120,0	*Sulawesi Barat*		05
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	*Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	-	*5*	*8*	*10*	*12*	164,5	*Papua*		05
Penanganan jalan lingkar Danau Anggi Giji dan Anggi Gida	*Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*	-	*4*	*4*	-	-	60,0	*Papua Barat*		05
Penanganan Jalan lingkar Nunukan	*Panjang Jalan lingkar yang dibangun/ditingkatkan (km)*	-	-	*10*	-	-	80,0	*Kalimantan Utara*		05
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo)	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*2*	*2*	-	-	30,0	*Yogyakarta*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu - Bonehau - Batuisi - Bts Sulsel)	*Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)*		*6*	*7*	*8*	*6*	250,8	*Sulawesi Barat*		05
Jalan Trans Yapen	*Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)*			*3*	*4*		74,8	*Papua*		05
Jalan Lingkar Pulau Weh	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*4*	-	-	40,0	*Aceh*		05
Jalan Pulau Terluar Maluku	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*25*	*25*	*25*	*25*	1.680,0	*Maluku*	*Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan*	05
Jembatan Bian	*Jembatan yang dibangun (lokasi)*	-	-	-	*1*	-	180,0	*Papua*		05
Pembangunan Fly Over Kemang dan Duplikasi Overpass	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*			*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	200,0	*Banten*		05
Pembangunan Fly Over Bitung	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	175,0	*Banten*		05
Pembangunan Fly Over Canguk	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	53,9	*Jawa Tengah*		05
Pembangunan Fly Over Madiun (Yos Sudarso)	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	75,0	*Jawa Timur*		05
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1(selesai)*	-	-	-	148,8	*Sumatera Utara*		05
Pembangunan Fly Over Pinang Baris	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	151,6	*Sumatera Utara*		05
Pembangunan Fly Over/ Underpass Mendukung Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta-Semarang	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	-	*1(berlanjut)*	*1(berlanjut)*	5.346,0	*Jawa Barat, Jawa Tengah*	*KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)*	05
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	100,0	*Jawa Tengah*		05
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*		*5*	*5*	*6*	*9*	300,0	*Sumatera Utara*		05
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*2*	*30*	*30*	*18*	*17*	2.530,2	*Sulawesi Selatan*		05
Jalan lingkar perkotaan Jawa	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	*7*	-	*16*	-	-	350,1	*Jawa Timur*		05
Jalan Lingkar Pekalongan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*3*	*5*	*6*	*4*	180,0	*Jawa Tengah*		05
Pembangunan Jalan Lingkar Temanggung - Parakan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	*5*	*4*	-	98,8	*Jawa Tengah*		05
Jalan Lingkar Samarinda	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*4*	*4*	*4*	*4*	373,0	*Kalimantan Timur*		05
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	*5*	*5*	*5*	*5*	220,0	*Jawa Timur*		05
Pembangunan Fly Over Kopo	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1(berlanjut)*	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	381,2	*Jawa Barat*		05
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	379,0	*Kepulauan Riau*		05
Pembangunan Fly Over Gamping	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	215,5	*Yogyakarta*		05
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	*Panjang Underpass terbangun (lokasi)*	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	-	-	-	122,9	*Jawa Barat*		05
Pembangunan Fly Over Aloha	*Panjang Fly Over terbangun (lokasi)*	-	-	*1(berlanjut)*	*1 (selesai)*	*100*	180,0	*Jawa Timur*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	-	4	5	2	94,4	*Jawa Timur*		05
Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	-	5	5	8	-	210,1	*Jawa Timur*		05
Jalan Lingkar Kuningan	*Panjang jalan yang dibangun (km)*	4	5	5	-		159,6	*Jawa Barat*		05
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol							122.250,2			
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	3	3	3	3	3	3.903,5	*Tersebar (Jawa)*		05
Jalan Tol Semarang - Demak (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	-	-	-	-	16	7.100,0	*Jawa Tengah*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	05
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	472	590	495	325	149	105.524,0	*Tersebar (Sumatera)*	*Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung*	05
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	2	2	2	2	2	2.661,8	*Tersebar (Kalimantan)*		05
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	*Panjang jalan tol yang dibangun (km)*	3	3	3	3	3	3.061,0	*Tersebar (Sulawesi)*		05
Program Pengelolaan Sumber Daya Air							**187.772,2**			
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak							76.917,6			
Pencegahan kebakaran hutan di kawasan rawa	*Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan tata kelola airnya (wilayah sungai)*	-	3	3	3	3	180,0	*Tersebar*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi	*Luas lahan irigasi yang diairi dari bendungan (Ha)*	*105.461*	*14.697*	*116.375*	*53.959*	*52.057*	5.771,0	*Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Rajui, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Gondang, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso,*		05
Pembangunan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa kewenangan pusat yang dibangun (Ha)*	*15.000*	*79.625*	*79.625*	*79.625*	*79.625*	50.925,0	*Tersebar*		05
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat	*Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi (Ha)*	*80.000*	*115.403*	*115.403*	*115.403*	*115.403*	16.070,3	*Tersebar*		05
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	*Luas jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi (Ha)*	*11.388*	*22.153*	*22.153*	*22.153*	*22.153*	2.056,9	*Tersebar*		05
Pengembangan sistem water accounting	*Jumlah sistem data pemantau ketersediaan air yang dibangun (unit)(kumulatif)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	60,0	*Terpusat*		05
Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)	*Jumlah daerah irigasi dengan pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)(daerah irigasi)*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	180,0	*Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi	*Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi (daerah irigasi)*	*5*	*10*	*10*	*10*	*11*	322,0	*Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan*		05
Penyediaan air untuk komoditas perkebunan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk perkebunan rakyat (unit)*	*-*	*1*	*1*	*2*	*2*	24,0	*Tersebar*		05
Penyediaan air untuk komoditas peternakan rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk peternakan rakyat (unit)*	*-*	*2*	*2*	*2*	*2*	32,0	*Tersebar*		05
Penyediaan air untuk komoditas hortikultura rakyat	*Jumlah prasarana penyediaan air yang dibangun untuk hortikultura (unit)*	*-*	*2*	*3*	*3*	*3*	44,0	*Tersebar*		05
Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat	*Luas irigasi tambak rakyat yang dibangun (Ha)*	*229*	*1.193*	*1.193*	*1.193*	*1.193*	1.252,3	*Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB*		05
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai							32.751,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah dokumen strategi pengelolaan risiko banjir perkotaan (dokumen)*	*5*	*8*	*9*	*10*	*10*	210,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai pada kota : Ambon, Bima, Manado, Pontianak, Samarinda, Medan, Semarang, Cirebon, Padang, Pekanbaru, Jambi, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Palembang, Bengkulu, Mataram, Denpasar, Surabaya, Banjar Jawa Barat, Tasikmalaya, Sukabumi,*		05
Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara jawa	*Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara jawa yang memiliki rencana pengelolaan pesisir terpadu (kawasan perkotaan)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	40,0	*Terpusat*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di WS kritis (Km)*	*24*	*13*	*15*	*15*	*18*	2.991,5	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)*	*32*	*14*	*10*	*11*	*4*	2.845,0	*Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai	*Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya di Kawasan Prioritas lainnya (Km)*	*62*	*50*	*55*	*60*	*65*	6.777,2	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		05
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis (unit)*	*3*	*5*	*8*	*10*	*10*	1.003,5	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	*Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)*	*3*	*4*	*4*	*10*	*10*	866,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		05
Pembangunan Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb)	*Jumlah kota dengan peningkatan sistem drainase utama (kota)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	3.870,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai melintasi perkotaan yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		05
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana bencana banjir	*Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun atau ditingkatkan (km)*	*5*	*8*	*8*	*10*	*10*	3.480,0	*Tersebar*		05
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	*Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatakan di wilayah sungai kritis (unit)*	*2*	*5*	*10*	*15*	*20*	525,0	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	05
Pembangunan dan peningkatan check dam penahan banjir dan sedimen	*Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai prioritas (unit)*	*12*	*10*	*10*	*15*	*20*	700,0	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*		05
Pembangunan dan peningkatan sabo dam penahan banjir dan sedimen di wilayah sungai prioritas	*Jumlah sabo dam yang dibangun atau ditingkatkan (unit)*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*	1.145,0	*Tersebar*		05
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)*	*13*	*14*	*15*	*15*	*15*	641,5	*Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur*	*Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa*	05
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	*Panjang tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)*	*9*	*10*	*15*	*20*	*20*	7.656,8	*Kawasan prioritas lainnya dan pulau pulau terluar*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu							621,8			
Penetapan peraturan pemerintah terkair SDA	*Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (peraturan)*	-	2	2	-	-	4,0	*Pusat*		05
Pembuatan dokumen pola dan rencana PSDA	*Jumlah dokumen kebijakan PSDA wilayah sungai kewenangan pusat yang ditetapkan (dokumen)*	29	38	47	56	64	105,3	*Tersebar*		05
Penyusunan dokumen penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	*Jumlah pedoman penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai (dokumen)*	1	-	-	-	-	2,0	*Pusat*		05
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah sungai	*Jumlah wilayah sungai yang dinilai kinerja pengelolaannya (wilayah sungai)*	-	2	2	3	3	15,0	*Tersebar*		05
Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan ICT pengelolaan infrastruktur SDA (unit)*	-	7	8	9	10	68,0	*Tersebar*		05
Pengembangan GIS (Geographic Information System) dan Pemodelan Sumber Daya Air	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan GIS dan pemodelan sumber daya air (unit)*	-	7	8	9	10	170,0	*Tersebar*		05
Pengembangan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi hidrologi dan lingkungan sumber daya air (unit)*	-	7	8	9	10	170,0	*Tersebar*		05
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai kritis (unit)*	4	4	4	4	4	50,0	*DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan*	*Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis*	05
Pengembangan sistem peringatan dini banjir	*Jumlah sistem peringatan dini bencana banjir di wilayah sungai prioritas lainnya (unit)*	3	3	3	3	3	37,5	*Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir*	*Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana*	05
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							56.770,5			
Perencanaan pembangunan bendungan baru dengan protokol berkelanjutan	*Jumlah dokumen perencanaan bendungan protokol berkelanjutan (dokumen)*	1	1	1	1	1	25,0	*Terpusat*		05
Perencanaan pembangunan bendungan dengan skema KPBU	*Jumlah dokumen perencanaan bendungan dengan skema KPBU (dokumen)*	1	1	1	1	1	25,0	*Terpusat*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan pengembangan tampungan alami	*Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	20,0	*Terpusat*		05
Bendungan baru yang selesai dibangun	*Jumlah pembangunan bendungan multiguna lanjutan (unit)*	*45 lanjutan 11 selesai*	*34 lanjutan 11 selesai*	*23 lanjutan 12 selesai*	*11 lanjutan 7 selesai*	*4 selesai*	42.415,1	*Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung,*		05
Bendungan baru yang dibangun	*Jumlah bendungan multiguna baru yang dibangun (unit)*	*-*	*4 baru*	*3 baru 4 lanjutan*	*2 baru 7 lanjutan*	*2 baru 9 lanjutan*	12.401,4	*Bendungan Rongkong, Bendungan Matenggeng, Bendungan Mbay, Bendungan Pelosika, Bendungan Jenelata, Bendungan Digul, Bendungan Busuk, Bendungan Lambakkan, Bendungan Kusan, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Warsamson*	*18 Waduk Multiguna*	05
Bendungan yang direhabilitasi	*Jumlah bendungan yang direhabilitasi / ditingkatkan (unit)*	*2*	*1*	*1*	*1*	*-*	230,0	*Bendungan Wonogiri, Benanga, Bili-bili, Sutami*		05
Tampungan alami yang direvitalisasi	*Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi (kumulatif) (unit)*	*8*	*8*	*10*	*10*	*15*	1.319,0	*Tersebar*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya	*Jumlah tampungan alami yang dikembangkan manfaatnya (unit)*	*-*	*1*	*1*	*1*	*1*	60,0	*Tersebar*		05
Penyelesaian sertifikasi operasi bendungan	*Jumlah bendungan yang memiliki sertifikat operasi (unit)*	*10*	*17*	*9*	*7*	*12*	275,0	*Tersebar*		05
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku							19.713,4			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar	*Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	360,2	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulaewsi Utara, Riau, Kepulauan Riau*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	*Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)*	*0*	*4*	*4*	*5*	*4*	5.783,8	*Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Barat*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	*Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	3.320,8	*Kawasan Metropolitan Banjarmasin, Denpasar, Manado, Palembang, Makassar, Perkotaan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kota Baru Sofifi, Maja, Tanjungselor, Ibu Kota Negara*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)	*Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	856,7	*KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, DPP Danau Toba, DPP Padang-Bukittinggi, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KEK/DPP Tanjung Kelayang, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, KI Tanggamus, KEK/DPP Tanjung Lesung, DPP Borobudur dsk, KI Madura, DPP Bali, KEK/DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong-Tanah Laut, DPP Derawan-Berau, KI Batulicin, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Tanah Kuning, DPP Wakatobi, KI/KEK Palu,*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								DPP Manado-Likupang, KI/KEK Bitung, KEK/DPP Morotai, KI Teluk Weda, DPP Raja Ampat, KI/KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, KEK/DPP Singosari, KI Tenayan, KI Brebes, KEK Be Creative District Karawang, KEK Be Creative District Maja-Rangkas, KI Ladong, KI Katibung, KI Tanjung Buton, KI Sumbawa Barat, KI Pesawaran, KI Batanjung, KEK Kendal, KI Way Pisang, KI Takalar, DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih, DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh, DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya, DPP Baru Sambas-Singkawang		
Penyediaan air baku di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa	*Tambahan debit air baku di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)*	-	*2*	*0*	-	-	796,8	*Kabupaten Cirebon, Pekalongan*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	*Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)*	*2*	*3*	*4*	*3*	*5*	5.674,6	*tersebar*	*Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*	05
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku	*Jumlah unit infrastruktur penyedia air baku yang direhabilitasi (unit)*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	1.016,8	*Tersebar*		05
Pengawetan dan pengisian kembali air tanah	*Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan recharge air tanah (unit)*	-	*7*	*8*	*9*	*10*	340,0	*Tersebar*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi (conjunctive use)	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (unit)*	-	*7*	*8*	*9*	*10*	510,0	*Tersebar*		05
Pengembangan sistem informasi air tanah	*Jumlah BBWS/BWS yang mengembangkan sistem informasi air tanah (unit)*	-	*7*	*8*	*9*	*10*	170,0	*Tersebar*		05
Bendungan yang dimanfaatkan untuk air baku	*Jumlah debit air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)*	*6*	*1*	*10*	*6*	*1*	883,7	*Bendungan Paya Seunara, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Raju, Bendungan Titab, Bendungan Jatigede, Bendungan Teritip, Bendungan Gondang, Bendungan Sei Gong, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Bendungan Sindangheula, Bendungan Logung, Bendungan Marangkayu, Bendungan Kuningan, Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng, Bendungan Tukul, Bendungan Pidekso, Bendungan Tugu, Bendungan Karalloe, Bendungan Keureuto, Bendungan Tapin, Bendungan Passeloreng,*		05

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
								Bendungan Lolak, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Karian, Bendungan Rukoh, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ladongi, Bendungan Ciawi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Semantok, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Sadawarna, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Sidan, Bendungan Margatiga, Bendungan Bagong, Bendungan Randugunting, Bendungan Napun Gete, Bendungan Temef, Bendungan Meninting, Bendungan Jlantah, Bendungan Manikin,		
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA							997,5			
Peningkatan keamanan bendungan yang memiliki risiko tinggi	*Jumlah bendungan dengan risiko tinggi yang dirurunkan indeks resikonya (unit)*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*	450,0	*Tersebar*		05
Konservasi daerah tangkapan air bendungan	*Jumlah konservasi daerah tangkapan air bendungan (unit)*	*10*	*17*	*9*	*7*	*12*	275,0	*Tersebar*		05
Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara	*Jumlah peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara (unit)*	*828*	*828*	*828*	*828*	*828*	272,5	*Pusat*		05
Program Pengembangan Perumahan							**51.081,0**			
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial							3.905,5			
Pembangunan PSU Perumahan	*Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU (unit)*	*22.500*	*47.970*	*47.970*	*71.950*	*71.955*	3.905,5	*34 Provinsi*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Perumahan Swadaya							27.095,3			
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan (unit)*	-	*3.000*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	1.125,0	*34 Provinsi*		05
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah (Unit)*	*12.750*	*2.700*	*2.700*	*4.000*	*4.000*	1.500,0	*34 Provinsi*		05
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Bantuan peningkatan kualitas (unit)*	-	*40.000*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	10.000,0	*34 Provinsi*		05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (bedah rumah)	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)*	*166.000*	*72.000*	*72.000*	*108.000*	*146.700*	13.470,2	*34 Provinsi*		05
Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya Mendukung KSPN	*Jumlah pembangunan baru rumah swadaya mendukung KSPN (unit)*	*300*	*440*	*440*	*660*	*660*	250,0	*10 KSPN Super Prioritas*		05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Membangun KSPN	*Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang Mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas (unit)*	*2.450*	*510*	*510*	*765*	*765*	250,1	*10 KSPN Super Prioritas*		05
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	*Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)*	-	*100.000*	*100.000*	*150.000*	*150.000*	500,0	*34 Provinsi*		05
Penyediaan Rumah Khusus							2.030,1			
Pembangunan Rumah Khusus	*Jumlah rumah khusus yang terbangun (unit)*	*2.000*	*1.570*	*1.570*	*2.355*	*2.505*	2.030,1	*34 Provinsi*		05
Penyediaan Rumah Susun							18.050,1			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja, dan ASN	*Jumlah Rumah Susun yang Terbangun (unit)*	*3.341*	*4.600*	*4.600*	*6.900*	*6.900*	13.300,1	*34 Provinsi*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	05
Pembangunan Rumah Susun Menggunakan Skema KPBU	*Jumlah Rumah Susun yang Dibangun Menggunakan Skema KPBU (unit)*	-	-	-	*5.000*	*10.000*	0,0	*6 Metropolitan*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	05
Pembangunan rumah ASN di ibu kota negara	*Jumlah rumah yang dibangun (unit)*	-	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	4.750,0	*Ibu Kota Negara*	*Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)*	05
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah							**43,0**			
Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah							43,0			
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 6000 Ha*	*1*					2,0	*Pusat*		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

033.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	*Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang disusun*		*3*				41,0	*Pusat*		05
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo							**130,0**			
Pengendalian Lumpur Sidoarjo							130,0			
Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana lumpur Sidoarjo	*Panjang tanggul dan infrastruktur penahan lumpur sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi (km)*	*28*	*10*	*8*	*7*	*5*	130,0	*Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur*		05
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							**2.851,8**			
Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan							2.806,4			
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	*Jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga)*	*312*	*68.342*	*-*	*-*	*-*	2.796,2	*34 Provinsi*		05
Layanan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	*Jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)*	*58.460*	*85.000*	*110.000*	*135.000*	*161.540*	10,2	*34 Provinsi*		05
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan							45,4			
Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	*Jumlah rumah tangga yang terverifikasi untuk mendapatkan subsidi perumahan (rumah tangga)*	*102.500*	*157.500*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	45,4	*Pusat*		05
JUMLAH							**565.952,9**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

034.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	270,9
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	739,9
JUMLAH	**1.010,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

034.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan							**28,2**			
Koordinasi Penegakan Hukum							16,7			
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1	1	1	1	1	16,7	Pusat		07
Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional							11,5			
Penguatan perilaku tertib di ruang publik melalui Gerakan Indonesia Tertib	Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib	1	1	1	1	1	11,5	Pusat		04
JUMLAH							**28,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	212,3
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	1.122,1
JUMLAH	**1.334,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian							**285,0**			
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi							15,0			
Koordinasi Kebijakan Reformasi Regulasi Cipta Lapangan Kerja	Ditetapkannya Undang-Undang dan Naskah Akademik UU Cipta Lapangan Kerja	1 UU dan 1 Naskah Akademik	-	-	-	-	15,0	Pusat		01
	Terselesaikannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja	15 Peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	0,0	Pusat		01
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	0,0	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri							10,0			
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Subtitusi Impor	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Subtitusi Impor	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,0	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	3,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional							5,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

035.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	2,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	2,5	Pusat		01
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan							255,0			
Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan implementasi program Kartu Prakerja	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	1 Paket Rekomendasi	250,0	Pusat		03
	Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,0	Pusat		03
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	2 paket rekomendasi	5,0	Pusat		01
JUMLAH							**285,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

036.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	191,1
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	568,7
JUMLAH	**759,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

036.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							**260,0**			
Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya							210,0			
Perluasan diseminasi GNRM pada Masyarakat	Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	1	1	1	1	148,4	Pusat		04
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang Melaksanakan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental	49	49	49	49	49	45,8	Pusat		04
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM	1	1	1	1	1	15,8	Pusat		04
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)							50,0			
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	Rekomendasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan	10	7	5	3	3	50,0	181 Kab/Kota; 11 Provinsi		03
JUMLAH							**260,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	913,4
Program Pengembangan Kepariwisataan	19.310,6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.456,9
JUMLAH	**24.680,9**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Kepariwisataan							**12.422,9**			
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Barat							93,4			
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	2	4	4	4	4	33,0	Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah barat	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	1	1	1	1	1	8,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah							151,4			
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	2	6	6	6	6	47,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, kalimantan Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayah tengah	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	6	6	6	6	6	52,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Timur							206,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	4	8	8	8	8	65,0	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Revitalisasi Bali	Revitalisasi Bali yang terselesaikan	1	1	1	1	1	5,0	Bali	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayahTimur	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi DAK wilayahTimur	0	10	10	10	10	8,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	Jumlah Perumusan kebijakan operasional di destinasi prioritas	0	4	5	6	7	44,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	10	10	10	10	10	84,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Wilayah II							1.203,7			
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	5	5	5	5	5	236,4	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	4	4	4	4	4	59,4	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	5	5	5	5	5	332,1	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	5	5	5	5	5	499,3	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
International MICE Bidding	Jumlah International MICE Bidding	2	2	2	2	2	51,0	Pusat		01
Promosi Wisata Gastronomi	Jumlah Promosi Wisata Gastronomi	2	2	2	2	2	25,5	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China							451,0			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	2	2	2	2	2	49,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	2	2	2	2	2	36,7	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Tiongkok	480	480	480	480	480	133,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Tiongkok yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Tiongkok yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	160223	160223	160223	160223	160223	231,7	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika							314,4			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	2	2	2	2	2	126,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	4	4	4	4	4	51,5	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika	225	225	225	225	225	51,0	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika yang dikerjasamakan dengan Maskapai dan Wholesaler	25136	25136	25136	25136	25136	70,6	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa							416,0			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	5	5	5	5	5	230,4	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	4	4	4	4	4	47,9	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Eropa	340	340	340	340	340	122,4	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	2	2	2	2	2	15,3	Pusat		01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Wilayah I							688,9			
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Elektronik	7	7	7	7	7	125,3	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Cetak	6	6	6	6	6	75,0	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Ruang	3	3	3	3	3	110,2	Pusat		01
Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding melalui Media Digital	10	10	10	10	10	301,9	Pusat		01
International MICE Bidding	Jumlah International MICE Bidding	5	5	5	5	5	25,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Wisata Gastronomi	Jumlah Promosi Wisata Gastronomi	4	4	4	4	4	51,0	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand dan Indochina							252,3			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	3	3	3	3	3	68,5	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	4	4	4	4	4	15,3	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Singapore, Thailand dan Indochina	50	50	50	50	50	13,1	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	16	16	16	16	16	30,2	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	9	9	9	9	9	115,0	Pusat		01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE	Jumlah Promosi Penjualan Stakeholder MICE	4	4	4	4	4	10,2	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei							394,8			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	3	3	3	3	3	30,6	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Malaysia dan Brunei Darussalam	80	80	80	80	80	15,3	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	65	65	65	65	65	198,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	12	12	12	12	12	102,0	Pusat		01
Misi Penjualan Stakeholder Mice	Jumlah Misi Penjualan Stakeholder Mice	6	6	6	6	6	32,9	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste, Philipina, dan Papua New Guinea							158,1			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	3	3	3	3	3	75,0	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	3	3	3	3	3	25,5	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Timor Leste, Philipina dan Papua New Guinea	75	75	75	75	75	27,2	Pusat		01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah Di Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding	8	8	8	8	8	17,6	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	2	2	2	2	2	12,8	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania							177,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pameran Wisata Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata Branding di Australia dan Oceania	4	4	4	4	4	23,9	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	4	4	4	4	4	15,8	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Australia dan Oceania	65	65	65	65	65	23,4	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/Tour Operator	8	8	8	8	8	96,5	Pusat		01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE	Jumlah Promosi Penjualan Stakeholder MICE	6	6	6	6	6	18,3	Pusat		01
Pengembangan Manajemen Strategis							57,8			
Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan	Jumlah Penyusunan bisnis model manajemen pariwisata unggulan	4	5	5	4	3	36,8	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata	Jumlah Rekomendasi kebijakan strategis pariwisata	2	3	4	3	2	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengelolaan Kawasan Pariwisata							2.102,9			
Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	1	1	1	1	1	10,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisataan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba		250	300	300	300	300	34,8	Sumatera Utara		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	8	8	8	8	8	929,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	7	7	7	7	7	45,0	Sumatera Utara	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur	Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Borobudur	3	3	3	3	3	15,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisataan Badan Otorita Borobudur		360	400	400	400	400	10,9	DI Yogyakarta, Jawa Tengah		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Otorita Borobudur	3	3	3	3	3	393,5	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Borobudur	2	2	4	4	4	32,0	DI Yogyakarta, Jawa Tengah	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita Labuan Bajo	1	1	1	1	1	3,7	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Layanan Manajemen SDM Kepariwisataan Badan Otorita Labuan Bajo		100	100	\	0	0	9,0	Nusa Tenggara Timur		01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan Otorita Labuan Bajo	11	11	11	11	11	585,0	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo	Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita Labuan Bajo	3	3	5	5	5	35,0	Nusa Tenggara Timur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem							190,7			
Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)	Jumlah Penyusunan integrated tourism masterplan (ITMP)	1	3	3	3	1	28,6	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	Jumlah Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	5	5	5	5	5	12,5	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas	11	13	15	17	20	34,5	Destinasi Pariwisata Prioritas	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	Jumlah Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi)	10	12	12	12	12	34,8	Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi branding		01
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable Tourism Observatory (STO)	3	5	5	6	6	58,3	Destinasi Pariwisata Prioritas		01
Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)	Jumlah Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)	5	6	7	8	9	17,5	Pusat		01
Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan	Jumlah Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan	1	2	2	2	2	4,5	Pusat		01
Peningkatan Investasi Pariwisata							136,4			
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	5	6	7	8	9	29,4	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas	Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi Prioritas	15	15	15	15	15	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	0	10	20	34	34	49,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Market sounding di destinasi investasi	Jumlah Market sounding di destinasi investasi	0	4	4	4	4	16,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	Jumlah Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	0	1	2	2	2	21,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Wisata Budaya							109,0			
Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)	Jumlah Penyusunan Desain Manajemen Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)	4	5	6	5	0	29,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya	Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata budaya	5	5	5	5	3	23,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner dan Belanja	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	0	5	5	5	4	19,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan							234,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Bidding MICE Internasional	Jumlah Peningkatan Bidding MICE Internasional	6	10	12	15	18	61,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan	Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan wisata alam dan buatan	10	12	14	15	15	69,3	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	0	8	8	4	4	48,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan	Jumlah Penyusunan site design pengembangan infrastruktur dalam kawasan wisata bahari dan ekowisata berbasis pariwisata berkelanjutan	0	7	7	7	7	56,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Industri dan Regulasi Pariwisata							115,9			
Kajian Pengembangan Kepariwisataan	Jumlah Kajian Pengembangan Kepariwisataan	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		01
Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata	Jumlah Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata	10	15	17	10	10	27,9	Pusat		01
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	2	5	8	6	6	13,5	Pusat		01
Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah Penyusunan Concept Note Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	1	0	0	0	0	1,0	Pusat		01
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok Industri Pariwisata	0	5	6	7	8	26,0	Pusat		01
Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata	Jumlah Penyusunan Concept Note Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap penyusunan Kebijakan Pariwisata	0	1	0	0	0	2,0	Pusat		01
Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	Jumlah Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	0	1	1	1	1	20,0	Pusat		01
Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat	Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi usaha masyarakat	0	500	750	1000	1250	10,5	Pusat		01
Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga							715,5			
Assesor yang dilatih	Jumlah assesor yang dilatih	1000	1500	2000	1750	1500	77,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Tersertfikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM tersertfikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata	104000	130000	136500	102375	81900	388,5	Pusat		01
Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	Jumlah masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan usaha sebagai pemasok industri pariwisata	11800	11800	12390	9912	9416,4	117,4	Pusat		01
Daerah yang mendapatkan pengembangan SDM	Jumlah daerah yang mendapatkan pengembangan SDM	21	24	27	30	30	132,0	Pusat		01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik							281,6			
Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Pameran Wisata Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	4	4	4	4	4	98,9	Pusat		01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	4	4	4	4	4	57,0	Pusat		01
Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas dan Destinasi Branding di Asia Pasifik	100	100	100	100	100	27,5	Pusat		01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Pasifik yang dikerjasamakan dengan Maskapai danWholesaler	Jumlah Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia Pasifik yang dikerjasamakan dengan Maskapai danWholesaler	10000	10000	10000	10000	10000	82,8	Pusat		01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE	3	3	3	3	3	15,3	Pusat		01
Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata							3.970,6			
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		2350	2350	2550	2750	2800	229,0	Kota Bandung		03
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		2400	2400	2450	2450	2450	182,6	Kab. Badung		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan		1411	1411	1611	1811	2011	156,8	Kota Medan		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar		2492	2492	2692	2892	3092	163,8	Kota Makassar		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang		1200	1300	1400	1600	1700	162,6	Kab. Lombok Tengah		03
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok		1400	1400	1500	1700	1800	129,2	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		2500	2500	2500	2500	2500	97,5	Kota Bandung		03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung		5000	5000	0	0	0	327,1	Kota Bandung		03
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		2033	2033	2500	2500	2500	160,2	Kab. Badung		03
Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang		14159	0	0	0	0	500,1	Kota Palembang		03
Peningkatan Sarana dan prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Medan		1220	1220	1420	1420	1420	110,3	Kota Medan		03
Percepatan Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok		14948	0	0	0	0	525,9	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Lombok		439	500	700	900	1000	199,8	Kab. Lombok Tengah		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Pariwisata Palembang		500	500	700	900	1000	177,3	Kota Palembang		03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung Pendidikan Politeknik Negeri Pariwisata Medan		11872	0	0	0	0	218,4	Kota Medan		03
Sarana dan Prasarana Politeknik Pariwisata Makassar		932	932	1000	1100	1200	33,6	Kab. Badung		03
Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali		26712	0	0	0	0	213,8	Kab. Badung		03
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar		10656	0	0	0	0	186,7	Kota Makassar		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sulawesi Utara		1	0	0	0	0	2,0	Sulawesi Utara		03
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Sorong		1	0	0	0	0	2,0	Kota Sorong		03
Penyusunan Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi baru		0	1	0	0	0	2,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara		0	2	0	0	0	14,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Sorong		0	2	0	0	0	14,0	Pusat		03
Penyusunan DED dan Studi Tapak PTNP Destinasi baru		0	0	2	0	0	14,0	Pusat		03
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara		0	0	1	1	1	106,0	Sulawesi Utara		03
Pembangunan PTNP Sorong		0	0	1	1	1	36,0	Kota Sorong		03
Pembangunan PTNP Destinasi Baru		0	0	0	1	1	6,0	Pusat		03
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif							**3.961,1**			
Riset dan Pengembangan							172,0			
Big Data Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga kerja	3	3	3	3	3	130,9	Pusat		01
Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	4	5	7	4	3	41,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Edukasi Ekonomi Kreatif							390,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi	11200	11500	12000	11400	11200	258,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif	5000	5400	5875	5300	5000	131,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor Non-Perbankan							350,3			
Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	Jumlah Modal yang disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi	255	270	320	240	220	255,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	1700	1800	2000	1650	1550	38,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Social Entrepreneur Mentoring Program	Jumlah Social Entrepreneur yang difasilitasi	0	685	725	690	650	56,8	Pusat		01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor Perbankan							201,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	Jumlah Modal yang disalurkan dari akses Perbankan kepada Pelaku ekonomi kreatif	5082	5225	5650	5150	4900	128,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan akses permodalan ekonomi kreatif Sektor Perbankan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pelatihan akses permodalan	1500	1600	1750	1450	1350	46,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI	Jumlah skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis HKI yang dikembangkan	0	1	1	1	1	26,9	Pusat		01
Fasilitasi Infrastruktur Fisik							741,2			
Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan	Jumlah Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan	4	5	5	3	3	51,3	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi, khususnya di lokasi klaster kreatif	Jumlah Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi	30	31,5	34	31	27	419,9	Kabupaten/kota di 34 provinsi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di Destinasi Pariwisata Prioritas dan lokasi Cultural Heritage Regeneration	Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif	0	25	30	25	20	270,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Infrastruktur TIK							390,8			
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	Jumlah Infrastruktur TIK yang Difasilitasi	8500	9000	10100	8500	7500	274,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pre-Start Up yang Difasilitasi (termasuk melalui Digital Lab, Digital Enterpreneurship, Pemagangan Internasional)	Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi	250	384,848485	400	372,727273	363,636364	116,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar Dalam Negeri							184,0			
Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (termasuk melalui platform e-commerce dan event promosi berkelas internasional dalam negeri)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri	2050	2100	2350	2000	1950	145,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan pelaku kreatif terkait manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pelatihan manajemen pemasaran dan pemasaran online (e-commerce)	1500	1600	1900	1480	1200	38,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar Luar Negeri							449,4			
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan (Gerai/Pusat)	Jumlah Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di luar negeri yang dikembangkan	-	3	3	3	3	77,2	Pusat		01
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor untuk Pelaku/Usaha Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor	1500	1650	1775	1450	1250	141,2	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform E-Commerce di Luar Negeri	32	34	40	30	28	231,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif							213,5			
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)	4650	4850	5250	4650	4450	77,5	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan (Produk/Jasa)	2500	2650	2950	2400	2300	110,4	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)	200	220	245	195	165	25,7	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi							41,1			
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandardisasi	250	270	330	230	200	41,1	Kabupaten/kota di 34 provinsi	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri							637,0			
Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif (termasuk komersialisasi hasil riset)	Jumlah Kerja sama quadruple helix untuk Scale-Up Rintisan Produk dan Platform Kreatif	25	30	35	20	15	142,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Be Creative District (BCD)	Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) dikembangkan	2	2	2	2	2	445,0	Jawa Barat dan Banten		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

040.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama Pengembangan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	3	3	4	3	2	49,3	Pusat		01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri							189,9			
Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB, Friend Of Creative Economy)	Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam Lingkup WCCE	5	6	6	4	4	138,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasamayang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	10	10	12	10	9	51,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							**16.384,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

041.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	864,8
Program Pembinaan BUMN	461,1
JUMLAH	**1.325,9**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN	768,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	92,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.105,0
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	0,0
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	882,4
Program Penguatan Riset dan Pengembangan	12.960,9
Program Penguatan Inovasi	1.868,8
Program xxx (Nomenklatur masih dalam pembahasan)	60,0
JUMLAH	**17.738,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti							**1.075,7**			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan							350,8			
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina Menjadi Pusat Unggulan Iptek	138	138	138	138	138	185,4	Pusat		03
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan	114	120	126	131	138	148,5	Pusat		03
Penjaminan mutu Pranata Litbang	Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi	55	60	65	70	75	16,9	Pusat		03
Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya							724,9			
Implementasi RIRN dan ARN	Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK Iptek Eksisting Yang Dikembangkan	5	5	5	5	5	656,7	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	03
Implementasi RIRN dan ARN	Inkubator pada STP Eksisting yang Fungsional	18	18	18	18	18	48,2	Pusat	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	03
Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang Dikembangkan	0	7	7	7	7	20,0	Pusat		03
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti							**662,5**			
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang							662,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa DN	400	450	450	450	450	192,0	Pusat		03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa LN	250	200	230	260	260	470,5	Pusat		03
Program Penguatan Riset dan Pengembangan							**12.368,0**			
Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek							2.863,0			
Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan	1	1	1	1	1	21,4	Pusat		03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Flagship Riset Nasional	22	43	43	43	43	2.100,0	Pusat		03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Insentif Sistem Inovasi Nasional	260	260	260	260	260	405,2			03
Penelitian Flagship Riset Nasional	Penelitian Pengembangan Teknologi Industri	24	50	60	70	80	316,4			03
Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat							9.367,8			
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH	3700	3800	3900	4000	4100	2.614,3	Pusat		03
Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada Masyarakat	1022	1100	1200	1300	1400	724,5	Pusat		03
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN Non BH	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN	13000	14000	14500	15000	15500	6.029,0	Pusat		03
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi							137,2			
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang di fasilitasi untuk dipublikasikan	1200	3750	3900	4250	4500	62,5	Pusat		03
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang difasilitasi terakreditasi dan bereputasi internasional	800	2650	2800	3000	3150	74,7	Pusat		03
Program Penguatan Inovasi							**1.706,0**			
Pengembangan Sistem Inovasi							4,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Klaster Inovasi	Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix	4	5	5	5	5	4,0			03
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi							514,9			
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	Jumlah Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	297	250	250	250	250	514,9	Pusat		03
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi							179,9			
Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT	115	120	130	135	150	179,9			03
Penguatan Inovasi Industri							388,0			
Produk Inovasi Litbang di Industri	Jumlah Produk Inovasi Litbang di Industri	60	65	70	75	80	388,0	Pusat		03
Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri							619,2			
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (Teaching Industry)	Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	11	11	11	11	11	619,2	Pusat		03
Program Pengembangan Iptek dan Inovasi							**60,0**			
Kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi							60,0			
Penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei belanja litbang industri	Persentase industri manufaktur yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen)		80	90	100	100	0,0	Pusat		03
Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal	Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		04
Pembinaan dan pengiriman Tim Nasional pada Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	Jumlah medali dan/atau penghargaan yang diperoleh dari Kompetisi Matematika dan Sains Internasional	0	1	1	1	1	4,0	34 Provinsi		04
Dukungan perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa	Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan	0	10	10	10	10	4,0	34 Provinsi		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

042.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi forum pendanaan inovasi (pitching)	Jumlah start-up teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi		10	10	10	10	4,0			03
Pendampingan peneliti remaja oleh fungsional peneliti	Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti	0	200	200	200	200	40,0	34 Provinsi		04
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian	Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Iptek		25	50	75	100	4,0	Pusat		03
JUMLAH							**15.872,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	576,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	10,7
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	3.017,9
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	177,8
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	495,8
JUMLAH	**4.278,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi							**1.194,7**			
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan							9,3			
Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism	20	21	22	23	24	9,3	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM							4,4			
Desain skema pembiayaan usaha	Jumlah skema pembiayaan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	4,4	Pusat		01
Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil							167,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (Start Up Capital)	Tersalurnya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula	1900	2000	2100	2205	2315	167,1	Pusat, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Lombok Utara, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay	01, 02
Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran							94,5			
Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri		200	240	252	265	278	30,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri		140	200	210	221	232	63,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi							38,8			
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Menengah dan Besar	TERFASILITASINYA KEMITRAAN strategis ANTARA KUMK DENGAN USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA BESAR (UB)	150 KUMK di 3 Lokasi	170 KUMK di 3 Lokasi	179 KUMK di 3 Lokasi	187 KUMK di 3 Lokasi	197 KUMK di 4 Lokasi	38,8	Pusat	1. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter 2. Penguatan Jaminan usaha Sentra 350 Koperasi Petani dan Nelayan	01
Pengembangan Kewirausahaan							283,9			
Penumbuhan Wirausaha Melalui Pemasyarakatan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	2000	2100	2205	2315	2430	16,8	Pusat		04
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi	1500	2000	2100	2205	2315	50,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga		600	700	735	772	810	18,1	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya SDM KUMKM melalui pelatihan kewirausahaan	6500	7500	7875	8269	8682	194,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Forum Kewirausahaan Sosial		0	1	1	1	1	4,3	Pusat		01
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi							284,5			
Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	3360	4000	4200	4410	4631	103,0	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer koperasi	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	1690	2000	2100	2205	2315	51,6	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01, 04
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	4707	4942	5189	5449	5700	129,9	Pusat, Kabupaten Belu, Kota Jayapura, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	02, 03
Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM							93,5			
SDM Koperasi dan UKM yang Difasilitasi Melalui SKKNI	Terfasilitasinya SDM KUKM Melalui SKKNI	2400	2520	2646	2778	2917	93,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk							63,8			
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk	1703	2000	2100	2205	2315	31,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
KUMKM yang difasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk ekspor		400	500	525	551	579	32,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu							154,7			
Sarana prasarana layanan usaha terpadu	Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM)	8	8	8	8	8	154,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi							**36,6**			
Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi							19,4			
Pengembangan akses dan jaringan koperasi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan jaringan dan akses ke dalam dan luar negeri	0	2	3	3	3	4,3	Pusat		01
Pengembangan inovasi koperasi	Jumlah Koperasi model baru yang dikembangkan	0	3	3	3	3	15,1	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM							17,2			
Konferensi Koperasi Nasional	Terselenggaranya Konferensi Koperasi	0	1	1	1	1	17,2	Pusat		01
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro							**470,6**			
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan							30,9			
KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang pertanian dan perkebunan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	30,9	Pusat, Kabupaten Timor Tengah Utara; Kabupaten Belu	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke) 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan							33,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
KUKM Sektor Perikanan dan Peternakan yang diperkuat kapasitas usaha melalui Kemitraan	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	25	40	42	44	46	33,4	Pusat; Kabupaten Merauke; Kabupaten Nunukan	1. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke) 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01, 02
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi							14,9			
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi dan inkubasi	Terlaksananya Jumlah Inkubator yang memberikan pendampingan pengembangan ide usaha	4	5	5	6	6	14,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal							31,0			
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Didampingi Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi mangakses KUR	3000	5000	5250	5513	5788	24,6	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi untuk mengakses kredit melalui lembaga keuangan non bank	Jumlah usaha mikro dan kecil yang difasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan fintech	0	750	788	827	868	6,5	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa							30,9			
KUKM bidang Industri dan Jasa yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan	KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA MELALUI KEMITRAAN	25	40	42	44	46	30,9	Pusat	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter; Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro							304,4			
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Bencana	20	21	22	23	24	110,1	34 provinsi dan Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kab. Malaka, Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat;	1. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke)	02, 06
Pedagang skala mikro informal/pedagag kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi dan promosi	Tersedianya fasilitasi PKL untuk memperoleh kepastian tempat usaha	350	368	386	405	425	23,0	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

044.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	29	30	32	34	35	171,3	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian							25,2			
Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Penyuluhan Pembentukan Koperasi	500	300	331	347	599	9,9	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Kenaikan jumlah PPKL	100	113	119	125	131	15,2	Pusat	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	01
JUMLAH							**1.701,9**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	153,3
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	487,0
Program Perlindungan Anak	424,5
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220,2
JUMLAH	**1.285,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							**300,0**			
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan							22,7			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di KL	Jumlah K/L bidang polhukam yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5	10	10	10	10	6,6	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang polhukam	4	4	4	4	4	5,0	Provinsi		03
Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa	10 kab/Kota	8	7	7	7	11,1	Provinsi		07
Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan							18,6			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di KL	Jumlah K/L bidang infrastruktur dan lingkungan yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	2	10	10	10	10	6,7	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang infrastruktur dan lingkungan di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang infrastruktur dan lingkungan	9	9	9	9	9	11,9	Provinsi		03
Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga							95,8			
Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Terlaksananya SPHPN	-	1	-	-	1	0,0	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari KDRT	Jumlah KL dan Provinsi yang yang difasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT	10	10	10	10	10	24,9	Provinsi		03
Fasilitasi penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan layanan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT	10	10	10	10	10	5,5	Provinsi		03
	Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan bagi korban (UPTD dan P2TP2A) yang dilatih tentang penanganan korban dan pendataan	-	170	170	170	170	57,8	Provinsi		03
KIE Pencegahan dan Penanganan KDRT melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan KDRT melalui berbagai media	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga							16,5			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di KL	Jumlah K/L bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	5	8	11	11	11	5,5	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga	5	7	9	9	9	7,0	Provinsi		03
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan Stunting	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting	-	7	6	6	6	4,0	32 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi							55,4			
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di KL	Jumlah K/L bidang ekonomi yang meningkat kapasitas PUG/PPRGnya	8	11	11	11	11	8,4	Pusat		03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang ekonomi di provinsi	Jumlah provinsi yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang ekonomi	4	8	8	8	8	6,1	Provinsi		03

047.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelatihan bagi dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dalam memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh peningkatan kapasitas berwirausaha	Jumlah dinas yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan		9	9	8	8	14,4	34 Provinsi		01
Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Layananan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	0,30985915	0,14084507	0,26760563	0,28169014	5,4	32 Provinsi		01
	Jumlah SDM pendamping perempuan pelaku kewirausahaan (Mekaar) yang ditingkatkan kapasitasnya tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	18000	18000	18000	18000	21,1	32 Provinsi		01
Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus							25,8			
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah K/L dan provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	15	15	15	15	15	10,7	Pusat dan Provinsi		03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan dan pemberdayaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	180	180	180	180	180	7,1	Pusat		03
Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana	Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana	1	-	-	-	-	0,3	Pusat		03
KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang							35,6			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
KIE Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui berbagai media	1	1	1	1	1	9,4	Pusat		03
Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari TPPO	Jumlah K/L yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas TPPO	21	21	21	21	21	17,9	Pusat		03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan perempuan korban TPPO	Jumlah perempuan Korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan	100	100	100	100	100	8,3	Pusat		03
Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan							29,6			
Fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam	11	11	11	11	11	11,3	Pusat		03
Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	200	200	200	200	200	5,0	Pusat		03
Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan kelompok BK-PMI	15	7,5	8	8	6	5,6	34 Provinsi		03
KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE hak perempuan dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai Media	-	1	1	1	1	7,7	Pusat		03
Program Perlindungan Anak							**279,0**			
Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi							17,8			
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebijakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	7	7	7	7	6	10,0	34 Provinsi		03
Provinsi yang difasilitasi dalam penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perumusan kebihjakan dan penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan	4	4	4	4	4	5,0	20Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
advokasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan ABH	jumlah SDM yang mendapatkan advokasi tentang penanganan kasis berbasis pemenuhan hak anak	-	200	200	200	200	2,8	34 Provinsi		03
Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus							2,8			
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam perlindungan anak penyandang disabilitas dan	2	3	3	3	3	2,8	14 provinsi		03
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi							135,2			
Pelaksanaannya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Terlaksananya SNPHAR	-	1	-	-	1	0,0	Pusat		03
Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2	2	3	3	3	5,5	13 Provinsi		03
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	600	670	680	690	700	3,0	34 Provinsi		03
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	-	8	8	8	8	3,8	Pusat		03
Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan TORLIN)	2	30	34	40	50	78,0	208 Kab/Kota		03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilatih dalam menerapkan Disiplin Positif (Guru Cerdas)	200	100	100	100	100	2,2	34 Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Lembaga Layanan yang dilatih manajemen kasus dan pelayanan terpadu	Jumlah provinsi yang lembaga Layanannya mendapatkan pelatihan manajemen kasus dan pelayanan terpadu	-	8	8	9	9	5,0	34 Provinsi		03
penyediaan hotline bagi korban (TeSA)	jumlah layanan pengaduan melalui hotline bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	-	1	1	1	1	7,0	Pusat		03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih tentang Standar Operasional Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi	-	416	456	496	536	4,0	34 Provinsi		03
koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	Jumlah daerah (prov/kab/kota) Provinsi yang dikoordinasikan dalam penyelesaian penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	-	12	14	14	16	3,7	56 provinsi/kab/kota		03
Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih tentang Perlindungan Anak	-	1584	1742	1916	2108	5,0	514 Kab/Kota		03
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan	Jumlah Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan	-	3	6	6	3	6,0	Kota malang, kab. Bintan, Kota Kupang, Kota Samarinda, Kab. Deli Serdang, Kota Palu, Kota Banda Aceh, kab. Solok, Kab. Gorontalo		03
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Jumlah Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi	-	2	4	4	2	4,5	Kab. Berau, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Tobasa, Kab. Magelang, Kab. Bogor		03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan	-	225	250	275	300	4,0	34 Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	9	-	-	-	-	3,5	9 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan							17,0			
promosi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah aerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	10	10	10	10	10	8,3	28 Kab/Kota		03
	Jumlah derah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	10	4	5	5	6	4,7	13 Kab/Kota		03
Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting bagi provinsi	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting	4	4	4	4	4	4,0	16 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan							46,5			
peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak	10	9	9	9	9	6,0	13 Prov/Kab/Kota		03
	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	24	20	20	20	20	6,3	19 Kab/Kota		03
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan daycare	5	10	25	25	25	18,0	40 Provinsi/ Kab/Kota		03
pencegahan perkawinan anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	20	20	20	20	20	8,0	100 Provinsi/ Kab/Kota		03
pengembangan lingkungan ramah anak	jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	10	10	10	10	12	8,2	11 Kab/Kota		03
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi							14,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi	Jumlah Desa Bebas Pornografi	-	7	7	8	8	5,2	30 Desa/Kelurahan		03
Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	Jumlah provinsi yang lembaga layanannya sudah mendapat pelatihan dukungan psikososial	-	8	8	9	9	6,3	34 Provinsi		03
Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	660	670	680	690	700	3,0	34 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak							17,0			
Peningkatan kapasitas dan peran forum anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	34	17	17	17	17	9,0	34 Provinsi		03
peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	34	17	17	17	17	8,0	34 Provinsi		03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya							28,2			
pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah	jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah ramah anak	5	2	2	2	2	5,6	10 Provinsi		03
fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan fasilitas kreativitas dan budaya anak	5	2	2	2	2	7,6	10 Provinsi		03
Penguatan kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Kebijakan KLA	-	34	34	34	34	15,0	34 Provinsi		03
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							**64,0**			
Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha							15,5			
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Program PPPA	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	-	6	12	16	20	2,7	Pusat/34 Provinsi		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

047.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program Sinergi untuk Peningkatan Keluarga yang Responsif Gender	-	10	20	25	34	12,8	Pusat/34 Provinsi		04
Partisipasi Media							14,2			
Fasilitasi Program Sinergi untuk Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media	Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA	-	130	160	200	250	14,2	Pusat/34 Provinsi		04
Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan							34,3			
Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Sinergi Percepatan Program PPPA	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melakukan Sinergi dalam Program PPPA	-	100	150	200	250	14,8	Pusat/30 Provinsi		04
Replikasi Inovasi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam Program PPPA	Jumlah Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang melakukan replikasi inovasi partisipasi masyarakat dalam program PPPA	-	6	9	12	15	4,2	Pusat/34 Provinsi		04
Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat Penguatan PUG dan PUHA di Bidang PPPA	10	50	70	100	150	15,3	Pusat/Daerah		04
JUMLAH							**643,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	187,9
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	589,3
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	175,9
JUMLAH	**953,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi							**343,5**			
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I							50,1			
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	350 Unit Kerja	415 Unit Kerja	485 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,1	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	217 IP	92 IP	82 IP	65 IP	45 IP	3,2	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	217 IP	210 IP	210 IP	210 IP	210 IP	13,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kinerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,4	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,2	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	16,2	Pusat		07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II							50,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	350 Unit Kerja	415 Unit Kerja	485 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,1	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	189 IP	92 IP	82 IP	65 IP	45 IP	3,2	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	189 IP	210 IP	210 IP	210 IP	210 IP	13,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kinerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,7	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,2	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	16,2	Pusat		07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III							52,6			
Evaluasi Zona Integritas di sektor strategis	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	165 Unit Kerja	300 Unit Kerja	370 Unit Kerja	430 Unit Kerja	550 Unit Kerja	13,5	Pusat/Daerah		07
Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	210 IP	91 IP	81 IP	65 IP	45 IP	3,7	Pusat/Daerah		07
Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	210 IP	205 IP	205 IP	205 IP	205 IP	14,0	Pusat/Daerah		07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang diriviu perencanaan kinerjanya	-	4 IP	10 IP	10 IP	10 IP	0,6	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan tim pengelola RB Nasional	Jumlah rekomendasi Tim RB Nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4,3	Pusat		07
Penguatan tim pengelola RB Daerah	Jumlah rekomendasi Tim Asistensi RB Daerah	-	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	16,5	Pusat		07
Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana							2,8			
Kebijakan penataan eselonisasi	Jumlah kebijakan penataan eselonisasi	1 PermenPAN	-	-	-	-	0,3	Pusat		07
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah	Jumlah rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah	-	-	-	1 rancangan arsitektur	1 arsitektur	2,5	Pusat		07
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							21,8			
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional	Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	1 Perpres	-	-	-	-	1,8	Pusat		07
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Jumlah Portal arsitektur SPBE	-	1 Portal	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyusunan Undang-Undang SPBE	Jumlah UU SPBE	-	1 NA	1 RUU	1 RUU	1 UU	11,0	Pusat		07
Penyusunan kebijakan tatakelola pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PAN	1. PermenPAN RB tentang Peta Rencana SPBE Nasional 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Evaluasi SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Penyusunan Arsitektur SPBE 2. PermenPAN RB tentang Pedoman SDM SPBE	1. PermenPAN RB tentang Pedoman Manajemen Perubahan 2. PermenPAN RB tentang Pedoman Proses Bisnis	-	-	4,0	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah							24,5			
Penataan kelembagaan bidang polhukam	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	19,6	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang polhukam	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,9	Pusat		07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman							27,4			
Penataan kelembagaan bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah K/L yang ditata	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	8 K/L	22,0	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	18 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5,4	Pusat		07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan							21,2			
Penataan kelembagaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah K/L yang ditata	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	7 K/L	16,5	Pusat		07
Penerapan proses bisnis instansi pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah IP yang menerapkan proses bisnis	8 IP	5 IP	5 IP	5 IP	5 IP	4,7	Pusat		07
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur							7,0			
Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	-	1 Dokumen	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyusunan peta jalan dan kebijakan pemindahan ASN ke IKN	Jumlah dokumen peta jalan	2 Dokumen Peta Jalan	-	-	-	-	2,0	Pusat		02
Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Aparatur							27,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir nasional	Jumlah instansi pemerintah	3 IP	30 IP	30 IP	30 IP	30 IP	18,5	Pusat		07
Penerapan Manajemen Talenta ASN	Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN	-	-	-	89 K/L	34 Provinsi 100 Kab/Kota	7,0	Pusat		07
Kebijakan penataan jabatan fungsional	Jumlah kebijakan	1 kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Kebijakan Smart Office	Jumlah Kebijakan	1 Kebijakan	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur							4,0			
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP pensiun ASN	Jumlah kebijakan	-	1 kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan insentif untuk ASN High Performance, di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	Jumlah kebijakan insentif untuk ASN di 3T dan tingkat risiko pekerjaan tinggi	-	-	1 Kebijakan	-	-	1,0	Pusat		07
Kebijakan insentif ASN yang terdampak pada pemindahan IKN	Jumlah kebijakan insentif ASN yang terdampak pada pemindahan IKN	-	1 Kebijakan	-	-	-	1,0	Pusat		02
Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik							23,3			
Review dan pemetaan sektor pelayanan strategis (dasar dan perizinan)	Jumlah sektor layanan strategis yang direview/dipetakan	-	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-SP4N	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	8,3	Pusat		07
Pembangunan hub (pusat pengetahuan) inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	50 inovasi	5,0	Daerah		07
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Integrasi Data, Proses, dan Standar Pelayanan MPP	Jumlah kebijakan integrasi data, proses, dan standar pelayanan MPP	1 Perpres	-	-	-	-	1,0	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	-	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2,0	Pusat/Daerah		07
Integrasi proses bisnis pelayanan publik tingkat pusat	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	-	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3,0	Pusat		07
Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik untuk Mendorong Gerakan Indonesia Melayani	Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	3,0	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik III							7,4			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,6	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04
Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur							8,1			
Penegakan disiplin SDM Aparatur	Jumlah Instansi Pemerintah yang melakukan penegakan disiplin ASN	60 IP	60 IP	80 IP	100 IP	100 IP	3,5	Pusat		04
Pembangunan Integritas ASN	Persentase ASN yang mengisi survey integritas	0,1	-	-	-	10%	2,0	Pusat/Daerah		07
Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	Jumlah Kebijakan	-	1 Perpres	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Penyusunan kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	1 Peraturan Pemerintah	-	-	-	-	1,0	Pusat		07
Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN	Penyusunan kebijakan pembinaan netralitas ASN	1 Permenpan	-	-	-	-	0,3	Pusat		07
Penyusunan kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN	Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi terhadap intoleransi dan radikalisme di Lingkungan ASN	1 Perpres	-	-	-	-	0,3	Pusat		07
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur							1,5			
Penyusunan kebijakan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Jumlah kebijakan	4 Kebijakan	-	-	-	-	0,6	Pusat		07
Piloting penerapan sistem mananjemen kinerja	Jumlah IP yang di-ujicoba penerapan sistem manajemen kinerja	7 IP Pusat 10 IP Daerah	-	-	-	-	0,9	Pusat/Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

048.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)							**90,3**			
Pengawasan Implementasi Sistem Merit Aparatur Sipil Negara							90,3			
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	5,5	Pusat/Daerah		07
Penyelesaian dan Penyelidikan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah rekomendasi penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang ditindaklanjuti	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	160 rekomendasi	10,0	Pusat/Daerah		04
Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit	73 IP	637 IP	637 IP	637 IP	637 IP	28,8	Pusat/Daerah		07
Pembinaan Penerapan Sistem Merit	Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit	67 IP	70 IP	70 IP	70 IP	70 IP	7,3	Pusat/Daerah		07
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku	270 IP	390 IP	510 IP	630 IP	719 IP	19,3	Pusat/Daerah		07
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan pelaksanaan seleksi JPT di Instansi Pemerintah	1500 Rekomendasi	1750 Rekomendasi	2000 Rekomendasi	2250 Rekomendasi	2500 Rekomendasi	19,3	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							**433,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN INTELIJEN NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	3.781,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	97,2
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	14.332,4
JUMLAH	**18.211,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN INTELIJEN NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara							**1.248,0**			
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia							1.248,0			
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	Jumlah personel yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM intelijen siber	-	50 Personel	50 Personel	50 Personel	50 Personel	20,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	Jumlah sistem CIA	-	7 sistem	7 sistem	7 sistem	7 sistem	1.200,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber	Jumlah tim respon ancaman intelijen siber yang dibentuk	_	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	28,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara							**237,9**			
Operasi Kontra Intelijen							177,9			
Operasi Intelijen Kontra Teorisme	Jumlah operasi intelijen terorisme	3670 Laporan	2898 Laporan	2999 Laporan	3104 Laporan	3104 Laporan	101,5	Pusat		07
Operasi intelijen separatisme	Jumlah operasi intelijen separatisme	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	5528 Laporan	76,5	Pusat		07
Operasi Intelijen Siber							60,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

050.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Operasi Intelijen Siber	Jumlah kegiatan operasi intelijen siber	550 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	20 Operasi	52,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	Jumlah kegiatan kerjasama intelijen keamanan siber	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							**1.485,9**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	3.303,8
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	7.844,9
JUMLAH	**11.148,7**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara							**600,0**			
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi							600,0			
Penguatan National Data Center	Pusat data nasional berstandar internasional	-	1 DC berstandar Internasional (Tahap 1)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 2)	1 DC berstandar Internasional (Tahap 3)	-	600,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara							**3.093,2**			
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital							8,9			
Pembuatan Matriks Keamanan Siber	Standar Matriks Keamanan Siber	1 Standar	_	_	_	_	8,9	Pusat		07
Proteksi Sektor Pemerintah							61,6			
Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilateral Bidang Keamanan Siber	Jumlah kegiatan kerjasama bidang keamanan siber		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	1 Dokumen	-	-	-	-	1,6	Pusat		07
Proteksi Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN)							122,5			
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor IIKN	_	1 Entitas	1 Entitas	_	_	7,5	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Infrastruktur Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah sistem VVDP	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pembangunan Information Sharing and Analysis Center (ISAC)	Jumlah sistem ISAC	-	1 Sistem	-	-	-	50,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020	Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun 2020	1 Kegiatan	_	_	_	_	5,0	Pusat		07
Penyusunan Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	Jumlah Regulasi ISAC dan Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)	2 Regulasi	-	-	-	-	7,0	Pusat		07
Penyusunan Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN	Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IIKN	1 Regulasi	-	-	-	-	3,0	Pusat		07
Proteksi Sektor Ekonomi Digital							9,7			
Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber	Nilai budaya keamanan siber masyarakat	4 Nilai	-	-	-	-	8,2	Pusat		07
Penerapan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas	Jumlah PSE yang sudah menerapkan standar kriptigrafi	100 PSE	-	-	-	-	1,4	Pusat		07
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah							31,7			
Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah	15 K/L/D	25 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	27 K/L/D	31,7	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional							64,0			
National Cyber Exercise Drill Test	Jumlah peserta yang mengikuti National Cyber Excersice Drill Test	1230 Orang	1250 Orang	1300 Orang	1400 Orang	1450 Orang	60,7	Pusat		07
Penyusunan Regulasi Pembentukan CERT	Jumlah Regulasi Pembentukan CERT	1 Regulasi	-	-	-	-	3,3	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Ekonomi Digital							12,7			
Membangun Kemampuan penanganan insiden di sektor ekodig (manajemen krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital (penguatan insiden siber. capacity building)	Jumlah PSE yang memiliki kemampuan menangani insiden respon	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	100 PSE	4,6	Pusat		07
Penyusunan Regulasi Manajemen Krisis Keamanan Siber Nasional	Regulasi manajemen krisis siber	1 Regulasi	-	-	-	-	8,1	Pusat		07
Pengendalian Sumber Daya Manusia Siber dan Sandi Nasional							0,5			
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kamsiber	1 Regulasi	-	-	-	-	0,5	Pusat		07
Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital							454,2			
Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	1 Regulasi	-	-	-	-	4,2	Pusat		07
Pembangunan Sistem Monitoring Pengendalian Informasi	Jumlah sistem monitoring pengendalian informasi	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	450,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber Nasional							2.243,2			
Pembangunan kapasitas National Computer Security Incident Response Team (Nat-CSIRT)	Jumlah sistem simulasi incident response	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	743,2	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Perluasan Cakupan Area National Cybersecurity Operation Center	Jumlah Cakupan Perluasan Area National Cybersecurity Operation Center	4 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	1.500,0	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

051.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Siber dan Sandi							84,2			
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi Bagi Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan Pendidikan Pelatihan Fungsional Sandi bagi pemerintah daerah	100 Lulusan	-	-	-	-	5,2	Pusat		07
Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk K/L/D	200 Lulusan tersertifikasi	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	14,7	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D	Jumlah Lulusan Pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L/D	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	100 Lulusan	32,6	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelenggaraan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN yang mengikuti Program Born to Defence	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	500 Lulusan	31,8	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
JUMLAH							**3.693,2**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

052.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	11,7
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	61,1
JUMLAH	**72,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

052.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional							**14,3**			
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu							14,3			
Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara	1	4	4	4	4	14,3	Pusat		04
JUMLAH							**14,3**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PUSAT STATISTIK

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.425,9
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	8.806,2
JUMLAH	**11.232,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PUSAT STATISTIK

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							**1.022,3**			
Pengembangan dan Analisis Statistik							150,0			
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	39,7	WM Jakarta		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	1	1	1	13,4	WM Bandung		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	0	1	5,2	WM Semarang		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	1	1	1	19,7	WM Surabaya		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	1	1	6,3	WM Medan		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	17,8	WM Palembang	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	17,9	WM Banjarmasin	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	0	0	0	1	3,2	WM Manado		02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	13,5	WM Makassar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah publikasi/laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit waktu	0	1	1	1	1	13,5	WM Denpasar	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	02
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi							13,8			
Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA)	1	1	1	1	1	13,8	Pusat		01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata							219,8			
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu	69	69	69	69	69	145,6	Pusat		01
Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu	35	35	35	35	35	62,5	Pusat		01
Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu	19	19	19	19	19	11,7	Pusat		01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							638,7			
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	515	515	515	515	515	277,6	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

054.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu	506	506	506	506	506	361,1	Pusat		01
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian						0,0	Pusat		01
JUMLAH							**1.022,3**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	3.543,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	50,0
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	4.090,2
JUMLAH	**7.683,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas							**6,1**			
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional							6,1			
Pembangunan Portal Data Nasional	Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional	-	-	-	1 Data Terintegrasi	1 Data Terintegrasi	5,1	Pusat		07
Penyusunan kebijakan manajemen data dan informasi implementasi Perpres 95/2018 tentang SPBE	Jumlah Permen PPN	1 Permen PPN tentang Manajemen Data dan Informasi	-	-	-	-	1,0	Pusat		07
Program Perencanaan Pembangunan Nasional							**71,5**			
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan							25,0			
Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Geopark (Geopark)	2	2	2	2	2	15,0	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

055.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	Alternatif Pendanaan Pengembangan Geopark (Skema)	1	1	1	1	1	10,0	Pusat		01
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional							13,5			
Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	1	1	1	1	1	13,5	Pusat		07
Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan							33,0			
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	75	100	-	-	-	21,0	Pusat		07
	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	50	75	100	-	-	0,0	Daerah		07
	Persentase Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	25	50	75	100	-	0,0	Pusat dan Daerah		07
Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan	3	3	3	3	3	12,0	Pusat		07
JUMLAH							**77,6**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	4.678,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	1.287,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	109,6
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	1.122,4
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	1.649,6
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	161,3
Program Penataan Agraria	105,0
Program Pengadaan Tanah	273,9
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	909,8
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	92,1
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	23.278,2
JUMLAH	**33.668,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN							**1.140,3**			
Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan							1.091,3			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	DKI Jakarta		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	28	28	28	28	28	32,1	Jawa Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	36	36	36	36	36	32,1	Jawa Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	Yogyakarta		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	40	40	40	40	32,1	Jawa Timur		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	22	22	22	22	22	32,1	Aceh		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	26	26	26	26	26	32,1	Sumatera Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	20	20	20	20	20	32,1	Sumatera Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Riau		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32,1	Jambi		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	16	16	16	16	16	32,1	Sumatera Selatan		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Lampung		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32,1	Kalimantan Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	15	15	15	15	32,1	Kalimantan Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32,1	Kalimantan Selatan		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32,1	Kalimantan Timur		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	14	14	14	14	32,1	Sulawesi Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	12	12	12	12	32,1	Sulawesi Tengah		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	25	25	25	25	25	32,1	Sulawesi Selatan		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Sulawesi Tenggara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32,1	Maluku		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	10	10	10	10	32,1	Bali		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	23	23	23	23	32,1	NTB		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	NTT		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	13	13	13	13	32,1	Papua		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	Bengkulu		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Maluku Utara		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Banten		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Kep. Bangka Belitung		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	7	7	7	7	32,1	Gorontalo		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	8	8	8	8	32,1	Kep. Riau		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	11	11	11	11	32,1	Papua Barat		02
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	6	6	6	6	32,1	Sulawesi Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	5	5	5	5	32,1	Kalimantan Utara		02
Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian ATR/BPN							49,0			
Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Tanah Adat/Ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	34	34	34	34	34	49,0	DKI Jakarta		02
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang							**506,1**			
Perencanaan Tata Ruang							81,2			
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Jawa Tengah (KSN Kawasan Sangiran)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Jawa Timur		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3,3	Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar Aceh Darrusalam		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	1	0	0	3,2	Sumatera Barat (KSN TN Kerinci Seblat, KSN Danau Maninjau)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Jambi (KSN Cagar Budaya Muaro Jambi)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Sumatera Selatan		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1,8	Sulawesi Utara		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-Watumohai-Rawa Tinondo)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	0	2	0	2	9,3	Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	0	0	0	1	3,3	NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	2	0	0	0	4,2	Haumeni Ana, Turiskain (NTT)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	0	1	1,8	NTT (KSN Kawasan Mbay)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	2	0	6,7	Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	0	1	0	1,7	Papua		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Bengkulu (KSN TN Bukit Barisan Selatan)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1	0	0	0	1,6	Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-Kwandang)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	1	0	0	0	0	2,1	Serasan (Kep. Riau)		02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	0	1	0	0	1,7	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Atambua	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Kabupaten Natuna		02
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,5	Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Mota'ain Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi Legislasi RDTR Motamasin Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Malaka		02
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden	1	-	-	-	-	0,2	Kab. Timor Tengah Utara	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang diselesaikan - Revisi RTR Pulau (matek PK) - Revisi RTRW Kaltim(matek dan raperda) - Revisi RTRW Kukar (matek dan raperda) - Revisi RTRW PPU(matek dan raperda) - Revisi RTR Pulau (matek dan raperpres) - RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN (matek dan raperpres) - Revisi RTRWN (Matek dan RPP) - RDTR BWK I (Matek dan Raperpres) - RDTR BWK II (Matek dan Raperpres)	7	4				26,8	Pusat	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Penataan Kawasan							124,9			
Master Plan Kawasan Rawan Bencana	jumlah rekomendasi teknis kawasan rawan bencana yang disusun	2	2	2	2	2	20,1	Pusat		06
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR Arahan Prioritas Nasional	5	12	12	12	12	104,8	Pusat		06
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah							300,0			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Aceh		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Kec. Bener Meriah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	6	6	2,3	Aceh		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	4	5	6	5,2	Aceh		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	0	0	0	0	0,1	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0,1	DKI Jakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Jawa Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	7	9	11	12	4,5	Jawa Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	7	8	10	11	11,3	Jawa Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	8	9	10	3,8	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	6	7	8	9	9,5	Jawa Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	6	8	9	8,3	Yogyakarta		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Jawa Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Jawa Timur (Lamongan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Jawa Timur		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	9	8,4	Jawa Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	11	3,6	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	2	0	4,0	Sumatera Utara (Nias Barat dan Nias Selatan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	10	8,5	Sumatera Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sumatera Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	0	0	0	2,0	Sumatera Barat (Kep Mentawai)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	8	9	3,3	Sumatera Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	8	8	8,2	Sumatera Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	4	4	6	6	2,2	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3	4	6	6	5,2	Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2,0	Jambi (Kab Sarolangun)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	5	7	2,3	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	4	5	7	6,4	Jambi		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sumatera Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	7	9	9	3,4	Sumatera Selatan		02

056.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	7	9	9	8,5	Sumatera Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2,7	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	6,9	Lampung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	1,3	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	0,9	Kalimantan Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	8	1,3	Kalimantan Tengah		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	8	0,9	Kalimantan Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1,3	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0,9	Kalimantan Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	6	7	8	1,3	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	0,9	Kalimantan Timur		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Utara		02

056.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Tengah		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	6	6	8	10	1,3	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	8	10	0,9	Sulawesi Selatan		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara)		02

056.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	4	5	6	7	8	1,3	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	5	6	7	8	0,9	Sulawesi Tenggara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1,6	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	3	5	1,9	Maluku		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	5	2,2	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	5	6,3	Bali		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	NTB		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	6	1,8	NTB		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	6	1,9	NTB		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	1	1	1	2	12,0	NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu Raijua)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	2	3	5	5	1,3	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2	3	5	5	0,9	NTT		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2	3	1	1	14,0	Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mappi, Nduga, Asmat)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.19

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	1	3	5	5	5	1,9	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	3	5	5	5	2,0	Papua		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	6	7	2,6	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	6	7	7,7	Bengkulu		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Maluku Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	0	0	0	1	2,0	Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	3	3	4	5	1,8	Maluku Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	4	5	2,0	Maluku Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	4	4	5	2,0	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	3	3	3	4	4,6	Banten		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	2	2	2	2	1,7	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	7	8	2,7	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	7	8	6,9	Kep. Bangka Belitung		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Gorontalo		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	1,3	Gorontalo		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	0,9	Gorontalo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	0	0	0	0	2,0	Kep. Riau (Bintan)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	6	7	2,5	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	6,6	Kep. Riau		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	1	1	1	0	6,0	Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak)		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	2	3	5	5	5	1,9	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	1	3	5	5	5	2,0	Papua Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Sulawesi Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	4	5	5	6	1,3	Sulawesi Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	4	5	5	6	0,9	Sulawesi Barat		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	0	1	1	1	1	0,9	Kalimantan Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	3	5	5	7	8	1,3	Kalimantan Utara		02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	3	5	5	7	8	0,9	Kalimantan Utara		02
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan							**544,3**			
Survei Dan Pemetaan Tematik							4,5			
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan P4T di kawasan hutan di kawasan perluasan IKN (Hektar)	73169					4,5	Ibu Kota Negara	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pengukuran dan Pemetaan Dasar							539,8			
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3189	5000	5000	5000	5000	539,8	34 Provinsi		02
Program Pengadaan Tanah							**212,5**			
Pemanfaatan Tanah Pemerintah							212,5			
Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	1	1	1	1	1	212,5	DKI Jakarta		02
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah							**132,8**			
Pengendalian Pemanfaatan Ruang							30,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah obyek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW)	6	2	0	0	0	25,9	Pusat		01
Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap	Jumlah kasus objek Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap (P3RSL)	3	0	0	0	0	4,1	Pusat		01
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan							50,6			
Teridentifikasinya Data HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	Jumlah Bidang Tanah hasil Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian	15000	15000	15000	15000	15000	50,6	34 Provinsi		03
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar							52,2			
Terlaksananya Penertiban Tanah Terlantar	Jumlah Bidang Tanah Terlantar yang Ditertibkan	11400	11400	11400	11400	11400	52,2	34 Provinsi		03
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah							**15.917,8**			
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah							5,3			
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1600	1000	800	1563,65	1,0	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	450	0	0	0	0,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	1283,46	0	0	0,0	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1283,57	392,15	0	0	0,2	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	0	0	0	200	0,1	Kabupaten Lamandau		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	650	0	0	0	0,1	Kabupaten Barito Kuala		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	4120	1703	0	1728,04	287	0,8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una0Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	927	0	0	1509,71	0,3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	450	0	0,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	900	0	0	0	0,1	Kabupaten Bima		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	1002,31	0	0	750	0,2	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	450	0	0,1	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	0	0,3	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	1646,97	787	0,1	Kabupaten Gorontalo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	0	0	750	1373	1,0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak0Fak		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	720	1378	0	0	0	0,1	Kabupaten Mamuju Tengah		02
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	0	750	0	0	2318	0,4	Kabupaten Bulungan		02
Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah							185,6			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	-	-	-	-	-	0,0	DKI Jakarta		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	99500	125961	125961	125961	125961	1,1	Jawa Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	3403	3403	3403	3403	3403	0,1	Jawa Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	8	8	8	8	8	0,8	Yogyakarta		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	163000	521860	521860	521860	521860	4,3	Jawa Timur		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) (Ha)	38376	38376	38376	38376	38376	0,4	Aceh		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	88000	421366	421366	421366	421366	3,3	Sumatera Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	71045	71045	71045	71045	71045	0,7	Sumatera Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	282519	282519	282519	282519	282519	2,8	Riau		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	353625	353625	353625	353625	353625	3,5	Jambi		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	551837	551837	551837	551837	551837	5,4	Sumatera Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	104044	104044	104044	104044	104044	1,0	Lampung		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	72000	952995	952995	952995	952995	0,7	Kalimantan Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	163656	467144	315400	315400	315400	3,6	Kalimantan Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	65500	15760	15760	15760	15760	0,7	Kalimantan Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	130000	678868	678868	678868	678868	1,5	Kalimantan Timur		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22112	22112	22112	22112	22112	0,4	Sulawesi Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	64000	275632	275632	275632	275632	4,2	Sulawesi Tengah		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	233306	233306	233306	233306	233306	4,4	Sulawesi Selatan		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	25500	62913	62913	62913	62913	1,0	Sulawesi Tenggara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	59031	59031	59031	59031	59031	6,5	Maluku		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	223	223	223	223	223	2,1	Bali		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	45000	22256	22256	22256	22256	0,5	NTB		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	23500	43347	43347	43347	43347	0,8	NTT		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	7700	1369100	1369100	1369100	1369100	115,6	Papua		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111000	122738	122738	122738	122738	1,1	Bengkulu		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	60637	60637	60637	60637	60637	6,6	Maluku Utara		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	4800	10799	10799	10799	10799	0,6	Banten		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111928	111928	111928	111928	111928	1,1	Kep. Bangka Belitung		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	5439	5439	5439	5439	5439	0,1	Gorontalo		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	16489	16489	16489	16489	16489	0,2	Kep. Riau		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	77198	77198	77198	77198	77198	8,4	Papua Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	36996	36996	36996	36996	36996	0,7	Sulawesi Barat		02
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	54128	219451	143579	143579	143579	1,5	Kalimantan Utara		02
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah							9.392,8			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	-	-	-	-	-	0,0	DKI Jakarta		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	491757	384767	486958	486958	486958	420,5	Jawa Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1324000	122073	122073	122073	122073	244,2	Jawa Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	215000	43836,25	43836,25	43836,25	43836,25	69,7	Yogyakarta		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1375000	240076	240076	240076	240076	315,6	Jawa Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) (Ha)	401443	401443	401443	401443	401443	349,7	Aceh		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	816	287	0	0	60	0,0	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	80000	544330	544330	544330	544330	474,4	Sumatera Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	306642	306642	306642	306642	277,6	Sumatera Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	112	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122500	201964	201964	201964	201964	92,9	Riau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168000	442371	442371	442371	442371	280,2	Jambi		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	590	0	0	750	0	0,0	Kabupaten Bungo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	272450	842774	842774	842774	842774	501,3	Sumatera Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2120	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	200000	347311	347311	347311	347311	262,2	Lampung		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	401	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	261000	929571	929571	929571	929571	210,5	Kalimantan Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	555	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	206000	308506	308506	308506	308506	166,4	Kalimantan Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	728	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Lamandau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	269000	247829	247829	247829	247829	181,8	Kalimantan Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1720	1803	0	0	0	0,0	Kabupaten Barito Kuala		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	672476	672476	672476	672476	742,6	Kalimantan Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	451	0	0	120	500	0,0	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	69000	132387	132387	132387	132387	97,0	Sulawesi Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	235700	337110	337110	337110	337110	305,0	Sulawesi Tengah		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1204	0	100	0	90	0,0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131500	418568	418568	418568	418568	395,0	Sulawesi Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2638	0	1075	0	307	0,0	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	91500	213099	213099	213099	213099	233,7	Sulawesi Tenggara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1726	0	300	0	75	0,0	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	59500	131408	131408	131408	131408	114,8	Maluku		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	231	95	0	1004	0	0,0	Kabupaten Maluku Tengah		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	63500	32702	32702	32702	32702	27,5	Bali		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32500	590721	590721	590721	590721	38,9	NTB		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	160850	124198	124198	124198	124198	166,7	NTT		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1070	0	0	0	180	0,0	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19000	1211375	1211375	1211375	1211375	1.577,3	Papua		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	746	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	40000	149861	149861	149861	149861	109,3	Bengkulu		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	1075	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	19300	112954	112954	112954	112954	32,5	Maluku Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	283	0	144	0	0	0,0	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	250000	46862	46862	46862	46862	58,6	Banten		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	52000	168528	168528	168528	168528	66,4	Kep. Bangka Belitung		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	400	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Bangka Selatan		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	45000	55608	55608	55608	55608	55,6	Gorontalo		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	344	0	992	200	0	0,0	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	39000	27450	27450	27450	27450	44,0	Kep. Riau		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	13500	92685	92685	92685	92685	1.099,2	Papua Barat		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	163	0	500	0	0	0,0	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	30000	95761	95761	95761	95761	86,5	Sulawesi Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

056.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	320	0	0	0	0	0,0	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	105000	195429	195429	195429	195429	88,0	Kalimantan Utara		02
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	2368	547	300	0	0	0,0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Terlaksananya Legalisasi Tanah (Sertipikat Hak Atas Tanah)	Luas cakupan bidang tanah yang dilegalisasi	900000	900000	900000	900000	900000	0,0	34 Provinsi		03
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bagi Masyarakat Penerima TORA	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan	176	492	492	492	492	207,3	34 Provinsi		03
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah							6.334,1			
Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	Jumlah Bidang Tanah yang Diinventarisasi	1161000	1000000	1000000	1000000	1000000	650,3	34 Provinsi		03
Terlaksananya Redistribusi Tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	602135	866315	866315	866315	866315	2.911,4	34 Provinsi		03
Terlaksananya operasional Gugus Tugas Reforma Agraria	Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria	72	536	536	536	536	2.772,4	34 Provinsi		03
JUMLAH							**18.453,8**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	174,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	18,0
Program Pengembangan Perpustakaan	2.816,7
JUMLAH	**3.009,5**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Perpustakaan							**2.366,8**			
Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional							46,0			
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	350000	355000	360000	365000	365000	46,0	Pusat		04
Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi							128,0			
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno dan budaya etnis nusantara	50	50	50	50	50	22,2	Pusat		04
Pengembangan Mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	500	500	500	500	500	40,4	Daerah		04
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan Perpusnas berbasis inklusi sosial di Perpusnas (Perpusnas Jakarta)	13	15	17	19	21	65,4	Pusat		04
Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan							85,2			
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan	1417	1500	1600	1700	1800	85,2	Pusat/ Daerah		04
Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional							277,0			
Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-jurnal yang dilanggan	574139	631553	688967	746381	746381	277,0	Pusat		04
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca							1.735,4			
Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	900	900	900	900	900	298,6	Daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

057.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perluasan layanan perpustakaan berbasis digital melalui Pojok Baca Digital	Jumlah Pojok Baca Digital (lokasi)	250	300	360	432	500	211,8	Daerah		04
Pengembangan budaya gemar membaca	Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi)	100	100	100	100	100	103,1	Pusat/ Daerah		04
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial (daerah)	681	1048	1267	1634	2248	1.121,9	Daerah		04
Pengembangan Pustakawan							12,5			
Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah pustakawan yang tersertifikasi	440	700	700	700	700	12,5	Pusat/ Daerah		04
Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno							58,7			
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi	34765	34765	34765	34765	34765	58,7	Pusat		04
Pelestarian manuskrip melalui alih aksara, alih media, alih bahasa, dan konservasi	Jumlah alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	39750	39750	39750	39750	39750	0,0	Pusat		04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno							12,0			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (UPT Bung Karno Blitar)	10	11	12	13	14	12,0	Pusat		04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta							12,0			
Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)	10	11	12	13	14	12,0	Pusat		04
JUMLAH							**2.366,8**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.025,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	88,1
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.520,7
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.520,0
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.029,3
Program Pengembangan Aplikasi Informatika	1.289,5
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	899,3
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	16.226,2
JUMLAH	**24.598,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika							**225,2**			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat							49,4			
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan (16.10.2 b)	72	80	90	100	110	8,3	Pusat		07
Penguatan Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (**)	Jumlah Badan Publik yang Informatif (16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)	35	40	45	55	60	13,7	Pusat		07
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	35	40	45	50	27,4	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat							108,9			
Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	9	11	13	15	30,5	Pusat		07
Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang Memenuhi Standar Peraturan Perundangan Bidang Penyiaran	Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	15 (TV Berjaringan) 4 (Radio Berjaringan) 4 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 20 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 21 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LPB Satelit)	(Radio Berjarin	74,9	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan	96	97	98	99	99	3,5	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers							66,9			
Pendataan dan verifikasi perusahaan pers	Jumlah perusahaan pers yang diverifikasi secara faktual	250	500	500	600	700	4,3	Pusat		07
Pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	85	85	90	90	90	3,5	Pusat		07
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	Persentase (%) provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	80	83	85	90	28,4	Pusat		07
Sertifikasi Jurnalis	Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis	490	1500	1500	1500	1500	30,7	Pusat		07
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							**1.867,2**			
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik							7,0			
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah	1	1	1	1	1	7,0	Pusat		07
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM							164,2			
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) penerima beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95	164,2	Pusat		07
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi							8,3			
Pengenalan TIK kepada masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	2000	2200	2500	3000	3500	8,3	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Profesi dan Sertifikasi bidang Kominfo							1.687,7			
Pelatihan SDM bidang TIK	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (kumulatif)	50000	50000	50000	50000	50000	1.687,7	Tersebar		05
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika							**1.174,4**			
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika							676,0			
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK	Tahap penyelesaian laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	Perencanaan	Penyiapan konstruksi	Transaksi dan penanda tanganan	Konstruksi	Uji Rujukan Na	105,0	Pusat		05
Pengembangan Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Persentase pemenuhan standar pengujian perangkat berstandar internasional	30	50	70	90	100	571,0	Pusat		05
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika							336,2			
Pengembangan infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	Jumlah penyediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio - SMFR transportable: 75 site - Stasiun bergerak: 6 unit - Perangkat portable: 47 unit	25	27	27	26	23	336,2	Tersebar		05
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit							162,2			
Penataan spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung ekonomi digital Indonesia	Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum frekuensi radio untuk penyiaran digital	1	1	1	-	1	25,7	Pusat		05
	Penambahan spektrum Frekuensi Radio untuk broadband (Kumulatif)	30 MHz (2.3%)	50 MHz (3.8%)	1050 MHz (80%)	1120 MHz (85.5%)	310 MHz(100%	136,5	Pusat		05
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika							**804,0**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran							578,1			
Penetrasi fixed broadband	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (kumulatif)	13,29	16,25	20,83	25,42	30,00	26,0	Pusat		05
Penggelaran jaringan tetap pitalebar	Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik di kecamatan (kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60	55,3	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Sistem infrastruktur penyiaran digital *(Belum mempertimbangkan alokasi PHLN)	Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV digital	44 lokasi satuan transmisi	50 lokasi satuan transmisi	60 lokasi satuan transmisi	74 lokasi satuan transmisi	asi satuan tra	487,8	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Fasilitasi Ducting bersama	Jumlah kabupaten/kota yang memanfaatkan ducting bersama	2	4	6	8	10	9,0	Tersebar		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran							105,9			
Implementasi sistem penyiaran digital	Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	53	60	70	75	80	105,9	Tersebar		05
Implementasi penyiaran radio digital	Implementasi penyiaran radio digital •Simulcast AM dan DRM 30 (MF) •Simulcast FM dan DRM+ (VHF Band 2)	0	0	0	50	100	0,0	Tersebar		05
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi							120,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penataan bidang telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital	Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turannya: 1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun 1999) 3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009) 4. RUU OMNIBUSLAW 5. Aturan Turunan	1.Pengesahan RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) 2. Naskah akademik RUU OMNIBUSLAW (Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran) 3. Naskah akademik RUU Telekomunikasi 4. Naskah akademik RUU Pos	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Naskah aturan turunan UU Penyiaran	1. Naskah dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Telekomunikasi 2. Naskah dan DIM RUU Pos 3. Pengesahan aturan turunan UU Penyiaran	1. Pengesahan RUU Telekomunikasi 2. Pengesahan RUU Pos	ekomunikasi2.	120,0	Pusat		05
Program Pengembangan Aplikasi Informatika							**1.152,4**			
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat							175,2			
Fasilitasi literasi digital bagi masyarakat	Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat	10000000	20000000	30000000	40000000	50000000	34,6	Tersebar		05
Digital technopreuner	Jumlah startup aktif yang terbentuk	25	52	81	112	150	140,5	Tersebar		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Penatakelolaan Aplikasi Informatika							31,0			
Gerakan menuju Smart City	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kumulatif)	40	70	100	125	150	15,0	Tersebar		05
Penyusunan kebijakan infrastruktur dan aplikasi SPBE	Jumlah Peraturan Menteri Kominfo yang mendukung implementasi SPBE	8	8	8	8	8	16,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan							467,8			
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (kumulatif)	8	10	12	14	16	20,0	Pusat		05
Penyelenggaraan pusat data nasional *(Belum mempertimbangkan alokasi PHLN)	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)	K/L:30% Pemprov/kab /kot:30%	K/L:50% Pemprov/kab /kot:50%	K/L:80% Pemprov/kab /kot:80%	K/L:100% Pemprov/kab /kot:100%	Pemprov/kab	376,0	Pusat	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05, 07
Penyelenggaraan layanan e-government (SPBE) Nasional	Persentase layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE	20	40	60	80	100	58,0	Pusat		05
Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	4 Desain	3,8	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	Terselenggaranya jalur komunikasi yang berkualitas dan aman dalam penyelenggaran layanan SPBE	Tersedianya akses yang memadai bagi penyelenggaraan aplikasi umum	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 100.000 ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 500 ribu ASN	Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 1 juta ASN	berbasis selule	0,0	Pusat		07
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase terwujudnya interoperabilitas antara layanan SPBE	100	100	100	100	100	10,0	Pusat		07
Pengembangan Ekonomi Digital							121,6			
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0,2	Kab. Timor Tengah Utara	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	-	500	500	500	500	0,2	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Fasilitasi startup menjadi unicorn	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	0	0	1	2	3	6,1	Tersebar		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan teknologi digital pada kawasan prioritas	Persentase fasilitasi adopsi teknologi digital di Kawasan Prioritas: a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 kawasan pariwisata d. 30 kawasan IKM	Kajian pemetaan teknologi dan penyedia platform teknologi digital	50	100	100	100	65,0	Tersebar		05
Fasilitasi scaling up UMKM	Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah (dari total 4.4 juta UMKM bidang pengolahan)	Kajian pemetaan UMKM dan kebutuhan teknologi digital	11000	22000	33000	44000	50,0		Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01, 02
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,1	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Pengendalian dan Pengembangan Aplikasi Informatika							354,9			
Pengendalian konten negatif	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	120000	150000	175000	210000	250000	354,9	Pusat		05
Kegiatan xxx							2,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan portal pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah portal pelayanan publik	-	-	-	-	2 portal	2,0	Pusat/Daerah		07
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik							**62,4**			
Penata Kelolaan Bidang Komunikasi Publik							44,8			
Penata Kelolaan Komunikasi Publik	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	6	2	2	2	2	13,8	Pusat		07
Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik	500	550	600	650	700	1,1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan urusan PIKP dan Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	65	70	75	85	90	30,0	Pusat		07
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Pemerintah							17,6			
Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan pertunra)	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik	60	63	65	68	70	17,6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi							**13.194,5**			
Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi							13.194,5			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	12 unit	6 unit	6 unit	6 unit	0,0	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom		02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	0,0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0,0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak		02
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang	30 unit	21 unit	21 unit	20 unit	20 unit	0,0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi	Jumlah BTS yang terbangun (unit)						0,0	Prov. Nusa Tenggara Barat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	0,0	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun	10 unit	6 unit	6 unit	6 unit	5 unit	0,0	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	5 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	0,0	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	10 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit	0,0	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom		02
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang	20 unit	23 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0,0	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat		02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	30 unit	46 unit	47 unit	47 unit	47 unit	0,0	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun	20 unit	21 unit	20 unit	20 unit	20 unit	0,0	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BAKTI Palapa Ring	Persentase pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	Barat : 35% Tengah : 10% Timur : 5%	Barat : 40% Tengah : 15% Timur : 10%	Barat : 45% Tengah : 20% Timur : 15%	Barat : 50% Tengah : 30% Timur : 20%	engah : 40%Ti	2.546,8			05
BAKTI SINYAL/ LASTMILE *(Belum mempertimbangkan penyesuaian PNBP BHP Frekuensi)	Desa non komersial yang mendapatkan jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif)	5052	5052	5052	5052	5052	2.614,7	Tersebar, Kabupeten Kep Sangihe, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bengkayang, Kota Sabang, Kabupaten Natuna	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	02, 05
BAKTI Satria Satelit Republik Indonesia	Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi SATRIA (Gbps)	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	150	150	2.802,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
BAKTI INTERNET	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	-	1	1	1	1	0,0	Kab. Merauke	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Bakti Akses Internet	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	12000	27000	42000	61000	91000	5.231,0	Tersebar		05
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	0,0	Kab. Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

059.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	-	0,0	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	-	1	1	1	1	0,0	Kab. Sambas	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	-	250	250	250	250	0,0	Kab. Nunukan	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
JUMLAH							**18.480,1**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	15.172,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	130.876,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	866,9
Program Penelitian dan Pengembangan Polri	120,9
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	5.347,6
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	1.190,3
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	8.047,2
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	594,7
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	5.814,6
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	41.906,6
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	21.662,3
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	1.104,2
Program Pengembangan Hukum Kepolisian	226,6

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.A.2

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
JUMLAH	**232.930,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri							**804,9**			
Pelayanan Kesehatan Polri							804,9			
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Pusdokkes	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
Pemenuhan Rumah Sakit Polri	Jumlah Rumah Sakit Polri yang Dibangun dan di Upgrade	-	Dibangun : 2 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 2 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	Dibangun : 1 unit; Diupgrade : 1 Unit	800,0	Pusat		07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri							**80.729,5**			
Pengembangan Peralatan Polri							71.439,2			
Pembangunan Command Centre	Jumlah Command Center yang dibangun	5 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1.287,0	Pusat dan Daerah		07
Optimalisasi Perangkat Data Center	Jumlah Perangkat Data Center yang dioptimalisasikan	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	213,1	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen	Jumlah Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	727 Unit	145,7	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SKCK Online	Jumlah SKCK Online yang dibangun dan di upgrade	100 Unit	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	496 upgrade	61,2	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Reserse Kriminal	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	94,9	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Hardware dan Software baru di Puslabfor Sentul* (Pengadaan melalui PLN dengan asumsi 1 USD= Rp 14.500)	Jumlah Peralatan Labforensik yang diadakan	-	_	1 Paket	_	1 Paket	58,0	Pusat dan Bidlabfor Polda	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Peralatan Digital Forensik	Jumlah Peralatan Laboratorium Forensik yang diadakan	_	_	1 Paket	_	1 Paket	58,0	Pusat dan Bidlabfor Polda	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Pemeliharaan Keamanan	-	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	50.936,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Intelijen Keamanan	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6 Paket	1.374,9	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam TIK	Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	792,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Layanan Lalu Lintas	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44,7	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Brigade Mobil	-	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	13.944,0	Pusat dan Daerah		07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti Teror	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1.374,9	Pusat dan Daerah		07
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital BPKB dan STNK	-	5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	304,8	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan Big Data Polri	Sistem Single Data Entry Polri	-	Tahap 1 (1paket)	Tahap 2 (1paket)	Tahap 3 (1 paket)	Tahap 4 (1 Paket)	750,0	Pusat		07
Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri							9.290,3			
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah RPK Sesuai SPM yang Dibangun	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	69,0	Daerah		07
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	16 unit	-	-	-	-	162,9	Daerah		07
Pemenuhan Rumah Negara Polri	Jumlah Unit Rumah Negara Polri	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.086,0	Daerah		07
Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan	Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil. Perbatasan yan diabngun	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	28,8	Daerah		07
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastuktur POLRI	-	1 Paket	1 Paket	-	-	7.352,0	Ibu Kota Negara	Ibu Kota Negara (IKN)	02
Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	-	2 Polres	2 Polres	2 Polres	2 Polres	24,0	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai SPM	-	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek	24,0	Pusat dan Daerah		07
Pembangunan SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online	Jumlah SATPAS sesuai SPM yang Terintegrasi secara Online (Gedung BPKB Prototype)	-	5 Polda	5 Polda	5 Polda	5 Polda	495,6	Pusat dan Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	Jumlah M2 Sarana Prasarana Layanan Kepolisian	-	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	3000 M2 (40 Unit)	48,0	Pusat dan Daerah		07
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri		**-**	**0,64**	**0,65**	**0,66**	**0,67**	**151,1**			
Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri		-	0,58	0,59	0,59	0,6	151,1			
Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap Anggota Polri	-	0,77	0,78	0,79	0,8	151,1	Pusat dan Daerah		07
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri							**716,4**			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri							716,4			
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Brigade Mobil	Jumlah anggota satuan Brigade Mobil yang mendapatkan pelatihan Harkatpuan dalam Penanganan Konflik Secara Humanis	-	10.168 Orang	10.676 Orang	11.209 Orang	11.715 Orang	42,7	Pusat dan Daerah		07
Sertifikasi Profesi Anggota Polri	Jumlah Anggota yang memiliki Sertifikat Profesi	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	567,0	Pusat		07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Samapta Baharkam	Jumlah anggota Satuan Samapta yang mendapatkan Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis	-	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	5,2	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara Humanis Kepada Anggota Satuan Binmas	Jumlah anggota Satuan Binmas yang mendapatkan Peningkatan kemampuan personel Korbinmas	-	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	20,0	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan bela negara	Jumlah Keterlibatan Warga Negara dalam Upaya Bela Negara	-	875	875	875	875	51,9	Pusat		04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Digital Forensik	Jumlah CHFI dan ECIH yang terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda	-	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	57 lulusan	6,8	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas SDM Siber Polri	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi, pelatihan, dan capacity building siber	-	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	269 lulusan	17,5	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Sertifikasi CEH Penyidik Siber Polri	Jumlah Penyidik yang Bersertifikasi CEH	-	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	5,2			07
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							**6.024,9**			
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara							204,0			
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	Jumlah kegiatan identifikasi dan sosialisasi Tindak Pidana Terorisme	-	157 Kegiatan	160 Kegiatan	162 Kegiatan	165 Kegiatan	102,0	Pusat dan Daerah		07
Pencegahan Terorisme	Jumlah Kegiatan Pencegahan Terorisme	-	50 Kegiatan	55 Kegiatan	57 Kegiatan	60 Kegiatan	102,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital							2.808,0			
Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	Jumlah Obyek Vital yang mendapat Pengamanan	-	861 Obyek Vital	911 Obyek Vital	961 Obyek Vital	1011 Obyek Vital	1.404,0	Pusat dan Daerah		07
Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	Jumlah Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	-	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	234 Target Rentan	1.404,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan							3.012,9			
Penyelesaian Tindak Pidana di laut	Jumlah Kasus Keamanan Laut yang Ditangani	-	119 Kasus	131 Kasus	144 Kasus	158 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		07
Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing	Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing yang Ditangani	-	156 Kasus	159 Kasus	164 Kasus	166 Kasus	572,0	Pusat dan Daerah		07
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korpolair	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
Patroli Wilayah Perbatasan Laut	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Perbatasan	-	366 Jam	380 Jam	394 Jam	408 Jam	886,8	Pusat dan Daerah		07
Patroli Wilayah Selat Malaka	Jumlah Produksi Jam Patroli di Wilayah Selat Malaka	-	1.088 Jam	1.123 Jam	1.158 Jam	1.193 Jam	886,8	Pusat dan Daerah		07
Operasi Keamanan Perairan	Jumlah Operasi Keamanan Perairan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90,4	Pusat dan Daerah		07
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							**7.059,3**			
Penindakan Tindak Pidana Umum							69,0			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

060.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Penyelesaian Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya yang Ditangani	-	0,83	0,84	0,84	0,85	69,0	Pusat dan Daerah		07
Penindakan Tindak Pidana Terorisme							2.147,4			
Penanganan Kasus Terorisme	Jumlah Kasus Terorisme yang Ditangani	-	17 Kasus	20 Kasus	22 Kasus	25 Kasus	2.147,4	Pusat		07
Penindakan Tindak Pidana Narkoba							4.581,8			
Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika	Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika yang Terungkap	-	77 Jaringan	76 Jaringan	75 Jaringan	74 Jaringan	9,3	Pusat dan Daerah		07
Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	-	2,6 Ton	2,5 Ton	2,4 Ton	2,3 Ton	9,3	Pusat dan Daerah		07
Penanganan Kasus Kejahatan Narkotika	Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika yang Ditangani	-	38.000 Kasus	37.000 Kasus	36.000 Kasus	35.000 Kasus	4.560,0	Pusat dan Daerah		07
Penanganan Kasus TPPU Terkait Narkotika yang Ditangani	Jumlah Kasus TPPU terkait Narkotika yang ditangani	-	8 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	3,2	Pusat dan Daerah		07
Penindakan Tindak Pidana Siber							261,0			
Penanganan Tindak Pidana Siber	Jumlah penanganan tindak pidana siber	-	1.247 Kasus	1.247 Kasus	1.247 Kasus	1.247 Kasus	187,4	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Penyelidikan Online Dittipidsiber	Penyelidikan Online Dittipidsiber : 1080 Laporan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan	-	3.864 laporan	3.864 laporan	3.864 laporan	3.864 laporan	73,6	Pusat	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	07
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi							**4,9**			
Penanggulangan Keamanan dalam Negeri							4,9			
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah Rawan dan Bencana Oleh Korbrimob	Jumlah Bakti POLRI di Wilayah Rawan dan Bencana	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,9	Pusat dan Daerah		07
JUMLAH							**95.490,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	1.298,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	88,3
Program Pengawasan Obat dan Makanan	5.135,5
JUMLAH	**6.522,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM							**352,9**			
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM							5,3			
Pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dan triangular bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	2	2	2	5,3	Pusat		07
Pengembangan SDM Aparatur Badan POM							101,0			
Sertifikasi pengawas obat dan makanan yang kompeten sesuai standar	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	770	820	875	935	1000	101,0	Pusat		03
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan							246,7			
Pengembangan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi	Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35	55	70	85	100	246,7	33 Provinsi		03
Program Pengawasan Obat dan Makanan							**2.956,4**			
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							2.613,3			
Penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	50	52	54	56	58	179,8	33 Provinsi		03
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan sesuai standar	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	192,5	33 Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	48,0	33 Provinsi		03
Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	301,1	33 Provinsi		03
Pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai good laboratory practice	70	75	80	85	90	1.282,9	33 Provinsi		03
Pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai standar	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	262,0	33 Provinsi		03
Penerapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	660	1330	2010	2700	3400	116,8	34 Provinsi		03
Penerapan desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	211	427	648	874	1105	172,2	34 Provinsi		03
Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	84	165	255	350	450	58,1	34 Provinsi		03
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan							13,7			
Pemberian sertifikat CPOTB untuk UMKM OT	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima Sertifikat CPOTB Bertahap	42,26	53,53	64,81	76,09	87,37	13,7	33 Provinsi		03
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru							31,2			
Penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko	19	38	57	76	95	31,2	Pusat		03
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor							49,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberian Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80	81	82	83	84	43,7	Pusat		03
Pemberian Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	78	80	82	84	86	5,6	Pusat		03
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif							15,5			
Penyelesaian permohonan ekspor impor Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300	16500	16700	16900	17100	5,3	34 Provinsi		03
Pengawasan label dan iklan produk tembakau	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60000	60200	60400	60600	60800	10,2	33 Provinsi		03
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang							39,5			
Pengawasan produk pangan fortifikasi	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	88	89	90	90	13,5	34 Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pengawasan pangan olahan sesuai standar di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	50	125	200	275	350	26,0	33 Provinsi		03
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor							18,2			
Pengawasan fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat sesuai standar	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk high risk lainnya, dan bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84	86	88	90	92	18,2	33 Provinsi		03
Registrasi Pangan Olahan							46,8			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

063.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberian keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	79	80	81	82	46,8	Pusat		03
Registrasi Obat							49,9			
Pemberian keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	60	63	66	69	72	49,9	33 Provinsi		03
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan							79,0			
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	74,0	33 Provinsi		03
Pengembangan grand design penguatan laboratorium dan balai POM	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan dan penguatan balai POM	0	5	20	30	40	5,0	Pusat		03
JUMLAH							**3.309,3**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

064.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	142,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	8,9
Program Pengembangan Ketahanan Nasional	309,1
JUMLAH	**461,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

064.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Ketahanan Nasional							**36,8**			
Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan							12,7			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	-	500	500	500	500	12,7	Pusat dan Daerah		04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan							12,7			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	-	500	500	500	500	12,7	Pusat dan Daerah		04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan							11,4			
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog Wawasan Kebangsaan	190	400	400	400	400	11,4	Pusat dan Daerah		04
JUMLAH							**36,8**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	498,5
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1.597,1
JUMLAH	**2.095,7**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM							**218,9**			
Pengelolaan Sistem Informasi							218,9			
Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ Annual Technical Support (ATS)	1	1	1	1	1	109,9	Pusat		01
Pengembangan Data Center dan DRC yang mendukung OSS	Jumlah pengembangan data center, DRC, jaringan dan sistem keamanan informasi yang handal	1	1	1	1	1	109,0	Pusat		01
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal							**943,9**			
Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah							10,6			
Standarisasi tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan standard tatakelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	5,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Sistem informasi standardisasi NSPK perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	Jumlah usulan standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah	1	1	1	1	1	4,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri							36,5			
Partisipasi dalam kerjasama internasional	Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama Internasional	14	23	24	24	25	22,1	Pusat		01
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi pertemuan kerjasama internasional di bidang penanaman modal	14	23	24	24	25	3,2	Pusat		01
Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan pemangku kepentingan usaha	Jumlah kerjasama penanaman modal dengan Pemangku Kepentingan Usaha di dalam dan luar negeri	3	4	5	5	6	4,2	Pusat		01
Penyusunan bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	Jumlah bahan kajian terkait pengaturan Outward Investment	1	1	1	1	1	2,5	Pusat		01
Penyelenggaraan fasilitasi minat outward investment	Jumlah forum fasilitasi minat outward investment kepada perusahaan nasional	15	15	18	18	20	4,4	Pusat		01
Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal							42,7			
Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha	10	10	10	10	10	13,4	Jakarta, Surabaya, Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	10	10	10	10	10	22,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	2	2	2	2	2	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah							19,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	15	15	15	15	15	19,9	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal							257,7			
Penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri	1850	1850	1850	1850	1850	246,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan analisis negara target dan negara pesaing	Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing	2	2	2	2	2	11,4	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara							185,4			
Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional	Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri	(Rp 1.022,8 Triliun)	(Rp 1.125,1 Triliun)	(Rp 1.237,6 Triliun)	(Rp 1.361,3 Triliun)	(Rp 1.497,4 Triliun)	47,6	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Promosi penanaman modal dalam forum internasional	Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan)	(Rp 2.386,5 Triliun)	(Rp 2.625,1 Triliun)	(Rp 2.887,6 Triliun)	(Rp 3.176,4 Triliun)	(Rp 3.494,0 Triliun)	137,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal							40,7			
Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri	350	450	500	500	500	40,7	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri							76,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Forum Internasional bekerjasama dengan Media Internasional		800	800	800	800	800	47,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Keikutsertaan pada pameran penanaman modal di dalam dan di luar negeri		700	700	700	700	700	28,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I							8,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	20	20	20	20	20	8,1	Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II							8,0			
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II	33	41	44	47	50	8,0	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III							7,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III	50	50	50	50	50	7,7	Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV							12,9			
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	30	33	36	39	42	12,9	Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya							17,5			
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi	10	12	12	12	12	2,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Evaluasi Rencana Strategis BKPM	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM	1	1	1	1		2,3	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	1	1	1	1	1	12,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur							18,4			
Fasilitasi rencana penanaman modal di bidang industri manufaktur	Jumlah Proyek di Sektor Industri Manufaktur yang terfasilitasi	6	7	7	8	8	3,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah	Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	4	4	5	5	6,1	Pusat		01
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota	20	24	28	32	36	2,8	Daerah di 34 Provinsi		01
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	1	1	1	1	1	6,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan							30,6			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Proyek prioritas pemerintah yang terfasilitasi	7	8	9	10	10	17,1	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	3	3	3	3	3	10,6	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01, 02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	5	6	7	7	7	2,9	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)							6,0			
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	7	7	7	7	6,0	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							118,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terintegrasi	100	150	200	250	300	20,8	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pengembangan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	2	2	2	2	39,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	150	200	250	300	44,0	Daerah di 34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen tata kelola sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8	10	10	12	12	14,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta							11,9			
Fasilitasi rencana investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU	5	7	7	8	8	11,9	Pusat		01
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat							6,7			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

065.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan mutu pelayanan PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01, 04
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur							27,3			
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur	1	1	1	1	1	14,1	Pusat		01
Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur	10	10	10	12	12	7,9	Pusat		01
Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur 2020-2024	Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur	1	1	1	1	1	5,3	Pusat		01
JUMLAH							**1.162,8**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	2.319,2
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.741,0
JUMLAH	**5.060,2**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN							**186,7**			
Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN							4,0			
Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi "Active Defense" dalam pencegahan peredaran gelap narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	4,0	Pusat		07
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba							182,7			
Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	Jumlah Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	-	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	1 Laboratorium	182,7	Daerah		07
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)							**1.014,6**			
Penyelenggaraan Advokasi							632,1			
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)	Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa	173 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	346 Desa	33,6	Daerah		07
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Pemkab/Pemkot yang diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	-	75 Kabupaten/ Kota	100 Kabupaten/ Kota	125 Kabupaten/ Kota	150 Kabupaten/ Kota	383,0	Pusat dan Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	Jumlah "Remaja Teman Sebaya" Anti Narkotika	-	1.730 Orang	1.730 Orang	1.730 Orang	1.730 Orang	129,3	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bagi SMP & SMU Sederajat	Jumlah SMP & SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill	-	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	86,2	Pusat dan Daerah		07
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif							22,3			
Kawaasan rawan Kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gealp, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program alternatif	Jumlah Kawasan rawan Kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gealp, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program alternatif	6 Kawasan					6,3	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar		07
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program Alternative Development	Jumlah Kawasan yang Beralih ke Tanaman Pengganti (Alternative Development)		4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	16,0	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar		07
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum							2,0			
Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika	Jumlah laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika	1 Laporan	-	-	-	-	2,0	Pusat		07
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat							162,0			
Operasionalisasi Pos Interdiksi	Jumlah Pos Interdiksi yang Operasional	-	7 Pos	9 Pos	11 Pos	13 Pos	58,0	Pusat dan Daerah		07
Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dari Luar Negeri	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	4,0	Pusat		07
Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	Jumlah Sistem Informasi Kerawanan Narkotika yang terbangun	-	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100,0	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba							15,0			
Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	-	-	-	-	2,4	Pusat dan Daerah		07
Pelatihan Kompetensi Teknis Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan	Jumlah Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-	225 Orang	250 Orang	275 Orang	300 Orang	12,6	Pusat dan Daerah		07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah							13,2			
Operasionalisasi Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi SPM	-	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	13,2	Pusat dan Daerah		07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat							10,1			
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi SPM	10 Fasilitas	-	-	-	-	1,7	Pusat dan Daerah		07
Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-	45 Unit	50 Unit	55 Unit	60 Unit	8,4	Pusat dan Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

066.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika							54,0			
Titik lokasi lahan tanaman ganja yang dimusnahkan	Jumlah Titik lokasi lahan tanaman narkotika yang dimusnahkan	-	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	29,0	Pusat dan Daerah		07
Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	Jumlah Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,0	Pusat		07
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika							104,0			
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	Jumlah Laporan Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran Aset dan Transaksi Keuangan	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	4,0	Pusat		07
Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	Jumlah Sistem Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terbangun	-	1 Sistem	1 Sistem	-	-	100,0	Pusat		07
JUMLAH							**1.201,3**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	353,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	145,7
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	1.155,5
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.745,1
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	402,5
Program Pengembangan Daerah Tertentu	424,4
Program Pembangunan Daerah Tertinggal	498,8
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1.410,3
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.273,5
JUMLAH	**16.408,9**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa							**10.342,3**			
Pemberdayaan Masyarakat Desa							6.906,6			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2635 orang	2218 orang	2060 orang	1901 orang	1743 orang	486,7	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3874 orang	3261 orang	3028 orang	2795 orang	2562 orang	715,5	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	194 orang	164 orang	152 orang	140 orang	129 orang	35,9	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3830 orang	3224 orang	2994 orang	2763 orang	2533 orang	707,4	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	3228 orang	2717 orang	2523 orang	2329 orang	2134 orang	596,1	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2697 orang	2270 orang	2108 orang	1946 orang	1784 orang	498,1	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	518 orang	436 orang	405 orang	374 orang	343 orang	95,7	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	797 orang	671 orang	623 orang	575 orang	527 orang	147,2	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	694 orang	584 orang	542 orang	501 orang	459 orang	128,2	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1427 orang	1201 orang	1115 orang	1029 orang	943 orang	263,5	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1213 orang	1021 orang	948 orang	876 orang	803 orang	224,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1011 orang	851 orang	790 orang	729 orang	669 orang	186,7	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	711 orang	599 orang	556 orang	513 orang	470 orang	131,4	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	925 orang	778 orang	723 orang	667 orang	611 orang	170,8	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	417 orang	351 orang	326 orang	301 orang	276 orang	77,1	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	747 orang	629 orang	584 orang	539 orang	494 orang	138,0	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	914 orang	769 orang	714 orang	659 orang	604 orang	168,8	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1119 orang	942 orang	874 orang	807 orang	740 orang	206,6	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	977 orang	822 orang	763 orang	705 orang	646 orang	180,4	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	500 orang	421 orang	391 orang	361 orang	331 orang	92,4	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	316 orang	266 orang	247 orang	228 orang	209 orang	58,3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	494 orang	415 orang	386 orang	356 orang	326 orang	91,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	1512 orang	1273 orang	1182 orang	1091 orang	1000 orang	279,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	2707 orang	2278 orang	2116 orang	1953 orang	1790 orang	499,9	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	665 orang	560 orang	520 orang	480 orang	440 orang	122,9	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	529 orang	445 orang	413 orang	382 orang	350 orang	97,7	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	614 orang	517 orang	480 orang	443 orang	406 orang	113,4	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	153 orang	129 orang	120 orang	111 orang	101 orang	28,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	326 orang	274 orang	255 orang	235 orang	216 orang	60,2	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	136 orang	115 orang	106 orang	98 orang	90 orang	25,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	939 orang	790 orang	733 orang	677 orang	621 orang	173,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	144 orang	121 orang	113 orang	104 orang	95 orang	26,6	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	222 orang	187 orang	173 orang	160 orang	147 orang	41,0	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.18

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1,2	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar							24,0			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.20

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, Brebes, Pekalongan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kulon Progo, Bantul	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	14 kabupaten	2,1	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	0,8	Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Pasaman, Pasaman Barat, Solok	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Rokan Hulu, Kampar	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.21

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kerinci, Tanjung Jabung Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Ogankomering Ilir, Muara Enim	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Ketapang, Sambas, Sintang	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Penajam Paser Utara, Kutai Barat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Banggai, Parigi Moutong	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.22

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Enrekang, Bone	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Buton, Kolaka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	1,8	Gianyar, Buleleng	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	8 kabupaten	1,2	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	21 kabupaten	3,2	Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.23

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	5 kabupaten	0,8	Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori, Yahukimo, Yalimo	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Kaur, Bengkulu Utara	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Halmahera Selatan, Kepulauan Sula	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	12 kabupaten	1,8	Pandeglang, Lebak	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Bangka Barat, Bangka	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	0,5	Boalemo, Gorontalo, Pohuwato	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.24

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Natuna, Lingga	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	22 kabupaten	3,3	Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	0,6	Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	0,3	Malinau, Nunukan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	02
Pembangunan Sarana Prasarana Desa							1.703,4			
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	7,1	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.25

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	3 desa	3 desa	21,3	DPP Borobudur	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	23,1	DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	15 desa	6 desa	3 desa	2 desa	2 desa	24,9	DPP Danau Toba	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.26

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	8,9	DPP Baru Bukittinggi-Padang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	1 desa	1 desa	2 desa	2 desa	7,1	DPP Baru Derawan-Berau	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	3 desa	16,9	DPP Manado-Likupang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.27

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	8,9	DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	2 desa	16,0	DPP Wakatobi	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	8 desa	6 desa	6 desa	4 desa	3 desa	24,0	DPP Lombok-Mandalika	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.28

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	6 desa	6 desa	6 desa	4 desa	3 desa	22,2	DPP Labuan Bajo	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	8,9	DPP Morotai	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	3 desa	2 desa	8,9	DPP Tanjung Lesung	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.29

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	1 desa	2 desa	2 desa	3 desa	2 desa	8,9	DPP Tanjung Kelayang	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	9,8	DPP Baru Raja Ampat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	841 desa	1311 desa	1374 desa	1382 desa	0 desa	113,2	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.30

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	894 desa	1644 desa	1960 desa	1787 desa	0 desa	147,7	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	231 desa	87 desa	0 desa	144 desa	0 desa	7,5	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	550 desa	1996 desa	2494 desa	1009 desa	281 desa	158,9	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.31

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1306 desa	1522 desa	1943 desa	1453 desa	546 desa	147,4	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.32

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	470 desa	1338 desa	1528 desa	1143 desa	662 desa	121,5	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	417 desa	208 desa	182 desa	235 desa	0 desa	19,1	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.33

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	485 desa	377 desa	556 desa	197 desa	0 desa	33,5	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	639 desa	290 desa	205 desa	509 desa	65 desa	30,8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	321 desa	786 desa	892 desa	540 desa	12 desa	62,4	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.34

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	683 desa	680 desa	404 desa	593 desa	408 desa	57,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	638 desa	319 desa	574 desa	0 desa	812 desa	42,1	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	492 desa	367 desa	314 desa	93 desa	392 desa	31,8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	724 desa	356 desa	277 desa	478 desa	479 desa	41,6	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.35

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	522 desa	193 desa	190 desa	139 desa	169 desa	20,2	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	472 desa	231 desa	367 desa	287 desa	362 desa	31,8	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	853 desa	263 desa	695 desa	452 desa	221 desa	44,0	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.36

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	542 desa	435 desa	694 desa	487 desa	111 desa	47,2	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	605 desa	666 desa	497 desa	276 desa	175 desa	47,7	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	357 desa	278 desa	397 desa	307 desa	57 desa	28,8	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.37

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	133 desa	117 desa	75 desa	156 desa	133 desa	12,2	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	0 desa	157 desa	0 desa	639 desa	0 desa	19,2	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	374 desa	612 desa	393 desa	656 desa	863 desa	61,5	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	866 desa	0 desa	139 desa	524 desa	0 desa	19,5	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	390 desa	290 desa	215 desa	314 desa	324 desa	29,7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	386 desa	190 desa	257 desa	418 desa	49 desa	24,8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	992 desa	326 desa	0 desa	340 desa	246 desa	28,7	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	50 desa	0 desa	122 desa	0 desa	50 desa	4,0	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	433 desa	191 desa	0 desa	0 desa	224 desa	13,1	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	197 desa	52 desa	70 desa	75 desa	0 desa	6,2	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	563 desa	0 desa	142 desa	281 desa	0 desa	12,6	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	291 desa	88 desa	144 desa	59 desa	168 desa	12,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	106 desa	74 desa	0 desa	232 desa	0 desa	8,2	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna							1.533,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.40

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.42

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.43

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.45

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.46

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.47

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.49

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat	1 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0 provinsi	0,3	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.50

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	60 desa	60 desa	72 desa	72 desa	72 desa	180,9	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	84 desa	84 desa	72 desa	72 desa	72 desa	204,3	Manggarai, Ngada, Sumba Timur		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	215 desa	215 desa	226 desa	226 desa	226 desa	593,8	Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	63 desa	63 desa	72 desa	72 desa	72 desa	183,8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah		02
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD	78 desa	78 desa	168 desa	168 desa	168 desa	361,8	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat		02
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa							175,1			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.51

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.52

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.53

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.54

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.55

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.56

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.57

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	0 desa	1,0	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.59

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.60

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1,3	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	0 desa	0 desa	0 desa	1 desa	1 desa	0,7	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	0 desa	1 desa	1 desa	1,3	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	0 desa	1,3	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.61

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.62

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	10 desa	10 desa	3,9	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.63

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	10 desa	10 desa	3,9	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.64

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	11 desa	11 desa	10 desa	4,0	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.65

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.66

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.68

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	11 desa	4,3	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	16 desa	16 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,2	Majene, Mamasa, Polewali Mandar		02
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	15 desa	15 desa	12 desa	11 desa	10 desa	4,1	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung		02
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan							**189,9**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.71

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan							50,5			
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Sukabumi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Magelang dan Kab. Kendal		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Aceh Timur		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Agam		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Muaro Jambi		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Banyuasin		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.72

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Kotawaringin Barat		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Minahasa Utara		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.73

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Maluku Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Buleleng dan Klungkung		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	4 BUMDes bersama	3,4	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kota Jayapura dan Kab. Merauke		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bengkulu Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Morotai		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Pandeglang		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	3 BUMDes bersama	2,5	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bintan		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	2 BUMDes bersama	1,7	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah		02
BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana, Pemasaran serta Permodalannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	1 BUMDes bersama	0,8	Kab. Bulungan		02
Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan							76,1			
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab. Pamekasan		02
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab.Kubu Raya		02
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab.Buol		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.75

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	15,9	Kab. Maluku Tengah		02
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	12,6	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur		02
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan							52,6			
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Pamekasan		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Banyuasin		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab.Kubu Raya		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab.Buol		02
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	8,6	Kab. Maluku Tengah		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	0 kawasan	0 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	9,5	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur		02
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas							10,8			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Sukabumi		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Magelang dan Kab. Kendal		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Aceh Timur		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Agam		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Muaro Jambi		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.77

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Banyuasin		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Kotawaringin Barat		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Minahasa Utara		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.78

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Maluku Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Buleleng dan Klungkung		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	4 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,7	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kota Jayapura dan Kab. Merauke		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bengkulu Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Morotai		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Pandeglang		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,5	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bintan		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	2 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,4	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah		02
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0,2	Kab. Bulungan		02
Program Pengembangan Daerah Tertentu							**308,7**			
Penanganan Daerah Rawan Pangan							71,9			
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	0	0	1	0	0	2,4	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1	1	0	0	0	4,2	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.80

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	0	0	1	0	0	2,4	Kab. Sumba Barat Daya		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan				1		2,6	Kab. Boven Digoel		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1				1	4,8	Kab. Keerom		02
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1	1			1	7,5	Kab. Supiori		02
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya yang fungsional di daerah tertentu rawan pangan	4	4	4	4	4	48,0	Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Daerah Perbatasan							145,0			
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	200	200	100	100	96	11,6	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	100	100	100		100	6,7	Kab. Malaka		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan		100		50		3,3	Kab. Supiori		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	50	50		50	50	3,4	Kab. Boven Digoel		02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	100	100		100		5,0	Kab. Keerom		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.81

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	4	4	4			18,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	2	2				6,0	Kab. Malaka		02
Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2	2	2	2	12,0	Kab. Supiori		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		2	2	2	2	12,0	Kab. Boven Digoel		02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Ditingkatkannya Panjang Jalan Strategis Desa Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal	2	2	2	2		12,0	Kab. Keerom		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	52,8888889	52,8888889	52,8888889	52,8888889	52,8888889	13,2	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	40	40	40	40	40	10,0	Kab. Malaka, Belu, Kupang	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	5,7	Kab. Supiori		02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	21,7777778	21,7777778	21,7777778	21,7777778	21,7777778	5,4	Kab. Boven Digoel		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	60	60	60	60	60	15,0	Kab. Pegunungan Bintang	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	22,6666667	5,7	Kab. Keerom		02
Penanganan Daerah Rawan Bencana							42,0			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Pesisir Barat		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	292,964245	289,042676	289,042676	289,042676	289,042676	7,4	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	196,078431	196,078431	192,156863	192,156863	192,156863	4,9	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	96,0784314	2,5	Kab. Lombok Utara	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.83

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	490,196078	490,196078	488,235294	480,392157	480,392157	12,4	Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas masyarakat terdampak bencana dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	392,156863	392,156863	384,313725	384,313725	384,313725	9,9	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar							37,4			
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar		1	1	1		6,6	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)		02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1	1	3	2	17,6	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar		02
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di daerah pulau kecil dan terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1	1			6,6	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)		02
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di daerah pulau kecil dan terluar	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di pulau kecil dan terluar	1	1			1	6,6	Kab. Teluk Wondama		02
Penanganan Daerah Pasca Konflik							12,5			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	2,1	Kab. Donggala		02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	314,339623	314,339623	314,339623	314,339623	314,339623	8,3	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	78,490566	2,1	Kab. Sorong		02
Program Pembangunan Daerah Tertinggal							**313,2**			
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal							30,0			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	2,3	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Pesisir Barat		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25	1,8	Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	59	59	59	59	59	2,4	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Lombok Utara		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75	5,3	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	5,9	Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	59	59	59	59	59	2,4	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	15	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Supiori		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	30	29,5	29,5	29,5	29,5	1,2	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	30	29,5	29,5	29,5	29,5	1,2	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel		02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,6	Kab. Kepulauan Sula		02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	118	118	118	118	118	4,7	Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal							35,0			
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2			4,5	Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2			4,4	Kab. Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut dskt)		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal				0,2	0,2	10,0	Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini dskt); Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan KSPN Lore Lindu dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal	0,2	-	0,2	0,2	-	8,6	Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN Rinjani dskt)		02
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Meningkatnya persentase kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		0,2	0,2	0,2		7,5	Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah Daru dskt)		02
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal							135,1			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	1	0	0	0	1,3	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	1	1	0	1	0	4,9	Kab. Sigi, Tojo Una-una		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	1					1,3	Kab. Lombok Utara		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	4	3	3	1	18,2	Kab. Kupang, Mangggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.87

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	1	4	5	3	21,1	Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintan, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal					1	1,9	Kab. Kepulauan Sula		02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang fungsional di daerah tertinggal	0	2	1	0	1	6,4	Kab. Teluk Wondama, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Sigi		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5		1,5			5,1	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Lombok Utara		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5					3,0	Kab. Timor Tengah Selatan		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	0	7,2	10	4	8	42,1	Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal			1,91	1,91		5,6	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.88

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal		2				2,3	Mamberamo Raya		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	2,5	3,5	2	0	0	10,2	Nabire, Intan Jaya,Dogiyai, Paniai		02
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Terbangunnya/ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	0	0	0	2	1,73	5,8	Kab. Pegunungan Arfak, Sorong	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal							113,1			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	1	0	1	1	3,0	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	-	-	-	-	1,0	Kab. Kepulauan Mentawai		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	3	-	-	-	-	3,6	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	2	0	1	0	3,5	Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	0	0	0	0	1,1	Kab. Lombok Utara		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	1	1	3	12,9	Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.89

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	5	9	5	3	26,4	Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	0	2	0	2,4	Kab. Boven Digoel, Mappi		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	0	1	1	1	3,6	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	0	1	0	0	3	4,8	Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	0	0	0	0	1,2	Kab. Kepulauan Sula		02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Meningkatnya Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1	2	2	2	1	9,6	Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0	0,05	0,05	0	4,0	Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0	0	0	1,0	Kab. Kepulauan Mentawai		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.90

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0	0	0	3,0	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0,05	0,05	0	0,05	7,0	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0,05	0	0	2,0	Kab. Lombok Utara		02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	9,0	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0	0	0	0,05	2,0	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	-	0,05	0,05	2,0	Kab. Keerom		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	0,05			1,0	Kab. Nabire		02

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	-	-	-	0,05		1,0	Kab. Tolikara	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0,05					1,0	Kab. Kepulauan Sula		02
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	0	0,05	0,05	0,05	0,05	7,0	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw	Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	02
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi							**835,1**			
Pembangunan Permukiman Transmigrasi							823,7			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	3	2	1	2	57,8	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	-	-	1	1	12,5	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Bungo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.92

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	1	38,6	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	2	1	30,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	-	2	1	1	24,6	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	-	1	1	21,0	Kabupaten Lamandau		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	25,9	Kabupaten Barito Kuala		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	2	2	41,2	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	2	3	1	1	52,9	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	1	1	1	1	45,1	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.93

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	2	2	2	2	67,3	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	1	2	1	1	30,6	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	3	1	-	-	1	18,9	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	2	1	53,4	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	24,4	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	2	2	48,8	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	1	1	18,4	Kabupaten Bangka Selatan		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	2	3	1	45,9	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.94

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	-	29,3	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	1	53,8	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	2	1	34,0	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Penyediaan Tanah Transmigrasi							11,4			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	1600	1000	800	1563,65	1,9	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	450	-	-	-	0,2	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	1283,46	-	-	0,5	Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	1283,57	392,15	-	-	0,6	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	-	-	-	200	0,1	Kabupaten Lamandau		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	650	-	-	-	0,2	Kabupaten Barito Kuala		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	4120	1703	-	1728,04	287,7	1,6	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Moutong		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.95

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	300	-	0,1	Kabupaten Wajo		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	927	-	-	1509,71	0,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	450	-	0,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	900	-	-	-	0,3	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	1002,31	-	-	750	0,6	Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	450	-	0,2	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	-	-	0,3	Kabupaten Pulau Morotai		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	150	-	0,1	Kabupaten Bangka Selatan		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	1646,97	787	0,9	Kabupaten Gorontalo		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	-	-	750	1373	0,8	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	720	1378	-	-	-	0,5	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	-	750	-	-	2318,06	1,1	Kabupaten Bulungan		02
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi							**658,2**			
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi							585,3			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	3	3	3	32,4	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Bungo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	3	2	2	3	30,8	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	1	2	21,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	3	2	3	1	27,8	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Lamandau		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Barito Kuala		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.97

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	2	2	2	1	1	24,6	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	5	4	6	5	66,2	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	3	3	3	1	37,8	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	3	3	3	33,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Maluku Tengah		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	-	2	2	2	26,4	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	2	1	27,1	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	3	2	33,4	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	16,7	Kabupaten Bengkulu Utara		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.98

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	2	23,4	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	1	1	1	1	12,3	Kabupaten Bangka Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	4	3	2	4	40,7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	2	2	2	24,7	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	-	2	1	2	2	21,6	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	2	2	1	2	22,2	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Pengembangan Usaha Transmigrasi							59,2			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	1	2	-	1	2,5	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	-	1	1,0	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	1	-	1	-	1,0	Kabupaten Bungo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	2	1	1	2	2,9	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	2	-	1,5	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.99

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	1	2	1	3,0	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	1	-	1,8	Kabupaten Lamandau		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	-	1	1	1,0	Kabupaten Barito Kuala		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	-	1	1	-	1,8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	3	4	3	6,4	Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	2	1	-	1	2,9	Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	1	2	3,2	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	1	1	1	1,4	Kabupaten Maluku Tengah		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	1	1	1	2,0	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	2	2	1	1	3,4	Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	2	2	2	2	4,0	Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.100

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	-	1	-	0,5	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	-	-	2	2	2	2,9	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	-	1	-	1,0	Kabupaten Bangka Selatan		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	3	3	3	1	5,5	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	1	2	2	1	3,1	Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	1	1	1	1	3,2	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	2	-	1	-	1	3,3	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan		02
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi							13,8			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	816	287	-	-	60	0,6	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Simeulue		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	112	-	-	-	639	0,5	Kabupaten Pesisir Selatan		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	590	-	-	750	-	0,6	Kabupaten Bungo		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2120	-	-	-	-	0,6	Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.101

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	401	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	555	-	-	-	-	0,3	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	728	-	-	-	-	0,3	Kabupaten Lamandau		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1720	1803	-	-	-	1,4	Kabupaten Barito Kuala		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	451	-	-	120	500	0,8	Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1204	-	100	-	90	0,8	Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Parigi Moutong		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2638	-	1075	-	307	1,5	Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1726	-	300	-	75	0,9	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	231	95	-	1004	-	0,7	Kabupaten Maluku Tengah		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	320	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1070	-	-	-	180	0,8	Kabupaten Sumba Timur		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

067.B.102

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	746	-	-	-	-	0,1	Kabupaten Merauke		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	1075	-	-	-	-	0,2	Kabupaten Bengkulu Utara		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	283	-	144	-	-	0,2	Kab. Kepulauan Sula		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	400	-	-	-	-	0,1	Kabupaten Bangka Selatan		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	344	-	992	200	-	0,7	Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	163	-	500	-	-	0,6	Kab. Fak-Fak		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	679	-	-	-	-	0,7	Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu		02
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	2368	547	300	-	-	0,7	Kabupaten Bulungan		02
JUMLAH							**12.647,4**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

068.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	1.007,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	100,4
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	828,9
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	5.233,0
JUMLAH	**7.169,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga							**3.711,0**			
Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK							671,7			
Pemanfaatan Data dan Informasi KKBPK	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK	57,6	60,69	63,41	66,51	70,05	671,7	Pusat dan Provinsi		03
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah							1.507,5			
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	38,32	46,12	53,92	61,72	69,52	1.507,5	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak							153,1			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	38,68	39,68	40,68	41,68	42,68	153,1	Pusat dan Provinsi		04
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan							17,8			
Peningkatan kinerja penyuluh KB dalam capaian Program KKBPK	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	60	65	70	75	85	17,8	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pembinaan Ketahanan Remaja							61,9			
Peningkatan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72	30,9	Pusat		04
Pengembangan karakter remaja yang berkualitas	Indeks karakter remaja	67,92	68,42	68,92	69,42	69,92	30,9	Pusat		04
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi							241,0			
Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	29	32	35	38	40	241,0	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03

PRESIDEN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus							12,6			
Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Persentase kesertaan KB di 100 Kab/Kota dengan kesertaan KB rendah	37,96	38,46	38,96	39,46	39,96	12,6	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga							131,8			
Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga yang berwirausaha	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	131,8	Pusat dan Provinsi		04
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan							97,0			
Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	12	13	14	15	16	97,0	Pusat		04
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk							50,2			
Peningkatan Kab/Kota yang memiliki kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov % 45% kab/kota	29,0	Pusat dan Provinsi		03
Peningkatan efektivitas kelompok kerja KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	10% prov & 10% kab/kota	20% prov & 20% kab/kota	30% prov & 30% kab/kota	40% prov & 40% kab/kota	50% prov & 50% kab/kota	21,2	Pusat dan Provinsi		03
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR							10,7			
Peningkatan kualitas pelayanan KB	Indeks Informasi Metode KB (method information index/MII)	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	10,7	Pusat dan Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Analisis Dampak Kependudukan							91,0			
Penyediaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	30% prov & 10% kab/kota	45% prov & 20% kab/kota	60% prov & 30% kab/kota	75% prov & 40% kab/kota	100% prov & 50% kab/kota	91,0	Pusat dan Provinsi		03
Perencanaan Pengendalian Penduduk							28,3			
Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	50	60	68	75	80	7,1	Pusat dan Provinsi		03
Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	30% prov & 21% kab/kota	45% prov & 27% kab/kota	60% prov & 33% kab/kota	75% prov & 38% kab/kota	100% prov % 45% kab/kota	21,2	Pusat dan Provinsi		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi							636,4			
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	9984	10215	10214	10214	10214	116,9	Provinsi		03
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29327	29327	29327	29327	29327	340,1	Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	4122784	4122784	4122784	4122784	4122784	179,4	Provinsi	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	03
JUMLAH							**3.711,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	65,8
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	152,5
JUMLAH	**218,3**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM							**33,0**			
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara							13,5			
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	Jumlah Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	2 Standar Norma dan Setting	6,0	Pusat		07
Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Jumlah Surat Keterangan Korban Penanganan pelanggaran HAM yang berat	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	450 Surat Keterangan	7,5	Pusat		07
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban							19,5			
Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	15,0	Pusat		07
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2,5	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

074.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP	1	-	-	-	-	2,0	Pusat		03
JUMLAH							**33,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg	1.042,1
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	11.272,6
JUMLAH	**12.314,7**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika							**7.545,3**			
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG							2.354,7			
Informasi Gempabumi dan Tsunami dengan pemasangan seismograf	Jumlah penambahan peralatan seismograf untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami	117	56	55	55	55	889,1	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	Jumlah Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas	300	50	50	50	50	1.441,3	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Sekolah Lapang Geofisika untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan tsunami	Jumlah peserta yang meningkat pemahaman terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami melalui sekolah lapang geofisika	300	900	900	900	900	24,4	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG							238,6			
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Iklim Terapan (Sekolah Lapang Iklim)	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim	1000	1275	1450	1650	1650	49,1	281 lokasi		06
Informasi Iklim Terapan di Pusat	Jumlah Informasi Iklim Terapan di Pusat	6	6	6	6	6	189,5	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa BMKG							1.681,0			
Operasional Aloptama MKG yang Prima	Persentase alat operasional utama MKG yang laik operasi	90	91	92	93	94	1.681,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG							812,5			
Jaringan komunikasi yang handal	Peningkatan persentase ketersediaan layanan jaringan komunikasi	92	93	94	95	96	812,5	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG							278,5			
Informasi peringatan dini windshear	Jumlah bandara yang memperoleh informasi peringatan dini windshear	4	3	2	2	3	278,5	14 bandara	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG							346,2			
Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II	Jumlah stasiun yang menyediakan layanan informasi cuaca digital skala desa/kelurahan dengan scalling up wheather capacity II	-	1	10	34	-	346,2	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG							11,8			
Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	Jumlah kota besar yang dilakukan studi informasi kerentanan seismik	5	2	2	2	2	11,8	13 kota	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG							1.822,0			
Informasi meteorologi maritim melalui Strengthening of Marine Meteorology	Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi meteorologi maritim	20	20	20	20	20	1.792,3	100 pelabuhan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

075.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)	Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya terhadap informasi cuaca maritim dan peringatan dini cuaca melalui sekolah lapang nelayan/SLN	500	1360	1360	1360	1360	29,7	34 provinsi		06
JUMLAH							**7.545,3**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.764,2
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	813,6
JUMLAH	**3.577,8**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							**127,8**			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							127,8			
Peningkatan kompetensi SDM KPU	Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	127,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							**347,6**			
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW							347,6			
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	85,1	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

076.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	21,3	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	106,4	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	71,0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	63,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
JUMLAH							**475,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

077.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	78,3
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	578,0
JUMLAH	**656,3**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

077.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI							**0,5**			
Penyelenggaraan Pengawasan Intern							0,5			
Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0,5	Pusat		07
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara							**5,5**			
Penanganan Perkara Konstitusi							5,5			
Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4,0	Pusat		07
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	Penyusunan Anotasi UU berdasarkan Putusan MK	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	15 Undang-Undang	1,5	Pusat		07
JUMLAH							**6,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

078.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	134,9
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	427,0
JUMLAH	**561,9**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	239,5
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	4.736,7
JUMLAH	**4.976,2**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI							**185,6**			
Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti							185,6			
Pengembangan Research Power-House	Peraturan Jabatan Fungsional Baru	5					5,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	5					3,7	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Program Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	220	240	300	350	500	176,9	Provinsi Jawa Barat		03
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek							**4.342,2**			
Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah							26,0			
Repositori ilmiah nasional (RIN)							26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Inovasi							1.100,6			
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual	1	1	1	0	0	496,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Produktif Cibinong Science and Technology Park (C-STP)	1	0	0	0	0	100,0	Provinsi Jawa Barat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi	1	1	0	0	0	259,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Procurement of Multi Purposes Research Vessels	1	1	3	3	3	0,1	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh UKM/Masyarakat	10	10	10	10	10	20,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Infrastruktur Fasilitas laboratorium proses pangan tradisional berstandar current Good Manufacturing Practices (c-GMP)	1	1				145,0	Provinsi DI Yogyakarta		03
Peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini	Produk riset dan produk inovasi sederhana yang dihasilkan oleh siswa pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan oleh fungsional peneliti	0	200	200	200	200	40,0	Provinsi Jawa Barat		04
Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang dikomersialisasikan	0	10	10	10	10	40,0	Provinsi Jawa Barat		04
Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Baru							170,2			
Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan	2	2	2	2	2	86,2	Provinsi Jawa Barat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion		2	2	2	2	84,0	DKI Jakarta		03
Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian							78,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan		18					11,9			03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Pengemasan Makanan Olahan	2	2	2	2	2	67,0	Provinsi DI Yogyakarta		03
Penelitian Biologi							628,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Vaksin Rekombinan dan HPV	2	2	2	2	2	79,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat						14,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Pengungkapan dan Pemanfataan Biodiversitas Nusantara	21	4	5	5	7	107,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka	4	4	4	4	4	109,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat Amoksilin		1	1	1	1	98,6	Provinsi Jawa Barat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin						67,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi		3	3	2	2	26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi		1	1	1	1	4,1	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi		1	1	1	1	7,5	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi		2	2	1	1	19,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Perbanyakan massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih		2	2	2	2	19,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul		1	2	0	0	18,8	Provinsi Jawa Barat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul		1	1	1	1	2,8	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api		1	1			55,8	Provinsi Jawa Barat		03
Penelitian Ekonomi							366,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Perubahan Masyarakat dalam Revolusi Digital	1	3	3	3	3	102,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Penguatan Demokrasi Indonesia	1	3				82,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif dan Maritim	1	11	11			95,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Nasional	1	3	3	3	3	63,0	Provinsi DKI Jakarta		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan Kebencanaan yang Terintegrasi		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Indonesia		1	1	1	1	12,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Penelitian Kimia							1.091,0			
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Kendaraan Listrik	1	1	1	1	1	873,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Radar Pertahanan Udara Nasional			1	1	1	36,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional		3	3	3	3	32,0	Provinsi Banten		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Baterai Lithium Berlisensi Indonesia			1	1	1	44,0	Provinsi Banten		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi Untuk Produksi Greenfuel		1	1	1	1	16,0	Provinsi Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarisma untuk implan bedah otak, implan tulang, dan karteter diagnostik jantung			3	3	3	3	90,0	Provinsi Banten		03
Penelitian Oseanografi							870,0			
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Kelautan untuk Kajian Potensi Bencana		3					4,1			03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut	5					13,1	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Core Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project	5	5		0	0	263,1	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)	1					315,0	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Penguatan Riset Samudra Nasional		1	1	1	1	102,2	Provinsi DKI Jakarta		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS)	3		16	16	16	26,5	Provinsi Jawa Barat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

079.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah		1	1	1	1	26,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)		1	1	1	1	42,0	Provinsi Jawa Barat		03
Pengembangan Research Power-House	Fasilitas kawasan geodiversitas Indonesia - Karang Sambung		1	0	0	0	78,0	Provinsi Jawa Tengah		03
Pengembangan Penerbitan Ilmiah							11,5			
Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder		1	1	1	1	1	11,5	DKI Jakarta		03
JUMLAH							**4.527,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	362,2
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	925,6
JUMLAH	**1.287,8**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan							**111,9**			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BATAN							29,9			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Pegawai yang melanjutkan pendidikan jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir	15	20	20	20	20	12,7	Pusat		03
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	500	500	600	600	600	9,2	Pusat		03
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM BATAN	2	2	2	2	2	8,0	Pusat		03
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan SertifikasI							6,7			
Pelaksanaan dan Penerapan Standarisasi Iptek Nuklir	Dokumen Standardisasi Produk Iptek Nuklir	6	7	7	7	7	3,5	Pusat		03
Pelaksanaan dan Penerapan Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nukli	Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nuklir	2	7	7	7	7	3,2	Pusat		03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir							75,2			
Jasa Pendidikan Iptek Nuklir	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Sertifikasi Personel	3.25	3.25	3.26	3.26	3.27	30,6			03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	96	68	107	96	96	31,9	Yogyakarta		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

080.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penguatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Teknologi Nuklir		3	3	3	3	3	12,7	Pusat		03
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi							**277,8**			
Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir							168,3			
Pengembangan PLTN Skala Industri	Pengembangan PLTN Skala Industri	5	6	6	6	7	168,3			03
Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka							53,1			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe RF Radiosinovektori		1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	4,2	Prov Banten		03
Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka untuk Diagnosis dan Terapi	Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka	5	5	7	7	7	31,3	Prov Banten		03
Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Keselamatan Pendukung Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka	Dokumen Pengoperasian, Pemeliharaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	1	1	1	1	1	17,6	Prov Banten		03
Pengembangan Sains dan Teknologi Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor Riset							23,7			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe Senyawa Bertanda untuk Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Data Riset	1 Prototipe	23,7	Prov Banten		03
Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir							32,7			
Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	Dokumen Teknis Teknologi dan Keselamatan PLTN Besar dan SMR	4	5	6	7	8	32,7			03
JUMLAH							**389,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	259,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt	18,0
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7.465,9
JUMLAH	**7.743,1**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT							**80,3**			
Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi BPPT							80,3			
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Jumlah Perekayasa yang mendapatkan Beasiswa S3	1	1	1	1	1	77,5	DKI Jakarta		03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas (kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek	Program Pembinaan Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa						2,8	DKI Jakarta		03
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi							**6.651,8**			
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur							138,5			
Penelitian Flagship Riset Nasional	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur	1	1	1	1	1	138,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati							5,5			
Penelitian Flagship Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	5,5	Lampung		03
Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi							34,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan Hortikultura	1	1	1	1	1	17,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Bioteknologi untuk Pengembangan Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	17,3	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai							22,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	UJi Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk mendukung Bidang Maritim dan Transportasi	1	1	1	1	1	8,7	Yogakarta		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1	1	1	14,1	Yogyakarta		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan							215,9			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	5	5	5	5	5	215,9	DKI Jakarta, Mentawai dan Selat Sunda		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri							13,4			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting	1	1	1	1	1	13,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri							3,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	3,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi							24,6			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government dan e-Business)	1	1	1	1	1	24,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika							110,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	110,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Permesinan							29,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	4,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Propulsi Kendaraan Berbasis Listrik	1	1	1	1	1	25,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan							607,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	3	3	3	3	3	607,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah							77,3			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases	1	1	1	1	1	77,3	Provinsi Riau		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi							1.305,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Produk bidang Transportasi Perkeretaapian	2	2	2	2	2	1.305,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan penerapan Teknologi Lingkungan							8,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	2	2	2	2	2	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	2	2	2			7,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material							148,3			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Terintegrasi	1	1	1	1	1	1,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium dan Gigi	2	2	2	2	2	120,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Bangunan Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan Murah	1	1	1	1	1	10,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	1	1	1			4,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	11,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	1,1	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian							13,7			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal	1	1	1	1	1	13,7	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana							2.250,0			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana	1	1	1			2.250,0	Kepulauan Mentawai dan Selat Sunda		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral							10,0			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel	1	1	1	1	1	10,0	Morowali		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika							29,5			
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang Maritim	3	3	3	3	3	29,5	Jawa Timur		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca							479,7			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	4	4	4			23,7	DKI Jakarta		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Uji Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana	4	4	4	4	4	101,0	Provinsi Riau		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Pengadaan armada pendukung modifikasi Cuaca dan Peralatannya	4	4	4			355,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika							12,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim	1	1	1	1	1	4,2	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	8,6	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Sistem Audit Teknologi							13,4			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	8,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan	1	1	1	1	1	0,9	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku Obat	1	1	1	1	1	1,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Industri Proses dan Energi							2,8			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	2,8	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika							2,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	1	1	1	1	1	2,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi Energi							415,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil	1	1	1	1	1	331,6	Kamojang		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Station	1	1	1	1	1	83,4	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia							173,7			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Pilot Project Garam Industri	1	1	1	1	1	173,7	Gresik, Jawa Timur		03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim							363,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Industri Perkapalan	5	5	5	5	5	363,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

081.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Elektronika							140,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil Listrik	5	5	5	5	5	5,0	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS	5	5	5			135,5	Serpong, Tangerang Selatan-Banten		03
JUMLAH							**6.732,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	178,2
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	3.781,3
JUMLAH	**3.959,5**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa							**3.707,0**			
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh							331,0			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3650000	3650000	3650000	3650000	3650000	296,0	Pusat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	4	4	4	4	4	10,0	Pusat		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Produk Litbangyasa Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9	9	9	9	9	10,0	Pusat		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot	1	1	1	1	1	15,0	Pusat		03
Pengembangan Sains Antariksa							211,9			
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT	1		-	-	-	164,0	Provinsi NTT		03
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Informasi cuaca antariksa	3	3	3	3	3	47,9	Jawa Barat		03
Pengembangan Sains Atmosfer							320,5			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk Keselamatan Transportasi, Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim (ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)	3	3	3	3	3	95,0	Jawa Barat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Decision Support Tools (DST) berbasis Sains dan Teknologi Atmosfer untuk mendukung Smart Water Management System	-	3	3	3	3	100,5	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Laboratorium Terbang Nasional	-	1	-	-	-	125,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh							360,2			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR PRN)	1	2	2	2	1	35,0	Pusat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs)	19	2	2	2	2	25,0	Pusat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh	100	3	3	3	3	29,8	Pusat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional	-	4	4			270,4			03
Pengembangan Teknologi Penerbangan							655,1			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE KOMBATAN)	1	1	1	1	1	275,0	Jawa Barat		03
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	250,1	Jawa Barat		03
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Teknologi Operasi Terbang dan Diseminasi	2	2	2	2	2	5,0	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Pembangunan Laboratorium Pengujian Komponen Pesawat Udara Berdasarkan Standar Internasional DO-160	1	-	-	-	-	125,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Teknologi Satelit							845,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

082.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah (KOORDINATOR PRN)	1	1				844,2	Jawa Barat		03
Teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Satelit Mikro LAPAN-A4	1					1,0	Jawa Barat		03
Pengembangan Teknologi Roket							983,2			
Hasil inovasi Flagship Nasional Prioritas Riset Nasional	Prototipe roket bertingkat 100 KM (KOORDINATOR PRN)	1	1	1	1	1	975,0	Jawa Barat		03
Teknologi garda depan (frontier) yang dikuasai	Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan Khusus	2					5,0	Jawa Barat		03
Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan	Bandar Antariksa Skala Kecil	-	-	-	-	-	3,2	Papua		03
JUMLAH							**3.707,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	417,3
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	3.533,2
JUMLAH	**3.950,5**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial							**2.368,4**			
Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika							387,1			
Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun	30	45	45	45	45	242,5	Cors RPJMN (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua), CORS InaTEWS (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat)		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	Jumlah stasiun pasang surut yang dibangun	26	31	31	31	31	136,6	Pasut RPJMN (Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, NTT, NTB, Kalimantan Tengah), Pasut InaTEWS (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Banggai Kepulauan-Sulteng, Sulawesi Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Aceh, Lampung, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah)		06
Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola	Jumlah titik pantau geodinamika yang dikelola	90	90	90	90	90	8,0	Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan		06
Pemetaan Batas Wilayah							137,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	500	4000	4000	4000	4000	100,0	Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara		02
Tanda batas Negara	Jumlah pilar tanda batas negara yang dibangun	120	225	200	200	200	31,5	Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat		07
Peta batas Negara	Jumlah peta batas negara yang dihasilkan	32	20	20	20	20	2,5	RI-Malaysia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), RI-PNG (Papua), RI-RDTL (NTT)		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas laut yang dihasilkan	6	20	20	17	15	1,4	RI-Malaysia (Selat Malaka dan Laut Sulawesi), RI-Vietnam (Natuna), RI-Palau (Samudera Pasifik), RI-India (Samudera Hindia), RI-RDTL (Laut Timor)		07
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas darat yang dihasilkan	3	20	20	20	20	2,5	RI-Malaysia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat), RI-PNG (Papua), RI-RDTL (NTT)		07
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai							165,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan Garis Pantai Prioritas	Panjang Garis Pantai Terpetakan	10000	6000	6000	6000	6000	165,5	Lombok, Selat Sunda, Bali, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Kendari, Kolaka, Labuan Bajo, Maumere, Manokwari, Makassar, Pare-pare, Selayar, Poso, Kaimana, Nabire, Biak, Serui, Merauke, Bontang, Tarakan, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Madura, Probolinggo, Jakarta, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Rembang, Jepara, Padang, Mamuju, Gorontalo, Manado, Bengkulu, Batam, Singkawang, Palopo, Toli-toli, Waingapu, Amahae		01
Pemetaan Rupabumi dan Toponim							1.240,7			
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi	6865	14000	14000	14000	14000	790,5	Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB		02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

083.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000	Cakupan peta RBI skala 1:5000	21889 (4099 NLP)	14000	14000	14000	14000	450,2	Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB		02
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial							437,3			
Layanan Data Center	Jumlah hari layanan data center beroperasi	360	360	361	361	362	327,3	Pusat		02
Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia	Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun	300	1200	1200	1200	1200	110,0	Pusat		02
JUMLAH							**2.368,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	185,9
Program Pengembangan Standardisasi nasional	774,5
JUMLAH	**960,4**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Standardisasi nasional							**752,2**			
Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal							41,2			
Standar Nasional Indonesia bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal		200	220	240	260	280	28,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru		160	166	172	178	180	12,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi							20,5			
Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi		150	175	190	205	230	20,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif							20,5			
Standar Nasional Indonesia bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		150	170	190	210	230	20,5	Pusat		01
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian							66,1			
Pembinaan Penerapan SPK bagi Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)		225	350	430	585	628	41,1	Pusat		01
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis		1800	1800	2000	2000	2000	25,0	Makassar, Riau, Palembang, Surabaya, Bekasi		01
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian							14,1			
Skema Penerapan Standar		275	375	480	600	725	14,1	Pusat		01
Peningkatan Akreditasi Laboratorium							167,2			
Penilaian Akreditasi Laboratorium		1035	1095	1150	1205	1260	97,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Laboratorium SNSU		1					70,0	Serang	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Seritifikasi							41,6			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi		650	700	750	800	850	41,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi							14,5			
Sistem dan Skema Akreditasi		14	15	16	17	18	14,5	Pusat		01
Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi							110,1			
Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi		62	62	65	65	65	110,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia							169,6			
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia		71	71	73	73	73	169,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian							4,7			
Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		1	1	1	1	1	4,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

084.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Data dan Sistem Informasi							15,0			
Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		1	1	1	1	1	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							67,1			
Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		4	10	12	14	18	15,2	Pusat		01
Pelatihan dan Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		3	3	3	3	3	35,9	Pusat		01
Roadmap Pengembangan SPK		1	1				1,0	Pusat		01
Pengembangan keahlian spesifik SPK bagi Standards Professionals Indonesia		1	1	1	1	1	15,0	Pusat		01
JUMLAH							**752,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

085.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	16,8
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	335,6
JUMLAH	**352,4**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

085.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir							**157,9**			
Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir							157,9			
Teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional	4	15	15	15	15	157,9	Pusat		03
JUMLAH							**157,9**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	124,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	103,0
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	412,5
JUMLAH	**640,0**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara							**105,4**			
Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat							6,5			
Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	Jumlah Sistem Informasi Kompetensi ASN (SIPKA)	1 Sistem	-	-	-	-	1,5	Pusat		07
Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional	-	-	1 Dokumen	-	-	5,0	Pusat		07
Inovasi Administrasi Negara							6,6			
Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah lab inovasi pelayanan publik	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	4 Daerah	6,6	Daerah		07
Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara							6,2			
Skenario model kesejahteraan ASN (insentif untuk ASN High Performance, insentif untuk ASN di daerah 3T dan risiko tinggi)	Laporan rekomendasi kebijakan	3 Kajian	-	-	-	-	1,2	Pusat		07
Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	Jumlah dokumen gap analysis	1 Dokumen	-	-	-	-	5,0	Pusat		07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara							2,0			
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
Pengembangan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	2 kebijakan/ modul/ pedoman	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

086.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Standarisasi Pembentukan Karakter Dasar dan Kader ASN							83,1			
Penerapan sekolah kader ASN	Jumlah lulusan sekolah kader ASN	-	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta	83,1	Pusat		07
Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN							1,0			
Pengembangan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah Kebijakan/modul/pedoman	-	1 kebijakan/ modul/ pedoman	-	-	-	1,0	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							**105,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

087.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	82,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,8
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	215,0
JUMLAH	**300,2**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

087.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional							**180,1**			
Pembinaan Kearsipan Pusat							108,9			
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	75 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	121 Rekomendasi	122 Rekomendasi	7,1	Pusat		07
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	K/L = 32 Instansi Daerah = 38 Prov/Kab/Kota	K/L = 7 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	K/L = 14 Instansi Daerah = 27 Prov/Kab/Kota	K/L = 16 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	K/L = 8 Instansi Daerah = 32 Prov/Kab/Kota	76,0	Pusat		07
Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	75 Instansi	167 Instansi	171 Instansi	168 Instansi	122 Instansi	25,9	Pusat/Daerah		07
Pemanfaatan Arsip							23,2			
Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	254650	280110	308145	338945	372835	23,2	Pusat/ Daerah		04
Preservasi Kearsipan							28,9			
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	122851	293730	323823	356845	392970	28,9	Pusat/Daerah		04
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional							19,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

087.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	10120	10120	10120	10120	10120	19,1	Pusat/ Daerah		04
JUMLAH							**180,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	114,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	180,7
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	596,1
JUMLAH	**891,4**

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara							**58,8**			
Perumusan Kebijakan Teknis Jabatan Aparatur Sipil Negara							15,3			
Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi	72 IP	137 IP	137 IP	137 IP	138 IP	15,3	Pusat		07
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian							21,2			
Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	Jumlah Data ASN	1 Database	-	-	-	-	10,5	Pusat		07
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1 Sistem	-	-	-	-	10,7	Pusat		07
Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Standardisasi Kinerja Jabatan, dan Pengambangan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara							15,0			
Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN	Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019 menggunakan sistem informasi kinerja	25 IP	204 IP	204 IP	202 IP	-	15,0	Pusat/Daerah		07
Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS							6,8			
Sistem Talent Pool JPT Nasional	Jumlah Sistem Talent Pool JPT Nasional	-	-	-	1 Upgrade Sistem	-	3,0	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

088.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaan kompetensi ASN (JPT dan JA) melalui Assesment Center	Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center	2000 Orang	100% jumlah JPT dan JA terpetakan kompetensinya	-	-	-	3,8	Pusat/Daerah		07
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kode Etik, dan Disiplin, Serta Pemberhentian dan Pensiun							0,5			
Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun	Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	25	25	25	25	25	0,5	Pusat		04
JUMLAH							**58,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.371,6
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2.155,9
JUMLAH	**3.527,5**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							**394,0**			
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP							394,0			
Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko	Jumlah kebijakan/ pedoman pelaksanaan manajemen resiko	1	0	0	0	0	2,3	Pusat		07
Penerapan Manajemen Risiko di K/L	Jumlah K/L dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	18 IP	37 IP	49 IP	60 IP	69 IP	60,8	Pusat		07
		0,2069	0,4253	0,5632	0,6697	0,7931	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Provinsi	Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	2 IP	6 IP	10 IP	14 IP	23 IP	15,6	Daerah		07
		0,05	0,15	0,3	0,4	0,62	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Kab / Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) pada level 3 dari skala 1 s.d. 5	25 IP	51 IP	76 IP	127 IP	200 IP	132,9	Daerah		07
		0,05	0,1	0,15	0,25	0,39	0,0			07
Penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)	Jumlah Badan Usaha dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	355 BU	419 BU	524 BU	622 BU	741 BU	182,4	Pusat / Daerah		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

089.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
		0,1674	0,1975	0,2471	0,2933	0,3494	0,0			07
JUMLAH							**394,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	2.245,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	1.774,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	174,7
Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	184,9
Program Pengembangan Ekspor Nasional	2.086,6
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	755,0
Program Perundingan Perdagangan Internasional	802,1
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	6.127,8
Program Perdagangan Berjangka Komoditi	306,9
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.292,3
JUMLAH	**15.750,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan							**281,2**			
Penyelenggaraan Akademi Metrologi							38,2			
Layanan Pendidikan Vokasi Kemetrologian	Jumlah lulusan Akademi Metrologi	165	165	215	265	315	38,2	Jawa Barat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	01
Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)							243,0			
Buyer Inquiry	Jumlah buyer inquiry	9	12	15	18	21	75,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Market Intelligence dan Co Working Space di Pasar Potensial	Jumlah Market Intelligence dan Co Working Space	21 Martel dan 5 Co Working Space	22 Martel dan 6 Co Working Space	23 Martel dan 7 Co Working Space	24 Martel dan 8 Co Working Space	25 Martel dan 9 Co Working Space	168,0	Canberra, Sydney, Singapore, KL, Bangkok, Manila, Hanoi, Hongkong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Seoul, Busan, Osaka, Tokyo, Chenai, New Delhi, Dubai, Riyadh, Jedah, Kairo, Johanesburg, Lagos, Moscow, Budapest, Roma, Barcelona, Madrid, Milan, Lyon, Jenewa, Paris, London, Denhag, Brussel, Hamburg, Berlin, Copenhagen, Santiago, Sao Paolo, Mexico, LA, Vancouver, Chicago, Washington, Ottawa	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Pengembangan Ekspor Nasional							**1.175,2**			
Pengembangan Produk Ekspor							121,2			
Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	70	80	90	100	110	55,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Pengembangan produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	50	60	70	80	90	16,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekspor sektor jasa dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	25	30	35	40	45	50,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor							70,9			
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan luar negeri	7	7	7	7	7	40,9	Sydney, Jeddah, Lagos, Hongkong, Skow, Nunukan, Atambua		01
Pilot Project Pendirian Export Center	Jumlah Export Center di Daerah		1	2	3	4	30,0	Medan, Bandung, Surabaya, Makassar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor							131,3			
Penghargaan Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi penghargaan dan fasilitas	50	50	50	50	50	17,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang utama	6	10	15	20	25	41,4	Pusat		01
Penyebaran Informasi dan Analisa Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah informasi dan analisa pasar ekspor negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	7	10	15	20	27,9	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Customer Service Center (Export helpdesk) Online/Ofline	Jumlah export helpdesk	1	1	1	1	1	19,5	Pengumpulan data dilakukan di daerah(Jateng, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku)	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan market place berorientasi ekspor	Jumlah Layanan Market Place	1	1	1	1	1	25,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Promosi dan Citra							714,9			
Kegiatan Pencitraan	Jumlah kegiatan pencitraan	11	11	11	11	11	27,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Kegiatan, World Dubai Expo 2020	Jumlah pelaksanaan WED 2020	1	1	1	1	1	330,5	Dubai	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
CA Expo Nanning China dan Penugasan Pameran Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi	7	7	8	8	8	50,1	China, Jerman	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang utama	11	15	20	25	30	101,0	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Jumlah promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	4	10	15	20	25	138,8	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Promosi Produk dan jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	Jumlah Promosi Produk dan Jasa Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo Indonesia	6	6	6	6	6	67,2	Jakarta, Surabaya	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kerja Sama Pengembangan Ekspor							39,7			
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	5	5	5	5	5	12,6	Swiss, Amerika Serikat, RRT, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.6

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor	750	770	790	810	830	16,8	Jateng, Jatim, Kaltim, Sumut, Sumsel, Bali	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Kerjasama Ekspor Sektor Jasa	Jumlah kerjasama pengembangan ekspor sektor jasa	2	2	2	2	2	3,2	Jabar, Banten	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama	6	6	6	6	6	7,0	Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar, Yogya, Jatim	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan SDM Bidang Ekspor							97,2			
Export Coaching Program	Jumlah peserta export coaching program	125	150	175	200	225	26,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor	119	124	129	134	139	70,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri							**345,4**			
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan							26,6			
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan	7	7	7	7	7	26,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan							37,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.7

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Kebijakan Ekspor Produk Industri	Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor produk industri	2	2	2	2	2	10,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor produk perindustrian dan pertambangan berteknologi tinggi	Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan peningkatan nilai tambah ekspor produk industri dan pertambangan	7	7	7	7	7	26,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor							83,3			
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Inatrade	Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Inatrade	1	1	1	1	1	10,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Melalui Skema Imbal Dagang	Negara	1	1	1	1	1	5,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan	1	1	1	1	1	6,7	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.8

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan terhadap Implementasi Fasilitasi Perdagangan (KNFP)	Jumlah layanan KNFP	1	1	1	1	1	13,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia	Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan Lainnya	1	1	1	1	1	8,3	34 Provinsi	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT)			7+13	18+13	18+13	18+13	38,0	Pusat	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01
Pengelolaan Impor							31,0			
Kebijakan Impor Dalam Rangka Penguatan Struktur Impor Bahan Baku dan Penolong	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Baku dan Penolong	9	8	7	6	5	11,8	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional	Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor Bahan Pokok	4	4	4	4	4	6,3	Pusat		01
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Impor di Post Border	Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan impor di post border	1	1	1	1	1	13,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar							54,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.9

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Jumlah pengamanan dan perlindungan akses pasar	29	31	33	35	37	54,9	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah							112,4			
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi promosi dan diklat	500	550	600	650	700	99,4	Pusat		01
FTA Center di Daerah	Jumlah FTA Center di Daerah	1	1	0	0	0	13,0	Jatim	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Program Perundingan Perdagangan Internasional							**687,7**			
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional							359,5			
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar di negara mitra	88	90	92	94	88	218,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
FTA Center	Jumlah layanan FTA Center Piloting (Sebelum beralih ke export center)	903	910	910	910	903	70,1	Jakarta, Jateng, Maluku, Sulsel, Sumut, Jabar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.10

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	13	15	17	19	21	17,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional	7	7	7	7	7	40,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah tindak lanjut perundingan perdagangan internasional	2	2	2	2	2	7,3	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat, LN, dan Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional di Pusat LN dan Daerah	2	2	2	2	2	5,8	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan Jasa							94,7			
Penyusunan Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap serta Dokumen Daya Saing di Bidang Jasa	3	3	3	3	3	41,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Akses Pasar Jasa di Pasar	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar sektor jasa di negara mitra	40	42	44	46	48	33,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.11

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa	Jumlah dokumen koordinasi perundingan bidang jasa	1	1	1	1	1	20,4	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perundingan Perdagangan Multilateral							47,9			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Multilateral	29	31	33	35	29	41,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral	5	5	5	5	5	6,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN							62,1			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum ASEAN dan Mitra ASEAN	110	115	120	125	110	56,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pemahaman dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah diseminasi pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	8	8	8	8	8	5,7	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Perundingan Perdagangan Bilateral							75,9			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.12

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di Fora Bilateral	90	100	110	120	100	75,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional							47,7			
Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan perundingan penurunan hambatan akses pasar barang olahan di forum APEC dan organisasi internasional	76	81	86	91	96	38,3	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	Jumlah laporan Pengembangan Tata Aturan Eksternal yang Kondusif bagi Lalu Lintas Perdagangan RI	8	8	8	8	8	9,4	Pusat		01
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri							**5.180,0**			
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							784,4			
Peningkatan Kewirausahaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah bantuan sarana usaha perdagangan	10000	10000	10000	10000	10000	644,8	Pusat	10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.13

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	2500	3000	3500	4000	4500	77,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01, 04
Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat Nusantara	300	400	500	600	700	62,5	34 Provinsi		03
Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting							228,0			
Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat	Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat	12	12	12	12	12	183,8	Pusat		01
Stabilitasasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	Jumlah stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN	82	82	82	82	82	44,2	Pusat		01
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan							106,4			
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	200	300	400	500	600	12,0	Pusat		01
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan	Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang mendapat pembinaan	2000	2000	2000	2000	2000	74,7	Pusat		01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Secara Elektronik	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik	1	1	1	1	1	6,2	Pusat		01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan Konvensional	Jumlah kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional	5	5	5	5	5	13,6	Pusat		01
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan							4.061,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.14

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	800	800	800	800	800	191,3	Pusat		02
Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	Jumlah Implementasi pemanfaatan Digital Payment dan TIK Dalam Sistem Pembayaran dan Distribusi	3	10	20	30	40	51,5	Pusat		01
Penataan Perdagangan Antar Provinsi	Jumlah Sistem Perdagangan Antar Provinsi	1	1	1	1	1	30,7	Pusat		01
Verifikasi Data Gudang dan Stok Barang di Gudang	Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan Laporan Stok Barang di Gudang	1	1	1	1	1	75,0	Pusat		01
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	49	70	72	68	48	3.712,6	Pusat	Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke; Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	01, 02
Program Perdagangan Berjangka Komoditi							**80,2**			
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas							57,0			
Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	50	55	60	65	70	19,5	Pusat		01
Jumlah Pengguna Pasar Lelang	Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang	430	430	430	430	430	9,5	Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulut, Sultra, Gorontalo, Jabar, Jatim, Sulsel, Jateng, Sumbar, DKI Jakarta		01

090.B.15

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan Warehouse Management System	6	12	17	22	27	28,0	Tanah Datar, Madiun, Kudus, Gorontalo, Tapin, Garut		01
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas							23,2			
Analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	Jumlah analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang	7	7	7	7	7	23,2	Pusat		01
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga							**561,4**			
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen							95,9			
Edukasi Konsumen	Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	6500	6500	6500	6500	6500	71,0	Pusat		04
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang dibina	500	500	500	500	500	3,4	Pusat		04
Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah SDM LPK yang dibina	330	330	330	330	330	21,5	Pusat		01
Peningkatan Tertib Ukur							74,8			
Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur	10	10	10	10	10	16,2	Pusat		01
Pengawasan Kemetrologian	Pengawasan Kemetrologian	15000	15000	15000	15000	15000	55,6	Pusat		01
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrologian	Jumlah pejabat fungsional bidang kemetrologian yang diberikan pembinaan	400	400	400	400	400	3,1	Pusat		01
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa							58,4			
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang diberikan pembinaan	115	115	115	115	115	17,7	Jawa Barat		01
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	Jumlah Pengawasan	50	50	50	50	50	5,9	Pusat		01
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label	Jumlah pengawasan barang beredar terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label	660	670	680	690	700	34,8	Pusat		01

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.16

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang							69,7			
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah contoh/sampel yang diuji mutu barang	4500	4600	4700	4800	4900	57,4	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Jumlah pejabat fungsional penguji mutu barang yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	12,2	DKI Jakarta		01
Standardisasi dan Pengendalian Mutu							31,5			
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	7500	7500	7500	7500	7500	11,5	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	Jumlah informasi standar mitra tujuan ekspor	10	11	12	13	14	4,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pemantauan Mutu BOKOR	Jumlah pemantauan mutu bokor	6	7	8	9	10	15,1	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi							20,3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

090.B.17

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat/sampel yang diuji layanan kalibrasi	7100	7120	7140	7160	7180	20,3	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi							13,1			
Layanan Sertifikasi	Jumlah layanan sertifikasi	169	179	189	199	209	13,1	DKI Jakarta	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Peningkatan Tertib Niaga							197,7			
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang diberikan pembinaan	150	150	150	150	150	26,3	Jawa Barat		01
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diawasi	150	160	170	180	190	34,2	Pusat		01
Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	3162	3162	3162	3162	3162	137,2	Medan, Surabaya, Bekasi, Makassar	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							**8.311,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	636,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	41,0
Program Kepemudaan dan Keolahragaan	2.679,3
Program Pembinaan Olahraga Prestasi	3.811,2
JUMLAH	**7.168,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Kepemudaan dan Keolahragaan							**1.631,0**			
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda							44,0			
Pemuda yang difasilitasi sebagai kader wirausaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5000	5000	5000	5000	5000	24,0	Pusat		01, 03
Terfasilitasinya sentra kewirausahaan pemuda	Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi	34	34	34	34	34	20,0	Pusat		03
Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda							25,4			
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	1700	1700	1700	1700	1700	8,5	Pusat		03
Terfasilitasinya pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	1800	1800	1800	1800	1800	16,9	Pusat		03, 04
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda							41,4			
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan kepemudaan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		03
Terlaksananya koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	6	6	6	6	6	41,0	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							93,6			
Terfasilitasinya pemuda dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	17	17	17	17	17	50,7	Pusat		03, 04
Terfasilitasinya pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6150	6150	6150	6150	6150	42,8	Pusat		03
Peningkatan Wawasan Pemuda							56,4			
Terfasilitasinya pemuda kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif	1500	1500	1500	1500	1500	28,2	Pusat		03, 07
Terfasilitasinya pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia	34	34	34	34	34	28,2	Daerah		03
Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus							25,1			
Tersampaikannya kampanye olahraga tradisional, usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan	11274	11274	11274	11274	11274	25,1	Pusat		03
Pengembangan Olahraga Pendidikan							17,5			
Tersampaikannya kampanye olahraga olimpik di Sekolah Dasar, Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Nonformal dan Informal	Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	17000	17000	17000	17000	17000	17,5	Pusat		03
Pengembangan Olahraga Rekreasi							162,3			
Tersampaikannya kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata	Jumlah peserta kampanye olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	14020	14020	14020	14020	14020	140,9	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terfasilitasinya Penyelenggaraan dan KeikutsertaanKejuaraan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan kejuaraan olahraga rekreasi	3	3	3	3	3	21,4	Pusat		03
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga							807,2			
Tersusun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan sentra dan sekolah khusus keolahragaan yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,7	Pusat		03
Meningkatnya peserta PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan di daerah	Jumlah peserta PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Di Daerah	1381	1381	1381	1381	1381	623,0	Pusat		03
Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra keolahragaan dan sekolah khusus keolahragaan	Jumlah peserta olahraga di sekolah khusus keolahragaan	253	253	253	253	253	183,5	Pusat		03
Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga							329,6			
Terfasilitasinya bantuan untuk Prasarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	29	29	29	29	29	64,8	Pusat		03
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasiberbasis cabang olahraga olimpik	59	58	58	58	58	264,8	Pusat		03
Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga							28,6			
Tersusunnya Naskah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang dapat dimanfaatkan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,4	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terlaksananya Koordinasi dan Kemitraan Keolahragaan dengan Lembaga Lintas Sektoral, Antar Tingkat Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	10	10	10	10	10	28,2	Pusat		03
Program Pembinaan Olahraga Prestasi							**2.867,0**			
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan							147,3			
Terfasilitasinya pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	Jumlah pembinaan induk organisasi cabang-cabang olahraga prestasi cabang olahraga olimpik, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	17	17	17	17	17	24,2	Pusat		03
Terfasilitasinya pengelola organisasi keolahragaan olimpik dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga	1250	1250	1250	1250	1250	29,6	Pusat		03
Terfasilitasinya tenaga keolahragaan olimpik dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	3000	3000	3000	3000	3000	93,5	Pusat		03
Pembinaan Olahraga Prestasi							2.719,7			
Tersususun dan termanfaatkannya naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi	Jumlah naskah kebijakan pembinaan olahraga prestasi yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	0,6	Pusat		03
Terfasilitasinya olahragawan andalan nasional	Jumlah olahragawan andalan nasional	1000	1000	1000	1000	1000	1.409,3	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat Internasional (single dan/atau multi event)	44	44	44	44	44	50,7	Pusat		03

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

092.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional (PON, Peparnas)	2	N/A	N/A	N/A	2	328,2	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional (Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, ASEAN Para Games)	3	2	2	2	2	868,9	Pusat		03
Terfasilitasinya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional (single dan/atau multi event)	62	62	62	62	62	62,0	Pusat		03
JUMLAH							**4.498,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

093.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	777,7
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1.078,9
JUMLAH	**1.856,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

093.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi							**74,5**			
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah							28,8			
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Instansi yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	84 Instansi	28,8	Pusat		07
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan							45,7			
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	45,7	Pusat		07
JUMLAH							**74,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

095.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	302,4
Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	2.441,2
JUMLAH	**2.743,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

100.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI YUDISIAL RI

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	99,5
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	157,1
JUMLAH	**256,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

100.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI YUDISIAL RI

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial							**12,5**			
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik							12,5			
Karakterisasi putusan	Jumlah Putusan yang dilakukan Karakterisasi	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	35 putusan	12,5	Pusat		07
JUMLAH							**12,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	697,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	51,1
Program Penanggulangan Bencana	2.533,4
JUMLAH	**3.281,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB							**54,9**			
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana							54,9			
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Simulasi PB di Daerah	Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah	19	19	19	19	19	54,9	34 Provinsi		06
Program Penanggulangan Bencana							**1.773,5**			
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana							29,0			
Sistem dan dukungan teknis sistem penanggulangan bencana	Jumlah sistem yang dikembangkan	13	13	13	13	13	29,0	Pusat	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui mitigasi bencana							19,5			
Satuan Pendidikan Aman Bencana	jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana	8	8	8	8	8	19,5	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi							7,9			
Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah personil yang didampingi	120	120	120	120	120	7,9	Pusat		06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat							1.056,4			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan	10	10	10	10	10	1.056,4	34 provinsi		06
Peringatan Dini							22,0			
Sistem Peringatan Dini	jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang termanfaatkan	6	6	6	6	6	22,0	34 provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan							70,2			
Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi	10	10	10	10	10	58,0	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Budaya Sadar bencana	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	81	81	81	81	81	12,2	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Layanan pusat pengendalian operasi							8,2			
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan keposkoan	Jumlah personil yang mendapat pendampingan SKPDB dan keposkoan	105	105	105	105	105	8,2	34 Provinsi	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat							6,1			
Pengelola Infrastruktur Darurat	Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100	100	100	6,1	34 provinsi		06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan							49,5			
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan	Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	2	2	2	2	2	2,4	34 Provinsi		06
Desa Tangguh Bencana	jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	120	120	120	120	120	47,1	34 Provinsi		06
Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB							269,9			
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB	144	136	135	134	134	269,9	34 Provinsi		06

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB							52,2			
Distribusi Logistik dan Peralatan PB	Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB	5	5	5	5	5	52,2	34 Provinsi		06
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana							16,0			
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi Sulawesi Tengah	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi NTB	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	2,5	Provinsi Banten	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	4	4	4	4	4	8,5	34 provinsi		06
Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA							45,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	6,0	Kabupaten Lebak dan Pandeglang	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7,0	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	7,0	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	8	8	8	8	8	25,2	34 provinsi		06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi							57,2			
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	490 orang	56,0			06
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	80 orang	80 orang				1,2	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	02

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

103.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pemetaaan dan Evaluasi Risiko Bencana							26,3			
Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	Jumlah kajian pemetaan dan analisis risiko bencana tersusun	5	5	5	5	5	26,3	Pusat		06
Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana							37,9			
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan Teknis Pengembangan Strategi PB	Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	18	18	18	18	18	37,9	Pusat		06
JUMLAH							**1.828,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	669,6
JUMLAH	**669,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI							**365,0**			
Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia							365,0			
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedural	Pelaksanaan pembekalan akhir keberangkatan	179.860 CTKI/TKI	200.000 CTKI/TKI	230.000 CTKI/TKI	260.000 CTKI/TKI	300.000 CTKI/TKI	190,0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta		07
CTKI/TKI yang terlindungi	Penanganan/pemulangan TKI Bermasalah	18.000 TKI	17.000 TKI	15.000 TKI	13.000 TKI	10.500 TKI	175,0	Pusat, Aceh Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

104.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
JUMLAH							**365,0**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	87,7
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	846,7
JUMLAH	**934,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							**821,8**			
Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa							33,3			
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Perencanan Pengadaan	Jumlah Pengembangan integrasi, dan Implementasi sistem informasi Perencanaan pengadaan	1	1	1	1	1	17,6	Pusat		07
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan Implementasi Sistem Monev Pengadaan	Jumlah Pengembangan integrasi, dan Implementasi sistem informasi monev pengadaan	1	1	1	1	1	15,7	Pusat		07
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional							465,3			
Pengembangan SPSE Terpusat	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat	10	150	300	450	600	465,3	Pusat dan Daerah		07
Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa							120,0			
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	20	20	25	30	34	120,0	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							33,9			
UKPBJ yang mencapai maturitas (level 3)	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitas (level 3)	100	197	290	382	481	33,9	Pusat dan daerah		07
Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							29,5			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

106.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	169	173	197	221	245	29,5	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah							38,2			
Pelaksanaan Diklat	Jumlah Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	26	28	30	32	34	38,2	Pusat dan Daerah		07
Pengembangan Sistem Katalog							72,8			
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral	Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	20	30	40	50	60	20,2	Pusat dan daerah		01
Pengembangan Produk yang Masuk e-catalogue	Jumlah Produk yang tersedia dalam e-catalogue	125000	150000	175000	200000	225000	12,8	Pusat		01
Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pembelian Langsung Secara Elektronik	2	2	2	2	2	39,8	Pusat		01
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum							28,8			
Rumusan Kebijakan dan Strategi Pengadaan Umum	Jumlah Dokumen Formulasi Permasalahan Penerapan Kebijakan PBJP dan Formulasi Aksi-aksi Kebijakan	2	3	3	4	4	28,8	Pusat		01
JUMLAH							**821,8**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN SAR NASIONAL

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	371,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	801,1
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	13.019,4
JUMLAH	**14.191,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN SAR NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan							**11.685,2**			
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							10.601,2			
Pengadaan Peralatan SAR	Jumlah peralatan SAR yang disediakan (paket)	1	1	1	1	1	60,9	Pusat		05
Pembangunan Prasarana SAR	Jumlah Prasarana SAR yang dibangun (paket)	1	1	1	1	1	60,0	Pusat		05
Penyediaan Pesawat Fixed Wing	Jumlah Pesawat Fixed Wing yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (selesai)	1 (selesai)	1.800,0	Pusat		05
Penyediaan Medium Helicopter	Jumlah Medium Helicopter yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	3 (2 selesai dan 1 berlanjut)	3 (1 selesai dan 2 berlanjut)	2 (2 selesai)	1.880,0	Pusat		05
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.120,0	Pusat		05
Penyediaan Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2	Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 yang disediakan (unit)	-	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	1.960,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1	Jumlah Rescue Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	175,3	Pusat		05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2	Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	6	6	6	6	6	1.752,0	Pusat		05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1 yang disediakan (unit)	12	15	15	15	15	354,0	Pusat		05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2 yang disediakan (unit)	8	15	15	15	15	301,0	Pusat		05
Penyediaan Landing Craft	Jumlah Landing Craft yang disediakan (unit)	100	70	70	80	80	170,0	Pusat		05

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

107.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyediaan Rafting Boat	Jumlah Rafting Boat yang disediakan (unit)	-	30	30	40	40	28,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Car Tipe I	Jumlah Rescue Car Tipe I yang disediakan (unit)	6	20	20	20	20	161,3	Pusat		05
Penyediaan Rescue Car Tipe II	Jumlah Rescue Car Tipe II yang disediakan (unit)	32	34	34	34	34	126,0	Pusat		05
Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Jumlah Rescue Truck Tipe I yang disediakan (unit)	4	15	15	15	15	345,6	Pusat		05
Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Jumlah Rescue Truck Tipe II yang disediakan (unit)	31	33	33	33	33	307,1	Pusat		05
Pengelolaan Operasi SAR							464,8			
Pengelolaan Operasi SAR	Jumlah Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (satker)	44	44	44	44	44	464,8	Pusat		05
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							160,0			
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Jumlah sistem komunikasi SAR yang disediakan (paket)	4	6	6	8	8	160,0	Pusat		05
Pembinaan Potensi SAR							459,2			
Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten	Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)	10000	10000	10000	10000	10000	459,2	Pusat		05
JUMLAH							**11.685,2**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha	115,9
Program Pengawasan Persaingan Usaha	308,3
JUMLAH	**424,2**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Persaingan Usaha							**269,3**			
Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha							15,9			
Pengawasan Persaingan Usaha	Jumlah kajian pengawasan persaingan usaha	7	7	8	8	8	15,9	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Pengawasan Kemitraan							18,6			
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan	18	19	21	23	25	17,4	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	2	3	4	5	6	1,2	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU							45,1			
Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah	Jumlah rekomendasi perkara persaingan usaha di daerah	36	36	40	46	46	17,6	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel		01
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan nilai persaingan usaha sehat	18	20	20	20	26	19,0	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01

108.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah	Jumlah pengawasan pelaku usaha di daerah	18	20	20	20	24	8,5	Sumut, Kepri, Kaltim, Jabar, Jatim, Sulsel		01
Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat							36,5			
Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah investigasi pelanggaran persaingan usaha	100	117	137	157	177	36,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat							42,0			
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Jumlah laporan pemberkasan perkara persaingan usaha	32	25	25	30	30	11,1	Pusat		01
Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	Jumlah penuntutan perkara persaingan usaha		19	21	23	25	23,2	Pusat		01
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	Jumlah laporan litigasi perkara persaingan usaha		12	14	16	18	7,7	Pusat		01
Penilaian Merger dan Akusisi							19,1			
Penilaian Merger dan Akuisisi	Jumlah penilaian merger dan akuisisi	39	38	42	46	50	16,5	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Penanganan Perkara Merger dan Akuisisi	Jumlah dugaan perkara merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti		6	8	9	10	2,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Analisis Kebijakan Pemerintah							16,2			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

108.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyusunan dan Monitoring Surat Saran	Jumlah surat saran pertimbangan KPPU kepada K/L/D	10	10	10	12	12	1,2	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Analisa dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah	Jumlah kajian analisa kebijakan persaingan	7	9	9	11	11	15,0	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan							17,3			
Advokasi Persaingan Usaha	Jumlah advokasi persaingan usaha	15	15	16	17	18	10,9	Pusat		01
Advokasi Kemitraan	Jumlah advokasi kemitraan	12	13	14	15	16	6,5	Pusat	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	01
Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha							58,6			
Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Jumlah persidangan majelis dan penetapan/putusan perkara persaingan usaha	45	47	50	52	55	58,6	Pusat	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	01
JUMLAH							**269,3**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

109.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	29,2
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	975,8
JUMLAH	**1.005,0**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

109.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu							**693,4**			
Pengendalian Pengembangan Wilayah Suramadu							693,4			
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	luas lahan kawasan (ha)	50	50	25	25	25	384,8	Jawa Timur		05
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (km)	22,8	26,3	24,8	31,1	29,4	308,6	Jawa Timur		05
JUMLAH							**693,4**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

110.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	69,6
Program Pengawasan Pelayanan Publik	216,7
JUMLAH	**286,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

110.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Pelayanan Publik							**194,7**			
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat							90,7			
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling)	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	6000	6300	6600	6800	7000	90,7	Pusat/Daerah		07
Pencegahan Maladministrasi							103,9			
Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009	Jumlah instansi Pemerintah yang disurvey terkait kepatuhan terhadap Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	587	587	587	587	587	103,9	Pusat/Daerah		07
JUMLAH							**194,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	280,0
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	342,6
JUMLAH	**622,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan							**10,5**			
Pengelolaan Batas Wilayah Darat							5,5			
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam	Jumlah Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam yang terlatih dalam pengamanan perbatasan	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	5,5	Pusat		07
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara							5,0			
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah PPKT yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	5,0	Pusat		07
JUMLAH							**10,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	667,4
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	6.255,9
JUMLAH	**6.923,3**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam							**5.654,7**			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut							816,6			
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapasitas bongkar muat barang di pelabuhan Kabil (ton/jam)		1000				250,8		Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik (dan internasional)	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)	4000000		8000000			565,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara							909,8			
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)			350000		650000	909,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Penumpang (Orang/Tahun)		6000000	6500000	6700000	7000000	0,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan							284,0			
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah fisik bangunan (unit)			1			84,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah peralatan kesehatan (Lot)		5				200,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana							1.572,1			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	60	50	30	40	4	1.572,1	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah							2.072,2			
Fasilitas air baku	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	600	230			1000	1.644,9	Kota Batam, Barelang	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas air limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)			20			427,3	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
JUMLAH							**5.654,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Penanggulangan Terorisme	2.352,1
JUMLAH	**2.352,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Penanggulangan Terorisme							**652,5**			
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan							521,4			
Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	Jumlah Kegiatan Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme.		187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	187 Kegiatan	196,5	Pusat		07
Kegiatan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)		32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	32 FKPT	132,3	Pusat		07
Kegiatan Kontra Radikalisasi	Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi		48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	48 Operasi	192,6	Pusat		07
Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan							56,1			
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Jumlah Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme		90 Koordinasi	93 Koordinasi	95 Koordinasi	97 Koordinasi	49,6	Pusat		07
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6,5	Pusat		07
Dukungan Administrasi dan SDM							75,0			
Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	Jumlah Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	30,4	Pusat		07
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan Pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi		3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	3 Wilayah	44,7	Pusat		07

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
JUMLAH							**652,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

114.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKRETARIAT KABINET

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	180,2
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	431,5
JUMLAH	**611,6**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

115.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	224,3
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3.106,9
JUMLAH	**3.331,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

115.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu							**234,1**			
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu							234,1			
Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	42,6	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif	Pusat Pengawasan Partisipatif 148 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 248 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 348 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 448 daerah	Pusat Pengawasan Partisipatif 549 daerah	63,8	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota	85,2	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)		07
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	19 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	42,6			07
JUMLAH							**234,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

116.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	393,3
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	983,5
JUMLAH	**1.376,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

116.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik							**253,7**			
Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru							200,0			
Sarana dan prasarana infrastruktur penyiaran Radio publik	Jumlah pengembangan infrastruktur stasiun radio publik (stasiun)	15	15	15	15	15	200,0	Tersebar		05
Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik							45,2			
Pengembangan Program dan Produksi Siaran (Radio Tanggap Bencana)	Jumlah lokasi Radio Early Warning System (EWS)	5	10	15	20	25	28,2	Pusat		06
Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan (Produksi Dokumenter)	Jumlah paket siaran dokumenter	65	65	65	65	65	17,0	Pusat		03
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional							8,5			
Program, Produksi, dan Pengembangan Siaran Internasional	Jumlah siaran dalam bahasa asing	9	9	10	10	10	8,5	Pusat		07
JUMLAH							**253,7**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	309,0
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	2.025,4
JUMLAH	**2.334,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik							**1.472,5**			
Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik							1.080,0			
Sarana dan prasarana infrstruktur penyiaran TV publik	Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV publik	70	80	90	100	100	1.080,0	Tersebar	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	05
Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik							370,0			
Kanal Pendidilkan dan Budaya	Jumlah jam siar konten pendidikan dan budaya	1460	2190	2920	2920	2920	370,0	Pusat		03
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional							22,5			
Siaran TV Publik (Siaran Pendidikan Agama)	Jumlah jam siar konten pendidikan agama	1318	1400	1485	1550	1600	22,5	Pusat		04
JUMLAH							**1.472,5**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

118.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	23,3
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	485,1
JUMLAH	**508,4**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

118.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang							**413,1**			
Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							389,1			
Pelabuhan Nasional Balohan	Pembangunan pelabuhan	1					89,1	Kota Sabang		02
Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang	Realisasi fisik pembangunan jembatan				1		300,0	Kota Sabang		02
Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International							24,0			
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor kepelabuhanan	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Jasa Kepelabuhanan (%)			60	80	80	24,0	Kota Sabang		02
JUMLAH							**413,1**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	2.466,4
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	512,6
JUMLAH	**2.979,1**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN KEAMANAN LAUT

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla							**2.136,1**			
Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla							2.136,1			
Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut	Jumlah senjata yang Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut	332	51	51	51	51	568,4	Pusat		07
Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut	Jumlah kapal Patroli Keamanan Laut	-	2 (Tahap 1)	2 (Tahap 2)	2 (tahap 3)	-	500,0			07
Pengadaan Amunisi	Jumlah Amunisi yang diadakan	1		1			70,0	Pusat		07
Pengadaan Boat Stopper	Jumlah Boat Stopper yang diadakan	-	3	3	3	3	27,5	Pusat		07
Pengadaan sarana prasarana operasi	Jumlah sarana prasarana operasi yang diadakan	-	77	-	-	-	15,2	Pusat		07
Pembelian Data AIS Satelit	Jumlah Data AIS satelit yang dibeli	1	1	1	1	1	20,0	Pusat		07
Sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna	Jumlah sistem peringatan dini	1	1	1	1	1	460,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna	Jumlah Kapal	-	-	1 unit (20%)	1 unit (60%)	1 unit (100%)	450,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna	Jumlah UAV	-	4 unit (tahap 1)	4 unit (tahap 2)	4 unit (tahap 3)	4 unit (tahap 4)	25,0	Pusat	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	07
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut							**465,5**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut							330,8			
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut	Jumlah hari operasi keamanan dan keselamatan laut	16	90	90	90	90	330,8	Pusat		07
Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut							134,7			
Operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	jumlah kegiatan operasi laut bersama terkoordinasi bilateral	5	6	6	6	6	76,0	Pusat		07
Operasi Udara bersama terkoordinasi bilateral	Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinasi bilateral	4	4	4	4	4	58,7	Pusat		07
JUMLAH							**2.601,6**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

120.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	441,0
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	545,8
JUMLAH	**986,8**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

120.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman							**90,3**			
Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim							21,9			
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim yang dikoordinasikan	9	10	10	10	10	21,9	Pusat		07
Koordinasi Jasa Kemaritiman							22,0			
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman	Jumlah Bahan Rumusan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa Kemaritiman yang dikoordinasikan	9	10	10	10	10	22,0			01
Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari							24,4			
Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Bahari yang Dihasilkan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Bidang Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari yang Dikoordinasikan	6	7	7	7	7	24,4	Pusat		04
Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim							22,0			
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang Dihasilkan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang dikoordinasikan	6	7	7	7	7	22,0			01
JUMLAH							**90,3**			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.A.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	123,7
Program Pembinaan Ideologi Pancasila	598,0
JUMLAH	**721,7**

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.1

MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Program Pembinaan Ideologi Pancasila							**420,9**			
Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila							122,3			
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara,kementerian/lembaga, pemerintahan daerah ,organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainya yang diselesaikan	1	1	1	1	1	91,7	Pusat dan daerah		04
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1	1	1	1	1	30,6	Pusat dan daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.2

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Dukungan Pelaksanaan Internalisasi dan Institusional Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi							64,2			
Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	27,5	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan	3	3	3	3	3	36,7	Pusat dan daerah		04
Dukungan Penyelenggaraan Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila							33,4			
Perumusan dan Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3	33,4	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.3

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
	Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila							115,8			
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	30,7	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	27,6	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.4

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	1	1	1	1	1	57,5	Pusat dan daerah		04
	Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	0,0			04
	Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan	100	100	100	100	100	0,0			04
Dukungan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila							85,2			
Evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang ideologi negara	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122.B.5

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS *(MAJOR PROJECT)*	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan penyelenggara negara dan ASN yang menentang ideologi negara	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04
Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	Jumlah evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	1	1	1	1	1	28,4	Pusat dan daerah		04
JUMLAH							**420,9**			

Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Satya Bhakti Parkesit

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

1. PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

1.1. Target Pembangunan Wilayah Papua

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Target Pembangunan Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Papua Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,24	2,00	5,70	6,50	7,10	7,60	8,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	23,01	22,17	20,03	19,01	17,00	16,05	14,67
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30	6,24	6,00	5,80	5,60	5,20	4,90
Papua	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,33	2,10	4,70	5,80	6,80	7,50	7,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	27,74	27,53	24,59	23,55	21,88	19,95	19,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20	3,65	2,90	2,90	2,90	2,50	2,30

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan Wilayah Papua, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Papua Barat	Rp triliun	17,72	11,59	21,64	23,78	26,69	30,09	33,85
Papua	Rp triliun	78,80	47,72	76,54	92,69	104,03	117,47	132,84

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen

1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis dan tujuah wilayah adat: Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay sejalan dengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang

mengamanatkan tentang: (1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara, telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Selain berbasiskan wilayah adat, pembangunan Wilayah Papua akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Papua	1	Kabupaten Nabire	Papua Barat	1	Kota Sorong*
	2	Kabupaten Dogiyai		2	Kabupaten Sorong
	3	Kabupaten Mimika		3	Kabupaten Tambraw
	4	Kabupaten Paniai		4	Kabupaten Manokwari
	5	Kabupaten Deiyai		5	Kabupaten Manokwari Selatan
	6	Kabupaten Intan Jaya		6	Kabupaten Teluk Wondama
	7	Kabupaten Puncak			
	8	Kabupaten Puncak Jaya			
	9	Kabupaten Tolikara			
	10	Kabupaten Jayawijaya			
	11	Kabupaten Yalimo			
	12	Kabupaten Jayapura			
	13	Kota Jayapura*			
	14	Kabupaten Keerom			
	15	Kabupaten Pegunungan Bintang			
	16	Kabupaten Boven Digoel			
	17	Kabupaten Merauke			
Koridor Pemerataan					
Papua	1	Kabupaten Biak Numfor	Papua Barat	1	Kabupaten Sorong Selatan
	2	Kabupaten Supiori		2	Kabupaten Maybrat
	3	Kabupaten Mamberamo Raya		3	Kabupaten Pegunungan Arfak
	4	Kabupaten Mamberamo Tengah		4	Kabupaten Raja Ampat
	5	Kabupaten Nduga		5	Kabupaten Teluk Bintuni
	6	Kabupaten Lanny Jaya		6	Kabupaten Fakfak
	7	Kabupaten Yahukimo			
	8	Kabupaten Sarmi			
	9	Kabupaten Mappi			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

1.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
   a. Provinsi Papua: sagu, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; dan
   b. Provinsi Papua Barat: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Biak, SKPT Timika, dan SKPT Merauke, WPP 717 (Perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik), dan WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur).

Gambar 1.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Papua

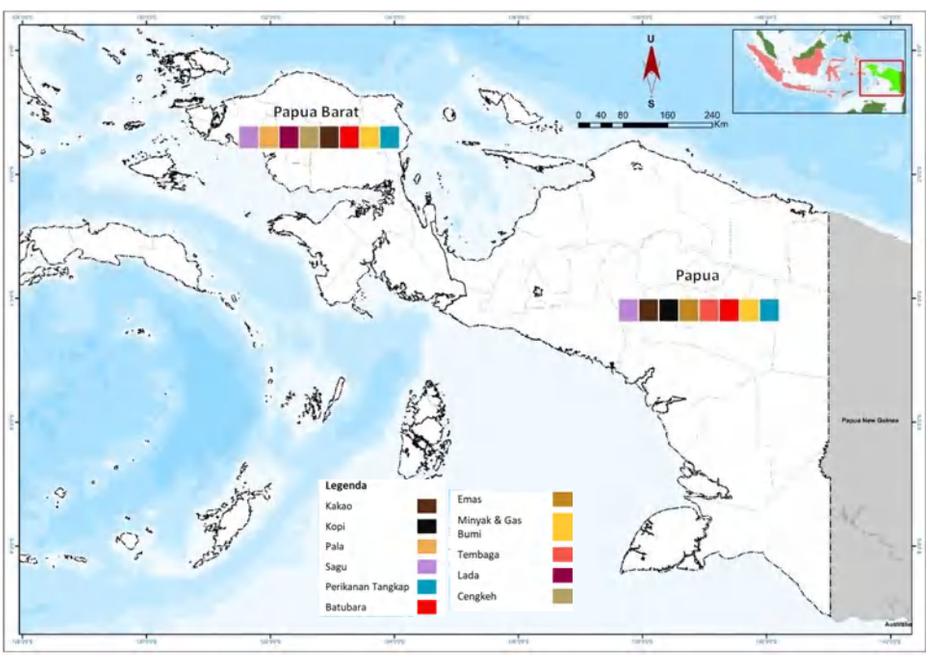

1.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan industri pengolahan yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat dskt dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
3) Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor (Mappi), Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani/Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil;
4) Pengembangan *outlet* pelabuhan *hub* Pelabuhan Sorong serta Bandara Biak yang berpotensi sebagai *hub* penerbangan internasional;
5) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi terutama Pelabuhan Sorong sebagai hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan;
6) Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya sekolah berpola asrama, pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, pemerataan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, Balai Latihan Kerja, asrama mahasiswa nusantara, dan afirmasi ASN; dan
8) Pengembangan 34 SMK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Gambar 1.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Papua

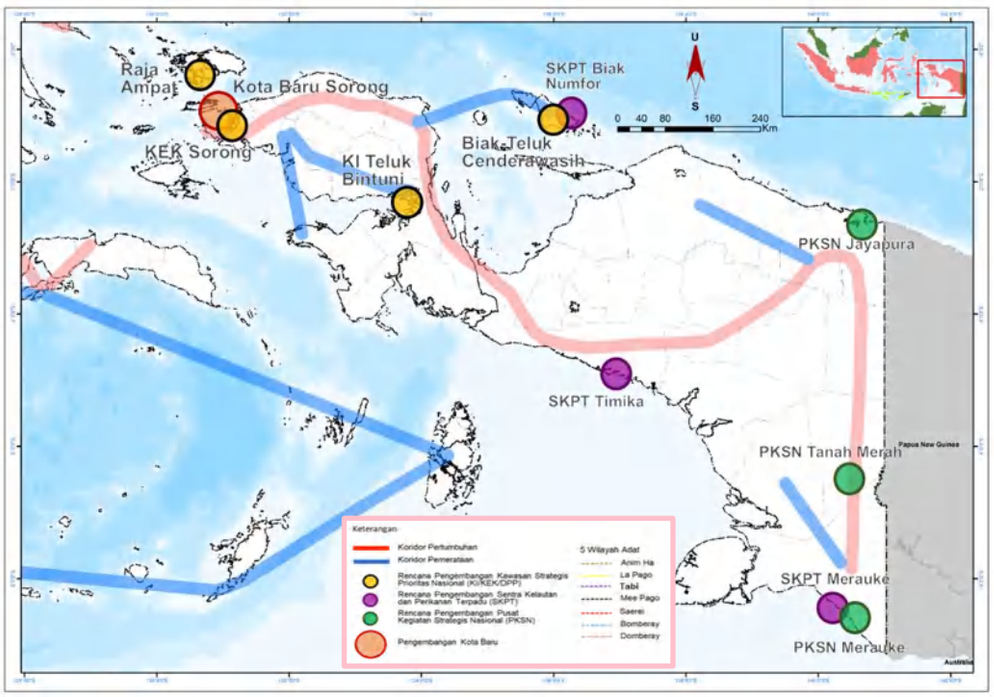

Gambar 1.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Papua 2024

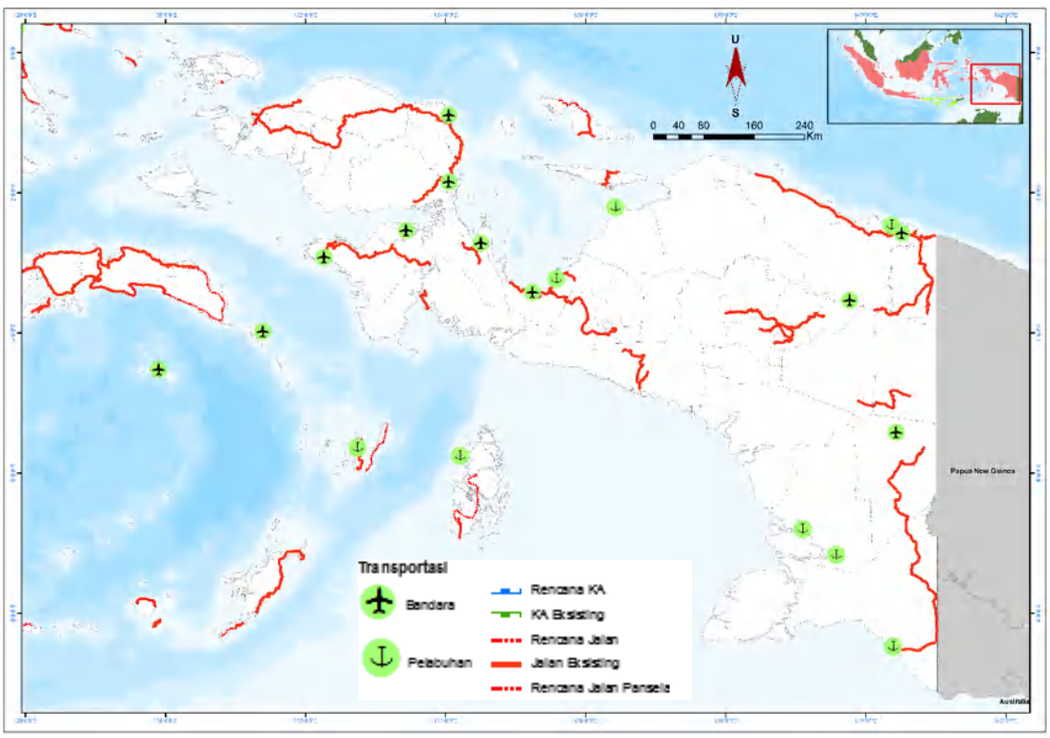

Gambar 1.4.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Papua 2024

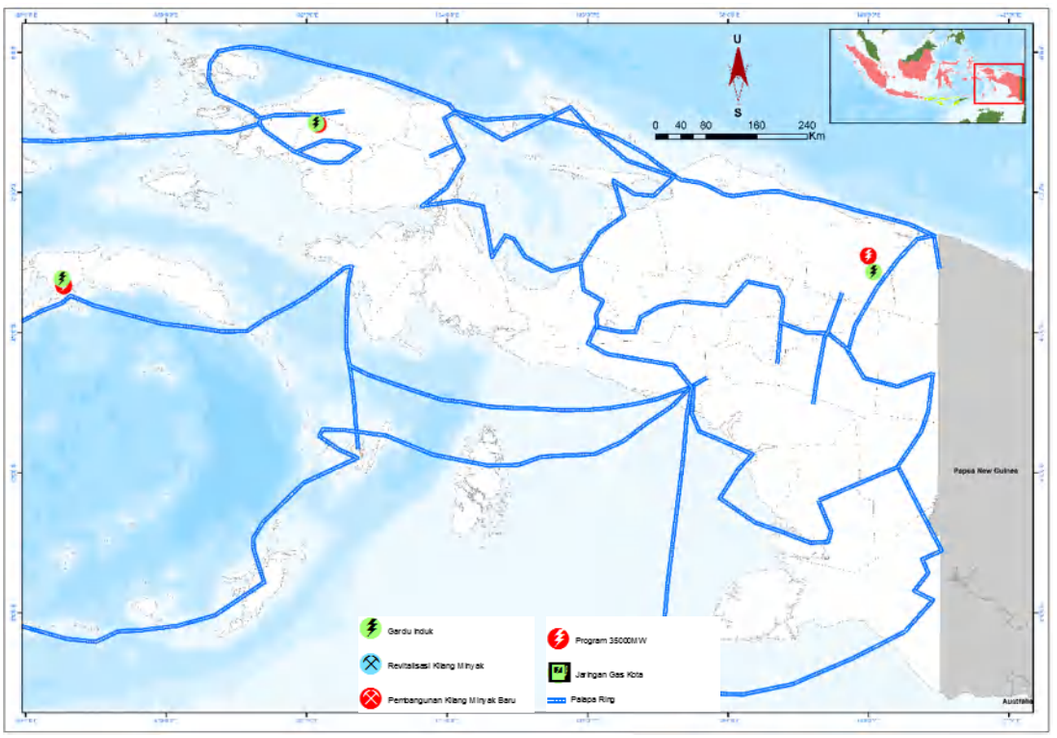

1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan pembangunan Kota Baru Sorong (Tabel 1.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.

1.2.4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet di 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua dan 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat. Dari 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua, terdapat 20 kabupaten yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: koridor pertumbuhan meliputi Keerom, Nabire, Boven Digoel, Deiyai, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai,

Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara; sementara itu koridor pemerataan meliputi Supiori, Mappi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Adapun delapan (8) kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor kewilayahan, yaitu koridor pertumbuhan: Teluk Wondama, Sorong, Tambrauw, Manokwari Selatan; dan koridor pemerataan: Teluk Bintuni, Maybrat, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak;

2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya juga dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Papua berlokasi di 5 kabupaten berikut, antara lain: Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Sarmi di Provinsi Papua; serta Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 36 kecamatan lokpri di Provinsi Papua dan 3 kecamatan lokpri di Provinsi Papua Barat;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
5) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak, Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9) Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua sejumlah 178.500 orang;
10) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 19,98 persen di Provinsi Papua, dan 16,05 persen di Provinsi Papua Barat;

11) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
    a. Peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah utara Pulau Papua;
    b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
    c. Peningkatan konservasi hutan.

1.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung;
2) Optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan kementerian/lembaga;
3) Penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat;
4) Pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga perempuan dan anak, percepatan pembangunan kawasan kampung,
5) Pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub)*;
6) Pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal;
7) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran distrik/kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan fokus Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaimana dan kabupaten lain yang siap;
9) Pengembangan wilayah adat (7 wilayah adat);
10) Revisi UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
11) Penguatan kerjasama antarkabupaten di masing-masing wilayah adat (7 wilayah adat);
12) Pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura;
13) Penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Tanah Papua;
14) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Papua (Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni);

15) Penataan ruang dan lahan yang dilakukan melalui antara lain:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
    d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    i. Pembentukan bank tanah;
    j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
16) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
    a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
    b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
    c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
17) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
    a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
    b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
    c. Pengembangan energi baru terbarukan;
    d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
    e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata;
    g. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan

h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 1.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Papua Tahun 2025

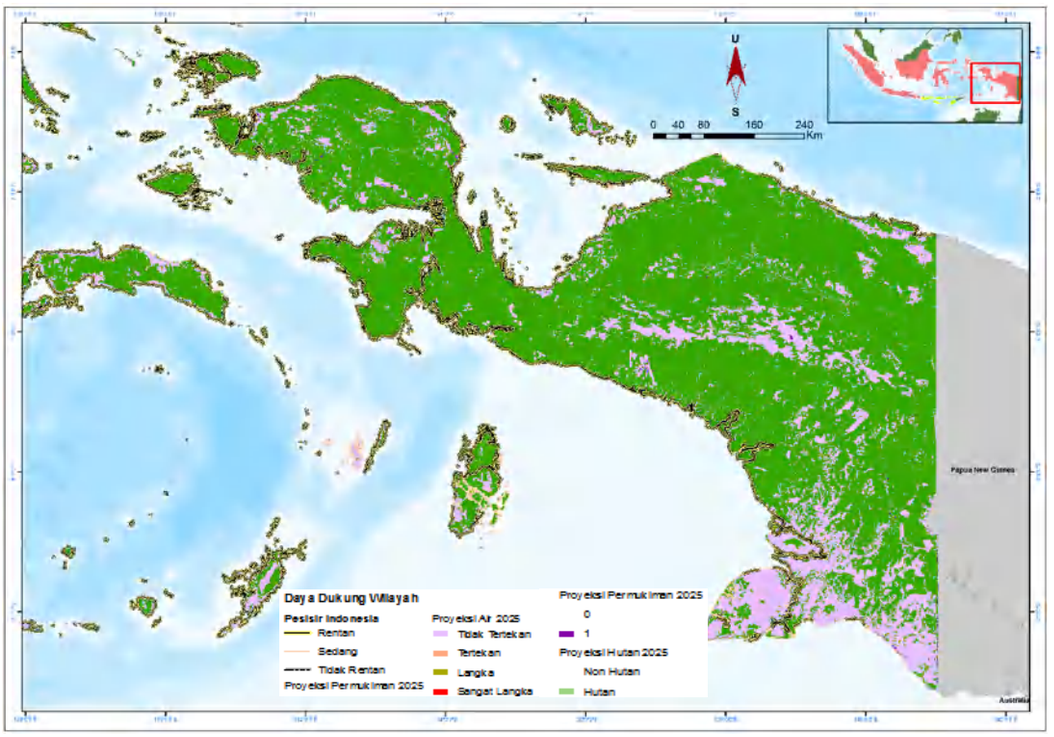

1.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Papua

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project)* adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Kota Baru Sorong;
2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke;
3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) Domberay dan (b) Laa Pago;
4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong;
5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P. Biak;
6) Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-Sorong; dan
7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.

Gambar 1.6.
Peta Sebaran Rencana Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)
RPJMN 2020-2024 di Wilayah Papua

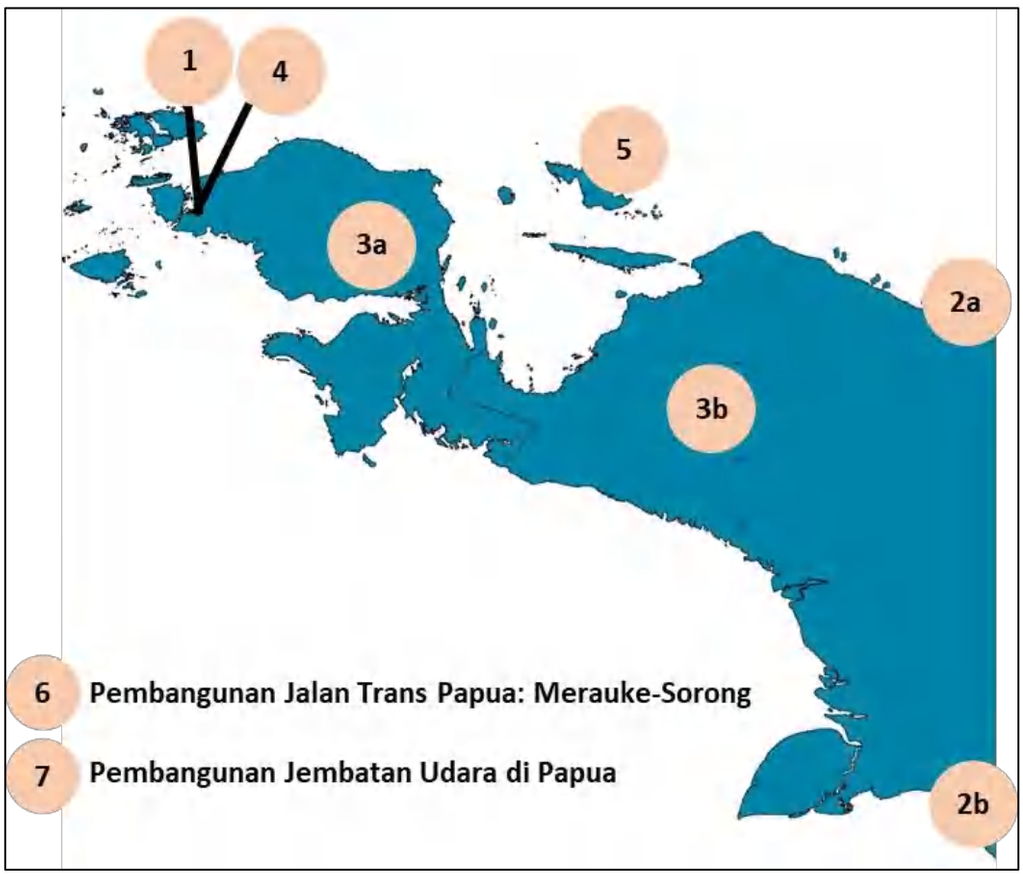

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU PAPUA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	**Laju Pertumbuhan PDRB Papua**	**6,04**	**96.607,45**			
	Share PDRB Wilayah Papua	**1,96**				
	IPM Wilayah Papua	**63,94-67,24**				
	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	**19,02**				
Provinsi Papua						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Pembangunan DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Jalan Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	16,61	1.054,36	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Biak	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	210,46	16,48	Provinsi Papua, Kab. Kepulauan Yapen	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	514,35	32,36	Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Papua, a.l: Kab. Merauke, Kab. Biak Numfor	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kemen KP
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan Tembaga	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi Tembaga	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Papua**		**8.040,12**			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil				**Kota Jayapura**		
Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		400	Kota Jayapura (lingkup pelayanan), Provinsi Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	423,50	748,75	Provinsi Papua	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		8,60	Kota Jayapura, Provinsi Papua	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		120,54	Kota Jayapura, Provinsi Papua	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**2449 desa berkembang; 30 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**19 (terentaskan 3 kabupaten)**		**Prov. Papua: Kab. Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Paniai, Puncak, Supiori, Yalimo, Nabire, Boven Digoel, Waropen, Mappi, Mamberamo Raya, Intan Jaya, Asmat, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara, Keerom**		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,57**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**28,85**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**42,39**	**90,87**	**Kab. Keerom dan Kab. Merauke**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kemen Desa PDTT 2. Kemen ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua: Laa Pago	Peningkatan IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	51,40	17629,71	Wilayah adat La Pago (Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak)	1. Program Penyelenggaraan Jalan; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; 4. Program Guru dan Tenaga Kependidikan; 5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 7. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 8. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Program Penelitian dan Pengembangan; 10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 13. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 14. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 15. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri; 16. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 17. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 18. Program Pengembangan Kepariwisataan; 19. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 20. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1. Pemda Provinsi Papua; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian Perhubungan; 4. Kemenkominfo; 5. Kemendikbud; 6. Kemristek Dikti; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian KUKM; 10. Kementerian Perindustrian; 11. Kementerian Perdagangan; 12. Kementerian Desa PDTT; 13. Kementerian Pertanian; 14. Pemda Provinsi Papua

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,64	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,07	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,72	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Guru SMK	Jumlah guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi (orang)	100		Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi satu atap berpola asrama	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun dan beroperasi (unit)	1	15,40	Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama SMA	Jumlah unit sekolah baru SMA yang dibangun dan beroperasi		16,50	Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Puncak	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun/direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian, pariwisata, dan kesehatan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	40,90	Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Nduga	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	35.700	149,80	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Siswa mendapatkan pendidikan layanan khusus (Beasiswa Adem) (siswa)	520	70	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	16	24	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	1.290	107,50	Tersebar	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan tanaman tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas perkebunan kopi dan kakao yang difasilitasi (Ha)	133	2,15	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;	Kementerian Pertanian
Jumlah kawasan ubi jalar	Luas lahan ubi jalar yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	2.869	13,77	Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (*start up capital*)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (*start up capital*) (orang)	24	1,84	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih (orang)	100	1,75	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan *start up capital*	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	5	0,74	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran (PMKM)	195	10,04	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Lembah Baliem	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Jayawijaya		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	300.000	2.381,63	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	14	42,14	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	47	209,93	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	10	10,60	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun (unit)	50	92,30	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun (unit)	14	392	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736	Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		282,36	Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	39	3.155	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	2.389	7.245,60	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Wamena	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	397,51	Kab. Jayawijaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Nop Goliath	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	525,84	Kab. Yahukimo	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Oksibil	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	290,25	Kab. Pegunungan Bintang,	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Elelim	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	397,51	Kab. Yalimo	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Ilaga	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	470,52	Kab. Puncak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Tiom	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	1 (selesai)	80	Kab. Lanny Jaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mulia	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	120,54	Kab. Puncak Jaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Tolikara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	3	26,40	Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal	8	42,10	Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan pasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal (unit)	3	21,10	Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintan, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	148	5,90	Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	60	15	Kab. Pegunungan Bintang,	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Mee Pago	Peningkatan IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	60,90	4146,28	Wilayah Adat Mee Pago (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya)	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika 3. Program Pengembangan Daerah Tertinggal 4. Program Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 6. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 7. Program Peningkatan produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 8. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 9. Program Pengembangan Kepariwisataan 10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 17. Program Pengembangan Perumahan 18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 19. Program pendidikan dasar dan menengah 20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 22. Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian KP Kementerian Kominfo Kementerian Desa PDTT Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Kementerian Pertanian Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kemen ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah satu atap terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMP yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan sekolah menengah kejuruan mendukung sektor energi, transportasi, dan pariwisata	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	16,36	Tersebar		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	4.000	33,55	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	300	40,50	Tersebar	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	648	54,01	Tersebar	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan kopi	Luas lahan kopi yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	11.750	32,36	Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengeolahan Sagu Papua dan papua Barat	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi (unit)	1	1,92	Kab. Mimika, Kab. Nabire	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika (tingkat kemandirian (skala 1-5))	5	29,57	Kab. Mimika	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	10	0,60	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	9	1,32	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Paniai	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Paniai		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	100.000	952,65	Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	2	7,67	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Mimika	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	7	36,64	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	6	8,80	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus		10,26	Kab. Dogiyai	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	2	56	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		106	Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736	Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Nabire Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun		941,19	Kab. Nabire	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mozes Kilangin	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	748,54	Kab. Mimika	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		39	Kab. Nabire	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kab. Mimika	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Nabire	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	3	4,80	Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal (km)		10,15	Nabire, Intan Jaya,Dogiyai, Paniai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	59	2,36	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Saireri	**Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori**	**69,70**	**2010,63**	**Wilayah Adat Saireri Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori**	**1. Program Pengembangan Kepariwisataan 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal 3. Program Pengembangan Daerah Tertentu 4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 7. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 11. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 14. Program pendidikan dasar dan menengah 15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Desa PDTT 3. Kementerian KP 4. Kementerian KUKM 5. Kementerian Perindustrian 6. Kementerian ESDM; 7. Kemenkominfo; 8. Kemen PUPR 9. Kementerian Pendidikand an Kebudayaan 10. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar	Jumlah orang Yang Memanfaatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar			Tersebar	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan mendukung kemaritiman	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi		8,18	Kab. Biak Numfor	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	5.000	20,98	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	168	22,68	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	648	54,01	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Politeknik Perikanan	Jumlah Politeknik Yang Dibangun			Kab. Biak Numfor		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sentara Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat kemandirian (skala 1-5))	5	25	Kab. Biak Numfor	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Bibit rumput laut yang didistribusikan			Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	6	0,88	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	4.926	238,16	Kab. Supiori	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	1	6,08	Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun (unit)	5	30,64	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	6,46	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus		10,26	Kab. Biak Numfor	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	1	28	Kab. Kepulauan Yapen	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani		177,48	Kab. Biak Numfor	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		8,30	Kab. Supiori	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Supiori	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)	1	7,47	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar		6,60	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal (km)	2	12,00	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan		3,33	Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	23	5,67	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Jalan Trans Yapen	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		75	Kab. Kepulauan Yapen	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak	Panjang Jalan yang dibangun (km)	16,6	1.054,36	Kab. Biak Numfor	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Tabi	**Peningkatan IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura**	**69,6**	**1260,36**	**Wilayah Adat Tabi Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kota Jayapura**	**1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal 2. Program Pengembangan Daerah Tertentu 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 4. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 6. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 7. Program Pengembangan Kepariwisataan 8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 9. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 10. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 12. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 14. Program pendidikan dasar dan menengah 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan 19. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan**	**Kementerian Desa PDTT Kemenhub Kementerian Pertanian Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian ESDM; Kemenkominfo; Kemen PUPR**
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,07	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan Sekolah Satu Atap terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program pendidikan dasar dan menengah	Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian dan kemaritiman	Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan industri dan pendidikan dual sistem (unit)	1	0,18	Tersebar	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah paket bantuan peralatan pendidikan	DAK	DAK	Kab. Jayapura	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi (unit)	50	0,10	Kab. Jayapura	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	40,90	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	5.000	20,98	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	132	17,82	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	300	24,8	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Cenderawasih (prodi)	5	1,00	Kota Jayapura	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas lahan kakao dan kelapa yang difasilitasi (Ha)	200	8,88	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Area Tanaman Sagu	Luas area tanaman sagu (Ha*) *) target nasional	404	5,43	Kab. Jayapura	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	15	0,90	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	8	1,20	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Sentani	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Jayapura		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik		476,33	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titikk sumur bor (unit)	1	5,31	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	3	21,64	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	6,46	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	3	84,00	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		7,06	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	6.881	263,77	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	50,00	Kab. Jayapura	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengadaan moda transportasi darat	Jumlah moda darat (unit)	10		Kab. Keerom		Pemda Provinsi Papua
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	2,00	Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	3,60	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal		2,30	Kab. Mamberamo Raya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	30	1,18	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan	1	4,80	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		12,00	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan		5,01	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	23	5,67	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Anim Ha	**Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat**	**62,9**	**1887,20**	**Wilayah adat Anim Ha (Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat)**	**1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 3. Program Pembangunan Daerah Tertentu; 4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 5. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 8. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi**	**1. Pemda Provinsi Papua; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kemenhub 5. Kementerian PUPR 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian KP 8. Kementerian KUKM 9. Kementerian Perindustrian 10. Kemenkominfo**
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Kesehatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua	17. Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	19. Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	22. Program Penelitian dan Pengembangan 23. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	4	9,60	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16,00	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	16,36	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	9.400	39,43	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	208	28,00	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK			Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Musamus (prodi)	4	1,00	Kab. Merauke	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Padi	Luas kawasan padi (Ha*) *) target nasional	791.000	131,26	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen (unit)	67	8,38	Kab. Merauke	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi (unit)	1	1,92	Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	6	0,88	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	69.242	238,16	Kab. Mappi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun (unit)	10	47,64	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	9,70	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan sumur bor *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah titik sumur bor (unit)	1	6,08	Kab. Asmat, Kab. Merauke	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		82,99	Kab. Asmat*, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736,00	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	12	164,50	Kab. Asmat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85,00	Kab. Mappi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		22,50	Kab. Mappi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	500	2,00	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		2,40	Kab. Boven Digoel, Mappi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal		5,59	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	30	1,18	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		2,60	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal (km)	2	12,00	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)	50	3,35	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	22	5,44	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua (kecamatan)**	**36**	**60,11**	**Kec. Merauke, Kec. Kimaam, Kec. Semangga, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair**		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	18	2,592	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Papua (Kab. Supiori, Kab. Merauke)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		4,22	Kab. Supiori dan Kab. Merauke	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	5	0,5	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		52,8	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	4	7,5	Pulau Bepondi	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura**	**0,45**	**831,00**	**Kota Jayapura**		
Pengembangana terminal Skouw	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		23,75	Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		400	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan, BUMN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan Perbatasan Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	200	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Anjungan Cerdas Perbatasan Skouw	Jumlah anjungan cerdas Skouw yang dibangun	1	135	Kota Jayapura	KPBU	KPBU
Sistem Pengelolaan Drainase	Luas (hektar) yang difasilitasi sistem pengelolaan drainase		5,8	Kota Jayapura	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang difasilitasi (unit)	10	1	Kota Jayapura	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung “Wisata Perbatasan”	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III		3	Kota Jayapura	Program Pengembangan Kepariwisataan	Kementerian Pariwisata
Pembangunan Home Stay kampung Terapung Perbatasan	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	1	4	Kota Jayapura	Program Pengembangan Kepariwisataan	Kementerian Pariwisata
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kota Jayapura	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya		1	Kota Jayapura	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	1	7	Kota Jayapura	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke**	**0,59**	**637,44**	**Kab. Merauke**		
Pembangunan Jembatan Kali Bian	Jembatan yang dibangun (lokasi)		180	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		45	Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		48,1	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Merauke	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	4,8	Kab. Merauke	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	500	0,16	Kab. Merauke	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,2	Kab. Merauke	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Merauke	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke	5	11,03	Kab. Merauke	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,8	Kab. Merauke	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,35	Kab. Merauke	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah**	**0,67**	**2964,03**	**Kab. Boven Digoel**		
'Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Magellum	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	31,07	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
'Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Tanah Merah	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	1179,60	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Penyusunan Materi Teknis RDTR PLBN Yeyetkeun Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Materi Teknis dan Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara		2,10	Kab. Boven Digoel	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,1	Kab. Boven Digoel	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	1	0,34	Kab. Boven Digoel	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**39,30**	**1.160,03**	**Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kemendesa PDTT 2. Kemendagri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		15,45	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,27	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		38,55	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.790	499,87	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4 k	0,62	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	226	593,76	Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	22	3,33	Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kota Jayapura dan Merauke**	**55.00; 40.00**	**88,44**	**Kota Jayapura dan Kab. Merauke**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan *Sustainable Tourism Practices* (destinasi)	1	3,00	Kota Jayapura	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,00	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80,00	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1.211.375	1.577,2	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua**	**42,39**	**90,87**	**Kab. Keerom dan Kab. Merauke**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1 SP	53,40	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	33,38	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	3,97	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,12	Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)		0,00	Kab. Merauke	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**2,66**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**44**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**44**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	**1.370**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**44**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**562**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	30	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**1**	**9,47**			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	7,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (100%	**100**	**3,15**			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	30	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	30	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	**2,27**			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**30**	**0,75**			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	29	0,46	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	30	1,75	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	30	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**30**	**0,34**			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	30	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	30	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**30**	**0,34**			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	30	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,32	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,167	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara (Perdasi)	**2**	**1.300**			
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	1	7,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa		2,10	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Regulasi daerah otonom khusus/ istimewa	Jumlah regulasi pelaksanaan kekhususan/keistimewaan daerah					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1.211.375	1.577,24	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	1.369.100	115,64	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Papua	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	14	Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mappi, Nduga, Asmat)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,93	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	1,96	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan		6,73	Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Papua Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Jalan Akses KEK Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,8	444,11	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)	1 (selesai)	30.000	Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Papua Barat	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Sorong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Sorong	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5,5	250	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		45	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		38,12	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk Bintuni	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Teluk Bintuni	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Raja Ampat dan Sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)		30	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Raja Ampat dan Sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Raja Ampat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	2.822,01	61,05	Provinsi Papua Barat, Kab. Fakfak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	248,33	5,23	Provinsi Papua Barat, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Papua Barat, a.l: Kab. Sorong, Kab. Fakfak	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Papua**		**8.040,12**			
ProP : Pembangunan Kota Baru Sorong				**Kota Baru Sorong/Kota Sorong**		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)	1 (selesai)	30.000	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		180	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara	Kementerian Perhubungan
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Provinsi Papua Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	109	70,30	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		5,60	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**2449 desa berkembang; 30 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**7 (terentaskan 1 kabupaten)**		**Prov. Papua Barat: Kab. Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**32,38**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**35,61**	**59,52**	**Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Domberay	Peningkatan IPM di 11 Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	65,20	9.716,86	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	1. Program Penyelenggaraan Jalan; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; 4. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Program Guru dan Tenaga Kependidikan; 6. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Program Pembelajaran Kemahasiswaan; 8. Program penelitian dan Pengembangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 9. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 10. Program Pengembangan Kepariwisataan; 11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 12. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura; 13. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 14. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 15. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 16. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri; 17. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 18. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 19. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi; 20. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 21. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	1. Kementerian PUPR; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Kemenkominfo; 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Perdagangan; 8. Kementerian Pariwisata; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian KUKM; 9. Kementerian Perindustrian; 10. Kementerian Perdagangan; 11. Kementerian Desa PDTT; 12. Kementerian ESDM; 12. Pemda Provinsi Papua Barat

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	104	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	10	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,64	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,72	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785	0,0	11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun dan beroperasi		3,70	Kab. Tambrauw	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMP dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMA dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penyediaan Guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Mendukung industri kreatif, pariwisata, energi, dan pertanian (sagu, kakao)	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (sekolah)	1	40,90	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	Jumlah ruang praktik siswa/keterampilan yang dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemerintah Daerah
Pembangunan unit Sekolah Baru SMK Pariwisata	Jumlah unit sekolah baru SMK dibangun		8,90	Kab. Teluk Wondama	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Siswa penerima program pendidikan layanan khusus (Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM))	Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang)	504	68	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Pendidkan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	16	24	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	300	24,82	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Papua (prodi)	4	1	Kab. Manokwari, Kota Sorong	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (unit)	1	9,50	Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Kakao	Luas lahan perkebunan kakao yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	11.750	19,54	Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah	Luas lahan kacang tanah yang difasilitasi (Ha)	300	4,02	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan sayuran lainnya	Luas lahan perkebunan sayur yang difasilitasi (Ha)	350	30,95	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Kawasan Tanaman Obat di Papua dan Papua Barat	Luas kawasan tanaman obat yang difasilitasi (Ha)	310	3	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Hijauan pakan ternak	Luas lahan hijauan pakan ternak yang difasilitasi (Ha)	100	8,72	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Jumlah unit pengolahan sagu (unit)	1	1,92	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	26	2,00	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih (orang)	100	1,75	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	2	0,30	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi DPP Baru Raja Ampat	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Raja Ampat		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Anggi	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Pegunungan Arfak		Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat		50,40	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran (PMKM)	214	13,80	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	21.641	952,65	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	10	33,93	Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	20	112	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	20	20,76	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun		41,02	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Pegunungan Arfak	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun (unit)	10	288,50	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani		203,17	Kab. Tambrauw, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir terbangun (unit)	5	140,63	Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Sorong, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		53,93	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara Rendani	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	250	Kab. Manokwari	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan		38,12	Kab. Teluk Bintuni	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan		180	Kab.Sorong	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan		0,77	Kab. Raja Ampat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara Wasior Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	600	Kab. Teluk Wondama	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara Manokwari Selatan	Jumlah bandara baru yang dibangun		600	Kab. Manokwari Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Anggi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	250	Kab. Pegunungan Arfak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun (km)	50,54	2.768,61	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang Jembatan yang dibangun (m)	887,40	2.206,50	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan jalan lingkar Danau Anggi Giji dan Anggi Gida	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		60	Kab. Pegunungan Arfak	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Bintuni - Susumuk	Panjang Jalan yang dibangun (km)	5,50	250	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	7	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal (km)	1,73	5,76	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	9,60	Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal (unit)	1	6,40	Kab. Teluk Wondama, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	118	4,72	Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)	4	48	Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	392	9,88	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)	1	6,60	Kab. Teluk Wondama	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik (orang)	78	2,08	Kab. Sorong	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Wilayah Adat Papua : Bomberay	**Peningkatan IPM di 2 Kabupaten: Kab. Fakfak, Kab. Kaimana**	**68,90**	**3.195,48**	**Wilayah Adat Bomberay: Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana**	**1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengembangan Kepariwisataan 7. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 8. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 9. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 10. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 13. Program Aksesibilitas 14. Telekomunikasi dan Informasi 15. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 16. Program pendidikan dasar dan menengah 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan**	**Kementerian PUPR Kemenhub Kementerian Pertanian Kementerian KP Kementerian Pariwisata Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM; Kemenkominfo;**
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	104	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	10	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,60	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah unit sekolah baru SMA yang dibangun dan beroperasi		6,30	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pariwisata	Jumlah unit sekolah SMK yang direvitalisasi (sekolah)	1	8,18	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang)	96	15	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	260	21,67	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Luas lahan lada, pala, dan cengkeh yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	32.030	61,05	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Jumlah bibit rumput laut yang didistribusikan (kg)	800	0,12	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	10	0,60	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	3	0,44	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi Teluk Triton	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Kaimana		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	14.487	238,16	Kab. Kaimana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	2	6,02	Kab. Kaimana	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	2	26,50	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	2	5,44	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	1	28	Kab. Kaimana	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit SPAL Domestik (unit)	6.854	131	Kab. Fak-Fak	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Fakfak (SP. Moyana - Windesi)	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		120	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		135	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		120	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Inari	Panjang Jembatan yang dibangun		900	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandar Udara Siboru	Jumlah bandara baru yang dibangun		1.138,53	Kab. Fak-Fak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua Barat (kecamatan)**	**3**		**Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,29	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**44,14**	**588,79**	**Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, DPP Baru Raja Ampat**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kemendesa PDTT 2. Kemendagri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	9,80	DPP Baru Raja Ampat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	0	9,99	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	11	4,28	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,27	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	0	24,02	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	621	173,34	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	168	361,75	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	5	0,76	Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Raja Ampat dan Manokwari**	**NA; 26.00**	**87,79**	**Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan *Sustainable Tourism Practices* (destinasi)	1	3	Kab. Raja Ampat	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	4	1	Kab. Manokwari	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Manokwari	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)	0	0,36	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	92.685	1.099,15	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat**	**35,6**	**59,52**	**Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas		29,30	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.373	0,81	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	24,66	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,09	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,63	Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.373	1,04	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Fak-Fak	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**2,66**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**44**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**44**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	**1.369,74**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**44**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**808**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	24	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**1**	**9,47**			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	7,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	**3,15**			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	**1,73**			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**14**	**0,53**			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,79	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**14**	**0,16**			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**14**	**0,16**			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	12,87	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara (Perdasi)	**2**	**10.036**			
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	7,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus		2,1	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Revisi UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua	Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.		1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	92.685	1.099,15	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	77.198	8,43	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	Papua Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		6,00	Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,93	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	1,96	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

2. PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

2.1. Target Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Target Pembangunan Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,95	5,70	6,00	7,00	7,20	7,90	8,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	18,12	17,69	17,02	16,24	15,85	14,95	12,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,27	7,08	6,90	6,70	6,50	6,10	5,80
Maluku Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,92	5,80	6,10	6,80	6,90	7,80	8,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,64	6,77	6,00	5,40	4,89	4,04	3,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,77	4,97	4,20	4,00	3,90	3,40	3,10

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Maluku, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	Rp triliun	12,44	13,14	14,37	16,32	17,80	19,54	22,20
Maluku Utara	Rp triliun	11,21	10,60	13,32	14,72	16,44	18,51	21,53

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

2.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

Pembangunan wilayah Maluku akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Maluku	1	Kota Ambon*	Maluku Utara	1	Kota Ternate*
				2	Kota Tidore Kepulauan
				3	Kabupaten Halmahera Tengah
				4	Kabupaten Halmahera Selatan
Koridor Pemerataan					
Maluku	1	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku Utara	1	Kabupaten Pulau Morotai
	2	Kabupaten Buru		2	Kabupaten Halmahera Utara
	3	Kabupaten Buru Selatan		3	Kabupaten Halmahera Barat
	4	Kabupaten Maluku Tenggara		4	Kabupaten Kep. Sula
	5	Kota Tual*			
	6	Kabupaten Kep. Aru			
	7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat			
	8	Kabupaten Maluku Barat Daya			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut.

2.2.1. Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, dengan fokus komoditas yaitu:
   a. Provinsi Maluku: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya; dan
   b. Provinsi Maluku Utara: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel.

Gambar 2.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Maluku

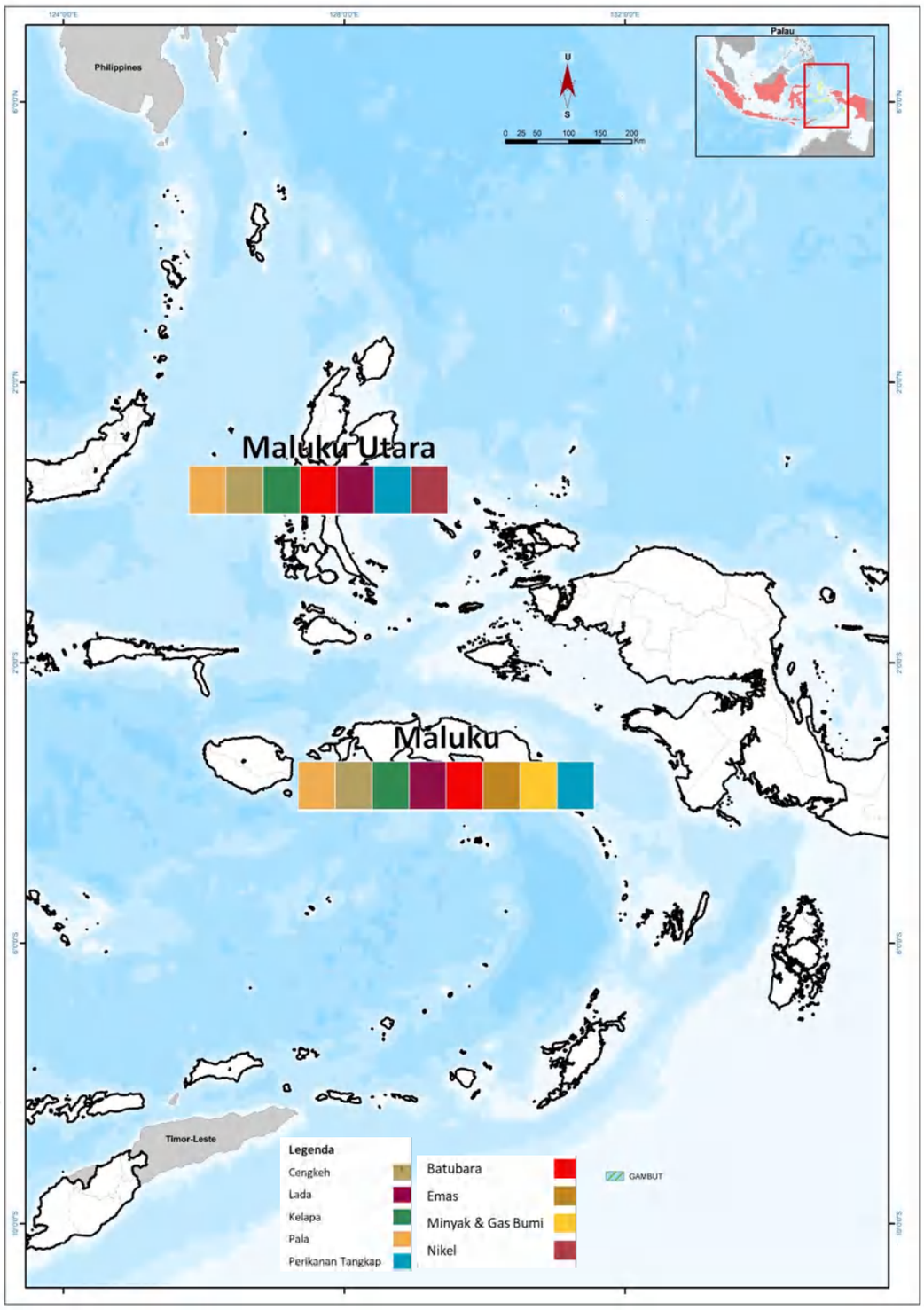

2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki; WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

2.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Jalan Lingkar/Trans Seram, Jalan Lingkar/Trans Pulau Kei Besar, Jalan Lingkar/Trans Pulau Buru, Jalan Lingkar/Trans Moa, dan Jalan Lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
    a. Pengembangan 52 SMK di wilayah Maluku secara keseluruhan berjumlah 52 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, dan teknologi dan rekayasa.
    b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 5 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (manufaktur listrik dan mesin di Maluku), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
    c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 6 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, serta manajer umum perdagangan.
    d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Maluku.

Gambar 2.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Maluku

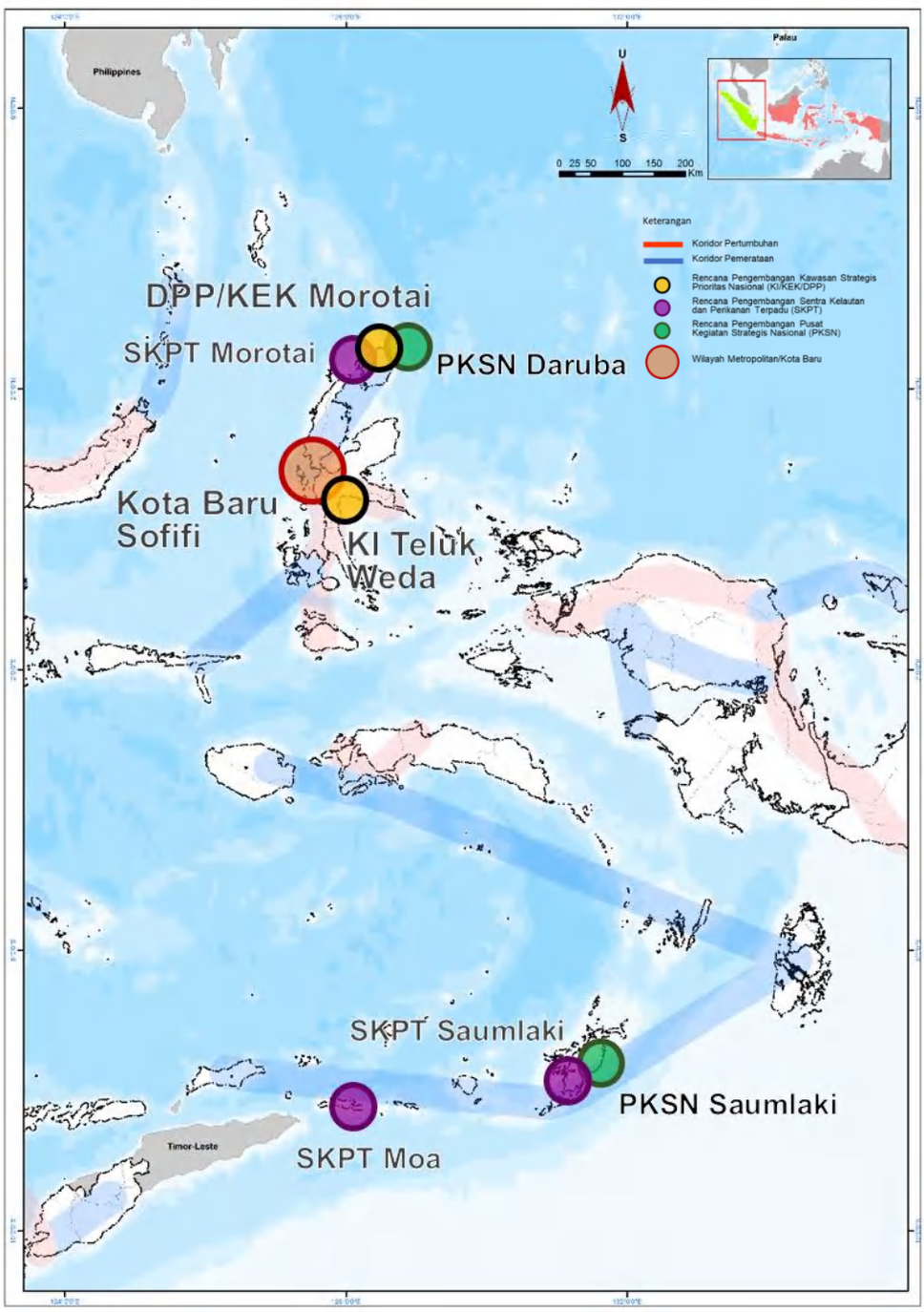

Gambar 2.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Maluku 2024

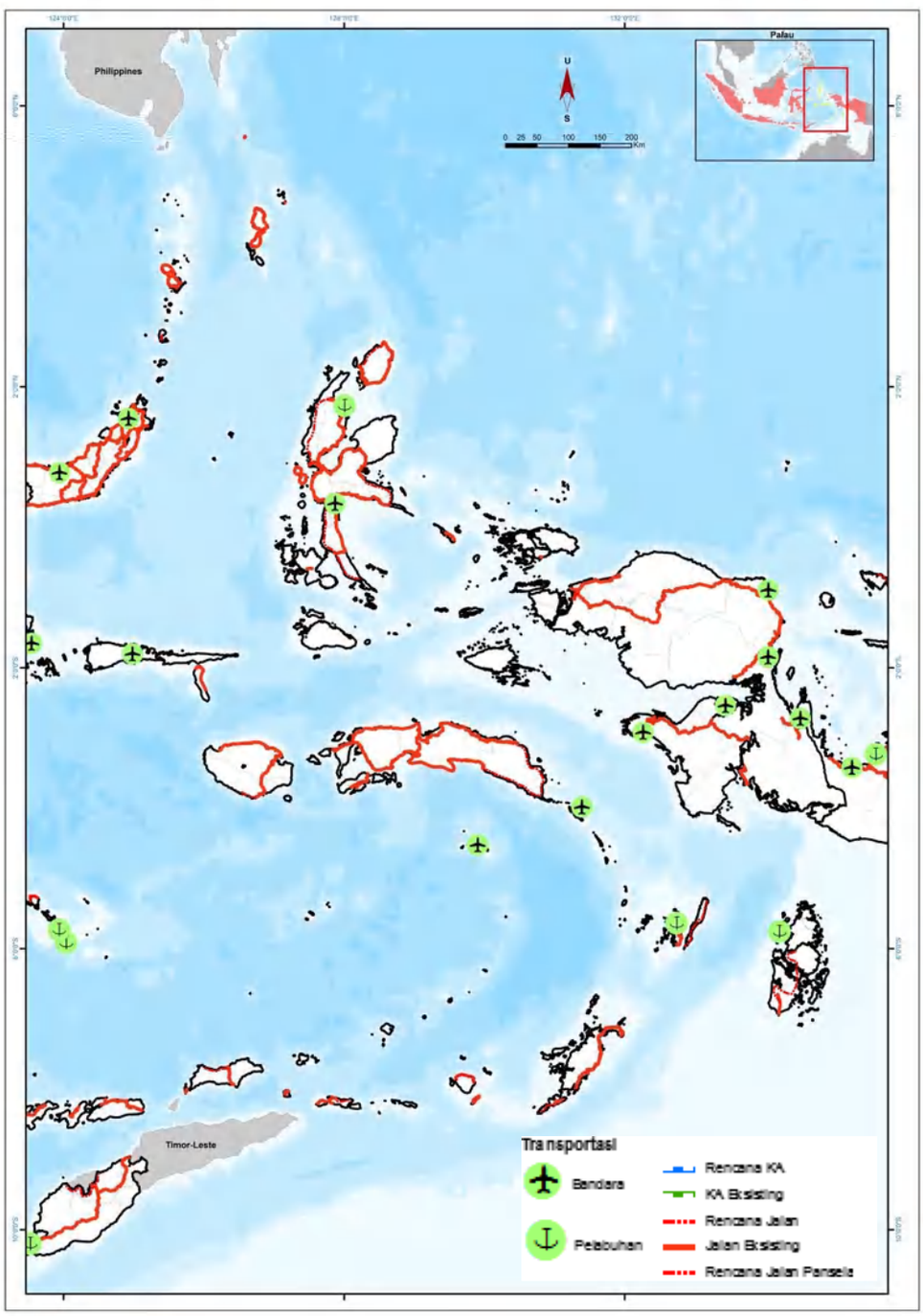

Gambar 2.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi Wilayah Maluku 2024

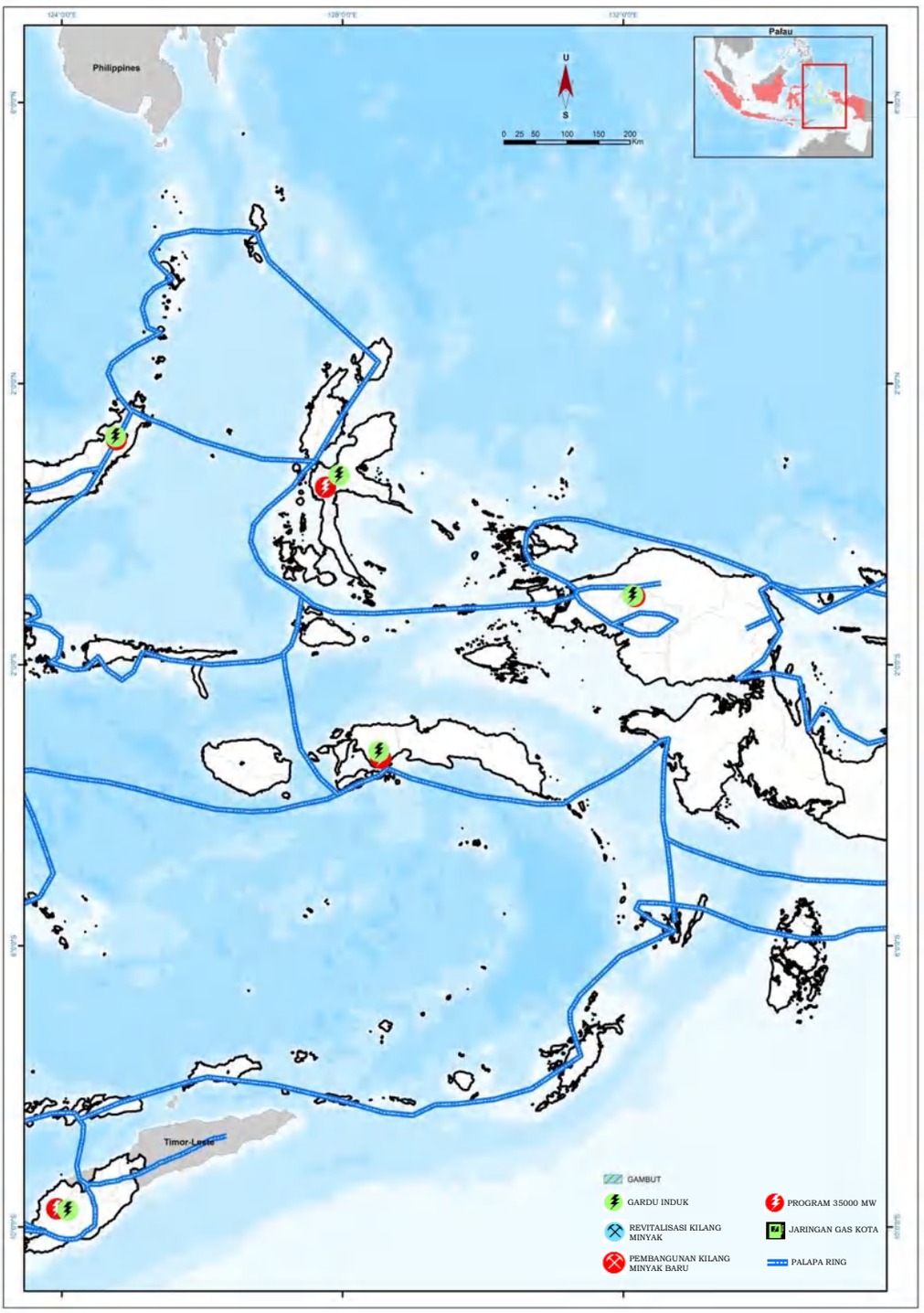

2.2.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi (Tabel 2.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

2.2.4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku dan 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara. Dari 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku, terdapat 4 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, kabupaten tertinggal yang termasuk dalam koridor kewilayahan adalah Kepulauan Sula yang berada pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Maluku berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Buru dan Maluku Tengah di Provinsi Maluku; serta Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 28 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku dan 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki dan PKSN Daruba;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai;

7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 6 kabupaten di Provinsi Maluku dan 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Maluku pada tahun 2023; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 15,19 persen di Maluku dan 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
    a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya;
    b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
    c. Peningkatan konservasi hutan.

2.2.5. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku

Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);

12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);

13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    h. Pembentukan bank tanah;
    i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
    a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
    b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
    c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.

15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
    a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
    b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
    c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
    d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
    e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;

f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 2.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Maluku 2024

2.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Maluku

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* yang Terintegrasi Bertaraf Internasional;
2) Pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
3) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P. Selaru, (h) P. Aru, dan (i) P. Kei Besar.

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Maluku

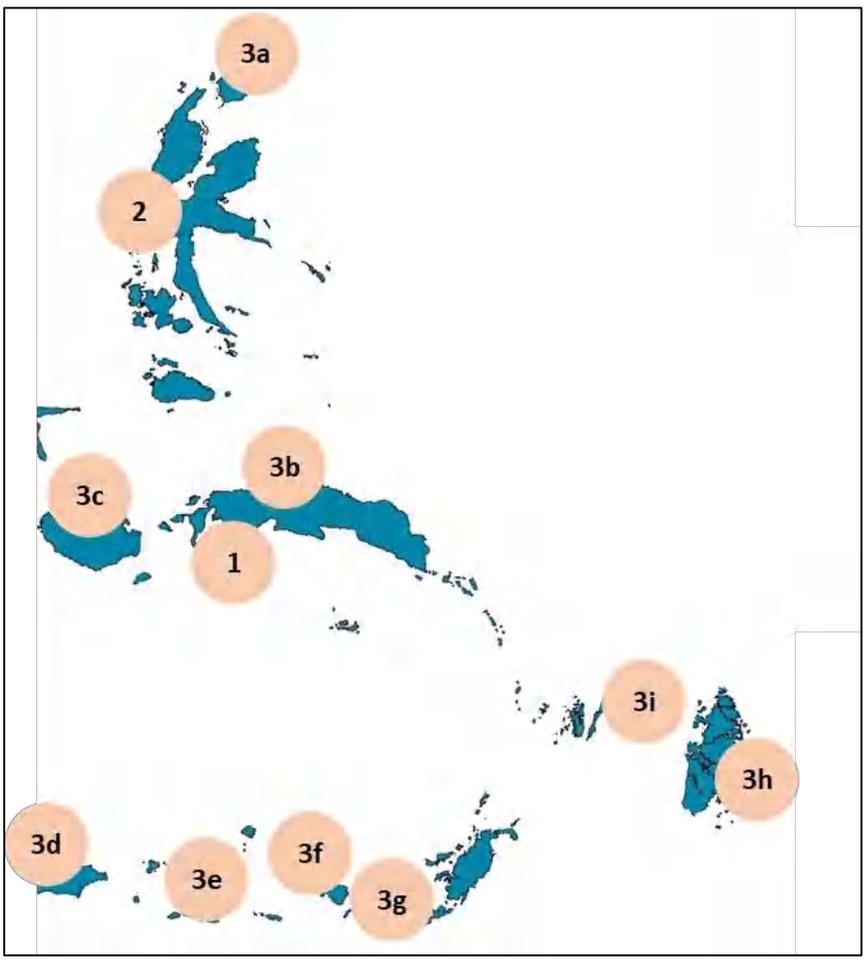

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

KEPULAUAN MALUKU

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 6: Pembangunan Wilayah Maluku	**Laju Pertumbuhan PDRB Maluku**	**6**	**14.053,00**			
	Share PDRB Wilayah Maluku	**0,55**				
	IPM Wilayah Maluku	**72,25-72,33**				
	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	**9,40**				
Provinsi Maluku						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3297,59	71,55	Provinsi Maluku, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1240,03	28,21	Provinsi Maluku, Kepuluan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Maluku	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku)			737,76	**Kota Ambon, Kota Tual**		
Pengembangan Pelabuhan baru di Ambon (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	560	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Pemda, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	45	Kota Tual, Provinsi Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Bandara Patimura	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	186	327,96	Provinsi Maluku	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		38,70	Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		223,24	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		32,09	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,31	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		152,71	Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**675 desa berkembang; 39 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)	**2 (terentaskan 4 kabupaten)**		**Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya**		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,52**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**22,11**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**46,81**	**39,78**	**Kab. Maluku Tengah**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 21,4 - 21,9%; 2. 66,5 - 67**	**2.020,58**	**Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya**	**1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; 3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; 4. Program Penyelenggaraan Jalan; 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 7. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 9. Program Penanganan Fakir Miskin; 10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaa Mikro; 11. Program Pengelolaan Ruang Laut.**	**1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian KUKM; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;**
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	0	64,88	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan		25	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa	kapal penyeberangan yang dibangun		30	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Jalan Trans Pulau Moa (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	9	567,61	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T		143,38	Kab. Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		3,50	Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	7	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	59	2,36	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		5,10	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		4,20	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	196	4,94	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		18	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	53	13,22	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)	96	11,63	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)	2	17,60	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	46.836	702,54	Kab. Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	56.742	459,61	Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun		APBD	Kab. Buru Selatan		Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa)	4	11,28	Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun		APBD	Kab. Buru Selatan		Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Provinsi Maluku (kecamatan)	28	3375,46	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	9	1,30	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Maluku (Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		39,59	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		26,40	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Jalan Trans Pulau Kei Besar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	20,07	1.274,19	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Wetar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	15,13	960,15	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Selaru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	8,53	541,44	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Aru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	7,91	502,19	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	4	30	Pulau Liran, Pulau Leti, Pulau Kei Besar, Pulau Panambulai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	0,52	99	Kabupeten Maluku Tenggara Barat		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	5	11,03	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/ ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)		9,73	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	67,50	Maluku	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		6,20	Maluku	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Kementerian Perhubungan
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kabupeten Maluku Tenggara Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**56,74**	**364,18**	**Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	57	27,11	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	57	53,72	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	331	92,35	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	180,89	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Maluku Tengah**	**53**	**68,9**	**Kab. Maluku Tengah**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Maluku Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Maluku Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Maluku Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131408	94,87	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku**	**46,81**	**39,78**	**Kab. Maluku Tengah**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,42	Kab. Maluku Tengah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,45	Kab. Maluku Tengah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1,44	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,73	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,41	Kab. Maluku Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Maluku Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,09**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**23**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**23**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	**1775**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**23**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**494**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**1**	4,98			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,075	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	12	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	12	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,056	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**12**	0,29			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	11	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	12	0,67	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**12**	0,13			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	12	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**12**	0,13			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,68	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	12	0,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131.408	94,87	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	59.031	5,33	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	26,51	Maluku	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,63	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	1,91	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK		1,70	Sekitar KI Teluk Weda	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	2	9,27	Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Maluku Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP/KEK Morotai	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Jalan Lingkar Pulau Morotai	Panjang jalan yang dibangun (km)		422,77	Maluku Utara		KemenPUPR/Pemda
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0,0	47	Maluku Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30	Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Morotai/KEK Morotai	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)	25	275	Maluku Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	220	Maluku Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)		85	Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk Weda	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Halmahera Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1061,17	24,18	Provini Maluku Utara,Kab. Sula, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Pulau Morotai	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3316,20	71,98	Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Maluku Utara, a.l: Kab. Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku**					
ProP : Pembangunan Kota Baru Sofifi				**Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan**		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50,00	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30,00	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	133	235,10	Provinsi Maluku Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		1,30	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		62,81	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku Utara)				**Kota Ternate**		
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		20,60	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		117,55	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		24,94	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,56	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		44,42	Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan (Provinsi Maluku Utara)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**675 desa berkembang; 39 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. Maluku Utara: Kab. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu**		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,55**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**4,07**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**34,68**	**76**	**Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 6,6 - 7,1%; 2. 64,8 - 65,3**	**254,91**	**Kab. Kepulauan Sula**	**1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2.Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; 3. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 4. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Program Penanganan Fakir Miskin; 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian KUKM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian PUPR**
Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Ikan yang Dibangun			Kab. Kepulauan Sula	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	20	1,43	Kab. Kepulauan Sula	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		1,20	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	15	0,59	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	1	1,90	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	4.010	60,15	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	4.959	44,63	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		144,01	Kab. Kepulauan Sula*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas Provinsi Maluku Utara	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Provinsi Maluku Utara (kecamatan)**	**6**	**13,92**	**Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	5	0,72	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		13,20	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba**	**0,55**	**484,36**	**Kab. Pulau Morotai**		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		6	Kab. Pulau Morotai	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jalan Lingkar Pulau Morotai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	422,77	Maluku Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Pulau Morotai	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		2,20	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Pulau Morotai	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Pulau Morotai	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Pulau Morotai	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**57,37**	**371,70**	**Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan, DPP Morotai**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	8,91	DPP Morotai	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	49	22,96	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	49	48,98	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	350	97,67	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	183,81	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Halmahera Selatan, Kepulauan Sula	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	**Indeks Pembangunana Kawasan Perdesaan di Kab. Morotai**	**62,00**	**86,48**	**Kab. Morotai**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30	4,16	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5	19,60	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	14,10	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Morotai	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Morotai	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Morotai	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Morotai	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Morotai	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Morotai	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Morotai	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	112.954	32,54	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara**	**34,68**	**75,93**	**Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	48,85	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,27	Kab. Pulau Morotai	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	23,44	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	2,88	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,23	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,26	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Kepulauan Sula	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,09**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**23**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**23**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	**1.775,07**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**23**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku Utara	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1281**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**1**	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	94,53			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,265	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,272	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**11**	0,50			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,61	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**11**	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**11**	0,12			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,24	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	11	0,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	112.954	32,54	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	60.637	6,63	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,09	Maluku Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	2,00	Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,82	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	2,03	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

3. PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

3.1 Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	3,00	4,30	4,90	5,50	6,20	6,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,75	14,56	13,52	13,00	12,35	10,85	8,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,42	3,50	3,30	3,20	2,70	2,40
Nusa Tenggara Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,20	5,60	6,50	6,90	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	21,35	21,09	18,00	17,35	16,15	14,56	12,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01	3,35	2,70	2,70	2,60	2,20	2,00

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Nusa Tenggara, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Provinsi	Keburuhan Investasi	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Barat	Rp triliun	2,34	30,17	41,09	47,20	56,59	64,59	73,94
Nusa Tenggara Timur	Rp triliun	40,07	44,93	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

3.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupatan/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
NTB	1	Kabupaten Lombok Barat	NTT	1	Kabupaten Manggarai Barat
	2	Kota Mataram*		2	Kabupaten Manggarai
	3	Kabupaten Lombok Tengah		3	Kabupaten Manggarai Timur
	4	Kabupaten Lombok Timur		4	Kabupaten Ngada
	5	Kabupaten Sumbawa Barat		5	Kabupaten Nagekeo
	6	Kabupaten Sumbawa		6	Kabupaten Ende
	7	Kota Bima		7	Kabupaten Sikka
	8	Kabupaten Dompu		8	Kota Kupang*
	9	Kabupaten Bima		9	Kabupaten Kupang
Koridor Pemerataan					
NTB	1	Kabupaten Lombok Utara	NTT	1	Kabupaten Sumba Timur
				2	Kabupaten Sumba Tengah
				3	Kabupaten Sumba Barat
				4	Kabupaten Sumba Barat Daya
				5	Kabupaten Timor Tengah Selatan
				6	Kabupaten Timor Tengah Utara
				7	Kabupaten Malaka
				8	Kabupaten Belu

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

3.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
   a. Provinsi Nusa Tenggara Barat: kelapa, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; dan
   b. Provinsi Nusa Tenggara Timur: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

Gambar 3.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Nusa Tenggara

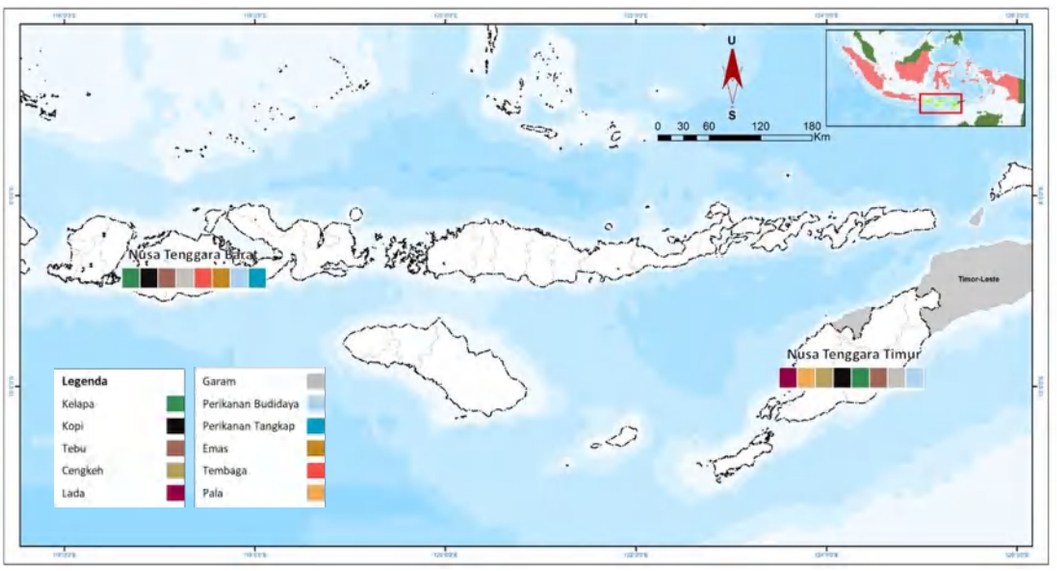

3.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Barat;
2) Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
3) Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
5) Penyediaan *outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan *feeder* yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
6) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
    a. Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
    b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, tambang di Nusa Tenggara Barat, otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
    c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
    d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

Gambar 3.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024

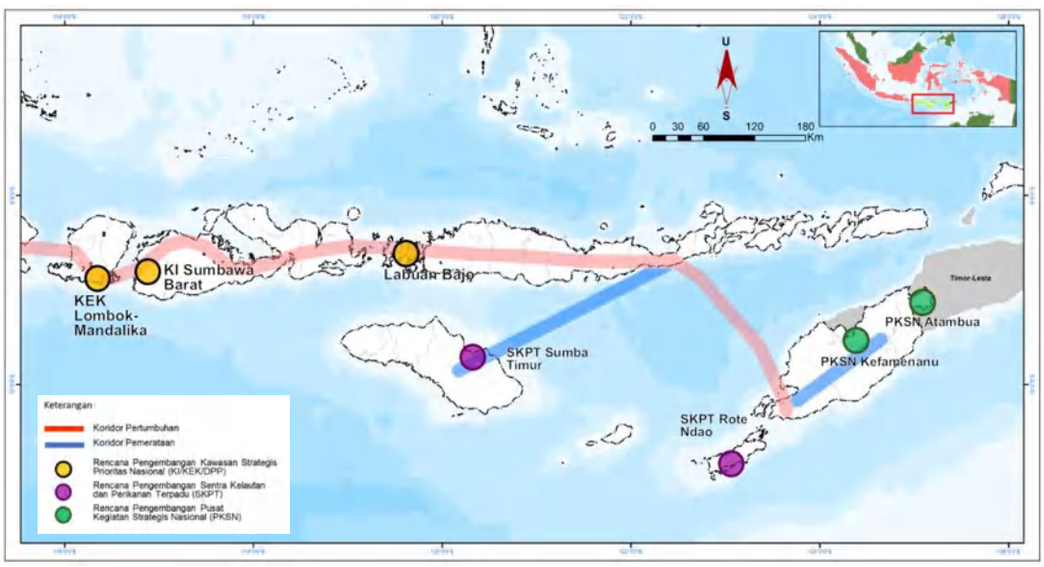

Gambar 3.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024

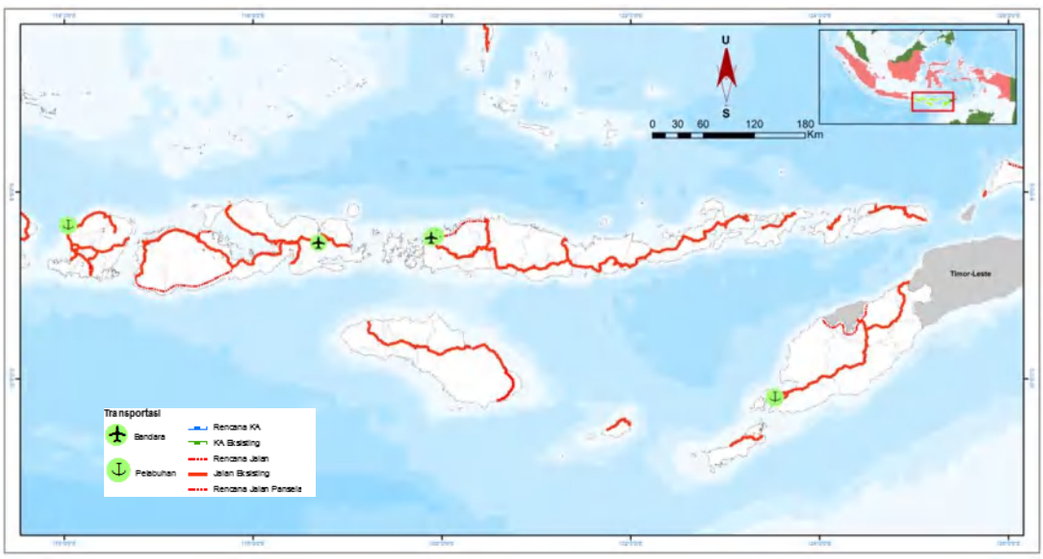

Gambar 3.4.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024

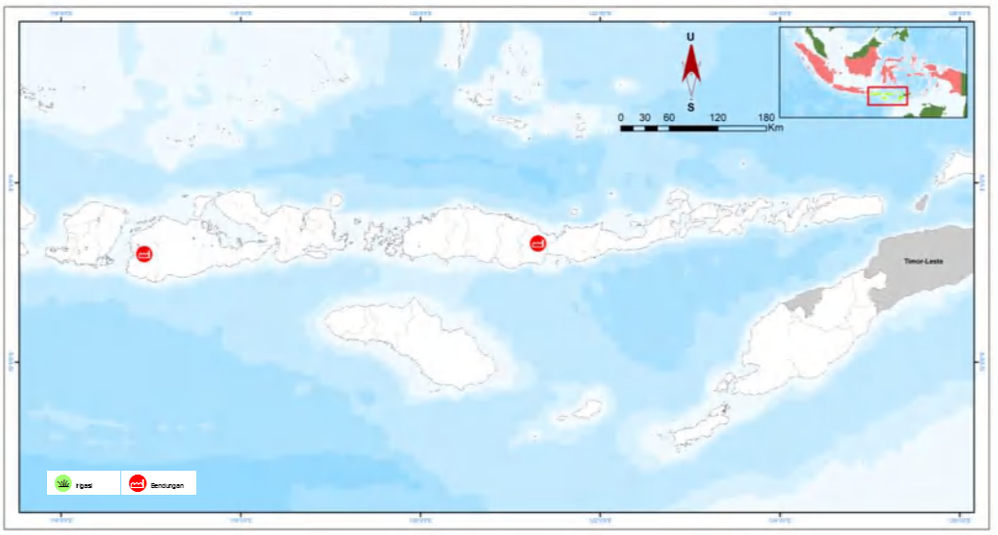

Gambar 3.5.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024

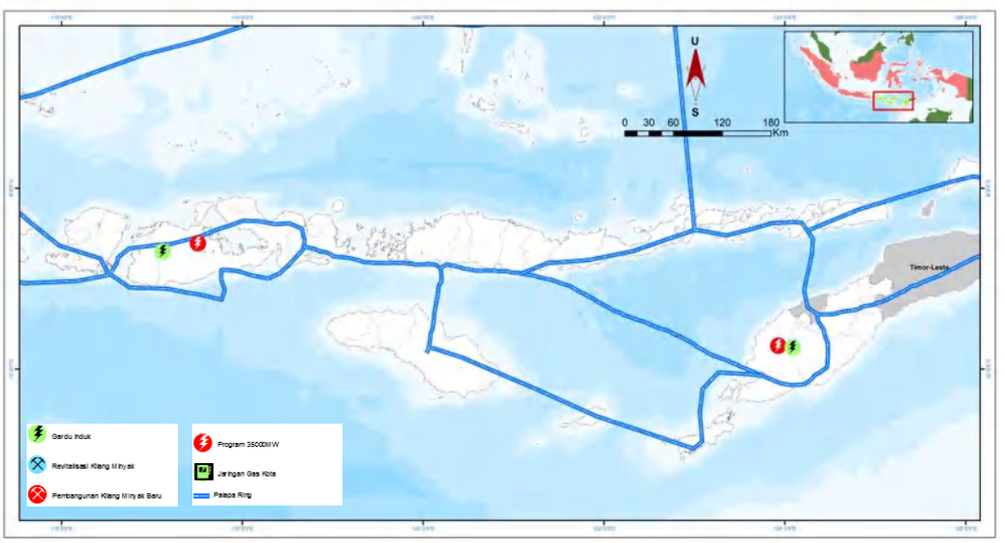

3.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang (Tabel 3.3);
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

3.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah. Adapun Kabupaten Lombok Utara sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Nusa Tenggara berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan

dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN Lombok Timur, dan KPPN Lombok Tengah;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima, Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
8) Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023;
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,87 persen di NTB, dan 15,69 persen di NTT; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
    a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
    b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
    c. Peningkatan konservasi hutan; dan
    d. Pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya.

3.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;

4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
    d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    i. Pembentukan bank tanah;
    j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;

15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 3.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2025

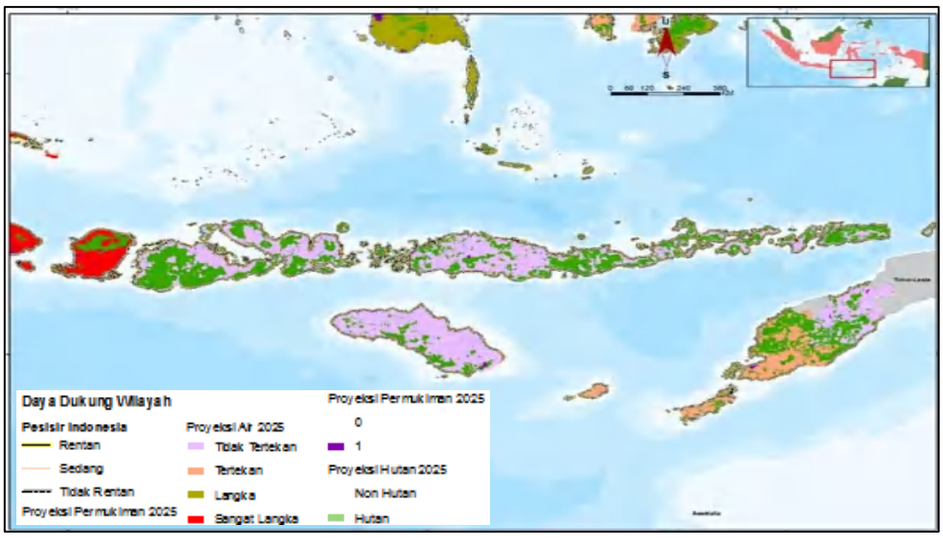

3.3 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Nusa Tenggara

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo;
2) Pemulihan Pasca Bencana Pulau Lombok dan Sekitarnya;
3) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b) PKSN Kefamenanu; dan
4) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

Gambar 3.7.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Nusa Tenggara

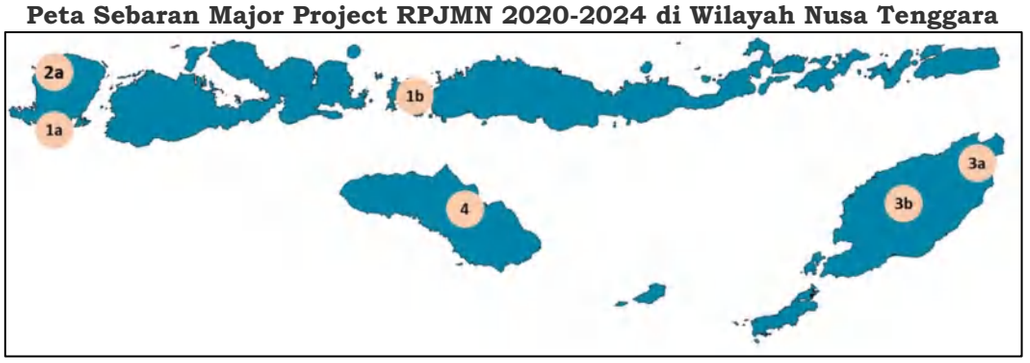

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

KEPULAUAN NUSA TENGGARA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	**Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara (persen/tahun)**	**5,09**	52.347,87			
	Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen)	**1,51**				
	IPM Wilayah Nusa Tenggara	**68,35-71,91**				
	Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (persen)	**13,69**				
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
Perbaikan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**>1**				
Pengembangan Bandara Lombok	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		350	Nusa Tenggara Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	150	Nusa Tenggara Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	
Jalan Bypass BIL-Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,60	892	Nusa Tenggara Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		6,50	Kab. Lombok Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan dan pengembangan Gardu Induk Kuta	Jumlah kapasitas Gardu Induk (MVA)	60		Prov. Nusa Tenggara Barat		PLN
Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi	Jumlah BTS yang terbangun (unit)			Prov. Nusa Tenggara Barat	Program aksesibilitas telekomunikasi dan informasi	Kemenkominfo
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas		1,40	Prov. Nusa Tenggara Barat	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Sumbawa Barat	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Sumbawa Barat	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	880,87	20,15	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Bima	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	481,60	30,53	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	2.585,27	104,09	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Dompu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan tembaga	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB**					
Optimalisasi produksi tembaga	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Nusa Tenggara Barat, a,l Kab. Dompu, Kab. Bima	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Nusa Tenggara Barat, a.l Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTB)				**Kota Mataram**		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	711	1.256,16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		22,40	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		393,75	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		236,92	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		50,21	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,11	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		174	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1079 desa berkembang; 143 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. NTB: Lombok Utara**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**10,61**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**60,44**	**59,61**	**1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa; 2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sumba Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	**1.Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 24 - 24,5%; 2. 69,6 - 70,1**	1056,47	**Kab. Lombok Utara**	**1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 2. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 3. Program Pengembangan Kepariwisataan; 4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Program Penanganan Fakir Miskin; 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	**1. Kementerian Desa PDTT; 2. Kementerian Pariwisata; 3. Kementerian KUKM; 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian PUPR**
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	4	1,10	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		2	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	15	0,59	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal		1,30	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal		8,58	Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN Rinjani dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96	2,45	Kab. Lombok Utara	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	Jumlah Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	7	15,28	Kab. Lombok Utara	Program Pengembangan Kepariwisataan	Kementerian Pariwisata
Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	625	44,69	Kab. Lombok Utara	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Kab. Lombok Utara	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	75	1	Kab. Lombok Utara	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	33.755	303,80	Kab. Lombok Utara	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	19.939	309,62	Kab. Lombok Utara	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,01	359,87	Kab. Lombok Utara*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**68,43**	189,85	**Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, DPP Lombok-Mandalika**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** **2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT** **2. Kementerian Dalam Negeri**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	24,01	DPP Lombok-Mandalika	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		19,17	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		46,07	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	326	91,16	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	8	1,21	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp Miliar)*)	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu**	**53.00; 59.00; NA; 75.00**	1.300,75	**Kab. Lombok Timur**	**1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Lombok Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Lombok Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	1	2	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1.239.877,50	1000,23	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	30	10,09	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	4,78	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	12,60	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	2	9,47	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160,00	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	590721	38,9	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**60,435**	59,61	**Kab. Bima dan Kab. Sumbawa**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	30,59	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,33	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	26,44	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,00	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,18	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,07	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	**Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)**					
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	10	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Kementerian Koperasi dan UKM
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4	7	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Prov. NTB	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi		1,20	Prov. Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Program Beasiswa Kurang Mampu	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	8.000	284	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Miskin	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	100	2	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Lombok Utara	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000		Nusa Tenggara Barat*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan *indikasi pendanaan masih merupakan total di 11 Provinsi; 182 Kab/Kota	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	4.847.877	0	Nusa Tenggara Barat	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun	150	375	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas)	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.100	27,50	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah	500	12,50	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop		2,19	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		19,21	Kab. Lombok Barat		Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Utara	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		19,08	Kab. Lombok Utara		Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Tengah	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		54,80	Kab. Lombok Tengah		Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Timur	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		89,64	Kab. Lombok Timur		Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		67,73	Kab. Sumbawa Barat		Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		17,96	Kab. Sumbawa		Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Mataram	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		11,42	Kota Mataram		Pemerintah Kota Mataram
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,29**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,5**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**34**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**34**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**1.667**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**34**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**805**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		50,82	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		19,96	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

Nusa Tenggara - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	**100**	2,67			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**45**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**11**	0,50			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**11**	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**11**	0,12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	14,87	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	590.721	38,88	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22.256	0,54	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	32,09	NTB	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraaan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	1,84	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	1,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	3,33	NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Labuan Bajo	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		28,50	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan baru di NTT (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	400	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Pemda, KPBU
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	21	1.402,21	Nusa Tenggara Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		28,50	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan PLTP Ulumbu 5	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	20		Flores		PLN
Gardu Induk Labuan Bajo (70 kV)	Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA)					Badan Usaha
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Nusa Tenggara - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	997,01	62,88	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1.335,36	29,91	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Malaka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	421,45	9,16	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	748,67	30,16	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Kupang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Bima	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTT)				**Kota Kupang**		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	588	1.039,58	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		246,18	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		52,13	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		4,45	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		12	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		118,97	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1079 desa berkembang; 143 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**7 (terentaskan 6 kabupaten)**		**Prov. NTT: Kab. Lembata, Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sabu Raijua dan Alor**		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,51**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**20,81**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**48,20**	**51,10**	**1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa; 2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sumba Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 24,4 - 24,9%; 2. 65,3 - 65,8**	2.873.543,57	**Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan**	**1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi; 2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro; 3. Program Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 6. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 7. Program Pemberdayaan Sosial; 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 9. Program Penanganan Fakir Miskin; 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 12. Program Penyelenggaraan Jalan**	**1. Kementerian ESDM; 2. Kementerian KUKM; 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Desa PDTT; 6. Kementerian Sosial; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian PUPR;**
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia		0,22	Kab. Belu	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			1	Kab. Malaka	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	2	43,12	Kab. Sumba Timur	Program Pendidikan Dasar Dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya pasar rakyat	2	56,70	Kab. Timor Tengah Selatan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun			Kab. Sumba Barat Daya		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	3	12,85	Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5	9	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	133	5,31	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	1	18,20	Kab. Kupang, Mangggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Timor Tengah Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal		7,50	Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah Daru dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		2,40	Kab. Sumba Barat Daya	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	490	12,39	Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	314	8,34	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	40	10	Kab. Malaka, Belu, Kupang	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		6	Kab. Malaka	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	100	6,68	Kab. Malaka	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)		2,2	Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	245.527	3682,91	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	304.543	2466,80	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang Mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha	4	11,98	Kab. Sumba Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T	0,19	922,65	Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Sumba (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun	23	1.483,54	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat Daya dan Sumba Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR/Pemda

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov NTT (kecamatan)**	**38**	**3285,10**	**Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		72,54	Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sabu Raijua	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	15	2,16	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		52,80	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	4	0,40	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua**	**0,48**	1379,81	**Kab. Belu**		
Jalan Perbatasan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)	4,55	1.256,02	Nusa Tenggara Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		17	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)	1	38,50	Kab. Belu	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		6,38	Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Uda	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun		2,40	Kab. Belu	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	250	0,08	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	250	0,08	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Belu	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	1	Kab. Belu	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Belu	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung (unit)	1	0,20	Kab. Belu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah (unit)	1	0,20	Kab. Belu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengembangan Sarana Industri Alat Mesin Pertanian Jagung	Jumlah sarana prasarana produksi pertanian jagung (unit)	1	0,20	Kota Atambua	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produki dan pembuatan pakan ternak	Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produki dan pembuatan pakan ternak (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi	Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan penanganan penyakit hama, teknologi produksi untuk komoditas jagung dan bawang merah	jumlah pelatihan mengenai penangan penyakit hama untuk komoditas jagung dan bawang merah	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	12	4,02	Kab. Belu	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Atambua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Fasilitasi Legislasi RDTR Motaain Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,20	Kab. Belu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu**	**0,57**	131,64	**Kab. Timor Tengah Utara**		
Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	45	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		25,16	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	500	0,16	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		0,90	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Timor Tengah Utara	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Timor Tengah Utara	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelaksanaan inseminasi buatan	Pelaksanaan inseminasi buatan (Akseptor)	1000	0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi dan kambing	Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk penggemukan sapi dan kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pakan ternak sapi dan kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Fasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	Jumlah masyakarat yang difasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya kambing	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan budidaya kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	100	0,36	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Lahan Garam yang difasilitasi	Luas lahan (ha) garam yang difasilitasi	20	10	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
Pembangunan sarana niaga garam rakyat	Jumlah (unit) sarana niaga garam rakyat yang dibangun	1	2,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	11	3,69	Kab. Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Maritaing	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**60,25**	700,61	**Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, DPP Labuan Bajo**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	22,24	DPP Labuan Bajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	863	59,78	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	863	122,48	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.000	279,26	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	204,25	Manggarai, Ngada, Sumba Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	21	3,17	Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur**	**59.00; 58.00; 45.00**	189,55	**Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada**	**1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	1	2	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1000	0,04	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	20	4,80	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,20	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	124.198	166,70	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**48,20**	51,10	**Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	18,92	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	750	0,65	Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	27,08	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,38	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	180	0,83	Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	750	0,24	Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	180		Kab. Sumba Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,29**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,5**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**34**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**34**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**1.667**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**34**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**2**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**862**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	8	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	23	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	23	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,52			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	1	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	**100**	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	23	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	23	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	23	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	23	0,48			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	23	0,27			
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	23	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**40**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	23	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**23**	0,68			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	22	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	23	0,42	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	23	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**23**	0,26			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	23	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	23	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**23**	0,26			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	23	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	18,96	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	6	4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	124.198	166,70	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	43.347	0,80	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	NTT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	2	12	NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu Raijua)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,31	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	0,91	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	4,20	Haumeni Ana, Turiskain (NTT)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	1,83	NTT (KSN Kawasan Mbay)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

4. PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

4.1. Target Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Target Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	5,80	6,20	6,60	6,70	7,30	7,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,80	7,66	7,00	6,68	6,45	5,93	5,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,86	6,25	6,70	6,50	6,30	5,90	5,60
Sulawesi Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,30	7,50	7,60	7,70	8,00	8,30	8,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,75	13,48	13,00	12,79	12,35	11,85	11,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,43	3,15	3,30	3,30	3,20	2,80	2,40
Sulawesi Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,07	7,10	7,10	7,50	7,70	8,10	8,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,06	8,69	8,46	8,25	7,35	6,75	5,68
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,97	5,20	5,10	5,00	4,50	4,20
Sulawesi Tenggara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,42	6,30	6,40	6,80	7,10	8,60	8,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	11,24	10,76	10,36	9,35	8,15	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26	3,59	3,30	3,20	3,10	2,80	2,40
Gorontalo	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,51	6,50	6,50	6,80	7,20	7,80	7,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	16,81	15,52	15,00	14,60	14,25	13,65	13,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	4,06	3,60	3,40	3,20	2,80	2,40
Sulawesi Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,23	5,00	5,10	5,40	5,70	6,40	8,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	11,02	9,62	9,36	8,79	7,51	4,85
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,16	3,18	3,00	2,90	2,70	2,30	2,00

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp. 469.73 Triliun.

Tabel 4.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	Kebuthan Investasi	Realiasasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	Rp Triliun	41,24	44,10	50,03	55,15	61,74	69,99	78,85
Sulawesi Tengah	Rp Triliun	49,44	60,54	60,77	67,46	75,71	86,04	97,54
Sulawesi Selatan	Rp Triliun	162,24	179,36	202,76	224,84	249,72	280,50	314,77
Sulawesi Tenggara	Rp Triliun	40,71	44,11	50,48	55,72	62,00	69,94	79,11
Gorontalo	Rp Triliun	11,09	12,16	13,51	15,09	16,88	18,99	21,37
Sulawesi Barat	Rp Triliun	11,07	10,66	14,77	16,04	17,55	19,28	21,62

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

4.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	No.	Kab/Kota	Provinsi	No.	KabupatenKota
Koridor Pertumbuhan					
Sulawesi Utara	1	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Selatan	1	Kabupaten Luwu Timur
	2	Kota Manado		2	Kabupaten Luwu Utara
	3	Kabupaten Minahasa		3	Kabupaten Luwu
	4	Kota Bitung		4	Kota Palopo*
	5	Kota Tomohon		5	Kabupaten Wajo
	6	Kabupaten Minahasa Selatan		6	Kabupaten Soppeng
	7	Kabupaten Bolaang Mongondow		7	Kota Pinrang
	8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		8	Kota Parepare*
Sulawesi Tengah	1	Kabupaten Buol		9	Kabupaten Barru
	2	Kabupaten Tolitoli		10	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	3	Kabupaten Parigi Moutong		11	Kabupaten Maros
	4	Kabupaten Donggala		12	Kota Makassar
	5	Kota Palu*		13	Kabupaten Gowa
	6	Kabupaten Poso		14	Kabupaten Takalar
Sulawesi Tenggara	1	Kabupaten Kolaka Utara	Gorontalo	1	Kabupaten Gorontalo Utara
	2	Kabupaten Kolaka		2	Kabupaten Gorontalo
	3	Kabupaten Kolaka Timur		3	Kota Gorontalo*
	4	Kota Kendari*	Sulawesi Barat	1	Kabupaten Polewali Mandar
	5	Kabupaten Konawe		2	Kabupaten Majene
				3	Kabupaten Mamuju*
				4	Kabupaten Mamuju

Provinsi	No.	Kab/Kota	Provinsi	No.	KabupatenKota
					Tengah
Koridor Pemerataan					
Sulawesi Utara	1	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Tenggara	1	Kabupaten Konawe Selatan
	2	Kabupaten Kepulauan Talaud		2	Kabupaten Muna
	3	Kabupaten Kepulauan Sitaro		3	Kabupaten Wakatobi
Sulawesi Tengah	1	Kabupaten Sigi	Gorontalo	1	Kabupaten Boalemo
	2	Kabupaten Tojo Una-Una	Sulawesi Barat	1	Kabupaten Mamuju Utara
	3	Kabupaten Banggai			
	4	Kabupaten Morowali Utara			
	5	Kabupaten Morowali			
Sulawesi Selatan	1	Kabupaten Toraja			
	2	Kabupaten Toraja Utara			
	3	Kabupaten Bone			
	4	Kabupaten Bantaeng			
	5	Kabupaten Bulukumba			
	6	Kabupaten Sinjai			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

4.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya, yang difokuskan pada komoditas:

   a. Provinsi Sulawesi Utara: kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   b. Provinsi Sulawesi Tengah: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   c. Provinsi Sulawesi Selatan: kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, tebu, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, garam, perikanan tangkap dan budidaya;
   d. Provinsi Sulawesi Tenggara: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   e. Provinsi Gorontalo: kelapa, tebu, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya;
   f. Provinsi Sulawesi Barat: kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan perikanan tangkap dan budidaya.

2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Talaud, WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), dan WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).

Gambar 4.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sulawesi

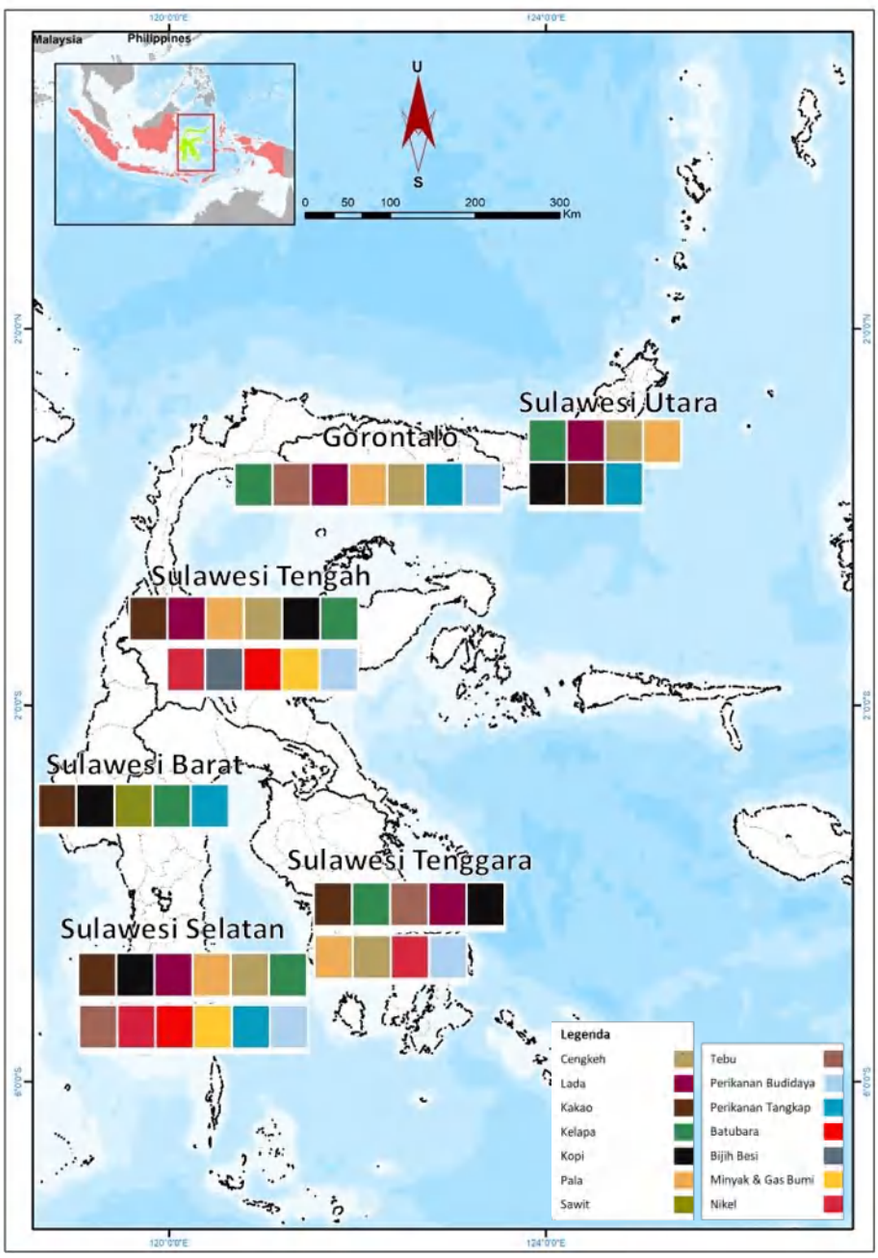

4.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar, dan DPP Wakatobi;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi Pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato, Bandara Boloang Mangondow, Pengemabngan Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar;
4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan *hub* Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
    a. Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
    b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
    c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
    d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.

Gambar 4.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sulawesi

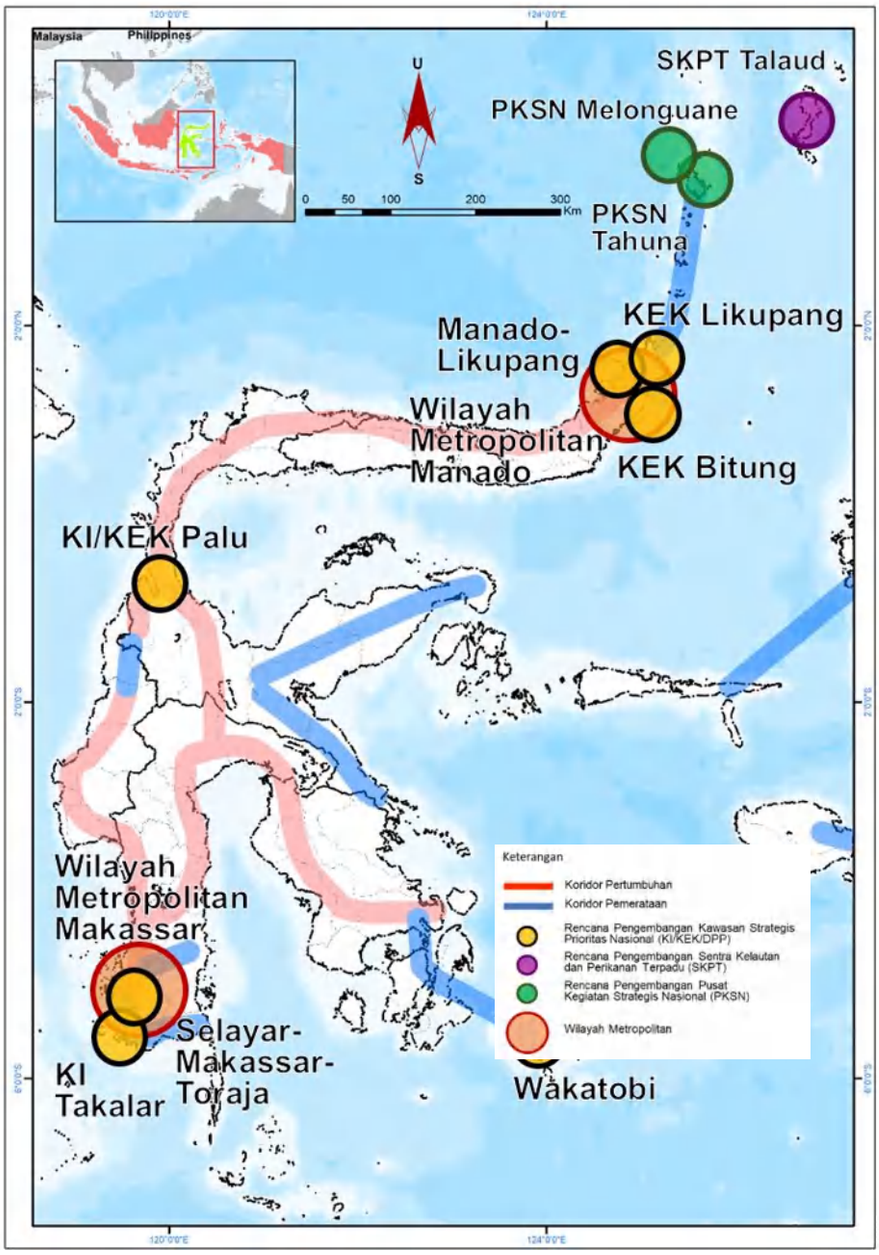

Gambar 4.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Sulawesi

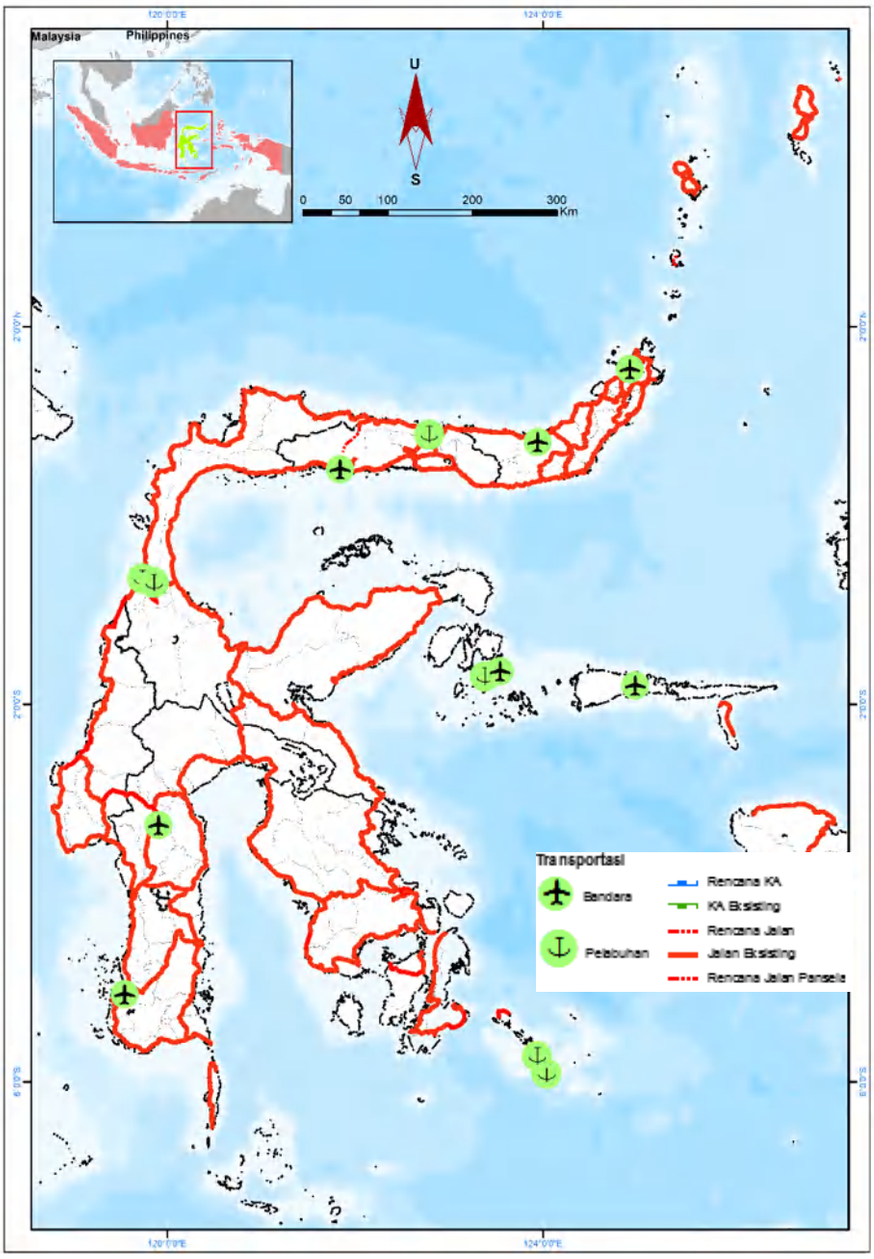

Gambar 4.4.
Peta Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi Wilayah Sulawesi

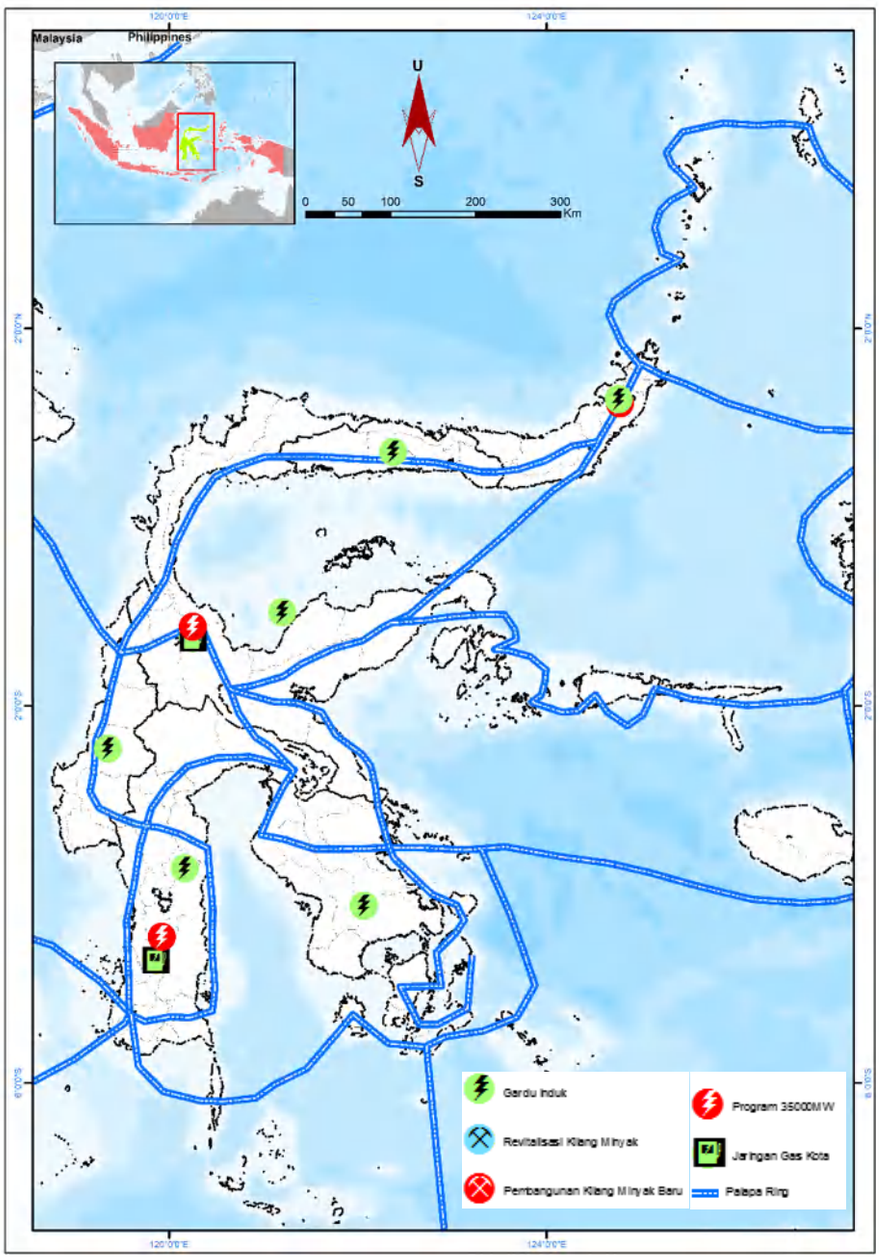

4.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Parepare, Palopo, Kendari, Mamuju dan Gorontalo (Tabel 4.3);
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Makassar (Mamminasata) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

4.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor pertumbuhan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi Gorontalo;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa

dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Gorontalo;

7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo;

8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023. Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit Schitosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan

9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara, 11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;

10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:

    a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;

b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
c. Peningkatan konservasi hutan;
d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; dan
e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.

4.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:

a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.

15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.

Gambar 4.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sulawesi tahun 2025

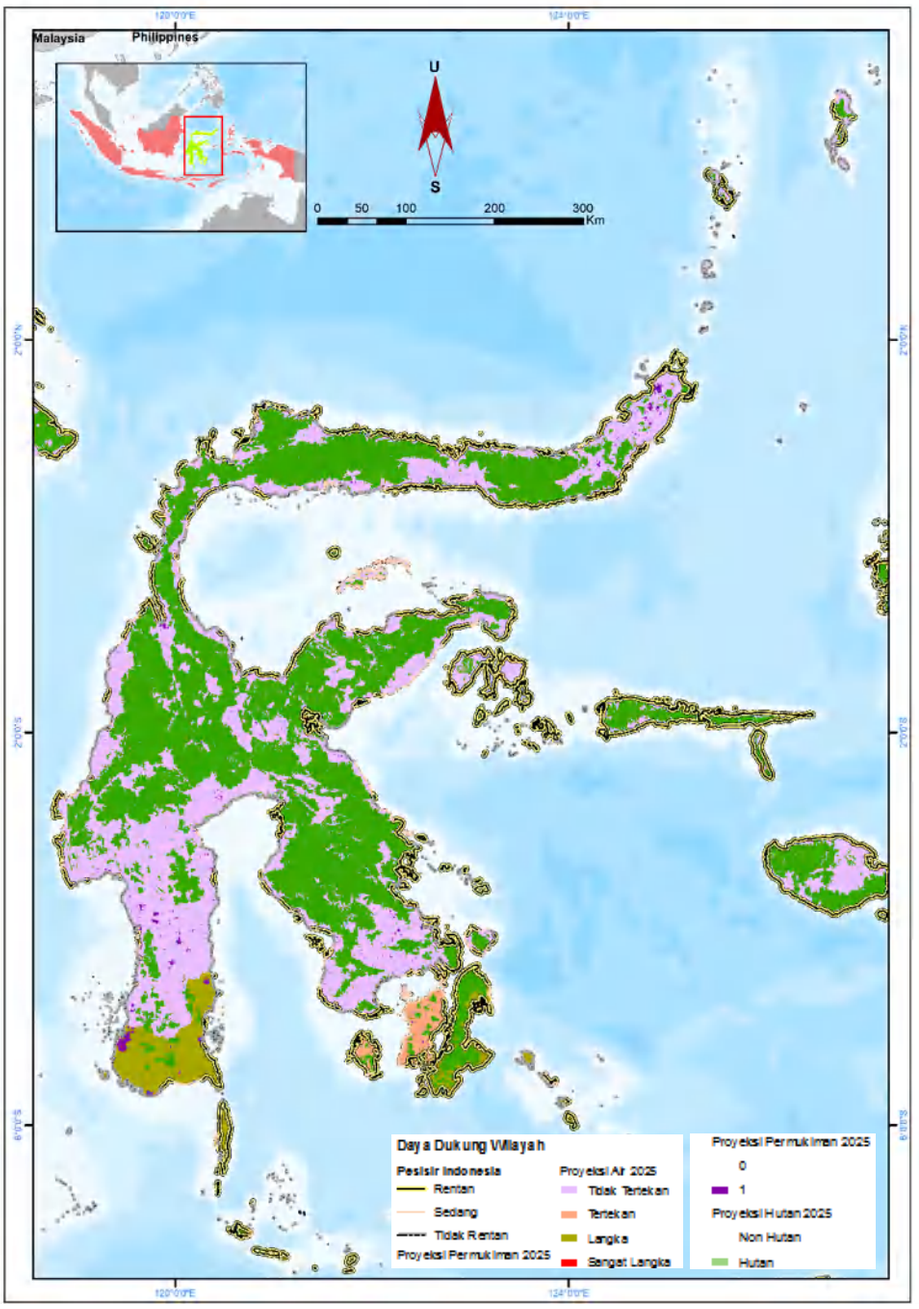

4.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Sulawesi

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b) Wakatobi;
2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar;
6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) Makassar;
8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi Selatan.

Gambar 4.6.
Peta Sebaran Rencana *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sulawesi

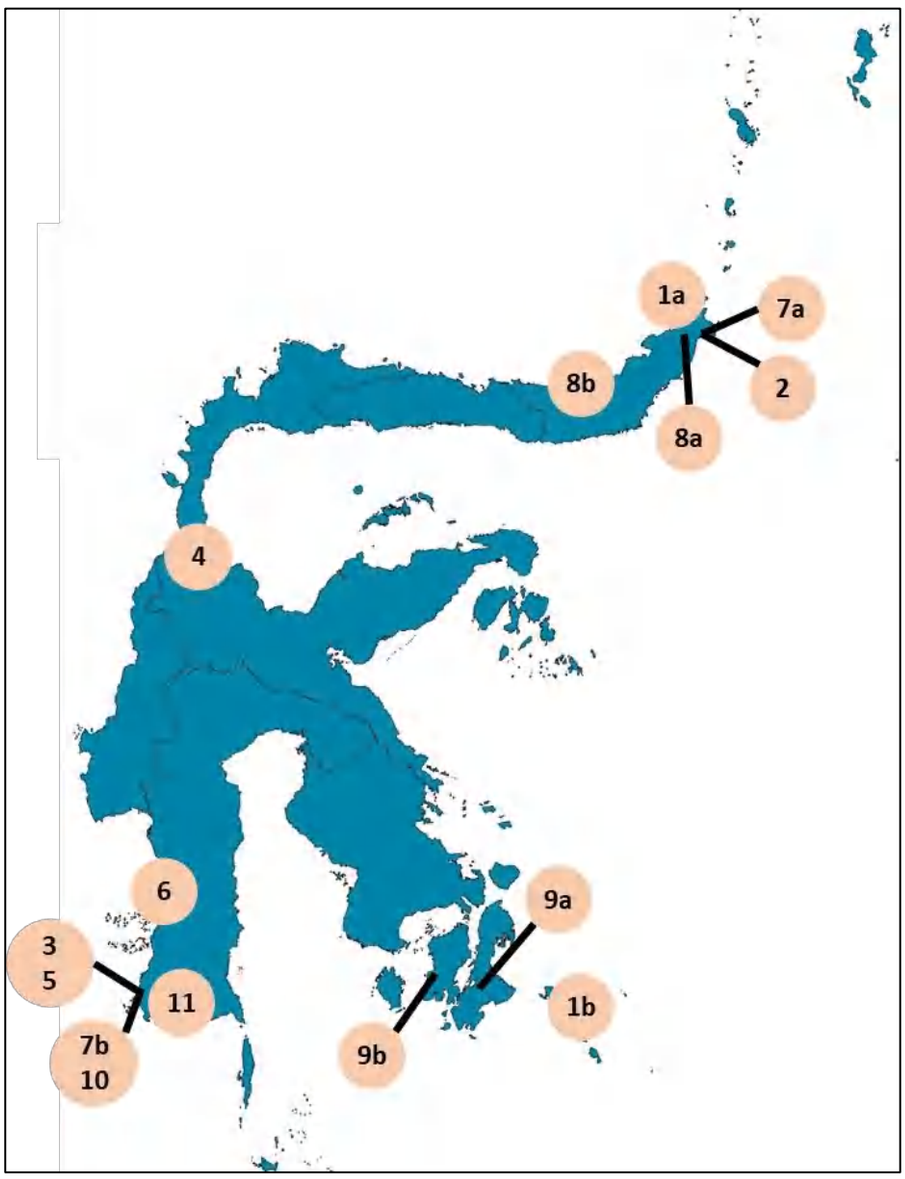

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU SULAWESI

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 5: Pembangunan Wilayah Sulawesi	**Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)**	**6,91**	**189.354,45**			
	Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)	**6,23**				
	IPM Wilayah Sulawesi	**69,41-75,83**				
	Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)	**7,90**				
Provinsi Sulawesi Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Bitung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kota Bitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Sulawasi Utara	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/DPP Baru Manado - Likupang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara**	**>1**				
Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)	Panjang jalan yang dibangun (km)		120	Sulawesi Utara		KPBU
Pembangunan PLTMG Minahasa	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Prov. Sulawesi Utara		PLN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Likupang/DPP Baru Manado - Likupang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Minahasa Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	2.009,52	45,79	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	4.718,46	102,38	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kepualauan Sangihe, Kab. Kepualauan Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Bitung, Kota Tomohon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	744,25	47,01	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	311,04	25,03	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Sulawesi Utara, a.l: Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Sulawesi Utara,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado (Bimindo)				**Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	322	569,30	Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara (Provinsi Sulawesi Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		787,13	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		27,70	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara (Provinsi Sulawesi Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		142,56	Kota Tomohon, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		14,40	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	3,17	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,51**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**7,92**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sulawesi Utara (kecamatan)**	**14**	37,74	**Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	5	0,72	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Talaud)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,00	23,62	Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Talaud	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		13,20	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	8	60	Pulau Mantehage, Pulau Kawio, Pulau kawaluso, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Kakarotan, Pulau Kabaruan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna**	**0,53**	29,98	**Kabupeten Kep Sangihe**		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kabupeten Kep Sangihe	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kabupeten Kep Sangihe	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kabupeten Kep Sangihe	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terba	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kabupeten Kep Sangihe	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan pelabuhan laut Tahuna	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		22,50	Kabupeten Kep Sangihe	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kabupeten Kep Sangihe	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kabupeten Kep Sangihe	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kabupeten Kep Sangihe	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane**	**0,48**	64,81	**Kabupeten Kep Talaud**		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud	5	10,96	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kepulauan Talaud	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan		40	Sulawesi Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kepulauan Talaud	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kepulauan Talaud	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		5,50	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kepulauan Talaud	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kepulauan Talaud	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**65,16**	255,03	**Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro, DPP Manado-Likupang**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** **2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT** **2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	16,91	DPP Manado-Likupang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	362	29,54	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	362	60,88	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	494	137,98	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Minahasa Utara**	**45.00**	127,7	**Kab. Minahasa Utara**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Minahasa Utara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Minahasa Utara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,00	Kab. Minahasa Utara	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Minahasa Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Minahasa Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,00	Kab. Minahasa Utara	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	132.387	97,0	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43,5**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Sulawesi Utara	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.215**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²)	2.800	52,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km²)	2.800	19,68	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	16	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	3,21			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	3	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42**	0,84			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	0,17	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**16**	0,66			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	15	0,28	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	16	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**16**	0,18			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	16	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**16**	0,18			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	16	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	50,39	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	6	5	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	132.387	97,00	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22.112	0,42	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	32,10	Sulawesi Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Sekitar Kawasan Pariwisata Likupang	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	1,83	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah**	**>1**				
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		130,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		101,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		812	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)		1.218,70	Sulawesi Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		245	Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Palu	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kota Palu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTU Palu III	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kota palu		PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	996,44	79,37	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	316,41	6,84	Provinsi Sulawesi Tengah,Kab. Donggala, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Toli toli	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	867,94	54,95	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab. Poso	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1542,99	35,41	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli Toli, Kab. Buol, Kab. Tojo Una Una	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan bijih besi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi bijih besi	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil				**Kota Palu**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sulawesi Tengah		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	381,50	674,49	Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		10,90	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		139,08	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		95,20	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. Sulawesi Tengah: Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	**0,12**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**59,29**	128,74	**Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1.16,2 - 16,7% 2. 69,7 - 70,2**	**1.654,96**	**Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala**	**1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 3. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5. Program Penanganan Fakir Miskin; 6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro; 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 8. Program Pengelolaan Ruang Laut**	**1. Kementerian ESDM; 2. Kementerian Desa PDTT; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian KUKM; 5. Kementerian PUPR**
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	2	2,84	Kab. Tojo Una-una	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	289	7,39	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		3,60	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		3	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal		4,90	Kab. Sigi, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Sigi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal	20	10	Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini dskt); Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan KSPN Lore Lindu dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	44	1,77	Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78	2,08	Kab. Donggala	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	42.046	630,69	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	225	2,50	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	53.673	434,75	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Sigi, Donggala	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		259,43	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Lingayan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sulawesi Tengah (kecamatan)**	**3**	**12,10**	**Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	3	0,432	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Toli-Toli)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		4,97	Kab. Toli-Toli	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**63,7**	**301,57**	**Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	221	39,99	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	221	83,03	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	604	168,76	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Banggai, Parigi Moutong	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Morowali, Kab. Buol dan Kab. Poso**	**35.00; 67.00; 60.00**	**310,30**	**Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Poso	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab.Buol	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)		1	Kab.Buol	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab.Buol	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kaawasan)	1	8,62	Kab.Buol	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	337.110	305	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah**	**59,29**	**128,74**	**Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	52,90	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	287,70	1,55	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan Kab. Parigi Moutong	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	5	66,22	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	3	6,42	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	90	0,83	Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	287,70	0,82	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	90		Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	**Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)**			**Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala**		
Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru	Unit Sekolah Baru Yang dibangun		725,35	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	10.000.000		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan *indikasi pendanaan masih merupakan total di 11 Provinsi; 182 Kab/Kota	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	4.847.877		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6.000		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	10	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi sulawesi tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat	Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan PSU Rumah Umum	2000	3.749	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya	1000	2.100	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Pembangunan Baru)	Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	150	375	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jamban/MCK Desa	Sistem Pengelolaan Air Limbah	25	21	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Tondo (7500 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		13	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Petobo (2700 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		97,22	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Sampah	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota yang terbangun		37,34	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah kapasitas produksi unit SPAM baru	120	3264,80	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Perbaikan Hilir Sungai Palu	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)		20,64	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	4	7	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)		1218,71	Sulawesi Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Jembatan yang dibangun (lokasi)		325	Kota Palu	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan Sulawesi Tengah	Jembatan yang dibangun (lokasi)		23,19	Kota Palu	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) RSUD Anutapura			227,70	Kota Palu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi IAIN Palu	Rekonstruksi Kampus 1 IAIN		119,30	Kota Palu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan IPA New Pasigala	Terlayaninya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana		100	Kabupaten Sigi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan Jaringain Distribusi Air Minum	Terlayaninya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana		301,80	Kota Palu, Kabupaten Sigi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		245	Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		812	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		130,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		101,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Penyiapan/ penataan lokasi berjualan bagi pelaku usaha mikro, koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang direlokasi/ditempatkan beserta dukungan sarana tempat berjualan	150	2,50	Taman Kota Kaombona Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang mendapatkan dukungan peralatan /modal kerja	50	7,50	Kota Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro,koperasi yang mendapatkan pelatihan	150	2,50	Kota Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng
Pemulihan Sektor Transportasi	PersentaseKonsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;	25	35,10	Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;	Persentase Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;			Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Melaksanakan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;	Persentase Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;			Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.	Persentase Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang			Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap	Persentase infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap terbangun	25	7,52	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sigi	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		21,08	Kabupaten Sigi		Pemerintah Kabupaten Sigi
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Donggala	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		4,80	Kabupaten Donggala		Pemerintah Kabupaten Donggala
Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah	Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota pascabencana		6	Provinsi Sulawesi Tengah		Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43,5**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tengah	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.865**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	14	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat pengembangan kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam hal penerapan SPM di daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**14**	0,331			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,74	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**14**	0,16			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**14**	0,16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,84	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	337.110	305	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	275.632	4,16	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	32,10	Sulawesi Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Pembangunan DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	2.638,70	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	3.790,40	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250,00	Kota Makassar-Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Bandara Buntu Kunik	Bandara baru yang dibangun (lokasi)		131,10	Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan PLTA Malea	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kab. Tana Toraja		IPP

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan PLTA Bakaru II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	140		Kab. Pinrang		PLN
Pembangunan PLTA Poko	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	130		Prov. Sulawesi Selatan		PLN
Pembangunan PLTMG Selayar II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kab. Kepulauan Selayar		PLN
Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU Makassar	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kota Makassar		PLN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kota Makassar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat		Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Takalar	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Takalar	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)	operasi	1.001	Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab. Pangkajene Kepulauan/Kab. Bantaeng/Kab. Gowa)		KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	575,40	45,79	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	1191,58	75,09	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3643,09	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Sopeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	693,83	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Wajo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	382,01	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Bone, Kab. Wajo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab. Bulukumba, Kab. Bone, Kab. Sinjai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab. Takalar, kab. Wajo, Kab. Luwu	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata)				**Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1 (selesai)	1.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	1.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1	150	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)	1 (selesai)	510	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)	1 (selesai)	10.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	2.638,70	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	3.790,40	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Sulawesi	Panjang jalan tol Mamminasata yang dibangun		6.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1046,50	1.850,21	Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Mamminasata (lpd)		43,50	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		960,61	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		590,63	Kota Makassar Kab Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		35,90	Kota Makassar, Kab Gowa, Kab Takalar, Kab Maros (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		826,47	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		227,80	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,94	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		251,46	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,48	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Selatan)				**Kota Pare-pare, Kota Palopo**		
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	12	2.613,70	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	12	3.790,40	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		26,60	Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		153,78	Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		16,34	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**9,22**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**58,11**	88	**Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**66,13**	358,84	**Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	111	44,61	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	111	88,93	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (oran)	740	206,60	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Enrekang, Bone	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur dan Kab. Bone**	**50.00; 51.00; 57.00; 58.00**	252,16	**Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Barru	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	27	4,01	Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	418.568	395	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan**	**58,11**	87,52	**Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	45,13	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,12	Kab. Wajo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	37,84	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,89	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	307	1,51	Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,03	Kab. Wajo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	307		Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43,50**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Selatan	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.457**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km^2)	2.800	98,4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km^2)	2.800	72,50	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	25	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	5,00			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	25	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	25	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	25	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	**68%**	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	25	0,27	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**25**	0,71			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	24	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	25	0,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**25**	0,29			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	25	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**25**	0,29			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	25	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,60	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	418.568	395	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	233.306	4,43	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	25	32,10	Sulawesi Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	10	1,31	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Sekitar Kawasan Pariwisata Tana Toraja	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	10	0,91	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,57	Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Wakatobi	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Wakatobi	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Wakatobi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)	30	225,00	Sulawesi Tenggara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Kapota (wakatobi)	Jembatan yang dibangun (km)	1	250,00	Sulawesi Tenggara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		288,24	Sulawesi Tenggara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	3080,35	246,04	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3637,03	18,89	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	112,07	7,33	Kab. Kolaka Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1001,64	22,59	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Muna, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	1470,80	18,89	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Sulawesi Tenggara, a.l: Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Tenggara)				**Kota Kendari**		
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	311,50	550,73	Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		53,60	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		227,56	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		13,07	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		7,53	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**10,56**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**58,98**	106,43	**Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**62,42**	331,06	**Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, DPP Wakatobi**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	16,01	DPP Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	175	44,84	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	175	80,02	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	646	180,40	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Buton, Kolaka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna**	**NA; 52.00; 54.00**	248,54	**Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Konawe Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Konawe Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Wakatobi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Muna	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Muna	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	213.099	233,70	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara**	**58,98**	106,43	**Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	67,30	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.509,71	0,93	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	33,92	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	3,17	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	75	0,86	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.509,71	0,25	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	75		Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	**43,50**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tenggara	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**823**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	18	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	100%	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	100%	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	**100%**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**18**	0,62			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	18	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**18**	0,20			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	18	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**18**	0,20			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,19	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	4	2,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	213.099	233,70	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	62913	1,01	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Sulawesi Tenggara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-Watumohai-Rawa Tinondo)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1006,68	23,20	Provinsi Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Goronralo Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	224,41	18,89	Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	257,08	18,89	Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Goronralo Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Gorontalo)				**Kota Gorontalo**		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	147	259,90	Provinsi Gorontalo	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		6,80	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		129,63	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		18,61	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,94	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		10,25	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	856	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**21,04**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**65,80**	**93,84**	**Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Gorontalo (kecamatan)**	**1**	2,52	**Kec. Anggrek**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan		0,22	Kec. Anggrek	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		2,20	Kec. Anggrek	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Anggrek	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Anggrek	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan		259,57	Kec. Anggrek	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**66,35**	99,23	**Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	224	11,04	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	224	18,02	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	216	60,19	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Boalemo, Gorontalo, Pohuwato	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara**	**NA; NA; 58.00**	331,48	**Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab.Gorontalo Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab.Gorontalo Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab.Gorontalo Utara	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab.Gorontalo Utara	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	344	163,76	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	55.608	55,60	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo**	**65,80**	93,84	**Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1 SP	45,87	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	787 Ha	0,94	Kab. Gorontalo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	4 Kawasan	40,67	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1 Kawasan	5,54	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,69	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	787 Ha	0,13	Kab. Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43,5**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Gorontalo	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**521**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	7	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	24	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**7**	0,442			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**7**	0,08			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**7**	0,08			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,74	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	55.608	55,60	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	5.439	0,10	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	32,10	Gorontalo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	1,31	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	0,91	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,57	Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-Kwandang)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Sulawesi Barat						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	269,37	17,09	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamasa	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	539,47	43,35	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	797,61	18,32	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju, Kab. Majane, Kab. Polewali Mandar, Kab. Pasangkayu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Barat, a.l: Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Barat)				**Mamuju (PKW)**		
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan		90	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)			120	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km)		60	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	161	284,65	Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Baru	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		36,93	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		3,10	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Polri
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1043 desa berkembang; 507 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**7,39**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**72,62**	**79,91**	**Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 89

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**63,90**	69,30	**Majene, Mamasa, Polewali Mandar**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	168	10,91	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	168	21,56	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (desa)	95	26,57	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	4	0,60	Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 90

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah**	**54.00; 50.00**	1.189,48	**Kab. Mamuju**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 6. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 7. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Mamuju	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Mamuju	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Mamuju	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	2	3	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit (dosis)	1.239.877,50	1.000,23	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Mamuju Tengah	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Mamuju	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Mamuju	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	95.761	86,50	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat**	**72,62**	79,91	**Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	53,76	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,53	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	21,60	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,18	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,73	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,11	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,32**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43,50**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**87**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**87**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**6.475**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**87**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**8**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**594**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	7	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	24	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	**36%**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**7**	0,41			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**7**	0,08			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**7**	0,08			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,51	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	95.761	86,50	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	36.996	0,70	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	Sulawesi Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	1,31	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	0,91	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

5. PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

5.1. Target Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Target Pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,06	5,10	5,50	5,90	6,70	7,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,77	7,49	6,43	6,15	5,75	5,15	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	4,45	4,00	3,70	3,60	3,10	2,80
Kalimantan Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	6,40	5,80	6,10	6,40	6,70	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,17	4,98	4,75	4,44	4,19	3,85	3,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01	4,10	3,70	3,70	3,60	3,30	3,20
Kalimantan Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	3,90	3,90	4,50	4,80	5,60	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,54	4,55	4,20	4,00	3,75	3,24	2,80
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,31	4,20	4,00	3,90	3,40	3,10
Kalimantan Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	5,60	5,80	6,70	7,10	8,00	8,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,94	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,60	6,09	6,20	6,00	5,80	5,40	5,10
Kalimantan Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	6,70	6,70	7,10	7,40	7,80	8,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,09	6,63	5,85	5,44	4,85	4,41	4,04
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,22	4,40	4,60	4,40	4,30	3,80	3,50

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan:
1. *Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.*
2. *Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)*
3. *Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)*

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Kalimantan, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Kalimantan 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realiasasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	Rp triliun	63,81	70,29	79,01	87,79	98,45	111,05	127,78
Kalimantan Tengah	Rp triliun	56,74	62,86	69,57	77,81	87,89	99,38	114,37
Kalimantan Selatan	Rp triliun	39,05	42,50	46,09	50,38	55,20	60,85	68,41
Kalimantan Timur	Rp triliun	174,70	188,95	212,55	249,79	287,30	332,56	396,73
Kalimantan Utara	Rp triliun	29,84	33,49	40,93	46,15	52,26	59,26	68,69

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: 1) Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
2) Investasi di Kalimantan Timur belum termasuk perkiraan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara.

5.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan melalui: (1) penyiapan dan penyusunan rencana induk (masterplan) secara terpadu yang mengutamakan nilai-nilai sosial budaya bangsa; tata ruang dan lahan, daya dukung lingkungan, dan pertahanan dan keamanan; serta mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (2) pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pembangkit listrik, sumber air bersih dan air baku, waduk dan bendungan; (3) pembangunan Istana Negara, gedung parlemen dan lembaga tinggi negara, pusat-pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri; (4) pengembangan tata kelola Ibu Kota yang bersih, hijau, cerdas dan berkelanjutan; (5) pengembangan dan perluasan kerjasama dan kemitraan pemerintah dan badan usaha dalam investasi dan pembiayaan pembangunan perkotaan; serta (6) perluasan kerjasama dan kemitraan internasional dalam pengembangan perkotaan.

Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu (1) hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; (2) penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; (4) percepatan pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*).

Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan tersebut akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Kalimantan Barat	1	Kota Pontianak*	Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Barito Kuala
	2	Kabupaten Kubu Raya		2	Kota Banjarmasin
	3	Kabupaten Ketapang		3	Kabupaten Banjar
Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Lamandau		4	Kota Banjar Baru
	2	Kabupaten Kotawaringin Timur		5	Kabupaten Tanah Laut
	3	Kabupaten Katingan		6	Kabupaten Tanah Bumbu
	4	Kota Palangkaraya*		7	Kabupaten Kota Baru
Kalimantan Timur	1	Kota Balikpapan*	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan*
	2	Kota Samarinda*			
	3	Kabupaten Kutai Kartanegara			
	4	Kabupaten Penajam Paser Utara			
Koridor Pemerataan					
Kalimantan Utara ‘	1	Kabupaten Malinau	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kotawaringin Barat
	2	Kabupaten Nunukan		2	Kabupaten Pulang Pisau
	3	Kabupaten Bulungan		3	Kabupaten Seruyan
	4	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Barat	1	Kabupaten Sambas
Kalimantan Timur	1	Kabupaten Paser		2	Kota Singkawang*
	2	Kabupaten Kutai Barat		3	Kabupaten Bengkayang
	3	Kabupaten Kutai Timur		4	Kabupaten Landak
	4	Kabupaten Bontang		5	Kabupaten Mempawah
	5	Kabupaten Berau			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

5.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antaran lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas antara lain:
   a. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara;

b. Provinsi Kalimantan Tengah: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, emas, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya;
c. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, batubara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
d. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara; dan
e. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

2) Pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP yaitu SKPT Sebatik, WPP 711 (berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan), WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa), WPP 713 (berlokasi di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 716 (berlokasi di Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera);

3) Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Berau, KPPN Kutai Timur, KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah, KPPN Bengkayang, KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Nunukan, dan KPPN Sambas.

Gambar 5.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan

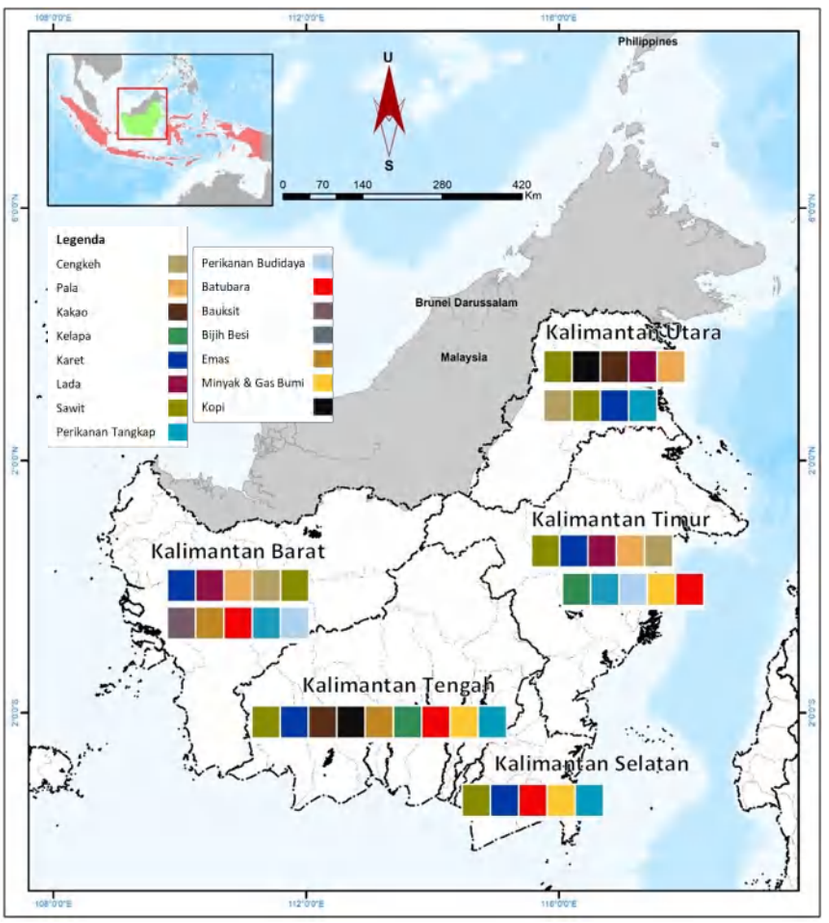

5.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) antara lain KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK MBTK;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas - Singkawang, dan DPP Baru Derawan-Berau;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Pelabuhan Tanah Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, Bandara Baru Murung Raya, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
    a. pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah 204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
    b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Tambang di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, Makanan dan Minuman di Kalimantan Selatan, Otomotif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
    c. pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 35 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung dan manajer umum (perdagangan).
    d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.

Gambar 5.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan

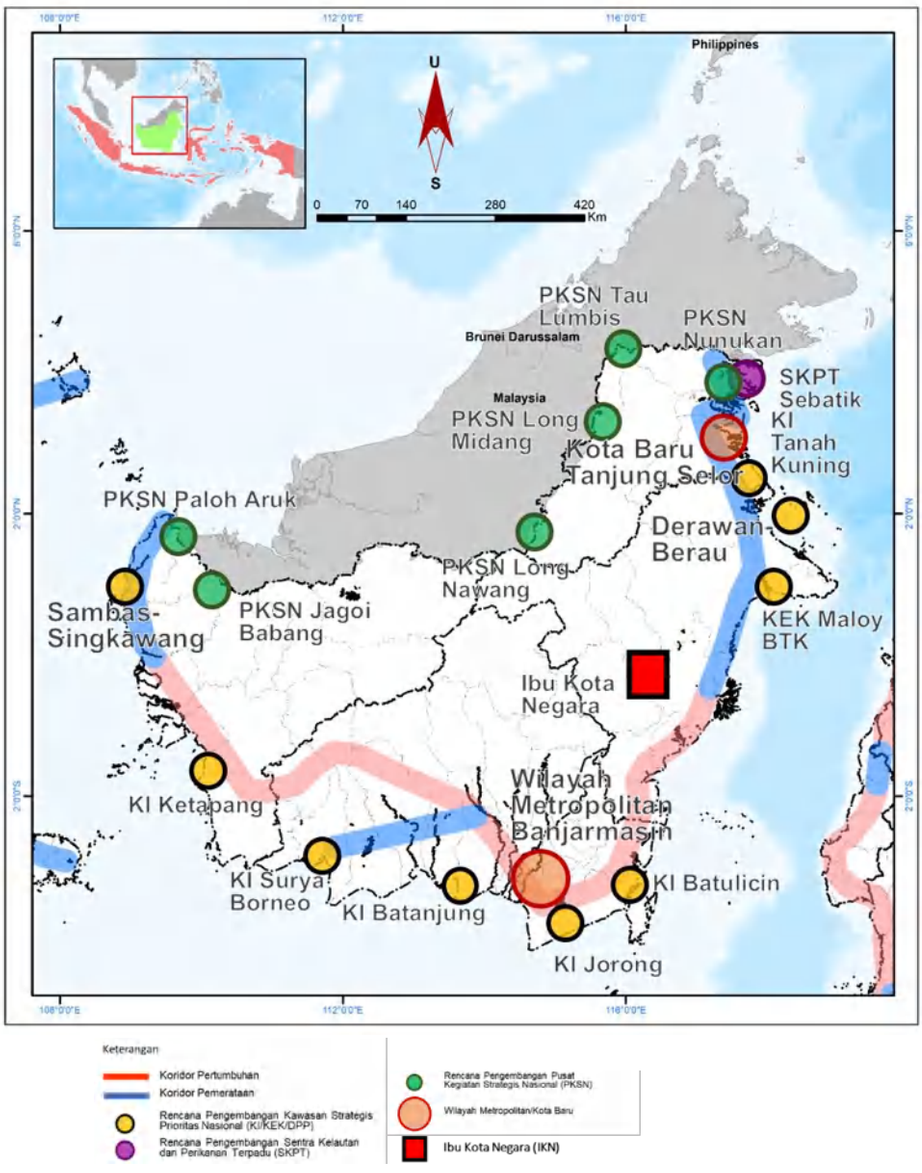

Gambar 5.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Kalimantan

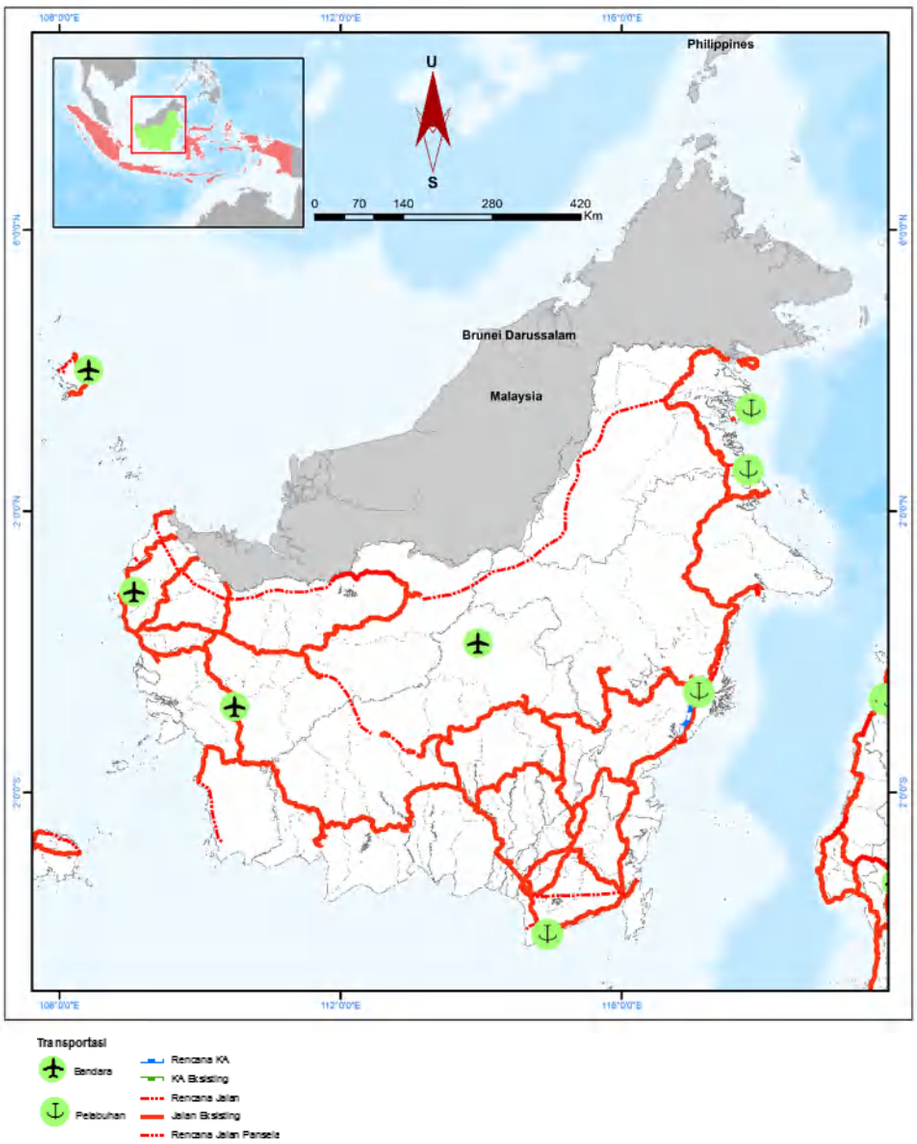

Gambar 5.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi Wilayah Kalimantan Tahun 2024

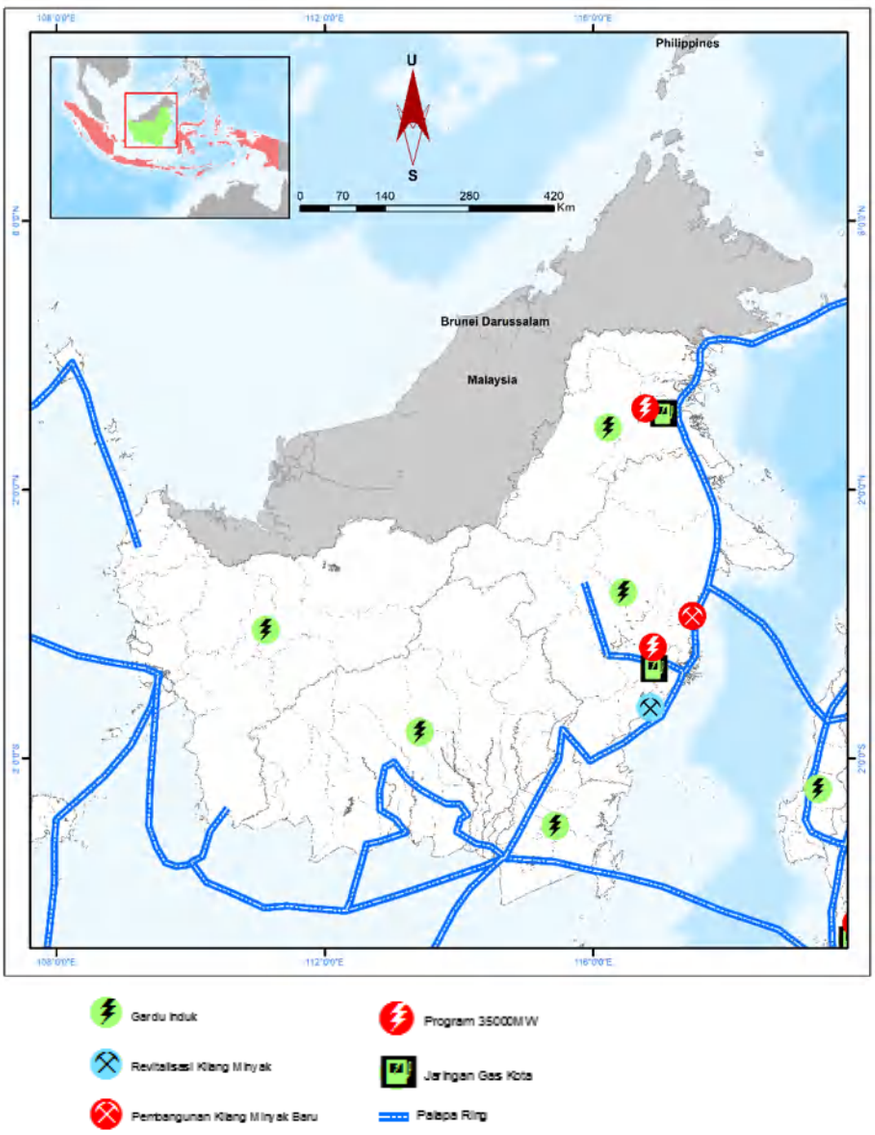

Gambar 5.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Kalimantan Tahun 2024

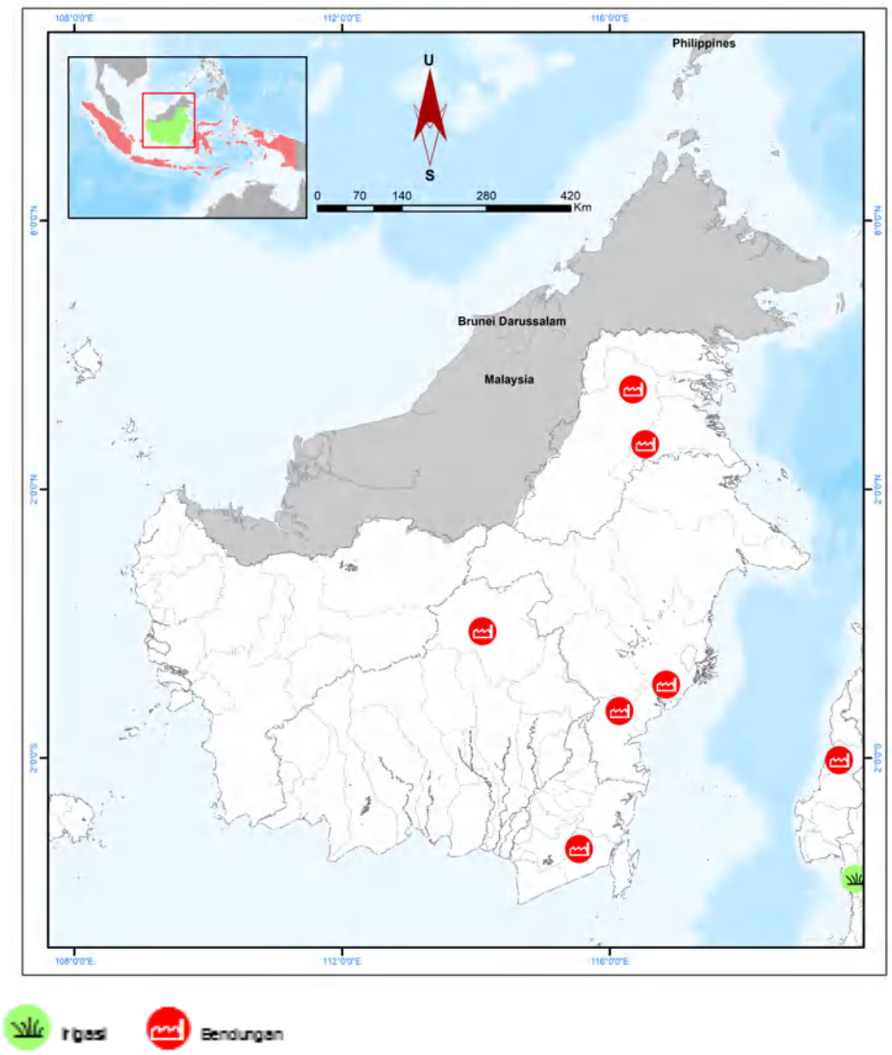

5.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan (Tabel 5.3);
2) Pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

5.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah; Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur; dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara;
3) Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;
4) Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Long Nawang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang.
5) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Timur, dan 20 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Utara;
6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan pada tahun 2023;
7) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai

target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,23 persen di Provinsi Kalimantan Barat, 3,5 persen di Provinsi Kalimantan Tengah, 4,44 persen di Provinsi Kalimantan Utara, 4,24 persen di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3,04 persen di Provinsi Kalimantan Selatan; dan

8) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
   a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan;
   b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
   c. Peningkatan konservasi hutan.

5.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan hutan, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
9) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
10) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Ulu);
11) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);
12) Penataan ruang dan lahan, melalui:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;

d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

13) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim:
a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
b. Peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;
c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
e. Peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.

14) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
c. Pengembangan energi baru terbarukan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata;
g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan
h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 5.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Kalimantan Tahun 2025

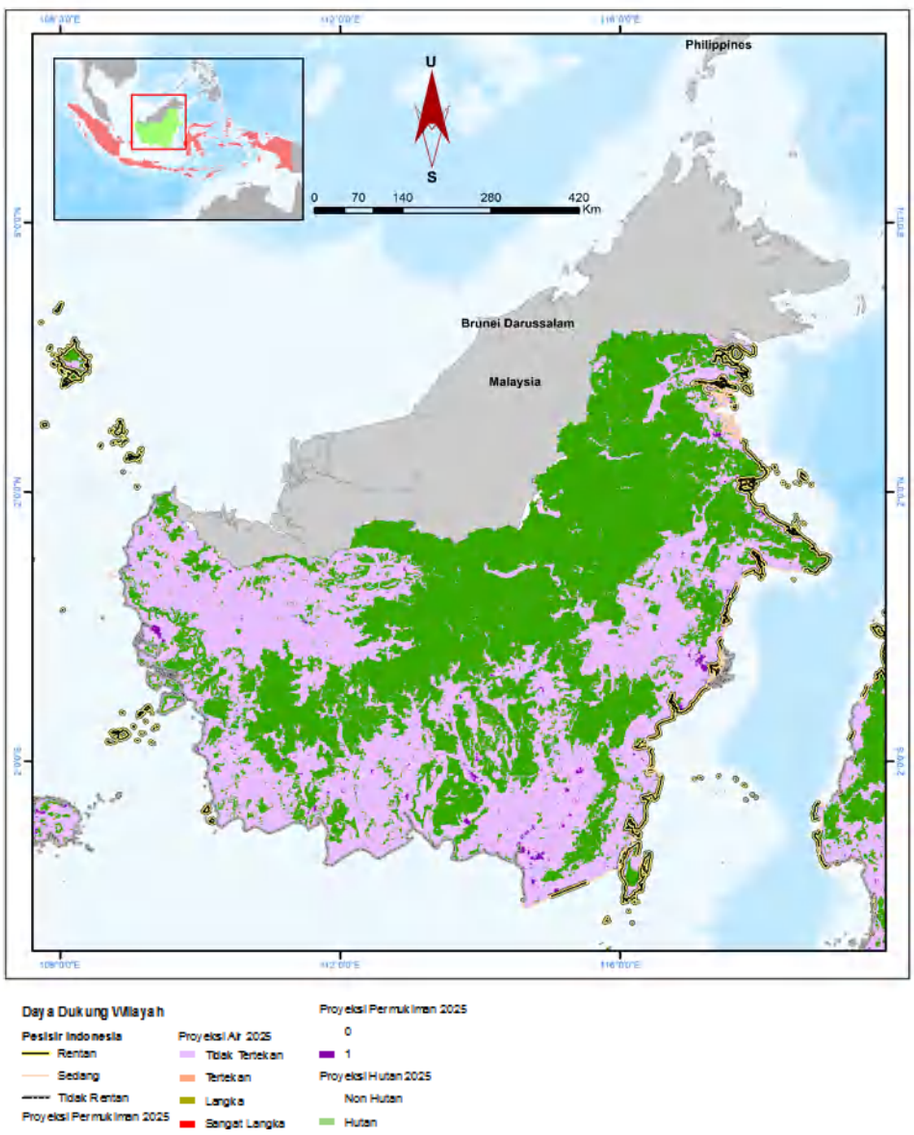

5.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Kalimantan

Selain penjabaran strategi pembangunan Wilayah Kalimantan, maka untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan, dalam kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan *Major Project* sebagai berikut:

1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);

4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan;
5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang;
7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru Bontang;
8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.

Gambar 5.7.
Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan

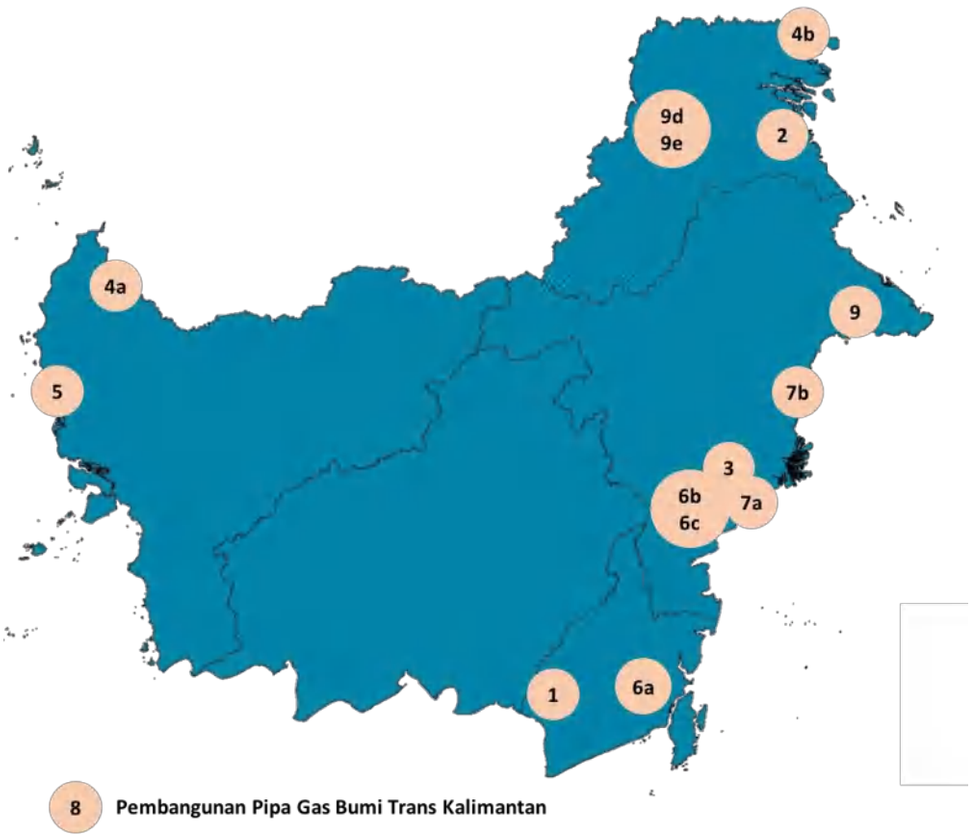

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU KALIMANTAN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	**Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)**	**5,37**	303.849,82			
	Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen)	**8,22**				
	IPM Wilayah Kalimantan	**71,22-79,25**				
	Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)	**3,29**				
Provinsi Kalimantan Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)	1 (selesai)	12.500	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Jalan Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	123	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		60	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1 (selesai)	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	250	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)		10	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Ketapang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan DPP Baru Sambas-Singkawang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat**	**>1**				
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jembatan Sambas Besar	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	1.860	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Sambas-Singkawang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0,03	9,75	Kab. Sambas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	617,31	25,60	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3199,44	68,99	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kubu Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					
Akselerasi Replanting dan Penerapar	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan bauksit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					
Optimalisasi produksi bauksit	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat**					
Optimalisasi produksi batu bara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Barat)				**Kota Pontianak, Kota Singkawang**		
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kota Singkawang (lingkup pelayanan), Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	407,20		Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat		BU
Jembatan Kapuas 3	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	300	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	602	1.064,34	Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		512,17	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		263,31	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		18,20	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		502,87	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		75,85	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		14,77	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1460 desa berkembang; 232 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,51**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**5,78**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**65,30**	**56,63**	**Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Barat (kecamatan)**	**14**	4,89	**Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,29	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		4,40	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh-Aruk**	**0,52**	277	**Kab. Sambas**		
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)		98,40	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah (unit) PLTS Roof Top yang dibangun		2,20	Kab. Sambas	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	3,20	Kab. Sambas	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Sambas	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengembangan Area Sentra Industri Lada	Luas Area kawasan industri lada yang dikembangkan (Ha)	500	4	Kab. Sambas	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	7	2,35	Kab. Sambas	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang**	**0,39**	115	**Kab. Bengkayang**		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (ha)	85	6,90	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1 (selesai)	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	4	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/ ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	0,19	47,65	Kab. Bengkayang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Bengkayang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Bengkayang	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	3	0,30	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	3	1,01	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**59,18**	311,57	**Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	812	39,13	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	812	75,83	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	669	186,72	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Ketapang, Sambas, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas**	**53.00; 47.00; NA; 45.00**	192,45	**Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,59	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,29	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab.Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab.Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat**	**65,30**	56,63	**Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,59	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,61	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	27,84	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,02	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,33	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,23	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,35**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,8**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**61**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**61**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**4.411**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**61**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**6**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.445**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	**15**	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,22			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	**15**	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	**15**	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	**15**	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	**15**	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	**15**	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	266,77			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	0,27	Pusat	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)			Kab. Ketapang	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**15**	0,60			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	14	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	15	0,55	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**15**	0,17			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	15	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**15**	0,17			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,21	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	952.995	0,73	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	32,09	Kalimantan Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	1,31	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	0,91	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah**	**>1**				
Jalan Akses KI Surya Borneo	Panjang jalan yang dibangun (km)	1	10	Kalimantan Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Surya Borneo	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batanjung	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah**	**>1**				
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Batanjung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	780,02	35,41	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	368,70	29,30	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	2806,99	177,66	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1.501,82	34,19	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Murung Raya	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Tengah, a.l: Kab. Kotawaringin barat, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Tengah)				**Kota Palangkaraya**		
Jembatan Kahayan 2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	300	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	76,80		Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah		BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	407,20		Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah		BU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	354	624,99	Provinsi Kallimantan Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		162,28	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		4,20	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1460 desa berkembang; 232 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**1,98**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**30,30**	**35,69**	**Kab. Lamandau**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**62,63**	225,02	**Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	392	29,52	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	392	54,23	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	470	131,38	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kotawaringin Barat**	**65**	79,17	**Kab. Kotawaringin Barat**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian EDM**
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	125	1,09	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	31	4,03	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	34	19,04	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun (unit)	3	0,66	Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1	13,33	Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Kotawaringin Barat	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	308.506	166,38	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah**	**30,30**	35,69	**Kab. Lamandau**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	20,99	Kab. Lamandau	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	200	0,11	Kab. Lamandau	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,83	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,30	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	200	0,13	Kab. Lamandau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Lamandau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,35**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,80**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**61**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**61**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**4.411**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**61**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**6**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Tengah	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.254,29**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	**15**	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	15	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**43**	224,40			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**15**	0,58			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	14	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	15	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**15**	0,17			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	15	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**15**	0,17			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,41	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	308.506	166,38	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	315.400	3,63	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	32,09	Kalimantan Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Batulicin	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selasa**	**>1**				
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		45	Kalimantan Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses KI Batu Licin	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	60	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Batulicin	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Tanah Bumbu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Jorong	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selasa**	**>1**				
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)		20	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses KI Jorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	60	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Jorong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Tanah Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	, Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, kab. Tanah Bumbu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	783	35,41	Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai, Kab. Tabalong, Kab. Balangan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Selatan, a.l: Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan**					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula)	**Share PDRB ADHB Metropolitan Terhadap Wilayah Pulau, Indeks Kota Berkelanjutan *)**	**6,40**	4.813,53	**Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	208,80	36.400	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Selatan)		BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	76,80		Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan		BU
Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan berbasis jalan	Sistem angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)		20	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kota Banjarmasin, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU, Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	581	1.027,21	Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin)	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		243,06	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		34,30	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		192,11	Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		22,39	Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		1,93	Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		37,14	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	17,86	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1460 desa berkembang; 232 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**2,25**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**75,03**	**40,93**	**Kab. Barito Kuala**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**63,75**	297,27	**Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	479	38,18	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	479	78,58	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	611	170,78	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	**Indeks Pembangunan Kwasan Perdesaan di Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar**	**72.00; 62.00**	287,46	**Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Banjar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Banjar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Banjar	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	344	163,76	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	247.829	181,81	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Selatan**	**75,03**	40,93	**Kab. Barito Kuala**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	25,87	Kab. Barito Kuala	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,24	Kab. Barito Kuala	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	0,96	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		1,45	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,09	Kab. Barito Kuala	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Barito Kuala	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,35**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,80**				

Kalimantan - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**61**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**61**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**4.410,69**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**61**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**6**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Selatan	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.236,72**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km^2)	2.800	79,46	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km^2)	2.800	30,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	14	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	3,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	5	1,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,89			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**14**	0,55			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**14**	0,16			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**14**	0,16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,75	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	247.829	181,81	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	15.760	0,70	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	32,09	Kalimantan Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Pembangunan DPP Baru Derawan-Berau	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur**	**>1**				
Pengembangan Bandara Kalimarau	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		28,40	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		75	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Derawan-Berau	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Berau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		40,50	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Kutai Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1 unit) (tahapan pembangunan)		1.001	Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai Kartanegara)		KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	378,32	15,49	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	2.847,48	61,78	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	207,64	4,27	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur**					
Optimalisasi produksi minyak bumi	jumlah produksi (barel)			Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan**					
ProP : Pembangunan Ibu Kota Negara			**466.040,50**	**Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara**		
Komponen Proyek K/L Non Fisik			917,60			
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RUU tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN)		3	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Pencabutan UU DKI Jakarta yang disahkan)		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara yang disusun		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara (PNBP-earmarking, KPBU, Pengelolaan Aset)		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 27 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Penyusunan peta jalan dan kebijakan pemindahan ASN ke IKN (Dokumen Peta Jalan)		2	Pusat	Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN/RB
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Kebijakan insentif ASN yang terdampak pada pemindahan IKN (Kebijakan)		2	Pusat		Kementerian PAN/RB
Penyiapan Kelembagaan Ibukota Negara	Raperpres Badan Otorita		2	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, Setkab, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan
Perencanaan Ibukota Negara	Strategi Komunikasi dan Kegiatan Public Hearingsebagai sarana sosialisasi dan penampungan aspirasi bagi Penyusunan Rencana Pemindahan Ibukota Negara yang dilaksanakan		100	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, KSP, SKP, Kementerian Kominfo
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun (Masterplan IKN, Detail Masterplan & Skematik, Siteplan & Skematik Bangunan, serta Skematik Infrastruktur Dasar)		100	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang diselesaikan: - Revisi RTR Pulau (Matek PK) - Revisi RTRW Kaltim(Matek dan Raperda) - Revisi RTRW Kukar (Matek dan Raperda) - Revisi RTRW PPU(Matek dan Raperda) - Revisi RTR Pulau (Matek dan Raperpres) - RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN (Matek dan Raperpres) - Revisi RTRWN (Matek dan RPP) - RDTR BWK I (Matek dan Raperpres) - RDTR BWK II (Matek dan Raperpres)		26,80	Pusat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang disusun		6	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional V	KLHK, Kementerian PPN/Bappenas
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 5600 Ha		2	Pusat	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang disusun		41	Pusat	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kementerian PUPR
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Ha)		36,40	Provinsi Kalimantan Timur	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	KLHK
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN (dokumen)		12,20	Pusat	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	KLHK dan Bappenas
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	1.500	137,40	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	KLHK

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1.200	95,20	Provinsi Kalimantan Timur	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN (Ha)		43,70	Provinsi Kalimantan Timur	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	KLHK
Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Skala 1:5000	Jumlah Kabupaten yang dibuat peta dasar skala 1:5000		8,87	Ibu Kota Negara	Informasi Geospasial Dasar	BIG
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan P4T di kawasan hutan di kawasan perluasan IKN (Hektar)		4,50	Ibu Kota Negara	Infrastruktur Keagrariaan	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi	Tersusunnya dokumen perencanaan transportasi di IKN (Masterplan, FS, DED)		30	Ibu Kota Negara	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kementerian Perhubungan
Mobilisasi ASN, TNI dan POLRI ke Ibu Kota Negara baru	Terlaksananya Pergeseran Personel Polri dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara (orang)		256,55	Ibu Kota Negara	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	SSDM Polri
Komponen Proyek K/L Fisik			465.122,90			
Komponen Proyek KPBU			252.460			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Gedung Pemerintahan		32.275	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Sarana Pendukung		12.505	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik		87.312	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian ESDM & Badan Usaha

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN	Pengembangan Terminal, Pengembangan dan Rehabilitasi Dermaga; Subsidi Operasional, Penetapan TTS (Traffic Separation Scheme); Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel & Fasilitas Lainnya)		1.075	Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Transportasi Laut	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian di IKN	Pembangunan Stasiun, Kereta Api Subway, KRL, Jalur KA; Pengadaan Kereta Listrik		34.086	Ibu Kota Negara	Pembangunan Transportasi Perkeretaapian	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN	Pembangunan Terminal dan Pembangunan Halte, BRT, ITS, Kelengkapan Jalan, Bus Air, Pelabuhan Penyebrangan		1.597	Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Transportasi Darat	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di kawasan IKN	Terbangunnya jalan dan jembatan (Jalan Nasional (Tol) 57 km, Jalan Nasional (Non Tol) 898 km, Fasilitas Pejalan Kaki 955km, Lajur Sepeda 468 km, Rel Kereta 72 km)		4.315	Ibu Kota Negara	Bina Marga	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Jalan Tol Kalimantan	Panjang Jalan Tol Balikpapan-Jembatan Penajam yang dibangun (km)		477	Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di kawasan IKN	Tersedianya kebutuhan air baku sesuai standar 225lt/hr/orang (m3/detik)	4,21	7.836	Ibu Kota Negara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di kawasan IKN	Terbangunnya infrastruktur Permukiman (pengendali banjir, drainase, sanitasi, dan infrastruktur energi)		19.475	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Penyediaan Perumahan Umum (KPBU)	Penyediaan Perumahan		51.507	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Komponen Proyek Swasta Murni/BUMN/BUMD			123.229,88			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara penunjang IKN	Pengembangan Bandar Udara Sepinggan dan AAP Samarinda		5.766,88	Ibu Kota Negara	Pembangunan Transportasi Udara	PT Angkasa Pura & Badan Usaha Swasta
Penyediaan Perumahan Umum (Badan Usaha Milik Negara/Swasta Murni)	Penyediaan Perumahan		113.479	Ibu Kota Negara		BUMN dan Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Kesehatan	Pembangunan sarana kesehatan swasta		1.320	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendidikan	Pembangunan Perguruan Tinggi & Lembaga Pendidikan Swasta		1.664	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendukung Kota	Pembangunan RTH (Termasuk Science Techno Park)		1.000	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Komponen Proyek APBN			89.433			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya jalan akses ke lokasi IKN		8.000	Ibu Kota Negara	Bina Marga	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya ruang terbuka hijau		2.000	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Istana Kepresidenan		480	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Kodam Khusus Ibu Kota & SAT BKO		7.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran Mabes TNI	Mabes TNI
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AD		2.250	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AD	TNI AD
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AL		6.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AL	TNI AL
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AU		10.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AU	TNI AU
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastuktur POLRI		7.352	Ibu Kota Negara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Slog Polri
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Perumahan Bagi VIP/Eselon I Setara		1.000	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Hunian Dinas		36.791	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Akses Infrastruktur dan Kawasan Inti		8.000	Ibu Kota Negara		
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Diplomatic Compound		110	Ibu Kota Negara		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastruktur Transportasi		450	Ibu Kota Negara		
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Timur)				**Kota Balikpapan, Kota Samarinda**		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kalimantan Timur		KPBU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	208,80	36.400	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)		BU
Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Jalur KA Trans Kalimantan (Balik papan - Samarinda)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20 (selesai)	450	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Kalimantan	Panjang jalan tol Samarinda-Bontang yang dibangun (km)		10.000	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha

Kalimantan - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan Lingkar Samarinda	Panjang jalan yang terbangun (km)	3,89	372,96	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	Jembatan yang dibangun (lokasi)		549,33	Kota Balikpapan - Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	462	816,82	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.921,23	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		421,88	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		104,80	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		617,26	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		97,25	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		6,36	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1460 desa berkembang; 232 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**6,00**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**58,89**	**68,38**	**Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
	Penduduk miskin di daerah tertinggal					
	Rata-rata IPM di daerah tertinggal					
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Timur (kecamatan)**	**3**	5,99	**Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,288	Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		4,4	Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Berau)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		1,31	Kab. Berau	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**63,01**	145,36	**Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara, DPP Baru Derawan-Berau**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	7,12	DPP Baru Derawan-Berau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	169	17,72	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	169	33,73	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	276	77,05	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Penajam Paser Utara, Kutai Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	**Indikator Pembangunana Kawasan Perdesaan di Kab. Berau dan Kab. Kutai Timur**	**53.00; 64.00**	123,19	**Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Berau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Berau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Berau	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Kutai Timur	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	672.476	742,64	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur**	**58,89**	68,38	**Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	41,22	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	24,58	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,83	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	500	0,75	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	500		Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,35**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,8**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**61**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**61**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**4.410,69**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**61**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**6**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Timur	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**108**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**63**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**11**	0,42			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**11**	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**11**	0,12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,81	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	672.476	742,64	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	678.868	1,45	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	32,09	Kalimantan Timur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Kawasan Pariwisata Derawan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanah Kuning	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara**	**>1**				
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		70	Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,50	600	Kalimantan Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	150	Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanah Kuning	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	112,55	7,33	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	102,01	7,94	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1309,94	28,45	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Utara, a.l Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan**					
ProP : Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor	**Jumlah penduduk, indeks kota berkelanjutan *)**	**100.000**		**Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan**		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	84	148,51	Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		2,10	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		80,17	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	1	30.000	Kab. Bulungan (Bendungan Kayan), Provinsi Kalimantan Utara		BUMN dan/atau Swasta
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	0	97,70	Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Polri
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		70	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		115	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Utara)				**Kota Tarakan**		
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	150	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kalimantan Utara		KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		6,80	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	2.875,67	269,64	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

Kalimantan - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**1460 desa berkembang; 232 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,51**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**4,64**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**54,92**	**61,64**	**Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kalimantan Utara (kecamatan)**	**20**	84,51	**Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		16,27	Kab. Nunukan	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan**	**0,44**	396	**Kab. Nunukan**		
Penanganan Jalan lingkar Nunukan	Panjang Jalan lingkar (km) yang dibangun/ditingkatkan		80	Kalimantan Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik	5	11,03	Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan			Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun		2,40	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	250	0,08	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	250	0,08	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa	Jumlah (unit) sarana prasarana industri pengolahan yang dibangun		247	Kab. Nunukan	KPBU	KPBU
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	15	5,03	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Kab. Nunukan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang**	**0,44**	1952,58	**Kab. Nunukan**		
Jalan perbatasan Kaltara	Panjang jalan yang dibangun (km)	19	1933,34	Kab. Nunukan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2,88	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Nunukan	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis**	**0,44**	18	**Kab. Nunukan**		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo

Kalimantan - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Nunukan	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,8	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang**	**0,69**	18	**Kab. Malinau**		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2	Kab. Malinau	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Malinau	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Malinau	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kab. Malinau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Malinau	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**51,88**	75,92	**Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		7,69	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		17,54	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	147	40,95	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Malinau, Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan	**Indeks Pembangunana Kawasan Perdesaan di Kab. Bulungan**		43,08	**Kab. Bulungan**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	5	1,06	Kab. Bulungan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)		1	Kab. Bulungan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bulungan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bulungan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Bulungan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	195.429	88,04	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara**	**54,92**	61,64	**Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	33,97	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	2.318,06	1,14	Kab. Bulungan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	22,17	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,27	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,70	Kab. Bulungan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	2.318,06	0,39	Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,35**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**42,8**				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**61**				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**61**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**4.410,69**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**61**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**6**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Utara	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**367**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah NLP peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	6	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

Kalimantan - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	6	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	6	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	1,67			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**6**	0,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	6	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**6**	0,06			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	6	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**6**	0,06			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,803	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	14,45	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	195.429	88	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	143.579	1,45	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	32,09	Kalimantan Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

6. PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

6.1 Target Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	3,70	4,00	4,70	5,20	5,60	5,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,97	15,32	13,34	13,00	12,35	11,71	11,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,36	6,20	6,20	6,00	5,90	5,50	5,20
Sumatera Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,18	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	8,83	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56	5,41	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Sumatera Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,00	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65	6,42	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,33	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,80	3,70	4,30	4,60	4,90	5,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39	7,08	6,25	5,85	5,55	5,25	4,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20	5,97	6,00	5,80	5,70	5,20	4,90
Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71	4,30	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92	7,60	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	4,19	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	5,40	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,8	12,71	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,23	4,48	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90
Bengkulu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,10	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,43	15,23	13,40	13,00	12,25	10,95	10,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51	3,39	3,50	3,30	3,10	2,70	2,30
Lampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,14	12,62	11,56	11,27	10,35	9,68	9,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06	4,03	3,80	3,60	3,40	3,00	2,70
Kepulauan Bangka Belitung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	3,60	3,90	4,60	5,10	5,50	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	4,62	4,40	4,16	3,85	3,35	3,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,65	3,62	3,30	3,10	3,00	2,50	2,20
Kepulauan Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	4,50	4,70	5,80	6,40	6;80	7,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20	5,90	5,30	4,95	4,54	4,15	3,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12	6,91	6,90	6,70	6,50	6,10	5,80

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sumatera, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realiasasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp triliun	66,28	64,12	82,90	89,39	97,16	105,84	121,49
Sumatera Utara	Rp triliun	224,16	242,90	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45
Sumatera Barat	Rp triliun	66,47	70,89	83,41	90,60	99,22	109,70	122,24
Riau	Rp triliun	201,26	226,57	242,31	262,79	292,28	318,99	359,70
Jambi	Rp triliun	41,74	42,92	49,77	54,30	60,12	66,78	75,64
Sumatera Selatan	Rp triliun	173,16	177,13	199,90	220,02	244,14	271,15	309,00
Bengkulu	Rp triliun	26,06	28,54	31,81	34,75	38,80	42,92	48,31
Lampung	Rp triliun	100,48	109,49	120,71	131,84	147,70	164,12	186,17
Kepulauan Bangka Belitung	Rp triliun	15,98	15,51	19,30	20,96	23,24	25,71	28,52
Kepulauan Riau	Rp triliun	92,77	99,21	110,37	120,47	135,45	151,95	171,03

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

6.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Aceh	1	Kota Sabang*	Jambi	1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2	Kota Banda Aceh*		2	Kabupaten Muaro Jambi
	3	Kabupaten Aceh Besar		3	Kota Jambi*
	4	Kabupaten Pidie	Sumatera Selatan	1	Kabupaten Musi Banyuasin

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
	5	Kabupaten Pidie Jaya		2	Kabupaten Banyuasin
	6	Kabupaten Bireuen		3	Kota Palembang
	7	Kota Lhoksumawe*		4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	8	Kabupaten Aceh Utara		5	Kabupaten Ogan Hilir
	9	Kabupaten Aceh Timur		6	Kabupaten Muara Enim
	10	Kota Langsa*		7	Kota Prabumulih*
	11	Kabupaten Aceh Tamiang		8	Kabupaten Empat Lawang
Sumatera Utara	1	Kabupaten Langkat		9	Kabupaten Lahat
	2	Kota Binjai		10	Kabupaten Musi Rawas
	3	Kota Medan		11	Kota Lubuk Linggau*
	4	Kabupaten Deli Serdang	Bengkulu	1	Kabupaten Rejang Lebong
	5	Kabupaten Karo		2	Kabupaten Kepahiang
	6	Kabupaten Serdang Bedagai		3	Kabupaten Bengkulu Tengah
	7	Kabupaten Batubara		4	Kota Bengkulu*
	8	Kabupaten Simalungun	Lampung	1	Kabupaten Tulangbawang
	9	Kota Tanjung Balai		2	Kabupaten Lampung Tengah
	10	Kabupaten Asahan		3	Kota Metro
	11	Kabupaten Labuhan Batu Utara		4	Kabupaten Lampung Selatan
	12	Kabupaten Labuhan Batu		5	Kota Bandar Lampung*
	13	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		6	Kabupaten Pesawaran
Sumatera Barat	1	Kabupaten Lima Puluh Koto		7	Kabupaten Lampung Timur
	2	Kota Payakumbuh	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Barat
	3	Kabupaten Agam		2	Kabupaten Bangka
	4	Kota Bukittinggi*		3	Kota Pangkal Pinang*
	5	Kota Padang Panjang	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Karimun
	6	Kabupaten Padang Pariaman		2	Kota Batam
	7	Kota Padang*		3	Kabupaten Bintan
Riau	1	Kabupaten Rokan Hilir		4	Kota Tanjung Pinang*
	2	Kota Dumai*			
Riau	3	Kabupaten Bengkalis			
	4	Kabupaten Siak			
	5	Kota Pekanbaru*			
	6	Kabupaten Pelalawan			
	7	Kabupaten Indragiri Hulu			
	8	Kabupaten Kampar			
Koridor Pemerataan					
Aceh	1	Kabupaten Aceh Tengah	Bengkulu	1	Kabupaten Mukomuko
	2	Kabupaten Aceh Barat		2	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Bener Meriah		3	Kabupaten Bengkulu

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
					Selatan
	4	Kabupaten Nagan Raya		4	Kabupaten Seluma
	5	Kabupaten Simeulue		5	Kabupaten Kaur
Sumatera Utara	1	Kota Pematang Siantar*	Lampung	1	Kabupaten Lampung Utara
	2	Kabupaten Samosir		2	Kabupaten Pringsewu
	3	Kabupaten Toba Samosir		3	Kabupaten Tanggamus
	4	Kabupaten Dairi		4	Kabupaten Lampung Barat
	5	Kabupaten Phakphak Barat		5	Kabupaten Pesisir Barat
	6	Kabupaten Hubang Hasundutan	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Tapanuli Utara		2	Kabupaten Bangka Selatan
	8	Kabupaten Tapanuli Tengah		3	Kabupaten Belitung
	9	Kota Sibolga*		4	Kabupaten Belitung Timur
	10	Kota Gunung Sitoli*	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kepulauan Anambas
	11	Kabupaten Nias		2	Kabupaten Natuna
	12	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Barat	1	Kabupaten Tanah Datar
	13	Kabupaten Nias Barat		2	Kabupaten Solok
	14	Kabupaten Nias Utara		3	Kota Solok*
Jambi	1	Kabupaten Serolangun		4	Kabupaten Pesisir Selatan
	2	Kabupaten Bungo		5	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	3	Kabupaten Batang Hari			
	4	Kabupaten Tebo			
	5	Kabupaten Merangin			
	6	Kabupaten Kerinci			
	7	Kota Sungai Penuh			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

6.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao,

kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang difokuskan pada:

a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi;
b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya;
d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi;
e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan batubara;
f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi;
g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas;
h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan perikanan tangkap; dan
j. Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap.

2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP 571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda;

4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues

Gambar 6.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera

6.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam-Bintan-Karimun, dan KPBPB Sabang;
2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan;
4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.

b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.

Gambar 6.2.
Peta Sebaran Kawaasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera

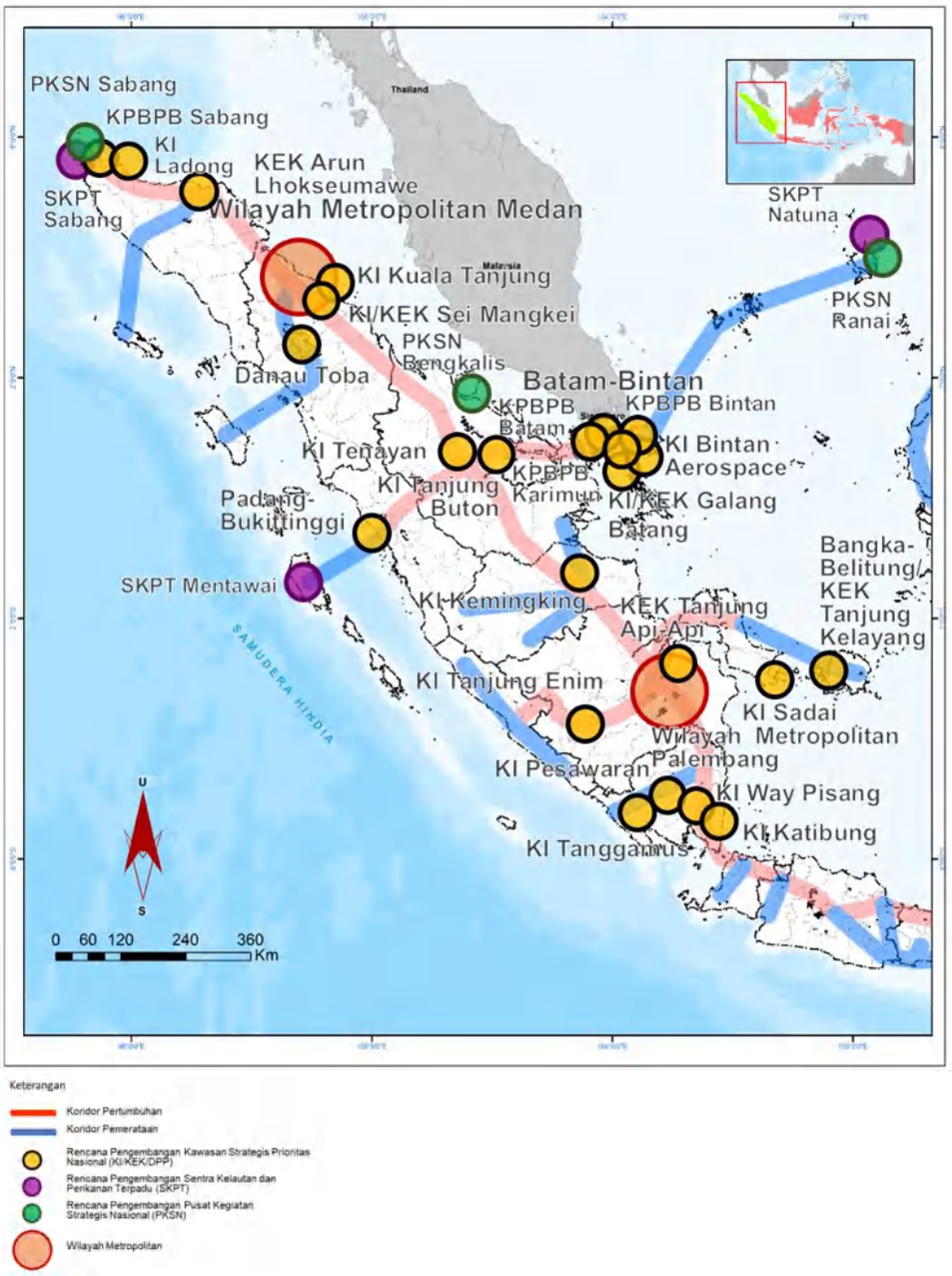

Gambar 6.3.
Peta Jaringan Infrastrukur Transportasi Wilayah Sumatera Tahun 2024

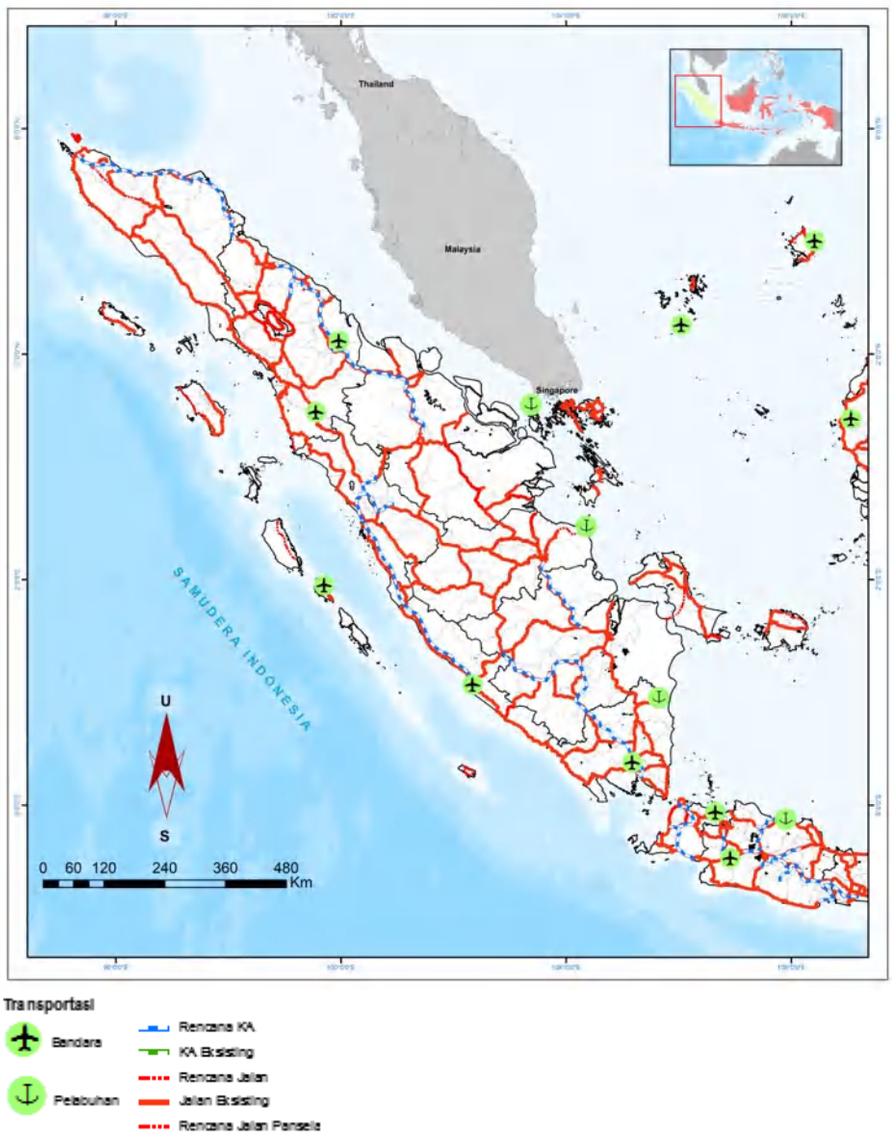

Gambar 6.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi Wilayah Sumatera Tahun 2024

Gambar 6.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Sumatera Tahun 2024

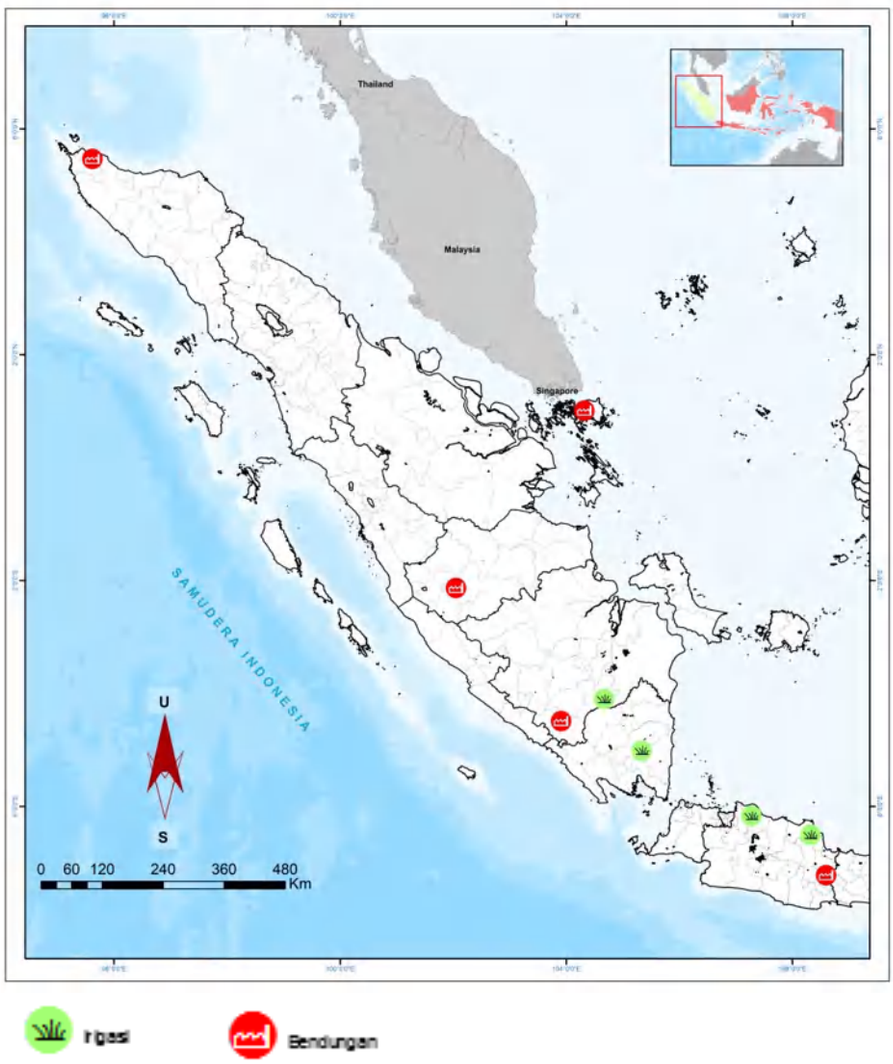

6.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera serta Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padang, Solok, Bukittinggi, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Prabumulih, Lubuk Linggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan Batam (Tabel 6.3);
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

6.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan, dan 4 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sumatera berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Aceh Singkil di Provinsi Aceh; Seluma di Provinsi Bengkulu; Lampung Barat di Provinsi Lampung; Pasaman Barat dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, dan Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 4 kecamatan lokpri di Provinsi Aceh, 2 kecamatan lokpri di

Provinsi Sumatera Utara, 15 kecamatan lokpri di Provinsi Riau, dan 35 kecamatan lokpri di Provinsi Kepulauan Riau;

4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai;

5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Banyuasin, KPPN Muaro Jambi, KPPN Belitung, KPPN Bangka Selatan, KPPN Belitung Timur, KPPN Bintan Kepulauan, KPPN Karimun, KPPN Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji;

7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji;

8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 10 Kabupaten/Kota di Aceh, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 4 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di Jambi, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 4 Kabupaten di Bengkulu, 6 Kabupaten di Lampung, 3 Kabupaten di Bangka Belitung dan 3 Kabupaten di Kepulauan Riau yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera pada tahun 2023;

9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga

Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,75% di Provinsi Aceh, 6,83% di Provinsi Sumatera Utara, 4,55% di Provinsi Sumatera Barat, 12,09% di Provinsi Bengkulu, 10,01% di Provinsi Lampung, 5,7% di Provinsi Riau, 4,21% di Provinsi Kepulauan Riau, 5,74% di Provinsi Jambi, 3,44% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 10,38% di Provinsi Sumatera Selatan; dan

10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
    a. Peningkatan ketahanan wilayah pantai barat Pulau Sumatera;
    b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
    c. Peningkatan konservasi hutan; dan
    d. Dukungan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

6.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh secara transparan, akuntabel, efisien,

efektif dan adil, dan berkelanjutan;

12) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan) dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai); dan;

13) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Ternggara, Kabupaten Subulussalam), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah), Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kab, Indragiri Hilir);

14) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
    d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    i. Pembentukan bank tanah;
    j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

15) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.

16) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 6.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sumatera 2025

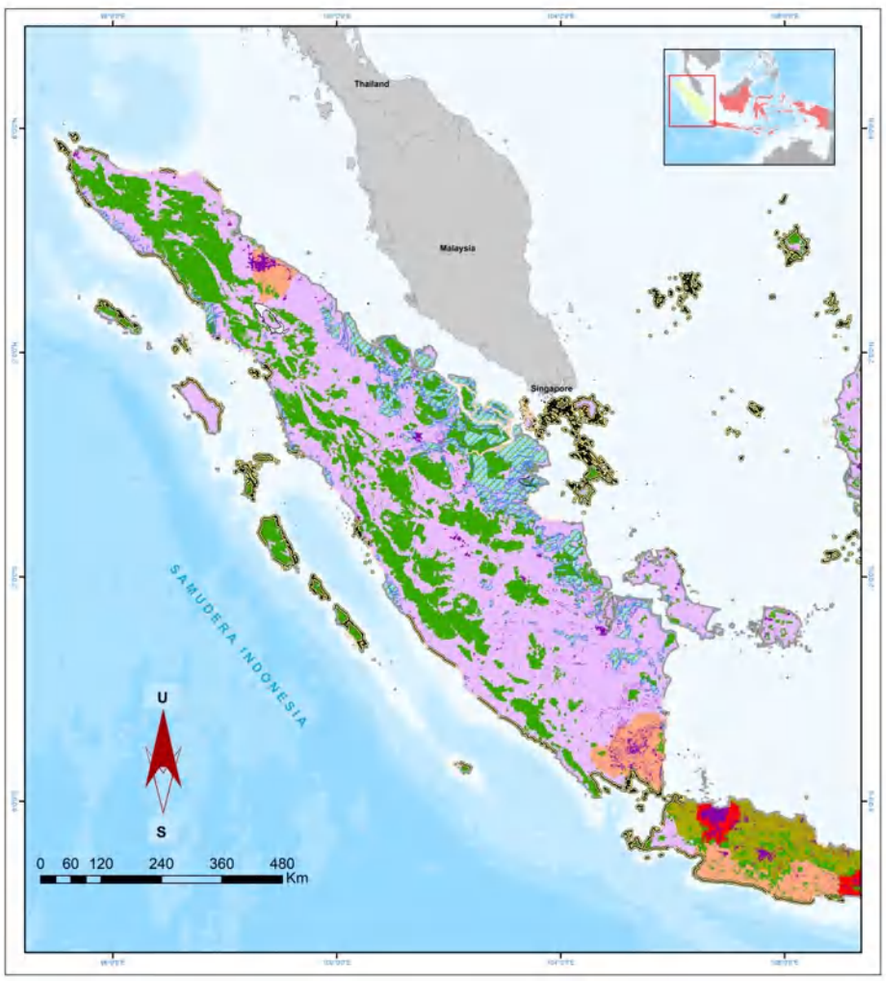

Daya Dukung Wilayah

Pesisir Indonesia
Rentan
Sedang
Tidak Rentan

Proyeksi Permukiman 2025

Proyeksi Air 2025
Tidak Tertekan
Tertekan
Langka
Sangat Langka

Proyeksi Permukiman 2025
0
1

Proyeksi Hutan 2025
Non Hutan
Hutan

6.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Sumatera

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project)* adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan;
3) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional;
5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Gambar 6.7.
Peta Sebaran Rencana *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sumatera

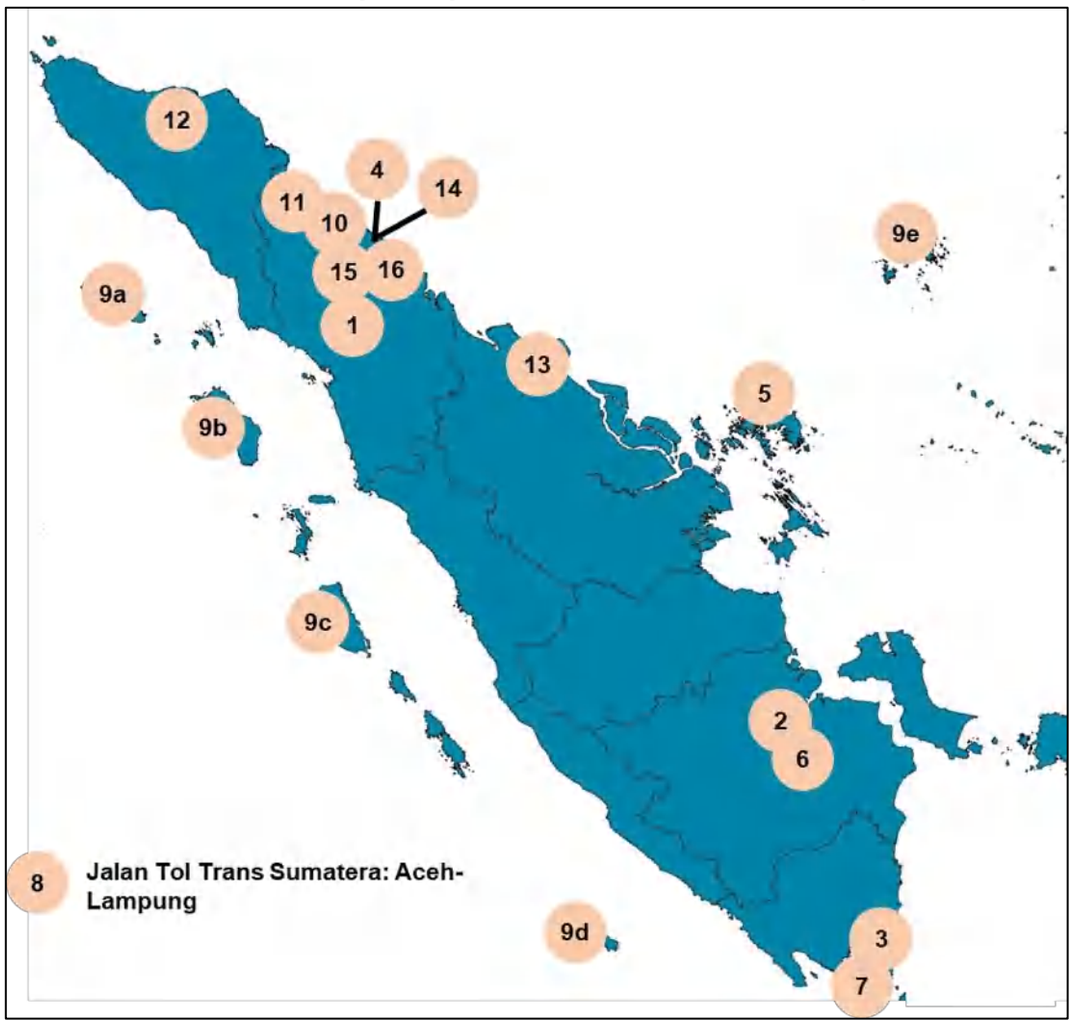

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU SUMATERA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 1: Pembangunan Wilayah Sumatera	**Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)**	**5,58**				
	Share PDRB Wilayah Sumatera (persen)	**21,83**				
	IPM Wilayah Sumatera (min-maks)	**71,90-78,19**				
	Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen)	**5,76**				
Provinsi Aceh						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh**	**>1**				
Pelabuhan Nasional Balohan	Pembangunan pelabuhan		89,06		Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang
Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	Realisasi fisik pembangunan jembatan		300	Kota Sabang	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor kepelabuhanan	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Jasa Kepelabuhanan (%)	80	24	Kota Sabang	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		60	Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh**	**>1**				
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhoksemawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (lanjutan)	458,50	Aceh	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Banda Aceh - Sigli yang dibangun (km)			Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Lhokseumawe - Langsa yang dibangun (km)	45		Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	30 (lanjutan)	1.050	Aceh	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun (km)		48	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Arun Lhokseumawe	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0,09	29,25	Kota Lhoksumawe	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Ladong	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Ladong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	523,38	32,97	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab. Bener Meriah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	113,86	9,16	Provinsi Aceh, Kab. Pidie	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	948,03	42,74	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tamiang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1030,66	22,59	Provinsi Aceh, Kab. Simeule, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Barat Daya, Kota Sabang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Singkil, Kab. Nagan Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Aceh, a.l: Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Aceh	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Aceh	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh**					
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan MIGAS Aceh	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Aceh)				**Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Aceh		KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhoksemawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (lanjutan)	458,50	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	30 (lanjutan)	1.050	Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		60	Kota Sabang, Provinsi Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Medan) yang dibangun (km)	45	75.318	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Lingkar Pulau Weh	Panjang jalan yang dibangun (km)		125	Kota Sabang, Provinsi Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	634	1.120,10	Provinsi Aceh	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		102,50	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		204,86	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		6,28	Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		126,23	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,52**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**14,26**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**61,69**	**74,64**	**Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**61,95**	1.025,08	**Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	546	141,28	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,95	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	546	278,21	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.134	596,07	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Aceh (kabupaten)**	**4**	14,84	**Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi		6	Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	1,44	Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang**	**0,52**	19,60	**Kota Sabang**		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang	5	11,28	Kota Sabang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kota Sabang	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kota Sabang	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,13	Kota Sabang	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kota Sabang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur**	**74**	79,17	**Kab. Aceh Timur**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian EDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kabupaten Aceh Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kabupaten Aceh Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kabupaten Aceh Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Aceh Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Aceh Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Aceh Timur	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	401.443	349,67	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh**	**61,69**	96,24	**Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	57,80	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.563,65	1,88	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	10,83	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,49	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	60	0,63	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.563,65	1,00	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	60		Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Aceh	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.924**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	24	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	20	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,89			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	24	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	24	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**36**	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**24**	1,93			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	23	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	24	1,04	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**24**	0,55			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	24	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**24**	0,70			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	24	0,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Peningkatan penataan hubungan pusat daerah					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,04	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.		15,04			
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus		2,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	7,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus	4	5	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	401.443	349,67	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	38.376	0,38	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) (satker)	22	32,10	Aceh	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Kec. Bener Meriah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	2,32	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	5,21	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	3,33	Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar Aceh Darrusalam	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara**	**>1**				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panajng jalan tol Tebing tinggi - Kisaran yang dibangun (km)	35	8,69	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Jalan Akses KI Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)	10	30	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Sei Mangkei	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		29,25	Kab. Simalungun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1 unit) (tahapan pembangunan)	operasi	1.000	Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun)		KPBU
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7,00	5,95	Kab. Simalungun	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kuala Tanjung	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kuala Tanjung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Batu Bara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Danau Toba dan sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara**	**>1**				
Jalan Akses KSPN Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,50	1.333	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan By Pass Balige	Panjang jalan yang dibangun		135	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		124,23	Sumatera Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)		295,30	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	305	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	1.105	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Danau Toba dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		6,50	Kab. Toba Samosir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3	10,64	Provinsi Sumatera Utara	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	554,48	25,03	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	602,71	37,85	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Proinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kab. Labuhanbatu Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	126,23	5,07	Proinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Utara, a.l: Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tanjung Balai, Kota Medan, Kab. Asahan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan (Mebidangro)	**Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera**	**10.82**		**Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo**		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Diversifikasi Energi Perkotaan	Jumlah Pembangunan Pemanfaatan PV Rooftop (MW)		300	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		PLN
	Jumlah Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum/SPLU (Unit)	200	43.513	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		PLN
Pengembangan jaringan listrik	Jumlah gardu induk yang dibangun	3		Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara		Dinas Pertambangan dan Energi, PLN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	3.000	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	670	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.330	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	125	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
c. Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)		244,30	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Bandara Kualanamu	Jumlah bandara yang dikembangkan		200,0	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	1	25.000	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Medan) yang dibangun (km)	45	75.318	Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Pekanbaru) yang dibangun (km)	55	65.659	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan	Panjang jalan yang dibangun (km)	9	300	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		148,80	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Fly Over Pinang Baris	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		151,61	Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.736	3.069,25	Provinsi Sumatera Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.922	Kota Medan, Kab. Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		700	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		82,60	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		1.321,61	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		261,1	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		44,16	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0,58	870	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	6,28	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Utara)				**Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli**		
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	305	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	1.105	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub,KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga yang dibangun (km)	13	10.000	Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Siantar By Pass	Panjang jalan yang dibangun (km)		96	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		169	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		49,90	Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		152,69	Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		26,60	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,18	54,28	Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**2 (terentaskan 2 kabupaten)**		**Prov. Sumatera Utara: Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias;**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**6,25**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 19,6 - 20,1%; 2. 64,9 - 65,4**	1898,10	**Kab Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan**	**1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal; 4. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 5. Program Pemberdayaan Sosial; 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 7. Program Penanganan Fakir Miskin; 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 9. Program Penyelenggaraan Jalan**	**1. Kementerian Perdagangan; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian PUPR; 6. Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan**
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat (paket)		18,90	Kab. Nias Selatan (Kec. Telukdalam, Maniamolo, dan Gomo, Ulususua)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia (paket)	40	43,75	Kab. Nias Selatan (Kec. Umbunasi, Susua, Ulunoyo, Huruna, Simuk, Hibala, Pulau-Pulau Batu Barat)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	3	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)		4	Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal (%)		4,50	Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	57	2,27	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)		6,60	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)		1,76	Kab. Nias Selatan	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	36.329	967,94	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	66.142	595,28	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,40	238,81	Kab. Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Trans Nias (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	305,92	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Nias Barat, Nias Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Puksesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun (unit)		DAK	Kab. Nias Selatan		Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Sumatera Utara (kecamatan)**	**2**	6,04	**Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	1,44	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun (paket)	10	4,40	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**63,33**	886,94	**Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, DPP Danau Toba**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** **2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT** **2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	24,91	DPP Danau Toba	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	662	119,34	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,95	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	662	234,73	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.784	498,13	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	5	0,76	Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir**	**75.00; 75.00**	90,13	**Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Samosir	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	20	3,83	Kab. Toba Samosir	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	4	1,26	Kab. Toba Samosir	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	544.330	474,39	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,30**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Utara	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**2.694**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	34	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	5,25			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	34	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	34	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**45**	2,27			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	34	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**34**	2,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	33	0,61	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	34	1,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**34**	0,79			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	34	0,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**34**	0,85			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	34	0,51	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,84	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	4,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	544.330	474,39	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	421.366	3,33	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	26	32,10	Sumatera Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	11	3,57	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	4	Sumatera Utara (Nias Barat dan Nias Selatan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	10	8,48	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan DPP Baru Padang-Bukittinggi	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat**	**>1**				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang yang dibangun (km)		7,87	Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	10	1.037	Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)		36	Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Padang-Bukittinggi	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami			Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	110,34	8,55	Provinsi Sumater Barat, Kab. Solok	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	89,85	5,49	Provinsi Sumater Barat, Kab. Solok	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	678,06	30,53	Provinsi Sumater Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	157,76	3,66	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Barat, a.l Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Barat)				**Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi**		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)	1,50	36	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	10	1.037	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	6 (lanjutan)	207,80	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VI (Pekanbaru-Padang) yang dibangun (km)		36.594	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	651	1.150,97	Provinsi Sumatera Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		281	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		19,70	Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		553,04	Kota Padang, Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		68,60	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		14,30	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,26	78,50	Kota Padang, Kota Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. Sumatera Barat : Kab. Kepulauan Mentawai;**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**5,00**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**76,10**	**26,38**	**Kab. Pesisir Selatan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 11 - 11,5%; 2. 63,2 - 63,7**	902,02	**Kab. Kepulauan Mentawai**	**1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; 3. Program Penyelenggaraan Jalan 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi; 6. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika; 7.Program Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 10. Program Penanganan Fakir Miskin; 11. Program Pengelolaan Ruang Laut;**	**1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian PUR; 3. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Kominfo; 4. Kementerian Desa PDTT; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		465	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		30	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Jalan Trans Mentawai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	11	716,51	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR/Pemda
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,37	112,14	Kab. Kepulauan Mentawai*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia (paket)	2	2,19	Kepulauan Mentawai (Desa Sinaka, Desa Bulasat, Desa Silabu, Desa Matotonan, Desa Paskiat Taileleu, Desa Kature)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (unit)	14	35	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika	Kementerian Kominfo
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)		1	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)		1	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal (%)		4,42	Kab. Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal (unit)		1,30	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)		2,40	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	96	2,45	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	5.122	94,50	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9.273	83,46	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai (tingkat kemandirian (skala 1 - 5))	4	11,08	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Pagai Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**69,99**	164,54	**Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, DPP Baru Bukittinggi-Padang**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	8,91	DPP Baru Bukittinggi-Padang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		17,16	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		33,15	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	343	95,74	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Pasaman, Pasaman Barat, Solok	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Pagai Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam**	**57.00**	45,37	**Kab. Agam**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	11	3,19	Kab. Agam	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Agam	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Agam	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Agam	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Agam	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	306.642	277,6	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat**	**76,10**	26,38	**Kab. Pesisir Selatan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	12,45	Kab. Pesisir Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,16	Kab. Pesisir Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	0,96	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	639	0,46	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,01	Kab. Pesisir Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	639		Kab. Pesisir Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**2.228**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	20	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	3,13			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	6	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	20	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	20	0,27		Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	20	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**93**	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	20	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**20**	1,12			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	19	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	20	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**20**	0,51			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	20	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**20**	0,64			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	20	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,89	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	306.642	277,59	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	71.045	0,69	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	20	32,10	Sumatera Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2,00	Sumatera Barat (Kep Mentawai)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8,24	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	3,16	Sumatera Barat (KSN TN Kerinci Seblat, KSN Danau Maninjau)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Riau						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tenayan	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau**	**>1**				
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanjung Buton	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanjung Buton	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13,00		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,66	Provinsi Riau, Kab. Pelalawan, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	918,61	41,51	Provinsi Riau, Kab. Kuantang Singingi, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kepulauan Meranti	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	466,72	10,38	Kab. Indragiri Hilir	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	425,08	26,86	Kab. Kepulauan Meranti	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Riau	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau**					
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi			Kab. Rokan Hilir	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Riau)				**Kota Dumai, Kota Pekanbaru (PKN)**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Riau		KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20	1.215	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Pekanbaru) yang dibangun (km)	55	65.659	Kota Dumai, Kota Pekanbaru (Provinsi Riau)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VI (Pekanbaru-Padang) yang dibangun (km)		36.594	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III (Pekanbaru-Palembang) yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	844	1.491,31	Provinsi Riau	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		476	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		136	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		20,40	Kota Dumai, Kota Pekanbaru (Provinsi Riau)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		97,41	Kota Dumai, Provinsi Riau	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,59**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**3,81**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis**	**0,59**	12,61	**Kab. Bengkalis**		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		4	Kab. Bengkalis	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Bengkalis	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		2,20	Kab. Bengkalis	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Bengkalis	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Bengkalis	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Bengkalis	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Bengkalis	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Riau (kecamatan)**	**15**	105,04	**Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir**		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	7	1,01	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,13	86,23	Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		17,60	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupat, Kec. Rupat Utara, Kec. Bandar Laksamana,Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	3	22,50	Pulau Rupat, Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**65,68**	245,32	**Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		31,22	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		57,43	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	527	147,23	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Rokan Hulu, Kampar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,30**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Riau	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.964**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	13	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	13	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	13	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**51**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**13**	0,97			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	12	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	13	0,38	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**13**	0,37			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	13	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minima	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**13**	0,53			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	13	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,04	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	201.964	92,87	Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	282.519	2,76	Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Riau	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	2,23	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	5,23	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Jambi						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kemingking	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jambi**	**>1**				
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	80	Jambi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	600	Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses KI Kemingking	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	50	Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	100	Jambi	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kemingking	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Muaro Jambi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	179,57	7,33	Provinsi Jambi, Kab, Kerinci	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	1846,14	83,64	Provinsi Jambi, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	429,54	2,44	Provinsi Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	585,76	37,24	Provinsi Jambi, Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Muaro Jambi	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jambi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jambi)				**Kota Jambi**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jambi		KPBU

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Jambi, Provinsi Jambi		BUMN
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20 (lanjutan)	550	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III (Pekanbaru-Palembang) yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	465,5	823,00	Provinsi Jambi	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		126	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		206	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		25	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		265	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		36	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		9	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**3,06**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**37,47**	**40,58**	**Kab. Bungo**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**65,39**	222,74	**Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	65	27,79	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	65	57,33	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	459	128,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kerinci, Tanjung Jabung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi**	**54.00**	124,65	**Kab. Muaro Jambi**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Muaro Jambi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Muaro Jambi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Muaro Jambi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	442.371	280,2	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi**	**37,47**	40,58	**Kab. Bungo**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,42	Kab. Bungo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)		3,19	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	12,33	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,64	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bungo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jambi	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.335**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32		Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	12	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	12	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	**0,78**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**12**	0,85			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	11	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**12**	0,33			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	12	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**12**	0,13			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,82	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	442.371	280,21	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	353.625	3,46	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	32,10	Jambi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	2	Jambi (Kab Sarolangun)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,33	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	6,38	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,57	Jambi (KSN Cagar Budaya Muaro Jambi)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Sumatera Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Percepatan Operasionalisasi KEK Tanjung Api-api	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan**	**>1**				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Indralaya - Muara Enim yang dibangun (km)		10,29	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau yang dibangun (km)		14,59	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Sumatera Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (KPBU)
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	80	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	8 (selesai)	700	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Tanjung Api-Api	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanjung Enim	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanjung Enim	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Muara Enim	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan akses KI Tanjung Enim	Panjang jalan yang dibangun (km)		85	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	8 (selesai)	700	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	836,21	53,11	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	3943,80	178,27	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Musi Rawas Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	514,02	20,76	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	491	3,05	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1018,46	21,98	Proinsi Sumatera Selatan, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Empat lawang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan**					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (ton)			Kab. Muara Enim	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi minyak dan gas	jumlah produksi (barel)			Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang (Patungraya Agung)	**Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera**	**10,82**		**Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik		0,72	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Diversifikasi Energi Perkotaan	Jumlah Pembangunan Pemanfaatan PV Rooftop (MW)		300	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		PLN
	Jumlah Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum/SPLU (Unit)	200	43.513	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		PLN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		Pemda (DAK)
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III Pekanbaru-Palembang yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VII Palembang-Bengkulu yang dibangun (km)	0	36.176	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.054	1.862,60	Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)		5	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		251	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		57	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		694,10	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		136,10	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		22,10	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		590,87	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan		2,50	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kemenparekraf
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	17,81	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Selatan)				**Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau**		
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		69	Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 90

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		137,20	Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		5,30	Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,17	51,34	Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. Sumatera Selatan : Musi Rawas Utara**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**9,35**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**64,97**	**73,37**	**Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**62,41**	448,74	**Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	12	60,94	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 91

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	12	114,75	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	943	263,50	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Ogankomering Ilir, Muara Enim	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan**	**64,97**	73,37	**Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	41	14,97	Kab. Banyuasin	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,59	Kab. Banyuasin	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Banyuasin	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	842.774	501,3	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	**Peningkatan Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan**	**64,97**	73,37	**Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	38,58	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,47	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	30,82	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	2,88	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,58	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,04	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Selatan	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**2.459**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²)	2.800	103,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km²)	2.800	39,64	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**58**	565,39			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**18**	1,47			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	18	0,73	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**18**	0,45			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**18**	0,61			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,81	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	1,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 101

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	842.774	501,25	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	551.837	5,39	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	16	32,10	Sumatera Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,35	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,48	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,66	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Bengkulu						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	267,61	16,91	Provinsi Bengkulu, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	595,89	26,98	Kab. Bengkulu Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,05	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bengkulu)				**Kota Bengkulu**		
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	6 (lanjutan)	207,80	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VII Palembang-Bengkulu yang dibangun (km)		36.176	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	263	464,10	Provinsi Bengkulu	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		43,60	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		107	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		149,56	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		9,70	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		8,06	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**11,54**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**76,46**	**42,10**	**Kab. Bengkulu Utara**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 104

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**61,93**	216,62	**Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	324	27,90	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	324	56,30	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	440	122,86	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 105

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kaur, Bengkulu Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Enggano	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah**	**58.00**	124,07	**Kab. Bengkulu Tengah**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Bengkulu Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Bengkulu Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bengkulu Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bengkulu Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Bengkulu Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	149.861	109,33	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu**	**76,46**	**42,10**	**Kab. Bengkulu Utara**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,45	Kab. Bengkulu Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,18	Kab. Bengkulu Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	16,69	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		0,48	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,22	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,10	Kab. Bengkulu Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bengkulu Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bengkulu	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**2.625**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,65			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**54**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Kab. Seluma	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**11**	0,90			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 111

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**11**	0,28			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**11**	0,50			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,67	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	149.861	109,33	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	122.738	1,06	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	Bengkulu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,63	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	7,66	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,66	Bengkulu (KSN TN Bukit Barisan Selatan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Lampung						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanggamus	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung**	**>1**				
Jalan Akses KI Tanggamus	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	20	Lampung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Pesawaran	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Pesawaran	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Way Pisang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Way Pisang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Katibung	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Katibung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	799,25	50,67	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	767,53	34,80	Provinsi Lampung, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1.933,67	42,13	Provinsi Lampung, Provinsi Lampung Utara, Provinsi Lampung Timur, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung**					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	1448,81	58,36	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Kampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Lampung	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Lampung, a.l: Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Bandar Lampung	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Lampung)				**Kota Bandar Lampung**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Lampung		KPBU
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		74,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.110	1.961,60	Provinsi Lampung	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional (lpd)		43,50	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		13,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		465,35	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		87,80	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		18,40	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		170,82	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)**		**Prov. Lampung : Kab. Pesisir Barat**		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**11,14648**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**59,63**	**53,84**	**Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	**1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal**	**1. 13,2 - 13,7%; 2.67,6 - 68,1**	425,08	**Kab. Pesisir Barat**	**1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 4. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 6. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 8. Program Penanganan Fakir Miskin;**	**1. Kementerian PUPR; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Desa PDTT; 5. Kementerian Sosial 6. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Difasilitasi Pembangunannya (unit)	154		Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,19	56,92	Kab. Pesisir Barat*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat (unit)		25,20	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu		3	0,37	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Pesisir Barat	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	96	2,45	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	11.687	105,18	Kab. Pesisir Barat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9.344	159,36	Kab. Pesisir Barat	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan Moda Transportasi Darat	Jumlah Moda Transportasi Darat yang Disediakan (unit)			Kab. Pesisir Barat		Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Penyediaan Moda Transportasi Air	Jumlah Moda Transportasi Air yang Disediakan (unit)			Kab. Pesisir Barat		Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**65,81**	392,34	**Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	408	53,88	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 120

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	408	104,46	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	803	224,10	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	4	0,60	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang**	**75.00; 75.00**	208,93	**Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang**	**1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 121

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	334	120,52	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	4	6,37	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	347.311	262,2	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung**	**59,63**	53,84	**Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	30,52	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	21,54	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,52	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,25	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,30**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,30**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Lampung	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.076**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 123

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32		Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	16	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	16	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	16	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**49**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**16**	1,40			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	15	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	16	0,71	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**16**	0,42			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	16	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**16**	0,58			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	16	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,63	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	2,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 128

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	347.311	262,17	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	104.044	1,02	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Lampung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	2,74	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	6,85	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	**>1**				
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)		85	Bangka Belitung	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,01	3,25	Kab. Belitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	120	Bangka Belitung	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	**>1**				
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1		Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)		50	Bangka Belitung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan stra	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	8.405,42	182,54	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah,Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	288,95	11,83	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	283,26	17,89	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka, Kab. Belitung Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan timah	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**					
Optimalisasi produksi timah	jumlah produksi (Ton)	61.486	11,83	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, a.l Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bangka Belitung)				**Kota Pangkal Pinang**		
Jalan Trans Bangka	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	350	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	193	340,34	Provinsi Bangka Belitung	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		18,70	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		112,05	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		20,95	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,70	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		82,79	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	**-**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**3,51**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 132

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	**76,49**	**31,98**	**Kab. Bangka Selatan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**67,61**	58,59	**Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, DPP Tanjung Kelayang**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Tanjung Kelayang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	50	3,76	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	50	8,02	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	101	28,31	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 133

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Bangka Barat, Bangka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan**	**75.00; 65.00; 75.00**	282,42	**Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Bangka Selatan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Bangka Selatan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168.528	66,38	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	**Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung**	**76,49**	31,98	**Kab. Bangka Selatan**	**1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN**
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	18,43	Kab. Bangka Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,06	Kab. Bangka Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,02	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,11	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,04	Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,3**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,30**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**720**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	8	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,60			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	8	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**49**	1,73			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 139

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**8**	0,47			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 140

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**8**	0,09			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	8	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**8**	0,09			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	8	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	50,39	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 142

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168.528	66,38	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111.928	1,09	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Kep. Bangka Belitung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	2,74	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,70	Sekitar KI Sadai	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	6,85	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Riau						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)**	**>1**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau**	**>1**				
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)	650.000	909,79	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)	650.000	1.300	Kota Batam	KPBU	BP Batam
Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)		565,79	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan fasilitas Pelabuhan bongkar muat Batu Ampar	Jumlah kapasitas bongkar muat pelabuhan (TEU'S)	1.000.000	4.138	Kota Batam	Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	BP Batam
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapsitas bongkar muat barang (ton/jam)		250,85	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	1.000	1.644,93	Kota Batam, Barelang	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pembangunan infrastruktur energi listrik	Jumlah peningkatan daya terpasang (MW)		4.200	Kota Batam	Badan Usaha/Swasta	BP Batam
Pembangunan infrastruktur energi gas	Jumlah peningkatan daya terpasang (mbtu)		2.200	Kota Batam	Badan Usaha/Swasta	BP Batam
Fasilitas Air Limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)	20	427,25	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah fisik bangunan (unit)		84	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah peralatan kesehatan (Lot)		200	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	4	1.572,08	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (Jalan Bintan) (km)		250	Kab. Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	Panjang jalan yang dibangun (Jalan Batam) (km)	12	80	Kota Batam	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		379	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		85	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau**	**>1**				
Pengembangan KEK Galang Batang			1.800	Kab. Bintan		Swasta
Jalan Akses KEK Galang Batang I	Panjang jalan yang dibangun (km)		11,78	Kab. Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Galang Batang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Bintan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	27	41,50		Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	Kemenperin

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 145

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (unit)	13	460		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kemenperin
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan Aerospace	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau**	**>1**				
Pengembangan KI Bintan Aerospace			5.374	Kab. Bintan		Swasta (PT Bintan Aviation Investmens)
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Bintan Aerospace	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Bintan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Tanjung Pinang		PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,2	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	27	41,50		Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	Kemenperin
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (unit)	13	460		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kemenperin
Pembangunan DPP Baru Batam-Bintan	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau**	**>1**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (km)		250	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan kawasan Bintan Resort			36.250	Kab. Bintan		Swasta (PT Bintan Resort Cakrawala)
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		49	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	1.098,99	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Percepatan pengembangan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark		1	Kabupaten Natuna		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP)	1	7,75	Kepulauan Riau	Program Pengembangan Kepariwisataan	Kemenparekraf
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	335,22	7,27	Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Ambas	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kepulauan Riau)				**Kota Tanjungpinang, Kota Batam (PKN)**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kepulauan Riau		KPBU
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		379	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		145,23	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		241	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		62,50	Kota Tanjungpinang, Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	291	513,60	Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 148

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	**0,52**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**7**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**62,41**	50,65	**Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		5,32	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		10,48	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	90	25,20	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 149

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Natuna, Lingga	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan**	**75**	44,02	**Kab. Bintan**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM**
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Bintan	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bintan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bintan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Bintan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	27.450	44,01	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	**Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai**	**0,52**	181,44	**Kab. Natuna**		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	5	11,03	Kab. Natuna	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 150

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		6	Kab. Natuna	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		49	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Kab. Natuna	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Natuna	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terba	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kab. Natuna	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	3	22,5	Pulau Sub, Pulau Pelampon, Pulang Malang Berdaun	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Kepulauan Riau	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Kemeterian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Natuna	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Natuna	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Natuna	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Percepatan pembangunan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark		1	Kab. Natuna		Kemenko Kemaritiman dan Investasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 151

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	**Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov Kepulauan Riau (kecamatan)**	**35**	203,71	**Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota**		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 152

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kota Batam)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,06	39,11	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	25	3,60	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun (paket)	80	70,40	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	6	0,60	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,3**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**56,3**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**164**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	**164**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**17.743**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**164**				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Riau	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**718**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 158

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	8	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	8	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**50**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**8**	0,30			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	0,28	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**8**	0,09			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	8	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**8**	0,09			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	8	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,74	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	27.450	44,01	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	16.489	0,16	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Kep. Riau	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2	Kep. Riau (Bintan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,53	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	6,61	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	2,10	Serasan (Kep. Riau)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

7. PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI

7.1 Target Pembangunan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2024

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Target Pembangunan Wilayah Jawa-Bali 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	3,57	3,47	3,18	3,05	3,00	2,95	2,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,22	5,90	5,70	5,50	5,10	4,80
Jawa Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	5,40	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45	6,91	6,31	6,07	5,70	5,24	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,17	7,99	7,70	7,50	7,40	7,00	6,70
Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,40	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,32	10,8	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51	4,49	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10
DI Yogyakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,20	6,10	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	11,7	9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,14	3,00	2,80	2,60	2,20	1,90
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,50	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98	10,37	10,08	9,71	9,29	8,70	8,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99	3,92	3,60	3,40	3,20	2,80	2,50

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Banten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,09	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,52	8,11	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,60	6,00	6,50	6,60	6,60	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,01	3,79	3,52	3,33	3,05	2,75	2,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,37	1,52	1,50	1,30	1,30	1,20	1,00

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Jawa dan Bali, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Jawa-Bali 2020-2024

Provinsi	Keburuhan Investasi	Realiasasi 2018	*Baseline* 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Rp triliun	1.085,47	1.179,27	1.311,96	1.437,12	1.579,67	1.735,42	1.910,97
Jawa Barat	Rp triliun	497,02	527,29	588,95	642,36	701,87	786,74	869,23
Jawa Tengah	Rp triliun	378,96	414,67	451,02	493,69	545,82	607,49	672,30
DI Yogyakarta	Rp triliun	40,50	43,86	44,51	49,01	54,48	61,18	68,01
Jawa Timur	Rp triliun	586,22	637,08	697,12	760,78	839,91	935,73	1.035,87
Banten	Rp triliun	180,90	186,89	220,62	240,35	264,07	293,03	323,15
Bali	Rp triliun	74,68	75,85	90,62	99,58	110,54	123,33	137,32

Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

7.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa-Bali

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Banten	1	Kota Cilegon*	Jawa Tengah	1	Kabupaten Brebes
	2	Kabupaten Serang		2	Kota Tegal*
	3	Kota Serang*		3	Kabupaten Tegal
	4	Kabupaten Lebak		4	Kabupaten Pemalang
	5	Kabupaten Tangerang		5	Kabupaten Pekalongan
	6	Kota Tangerang		6	Kota Pekalongan*
	7	Kota Tangerang Selatan		7	Kabupaten Batang
DKI Jakarta	1	Kabupaten Kepulauan Seribu		8	Kabupaten Kendal
	2	Kota Jakarta Barat		9	Kota Semarang
	3	Kota Jakarta Pusat		10	Kabupaten Demak
	4	Kota Jakarta Selatan		11	Kabupaten Kudus
	5	Kota Jakarta Timur		12	Kabupaten Pati
	6	Kota Jakarta Utara		13	Kabupaten Rembang
Jawa Barat	1	Kota Depok		14	Kabupaten Semarang
	2	Kabupaten Bogor		15	Kabupaten Grobogan
	3	Kota Bogor		16	Kota Salatiga
	4	Kota Bekasi		17	Kabupaten Boyolali
	5	Kabupaten Bekasi		18	Kabupaten Sukoharjo
	6	Kabupaten Karawang		19	Kota Surakarta*
	7	Kabupaten Purwakarta	Jawa Timur	1	Kabupaten Tuban
	8	Kabupaten Bandung Barat		2	Kabupaten Lamongan
	9	Kota Cimahi		3	Kabupaten Gresik
	10	Kota Bandung		4	Kota Surabaya
	11	Kabupaten Sumedang		5	Kabupaten Sidoarjo
	12	Kabupaten Majalengka		6	Kabupaten Mojokerto
	13	Kabupaten Cirebon		7	Kota Mojokerto
	14	Kota Cirebon*		8	Kabupaten Bangkalan
Bali	1	Kabupaten Tabanan		9	Kabupaten Pasuruan
	2	Kabupaten Badung		10	Kota Pasuruan*
	3	Kota Denpasar		11	Kabupaten Probolinggo
	4	Kabupaten Gianyar		12	Kota Probolinggo*
	5	Kabupaten Klungkung		13	Kabupaten Situbondo
				14	Kabupaten Banyuwangi
				15	Kabupaten Malang
				16	Kota Malang*
				17	Kota Batu*

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pemerataan					
Banten	1	Kabupaten Pandeglang	DI Yogyakarta	1	Kabupaten Sleman
Jawa Barat	1	Kabupaten Bandung		2	Kota Yogyakarta*
	2	Kabupaten Garut		3	Kabupaten Bantul
	3	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Timur	1	Kabupaten Kediri
	4	Kota Tasikmalaya		2	Kota Kediri*
	5	Kabupaten Ciamis		3	Kabupaten Bondowoso
	6	Kota Banjar		4	Kabupaten Lumajang
	7	Kabupaten Kuningan		5	Kabupaten Jember
	8	Kabupaten Sukabumi		6	Kabupaten Pamekasan
	9	Kota Sukabumi*		7	Kabupaten Sumenep
	10	Kabupaten Pangandaran	Bali	1	Kabupaten Buleleng
Jawa Tengah	1	Kabupaten Cilacap			
	2	Kabupaten Banyumas			
	3	Kabupaten Kebumen			
	4	Kabupaten Magelang			
	5	Kota Magelang*			
	6	Kabupaten Klaten			

Keterangan:
* *Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW*

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

7.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali, antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya, yang difokuskan pada:
   a. Provinsi DKI Jakarta: perikanan tangkap;
   b. Provinsi Jawa Barat: lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, emas, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   c. Provinsi Jawa Tengah: tebu, kopi, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   d. Provinsi DI Yogyakarta: tebu dan perikanan budidaya;
   e. Provinsi Jawa Timur: tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya;
   f. Provinsi Banten: kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya; dan

g. Provinsi Bali: kopi, kelapa, kakao, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap;

2) Pengembangan sektor perikanan melalui WPP antara lain WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa) dan WPP 573 (berlokasi di Samudera Hindia/Selatan Jawa);

3) Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

4) Pengembangan kawasan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis; dan

5) Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

Gambar 7.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Jawa-Bali

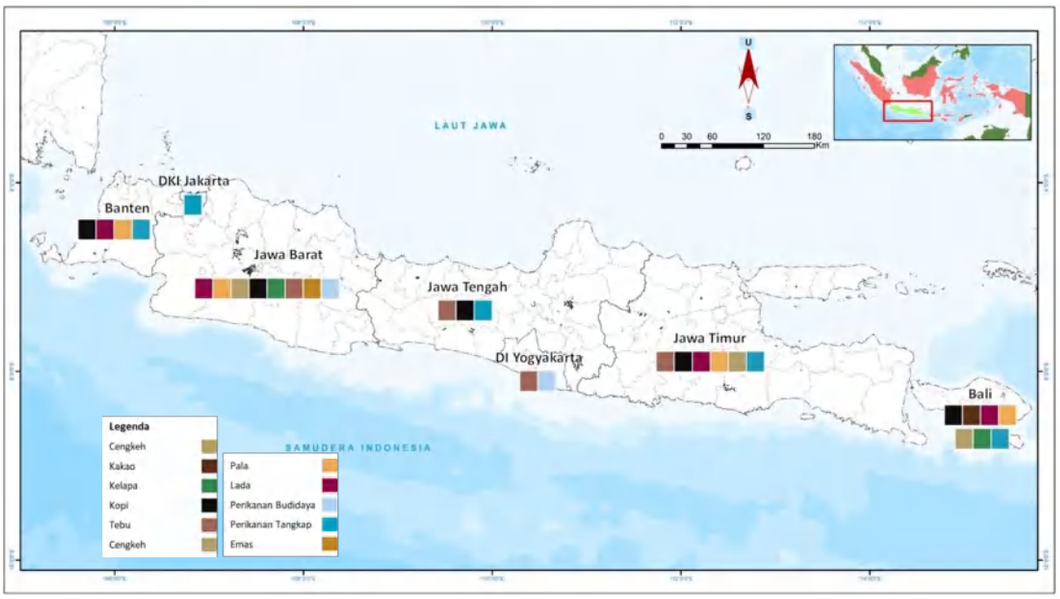

7.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;

2) Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh, DPP Borobudur dskt, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi dskt, dan DPP Revitalisasi Bali;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap- Yogyakarta, Pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Lintas Pansela, Jalan Lintas Penghubung Utara – Selatan Bali, Jalur Ganda KA Rangkasbitung – Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah, Reaktivitasi KA Jalur Jawa Barat, KA Akses NYIA, Pembangunan KA Cepat Jakarta – Bandung, Pembangunan KA Ekspress Jakarta – Semarang, Pembangunan Bandara Ngloram Cepu, dan Pembangunan Bandara Bali Baru;
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) Pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Hub Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak;
6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:
    a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
    b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur and Bali, tekstil di Jawa Barat, Jawa Tengah, kimia di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, manufaktur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, otomotif di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, minyak di Jawa Barat, tambang di Jawa Barat, dan Jawa Timur, perkapalan di Jawa Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
    c. Pengembangan BLK di wilayah Jawa- Bali berjumlah 104 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
    d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali.

Gambar 7.2.
Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa-Bali

Gambar 7.3.
Peta Jaringan Infrastruktur Perhubungan di Wilayah Jawa-Bali

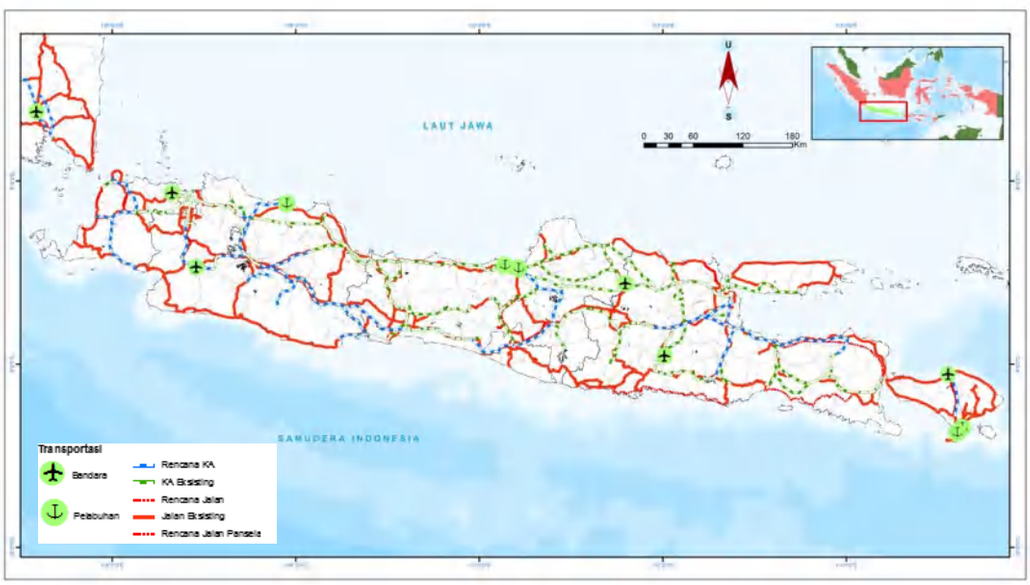

Gambar 7.4.
Jaringan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi di Wilayah Jawa-Bali

Gambar 7.5.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Pengairan di Wilayah Jawa-Bali

7.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, dan WM Denpasar; pembangunan Kota Baru Maja; serta pengembangan Kota Sukabumi, Cirebon, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Batu, Cilegon dan Serang (Tabel 7.3); dan
2) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur), WM Bandung (Cekungan Bandung), WM Semarang (Kedungsepur) dan WM Surabaya (Gerbangkertosusila) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

7.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Jawa berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Lebak dan Pandeglang di Provinsi Banten; serta Bangkalan, Bondowoso, Sampang, dan Situbondo di Provinsi Jawa Timur;
2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Klungkung dan KPPN Buleleng;
4) Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 3 kabupaten di Bali, 2 wilayah administratif di DKI Jakarta, 3

kabupaten di DI Yogyakarta, 16 kabupaten di Jawa Tengah, 20 kabupaten di Jawa Barat, 16 kabupaten di Jawa Timur dan 4 kabupaten di Banten yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023;

5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 3,6 persen di Banten, 4,85 persen di Jawa Barat, 2,25 persen di DKI Jakarta, 8,48 persen di Jawa Tengah, 7,75 persen di DI Yogyakarta, 8,30 persen di Jawa Timur dan 2,65 persen di Bali; dan
6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
   a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali;
   b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
   c. Peningkatan konservasi hutan; dan
   d. Pemantapaan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

7.2.5 Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kotan Tangerang

Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember);

12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember).

13) Penataan Ruang dan Lahan
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    h. Pembentukan bank tanah;
    i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
    a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
    b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
    c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.

15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi:
    a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi;
    d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
    e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;

f. Pengembangan energi baru terbarukan;
g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan
h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 7.6.
Peta Daya Dukung Wilayah Jawa-Bali Tahun 2025

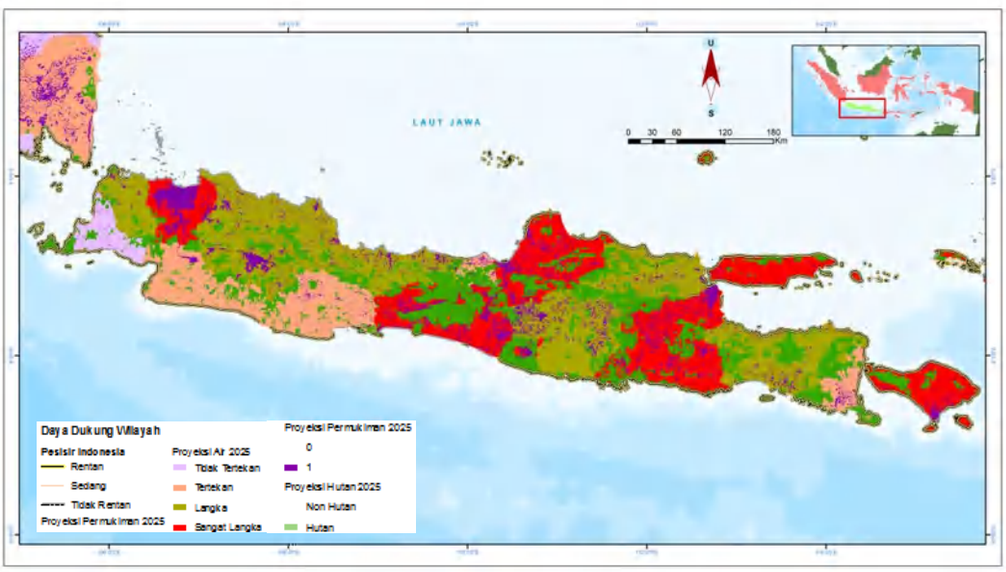

7.3 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Jawa-Bali

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project)* adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
2) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
3) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas);
4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar;
5) Pembangunan Kota Baru Maja;
6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
7) Penangangan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;

8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung);
9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban;
10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan (b) Tanjung Perak;
11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo;
12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya;
13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;
14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan
15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.

Gambar 7.7.
Peta Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Jawa Bali

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU JAWA-BALI

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	**Laju pertumbuhan PDRB Jawa-Bali (persen/tahun)**	**6,27**	669.943,25			
	Share PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen)	**59,81**				
	IPM Wilayah Jawa-Bali (min-maks)	**74,60-84,23**				
	Persentase penduduk miskin wilayah Jawa-Bali (persen)	**5,93**				
Provinsi DKI Jakarta						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DKI Jakarta**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi DKI Jakarta, a.l Kota Administasi Jakarta Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				**DKI Jakarta**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Provinsi DKI Jakarta		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.670	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	26.150	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	29.800	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	350	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	4.050	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
c. Perkeretaapian Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	33 (selesai)	2.040	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemenhub
d. Elevated Loopline (Dukungan KPBU)	Panjang jalur yang dibangun (km)	8 (selesai)	4.140	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
d. Elevated Loopline (Dukungan APBD)	Panjang jalur yang dibangun (km)	8 (selesai)	23.460	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
e. KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	10 (selesai)	500	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok	1	5.000	Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		42.000	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	57,90	110.823	Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Jalan	Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.435	2.537,08	Provinsi DKI Jakarta	Program Pengembangan Perumahan	
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		BUMN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	300	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (seelsai)	70	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		3.702	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		3.082	Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		227,80	Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		4.128,95	Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		1.297,24	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		125,06	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)		122,60	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		BIG
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	39,68	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah(%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DKI Jakarta	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**377**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik		0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	1	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,92			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	1	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	1	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	1	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**100**	1,66			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**1**	0,29			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**1**	0,01			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**1**	0,01			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	2,56	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.					
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1	6,63	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	2		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)			DKI Jakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)			DKI Jakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	DKI Jakarta	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	5.000	539,78	DKI Jakarta	Program Pengembangan Infastruktur Keagrariaan	Kementerian ATR/BPN
Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	1	212,51	DKI Jakarta	Pemanfaatan Tanah Pemerintah	Kementerian ATR/BPN
Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Tanah Adat/Ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	34	49	DKI Jakarta	Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementetian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	DKI Jakarta	Program Penyelenggaran Informasi Geospasial	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR		0,09	DKI Jakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota		0,10	DKI Jakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Bandung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan		209,60	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	406,94	6,50	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	681,40	43,35	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	84,49	1,95	Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	458,79	18,50	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat**					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				**Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Barat		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat		Pemda (DAK)
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (selesai)	70	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Panjang Underpass terbangun (lokasi)		122,85	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	1	15	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Jatiluhur (lpd)		43,50	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		4	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Badan Usaha
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kab. Bogor, Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)		Badan Usaha
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.282	Kota Bekasi, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		7.819	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		82,20	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		3.333	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		974,47	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		86,33	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat		BIG
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)				**Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	3.390	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	669	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	1.329	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1	60	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1 (selesai)	720	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1 (selesai)	80	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	Panjang jalur yang dibangun	27 (selesai)	1.000	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	24 (selesai)	1.010	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	24 (selesai)	910	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)		209,60	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Panjang jalan yang dibangun (km)		193,60	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		42.000	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	2	25	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Gedebage - Garut - Tasikmalaya yang dibangun		1.170	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun		340	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun		1.300	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Fly Over Kopo	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		381,19	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	6.717	11.874,78	Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Jatigede (lpd)		43,50	WM Bandung (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		2,40	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.610	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		4.670	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		86,60	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.382,15	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		652,05	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		59,06	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)			WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	1,26	1.890	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		KPBU

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,37	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)				**Kota Sukabumi, Kota Cirebon**		
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang dibangun		1.300	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Bandara Sukabumi	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	400	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		930	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		14,60	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		381,20	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		71,93	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		22	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		36	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**8,12**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**71,81**	828,59	**Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	7,12	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital		109,24	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		214,05	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.743	486,68	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	14	2,12	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi**	**51**	127,65	**Kab. Sukabumi**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,0	Kab. Sukabumi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,0	Kab. Sukabumi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	486.958	418,70	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**3.036**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	8	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Layanan Data Center (Hari)	362	327,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia (TerraByte)	1.200	110	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	28	0,27	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	32	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	5,47			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	5	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	28	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	28	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	28	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	28	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	28	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	28	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**65**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	28	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**28**	0,86			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	27	0,57	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	28	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	28	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**28**	0,32			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	28	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	28	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**28**	0,32			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	28	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,82	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	1,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	486.958	418,70	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	125.961	1,14	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	28	32,10	Jawa Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	12	4,46	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	11	11,25	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,66	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Provinsi Jawa Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah**	**>1**				
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara dikembangkan		300	Boyolali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	Panjang jalur keret api yang terbangun		240	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Borobudur dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		52	Kab. Magelang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3	10,64	Prov. Jawa Tengah	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Brebes	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah**	**>1**				
Jalan Akses KI Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	30	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)		95	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)		80	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	140	Jawa Tengah		
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	Panjang Fly Over terbangun (m)	1 (selesai)	100	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah**	**>1**				
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	Panjang Jalan yang dibangun		95	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Kendal	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,09	29,25	Kab. Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Peningkatan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	542,10	21,86	Provinsi Jawa Tengah, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kab. Semarang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	1237,57	78,15	Provinsi Jawa Tengah, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Jepara, Kab. Temanggung	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Tengah, a.l Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Batang, Kab. Pemalang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang (Kedungsepur)				**Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik		0,70	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah		Pemda (DAK)
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.500	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.500	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	310	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	150	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	510	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)		7,50	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya yang dibangun		30.000	Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Semarang - Demak yang dibangun		8.000	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Semarang - Demak yang dibangun		5.300	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	4.722	8.347,62	Provinsi Jawa Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	60	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Semarang Barat (lpd)		43,50	WM Semarang (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Semarang, Kendal, Demak, Kota Salatiga (Provinsi Jawa Tengah)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		450,01	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		92	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		689,09	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		12,86	Kab. Kendal, Kab. Semarang (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0,88	1.320	WM Semarang (Kedungsepur), Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		Badan Informasi Geospasial
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	5,19	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Tengah)				**Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal**		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah		Pemda (DAK)
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		240	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		300	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (Km)		600	Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	140	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Solo-Yogya yang dibangun		26.400	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan Fly Over Canguk	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	1 (selesai)	53,88	Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Wasosukas (lpd)		43,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		957,03	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		53,70	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		621,52	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		62,77	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		53,70	Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,10	52	Kota Pekalongan, Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**9,59**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**69,02**	1.174,89	**Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, DPP Borobudur**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** **2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kemendesa PDTT** **2. Kemendagri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	21,35	DPP Borobudur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital		143,51	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		283,39	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.562	715,45	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwerejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	12	1,81	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, Brebes, Pekalongan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal**	**68.00; 67.00**	168,67	**Kab. Magelang dan Kab. Kendal**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Kendal	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Kendal	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Magelang	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122.073	244,20	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Tengah	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.952,67**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²)	2.800	103,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km²)	2.800	39,64	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,72	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	36	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	32	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	2.263,70			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	6	1,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	36	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	36	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	36	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	36	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	36	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	36	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**75**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	36	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**36**	1,03			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	35	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	36	0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	36	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**36**	0,41			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	36	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	36	0,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**36**	0,41			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	36	0,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,54	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122073	244,20	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	3403	0,05	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	36	32,10	Jawa Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	10	3,75	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	9,51	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,74	Jawa Tengah (KSN Kawasan Sangiran)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi DI Yogyakarta						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta**	**>1**				
Jalan Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)		175	Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Yogyakarta	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Bruas Bawen - Yogya yang dibangun		30.000	Jawa Tengah		KPBU
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Borobudur dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		52	Kab. Magelang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Perekonomian Terpadu (KAPET) Kab. Kulon Progo Tahap 2 (Konstruksi dan Supervisi)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			Kab. Kulonprogo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas		1,40	Prov. DIY	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogayakrta**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	103,39	4,15	Provinsi DI Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab, Bantul	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi DI Yogyakarta, a.l: Kab. Sleman, Kab. Bantul	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (DI Yogyakarta)				**Kota Yogyakarta**		
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun (km)		800	Kota Yogyakarta (lingkup pelayanan), Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (Km)		600	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Bawen-Yogya yang dibangun		30.000	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Solo-Yogya yang dibangun		26.400	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	571	1.008,64	Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		92,44	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		313,01	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		10,90	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		223,52	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		68,54	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		3,87	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**11,88**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**75,17**	64,89	**Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		6,43	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		12,86	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	129	35,91	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kulon Progo, Bantul	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DI Yogyakarta	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**752**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**1**	2,26			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya(%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	6	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	6	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	6	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**86**	0,61			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**6**	0,41			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**6**	0,06			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	6	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**6**	0,06			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,32	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.			**Pusat (alokasi Kementerian)**		
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1	6,63	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	3		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	43.836,25	69,75	Yogyakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	8	0,76	Yogyakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	Yogyakarta	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,25	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Madura	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur**	**>1**		**Kab Madura**		
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Madura	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1 unit)		1.002	Jawa Timur (Kab. Lamongan)		SWASTA
Jalan Akses KI Madura	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	50	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	180	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Pangarengan)	Panjang jalan yang dibangun		80	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	600	Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub, BPWS, KPBU
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	Luas lahan kawasan (ha)	25	384,82	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	29,40	308,56	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Bromo-Tengger-Semeru	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur**	**>1**				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	223	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	25 (selesai)	1.210	Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Bromo-Tengger-Semeru	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Malang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur**	**>1**				
Jalan Pansela Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun	36	2.496,58	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	60	908,20	Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Banyuwangi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa TImur**	**>1**				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Singhasari	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab Malang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Banten	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Peningkatan komoditas unggulan tebu	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur**					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	2640,92	106,35	Provinsi Jawa Timur, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab, Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	718,78	45,18	Provinsi Jawa Timur, Kab. Malang, Kab. Ponorogo, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	109,02	2,38	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya (Gerbangkertosusila)				**Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan**		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		Pemda (DAK)
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.710	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	336	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	100	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	670	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
c. Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	Panjang jalur KA yang dibangun (km)	20 (selesai)	1.000	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	25 (selesai)	1.210	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	60	908,20	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak (lokasi)	1 (selesai)	5.500	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo III), Swasta

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun (km)	10 (selesai)	300	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)		60	Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan lingkar Utara Lamongan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang terbangun (km)		91	Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	10		Kab. Lamongan, Kab. Gresik (Provinsi Jawa Timur)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Jalan Tol Bandara Juanda -Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	25		Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	8		Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	5.569	9.845,12	Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	7	70	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Umbulan (lpd)		43,50	Kab Pasuruan dan sekitarnya, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		4	Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		960,61	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.842,19	Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		331,70	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.363,85	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Lamongan, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		463,37	Kab. Gresik, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		67,23	Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	2	3.645	WM Surabaya (Gerbangkertasusila), Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		Badan Informasi Geospasial
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	19,69	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Timur)				**Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.735,29	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	Bandara baru yang dibangun (lokasi)		600,00	Kota Kediri (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	60	908,20	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang dibangun (km)	38	23.402,17	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR, Badan Usaha
Jalan Tol Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Kertosono - Kediri yang dibangun			Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)		5	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.165,52	Kota Malang, Kota Probolinggo (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		62,60	Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		469,37	Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		33,09	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		41,46	Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Kediri (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,19	57,43	Kota Batu, Kota Kediri (Provinsi Jawa Timur)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan		2,50	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kemenparekraf
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	**12,06%**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**68,53**	1.188,78	**Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** **2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT** **2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	5	23,14	DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	281	156,28	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	281	290,77	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.533	707,39	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	12	1,81	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi**	**NA; 95.00**	171,85	**Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM**
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	2	3	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1688	0,22	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Banyuwangi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab. Pamekasan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Pamekasan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80,0	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240.076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Timur	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**3.495**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		62,67	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		23,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	39	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	39	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	39	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Pusat (alokasi Kementerian)	
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**92**	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**39**	0,97			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	38	0,55	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	39	1,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**39**	0,45			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	39	0,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**39**	0,45			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	39	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,58	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan				**Pusat (alokasi Kementerian)**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri**	**Kementerian Dalam Negeri**
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240.076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	521.860	4,30	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	32,10	Jawa Timur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Jawa Timur (Lamongan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,36	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Banten						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten**	**>1**				
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20	1.100	Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang terbangun		165	Banten	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Tanjung Lesung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,03	9,75	Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	6	Prov. Banten	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	153,51	9,77	Provinsi Banten, Kab. Lebak	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	53	1,16	Provinsi Banten, Kab. Lebak	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Banten	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				**Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang**		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Banten		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	2	234,60	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten)		Pemda (DAK)
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)		2.214,64	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten)		BU
Pembangunan Fly Over Bitung	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		175	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		175	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (seelsai)	70	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.434,38	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		41	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.504,15	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		310	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		162,19	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta di Provinsi Banten, Provinsi Banten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta di Provinsi Banten, Provinsi Banten		BIG
ProP : Pembangunan Kota Baru Maja				**Kota Baru Maja/ Kab Lebak**		
Jalan Tol Jabodetabek	Panjang jalan tol Serpong-Balaraja yang dibangun		6.000	Kota Baru Maja/ Kab Lebak (lingkup pelayanan), Provinsi Banten		Swasta
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		506,25	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		13,70	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		87,56	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,43	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		86,81	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Be Creative District (Maja-Rangkasbitung)	Jumlah BCD yang dikembangkan (unit)		66.666	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	BUMN dan Swasta, Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Banten)				**Kota Cilegon, Kota Serang**		
Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	9	676	Kota Cilegon, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15	800	Kota Cilegon, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Serang, Provinsi Banten	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Serang-Panimbang yang dibangun		5.300	Kota Serang, Provinsi Banten		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.572	2.778,40	Provinsi Banten	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253,13	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		25,70	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		480,79	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		26,28	Kota Serang, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		29,99	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa(%)	**4,45**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**67,11**	202,01	**Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, DPP Tanjung Lesung**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Tanjung Lesung	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	246	24,10	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	246	45,90	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (desa)	406	113,42	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Pandeglang, Lebak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang**	**70**	103,46	**Kab. Pandeglang**	**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM**
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Pandeglang	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,00	Kab. Pandeglang	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	54	19,70	Kab. Pandeglang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,59	Kab. Pandeglang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Pandeglang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,18	Kab. Pandeglang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,00	Kab. Pandeglang	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	46.862	58,6	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	**Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)**					
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000		Kab. Lebak dan Pandeglang*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	2	6,00	Kab. Lebak dan Pandeglang	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Prov. Banten	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Kab. Lebak dan Pandeglang	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Pandeglang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		4,64	Kab. Pandeglang		Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Serang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		2,10	Kab. Serang		Pemerintah Kabupaten Serang
Pemulihan pascabencana di Provinsi Banten	Terpulihkannya 5 sektor di 2 Kab/Kota pascabencana		39,91	Kab. Pandeglang dan Kab. Serang		Pemerintah Provinsi Banten
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Banten	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**1.073**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	9	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	2,26			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,92			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	9	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	9	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	9	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	9	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	9	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**58**	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	**9**	0,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	9	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	9	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**9**	0,10			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	9	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	9	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**9**	0,10			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	9	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,58	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	1,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	46.862	58,60	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	10.799	0,58	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Banten	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	2,01	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	4,62	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Bali						

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah**	**>1**				
Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	**Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali**	**>1**				
Pengembangan Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	184,6	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		900	Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	BUMN
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.500	Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (km)		1.050	Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)		215	Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (selesai)	325	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (berlanjut)	2.770	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Revitalisasi Bali	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		65	Kab. Buleleng	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun**					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali**					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	697,92	43,96	Provinsi Bali, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Buleleng	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali**					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	374,64	8,55	Provinsi Bali, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Karangasem	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali**					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	109,27	8,55	Provinsi Bali, Kab. Jembrana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali**					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	264,08	5,74	Provinsi Bali, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	**Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi**					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Bali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	**Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali**					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita)				**Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan**		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Denpasar, Provinsi Bali		Pemda (DAK)
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.500	WM Denpasar (lingkup pelayanan), Provinsi Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		900	WM Denpasar, Provinsi Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	184	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		150	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Badan Usaha
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (selesai)	325	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (berlanjut)	2.770	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)		215	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)		80	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	578	1.021	Provinsi Bali	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		2,10	Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		1,60	Kota Denpasar, Kab. Gianyar (Provinsi Bali)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		470,62	Kab. Badung, Kota Denpasar (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		379,69	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		56,90	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		629,57	Kab Tabanan, Kab Badung, Kab Gianyar (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		41,27	Kab Badung, Provinsi Bali	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		44,49	Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Badung (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,33	148,28	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,48	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	**Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri**	**197 desa berkembang; 2893 desa mandiri**				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	**2,013694056**				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
Pembangunan Desa Terpadu	**Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa**	**73,04**	103,19	**Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan**	**1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa**	**1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri**
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	133	11,62	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	133	23,99	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	209	58,27	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		0,95	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Gianyar, Buleleng	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	**Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Kab. Klungkung**	**68.10; NA**	579,75	**Kab. Buleleng dan Klungkung**	**1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan**	**1. Kementerian Pariwisata 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian PUPR (diusulkan melalui DAK)**
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Buleleng	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Buleleng dan Klungkung	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Buleleng dan Klungkung	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Buleleng	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Lembongan dan Jungutbatu sebanyak 2.178 SR	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terpasang di Lembongan dan Jungutbatu		6,53	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Baru Ruas Lingkar Barat - Selatan	Panjang jalan baru ruas barat - selatan yang terbangun		503,17	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Rehabilitasi/Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu	Panjang tanggul pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu yang terbangun		25	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32.702	27,50	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**3,60**				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**77,43**				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	**129**				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	**129**				

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	**11.658**				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	**129**				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	**12**				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	**100**				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bali	**(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik**	**972**				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		38,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		14,04	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Produk Hukum di Daerah
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Produk Hukum di Daerah
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	10	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	**2**	4,40			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	**100**	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	10	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	10	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	**66**	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
	(5) Jumlah daerah yang meningkat pendapatan daerahnya dari pajak dan retribusi daerah	**10**	0,44			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	9	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	9	0,15			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	10	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	**10**	0,11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	10	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	10	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	**10**	0,11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	10	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,43	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32.702	27,50	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	223	2,12	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	32,10	Bali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Bali	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	2,21	Bali	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	6,25	Bali		Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Satya Bhakti Parikesit